



Sailing Beyond Border for **Sustainable Competitive Advantages**

MELAJU MENEMBUS BATAS,
MEWUJUDKAN KEUNGGULAN BERKELANJUTAN



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limit of Liability

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2022 menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun bukan emiten atau perusahaan terbuka, Laporan Tahunan ini menggunakan standar yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. PT Pertamina Trans Kontinental tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

The references and standards used in the preparation of the 2022 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental use parameters and standard criteria that apply in Indonesia, where the Company carries out its business activities. Even though it is not an issuer or a public company, this Annual Report uses the standards set out in the Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, Circular of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

This Annual Report contains various statements related to the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations. These statements have prospects of risk and uncertainty, as well as the possibility of differences from actual developments. Various prospective statements in this Annual Report have been prepared based on assumptions regarding current conditions, as well as projections of future situations related to the Company's business environment. PT Pertamina Trans Kontinental cannot guarantee that the documents of which the validity has been confirmed will bring definite results.

Kesinambungan Tema

Continuity of Theme



• 2021 •

ENABLING ENERGY TRANSFORMATION: REPOSITIONING FOR THE FUTURE

MENGAKTIFKAN TRANSFORMASI ENERGI: REPOSITIONING UNTUK MASA DEPAN

Pertamina Trans Kontinental ("PTK") terus berusaha menjalankan operasi bisnis dengan senantiasa menerapkan prinsip tata kelola yang baik, kerja sama yang harmonis dengan pemangku kepentingan serta menjaga kelestarian alam. Hal ini seiring dengan komitmen dalam merealisasikan program pengembangan usaha yang dilaksanakan secara konsisten sehingga makin mengokohkan posisi PTK dengan membaiknya kinerja operasional maupun keuangan di tengah kondisi perekonomian yang menantang.

Pertamina Trans Kontinental ("PTK") is committed to run business operations by always adapting the good governance principles, harmonious cooperation with stakeholders and preserve the environment conservation. This commitment is in line with the commitment to drive business development programs, which has been carried out consistently thereby strengthening PTK's position with improved operational and financial performance as well as amidst the challenging economic conditions.



• 2020 •

CREATING VALUE FOR SUSTAINABLE GROWTH

MENCIPTAKAN NILAI UNTUK PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Inovasi telah menginspirasi Pertamina Trans Kontinental untuk terus secara konsisten mengokohkan komitmen demi meraih kesempurnaan mutu dan kepuasan bagi seluruh pelanggan. Layaknya karya seni, kami mengukir karya dengan konsisten dan ketekunan. Didukung manajemen yang andal dan profesional, dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Innovation has inspired Pertamina Trans Kontinental to consistently strengthen commitment to achieve quality and satisfaction perfection for all customers. Like an artwork, we craft our work consistently and sincerely. Supported by reliable and professional management, to build a better Indonesia.



• 2019 •

DIGITALIZATION OF BUSINESSES PROCESS AND STRENGTHENING HR

DIGITALISASI PROSES BISNIS DAN PENGUATAN SDM

Di tahun 2019, langkah lebih maju dengan memfokuskan kembali untuk mendorong tujuan dengan "Digitalisasi Proses Bisnis dan Penguatan SDM" untuk memanfaatkan tantangan dan peluang yang sangat besar dari revolusi digital guna memastikan bahwa PTK dapat terus menciptakan nilai-nilai terbaik di masa depan.

In 2019, a step forward by refocusing on driving goals with "Digitalization of Businesses Process and Strengthening HR" to take advantage of challenges and opportunities of the digital revolution to be sure that PTK can continue to create the best values at future.



Penjelasan Tema

Explanation of Theme



Sailing Beyond Border for Sustainable Competitive Advantages

MELAJU MENEMBUS BATAS, MEWUJUDKAN KEUNGGULAN BERKELANJUTAN

Restrukturisasi Holding BUMN Migas yang terjadi sejak tahun 2021 menciptakan sebuah transformasi bernilai tambah bagi penyelarasan peran Perusahaan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Di bawah *Subholding Integrated Marine Logistics* ("IML"), PTK berupaya menghadirkan layanan jasa terbaiknya dan berupaya melebihi aspirasi pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Tema "**Berlayar Melebihi Batas untuk Keunggulan Kompetitif yang Berkelanjutan**" berupaya menggambarkan perjalanan PTK di sepanjang tahun 2022. Dengan upaya menghadirkan layanan jasa terbaiknya, PTK berharap dapat meningkatkan level kompetensinya dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

The restructuring of SOE Oil and Gas Holdings taking place since 2021 has created a value-added transformation for the alignment of the Company's role in realizing national energy security. Under Integrated Marine Logistics ("IML") Subholding, PTK strives to provide its best services and strives to exceed the aspirations of shareholders and stakeholders to be able to create sustainable added value.

The theme "**Sailing Beyond Border for Sustainable Competitive Advantages**" seeks to describe the journey of PTK throughout 2022. By providing its best services, PTK hopes to increase its competency level and sustainable competitive advantage.

Kinerja Penting 2022

Performance Highlight 2022



25,89%

Peningkatan
Pendapatan Usaha

Growth of Revenue



38,17%

Pertumbuhan Laba
Tahun Berjalan

Growth of Profit for
the Year



38,08%

Peningkatan Laba
Tahun Berjalan yang
dapat Diatribusikan
kepada Pemilik
Entitas Induk

Growth of Profit for the Year
Attributable to the Owners
of the Parent Entity



5,14%

**Kenaikan
Jumlah Aset**

Growth of
Total Assets

4,59%

**Peningkatan
Jumlah Ekuitas**

Growth of
Total Equity

87,2

**Skor Asesmen
GCG**

GCG Assessment
Score

Daftar Isi

Table of Contents

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limit Of Liability	3
Kesinambungan Tema Continuity of Theme	4
Penjelasan Tema Explanation of Theme	5
Kinerja Penting 2022 Performance Highlight 2022	6
Daftar Isi Table of Contents	8

Ikhtisar Kinerja Performance Highlights	
Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights	12
Ikhtisar Operasi dan Pemenuhan K3 Operational and Osh Fulfillment Highlights	16
Ikhtisar Saham Share Highlights	18
Informasi tentang Efek yang Diterbitkan Information on the Issue of Securities	19
Kilas Peristiwa 2022 Events Highlights 2022	20
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	26

Profil Perusahaan Company Profile	
Informasi Umum dan Identitas Perusahaan General Information and Corporate Identity	62
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	63
Logo Perusahaan Company Logo	65
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Value	66
Kegiatan Usaha serta Produk dan Jasa Business Activities and Products and Services	68
Wilayah Operasional Operational Area	74
Daftar Alamat Kantor Office Address	76
Keanggotaan Asosiasi Membership in Associations	78
Struktur Organisasi Organizational Structure	79
Susunan dan Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Composition and Profile	80
Susunan dan Profil Direksi Board of Directors Composition and Profile	85

Laporan Manajemen Management Report	
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	32
Laporan Direksi Board of Directors Report	46
Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk Laporan Tahunan 2022 Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2022 Annual Report	58
Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2022 Statement of Responsibility from Board of Directors for 2022 Annual Report	59

Profil Pejabat Perusahaan Profile of Company's Executive Officers	90
Sumber Daya Manusia Human Resources	94
Pemegang Saham Shareholders	97
Struktur Grup dan Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, ventura bersama, serta special purpose vehicle ("SPV") Group Structure and List of Subsidiaries, Associates, Joint Venture and Special Purpose Vehicle ("SPV")	100
Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi Subsidiary and/or Associated Company	101
Informasi Tentang Kronologis Pencatatan Saham serta Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya Information Regarding the Chronology of Share Listing and Other Securities Issuance and Listing	105
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institution and Profession	105
Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website	107

Analisis & Pembahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis

Tinjauan Umum dan Industri General and Industry Review	110
Sinergi Bisnis PTK dalam Pertamina Group PTK Business Synergy in Pertamina Group	114
Tinjauan Operasional per Segmen Usaha Operational Review by Business Segment	115
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	128
Tinjauan Keuangan Financial Review	134
Aktivitas dan Profitabilitas Perusahaan The Company's Activities and Profitability	146
Kemampuan Membayar Utang Solvency	147
Kolektibilitas Piutang Accounts Receivable Collectibility	148
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure	148
Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Good Investment	150
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Good Investment	150
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date	152
Pencapaian Target Tahun 2022 Target Achievement 2022	153
Prospek dan Rencana Bisnis Tahun 2023 Business Prospects and Plans 2023	158
Kebijakan dan Pembagian Dividen Dividend Policy and Distribution	166
Kontribusi Kepada Negara Contribution to the State	168
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shares	168
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring	169
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties	170
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi	176
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events	177
Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan Changes in Laws and Regulations that Have Significant Effects on the Company	179

Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	180
Key Performance Indicator ("KPI")	181
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Soundness Level	182
Rencana Strategis 2022-2027 Strategic Plan 2022-2027	184
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Management	188

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Optimalisasi Teknologi Informasi Information Technology Optimization	204
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company	214
Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance	237
Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors	287
Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs	321
Organ Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Organs	347
Audit Independen/Akuntan Publik Independent Audit/Public Accountant	372
Manajemen Risiko Risk Management	378
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	391
Perkara Penting Important Cases	398
Kode Etik Code of Conducts	402
Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy	412
Kebijakan Terkait Gratifikasi Gratification Related Policy	413
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Policy	414
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Performance-Based Long-Term Compensation Policy	424
Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau Whistleblowing System ("WBS") Whistleblowing System ("WBS")	424
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN") State Officials' Wealth Report ("LHKPN")	430

Laporan Keuangan
Financial Report

Pencapaian
kinerja yang baik
mengindikasikan
kemampuan
Perusahaan untuk
dapat mengelola
tantangan dan
tumbuh secara
berkelanjutan.

The achievement of good
performance indicates the
Company's ability to be able
to manage challenges and
grow in a sustainable manner.



Ikhtisar Kinerja

Performance
Highlights





Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

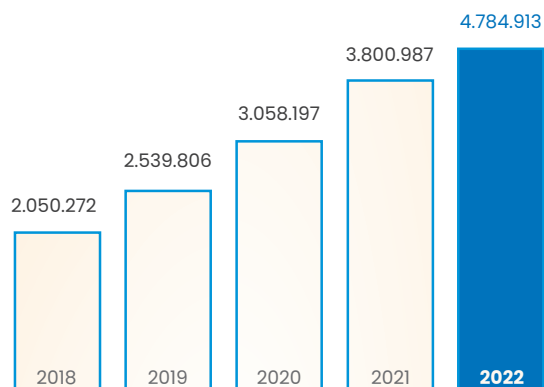
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In million Rupiah, unless otherwise stated	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021-2022 (%)	CAGR 2018-2022 (%)
Pendapatan usaha Revenue	4.784.913	3.800.987	3.058.197	2.539.806	2.050.272	25,89	↑ 23,60
Beban pokok pendapatan Cost of Revenue	(3.136.987)	(2.688.852)	(2.181.550)	(1.859.832)	(1.399.856)	16,67	↑ 22,35
Laba bruto Gross Profit	1.647.926	1.112.135	876.647	679.974	650.416	48,18	↑ 26,16
Beban umum dan administrasi General and Administrative Expenses	(649.316)	(458.185)	(318.096)	(288.144)	(228.763)	41,71	↑ 29,80
Keuntungan/(beban) lain-lain, bersih Other income/(expenses), net	25.531	25.543	(26.955)	35.303	(41.196)	(0,05)	↓ N/a
Pendapatan/(beban) keuangan Finance income (cost)	(76.234)	(47.575)	(43.785)	(64.559)	(52.449)	60,24	↑ 9,80
Bagian atas laba bersih ventura Bersama Share in profit of a joint venture	25.446	28.045	22.283	30.403	15.483	(9,27)	↓ 13,22
Beban pajak final Final tax expenses	(18.499)	(17.723)	(26.164)	(18.816)	(16.716)	4,38	↑ 2,57
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	954.854	642.240	483.930	374.161	326.775	48,68	↑ 30,74
Beban pajak penghasilan Income Tax Expenses	(221.826)	(111.701)	(60.553)	(79.163)	(47.683)	98,59	↑ 46,86
Laba tahun berjalan Profit for The Year	733.028	530.539	423.377	294.998	279.092	38,17	↑ 27,30
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain Other comprehensive income (loss)	20.683	15.527	(9.644)	(19.136)	(43.786)	33,21	↑ N/a
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income current year	753.711	546.066	413.733	275.862	235.306	38,03	↑ 33,78
EBITDA EBITDA	1.691.788	1.111.055	823.547	634.089	589.316	52,27	↑ N/a

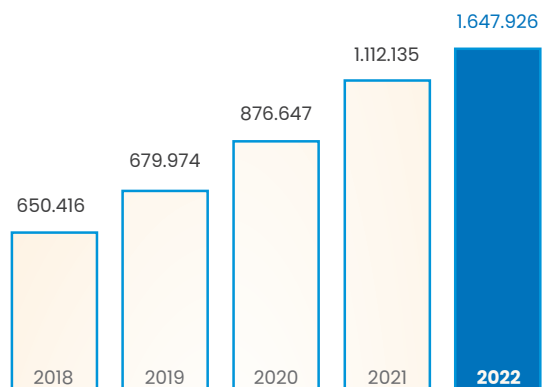
Pendapatan Usaha Revenue

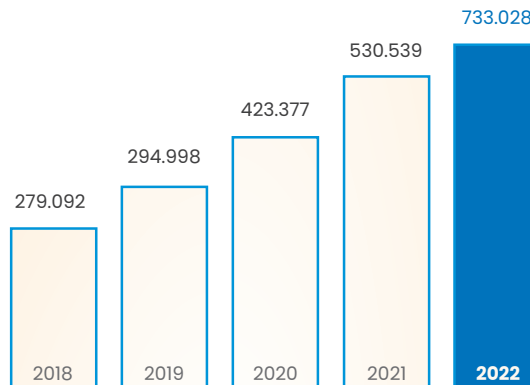
(dalam Rp juta)
(in Rp million)



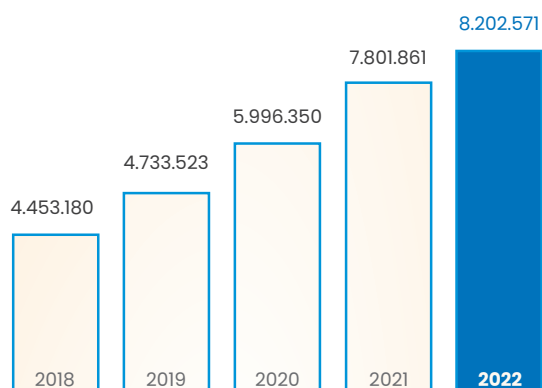
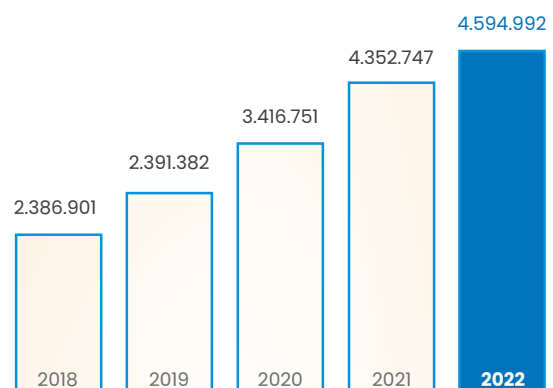
Laba Bruto Gross Profit

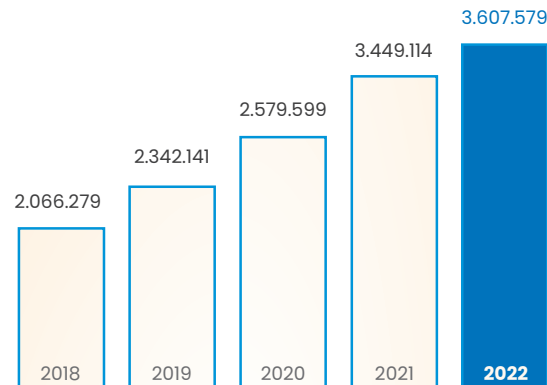
(dalam Rp juta)
(in Rp million)



Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data HighlightsLaba Tahun Berjalan
Profit for the Year(dalam Rp juta)
(in Rp million)Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In million Rupiah, unless otherwise stated	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021-2022 (%)	CAGR 2018-2022 (%)
Aset Tetap Fixed Assets	3.861.943	4.035.264	3.520.066	2.750.120	2.727.150	(4,30) ↓	9,09 ↑
Penyertaan saham Investment in shares	6.661	5.999	8.098	598	598	11,04 ↑	82,69 ↑
Investasi pada ventura bersama Investment in shares	87.607	84.643	74.425	73.083	55.066	3,50 ↑	12,31 ↑
Aset Lancar Current Assets	3.811.707	3.373.379	2.160.035	1.778.646	1.513.600	12,99 ↑	25,97 ↑
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	4.390.864	4.428.482	3.836.315	2.954.877	2.939.580	(0,85) ↓	10,55 ↑
Jumlah Aset Total Assets	8.202.571	7.801.861	5.996.350	4.733.523	4.453.180	5,14 ↑	16,50 ↑
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.613.513	3.133.013	2.320.665	1.351.807	1.266.095	15,34 ↑	29,98 ↑
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	981.479	1.219.734	1.096.086	1.039.575	1.120.806	(19,53) ↓	(3,26) ↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.594.992	4.352.747	3.416.751	2.391.382	2.386.901	5,57 ↑	17,79 ↑
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.607.579	3.449.114	2.579.599	2.342.141	2.066.279	4,59 ↑	14,95 ↑

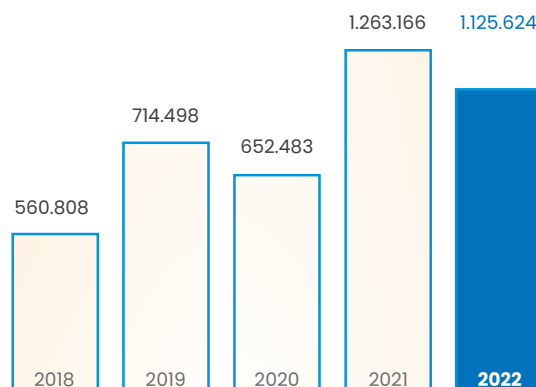
Aset
Assets(dalam Rp juta)
(in Rp million)Liabilitas
Liabilities(dalam Rp juta)
(in Rp million)

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data HighlightsEkuitas
Equity(dalam Rp juta)
(in Rp million)Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Cash Flows

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In million Rupiah, unless otherwise stated	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021-2022 (%)	CAGR 2018-2022 (%)
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating activities	1.367.580	1.291.616	604.669	427.195	210.646	5,88 ↑	59,62 ↑
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flows from investing activities	(219.767)	(660.338)	(733.156)	(130.796)	(285.324)	(66,72) ↓	(6,32) ↓
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities	(1.290.043)	(23.272)	55.534	(130.282)	218.553	5.443,33 ↑	N/a
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	4.688	2.677	10.938	(12.427)	25.977	75,12 ↑	(34,82) ↓
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	(137.542)	610.683	(62.015)	153.690	169.852	(122,52) ↓	N/a
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1.263.166	652.483	714.498	560.808	390.956	93,59 ↑	34,07 ↑
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of the year	1.125.624	1.263.166	652.483	714.498	560.808	(10,89) ↓	19,03 ↑

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Cash and cash equivalents at the end of the year

(dalam Rp juta)
(in Rp million)

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data HighlightsRasio-rasio Keuangan
Financial Ratios

	2022	2021	2020	2019	2018	Selisih Difference 2021-2022 (%)	
Aktivitas Activities							
Perputaran aset (%) Asset turnover (%)	59,33	50,47	50,98	60,14	46,98	8,86	↑
Rata-rata periode penagihan piutang (hari) Average Accounts Receivable Collection Period (days)	35	72	118	85	94	(51,39)	↓
Profitabilitas Profitability							
Rasio laba bersih terhadap aset (%) Return on Asset (ROA) (%)	8,94	6,80	7,06	6,23	6,27	2,14	↑
Rasio laba bersih terhadap ekuitas (%) Return on Equity (ROE) (%)	25,50	18,18	19,64	7,32	15,62	7,32	↑
Imbalan investasi (%) Return on Investment (ROI) (%)	20,42	14,59	13,73	13,57	13,42	5,83	↑
Margin laba operasi (%) Operating Profit Margin (OPM) (%)	20,87	17,20	18,26	14,13	20,57	3,67	↑
Margin laba bersih Net Profit Margin (NPM) (%)	15,32	13,96	13,84	10,64	13,61	1,36	↑
Likuiditas Liquidity							
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	31,20	40,32	28,12	52,90	44,36	9,12	↓
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	105,48	107,67	95,92	131,58	119,55	1,73	↓
Solvabilitas Solvency							
Jumlah Modal Sendiri terhadap Total Aset (%) Ratio of Total Own Capital to Total Assets (%)	43,98	44,21	43,02	49,48	46,40	1,01	↓
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	127,37	126,20	132,45	102,10	115,52	1,17	↑
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%) Debt to Asset Ratio (%)	56,02	55,79	56,98	50,52	53,60	0,23	↑

Ikhtisar Operasi dan Pemenuhan K3

Operational and Osh Fulfillment Highlights

Ikhtisar Pendapatan per Segmen

Revenue by Segment Highlights

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In million Rupiah, unless otherwise stated	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021-2022 (%)	CAGR 2018-2022 (%)
<i>Shipping Activities</i>	2.019.115	1.851.164	1.501.039	1.838.154	1.350.921	9,07 ↑	10,57 ↑
<i>Marine Services</i>	2.435.771	1.652.735	1.223.902	583.390	482.578	47,38 ↑	49,89 ↑
<i>Logistics Services</i>	330.026	297.088	333.256	350.676	216.774	11,09 ↑	11,08 ↑
Jumlah pendapatan usaha Total Operating Revenue	4.784.913	3.800.987	3.058.197	2.772.220	2.050.272	25,89 ↑	23,60 ↑

Ikhtisar Operasi

Operational Highlights

Perihal Description	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021-2022 (%)	CAGR 2018-2022 (%)
<i>Shipping Activities</i>							
Jumlah armada kapal milik (unit) Total Owned Ships (unit)	369	344	125	77	67	10,48% ↑	53,19 ↑
Jumlah <i>Commercial Days</i> kapal milik dan <i>brokerage</i> (hari) Commercial Days of Owned and <i>brokerage</i> Ships (days)	132.936	90.651	43.907	29.476	21.694	(36,64) ↓	28,56 ↑
<i>Commission Days</i> kapal milik (hari) Commission Days of Owned Ships (days)	112.270	83.281	36.646	23.015	19.559	34,81 ↑	54,79 ↑
Volume angkut <i>Contract of Affreightment</i> ("COA") (kilo liter) Transport volume of <i>Contract of Affreightment</i> ("COA") (kilo liter)	293.175	660.761	721.546	754.003	780.511	(125,38) ↑	(21,71) ↓
<i>Marine Services</i>							
Jumlah <i>Call</i> keagenan <i>tanker</i> pusat dan cabang (<i>call</i>) Total Tanker Agency <i>Call</i> of Head and Branch Offices (<i>Call</i>)	24.724	22.661	16.163	2.364	1.669	1,15 ↑	92,51 ↑
Jumlah <i>Call</i> administrasi pelabuhan khusus (<i>call</i>) Total Administration <i>Call</i> of Specific Port (<i>Call</i>)	-	-	-	-	24	-	-
<i>Logistics Services</i>							
<i>Cargo Handling</i> (ton)	304.063						
<i>Vessel Berthing</i> (<i>call</i>)	2.258						
<i>Cover Storage</i> (m ²)	346.935						
<i>Open Storage</i> (m ²)	744.428						
<i>Waste Management</i> (ton)	2.984						



Ikhtisar Operasi dan Pemenuhan K3 Operational and Osh Fulfillment Highlights

Ikhtisar K3 dan Lingkungan serta Kepegawaian OHS, Environment, and Employment Highlights

Perihal Description	2022	2021	2020	2019	2018	YoY 2021- 2022 (%)	CAGR 2018- 2022 (%)
K3 dan Lingkungan OHS and Environment							
Number of Accident ("NOA") (kejadian) Number of Accidents ("NOA") (cases)	-	1	-	-	-	-	-
Fatalitas (kejadian) Fatality (cases)	-	1	-	-	-	-	-
Tumpahan Minyak (kejadian) Oil Spills (cases)	-	-	-	-	-	-	-
Total Recordable Incident Rate ("TRIR") (kejadian) Total Recordable Incident Rate ("TRIR") (accidents)	0,16	0,12	0,14	-	0,34	33,33 ↑	(17,18) ↓
Jam Kerja Selamat (jam) Safe Working Hours (hours)	1.112.160*	6.326.040	7.178.840	6.271.064	5.905.976	(82,42) ↓	(34,13) ↓
Sumber Daya Manusia Human Resources							
Pekerja tetap (orang) Permanent Employees (persons)	567	600	376	346	367	(5,34) ↓	11,49 ↑
Pekerja tidak tetap (orang) Temporary Employees (persons)	602	634	44	40	84	(5,05) ↓	63,62 ↑
Pekerja Tidak Tetap/TJKP (orang) Temporary Employees (persons)	2.809	564	478	282	451	398,05 ↑	57,98 ↑
Jumlah pekerja (orang) Total Employees (persons)	3.978	1.798	898	668	902	(5,19) ↑	44,92 ↑

*) Dari kasus LTI 7 Desember 2022
From LTI case of 7 December 2022

Ikhtisar Saham

Share Highlights

Jumlah Saham dan Pemegang Saham serta Informasi Aksi Korporasi

Per 31 Desember 2022, jumlah saham Perusahaan terbagi 1.234.737 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B dimiliki oleh PT Pertamina International Shipping atau 99,999% sedangkan sebanyak 10 lembar saham seri A atau 0,001% dimiliki oleh PT Pertamina Pedeve Indonesia.

Hingga akhir tahun 2022, Perusahaan tidak melakukan penawaran saham umum kepada publik/masyarakat.

Dividen Saham Tunai

Berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2022, pemegang saham menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan perincian sebagai berikut:

1. Menyetujui pembagian Dividen kepada Pemegang Saham sebesar USD49.100.000,- (empat puluh sembilan juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat), secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam Perseroan, yang berasal dari Laba Bersih Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar USD37.157.795,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat) dan Laba Ditahan per tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sebesar USD11.942.205,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima Dolar Amerika Serikat). Pembayaran Dividen tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditutupnya Rapat;
2. Menyetujui Cadangan Wajib sebesar USD2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang dialokasikan dari Laba Ditahan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang belum ditentukan penggunaannya.

Number of Shares and Shareholders and Information on Corporate Actions

As of December 31, 2022, the Company's shares are divided into 1,234,737 series A shares and 819 series B shares owned by PT Pertamina International Shipping or 99.999%, while 10 series A shares or 0.001% are owned by PT Pertamina Pedeve Indonesia.

Until the end of 2022, the Company did not exercise public offering of shares to the public.

Cash Stock Dividends

Based on the approval given by the shareholders at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") held on June 16, 2022, the shareholders determined the appropriation of the Company's profit for the fiscal year 2021 (two thousand twenty-one), with the following details:

1. Approved the distribution of dividends to Shareholders in the amount of USD49,100,000.- (forty nine million one hundred thousand United States Dollars), proportionally according to the portion of share ownership in the Company, originating from the Net Profit for Fiscal Year 2021 (two thousand twenty one) of USD37,157,795 (thirty-seven million one hundred fifty-seven thousand seven hundred and ninety-five United States Dollars) and Retained Earnings as of 31-12-2021 (thirty-first December two thousand twenty-two) amounting to USD11,942,205 (eleven million nine hundred and forty-two thousand two hundred and five United States Dollars). Payment of the dividend should be done no later than 30 (thirty) days from the closing date of the Meeting;
2. Approved the Mandatory Reserve of USD 2,500,000 (two million five hundred thousand United States Dollars) which was allocated from Retained Earnings 2021 (two thousand twenty one) of which the appropriation had not been determined.



Informasi tentang Efek yang Diterbitkan

Information on the Issue of Securities

Hingga akhir tahun 2022, Perusahaan tidak menerbitkan efek obligasi maupun efek lainnya.

Up to the end of 2022, the Company did not issue bonds or other securities.

Kilas Peristiwa 2022

Events Highlights 2022



9 Februari 2022 | 9 Februari 2022

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") Port Medan berhasil meraih penghargaan dengan kategori perusahaan yang paling "Profesional" dalam Kegiatan Operasional Kepelabuhan. Penghargaan ini diberikan oleh Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan, Capt. Johnny Runggu Silalahi

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") Port Medan won an award in the category of the most "professional" company in Port Operational Activities. This award was handed over by the Head of the Belawan Main Syahbandar Office, Capt. Johnny Runggu Silalahi



8 Maret 2022 | March 8, 2022

Pergantian pejabat Direktur Pemasaran PTK dari Bapak Arsono Kuswardanu menjadi Bapak Imam Bustomi

The Change of PTK Marketing Director from Mr. Arsono Kuswardanu to Mr. Imam Bustomi



21 Maret 2022 | March 21, 2022

MoU Sinergitas dan Integrasi dalam Optimalisasi Kerja Sama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal, Pemeliharaan, dan Penyediaan Peralatan Pelabuhan antara PTK dengan PT Pelindo Jasa Maritim ("PJM")

MoU on Synergy and Integration in Optimizing Service Cooperation Ship Guiding and Delaying, Maintenance, and Provision of Port Equipment between Port Equipment between PTK and PT Pelindo Jasa Maritim ("PJM")



24 Maret 2022 | March 24, 2022

PTK mendapatkan Penghargaan dalam Anugerah BUMN 2022 dengan kategori Strategi Tumbuh dan Bertahan (Terbaik III) dan Direktur Utama PTK, CEO *Strategic Orientation* Anak Perusahaan BUMN Terbaik

PTK received an award in the 2022 BUMN Award in the category of Strategy for Growth and Survival (Best III) and President Director of PTK, CEO of Strategic Orientation of the Best BUMN Subsidiary.



26 April 2022 | April 26, 22

Peresmian Kantor Marine Business & Operation Region III di Balikpapan
Inauguration of Marine Business & Operation Region III Office in Balikpapan



Kilas Peristiwa 2022 Events Highlights 2022



24-26 Mei 2022 | May 24-26, 2022

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") dan PT Peteka Karya Samudera ("PKS") turut mendukung latihan bersama Regional Marine Pollution Exercise (Regional Marpolex) tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Perairan Makassar, Sulawesi Selatan.

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") and PT Peteka Karya Samudera ("PKS") participated in supporting the 2022 Regional Marine Pollution Exercise (Regional Marpolex) held by the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation in Makassar Waters, Sulawesi South.

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
RENCANA BUKU TAHUNAN 2022
ATAU PERENCANAAN TAHUNAN (ANNUAL GOVERNANCE
2022)

ASPEK PEMERIKSAAN RENCANA/PERENCANAAN	NOUR	ASPEK RENCANA/PERENCANAAN	REVISI RENCANA/PERENCANAAN
1. Penetapan Tujuan	1.00	1.01	1.01
2. Penetapan Sasaran	1.00	1.01	1.01
3. Penetapan Strategi	1.00	1.01	1.01
4. Penetapan Indikator	1.00	1.01	1.01
5. Penetapan Waktu	1.00	1.01	1.01
6. Penetapan Sumber Daya	1.00	1.01	1.01
7. Penetapan Risiko	1.00	1.01	1.01
8. Penetapan Evaluasi	1.00	1.01	1.01
9. Penetapan Pelaporan	1.00	1.01	1.01
10. Penetapan Penutup	1.00	1.01	1.01



30 Mei 2022 | May 30, 2022

Assessment GCG oleh BPKP dengan predikat Baik

GCG Assessment by BPKP with "Good" title



6 Juni 2022 | June 6, 2022

Peteka Shorebase Tanjung Batu ("PSTB") mendapatkan peringkat Hijau dalam Program Penghargaan Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah ("PROPERDA") Kalimantan Timur

June 6, 2022 - Peteka Shorebase Tanjung Batu ("PSTB") received a Green rating in the Regional Company Performance Rating Award Program ("PROPERDA") of East Kalimantan



8 Juni 2022 | June 8, 2022

PTK diwakili Gugus FIFA dan Gugus R2 Kotak meraih kategori Gold dan Silver dalam Forum APQ Award

PTK was represented by the FIFA Cluster and the R2 Kotak Cluster won the Gold and Silver categories in the APQ Award Forum



16 Juni 2022 | June 16, 2022

PTK melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021

PTK held the Annual General Meeting of Shareholders for the 2021 Fiscal Year

Kilas Peristiwa 2022
Events Highlights 2022**24 Juni 2022** | June 24, 2022

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") dan PT Pertamina International Shipping ("PIS") menandatangani *Head of Agreement* ("HoA") tentang kerja sama dalam pengedokan kapal

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") and PT Pertamina International Shipping ("PIS") signed a *Head of Agreement* ("HoA") regarding cooperation in ship docking

**28 Juli 2022** | July 28, 2022

Sekretaris Daerah Tanggamus melaksanakan audiensi dengan Direksi PTK terkait proyek Kawasan Industri Tanggamus.

The Regional Secretary of Tanggamus held an audience with PTK Board of Directors regarding the Tanggamus Industrial Estate project.

**1 Agustus 2022** | August 1, 2022

MoU Kerja Sama di Bidang Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan *Marine Loading Arm* ("MLA") di Wilayah Terminal BBM dan Gas Pertamina

MoU on Cooperation in the Provision of Marine Loading Arm (MLA) Maintenance and Repair Services in the Pertamina Fuel Oil and Gas Terminal Area

**11 Agustus 2022** | August 11, 2022

PTK raih Penghargaan Pilar Lingkungan terbaik dengan 4 bintang kategori Anak Perusahaan BUMN pada TJSL & CSR Award 2022

PTK won the best Environmental Pillar Award with 4 stars in the SOE Subsidiary category at the TJSL & CSR Award 2022

**18 Agustus 2022** | August 18, 2022

18 Penandatanganan Perjanjian Pekerjaan Jasa Penyewaan Kapal dan Pengelolaan *Ship to Ship* ("STS") untuk proyek *Fatty Acid Methyl Ester* ("FAME") di Balikpapan antara PTK dengan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia ("APROBI")

Signing of the *Ship to Ship* ("STS") Charter and Management Service Work Agreement for the *Fatty Acid Methyl Ester* ("FAME") project in Balikpapan between PTK and the Indonesian Biofuel Producers Association ("APROBI")



Kilas Peristiwa 2022 Events Highlights 2022



31 Agustus 2022 | August 31 – 2022

PTK mengadakan kegiatan *Vendor Day* dan memberikan beberapa penghargaan kepada mitra kerja maupun vendor dengan berbagai kategori

PTK held *Vendor Day* activities and gave several awards to partners and vendors in various categories



2 September 2022 | September 2, 2022

Rebranding 3 Anak Perusahaan PTK

Rebranding of 3 Subsidiaries of PTK



7 September 2022 | September 7, 2022

Launching penerapan PLTS pada kapal CB Transko Pari 01

Launching of PLTS implementation on the CB Transko Pari 01 ship



9 September 2022 | September 9, 2022

PTK merayakan HUT Ke – 53 dengan tema *Sailing Beyond Border*

PTK celebrated its 53rd Anniversary with the theme *Sailing Beyond Border*



22 Oktober 2022 | October 22, 2022

PTK melaksanakan kegiatan Aksi Tanam 1.000 Mangrove di Pulau Barrang Caddi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar

PTK carried out the Planting Action of 1,000 Mangroves on Barrang Caddi Island, Sangkarrang Islands District, Makassar

Kilas Peristiwa 2022
Events Highlights 2022**1 November 2022** | November 1, 2022

Pengembangan Bisnis Pengerukan melalui KSO dengan Van Oord Indonesia
Dredging Business Development through Operation Cooperation (KSO) with Van Oord Indonesia

**9 November 2022** | November 9, 2022

PTK meraih 3 penghargaan BUMN *Branding & Marketing Award 2022*, 1 *Gold Winner* di kategori *Global Brand and Marketing Strategy*, 1 *Gold Winner* di kategori *Maintaining The Brand Equity in Both Local/International Collaborations* dan *Creative Marketing Initiative*

PTK won 3 awards in the SOE Branding & Marketing Award 2022, 1 Gold Winner in the Global Brand and Marketing Strategy category, 1 Gold Winner in the Maintaining The Brand Equity category in Both Local/International Collaborations and Creative Marketing Initiative

**29 November 2022** | November 29, 2022

Inbreng asset dan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor PTK berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PTK No. 30 tanggal 29 November 2022 dimana terdapat perubahan komposisi Pemegang Saham PTK yaitu PT Pertamina International Shipping selaku pemegang 1.234.737 lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.234.737.000.000,- dan 819 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp819.000,- sehingga presentase kepemilikan saham sebesar 99,999%; dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku pemegang 10 lembar saham Seri A atau total sebesar Rp10.000.000,- dengan presentase kepemilikan saham sebesar 0,001%.

Inbreng assets and Increase in Issued/paid-up capital of PTK based on the Statement Deed of Shareholders' Resolution of Amendment to PTK's Articles of Association No. 30 dated November 29, 2022 which there was a change in the composition of PTK Shareholders, namely PT Pertamina International Shipping as the holder of 1,234,737 Series A shares with a nominal value of Rp1,234,737,000,000.- and 819 Series B shares with a nominal value of Rp819,000,- so that the percentage of share ownership is 99,999%; and PT Pertamina Pedeve Indonesia as the holder of 10 Series A shares or a total of Rp10,000,000,- with a percentage of share ownership is 0.001%.



Kilas Peristiwa 2022 Events Highlights 2022



6 Desember 2022 | December 6, 2022

SHEVIA (Safety Health Education Virtual Immersive Application): Aplikasi simulasi *training* dengan menggunakan teknologi Virtual Reality ("VR"). Adapun fitur yaitu terkait pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi semua karyawan sehingga dapat memberikan pengalaman pelatihan yang imersif, menyenangkan dan menarik sehingga dapat memberikan keterampilan memperkuat pemahaman konsep dan pengembangan kompetensi

SHEVIA (Safety Health Education Virtual Immersive Application): Training simulation application using Virtual Reality ("VR") technology. The features are related to Occupational Safety and Health ("OHS") training for all employees so as to provide an immersive, fun and interesting training experience so as to provide skills to strengthen concept understanding and competency development.



6 Desember 2022 | December 6, 2022

Penandatanganan SLA antara Pelindo dengan SH IML tentang Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal

Signing of SLA between Pelindo and Integrated Marine Logistics Subholding regarding Ship Pilotage and Tugging Services



27 Desember 2022 | December 27, 2022

Penandatanganan *Protocol of Delivery and Acceptance* Jual Beli Kapal dengan PT Pelayaran Multi Jaya Samudera untuk 2 set Tug Boat & Oil Barge dan dengan PT Penduung Segara Sentosa untuk 1 unit Landing Craft Tank

Signing of Protocol of Delivery and Acceptance of Ship Purchase with PT Pelayaran Multi Jaya Samudera for 2 sets of Tug Boat & Oil Barge and with PT Penduung Segara Sentosa for 1 Landing Craft Tank unit

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

PTK memiliki komitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional bisnisnya, antara lain dengan memenuhi ketentuan mengenai perizinan dan sertifikasi.

PTK has a commitment to complying with all applicable regulations to support the smooth operation of its business, including by fulfilling the provisions regarding licensing and certification.



Penghargaan di Tahun 2022

Awards 2022

9 Februari 2022 | February 9, 2022

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") Port Medan berhasil meraih penghargaan dengan kategori perusahaan yang paling "Profesional" dalam Kegiatan Operasional Kepelabuhanan. Diberikan oleh: Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan, Capt. Johnny Runggu Silalahi

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") Port Medan berhasil meraih penghargaan dengan kategori perusahaan yang paling "Profesional" dalam Kegiatan Operasional Kepelabuhanan. Diberikan oleh: Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan, Capt. Johnny Runggu Silalahi



25 Maret 2022 | March 25, 2022

Anugerah BUMN 2022

PTK meraih penghargaan Terbaik III Strategi Tumbuh dan Bertahan Kategori Anak Perusahaan BUMN serta penghargaan CEO *Strategic Orientation* Anak Perusahaan BUMN Terbaik pada ajang Anugerah BUMN ke-11 tahun 2022 dengan tema "Transformasi Tata Kelola BUMN". Diberikan oleh: BUMN Track

SOE Award 2022

PTK won the Best III Strategy for Growth and Survival in the SOE Subsidiary Category and the Best SOE Subsidiary Strategic Orientation CEO award at the 11th SOE Award event in 2022 with the theme "SOE Governance Transformation". Awarded by: BUMN Track





6 Juni 2022 | June 6, 2022

Program Penghargaan Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah ("PROPERDA") Kalimantan Timur.

Peteka Shorebase Tanjung Batu ("PSTB"), salah satu unit bisnis utama dari Pertamina Trans Kontinental ("PTK") yang beroperasi di wilayah Balikpapan, berhasil meraih Proper Hijau dalam Program Penghargaan Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah ("PROPERDA") Kalimantan Timur. Diberikan oleh: Gubernur Kalimantan Timur

Regional Company Performance Rating Award Program ("PROPERDA") of East Kalimantan

Peteka Shorebase Tanjung Batu ("PSTB"), one of the main business units of Pertamina Trans Kontinental ("PTK") operating in the Balikpapan area, won Proper Green in the Regional Company Performance Rating Award Program ("PROPERDA") of East Kalimantan. Awarded by: Governor of East Kalimantan



8 Juni 2022 | Juni 8, 2022

APQ Awards

PTK diwakilkan Gugus FIFA dan Gugus R2 Kotak meraih kategori *Gold* dan *Silver* dalam Forum APQ Award Diberikan oleh: PT Pertamina (Persero)

APQ Awards

PTK was represented by the FIFA Cluster and the R2 Kotak Cluster won the Gold and Silver categories in the APQ Award Forum on 8 June 2022 Awarded by: PT Pertamina (Persero)



11 Agustus 2022 | August 11, 2022

TJSL & CSR Award 2022

PTK raih Penghargaan Pilar Lingkungan terbaik dengan 4 bintang kategori Anak Perusahaan BUMN pada TJSL & CSR Award 2022 Diberikan oleh: E Kurniawan Padma selaku Komite Ahli CSR Bidang Lingkungan Corporate Forum for CSR Development ("CFCD")

TJSL & CSR Award 2022

PTK won the best Environmental Pillar Award with 4 stars in the SOE Subsidiary category at the TJSL & CSR Award 2022 Presented by E Kurniawan Padma as the CSR Expert Committee in the Environment of Corporate Forum for CSR Development ("CFCD")



9 November 2022 | November 9, 2022

BUMN Branding & Marketing Award 2022

Penghargaan yang berhasil diraih PTK ialah Peringkat 1 (*Gold*) *Global Brand and Marketing Strategy* untuk Kategori *Global Branding and Marketing* Anak Perusahaan BUMN; Peringkat 1 (*Gold*) *Maintaining The Brand Equity in Both Local/International Collaborations* untuk Kategori *Strong Brand Immunity to Stay Relevant* Anak Perusahaan BUMN; serta berhasil meraih The Best CMO (*Corporate Marketing Performance*) BUMN Branding and Marketing untuk kategori *Creative Marketing Initiative* Anak Perusahaan BUMN, yang diraih Imam Bustomi, Direktur Pemasaran PTK. Diberikan oleh: BUMN Track

SOE Branding & Marketing Award 2022

The awards won by PTK were Ranked 1st (*Gold*) in *Global Brand and Marketing Strategy* for the *Global Branding and Marketing* Category of SOE Subsidiaries; Ranked 1st (*Gold*) *Maintaining The Brand Equity in Both Local/International Collaborations* for the *Strong Brand Immunity to Stay Relevant* Category of SOE Subsidiaries; and won The Best CMO (*Corporate Marketing Performance*) SOE Branding and Marketing for the *Creative Marketing Initiative* category of SOE Subsidiary, which was won by Imam Bustomi, Marketing Director of PTK. Awarded by: BUMN Track



Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Sertifikasi yang Masih Berlaku

Valid Certifications

Sertifikat ISO 37001:2016 | ISO 37001:2016 certificate

Sertifikasi verifikasi kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan ("SMAP") sesuai dengan standar internasional.
Diberikan oleh TÜV NORD Indonesia
Tanggal berlaku: 28 Desember 2021
Masa habis: 27 Desember 2024

Verification Certification in conformity with the Anti-Bribery Management System ("SMAP") according to international standards.
Provided by TÜV NORD Indonesia
Effective date: December 28, 2021
Expiry date: December 27, 2024



ISO 45001:2018

Sertifikasi dari *The Occupational Health and Safety Management System* of PT Pertamina Trans Kontinental dalam hal *Provision of Shipping Operation, Ships Agency, Brokerage and Marine Services* dengan pencapaian *Is In Compliance With The Standart*
Diberikan oleh: Federazione CISQ dan IQNet The International Certification Network
Tanggal berlaku: 9 Desember 2020
Masa habis: 12 November 2023

Certification from *The Occupational Health and Safety Management System* of PT Pertamina Trans Kontinental in terms of *Provision of Shipping Operations, Ships Agency, Brokerage and Marine Services* with *Is In Compliance With The Standard* achievement
Provided by: Federazione CISQ and IQNet The International Certification Network
Effective date: December 9, 2020
Expiry date: November 12, 2023



ISO 9001: 2015

Sertifikasi untuk *The Quality Management System* of PT Pertamina Trans Kontinental dalam hal *Provision of Shipping Operation, Ships Agency, Brokerage And Marine Services* dengan pencapaian *Is In Compliance With The Standard*
Diberikan oleh: Federazione CISQ dan IQNet The International Certification Network
Tanggal berlaku: 4 Desember 2019
Masa habis: 18 Desember 2022

Certification for *The Quality Management System* of PT Pertamina Trans Kontinental in terms of *Provision of Shipping Operations, Ships Agency, Brokerage and Marine Services* with the achievement of *Is In Compliance With The Standard*
Provided by: Federazione CISQ and IQNet The International Certification Network
Effective date: December 4, 2019
Expiry date: December 18, 2022





Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications

Penyesuaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Adjustment of the Company's Safety Management System

Sertifikasi untuk verifikasi audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan dalam hal ketentuan Koda Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran (ISM Code) untuk tipe kapal; Kapal tangki minyak. Diberikan oleh Kementerian Perhubungan
Tanggal berlaku: 14 September 2022
Masa habis: 12 Januari 2023

Certification for audit verification of the Enterprise Safety Management System in terms of the provisions of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and the Prevention of Pollution (ISM Code) for ship type: Oil tanker.
Provided by the Ministry of Transportation
Effective date: September 14, 2022
Expiry date: January 12, 2023



ISO 14001:2015

Sertifikasi untuk *The Environmental Management System* of PT Pertamina Trans Kontinental dalam hal *Provision of Shipping Operation, Ships Agency, Brokerage And Marine Services* dengan pencapaian *Is In Compliance With The Standart* Diberikan oleh Federazione CISQ dan IQNet The International Certification Network
Tanggal berlaku: 3 November 2020
Masa habis: 6 November 2023

Certification for The Environmental Management System of PT Pertamina Trans Kontinental in terms of Provision of Shipping Operations, Ships Agency, Brokerage And Marine Services with Is In Compliance With The Standard achievement
Provided by: Federazione CISQ and IQNet The International Certification Network
Effective date: November 3, 2020
Expiry date: November 6, 2023



Pertumbuhan kinerja dan penguatan tata kelola memberikan jaminan tentang kelangsungan usaha PTK untuk dapat tumbuh tangguh hingga masa-masa mendatang

The growth in performance and strengthening of governance provides assurance of PTK's business continuity to grow resiliently into the future



Laporan Manajemen

Management Report





Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



Tumbuh di tengah situasi penuh tantangan menjadikan Perusahaan memiliki optimisme untuk dapat menjaga kelangsungan usaha di masa-masa mendatang.

Growing amidst a challenging situation has given the Company optimism to maintain business continuity in the future.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Sebagai pelaku usaha yang mendukung perkembangan sektor *shipping, marine & logistic*, PT Pertamina Trans Kontinental berkomitmen untuk mengambil bagian dalam proses pemulihan ekonomi, khususnya pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memberikan dampak luar biasa terhadap seluruh sendi kehidupan serta perekonomian. Terutama dengan posisi Perusahaan sebagai bagian dari *Holding* Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Migas di bawah PT Pertamina (Persero), Perusahaan memiliki semangat dan moral yang tinggi untuk berkontribusi dalam perkembangan industri migas nasional.

Untuk itu, izinkan saya mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2022, terutama dari sudut pandang Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Tangguh

Perekonomian dunia di tahun 2022 diwarnai oleh ketimpangan pemulihan ekonomi di berbagai negara dan kawasan *International Monetary Fund* ("IMF") dalam *World Economic Outlook* ("WEO") Oktober 2022 memproyeksikan pertumbuhan global akan melambat tajam hingga 3,2% di tahun 2022, jauh merosot dibandingkan tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Dear distinguished Shareholders and Stakeholders,

As a business actor that supports the development of the shipping, marine & logistic, PT Pertamina Trans Kontinental is committed to taking part in the economic recovery process, especially after the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, which has had an extraordinary impact on all aspects of life and the economy. Especially with the Company's position as part of the Oil and Gas State-Owned Enterprises ("BUMN") Holding under PT Pertamina (Persero), the Company has high enthusiasm and morals to contribute to the development of the national oil and gas industry.

For this reason, allow me to represent the Board of Commissioners in presenting the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, especially from the perspective of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

Global Economic Slowdown and Resilient Indonesian Economic Growth

Economic recovery disparities in various countries and regions characterize the world economy in 2022. The International Monetary Fund ("IMF"), in its October 2022 *World Economic Outlook* ("WEO"), projects that global growth will slow sharply to 3.2% in 2022, a sharp decline compared to 2021 with an economic growth rate of 6%.



Amir Hamzah

Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Kejatuhan perekonomian global terutama dipicu oleh pemulihan ekonomi yang tidak merata di berbagai negara, yang kemudian menciptakan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pasokan global. Hal ini kemudian menyebabkan gangguan mata rantai pasokan global, yang pada akhirnya berakibat pada kenaikan harga komoditas pangan dan energi hingga menyebabkan kenaikan inflasi. Kondisi ini diperparah dengan konflik Rusia dan Ukraina yang berdampak langsung terhadap krisis energi di berbagai belahan Eropa. Tak hanya itu, sebagai negara dengan kontribusi pemasok komoditas pangan besar di dunia, konflik Rusia dan Ukraina juga menyebabkan kenaikan komoditas pangan yang kemudian menambah persoalan pada inflasi. Inflasi dunia diperkirakan meningkat dari 5,7% pada tahun 2021 menjadi 9,1% pada tahun 2022. Hal ini kemudian direspon oleh sejumlah bank sentral terutama di negara maju yang melakukan pengetatan kebijakan moneter, terutama dengan meningkatkan suku bunga acuan.

Inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga khususnya dari negara maju berdampak langsung terhadap penempatan dana asing di berbagai negara berkembang khususnya menuju pasar Amerika Serikat (AS). Hal ini kemudian berimbas pada penguatan mata uang Dolar AS terhadap berbagai mata uang lain. *"Cash is the King"*, demikian Bank Indonesia menyebut penguatan mata uang Dolar AS ini, menjadikan tahun 2022 sebagai tahun dengan risiko yang tinggi atas nilai tukar maupun valuasi aset keuangan yang didasarkan pada Dolar AS.

Meskipun demikian, Indonesia mampu menjadi salah satu dari negara dengan prospek perkembangan perekonomian yang kuat. Di sepanjang tahun 2022, perekonomian Indonesia tumbuh cukup tangguh seiring dengan menurunnya restriksi aktivitas sosial dan bisnis pasca meredanya pandemi COVID-19. Mengutip data Badan Pusat Statistik ("BPS"), pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mencapai 5,31%, jauh lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 3,70%.

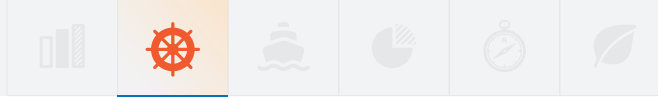
Berbagai kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang tepat sasaran, stabilitas politik yang terjaga dengan cukup baik, neraca pembayaran yang sehat, serta pertumbuhan ekspor di tengah tekanan situasi, menjadi landasan yang cukup baik bagi Indonesia untuk menjaga perekonomiannya tetap tumbuh tangguh khususnya di tengah tekanan perekonomian global yang melanda.

The global economic downturn is mainly driven by uneven economic recovery in various countries, creating an imbalance between global supply and demand. This disrupts the global supply chain, resulting in rising food and energy commodity prices and rising inflation. This situation is exacerbated by the Russia-Ukraine conflict, which directly impacts the energy crisis in various parts of Europe. Not only that, as a country with a significant contribution to food commodity suppliers in the world, the Russia-Ukraine conflict also causes an increase in food commodities which then adds to the problem of inflation. Global inflation is expected to rise from 5.7% in 2021 to 9.1% in 2022. This is then responded to by several central banks, especially in developed countries, tightening monetary policy, especially by raising benchmark interest rates.

High inflation and rising interest rates, especially from developed countries, directly impact foreign fund placement in various developing countries, especially towards the United States (US) market. This then affects the strengthening of the US Dollar against different other currencies. *"Cash is the King"* is the term used by Bank Indonesia to refer to this strengthening of the US Dollar currency, making 2022 a year with high risks for exchange rates and financial asset valuations based on the US Dollar.

Nevertheless, Indonesia can be one of the countries with strong economic development prospects. Throughout 2022, Indonesia's economy grew quite resiliently as social and business activity restrictions decreased following the easing of the COVID-19 pandemic. Citing data from the Central Statistics Agency ("BPS"), economic growth in 2022 reached 5.31%, much higher than in 2021, which was 3.70%.

Various targeted COVID-19 pandemic handling policies, well-maintained political stability, healthy balance of payments, and export growth amid pressure situations provide a good foundation for Indonesia to keep its economy resilient, especially amid global economic pressures.



Menariknya, di tahun 2022 Indonesia mampu memberikan pernyataan yang kuat terkait ekosistem energi saat penyelenggaraan G20 di Bali. Salah satu poin penting dari deklarasi G20 adalah dokumen *Bali Compact*, *Bali Energy Transition Roadmap*, dan *The 2022 G20 Sustainable Finance Report* sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah krisis energi. G20 juga mendorong kebijakan untuk transisi energi melalui insentif pembiayaan dan investasi.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas ("PT") wajib memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagai forum bagi pemegang saham; Direksi yang bertugas menjalankan pengurusan PT; dan Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan PT yang dilakukan Direksi.

Hubungan antara fungsi pengurusan oleh Direksi dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris harus berjalan secara sinergis. Dalam tatanan organisasi yang berlaku di PTK, hubungan sinergis ini terbangun baik secara formal maupun informal. Secara formal, Dewan Komisaris memiliki forum rapat gabungan dengan mengundang Direksi untuk melakukan fungsi pengawasan atas pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi.

Di sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris menggelar 39 kali rapat, di mana 20 kali rapat merupakan Rapat Internal Dewan Komisaris, dan 19 kali merupakan Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi. Dalam rapat-rapat tersebut, khususnya Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi, dibahas beberapa hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, baik laporan kinerja rutin bulanan, perkembangan *Good Corporate Governance* ("GCG") terutama pada aspek manajemen risiko dan pengendalian internal, maupun hal-hal khusus seperti pengalihan aset PTK kepada entitas anak.

Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari aspirasi dan amanat pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan PTK yang dilakukan oleh Direksi. Kompetensi anggota Dewan Komisaris memungkinkan untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait arah dan strategi pengurusan Perusahaan; tentunya dengan batas-batas hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi.

Interestingly, in 2022 Indonesia made a strong statement regarding the energy ecosystem during the G20 in Bali. One crucial point of the G20 declaration is the Bali Compact document, Bali Energy Transition Roadmap, and The 2022 G20 Sustainable Finance Report as guidelines for solving energy crisis problems. The G20 also encourages energy transition policies through financing and investment incentives.

Implementation of the Supervisory Function of the Board of Commissioners

According to the Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, a Limited Liability Company must have three main organs: the General Meeting of Shareholders ("RUPS") as a forum for shareholders, the Board of Directors responsible for managing the limited liability company, and the Board of Commissioners responsible for supervising the management of the limited liability company by the Board of Directors.

The relationship between the management function of the Board of Directors and the supervisory function of the Board of Commissioners must be carried out synergistically. In the organizational structure of the PT, this synergistic relationship is established both formally and informally. Formally, the Board of Commissioners has a joint meeting forum by inviting the Board of Directors to perform supervision over the management of the Company carried out by the Board of Directors.

Throughout 2022, the Board of Commissioners held 39 meetings, where 20 were internal meetings of the Board of Commissioners, and 19 were joint meetings by inviting the Board of Directors. In these meetings, especially the joint meetings by inviting the Board of Directors, several matters requiring the attention of the Board of Commissioners were discussed, such as routine monthly performance reports, the development of Good Corporate Governance ("GCG"), especially in terms of risk management and internal controls, as well as specific matters such as the transfer of PTK assets to a subsidiary entity.

The supervisory function carried out by the Board of Commissioners is part of the aspirations and mandate of the shareholders. Directly or indirectly, the Board of Commissioners represents the interests of shareholders in overseeing the management of the PT carried out by the Board of Directors. The competencies of the members of the Board of Commissioners enable them to provide input to the Board of Directors regarding the direction and management strategy of the Company, of course, within the limits of the rights, authorities, and obligations held by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Melalui upaya pengembangan hubungan sinergis berlandaskan tatanan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Dewan Komisaris berharap fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Perusahaan.

Di samping rapat-rapat sebagaimana telah dijelaskan di atas, fungsi pengawasan juga dilakukan Dewan Komisaris melalui kunjungan untuk mendapatkan perspektif langsung dari lapangan. Di sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris melakukan 9 (sembilan) kali kunjungan kerja, di mana hasil kunjungan kerja ini menjadi bahan bagi pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Beberapa poin masukan Dewan Komisaris atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi di sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

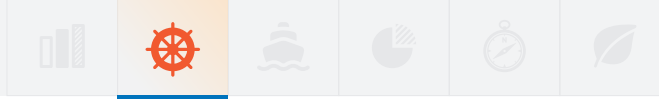
- Direksi PTK dalam melaksanakan RKAP perlu melakukan komunikasi yang lebih luas, baik di pasar *captive* maupun *non captive*, untuk mencapai target RKAP yang ditetapkan, serta mengakomodir kepentingan Pertamina Group dalam berbagai ragam layanan bidang yang dikuasai PTK.
- Mendorong Direksi PTK untuk dapat melakukan identifikasi lebih lanjut setiap peluang bisnis yang ada, serta memobilisasi upaya pelaksanaan *revenue enhancement* dan *cost efficiency* guna membantu mencapai target RKAP.
- Membuka ruang penyelesaian wan prestasi atas pembangunan *harbour* tug di sejumlah galangan kapal dengan tetap menghormati kontrak yang telah ditetapkan.
- Aset yang ada harus diperhatikan, baik dari status kepemilikannya (seperti tanah di Batam) serta memelihara agar utilisasi aset dapat optimal dan reliable. Infrastruktur yang ada sedapat mungkin dimanfaatkan hingga mencapai *optimum capacity*, misalnya di PSTB yang masih *idle capacity* 35%. Perlu pula dilakukan pemetaan kondisi *safe/unsafe condition* sarana prasarana.
- Permasalahan yang ada harus segera diselesaikan, terutama yang akan berdampak pada *cashflow*, antara lain piutang sewa lahan PT PAN di pelabuhan, isu *Agency Cost* di Port Tanjung Uban dan Pulau Sambu.
- Investasi harus dilakukan dengan seksama agar dapat meraih *opportunity* bisnis yang diharapkan. Misalnya potensi penambahan pendapatan di Kualanamu melalui SPM 50.000 di Port Belawan. Sebaliknya, agar tidak dilakukan investasi tambahan kapal, apabila masih ada investasi agar dapat lebih difokuskan untuk kebutuhan kapal yang telah memiliki target pasar, misalnya *dreging*.

Through efforts to develop a synergistic relationship based on an accountable organizational structure, the Board of Commissioners hopes that the supervisory function can be carried out effectively and thoroughly, which will ultimately positively impact the Company's performance.

In addition to the meetings described above, the Board of Commissioners also conduct the supervisory function through visits to obtain a direct perspective from the field. Throughout 2022, the Board of Commissioners conducted 9 working visits, where the results became the basis for supervision over the Company's management carried out by the Board of Directors.

Some input points from the Board of Commissioners on the management of the Company carried out by the Board of Directors throughout 2022 are as follows:

- PTK Board of Directors in implementing the RKAP need to communicate more broadly, both in captive and non-captive markets, to achieve the set RKAP targets, as well as accommodate Pertamina Group's interests in a variety of service fields controlled by PTK.
- Encouraging PTK Board of Directors to be able to further identify any existing business opportunities, as well as mobilize efforts to implement revenue enhancement and cost efficiency to help achieve the RKAP targets.
- Providing the space for the settlement of defaults on the construction of harbor tugs in a number of shipyards while respecting the contracts that have been stipulated.
- Existing assets must be considered, both in terms of ownership status (such as land in Batam) and maintenance so that asset utilization can be optimal and reliable. Existing infrastructure should be utilized as much as possible until it reaches optimum capacity, for example in PSTB which is still at 35% idle capacity. It is also necessary to map the safe/unsafe condition of infrastructure facilities.
- Existing problems must be resolved immediately, especially those impacting cash flow, including PT PAN's rental receivables at the port, Agency Cost issues at Port Tanjung Uban and Pulau Sambu.
- Investments must be made carefully to achieve the expected business opportunities. For example, the potential for additional income in Kualanamu through SPM 50,000 at Port Belawan. On the other hand, in order not to make additional investments in ships, if there is still investment, it can be more focused on the needs of ships that already have a target market, for example *dreging*.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

- Perbaikan dalam perencanaan investasi yang agar realisasi tercapai. Serapan ABI biasanya mengalami lagging dibandingkan realisasi fisik, sehingga perlu ada langkah breakthrough untuk mempercepat proses pembayaran. Adanya rencana investasi organik di tahun 2023 juga menjadikan perencanaan investasi kritikal.
- Dewan Komisaris berharap untuk investasi tahun 2023 dilakukan perencanaan yang lebih baik, terlebih dengan adanya rencana investasi anorganik di tahun 2023.
- Prinsip investasi memang menganut *high risk, high return*. Namun tetap perlu dilakukan dengan kehati-hatian karena jika gagal dapat berdampak pada pendapatan Perusahaan. Agar dilakukan *update* keekonomian atas FID proyek yang *multiyear* untuk melihat apakah proyek yang dilakukan masih akan memberikan imbal hasil yang ditargetkan dan dilaporkan pula ke Dewan Komisaris.
- Perlu membuat pembagian tugas *marketing* antara Pusat dan *Region* sehingga terjadi sinergi yang optimal.
- Posisi manajemen yang kosong perlu segera dilakukan pengisian, antara lain GM *Region I*.
- Diperlukan implementasi sistem yang terintegrasi dengan menggunakan MySAP hingga ke *Region* dan AP agar dapat mendukung pelaporan keuangan.
- *Region* perlu melakukan *market study* yang komprehensif untuk memetakan potensi bisnis yang ada di areanya.
- Kantor PTK berdiri di atas tanah milik Pertamina yang belum diserahkan imbreng seluas 12 Ha, sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut dan jangka waktunya pun sudah berakhir sehingga perlu untuk dimintakan perpanjangannya.
- Arah Dewan Komisaris terkait RJPP dan Rencana Kerja Tahun 2022 agar menjadi perhatian yang sudah ditindaklanjuti dalam *draft* RJPP dimaksud. Khususnya terkait penetrasi pasar global dalam meningkatkan kapabilitas ke pasar global yaitu *non-captive market*. *Region* perlu didorong untuk mencapai target yang ditetapkan dengan melakukan upaya perbaikan, seperti:
 - a. meningkatkan efisiensi;
 - b. mengawal RJPP yang sudah ditetapkan;
 - c. upaya pencarian sumber-sumber baru pekerjaan di luar RKAP; dan,
 - d. melakukan kerjasama dengan pihak KKKS Jabanusa dll, di mana Komite Dewan Komisaris siap membantu memfasilitasi.
- Improvements in investment planning so that realization is achieved. ABI absorption is usually lagging compared to physical realization, so there needs to be a breakthrough step to speed up the payment process. Having an organic investment plan in 2023 also makes investment planning critical.
- The Board of Commissioners hopes that for the 2023 investment, better planning will be carried out, especially with inorganic investment plans in 2023.
- The principle of investment does indeed adhere to high risk, high return. However, it still needs to be done carefully because it can impact the Company's income if it fails. An economic update on the multiyear project FID should be carried out to see if the project will still provide the targeted return and report to the Board of Commissioners.
- Creating a division of marketing tasks between the Center and the Region is necessary so that optimal synergy occurs.
- Vacant management positions need to be filled immediately, including GM *Region I*.
- Implementation of an integrated system using MySAP up to the Region and AP is needed to support financial reporting.
- The Region needs to conduct a comprehensive market study to map out existing business potential in its area.
- The PTK office stands on Pertamina-owned land that has yet to be handed over for 12 hectares of imbreng, so it needs to be discussed further. Its time has expired, so it needs to be extended.
- The Board of Commissioners' direction regarding RJPP and the 2022 Work Plan should be given attention that has been followed up in the draft RJPP in question. Primarily related to global market penetration in increasing capabilities to global markets, namely non-captive markets. Regions need to be encouraged to achieve the set targets by making improvement efforts, such as:
 - a. increase efficiency;
 - b. overseeing the established RJPP;
 - c. efforts to find new sources of work outside the RKAP; and,
 - d. collaborating with the Jabanusa KKKS, where the Committee of the Board of Commissioners is ready to help facilitate.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report**Penilaian Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya**

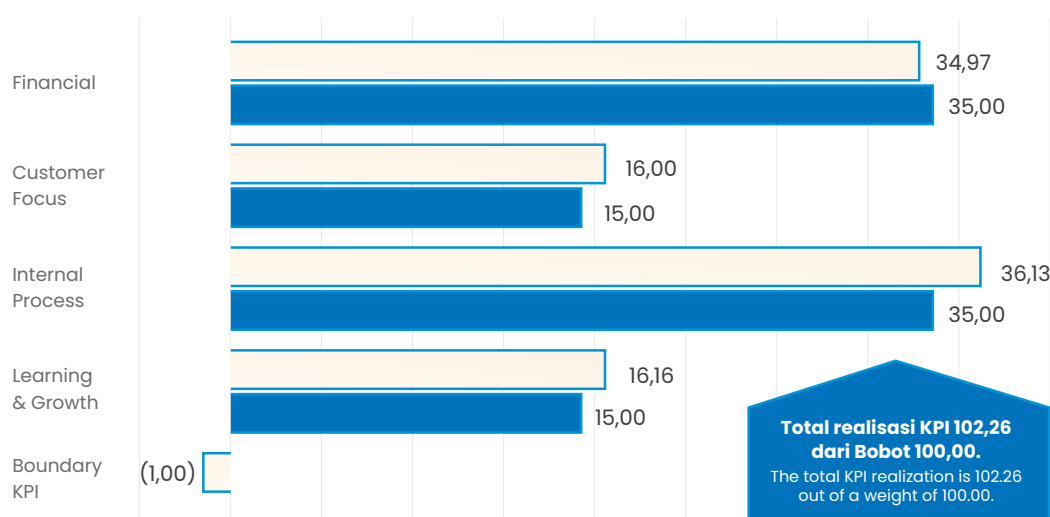
Sebagai representasi dari kepentingan pemegang saham, Dewan Komisaris memantau proses dan hasil penilaian kinerja Direksi. Penilaian kinerja Direksi tahun 2022 ditetapkan oleh pemegang saham melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ("KPSSS") tanggal 12 Agustus 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("KPSSS") Tahun 2022 di mana telah ditetapkan *Key Performance Indicator* ("KPI") Kesepakatan Kinerja Perusahaan tahun 2022. KPI tersebut menjadi dasar penilaian keberhasilan Direksi dalam menjalankan roda organisasi dan usaha PTK.

Performance Assessment of the Board of Directors and the Assessment Basis

As a representation of shareholders' interests, the Board of Commissioners monitors the process and results of the performance evaluation of the Board of Directors. The performance evaluation of the Board of Directors for the year 2022 was determined by the shareholders through a Circular Resolution of the Shareholders dated August 12, 2022, regarding the Company's Work Plan and Budget ("RKAP") for the year 2022, in which Key Performance Indicators ("KPIs") or Company Performance Agreements for 2022 were established. These KPIs serve as the basis for evaluating the success of the Board of Directors in managing the organization and PTK's business.

Bobot dan Realisasi Penilaian Kinerja Direksi

Weight and Realization of Board of Directors Performance Assessment

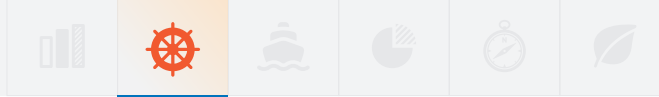


Realisasi KPI Direksi tahun 2022 secara keseluruhan mencapai 102,26% atau melebihi dari bobot 100,00 yang ditetapkan oleh pemegang saham. Seperti yang terlihat pada bagan di atas, hampir seluruh aspek KPI dapat dilampaui oleh Direksi. Hanya aspek *Financial* yang mencatat pencapaian sedikit di bawah KPI, di mana aspek *shipping & marine cost per unit* serta realisasi investasi ("ABI") menjadi aspek yang masih membutuhkan perhatian khusus. Untuk *Boundary KPI*, terdapat *Number of Accident* ("NoA") yang menjadi faktor pengurang atas KPI Direksi. Sebagai bagian dari Pertamina Group, NoA merupakan aspek penting khususnya dalam pengelolaan risiko operasional.

The realization of the Board of Directors Key Performance Indicators ("KPI") in 2022 overall reached 102.26% or exceeded the 100.00 weight set by shareholders. As the chart above shows, almost all KPIs can be exceeded by the Board of Directors. Only the Financial aspect recorded a slightly lower achievement than the KPI. The shipping and marine cost per unit and the realization of investment ("ABI") still require special attention. There is the Number of Accidents ("NoA") for the Boundary KPI, which is a reducing factor for the Board of Directors KPI. As part of the Pertamina Group, NoA is critical, especially in operational risk management.

Selain itu, PTK memiliki pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan yang memberikan perangkat dan metode untuk mengukur aspek keuangan, pertumbuhan, operasi, dan administrasi. Hasil evaluasi atas Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2022 tergolong dalam

In addition, PTK has a measurement of the Company's Health Level that provides tools and methods for measuring financial, growth, operational, and administrative aspects. The evaluation results of the Company's Health Level in 2022 are classified as



kondisi "SEHAT" kategori "AA" dengan skor "92,58", meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencatat pencapaian "90,50".

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada Direksi dan seluruh karyawan PTK. Adanya beberapa catatan dalam realisasi KPI menjadi titik evaluasi bagi peningkatan pengelolaan Perusahaan di masa-masa mendatang.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Pengawasan Penerapan GCG oleh Dewan Komisaris

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* ("GCG") merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan organisasi Perusahaan secara keseluruhan. Prinsip ini dilandasi pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta etika bisnis yang dikembangkan Perusahaan sebagai bagian dari pembentukan iklim usaha yang berkelanjutan. Terutama dengan status sebagai bagian dari *Holding* BUMN Migas, penerapan GCG di lingkup Perusahaan memiliki standar tinggi yang harus dipenuhi oleh seluruh Insan PTK.

Seluruh perangkat atau organ utama GCG telah berjalan dengan baik, yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan atas pengelolaan operasional dan usaha yang dilakukan Direksi. Konsep hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dalam perspektif kemitraan yang strategis.

Dewan Komisaris memandang, penerapan GCG di lingkup PTK telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta harapan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, hingga audit internal, telah dijalankan dengan tujuan menciptakan proses bisnis yang akuntabel. Perusahaan juga menerapkan proses audit independen oleh akuntan publik atas laporan keuangan. Agar independensi akuntan publik terjaga, mekanisme penunjukan akuntan publik dilakukan hingga level persetujuan pemegang saham dalam RUPS, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mekanisme ini diharapkan dapat menciptakan proses audit yang lepas dari benturan kepentingan. Laporan keuangan teraudit yang telah disertai opini dari akuntan publik akan menjadi laporan dasar yang dapat mencerminkan kinerja PTK yang telah disesuaikan dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

"HEALTHY" in the "AA" category with a score of "92.58", an improvement compared to 2021, which recorded an achievement of "90.50".

For this achievement, the Board of Commissioners sends our appreciation to the Board of Directors and all PTK employees. The notes in the KPI realization serve as an evaluation point for improving the Company's management in the future.

The Implementation of Corporate Governance and Supervision of GCG Implementation by the Board of Commissioners

Applying Good Corporate Governance ("GCG") principle is an integral part of the overall organizational development of a company. These principles are based on compliance with applicable regulations and laws and business ethics developed by the Company to create a sustainable business climate. Especially as part of the Oil and Gas SOEs Holding, the implementation of GCG within the Company has high standards that all PTK personnel must meet.

All main GCG tools or organs have been functioning well, namely the General Meeting of Shareholders (RUPS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Board of Commissioners carries out its duties and functions in overseeing the operational and business management carried out by the Board of Directors. The concept of the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out from the perspective of a strategic partnership.

The Board of Commissioners believes that the implementation of GCG within PTK has been carried out in accordance with existing regulations and the expectations of shareholders and all stakeholders. Risk management, internal control systems, and internal audits have been carried out to create an accountable business process. The company also applies an independent audit process by public accountants for financial statements. To ensure the independence of public accountants, the mechanism for appointing them is carried out up to the level of shareholder approval in the RUPS, as regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This mechanism is expected to create an audit process free from conflicts of interest. The audited financial statements, accompanied by the opinion of public accountants, will be the basic report that reflects the performance of PTK in accordance with the applicable financial reporting standards in Indonesia.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

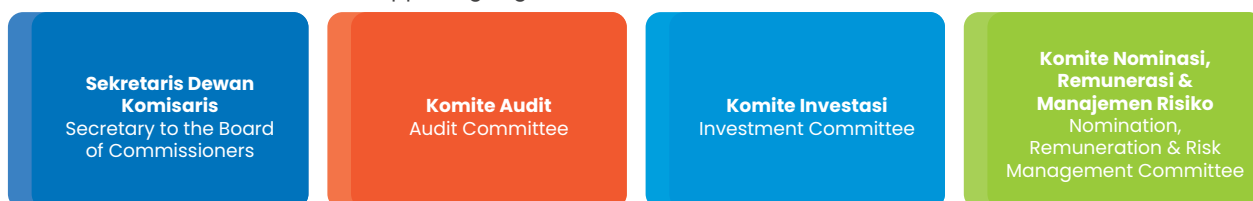
Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas kepatuhan PTK dalam menjalankan penilaian penerapan GCG secara periodik tahunan, sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Hasil *assessment* penerapan GCG di tahun 2022 menunjukkan skor 87,20 kategori "Sangat Baik", meningkat dari hasil *assessment* tahun 2021 dengan hasil 79,50 dengan kategori "Baik". Peningkatan ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan dari waktu ke waktu akan penerapan GCG di lingkup Perusahaan.

Melalui penerapan prinsip GCG dan fungsi pengawasan yang dijalankan, Dewan Komisaris berharap untuk dapat menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan PTK secara keseluruhan, sesuai prinsip korporasi yang dijalankan di Indonesia.

Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 4 (empat) organ pendukung, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners.



Seluruh organ pendukung di atas memiliki peran penting bagi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Penilaian kinerja terhadap organ pendukung dilakukan secara berkala:

1. Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat Komite Audit, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis bagi Komite Audit, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi. Selain itu, penilaian kinerja Komite Audit dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program

The Board of Commissioners also appreciates PTK's compliance in conducting periodic annual assessments of GCG implementation in accordance with the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, regarding the Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating Good Corporate Governance Implementation in SOEs. The GCG implementation assessment results in 2022 showed a score of 87.20 in the "Very Good" category, an increase from the assessment results in 2021, which was 79.50 in the "Good" category. This improvement shows sustainable improvement over time in implementing GCG within the Company.

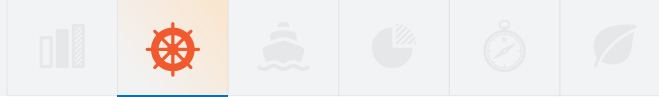
Through the implementation of GCG principles and the supervision function carried out, the Board of Commissioners hopes to create a balance in the overall management of PTK in accordance with corporate regulations practiced in Indonesia.

Assessment of the Performance of the Supporting Organs of the Board of Commissioners

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by 4 (four) supporting organs, as shown in the chart below.

All supporting organs above play an essential role in carrying out the supervisory function undertaken by the Board of Commissioners. Performance evaluations of the supporting organs are conducted periodically:

1. Performance appraisal of the Audit Committee is carried out at least 1 (once) a year with performance assessment indicators as determined by the Board of Commissioners, including attendance levels at Audit Committee meetings, attendance levels at internal Board of Commissioners meetings, written contributions to the Audit Committee, the accuracy of written recommendations, the accuracy of oral recommendations, active role (initiative), and innovation. Additionally, the Audit Committee's



kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang audit, kecukupan proses pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya. Berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode 360 derajat dan AKHLAK *Behavioural Survey* ("ABS"), Dewan Komisaris memberikan penilaian "High" kepada kinerja Komite Audit tahun 2022.

2. Penilaian kinerja Komite Investasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat Komite Investasi, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis bagi Komite Investasi, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi. Selain itu, penilaian kinerja Komite Investasi dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Investasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Investasi yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang investasi. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Investasi untuk periode jabatan berikutnya. Berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode 360 derajat dan AKHLAK *Behavioural Survey* ("ABS"), Dewan Komisaris memberikan penilaian "High" kepada kinerja Komite Investasi tahun 2022.

3. Penilaian kinerja Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko ("KNRM") dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat KNRM, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis bagi KNRM, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi. Selain itu, penilaian kinerja KNRM dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja KNRM dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan KNRM yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang nominasi,

performance evaluation is based on the realization and completion of work programs outlined in the Audit Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report, which covers the committee's tasks in the audit field, adequacy of internal control processes, and preparation of financial statements. The evaluation results serve as considerations for the Board of Commissioners in reappointing and/or dismissing Audit Committee members for the next term. Based on evaluations using the 360-degree method and AKHLAK Behavioral Survey ("ABS"), the Board of Commissioners gave a "High" rating to the Audit Committee's performance in 2022.

2. Performance appraisal of the Investment Committee is carried out at least 1 (once) a year with performance assessment indicators as determined by the Board of Commissioners, including attendance levels at Investment Committee meetings, attendance levels at internal Board of Commissioners meetings, written contributions to the Investment Committee, the accuracy of written recommendations, the accuracy of oral recommendations, active role (initiative), and innovation. Additionally, the Investment Committee's performance evaluation is based on the realization and completion of work programs outlined in the Investment Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Investment Committee report, which covers the committee's tasks in the investment field. The evaluation results serve as considerations for the Board of Commissioners in reappointing and/or dismissing Investment Committee members for the next term. Based on evaluations using the 360-degree method and AKHLAK Behavioral Survey ("ABS"), the Board of Commissioners gave a "High" rating to the Investment Committee's performance in 2022.

3. The Nomination, Remuneration & Risk Management ("KNRM") Committee's performance evaluation is conducted at least once a year with performance evaluation indicators determined by the Board of Commissioners, including attendance levels at KNRM meetings, attendance levels at internal Board of Commissioners meetings, written contributions to the KNRM, the accuracy of written recommendations, the accuracy of oral recommendations, active role (initiative), and innovation. Additionally, the KNRM Committee's performance evaluation is based on the realization and completion of work programs outlined in the KNRM Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the KNRM report, which

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

remunerasi, dan pengawasan atas manajemen risiko. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota KNRM untuk periode jabatan berikutnya. Berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode 360 derajat dan AKHLAK *Behavioural Survey* ("ABS"), Dewan Komisaris memberikan penilaian "High" kepada kinerja Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko tahun 2022.

Atas kinerja yang telah ditunjukkan seluruh organ pendukung, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Pandangan atas Penerapan Whistleblowing System ("WBS") Perusahaan dan Peran Dewan Komisaris dalam WBS Perusahaan

Perusahaan memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau WBS, yang memungkinkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal untuk dapat menyampaikan pengaduan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan Perusahaan. Sistem ini dikembangkan dan dikelola secara terpusat oleh entitas induk, PT Pertamina (Persero) sebagai bagian dari komitmen Pertamina Group untuk dapat menerapkan prinsip pengelolaan korporasi yang sehat dan akuntabel.

Dalam WBS yang telah diterapkan di lingkup PTK, Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas atas laporan yang masuk, sekaligus sebagai pihak yang berwenang atas laporan masuk yang tereskalasi hingga ke Dewan Komisaris. Bila laporan yang masuk terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan, diperlukan investigasi dari pihak eksternal yang independen untuk dapat memberikan perspektif yang bersih sebagai dasar bagi pemberian sanksi. Demikian pula jika pengaduan pelanggaran melibatkan anggota Dewan Komisaris, laporan yang diterima oleh Fungsi Internal Audit PT Pertamina (Persero) akan ditelaah untuk ditindaklanjuti jika memang diperlukan tindakan yang lebih jauh.

Di sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah menerima informasi dari PT Pertamina (Persero) bahwa terdapat 5 (lima) pengaduan yang masuk melalui mekanisme dan saluran WBS yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Seluruh laporan WBS di atas ditindaklanjuti oleh Fungsi terkait di PT Pertamina (Persero).

covers the committee's tasks in the nomination, remuneration, and supervision of risk management fields. The evaluation results serve as considerations for the Board of Commissioners in reappointing and/or dismissing KNRM Committee members for the next term. Based on evaluations using the 360-degree method and AKHLAK Behavioral Survey ("ABS"), the Board of Commissioners gave a "High" rating to the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee's performance in 2022.

The Board of Commissioners expresses their highest gratitude and appreciation for the performance demonstrated by all supporting organs.

Views on the Implementation of the Company's Whistleblowing System ("WBS") and the Role of the Board of Commissioners in the Company's WBS

The Company has a Whistleblowing System, or WBS, which allows internal and external stakeholders to submit complaints regarding violations committed by members of the Board of Commissioners, Directors or employees. This system was developed and managed centrally by the parent entity, PT Pertamina (Persero), as part of Pertamina Group's commitment to applying the principles of sound and accountable corporate management.

In the WBS that has been implemented within the scope of PTK, the Board of Commissioners acts as a supervisor for incoming reports and is the authority on incoming reports that are escalated up to the Board of Commissioners. If there is solid and convincing evidence in the incoming report, an independent external party investigation is needed to provide a clean perspective as a basis for imposing sanctions. Likewise, suppose a complaint of violation involves a member of the Board of Commissioners. In that case, the report received by the Internal Audit Function of PT Pertamina (Persero) will be reviewed for follow-up if further action is required.

Throughout 2022, the Company has received information from PT Pertamina (Persero) that there were 5 (five) complaints submitted through the WBS mechanism and channels owned by PT Pertamina (Persero). All WBS reports above were followed up by the relevant functions at PT Pertamina (Persero).

Informasi tentang Susunan Dewan Komisaris

Di sepanjang tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022 adalah sama.

Information about the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2022 there were no changes to the composition of the Board of Commissioners. Thus, the composition and structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2021 and December 31, 2022 are the same.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Amir Hamzah	28 Mei 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1 May 28, 2021 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period
Komisaris Commissioner	Andi Saiful Haq	11 September 2020 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1 September 11, 2020 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period
Komisaris Commissioner	Khalid Zabidi	12 November 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1 November 12, 2021 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period
Komisaris Commissioner	Agustinus Bensik Lomboan	9 Desember 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1 December 9, 2021 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period

Tidak terdapat pergantian dan perubahan susunan Dewan Komisaris sejak 1 Januari 2023 hingga disahkannya laporan tahunan ini tertanggal Mei 2023. Atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

The composition of the Board of Commissioners remained the same from 1 January 2023 until the ratification of this annual report May 2023. The Board of Commissioners expresses its most profound gratitude for the trust given by the Shareholders.

Pandangan atas Proyeksi Tahun 2023

Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun penuh tantangan yang muncul dari tekanan inflasi, perlambatan ekonomi, dan keberlanjutan konflik geopolitis. IMF dalam *World Economic Outlook* ("WEO") Oktober 2022 memproyeksikan pertumbuhan global akan melambat tajam menjadi 2,7% di tahun 2023 berbanding dengan proyeksi tahun 2022 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2%. Isu resesi perekonomian global menjadi gambaran besar atas kondisi perekonomian global, terutama masih ketatnya kebijakan moneter di sejumlah negara, konflik geopolitik yang masih berlanjut, tingkat suku bunga yang berlanjut dalam posisi yang cukup tinggi, inflasi yang masih tinggi akibat kenaikan harga energi, bahan baku industri, dan bahan pangan, hingga melambatnya perdagangan global.

Views on the 2023 Projections

2023 is predicted to be a year full of challenges arising from inflationary pressures, economic slowdowns, and continuing geopolitical conflicts. In the October 2022 *World Economic Outlook* ("WEO"), the IMF projects that global growth will slow down sharply to 2.7% in 2023 compared to the 2022 projection, with a projected global economic growth of 3.2%. The issue of the global economic recession is a big picture of global economic conditions, especially the still tight monetary policies in several countries, geopolitical conflicts that continue, interest rates continue to be in a reasonably high position, inflation is still high due to rising energy prices, industrial raw materials, and food, to the slowdown in global trade.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Namun demikian, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh kuat dibanding sebagian besar negara lain. Berdasarkan rekam jejak historis, resesi global umumnya berdampak lebih sedikit bagi negara-negara berkembang, termasuk dan khususnya Indonesia. Tingginya kontribusi permintaan domestik dan rendahnya eksposur terhadap ekspor/impor membantu menopang perekonomian Indonesia pada saat terjadi kejutan ekonomi global.

Dalam dokumen Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara ("RAPBN") tahun 2023, Pemerintah Indonesia memproyeksikan perekonomian Indonesia dapat tumbuh mencapai 5,3%, dengan inflasi yang mampu ditekan pada level 3,3%. Penurunan inflasi ini tak lepas dari meredanya imbas kenaikan harga BBM. Nilai tukar Rupiah akan berada pada angka yang stabil, sebesar Rp14.750 per Dolar AS. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia diharapkan akan berada pada angka USD90 per barel, tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Dewan Komisaris menyambut baik atas proyeksi kinerja Perusahaan sebagaimana tertuang dalam RKAP tahunan dan perencanaan bisnis 5 (lima) tahunan. Dengan optimisme perekonomian Indonesia serta target *lifting* migas yang terus meningkat, faktor eksternal Perusahaan tentu akan menjadi hal positif yang dapat memberikan daya dorong bagi pertumbuhan di tahun 2023. Dengan kompetensi, reputasi, dan posisi yang dimiliki, PTK tentu memiliki sejumlah hal positif yang dapat memberikan keuntungan bagi pertumbuhan kinerja.

Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung Direksi untuk dapat mencapai proyeksi kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan. Proyeksi peningkatan operasi dan pemasaran yang terdiri dari *Commission Days*, pengelolaan pelabuhan, *cargo handling*, *Commercial Days*, dan *Call Keagenan/Agency Call* diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kinerja keuangan, di mana pendapatan diharapkan mampu meningkat 7% s.d 13% dari realisasi tahun 2022.

However, Indonesia's economy is expected to grow more potent than most other countries. Based on historical track records, the global recession generally has less impact on developing countries, including and especially Indonesia. The high contribution of domestic demand and low exposure to exports/imports helped sustain the Indonesian economy during global economic shocks.

In the 2023 State Budget and Revenue Expenditure Plan ("RAPBN") document, the Government of Indonesia projects that the Indonesian economy can grow by up to 5.3%, with inflation being able to be kept at 3.3%. This decline in inflation could not be separated from the easing of the impact of rising fuel prices. The Rupiah exchange rate will be stable at Rp 14,750 per US Dollar. Meanwhile, the cost of Indonesian crude oil is expected to be at USD90 per barrel, the highest in the last 5 (five) years.

The Board of Commissioners welcomes the Company's performance projections as stated in the annual RKAP and 5 (five) year business plan. With the optimism of the Indonesian economy and the target of oil and gas lifting, which continues to increase, the Company's external factors will undoubtedly be positive things that can provide the impetus for growth in 2023. With competence, reputation and position owned, PTK certainly has several positive things that can give an advantage for performance growth.

The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors in achieving the projected 2023 performance. The projected increase in operations and marketing consisting of Commission Days, port management, cargo handling, Commercial Days, and Agency Calls is expected to drive growth in financial performance, where revenue is expected to increase by 7% to 13% from the realization in 2022.



Penutup

Dengan seluruh pencapaian kinerja yang telah ditorehkan di tahun 2022, Dewan Komisaris menyambut baik seluruh dedikasi yang telah ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses operasi dan bisnis PTK. Kepada pemegang saham, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasinya kepada Direksi dan seluruh insan PTK yang telah menunjukkan semangat kerja yang tinggi dalam mengembangkan Perusahaan. Semoga, seluruh kebersamaan ini dapat menjadi landasan bagi PTK untuk dapat terus menunjukkan potensi terbaiknya di masa-masa mendatang.

Closing Remarks

With all the performance achievements made in 2022, the Board of Commissioners welcomes all the dedication shown by all parties involved in the PTK operational and business processes. To the shareholders, the Board of Commissioners expresses our gratitude for the trust that has been given. The Board of Commissioners also sends our appreciation to the Board of Directors and all PTK personnel who have shown high morale in developing the Company. This togetherness can become the foundation for PTK to continue to offer its best potential in the future.

Jakarta, Mei | May 2023

Atas nama Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental,
On behalf of Board of Commissioners of PT Pertamina Trans Kontinental

Amir Hamzah

Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Mengelola tantangan adalah bagian dari upaya Perusahaan untuk terus melangkah dengan matang dalam menatap masa depan.

Managing challenges is part of the Company's efforts to continue to maturely step forward in facing the future.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Sebagai bagian dari *Holding* Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Migas di bawah PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Trans Kontinental mengambil peran dan turut berkontribusi dalam perkembangan industri migas nasional, khususnya pada sektor logistik energi. Atas dasar kompetensi inilah, PTK terus mengupayakan untuk meningkatkan kapabilitasnya dan menghadirkan jasa logistik untuk dapat bersama-sama seluruh pemangku kepentingan mewujudkan ketahanan energi nasional.

Kebijakan Strategis dan Pencapaian Tahun 2022

Ketidakpastian perekonomian global memberikan tantangan yang cukup besar bagi situasi di sepanjang tahun 2022. Pasokan global yang timpang dalam proses pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19, serta konflik Rusia dan Ukraina, berpengaruh besar atas krisis energi dan komoditas, yang kemudian berpengaruh terhadap meningkatnya inflasi. Kebijakan moneter berbagai negara melalui kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi global, serta *capital flight* akibat kebijakan "*Cash is The King*" dari investor negara maju, mewarnai kondisi tahun 2022.

Perekonomian nasional sendiri mampu bertahan dengan cukup baik, dan mencatat kinerja sebagai salah satu yang terbaik di tingkat Asia Tenggara dan bahkan di level G20. Badan Pusat Statistik ("BPS") merilis data bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 sebesar 5,31%, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 3,70%. Berakhirnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") menjadi salah satu poin

Dear distinguished Shareholders and Stakeholders,

As part of the Oil and Gas State-Owned Enterprise Holding under PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Trans Kontinental plays a role and contributes to developing the development of the national oil and gas industry, especially in the energy logistics sector. Based on this competence, PTK strives to improve its capabilities and provide logistics services so all stakeholders can jointly realize national energy security.

Strategic Policies and Achievements in 2022

Global economic uncertainty posed significant challenges for the situation throughout 2022. The uneven global supply in the post-COVID-19 economic recovery process and the conflict between Russia and Ukraine greatly impacted the energy and commodity crisis, which then affected the increasing inflation. The 2022 condition was filled with the various countries' monetary policies through interest rate hikes to curb global inflation, as well as capital flight resulting from the "*Cash is The King*" policy of advanced country investors.

The national economy has been able to withstand quite well, recording performance as one of the best in Southeast Asia and even at the G20 level. The data released by the Statistics Indonesia ("BPS") revealed that the Indonesia's economic growth in 2022 was recorded at 5.31%, up from 3.70% in 2021. The end of the Implementation of Restrictions on Community Activities ("PPKM") policy was a crucial point that drove the massive



Nepos MT Pakpahan

Direktur Utama
President Director

Laporan Direksi
Board of Directors Report

penting yang mendorong pertumbuhan kegiatan sosial kemasyarakatan secara massif. Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk mengatasi meningkatnya pengangguran yang terjadi akibat pandemi COVID-19, salah satunya melalui upaya melanjutkan proyek-proyek pembangunan.

Pada sektor migas, indikator terjaminnya suplai terlihat dari ketersediaan energi terhadap kebutuhan dalam negeri. Terjaminnya ketersediaan pasokan migas untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas. Di samping itu, permintaan minyak global yang semakin pulih mendorong berlanjutnya pemulihan aktivitas industri global dan penerbangan antar wilayah. Di saat yang sama, produksi minyak juga mulai mengalami peningkatan seiring harga yang mulai meningkat dan *rig-rig* yang mulai kembali beraktivitas.

Isu energi dalam sektor migas menjadi tema penting di tahun 2022, terutama melalui penyelenggaraan G20 di Bali. Penggunaan Bahan Bakar Minyak ("BBM") yang ramah lingkungan terus didorong oleh Pemerintah Indonesia, terutama dengan target Pemerintah Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emission* di tahun 2060. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mendorong regulasi untuk perubahan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di beberapa *smelter*.

Dalam menjalankan usahanya, PTK membagi segmen usahanya ke dalam 3 (tiga) kegiatan usaha, yaitu *Shipping Activities*, *Marine Services*, dan *Logistics Services*.

growth of social community activities. The Indonesian government continues to work hard to address the increasing unemployment caused by the COVID-19 pandemic, one of the ways was by the efforts to continue the development projects.

In the oil and gas sector, the indicator of guaranteed supply is evident from the availability of energy to domestic needs. Ensuring the availability of oil and gas supplies to meet domestic markets can be considered by optimizing domestic production and controlling oil and gas imports and exports to reduce the oil and gas balance of payments deficit. In addition, the global demand for oil that is recovering is driving the continued recovery of international industrial activities and inter-regional flights. At the same time, oil production is also starting to increase as prices rise and rigs become active again.

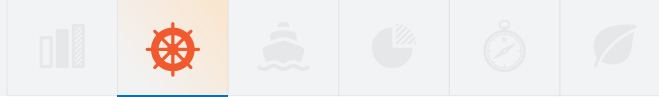
The energy issue in the oil and gas sector has become an important theme in 2022, primarily through the G20 in Bali. The Indonesian government continues to encourage the use of environmentally friendly fuels, especially with the Indonesian government's target to achieve Net Zero Emissions by 2060. To that end, the Indonesian government is pushing for regulations for using environmentally friendly fuels in several smelters.

In carrying out its business, PTK divides its business segments into three activities: Shipping Activities, Marine Services

Kegiatan Usaha Pertamina Trans Kontinental

Pertamina Trans Continental
Business Activities





Shipping Activities adalah layanan PTK terkait kapal yang terdiri dari 9 (sembilan) sub-segmen bisnis antara lain *ship utilization (own-fleet charter out & brokerage)*; *ship agency*; *bunker handling*; *ship management*; *crewing*; *fresh water supply (ship)*; *ship to ship provider*; *ship repair/dockyard* dan *ship vetting*.

Marine Services adalah layanan PTK di bidang marine yang terdiri dari 12 sub-segmen bisnis antara lain *pilotage & towage*; *dredging*; *hydrographic & oceanographic surveys*, *underwater landscape mapping*; *Recognized Security Organization for ISPS Code*; *underwater work services*; *fresh water supply (industrial)*; *waste management*; *port management & operations*; *port infrastructure & facility maintenance*; *port permits & licenses*; *provision of Mooring Master & POAC* dan *oil spill response*.

Logistic Services merupakan layanan PTK di bidang logistic yang terdiri dari 5 (lima) sub-segmen bisnis antara lain *custom clearance for ships*; *freight forwarding*; *logistic base (stevedoring, cargodoring, open yard, warehousing)*; *general service* dan *ship logistic supply (ship chandler)*.

Di tahun 2022 Perusahaan berupaya mengembangkan operasi dan usahanya melalui beberapa inisiatif, yaitu:

- *Shipping Activities*
 - a. Pemetaan, penilaian dan evaluasi kembali atas kapal-kapal Pertamina yang dialihkan kepada PTK agar dapat terutilisasi secara optimal sehingga dapat ditentukan langkah tindak lanjut atas kapal yang dinilai tidak produktif.
 - b. Membidik pengembangan ke segmen pasar penyediaan kapal di *Subholding Upstream*, dengan tetap menjaga aspek HSSE dan *operational excellence* kapal untuk *existing customer*.
 - c. Melanjutkan penerapan program *Computerized Maintenance Management System* pada kapal milik guna menjaga kehandalan kapal untuk mencapai target *commission days* dan *commercial days*.
 - d. Meningkatkan *HSSE excellence* dan *operational excellence* melalui program pelatihan/peningkatan kompetensi *crew* guna menjaga kepercayaan pelanggan.
 - e. Menerapkan *e-Procurement* dan strategi kontrak payung dengan *vendor/supplier spare part* terkait pemenuhan *maintenance* kapal untuk mencapai target *commission* dan *commercial days*.

Shipping Activities is a ship-related PTK service consisting of 9 (nine) business sub-segments including *ship utilization (own-fleet charter out & brokerage)*, *ship agency*, *bunker handling*, *ship management*, *ship manning*, *fresh water supply (ship)*, *ship-to-ship provider*, *ship repair/shipyard*, and *ship inspection*.

Marine Services is a PTK service in the marine sector consisting of 12 business sub-segments including *pilotage & towage*, *dredging*, *hydrographic & oceanographic surveys*, *underwater landscape mapping*, *Recognized Security Organization for ISPS Code*, *underwater work services*, *fresh water supply (industrial)*, *waste management*, *port management and operations*, *maintenance of port infrastructure & facilities*, *port licensing and permits*, *provision of Mooring Master & POAC*, and *oil spill response*.

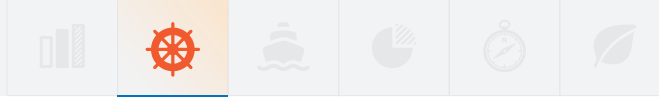
Logistic Services is PTK's service in logistics which consists of 5 (five) business sub-segments including *custom clearance for ships*; *freight forwarding*; *logistic base (loading and unloading, cargodoring, open yard, warehousing)*; *general services* and *ship logistic supply (ship chandler)*.

In 2022 the Company seeks to develop its operations and business through several initiatives, namely:

- *Shipping Activities*
 - a. Mapping, assessing and re-evaluating Pertamina's ships transferred to PTK so that they can be utilized optimally so that follow-up steps can be determined for ships that are considered unproductive.
 - b. Targeting the development of the ship supply market segment in the *Upstream Subholding* while maintaining the HSSE aspect and ship operational excellence for existing customers.
 - c. Continue implementing the *Computerized Maintenance Management System* program on owned ships to maintain ship reliability and achieve target commission and commercial days.
 - d. Improving HSSE and operational excellence through training programs/improvement of crew competence to maintain customer trust.
 - e. Implement *e-Procurement* and umbrella contract strategies with spare part vendors/suppliers related to fulfilling ship maintenance to achieve target commissions and commercial days.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

- *Marine Services*
 - a. Memperkuat sinergi dengan sesama entitas grup Pertamina dan entitas BUMN untuk mengembangkan peluang bisnis *marine* dan juga sebagai upaya untuk mendorong akselerasi pertumbuhan pasar segmen *shipping activities* dan *logistic services* melalui penawaran paket pekerjaan dengan skema *bundling* yang memiliki keunggulan *pricing strategy* yang kompetitif dan layanan *one-stop-services*.
 - b. Investasi penambahan alat penunjang kegiatan *oil spill response* dan teknik bawah air.
 - c. Sertifikasi dan peningkatan kompetensi pekerja untuk pekerjaan *marine & port engineering*, perawatan sarfas pelabuhan, pengerukan alur pelayaran.
 - d. Digitalisasi proses bisnis.
- *Logistic Services*
 - a. Investasi penambahan *heavy equipment* dan *cargo handling* pada *shorebase* Tanjung Batu untuk meningkatkan *operational excellence*.
 - b. Pengembangan bisnis *logistic shorebase* Kabil melalui kemitraan strategis.
 - c. Perluasan potensial *market logistic shorebase* yang bisa menjadi hub atau *centre point* yang berdekatan dengan proyek eksplorasi migas.
- Digitalisasi
 - a. Digitalisasi di seluruh mata rantai bisnis (*end to end*) untuk menunjang produktivitas dan kecepatan pengambilan keputusan.
 - b. Meningkatkan *maritime cyber security awareness* pada awak kapal dan operator untuk keamanan pertukaran informasi elektronik.
- Keuangan
 - a. Meningkatkan kelancaran arus kas dan kesehatan finansial Perusahaan melalui restrukturisasi skema pinjaman dari eksternal.
 - b. Percepatan perolehan piutang macet untuk menjaga arus kas Perusahaan.
- Organisasi dan Manajemen Portofolio
 - a. Transformasi budaya organisasi yang *agile* dan kompetitif guna menghadapi dunia persaingan yang VUCA.
 - b. Mengembangkan organisasi serta *workforce planning* yang mendukung perkembangan bisnis yang selaras dengan arah bisnis entitas induk.
 - c. Meningkatkan *Strategic People Development & Management*.
 - d. Optimalisasi portofolio anak perusahaan melalui *rebranding*.
 - e. Inisiasi atas program-program yang mendukung HSE *excellence* dan peningkatan rating ESG, seperti pengurangan emisi CO₂, penggunaan energi alternatif tenaga surya, dan lain-lain.
- Marine Services
 - a. Strengthening synergies with fellow Pertamina group entities and SOE entities to develop marine business opportunities and also as an effort to accelerate market growth in the shipping activities and logistics services segment through offering work packages with bundling schemes that have the advantages of competitive pricing strategies and one-stop services.
 - b. Investment in additional tools to support oil spill response activities and underwater techniques.
 - c. Certification and improvement of worker competency for marine & port engineering work, port infrastructure maintenance, and shipping channel dredging.
 - d. Digitalization of business processes.
- Logistics Services
 - a. Investment in adding heavy equipment and cargo handling at the Tanjung Batu shore base to improve operational excellence.
 - b. Kabil shore base logistics business development through strategic partnerships.
 - c. Potential shore base logistics market expansion, which can become a hub or centre point adjacent to oil and gas exploration projects.
- Digitization
 - a. Digitalization throughout the business chain (*end to end*) to support productivity and speed of decision-making.
 - b. Increase maritime cyber security awareness among ship crews and operators to secure electronic information exchange.
- Finance
 - a. Improving the smooth cash flow and the Company's financial health through restructuring external loan schemes.
 - b. Acceleration of the acquisition of bad debts to maintain the Company's cash flow.
- Organization and Portfolio Management
 - a. Transformation of an agile and competitive organizational culture to face the world of VUCA competition.
 - b. Developing an organization and workforce planning that supports business development in line with the primary entity's business direction.
 - c. Improving Strategic People Development & Management.
 - d. Optimization of the subsidiary portfolio through rebranding.
 - e. Initiate programs supporting HSE excellence and increasing ESG ratings, such as reducing CO₂ emissions, using alternative solar energy, and others.



Struktur permodalan juga menjadi perhatian, di mana permodalan memberikan gambaran tentang kemampuan Perusahaan dalam mengelola utang berbasis bunga dan ekuitas atau modal sendiri. Di tahun 2022, rasio utang berbunga terhadap ekuitas sebesar 7,36%, jauh di bawah kemampuan ekuitas Perusahaan. Hal ini tentu memberikan profil yang positif dan menjadi jaminan akan kelangsungan usaha jangka panjang Perusahaan, khususnya risiko *default* dalam pengelolaan modal kerja.

Dengan pengembangan berbagai kebijakan strategi di atas, PTK mampu mencatat pencapaian dan keberhasilan penting di sepanjang tahun 2022. Pendapatan usaha meningkat 25,89%, dari Rp3,80 triliun di tahun 2021 menjadi Rp4,78 triliun di tahun 2022. Laba tahun berjalan meningkat 38,17%, dari Rp530,54 miliar di tahun 2021 menjadi Rp733,03 miliar tahun 2022. Sedangkan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk meningkat 38,08%, dari Rp530,54 miliar di tahun 2021 menjadi Rp732,57 miliar untuk tahun 2022. EBITDA mengalami kenaikan hingga 52,27%, dari Rp1,11 triliun di tahun 2021 menjadi Rp1,69 triliun di tahun 2022.

Jumlah aset mengalami pertumbuhan 5,14%, dari Rp7,80 triliun di tahun 2021 menjadi Rp8,20 triliun di tahun 2022. Pertumbuhan aset Perusahaan terutama ditopang oleh aset lancar yang mampu tumbuh hingga 12,99%. Jumlah liabilitas mengalami kenaikan 5,57% yang terutama didorong oleh liabilitas jangka pendek. Sedangkan jumlah ekuitas mengalami pertumbuhan 4,59%.

Pencapaian Target Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") tahun 2022 yang telah disahkan melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ("KPSSS") tanggal 12 Agustus 2022, Perusahaan menunjukkan pengelolaan operasi dan bisnis yang mampu berjalan pada jalur yang telah ditetapkan. Seluruh kinerja operasi dan pemasaran mencatat pencapaian yang cukup baik, meskipun terdapat *Contract of Affreightment* ("COA") yang hanya membukukan 41,88% terhadap target yang ditetapkan karena adanya perubahan penyewaan kapal. Sebelumnya COA menjadi *Time Charter* ("TC").

Pada kinerja keuangan laba/rugi, realisasi pendapatan dibukukan 90,64%, sedangkan beban *overhead* justru mampu ditekan hingga tercatat hanya menyerap 66,45% terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan efisiensi ini memberikan nilai tambah bagi profitabilitas, di mana laba tahun berjalan mampu membukukan 131,07% dan EBITDA sebesar 129,97%, jauh di atas target yang telah ditetapkan.

Capital structure is also a concern, where capital provides an overview of the Company's ability to manage interest bearing debt and equity or its capital. In 2022, the interest-bearing debt-to-equity ratio was 7.36%, far below the Company's equity capacity. This certainly provides a favourable profile and guarantees the long-term business continuity of the Company, especially the risk of default in working capital management.

With the development of various strategic policies above, PTK achieved significant accomplishments and successes throughout 2022. Revenue increased by 25.89%, from Rp 3.80 trillion in 2021 to Rp 4.78 trillion in 2022. Profit for the Year increased by 38.17%, from Rp 530.54 billion in 2021 to Rp 733.03 billion in 2022. Meanwhile, Profit for the year attributable to owner of the parent entity increased by 38.08%, from Rp 530.54 billion in 2021 to Rp 732.57 billion in 2022. EBITDA increased by 52.27%, from Rp 1.11 trillion in 2021 to Rp 1.69 trillion in 2022.

The total assets grew 5.14%, from Rp 7.80 trillion in 2021 to Rp 8.20 trillion in 2022. The Company's assets growth was mainly supported by current assets which managed to grow 12.99%. The total liabilities increased by 5.57%, primarily driven by current liabilities. Meanwhile, total equity increased by 4.59%.

Achievement of 2022 Targets

Compared to the 2022 Company Work and Budget Plan ("RKAP") that has been approved through the Circular Resolution of the Shareholders ("KPSSS") dated August 12, 2022, the Company shows operational and business management that is able to run on the established track. All operating and marketing performances recorded quite good achievements. However, *Contracts of Affreightment* ("COA") only recorded 41.88% against the target due to changes in ship charter. Previously COA became *Time Charter* ("TC").

Regarding financial profit/loss performance, revenue realization was recorded at 90.64%. In comparison, overhead expenses could be suppressed until it was recorded as only absorbing 66.45% of the established budget. This efficiency success provided added value for profitability, where profit for the year was recorded at 131.07% and EBITDA at 129.97%, far above the established targets.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Pada posisi keuangan, realisasi nilai aset tahun 2022 mencatat pencapaian 93,55% terhadap target, hal ini disebabkan investasi yang hanya terealisasi 43,29% untuk investasi *Business Development* dan 24,71% untuk *Non Business Development* terhadap target tahun 2022. Liabilitas tercatat di bawah target, di mana terdapat beberapa pelunasan utang jangka panjang. Sedangkan ekuitas membukukan 88,29% terhadap target tahun 2022 yang disebabkan adanya pembayaran dividen untuk tahun 2021.

Kendala, Tantangan dan Solusi yang Ditempuh Perusahaan

Di sepanjang tahun 2022 Perusahaan mendapatkan adanya beberapa kendala dan tantangan yaitu:

1. Sumber pendanaan untuk investasi masih terbatas.
2. Keandalan armada dan mutu layanan belum sepenuhnya memenuhi *best practice*.
3. Kurangnya *cost consciousness & market analysis* karena lebih banyak berbisnis di *captive market*.
4. Utilisasi teknologi informasi terkait operasional, baik untuk urusan administrasi, teknis, dan integrasi data informasi belum dilakukan menyeluruh.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan, beberapa program yang menjadi solusi bagi PTK untuk menunjang pencapaian dalam mengatasi kendala dan tantangan di tahun 2022 antara lain *strategic initiatives*, *revenue enhancement* dan *cost optimization*.

In terms of financial position, the realization of assets in 2022 recorded an achievement of 93.55% of the target. This was because investment was only realized at 43.29% for Business Development investments and 24.71% for Non-Business Development of the 2022 target. Liabilities were recorded below target, where there were several long-term debt repayments. Meanwhile, equity recorded 88.29% of the 2022 target due to dividend payments for 2021.

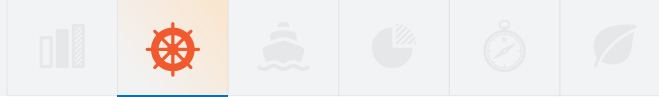
Challenges and Solutions Faced by the Company

Throughout 2022 the Company faced several obstacles and challenges, namely:

1. Funding sources for investment are still limited.
2. Fleet reliability and service quality must fully comply with best practices.
3. Lack of cost consciousness & market analysis because most do business in captive markets.
4. Utilization of information technology related to operations for administrative and technical matters and integration of information data has yet to be carried out thoroughly.

To overcome obstacles and challenges, factors that support the achievement of the PTK include Strategic Initiatives, Revenue Enhancement, and Cost Optimization.





Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* ("GCG") didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dasar-dasar penerapan GCG yang telah ditetapkan dalam Pertamina Group menegaskan penerapan prinsip GCG sebagai bagian dari perhatian regulator atas keterlibatan pemegang saham dan pemangku kepentingan bagi dunia usaha.

Sebagai bagian dari *Holding* BUMN Migas, PTK memiliki kewajiban untuk memenuhi kepatuhan tersebut. Di samping itu, prinsip GCG di lingkungan PTK dikembangkan dalam rangka menghindari Insan PTK dari praktik-praktik korporasi tidak sehat yang dapat merugikan baik PTK sendiri, pemegang saham, maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip GCG diharapkan mampu memberikan citra korporasi yang baik, yang tentunya akan memberikan dasar kepercayaan bagi PTK.

Pemenuhan prinsip GCG diwujudkan melalui keberadaan infrastruktur GCG di lingkup organisasi PTK, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Dewan Komisaris dan Direksi. Prinsip *two board*, atau 2 (dua) badan yang dianut oleh Perseroan Terbatas di Indonesia telah diterapkan oleh PTK melalui hubungan Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris melakukan peran dan fungsi dalam pengawasan atas pengelolaan kegiatan operasional dan bisnis oleh Direksi. Sementara Direksi, dibantu oleh organ pendukungnya yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, melakukan pengelolaan organisasi berbasis akuntabilitas dan transparansi. Audit Internal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan organisasi Perusahaan yang memiliki pengendalian, pengawasan dan mitigasi atas risiko usaha. Bekerjasama dengan Komite Audit yang bernaung di bawah Dewan Komisaris, Audit Internal memegang peran penting dalam memberikan evaluasi yang strategis bagi pengembangan PTK ke depan.

Di samping infrastruktur, Perusahaan juga telah memiliki sejumlah *softstructure* atau perangkat lunak GCG sebagai landasan bagi seluruh insan PTK dalam menjalankan prinsip GCG. Berbagai perangkat lunak ini menjadi proses atau mekanisme GCG yang memberikan aturan main bagi setiap organ GCG agar memiliki lingkup peran dan tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Agar penerapan prinsip GCG dapat terukur, Perusahaan melakukan *assessment* atau penilaian penerapan GCG secara periodik tahunan. Penilaian penerapan GCG mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi

Development of Corporate Governance Implementation

Good Corporate Governance ("GCG") principles are based on compliance with applicable regulations and laws. The GCG implementation basics established in the Pertamina Group emphasize the application of GCG principles as part of the regulator's concern for the involvement of shareholders and stakeholders in the business world.

As part of the Oil and Gas SOEs Holding, PTK must comply with these principles. In addition, the GCG principles in the PTK environment are developed to prevent PTK personnel from unhealthy corporate practices that could harm PTK itself, its shareholders, and its stakeholders. The implementation of GCG principles is expected to provide an excellent corporate image, providing a basis of trust for PTK.

GCG principles are fulfilled through GCG infrastructure within the PTK organization, namely the General Meeting of Shareholders ("RUPS"), Board of Commissioners and Board of Directors. The two-board principle applied by Limited Liability Companies in Indonesia has also been applied by PTK through the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners plays a role in overseeing the operational and business activity management performed by the Board of Directors. Meanwhile, the Board of Directors, assisted by its supporting organs, namely the Corporate Secretary and Internal Audit, manages the organization based on accountability and transparency. Internal Audit is an integral part of the Company's organizational management that controls, supervises, and mitigates business risks. In collaboration with the Audit Committee under the Board of Commissioners, Internal Audit plays an essential role in providing strategic evaluations for the future development of PTK.

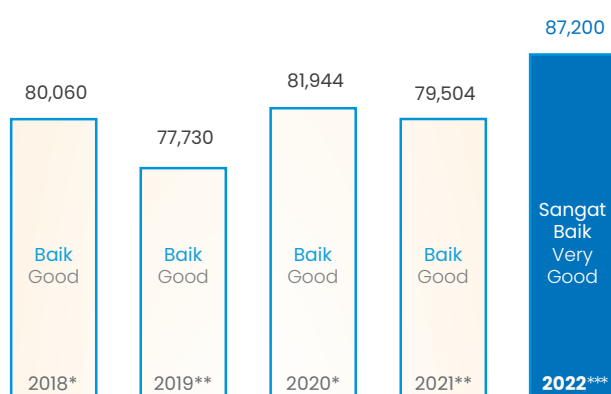
In addition to infrastructure, the Company also has several GCG soft structure as a basis for all PTK personnel in implementing GCG principles. Various GCG soft structure serve as GCG processes or mechanisms that guide each GCG organ to have its respective scope of roles, tasks, and responsibilities. To measure the implementation of GCG principles, the Company conducts annual periodic assessment of GCG implementation. The evaluation of GCG implementation refers to the Secretary of the SOE Ministry's Decree No. SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Ruang lingkup penilaian penerapan GCG meliputi 6 (enam) aspek *Governance*, yaitu Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan; aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal; aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; aspek Direksi; Pengungkapan Informasi dan Transparansi; serta Aspek Lainnya. *Assessment* ini, baik *assessment* oleh pihak independen maupun *self assessment* yang dilakukan tim internal, akan menjadi evaluasi dan masukan bagi perbaikan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan. Untuk penilaian tahun 2022 dilakukan melalui metode *assessment* oleh pihak independen dengan hasil 87,200 kategori "Sangat Baik". Hasil penilaian penerapan GCG tahun 2022 tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan *assessment* tahun 2021 dengan skor 79,504 kategori "Baik".

The scope of GCG implementation assessment includes 6 (six) Governance aspects: Commitment to Sustainable Corporate Governance Implementation; Shareholders and General Meeting of Shareholders/Owner Capital aspects; Board of Commissioners/Supervisory Board aspects; Board of Director aspects; Information Disclosure and Transparency; and Other Aspects. This assessment, both independent and self-assessment carried out by internal teams, will provide evaluations and feedback for improving the implementation of GCG principles within the Company. For the 2022 assessment, an independent assessment method was used, resulting in a score of 87.200 in the "Very Good" category. The 2022 GCG implementation assessment result also increased compared to the 2021 assessment, which scored 79.504 in the "Good" category.

Tren Skor Assessment Penerapan GCG 2018–2022
GCG Assessment Score Trend 2018–2022



Keterangan Bagan | Chart Description:

*) Penilaian GCG tahun 2018 dan 2020 dilakukan melalui *self assessment* Tim Internal PTK.

**) Penilaian GCG tahun 2019 dan 2021 dilakukan melalui *assessment* oleh BPKP.

***) Penilaian GCG tahun 2022 dilakukan melalui *assessment* oleh PT Multi Utama Indo Jasa.

*) The 2018 and 2020 GCG assessments were carried out through a self-assessment by the PTK Internal Team.

**) The 2019 and 2021 GCG assessments were carried out through an assessment by the BPKP.

***) The 2022 GCG assessment is carried out through an assessment by PT Multi Utama Indo Jasa.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Penerapan prinsip korporasi yang baik juga dilakukan melalui pengembangan hubungan dengan pemangku kepentingan; baik di tingkat eksternal maupun internal. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") Perusahaan dikembangkan untuk membangun keselarasan bersama para pemangku kepentingan, dengan harapan bahwa PTK dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan terus mengembangkan organisasi usaha yang tangguh.

Secara khusus, PTK menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk komitmen mewujudkan penerapan keberlanjutan yang sistematis dan terukur. Laporan tersebut menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan ini.

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development

The implementation of sound corporate principles is also carried out through developing relationships with stakeholders at the external and internal levels. The Company's Social and Environmental Responsibility ("TJSL") program is developed to build alignment with stakeholders, hoping that PTK can realize sustainable growth and continue to develop a resilient business organization.

Specifically, PTK prepares a sustainability report as a form of commitment to realizing the systematic and measurable implementation of sustainability. The report becomes an inseparable document from this annual report.

Informasi tentang Susunan Direksi Tahun 2022

Di sepanjang tahun 2022 pemegang saham memutuskan untuk melakukan beberapa pergantian dan perubahan susunan Direksi Perusahaan, dengan kronologis perubahan susunan Direksi adalah sebagai berikut.

Information about the Board of Directors Composition in 2022

Throughout 2022, shareholders decided to make several changes to the Company's Board of Directors composition, with the chronological changes in the composition as follows.

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2022

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors Throughout 2022

Periode 1 Januari s.d 8 Maret 2022 Period January 1 to March 8, 2022	Periode 8 Maret s.d 2 April 2022 Period March 8 to April 2, 2022	Periode 2 April s.d 15 Juli 2022 Period April 2 to July 15, 2022	Periode 15 Juli s.d 19 Juli 2022 Period July 15 to July 19, 2022	Periode 19 Juli s.d 5 Agustus 2022 Period July 19 to August 5, 2022	Periode 5 Agustus s.d 6 Desember 2022 Period August 5, to December 6, 2022	Periode 7 s.d 31 Desember 2022 Period 7 to December 31, 2022	Keterangan Information
Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahanw (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	-
Hadi Purnomo (Direktur Operasi) (Operations Director)	Hadi Purnomo (Direktur Operasi) (Operations Director)						Pada 2 April 2022 Hadi Purnomo diberhentikan dari jabatan Direktur Operasi. On April 2, 2022 Hadi Purnomo was dismissed from the position of Operations Director.
Arsono Kuswardanu (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)							Pada 8 Maret 2022 Arsono Kuswardanu diberhentikan dari jabatan Direktur Pemasaran. On March 8, 2022 Arsono Kuswardanu was dismissed from the position of Marketing Director.
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Operasi) (Finance & HR Director concurrently Acting Operations Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Operasi) (Finance & HR Director concurrently Acting Operations Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Pemasaran) (Finance & HR Director concurrently Acting Marketing Director)	Pada 2 April - 14 Juli dan 19 Juli - 4 Agustus 2022 Afan Aftory menjabat sebagai Plt. Direktur Operasi dan pada 7 Desember 2022 Afan Aftory menjabat sebagai Plt. Direktur Pemasaran. On April 2 - July 14 and July 19 - August 4, 2022 Afan Aftory served as Acting. Director of Operations and on December 7, 2022 Afan Aftory served as Acting. Marketing Director.
	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran merangkap Plt. Direktur Operasi) (Marketing Director concurrently Acting Operations Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)		Imam Bustomi menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 8 Maret 2022 dan pada 15 Juli - 18 Juli 2022 Imam Bustomi menjabat Plt. Direktur Operasi. Pada tanggal 6 Desember 2022 Imam Bustomi mengundurkan diri dari jabatan Direktur Pemasaran. Imam Bustomi served as Marketing Director since March 8, 2022 and on July 15 - July 18, 2022 Imam Bustomi served as Acting. Director of Operations. On December 6, 2022 Imam Bustomi resigned from the position of Marketing Director.
					Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	Slamet Harianto diangkat untuk menjabat Direktur Operasi sejak 5 Agustus 2022. Slamet Harianto was appointed to serve as Operations Director since August 5, 2022.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Dengan demikian, komposisi dan susunan Direksi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Thus, the composition and structure of the Board of Directors as of December 31, 2022 are as follows.

Susunan Direksi per 31 Desember 2022

Composition of the Board of Directors as of December 31, 2022

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Nepos MT Pakpahan	15 Juli 2022 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-2. July 15, 2022 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 2nd Period.
Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Pemasaran Finance & HR Director concurrently Acting Marketing Director	Afan Aftory	30 Agustus 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1 August 30, 2021 (for a period of 1 term of office, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period
Direktur Operasi Operations Director	Slamet Harianto	5 Agustus 2022 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1 August 5, 2022 (for a period of 1 term of office, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period

Tidak terdapat pergantian dan perubahan susunan Direksi sejak 1 Januari 2023 hingga disahkannya laporan tahunan ini tertanggal Mei 2023. Atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemegang Saham, Direksi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

The composition of the Board of Directors has remained the same since January 1, 2023, until the approval of this annual report dated May 2023. The Board of Directors expresses our profound gratitude for the trust given by the Shareholders.

Proyeksi Tahun 2023

Perusahaan telah mencanangkan proyeksi dan target kinerja tahun 2023 yang didasarkan pada asumsi-asumsi dari Pemerintah Indonesia serta asumsi dan kajian berbagai lembaga internasional dan domestik tentang prospek kondisi sosial perekonomian tahun 2023. Dari RKAP Perusahaan tahun 2023 tersebut, Perusahaan memiliki optimisme untuk mencanangkan rencana dan target kinerja yang cukup baik, dimana proyeksi peningkatan operasi dan pemasaran di 3 (tiga) segmen bisnis PTK Group yaitu *shipping activities*, *marine services* dan *logistic services* yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kinerja keuangan. Pendapatan Perusahaan di tahun 2023 diharapkan mampu meningkat 7% s.d 13% dari realisasi tahun 2022.

Proyeksi kinerja ini tentu dilandasi pada prospek perekonomian Indonesia yang cukup positif, target *lifting* migas yang terus meningkat, dan khususnya raihan posisi PTK di industri hingga akhir tahun 2022. Sebagai bagian dari *Subholding* IML dalam *Holding* BUMN Migas, PTK memiliki peluang untuk mendapatkan penunjukan langsung atas pengadaan kapal-kapal yang dibutuhkan Pertamina Group baik untuk *offshore support* maupun *marine support*. Terutama dengan digitalisasi proses bisnis yang diterapkan PTK secara bertahap dalam 2 (dua) tahun terakhir akan terus dilanjutkan sebagai upaya menyederhanakan alur kerja,

Projection for 2023

The Company has set projections and performance targets for 2023 based on assumptions from the Indonesian Government and premises and studies from various international and domestic institutions on the social and economic prospects for 2023. From the Company's 2023 RKAP, the Company is optimistic in setting good plans and performance targets, where the projected increase in operations and marketing includes Commission Days, Commercial Days, and Agency Calls/ Agency Calls which are expected to be able to boost financial performance growth. The Company's revenue in 2023 is expected to increase by 7% to 13% from the realization in 2022.

This performance projection is undoubtedly based on a reasonably positive economic outlook for Indonesia, a continuously increasing oil and gas lifting target, and especially PTK's position in the industry until the end of 2022. As part of the IML Subholding of the Oil and Gas State-Owned Enterprise Holding Company, PTK can be directly appointed to procure ships needed by Pertamina Group for offshore support and marine support. Specifically, the digitization of business processes that has been gradually implemented by PTK in the last 2 (two) years will be continued as an effort to simplify workflows and sources of factual information about PTK

sumber pencarian informasi faktual tentang operasional PTK baik secara *real time* maupun berkala, yang bertujuan memudahkan dalam analisis pendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. PTK telah menyusun *roadmap* digitalisasi menuju *system excellence* di tahun 2026, di mana pada tahun 2023 PTK menetapkan *milestone* sebagai *business process enabler* yang memberikan solusi-solusi digital dan migrasi data dari sistem lama ke teknologi baru.

Akhir Kata

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, izinkan Direksi menyampaikan terima kasih atas seluruh kerja sama yang telah terbina di sepanjang tahun 2022 hingga akhirnya PTK dapat mencapai hasil kinerja yang baik. Kepercayaan dari pemegang saham, kemitraan strategis bersama Dewan Komisaris dan seluruh komitenya, dedikasi dan kerja keras dari seluruh insan PTK, hubungan yang terjalin baik dengan mitra bisnis, hingga keterlibatan pemangku kepentingan; diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat bagi PTK untuk dapat terus melangkah ke depan dan meraih visinya untuk tumbuh berkembang di masa-masa yang akan datang.

operations both in real-time and periodically, with a view to facilitate analysis to support faster and more targeted decision making. PTK has prepared a digitization roadmap towards system excellence in 2026. In 2023, PTK will set a milestone as a business process enabler that provides digital solutions and data migration from old systems to new technologies.

Closing Remarks

By expressing our gratitude to God Almighty, allow the Board of Directors to send our thanks for all the cooperation established throughout 2022 which has enabled PTK to achieve good performance results. The trust of shareholders, strategic partnerships with the Board of Commissioners and all its committees, dedication, and hard work from all PTK personnel, good relationships with business partners, to stakeholder involvement are hoped to become a strong foundation for PTK to continuously move forward and achieve its vision of growing and developing in the future.

Jakarta, Mei | May 2023

Atas nama Direksi PT Pertamina Trans Kontinental,
On behalf of Board of Directors of PT Pertamina Trans Kontinental



Nepos MT Pakpahan

Direktur Utama
President Director

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk Laporan Tahunan 2022

Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2022 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

We, the undersigned, declare that all information in the 2022 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statements of the Company.

Jakarta, Mei | May 2023

DEWAN KOMISARIS PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

PT Pertamina Trans Kontinental Board of Commissioners

Amir Hamzah



Komisaris Utama
President Commissioner

Andi Saiful Haq



Komisaris
Commissioner

Khalid Zabidi



Komisaris
Commissioner

Agustinus Bensik Lamboan



Komisaris
Commissioner



Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2022

Statement of Responsibility from Board of Directors for 2022 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

We, the undersigned, declare that all information in the 2022 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statements of the Company.

Jakarta, Mei | May 2023

DIREKSI PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

PT Pertamina Trans Kontinental Board of Directors

Nepos MT Pakpahan

Direktur Utama
President Director

Afan Aftory

Direktur Keuangan & SDM
Finance & HR Director

Afan Aftory

Plt. Direktur Pemasaran
Acting Marketing Director

Menjabat Mulai 7 Desember 2022
Serves From December 7, 2022

Slamet Harianto

Direktur Operasi
Operation Director

Hadi Purnomo

Direktur Operasi
Operation Director

Menjabat Sampai 2 April 2022
Served Until April 2, 2022

Arsono Kuswardanu

Direktur Pemasaran
Marketing Director

Menjabat Sampai 8 Maret 2022
Served Until March 8, 2022

Imam Bustomi

Direktur Pemasaran
Marketing Director

Menjabat Sampai 6 Desember 2022
Served Until December 6, 2022

Sebagai pelaku usaha dalam industri *marine*, PTK berupaya memberikan produk dan jasa terunggul, khususnya dalam upaya untuk terus menciptakan nilai tambah dalam penguatan bisnis Holding BUMN Migas

As a business actor in the marine industry, PTK seeks to provide superior products and services, especially in an effort to continuously create added value in strengthening the Oil and Gas SOE Holding business



Profil Perusahaan Company Profile





Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

General Information and Corporate Identity

Nama Perusahaan Company Name	: PT Pertamina Trans Kontinental
Nama Singkat Common Name	: PTK
Tanggal Berdiri dan Beroperasi Establishment and Operation Date	: 9 September 1969 September 9, 1969
Dasar Hukum Pendirian Usaha Legal Basis of Business Establishment	: - Akta No 3 Tanggal 9 September 1969 dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta. - Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat di hadapan Dewantari Handayani, MPA., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, nama PT Pertamina Tongkang berubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. - Deed No. 3 dated 9 September 1969 made before Notary Tan Thong Kie in Jakarta. - Deed No. 012 dated 26 October 2011 made before Notary Dewantari Handayani, MPA approved under the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Decree No: AHU-58581.AH.01.01 Year 2011 dated 29 November 2011, the name PT Pertamina Tongkang was changed to PT Pertamina Trans Kontinental.
Status Badan Hukum Legal Entity Status	: Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") Limited Liability Company ("PT"), Domestic Investment ("PMDN")
NPWP Taxpayer Identification Number	: 01.000.501-5.051.000
Nomor Induk Berusaha ("NIB") Business Identification Number	: 8120110071176
SIUPAL	: BXXV-1203/AL 58
Kepemilikan Saham Share Ownership	: PT Pertamina International Shipping: 99,999% PT Pertamina Pedeve Indonesia: 0,001%
Modal Dasar Authorized Capital	: Rp4.424.580.819.000,-; terbagi atas 4.424.580 lembar saham seri A dengan masing-masing bernilai Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,- Rp4,424,580,819,000,-; divided into 4,424,580 series A shares with a nominal value of Rp1,000,000 each and 819 series B shares with a nominal value of Rp1,000 each.
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Fully Paid-in Capital	: Rp1.234.747.819.000,-; terbagi atas 1.234.747 lembar saham seri A dengan nominal masing-masing Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,- Rp1,234,747,819,000,-; divided into 1,234,747 series A shares with a nominal value of Rp1,000,000 each and 819 series B shares with a nominal value of Rp1,000 each.
Bidang Usaha Line of Business	: Jasa perkapalan, jasa <i>marine</i> dan jasa logistik Shipping, marine and logistic services
Kantor Layanan Office Network	: 1 Kantor Pusat Head Office 3 Kantor Office <i>Marine Business & Operation Region</i> 10 Kantor Marketing Area Marketing Area Offices
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	: Jl. Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat 10450, Indonesia
Telp Phone	: +6221 3192 3005
Faksimili Facsimile	: +6221 310 6804
Situs Web Website	: https://pertamina-ptk.com/
Surel Email	: pusat.ptk@pertamina-ptk.com
Jumlah Pekerja Total Employees	: 3.978 orang employees
Serikat Pekerja Trade Union	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Pertamina Trans Kontinental ("SPSI PTK")

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company



PT Pertamina Trans Kontinental, disebut juga sebagai “Perusahaan” atau “PTK”, semula bernama PT Pertamina Tongkang yang berdiri pada 9 September 1969 di Jakarta dan menjalankan usaha di bidang industri jasa *marine*. Perusahaan berfungsi memberikan dukungan bagi aktivitas PT Pertamina (Persero) dan *subholding* lainnya dengan 3 (tiga) kegiatan strategis yaitu:

- Pengadaan distribusi bahan bakar ke semua pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia;
- Pengadaan transportasi maritim bagi Pertamina Logistik untuk pengembangan proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- Bertindak sebagai *General Agent* dan *Handling Agent* bagi kapal-kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang disewakan.

PT Pertamina Trans Kontinental, also known as the “Company” or “PTK”, was originally named PT Pertamina Tongkang which was established on September 9, 1969 in Jakarta and carried out business in the maritime service industry. The function of the Company is to provide support for the activities of PT Pertamina (Persero) and other subholdings with 3 (three) strategic activities, namely:

- Provision of fuel distribution to all ports in the Indonesian territory;
- Provision of maritime transport for Pertamina’s Logistics for the development of projects spread across the Indonesian territory;
- Acting as a General Agent and Handling Agent for chartered-out tanker ships owned by PT Pertamina (Persero).

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan
General Information and Corporate Identity

Pada awalnya peranan Perusahaan masih sebagai sebatas unit bisnis yang diperbantukan pada aktivitas pengembangan PT Pertamina (Persero). Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1974 Perusahaan menerima tambahan armada kapal sejenis *supply vessel*. Hal ini untuk melayani dan mendukung pelaksanaan eksplorasi pengeboran minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai dan juga keperluan produksi.

4 (empat) tahun kemudian Perusahaan memperluas layanan jasa, menyusul selesainya program konstruksi depot bahan bakar baru di belahan timur dan tengah Indonesia. Selanjutnya, Perusahaan mengubah model bisnisnya untuk tujuan mencari keuntungan dan fokus kepada aktivitas lepas pantai dengan menyediakan layanan:

- Membantu eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai.
- Menjadi *Handling Agent* dari penyewa kapal milik PT Pertamina (Persero) dan kapal pihak ketiga.

Perusahaan adalah suatu Perseroan yang bergerak di bidang Pelayaran sebagai pemegang izin SIUPAL No. BXXV-1203/AL 58 pada tanggal 26 Maret 2002 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kian luasnya pelayanan dan jasa yang diberikan, menjadikan Perusahaan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya perubahan nama dari PT Pertamina Tongkang menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. Perubahan nama berlaku efektif 29 November 2011 sesuai dengan Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU- 58581. AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

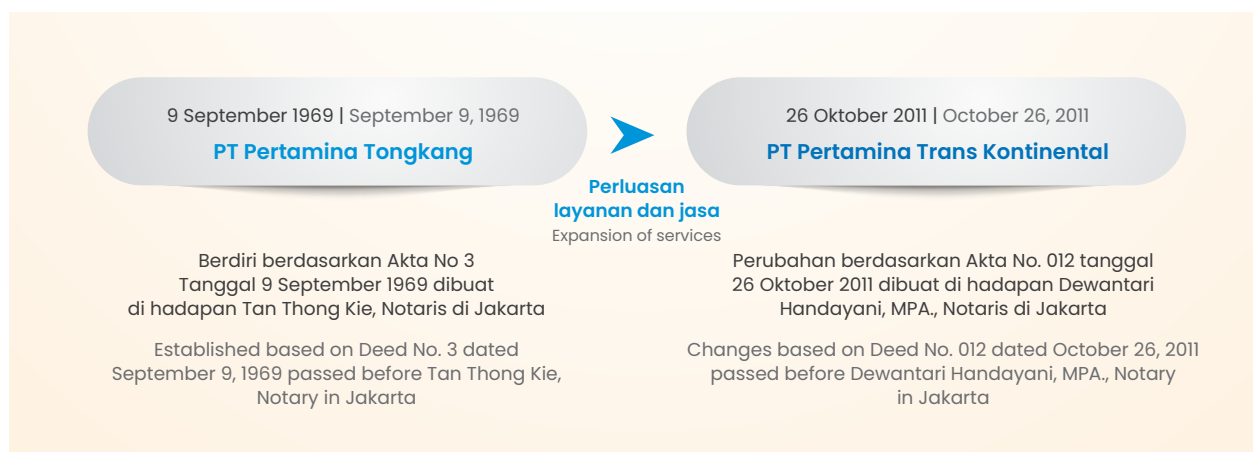
Initially, the role of the Company was still limited to a business unit seconded in the development activities of PT Pertamina (Persero). Along with its development, in 1974 the Company received an additional fleet of supply vessel-type ships to serve and support the implementation of offshore oil and gas drilling exploration and also production requirements.

4 (four) years later the Company expanded its services, following the completion of the new fuel depot construction program in the eastern and central regions of Indonesia. Subsequently, the Company altered its business model with the purpose of gaining profit and focusing on offshore activities by providing the following services:

- Assisting offshore oil and gas exploration
- Becoming a Handling Agent for charterers of vessels owned by PT Pertamina (Persero) and third parties.

The company is a company engaged in the shipping sector as the holder of a SIUPAL license no. BXXV-1203/AL 58 on March 26, 2002 issued by the Directorate General of Sea Transportation.

The expanding provided services urged the Company to make several changes, including the name change from PT Pertamina Tongkang to PT Pertamina Trans Kontinental. The name change was effective on November 29, 2011 in accordance with Deed No. 012 dated October 26, 2011 by Notary Dewantari Handayani, MPA, which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No: AHU-58581.AH.01.02 of 2011 of 29 November 2011.



Logo Perusahaan Company Logo



Logo Perusahaan telah disahkan berdasarkan Pedoman Standarisasi Identitas Perusahaan No. Revisi: PDM-001/G0000/2011-S0 dan berlaku sejak 22 Desember 2011.

The company logo has been ratified based on the Company Identity Standardization Guidelines Revision No: PDM-001/ G0000/2011-S0 valid since 22 December 2011.



Warna Hijau | Green Color

Mencerminkan sumber energi yang ramah lingkungan dan sebuah organisasi yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

Reflects environmentally friendly energy source and an organization with concern for its surrounding environment.

Warna Merah | Red Color

Mencerminkan insan Pertamina Trans Kontinental yang pekerja keras, berani, dan rajin serta mampu melawan tantangan.

Reflects the Pertamina Trans Kontinental personnel who are hard workers, courageous, and diligent as well as capable of facing challenges.

Simbol Anak Panah | "Arrow" Symbol

Melambangkan aspirasi organisasi Perusahaan untuk senantiasa bergerak ke depan, maju dan progresif. Ketiga elemen melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk Negara Indonesia. Simbol tersebut terlihat seperti monogram huruf "P" yang merupakan huruf pertama "PERTAMINA".

The "Arrow" symbol represents the Company's organizational aspiration to continuously move forward, be advanced and progressive. The three elements symbolize islands in various scales, which the shape of the Republic of Indonesia. The Symbol appears as a monogram of the letter "P", which is the first letter in "PERTAMINA".

Warna Biru | Blue Color

Mencerminkan sisi organisasi yang andal, dapat dipercaya, serta bertanggung jawab. Penekanannya lebih kepada kekuatan dan kewibawaan Perusahaan.

Reflects an organizational aspect that is reliable, trustworthy, and responsible. The emphasis is on corporate strength and charisma.

Kata "TRANS" dan "KONTINENTAL" | "TRANS" and "KONTINENTAL" Terms

Melambangkan aspirasi organisasi Perusahaan untuk senantiasa bergerak ke depan, maju dan progresif. Ketiga elemen melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk Negara Indonesia. Simbol tersebut terlihat seperti monogram huruf "P" yang merupakan huruf pertama "PERTAMINA".

TRANS Based on the dictionary, means pass through. Meaning of KONTINENTAL, based on the dictionary is a continent. Pertamina Trans Kontinental is a Subsidiary of PT Pertamina (Persero) with core business to support business activity of the parent company in oil & gas sector and ready to become a world-class Shipping and Marine Service Company.

Kata "PERTAMINA" | "PERTAMINA" Terms

Mencerminkan insan Pertamina Trans Kontinental yang pekerja keras, berani, dan rajin serta mampu melawan tantangan.

Reflects Pertamina Trans Kontinental people who are hardworking, brave, and diligent and able to face challenges.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Value

Visi dan Misi

Penetapan Visi dan Misi yang kini berlaku telah mendapatkan persetujuan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi secara sirkuler tanggal 18 November 2019 tentang Perubahan Visi dan Misi dan Persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2019. Maka berlaku efektif sejak keputusan tersebut, Visi dan Misi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Vision and Mission

Stipulation of current Vision and Mission has been ratified by the Board of Directors under the Board of Directors' Circular Decision Letter dated November 18, 2019 concerning Changes in Vision and Mission and Approval of the Board of Commissioners on November 27, 2019. Thus, effectively since the date of the Decision Letter, the Company's Vision and Mission are as follows:

Visi

Vision

Menjadi Perusahaan Jasa *Marine* yang Terintegrasi dengan Skala Global pada Tahun 2026

To be an Integrated Marine Service Company on Global Scale in 2026

Misi

Mission

Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE, Kehandalan Operasional dan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan dalam bidang:

1. Penyediaan jasa perkapalan sektor energi;
2. Penyediaan layanan *marine*;
3. Penyediaan jasa logistik.

Carrying out business activities oriented to HSE aspects, operational reliability and prioritizing customer satisfaction in the fields of:

1. Providing shipping services in the energy sector;
2. Providing marine services;
3. Providing logistics services.



Perubahan visi tersebut merupakan tonggak Perusahaan yang harus ditegakkan segenap Insan PTK. Maka untuk mewujudkan PTK sebagai Perusahaan Jasa *Marine* yang Terintegrasi dengan Skala Global pada Tahun 2026 diperlukan langkah-langkah strategis yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE;
2. Meningkatkan kehandalan operasional;
3. Mengutamakan kepuasan pelanggan dalam Penyediaan jasa perkapalan sektor energi, layanan *marine* dan jasa logistik.

The change of vision has become the Company's milestone to be upheld by all PTK personnel. To realize PTK as an Integrated Marine Service Company on Global Scale in 2026, the following strategic initiatives are necessary:

- Carrying out business activities oriented to HSE aspects;
- Increasing operational reliability;
- Prioritizing customer satisfaction in shipping service provision for energy sector, marine services and logistics services.

Nilai-nilai Utama Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial (*social welfare*), penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta, dibutuhkan transformasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dimana salah satunya melalui penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Pertamina Trans Kontinental mengadopsi dan mengoptimalkan nilai-nilai Perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip AKHLAK yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-1344/PTK0000/2021-S0.

Corporate Values

To actualize the role of State-Owned Enterprises as economic growth engines, social welfare accelerators, job providers, and talent providers, it is necessary to transform the Human Resources of State-Owned Enterprises, through the determination of Core Values of the Human Resources as identity and the glue of work culture that supports sustainable performance improvement.

Therefore, Pertamina Trans Kontinental adopts and optimizes corporate values based on the AKHLAK principles that have been ratified through President Director's Decision Letter No. Kpts-1344/PTK0000/2021-S0.

AKHLAK



AMANAH

Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given



KOMPETEN

Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continuous learning and capability improvement



HARMONIS

Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan
Mutual care and value diversity



LOYAL

Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Dedicated and prioritize the interest of the National and Country



ADAPTIF

Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Continuously innovating and enthusiast in driving and facing the change.



KOLABORATIF

Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis
Build synergistic cooperation

Kegiatan Usaha serta Produk dan Jasa

Business Activities and Products and Services

Selain mengoptimalkan sumber daya yang ada, PTK sebagai bagian dari Grup Pertamina juga senantiasa memanfaatkan peluang dan sinergi yang terjalin di dalamnya saat menjalankan aktivitas bisnis dan operasional sehari-hari.

In addition to optimizing existing resources, PTK as part of the Pertamina Group also always takes advantage of the existing opportunities and synergies when carrying out daily business and operational activities.



Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta No. 07 tanggal 3 Juli 2013, yang terakhir diubah melalui Akta No. 30 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta, maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang jasa perkapalan, *marine* dan logistik baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa perkapalan, *marine* dan logistik tersebut.

Untuk mencapai maksud tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:



Jasa Perkapalan Shipping Service

- Usaha-usaha dalam bidang pengangkutan hasil industri pertambangan dan umum;
- Usaha dalam bidang pengangkutan laut antar pelabuhan serta jasa penunjangnya, baik dalam maupun luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau perkapalan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal serta jasa penunjangnya;
- Usaha di bidang perkapalan/pengangkutan khusus peralatan dan kebutuhan pengeboran migas, muatan batu bara, muatan cair dan gas serta kargo umum lainnya;
- Menjalankan usaha penunjang bidang perkapalan;
- Usaha di bidang jasa manajemen kapal/*ship management services (ship crewing, ship operator, dan ship maintenance)*;

Business Activities According to the Articles of Association

In accordance with article 3 of the Articles of Association stated in Deed No. 07 dated July 3, 2013, which was last amended by Deed No. 30 dated November 29, 2022 made before Lenny Janis Ishak, SH., Notary in Jakarta, the purpose of establishing the Company is to carry out business in the field of shipping, *marine* and logistics services both domestically and abroad as well as other related business activities or support business activities in the shipping, *marine* and logistics services sector.

To achieve this purpose, the Company carries out the following business activities:

- Business in the transport of mining and general industry products sector;
- Business in the inter-port sea transport as well as supporting services, whether domestic or overseas, performed permanently and regularly and/or impermanent and irregular shipping using all types of vessels and supporting services sector;
- Business in the specific shipping/freight of oil and gas drilling equipment and needs, coal cargo, liquid and gas cargo, as well as other general cargo;
- Conducting the shipping sector supporting business;
- Business in the ship management services sector (*ship crewing, ship operator, ship maintenance*);



- Menjalankan usaha penyewaan kapal (*ship chartering dan brokerage*);
- Menjalankan usaha keagenan kapal (*ship agencies*);
- STS Provider
- Dockyard
- Ship Vetting
- Usaha *salvage* dan penundaan kapal;
- Jasa pemeliharaan peralatan perkapalan (navigasi).

- Conducting the ship charter business (*ship chartering & brokerage*)
- Conducting the ship agency business (*ship agencies*);
- STS Provider;
- Dockyard;
- Ship Vetting
- Ship salvaging and Tug business
- Navigation equipment maintenance services (navigation)



Jasa Marine Marine Service

- Manajemen dan operasional pelabuhan;
- Izin dan lisensi kepelabuhanan;
- Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, tapi tidak terbatas pada kapal *tanker*, *supply vessel*, tongkang, kapal tunda dan RIB;
- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan *general cargo*;
- Penanganan tumpahan minyak di perairan;
- Melaksanakan *bunker service* berupa pengisian dan/atau pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal baik di laut maupun di darat;
- Melakukan jasa pengolahan dan penyediaan air untuk keperluan kapal dan industri;
- Melaksanakan kegiatan distribusi dan *supply* bahan bakar dan air untuk kebutuhan kapal-kapal, depot-depot dan industri;
- Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal serta penyediaan suku cadang kapal dan alat transportasi lainnya;

- Port Management & Operations;
- Port Permits and Licenses;
- Purchasing and selling of transportation and/or logistic equipment including spare-parts but are not limited in tankers, supply vessels, barge, tug boat, and RIB;
- Liquid, gas and general cargo transport and storing business;
- Handling of Oil Spills in Waters
- Providing bunker services including fuel oil refilling and/or distribution for vessels, whether on or offshore
- Conducting water processing and supply services for vessels and industry need;
- Conducting fuel and water distribution and supply activities for vessels, depots, and industry needs;
- Conducting the ship manufacturing and repair business as well as provision of spare parts for ships and other means of transportation;

Kegiatan Usaha serta Produk dan Jasa

Business Activities and Products and Services

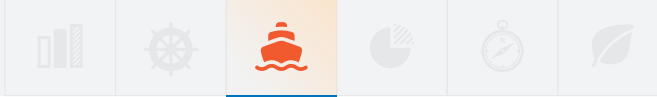
- Melakukan jasa perencanaan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung dan konstruksi-konstruksi bangunan di lepas pantai dan di bawah air beserta peralatannya;
- *Jasa tank cleaning* dan pengelolaan limbah (*sludge*);
- Melakukan usaha jasa bongkar muat barang di kapal;
- Melakukan usaha bidang kepelabuhanan dan administrasi pelabuhan khusus;
- Jasa pemeliharaan fasilitas pelabuhan;
- *Mooring Master* dan POAC
- *Jasa Recognize Security Organization ("RSO")*;
- Survei kelautan mengenai arus dan kedalaman laut (*Hydrografi Oceanography* dan Pemetaan/HOP);
- Konstruksi bawah air berupa pemasangan dan pemeliharaan pipa dan kabel bawah laut dan lain-lain;
- Jasa pengerukan dan reklamasi pantai;
- Jasa perawatan pekerjaan minyak dan gas bawah air;
- Jasa penyelaman dan pekerjaan bawah air.
- Conducting the business of planning, construction, repair, and maintenance services for vessels, flotation devices, and construction of offshore and underwater constructs and their equipment;
- Tank cleaning and waste management (*sludge*) services;
- Ship loading and unloading services;
- Port Activities and Special Port Administration;
- Port facility maintenance services;
- Mooring Master and POAC
- Recognized Security Organization ("RSO") services;
- Maritime Survey on Ocean Stream and depth (*Hydrographic and Oceanographic Prediction/HOP*);
- Underwater construction service as submarine pipe and cable installation and maintenance and other services;
- Seabed dredging and beach reclamation service;
- Subsea oil and gas project maintenance service;
- Commercial diving and underwater work services.

**Jasa logistik**
Logistic Service

- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan *general cargo*;
- Jasa ekspor impor barang dan jasa pengurusan dokumen ekspor impor (*customs clearance*);
- Mengadakan usaha di bidang *Freight Forwarding*, tidak terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman, dan pendistribusian barang;
- *Ship Chandler*;
- Penyewaan alat-alat berat dan atau peralatan kerja serta produksi;
- Melakukan kegiatan usaha penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang serta usaha lainnya (*logistic base*);
- Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran.
- Conducting the liquid, gas, and general cargo transportation and storing business;
- Export, import, and customs clearance services;
- Freight Forwarding business, not limited to logistics, delivery, and distribution services;
- Ship Chandler;
- Heavy equipment and/or production equipment rental;
- Storage, warehouse, logistics and distribution services of various commodities and other services (*logistics base*);
- Building and office rental and management services.

Seluruh kegiatan di atas telah dilaksanakan oleh Perusahaan.

All of the above activities have been implemented by the Company.



Bisnis Utama serta Produk dan Layanan Jasa

Penyediaan Kapal

PTK memiliki bisnis inti penyedia kapal sebagai armada operasional, yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan penyewa guna mendukung kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai dan darat seperti PT Pertamina (Persero), perusahaan migas kontraktor kontrak kerja sama ("KKKS"), dan lainnya.

Charter & Brokerage

Aktivitas bisnis melalui *Charter and Brokerage* dilakukan atas permintaan pelanggan, untuk memenuhi kebutuhan jenis kapal yang tidak dimiliki oleh PTK. *Charter and Brokerage* dilakukan dengan cara menyewa kapal sesuai dengan permintaan.

Keagenan Kapal

PTK menyediakan layanan keagenan kapal sebagai *General Agent* atau *Handling Agent* untuk kapal yang sandar di Pelabuhan-Pelabuhan Pertamina atau non Pertamina di Indonesia ataupun di Luar Negeri. Sebagai Agen Kapal, maka tugas utama perusahaan adalah mewakili pemilik kapal/*principal* dalam memenuhi persyaratan atau kewajiban serta kebutuhan kapal lainnya.

Jasa *shipping agent* yang diberikan PTK antara lain :

1. *In/Out Clearance* kapal di Pelabuhan
2. Pengurusan perizinan yang berkaitan dengan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina
3. Layanan untuk awak kapal antara lain penyediaan fasilitas transportasi dan akomodasi, serta pergantian awak kapal
4. Layanan untuk Kapal seperti penyediaan *Running Store, Running Repair, Provision*, dan lain lain
5. Penyediaan layanan *survey* dan inspeksi
6. Penyediaan layanan pemanduan dan penundaan di Pelabuhan

Tanggung jawab PTK sebagai *shipping agent*:

- Memastikan kelancaran kapal operasional di pelabuhan;
- Menyelesaikan kewajiban finansial;
- Menyampaikan laporan realisasi kunjungan kapal-kapal di pelabuhan Indonesia.

Pemanduan Kapal

PTK melaksanakan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Pelabuhan Pertamina di Indonesia.

Core Business and Business Products

Vessel Provider

PTK has the core business as a provider of vessels as an operational fleet, used in fulfilling the needs of charterers to support the offshore and onshore oil exploration activities, such as PT Pertamina (Persero), Contractors of Cooperation Contract ("KKKS") oil and gas companies, and others.

Charter & Brokerage

Business activities through charter and brokerage are conducted based on customer demand to meet the needs for types of vessels not owned by PTK. Charter and Brokerage is performed by chartering vessels according to demand.

Vessel Agency

PTK provides shipping agency services as a General Agent or Handling Agent for ships that dock at Pertamina or non-Pertamina Ports in Indonesia or abroad. As a Shipping Agent, the Company's main task is to represent the ship owner/principal in fulfilling the requirements or obligations as well as other needs of the ship.

Shipping agent services provided by PTK include:

1. *In/Out Clearance* of ships at the Port
2. Management of permits related to Customs, Immigration and Quarantine
3. Services for crew members include providing transportation and accommodation facilities, as well as changing crew members.
4. Services for Ships such as provision of *Running Store, Running Repair, Provision*, and others.
5. Provision of survey and inspection services
6. Provision of pilotage and tugging services at the Port

PTK responsibilities as a shipping agent:

- Ensuring the ease of operational ships at the port;
- Settling financial liability;
- Submitting the report for the visits of ships at Indonesian ports.

Pilotage Services

PTK carries out ship pilotage and tugging services at Pertamina Ports in Indonesia.

Kegiatan Usaha serta Produk dan Jasa Business Activities and Products and Services

Pengelolaan Pelabuhan

PTK melalui entitas anak, PT Pertamina Port and Logistics ("PPL", dahulu bernama PT Peteka Karya Samudera), melaksanakan jasa Administrasi Pelabuhan Khusus (Pelsus) di 16 lokasi Terminal Khusus (Tersus) Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK") Migas.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Perusahaan di bidang ini meliputi:

- Pelaksanaan administrasi pada layanan pelabuhan yang meliputi labuh, tambat, pandu, tunda (di luar wilayah kerja PT Pelindo) sebagai delegasi PT Pertamina (Persero), di mana pekerjaan Perusahaan atas nama PT Pertamina (Persero);
- Membuat laporan secara periodik terkait penyelesaian pekerjaannya, Perusahaan bertanggung jawab kepada PT Pertamina (Persero);
- Mengurus perizinan;
- Mengelola administrasi pelabuhan khusus. Dalam hal ini Perusahaan hanya mengelola pelabuhan khusus KKKS dan JOB;
- Melakukan penagihan jasa pelabuhan kepada Agen;
- Melakukan penyetoran jasa pelabuhan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah;
- Membuat laporan kegiatan kepelabuhanan kepada PT Pertamina (Persero), BP Migas, Kantor Pelabuhan/ Administrasi Pelabuhan;
- Membantu pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kepelabuhanan di Pelabuhan Khusus KKKS dan JOB.

Bunker Agent

Bunker agent merupakan jasa yang disediakan oleh PTK untuk pengiriman bahan bakar minyak ke kapal atau *tanker*

Offshore & Onshore Logistic Base

PTK menawarkan jasa pelayanan yang terintegrasi dalam *offshore & onshore logistic base* yang terdapat di Batam dan Tanjung Batu, Balikpapan, yang meliputi:

Batam

- Luas Area *Logistics shore base* 45,28 hektar.
- Pengiriman kargo dan jasa kargo administrasi.
- Perbaikan dan pembersihan kargo dengan fasilitas lengkap.
- Menyediakan layanan pasokan air bersih, pasokan bahan bakar gas dan jasa lainnya.
- Persewaan gedung kantor di Batam di Jalan Yos Sudarso Batu Ampar, Pulau Batam, terdiri dari tiga lantai untuk kebutuhan kantor, dengan fasilitas

Port Management

PTK through its subsidiary PT Pertamina Port and Logistics ("PPL", formerly named PT Peteka Karya Samudera), implements Special Port (Pelsus) Administration services in 16 locations of Special Purposes Terminal (Tersus) Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities ("SKK") Migas – Contractors of Cooperation Contract ("KKKS").

The scope of the Company's duties and responsibilities in this sector includes:

- Conducting the administration of port services, which include anchoring, mooring, guidance, tug (outside the PT Pelindo operational areas) as a delegate of PT Pertamina (Persero) where the Company acts on behalf of PT Pertamina (Persero);
- Preparing periodic reports relevant to job completion, the Company is responsible to PT Pertamina (Persero);
- Permits handling;
- Managing special port administration. In this case, the Company only manages KKKS and JOB special ports;
- Conducting the collection for port services to the Agent;
- Conducting the Port Services deposit to PT Pertamina (Persero) and the Government;
- Preparing reports of port activities to PT Pertamina (Persero), BP Migas, Port/Port Administration Office;
- Assisting management relevant to port administration at KKKS and JOB Special Ports

Bunker Agent

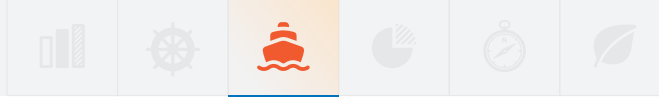
Bunker agent is a service provided by PTK for the delivery of fuel oil to ships or tankers.

Offshore & Onshore Logistic Base

PTK offers integrated services in the offshore & onshore logistics base, which are located in Batam and Tanjung Batu, Balikpapan which include:

Batam

- 45.28 ha storage warehouse;
- Cargo shipping and cargo administration services;
- Cargo repair and cleaning with full facilities;
- Providing clean water supply, gas fuel supply, and other services;
- Office building rental located at Yos Sudarso Street, Batu Ampar–Batam Island comprising of 3 floors for office needs, equipped with facilities of Air



Kegiatan Usaha serta Produk dan Jasa Business Activities and Products and Services

pendingin ruangan/AC, area parkir, keamanan 24 jam, 50 saluran telepon dan dilengkapi dengan sistem PABX. Selain itu, memiliki 350 KVA generator listrik dengan lokasi strategis di kargo jalur utama dan Pelabuhan Batu Ambar.

- Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi:
 - a. Lalu lintas dermaga.
 - b. Peralatan derek (*crane*) dengan kapasitas 50 tons ph, *American Crane* kapasitas 75 ton, *crane* Todano kapasitas 20 ton, derek *petty bone*, *carrylift* kapasitas 20 ton, *forklift* kapasitas 3 dan 5 ton, *prime over* setinggi 40 feet, dan *trailer caps* setinggi 40 kaki.

Tanjung Batu, Balikpapan

Peteka Shorebase Tanjung Batu ("PSTB") berlokasi di lahan milik Pertamina seluas 49 Ha di Tanjung Batu, Balikpapan. PSTB menyediakan fasilitas logistik untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan migas yang beroperasi di Kalimantan dan Sulawesi melalui penyediaan *one stop logistic services* berupa:

- Penyediaan fasilitas tempat penyimpanan (*open yard, warehouse*, dan tangki).
- Fasilitas sandar kapal dengan panjang 200 meter.
- Kegiatan *cargo handling* dan transportasi, penyediaan kantor dan akomodasi.
- Penyediaan fasilitas Pusat Logistik Berikat ("PLB").
- Penyediaan jasa *waste management*, dan jasa-jasa pendukung lainnya.
- Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi:
 - c. Fasilitas *Jetty* 200 m, 88 m, 65 m, 107 m dan 2-3 m.
 - d. Fasilitas RORO 2x250 ton LCTs.
 - e. Fasilitas *Speedboat Jetty*.

Recognized Security Organization ("RSO")

PTK ditunjuk sebagai RSO sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KI.93/1/15-04 yang telah diperbaharui sampai dengan saat ini. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Direksi RSO untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi ISPS Code di Indonesia.

RSO merupakan konsultan dalam bidang keamanan yang memberikan saran atau menyediakan bantuan dalam bidang operasional kapal dan fasilitas pelabuhan, meliputi:

- Melaksanakan Kegiatan Sertifikasi ISPS Code untuk kapal ("ISSC") dan Fasilitas Pelabuhan ("SoCPF").
- Melaksanakan atau menyelesaikan Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan ("PFSA").
- Membantu dalam menyiapkan rencana keamanan fasilitas pelabuhan ("PFSP").

Conditioner (AC), parking lot, 24 hours security, 50 phone lines, and PABX system facilities. Additionally, the building also has a 350 KVA electricity generator with a strategic location at primary cargo route and Batu Ambar port.

- Equipment and infrastructure support includes:
 - a. Harbor traffic
 - b. Crane with 50 tons ph capacity, American Crane with 75 tons capacity, Todano Crane with 20 tons capacity, petty bone crane, carrylift with 20 tons capacity, forklift with 3 and 5 tons capacity, 40-feet prime over, and 40-feet trailer caps.

Tanjung Batu, Balikpapan

Peteka Shorebase Tanjung Batu ("PSTB") is located on 49 hectares of land owned by Pertamina in Tanjung Batu, Balikpapan. PSTB provides logistics facilities to support operational activities of oil and gas companies operating in Kalimantan and Sulawesi through the provision of one stop logistics services in form of:

- Provision of storage facilities (*open yard, warehouse*, and tank)
- Ship docking facilities (the largest jetty with a length of 200 meters)
- Cargo handling and transportation activities, office provision and accommodation.
- Provision of Bonded Logistics Center ("PLB") facilities
- Provision of waste management services, and other supporting services.
- Equipment and infrastructure supports, including:
 - Jetty facilities 200 m, 88 m, 65 m, 107 m and 2-3 m.
 - RORO facility 2x250 ton LCTs
 - Speedboat Jetty facilities

Recognized Security Organization ("RSO")

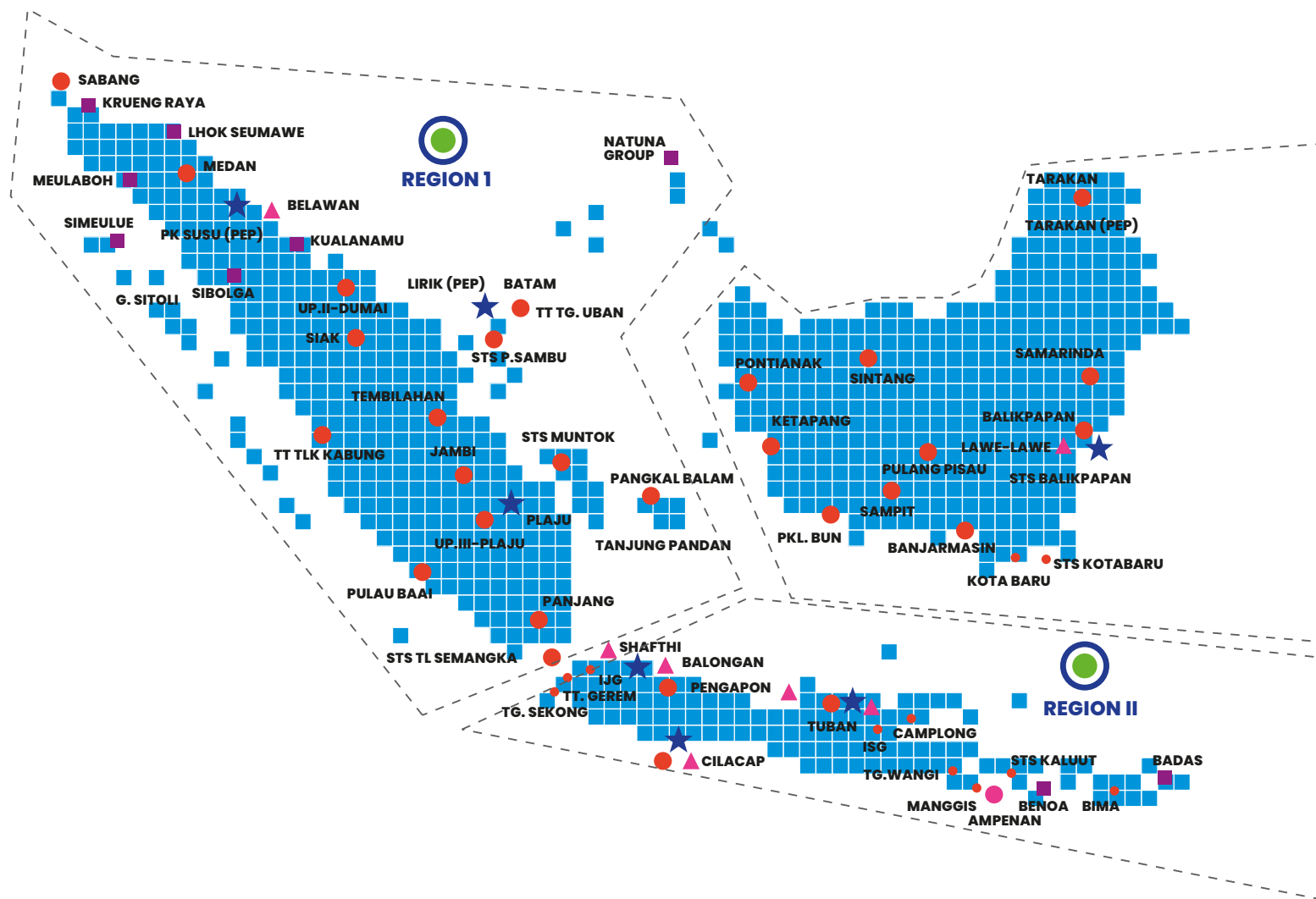
The Company has been appointed as RSO since 2004 based on the Director General of Sea Transportation Decree No. KI.93/1/15-04 which has been updated until now. This is the realization of the commitment of the RSO Board of Directors to participate in ISPS Code implementation in Indonesia.

RSO is a security sector consultant that provides suggestion or assistance in vessel operations and ports facilities, including:

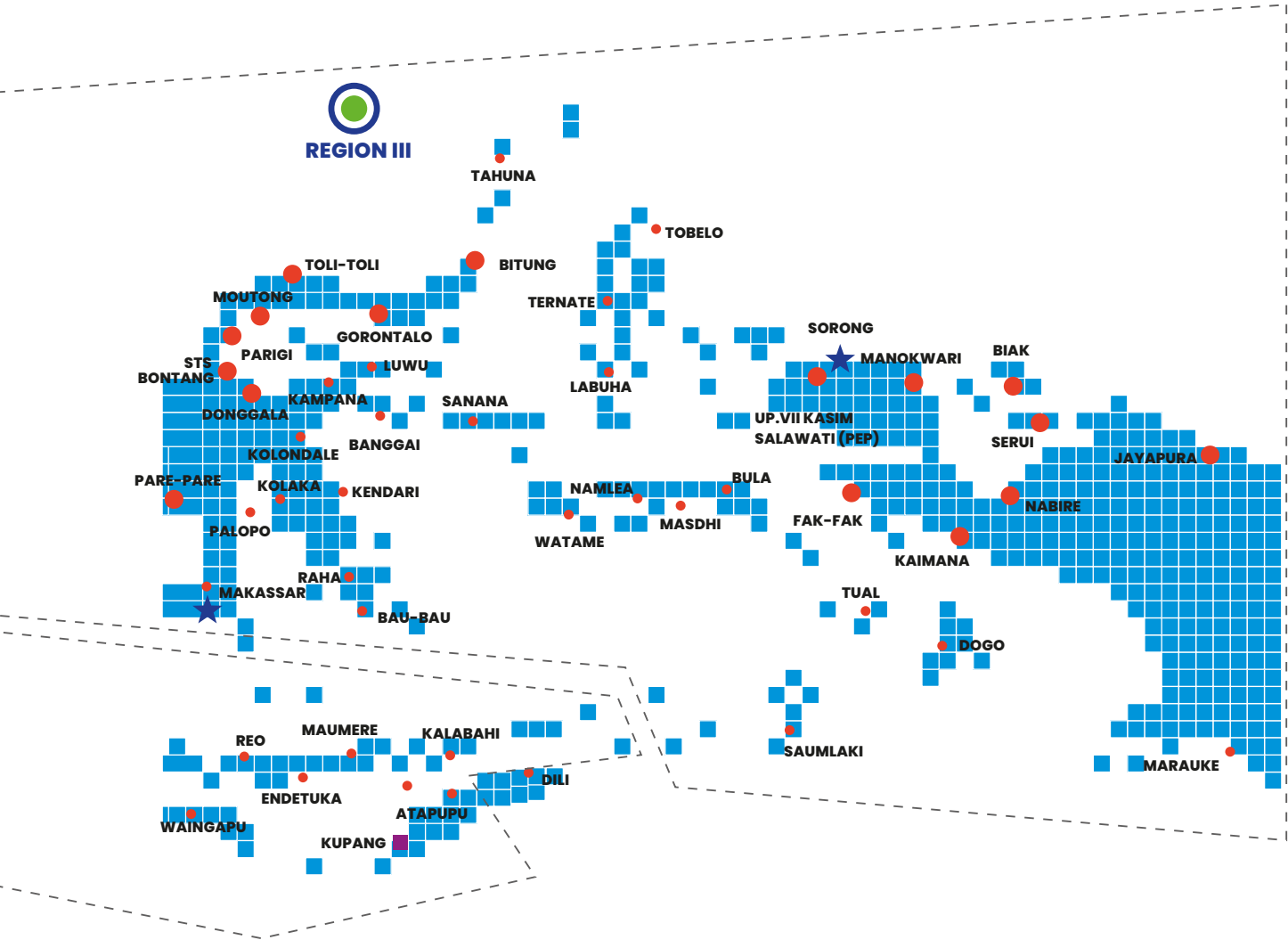
- Organizing activities of ISPS Code Certification for vessels ("ISSC") and Ports Facilities ("SoCPF").
- Conducting and completing the Ports Facilities Security Assessment ("PFSA").
- Assisting in the preparation of the Ports Facilities Security Plan ("PFSP").

Wilayah Operasional

Operational Area



Wilayah Operasional
Operational Area



Daftar Alamat Kantor Office Address

Kantor *Marine Business & Operation Region* ("MBOR")

Marine Business & Operation Region Office ("MBOR")

MBOR I

Kantor Pertamina MOR I
Jl. Yos Sudarso No. 8-10, Medan

MBOR II

Gedung Pertamina MOR V
Jl. Jagir Wonokromo No. 88, Surabaya

MBOR III

PT Pertamina Trans Kontinental
(Ex.Kantor Pertamina Patraniaga)
Jl. Longikis No.119 Kel. Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76123

Kantor *Marketing Area*

Marketing Area Office

MBOR I

Belawan

Jl. Minyak No. 1, Lingkungan I,
Kel. Belawan I, Kec. Medan, Belawan, Medan
Phone : (061) 6943464
Fax : (061) 694241-45
Email : Cabang.Belawan.PTK@pertamina.com

Batam

Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Batam 29435
Phone : (0778) 711741 - 42
Fax : (0778) 711263, 711136
Email : Cabang.Batam.PTK@pertamina.com

Dumai

Jl. Sultan Syarif Kasim No. 262, Dumai, Riau 28811
Phone : (0765) 443981,38370
Fax : (0765) 35173
Email : Cabang.Dumai.PTK@pertamina.com

Plaju-Palembang

Jl. Beringin No. 70, Plaju Palembang, Sumatra Selatan
Phone : (0711) 595473, 595376, 595475, 596474
Fax : (0711) 542367, 542377
Email : Cabang.Plaju.PTK@pertamina.com

MBOR II

Tanjung Priok

Gedung PT Pertamina Trans Kontinental
Area Logistic Pertamina
Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara
Phone : (021) 65307028, 65307026, 65307029
Fax : (021) 65307035
Email : Cabang.Priok.PTK@pertamina.com

Cilacap

Jl. Tongkol No. 20, Cilacap Selatan,
Cilacap, Jawa Tengah 53211
Phone : (0282) 521852
Fax : (0282) 521852
Email : Cabang.Cilacap.PTK@pertamina.com

Surabaya

Jl. Perak Timur 260, Perak, Surabaya
Phone : (031) 3282057,3299112
Fax : (031) 3299113
Email : Cabang.Surabaya.PTK@pertamina.com

MBOR III

Balikpapan

Jl. Yos Sudarso No.1,
Komp. Pertamina PO BOX 432 Balikpapan
Phone : (0542) 734693, 515663
Fax : (0542) 423766
Email : Cabang.Balikpapan.PTK@pertamina.com

Makassar

Jl. Ahmad Saleh No. 4,
Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang,
Makassar, Sulawesi Selatan
Phone : (0411) 873683
Fax : (0411) 873683
Email : Cabang.Makassar.PTK@pertamina.com

Sorong-Papua

Jl. Yos Sudarso No. 78, Komperta Lido Sorong, Papua
Phone : (0951) 322294, 329502, 329503
Fax : (0951) 322729
Email : Cabang.Sorong.PTK@pertamina.com

Port Area

PORT AREA BELAWAN

Arun Lhokseumawe

2nd Floor Marine Offline
PT. Arun NGL Blang Lancang, Lhokseumawe NAD
Phone : (0645) 654248
Fax : (0645) 654165
Email : Cabang.Arun.PTK@pertamina.com

Port Area Batam

Pulau Sambu

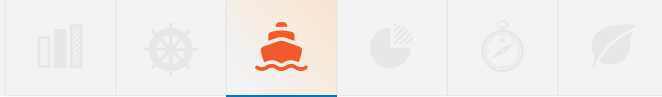
Pertamina Pulau Sambu RT. 01/RW. 06,
Kel. Tanjung Sari, Kec. Belakang Padang, Batam

Tarempa

Ds. Payamaran RT. 07/RW. 01, Kec. Palmatak,
Kab. Kepri Anabas, Kep. Riau

Tanjung Uban

Jl. Hang Tuah No.24 RT. 001/RW. 007,
Kel. Tanjung Uban, Kec. Bintan Utara,
Kab. Bintan, Kep. Riau

**PORT AREA DUMAI****Sei Pakning**

Gd. Marine Jasra Pertamina (Persero) – UPMS II
Jl. Jend. Sudirman, Sei Pakning 28761
Phone : (0766) 91112
Fax. : (0766) 91112
Email : Cabang.Dumai.PTK@pertamina.com

PORT AREA PLAJU-PALEMBANG**Jambi**

Jl. Yos Sudarso No. 36, Kasang, Jambi
Phone : (0741) 31623
Fax. : (0741) 7552186
Email : Cabang.Jambi.PTK@pertamina.com

PORT AREA TANJUNG PRIOK**Merak**

Jl. Pulojida Kav. M 90-92,
Tanjung Sekong, Merak, Banten
Phone : (0254) 571617, 571178
Fax. : (0254) 571617

Balongan

Jl. Kerang A8, Komplek Pertamina EP,
Balongan, Indramayu
Phone : (0234) 4288888

Cirebon

Jl. Sawo I C No. 46A, Komperta, Klayan,
Cirebon
Phone : (0231) 211691
Fax. : (0231) 211691

PORT AREA CILACAP**Semarang**

Mangunharjo RT. 002/RW. 003,
Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu, Semarang

PORT AREA SURABAYA**Tuban**

Jl. Tanjung Awar-Awar No. 10, RT. 02/RW. 01,
Dusun Boro, Ds. Tasik Harjo, Kec. Jenu, Tuban

Gresik

Jl. Yos Sudarso No. 01, RT. 002/RW. 004,
Kel. Bedilan, Gresik, Jawa Timur
Phone : (031) 3282057

Telaga Biru

Jl. Raya Pelabuhan No. 60, Bangkalan,
Madura
Phone : (031) 3071229

Situbondo

Jl. Raya Pelabuhan No. 1, Kalbut,
Situbondo
Phone : (0338) 675141

Tanjung Wangi

Jl. Raya Situbondo No. 8A,
Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi
Phone : (031) 3282057
Fax. : (031) 3299113

PORT AREA BALIKPAPAN**Kota Baru**

Gedung PT Pertamina (Persero) UPMS V
Jl. Pertamina RT. 21, Ds. Semayap, Kec. Pulau Laut Utara,
Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Phone : (0518) 23256

Kuala Semboja

Kuala Semboja RT. 003 Kel. Senipah, Kec. Samboja,
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Phone : (0542) 535137

Samarinda

Jl. Dr. Sutomo 40, Kel. Sanga-Sanga Dalam,
Kec. Sanga-Sanga, Kab. Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur
Phone : (0541) 671300
Fax. : (0541) 671487

Tanjung Santan

Komp. Chevron Santan Terminal RT. XI,
Desa Semangko, Kec. Marang Kayu,
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Phone : (0542) 548275
Fax. : (0542) 548278

Tarakan

Jl. Kesuma Bangsa RT. 04/RW. 03, Kel. Lungkas Ujung,
Kec. Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Timur

PORT AREA MAKASSAR**Bau-Bau**

Jl. Dayanu Ikhsanuddin KM. 8, Kel. Sulla, Kec. Betoambari,
Bau-Bau, Sulawesi Utara

Kolonodale

Jl. Wolter Mongonsidi No. 25, Kolonodale, Sulawesi Tengah
Phone : (0518) 21624

PORT AREA SORONG**Bintuni**

Bintuni, Babo, Irian Jaya Barat

Bula – Seram Timur

Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Bula Jl. Lumba-Lumba
RT. 002/RW. 001, Kel. Bula, Seram Timur

Wayame

Jl. Ir. M Putuhena RT. 006/RW. 003, Ds. Wayame, Kec. Teluk
Ambon, Ambon, Maluku
Phone : (0911) 310087
Fax. : (0911) 346155

Daftar Alamat Kantor
Office Address

Keanggotaan Asosiasi

Membership in Associations

Nama Organisasi Name of Organization	Lingkup Scope	Status Status
Indonesian National Shipowner Association ("INSA")	Nasional National	Anggota Member
Kamar Dagang Indonesia Indonesian Chamber of Commerce	Nasional National	Anggota Member



Struktur Organisasi

Organizational Structure



Susunan dan Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition and Profile



■ Di sepanjang tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris

Throughout 2022 there were no changes to the composition of the Board of Commissioners



Susunan dan Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition and Profile



Amir Hamzah

Komisaris Utama
President Commissioner

Periode jabatan 28 Mei 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1.
Term of office from May 28, 2021 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.

Warga Negara Indonesia

Usia 64 tahun
Kelahiran Malang, 24 Agustus 1958
Domisili di Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris sejak 28 Mei 2021 berdasarkan Akta No. 22 tanggal 31 Mei 2021, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ilmu Tanah di Universitas Brawijaya Malang (1981); serta beragam pendidikan non formal bidang Perminyakan, HSE, Perkapalan dan Manajemen dari dalam dan luar negeri.

Perjalanan Karir

Lebih dari 35 Tahun berpengalaman di bidang energi, khususnya Minyak dan Gas Bumi. Jabatan strategis: (1) Direktur Muda Divisi Konsultan PT Exsa International Co Ltd. (1982-1989), (2) Project Management Team Pembangunan Fasilitas Pengerungan Gas Plant Blok Kangean ARCO Bali North (1990-1992), (3) Senior Superintendent HSE ARCO Indonesia (1998), (4) Manajer HSE ARCO - BP (1999), (5) Kadin Hupmas BPMIGAS (2004 - 2007), (6) Kepala Divisi Eksternal BP MIGAS (2008-2009), (7) BPMIGAS rep. VP Pertamina Hulu, Total Indonesia, Conocophillips (2010-2012), (8) Kadiv Penunjang Operasi SKKMIGAS 2012 - 2014 dan (9) Direktur Pengembangan Bisnis HCI (2015-2021). Mendapatkan penghargaan Tingkat Dunia dalam ARCO Environmental Awards (1994) dan ARCO President Awards for The Best Safety Performance (1995). Mendapatkan nominator 10 besar untuk penerima Helios Awards pada BP Worldwide/International, London, Inggris (2001). Di tingkat nasional, mendapatkan penghargaan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2008).

Rangkap Jabatan

Di Dalam PTK: tidak ada.
Di Luar PTK: tidak ada.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham utama/pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.

Indonesian citizen

Aged 64
Born in Malang, August 24, 1958 .
Domiciled in Bogor, West Java, Indonesia.

Position and Basis of Appointment

Appointed as Commissioner since May 28, 2021 based on Deed No. 22 May 31, 2021, for 1 period of term of office (3 years). Previously he had never served on the Company's Board of Commissioners.

Education

Earned his Bachelor's Degree in Soil Science at Brawijaya University, Malang, in 1981, as well as various non-formal educations in the fields of Petroleum, HSE, Shipping and Management from within and outside the country.

Career History

More than 35 years of experience in the energy sector, especially Oil and Gas. Strategic positions: (1) Young Director of Consultant Division at PT Exsa International Co Ltd (1982-1989), (2) Project Management Team for the Construction of Pengerungan Gas Plant Facility in Kangean Block of ARCO Bali North (1990-1992), (3) HSE Senior Superintendent of ARCO Bali North (1998), (4) HSE Manager of ARCO-BP (1999), (5) BPMIGAS Head of Public Relations (2004-2007), (6) BP MIGAS Head of External Division (2008-2009), (7) BPMIGAS rep. VP Pertamina Upstream, Total Indonesia, Conocophillips (2010-2012), (8) Head of Operation Support Division SKKMIGAS 2012 - 2014, and Business Development Director of HCI (2015-2021). Received top 10 nominations for recipients of the Helios Awards at BP Worldwide/International, London, England (2001). At the national level, received an award from the Minister of Energy and Mineral Resources (2008).

Concurrent Position

In PTK: none.
Outside PTK: none.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, majority/controlling shareholder, or with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.

Susunan dan Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition and Profile

**Andi Saiful Haq**Komisaris
Commissioner

Periode jabatan 11 September 2020 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1.
Term of office from September 11, 2020 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.

Warga Negara Indonesia

Usia 48 tahun
Kelahiran Soppeng, 12 Mei 1975
Domisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Indonesian citizen

Aged 48
Born in Soppeng, May 12, 1975
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris sejak 11 September 2020 berdasarkan Akta No. 15 tanggal 23 November 2020, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Position and Basis of Appointment

Appointed as Commissioner since September 11, 2020 based on Deed No. 15 dated November 23, 2020 for 1 period of term of office (3 years). Previously he had never served on the Company's Board of Commissioners

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Sipil di Universitas Hasanuddin Makassar (1997); Pasca Sarjana Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung (2007) dan Cranfield University Inggris (2007); serta Pasca Sarjana Hubungan Internasional di Departemen Ilmu Politik Justus Liebig University Giessen, Jerman (2008).

Education

Bachelor's degree in civil engineering from Hasanuddin University Makassar, Master's Degree in Defense Studies from Bandung Institute of Technology (2007) and Cranfield University UK (2007), and Doctoral's Degree in International Relations from Department of Political Science of Justus Liebig University Giessen, Germany (2008).

Perjalanan Karir

Konsultan Program untuk Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh (2008-2011), Program Officer untuk Perdamaian dan Demokratisasi Aceh di Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia (2008-2011), Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta (2011-2013), Direktur di Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta (2013-2022), Komisaris di Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta (2022-Sekarang), Staf Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (2022-sekarang).

Career History

Program Consultant for the Commission for Disappearances and Acts of Violence (KontraS) in Aceh (2008-2011), Program Officer for Aceh Peace and Democratization at the Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia (2008-2011), Lecturer in the Department of International Relations of Paramadina University, Jakarta (2011-2013), Director at the Jakarta Institute for Transformation Studies (INTRANS) (2013-2022), Commissioner at the Jakarta Institute for Transformation Studies (INTRANS) (2022-present), Staff of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (2022-present).

Rangkap Jabatan

Di Dalam PTK: Ketua Komite Investasi (2021-sekarang).

Concurrent Position

Inside PTK: Chairman of the Investment Committee (2021-present).

Di Luar PTK: (1) Komisaris Institute for Transformation Studies (INTRANS) (2022-sekarang); (2) Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (2022-sekarang).

Outside PTK: (1) Commissioner of the Institute for Transformation Studies (INTRANS) (2022-present); (2) Special Staff to the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (2022-present)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham utama/pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, majority/controlling shareholder, or with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.



Susunan dan Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition and Profile



Khalid Zabidi

Komisaris
Commissioner

Periode jabatan 12 November 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1.
Term of office from November 12, 2021 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.

Warga Negara Indonesia

Usia 48 tahun
Kelahiran Bogor, 20 September 1974
Domisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris sejak 12 November 2021, berdasarkan Akta No. 16 tanggal 23 November 2021, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Pendidikan

Sarjana (S1) Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung (1999); Magister (S2) Manajemen Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung (2003); Fellowship Programme Communication Studies di Nanyang Technological University Singapore (2000).

Perjalanan Karir

(1) Dosen di FSRD ITB (2001-2008); (2) Dosen di Universitas Paramadina (2006-2021); (3) Direktur Utama PT Geothermal Teknindo Utama (2016-2021); (4) Senior Analis Content Konsultan Komunikasi Cybermedia HLVI (2017-2018); (5) Direktur Utama PT Tamaca (2017-2022); (6) Founder Epicentrum Consulting (2018-sekarang).

Rangkap Jabatan

Di Dalam PTK: Ketua Komite Audit (2021-sekarang).
Di Luar PTK: Komisaris PT Sejabat (2021-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham utama/pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.

Indonesian citizen

Aged 48
Born in Bogor, September 20, 1974
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Position and Basis of Appointment

Appointed as Commissioner since November 12, 2021 based on Deed No. 16 dated November 23, 2021 for 1 period of term of office (3 years). Previously he had never served on the Company's Board of Commissioners.

Education

Bachelor (S1) of Fine Arts and Design at the Institute of Technology Bandung (1999); Master's Degree (S2) in Fine Arts and Design at Institut Teknologi Bandung (2003); Fellowship Program Communication Studies at Nanyang Technological University Singapore (2000).

Career History

(1) Lecturer at FSRD ITB (2001-2008); (2) Lecturer at Paramadina University (2006-2021); (3) President Director of PT Geothermal Teknindo Utama (2016-2021); (4) Senior Content Analyst at HLVI Cybermedia Communication Consultant (2017-2018); (5) President Director of PT Tamaca (2017-2022); (6) Founder of Epicentrum Consulting (2018-present).

Concurrent Position

Inside PTK: Chairman of the Audit Committee (2021-present).
Outside of PTK: Commissioner of PT Sejabat (2021-present).

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, majority/controller shareholder, or with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.

Susunan dan Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition and Profile

**Agustinus Bensik Lomboan**Komisaris
Commissioner

Periode jabatan 9 Desember 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1.
Term of office from December 9, 2021 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.

Warga Negara Indonesia

Usia 58 tahun
Kelahiran Balikpapan, 7 Agustus 1964
Domisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Indonesian citizen

Aged 58 year
Born in Balikpapan, August 7, 1964
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Desember 2021, berdasarkan Akta No. 41 tanggal 24 Desember 2021, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Position and Basis of Appointment

Appointed as Commissioner since December 9, 2021 based on Deed No. 41 dated December 24, 2021 for 1 period of term of office (3 years). Previously he had never served on the Company's Board of Commissioners

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Mesin di Universitas Trisakti Jakarta (1988); Magister (S2) Manajemen di Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta (1995).

Education

Earned his Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Trisakti University, Jakarta (1988); Magister Management from Indonusa Esa Unggul University, Jakarta (1995).

Perjalanan Karir

(1) Relationship Manager Bank Panin (1989-1994); (2) VP. Bank Harmoni (1994-1995); (3) VP. Bank PDFCI (1995-1998); (4) Direktur/CFO Bank PDFCI- (1989-1999); (5) Partner Financial Advisor Pridana Sekuritas (2000-2001); (6) CFO & CBDO PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (2001-2010); (7) Presiden Komisaris PT. Glory Kasih Indonesia (2009-sekarang); (8) Komisaris PT. Kendilo Coal Indonesia (2009-2019); (9) Komisaris CV Eclat Prima Cemerlang (2005-sekarang); Komisaris CV Oasis Centre Arena (2018-sekarang); Komisaris CV Oca Fortable 2019-sekarang); (10) Komisaris CV Oasis Centre Arena (2018-sekarang); (11) Komisaris CV Oca Fortable (2019-sekarang). (12) Direktur PT Tiga Kawa Mitra (2022-sekarang).

Career History

(1) Panin Bank's Relationship Manager (1989-1994); (2) VP of Harmony Bank (1994-1995); (3) VP of PDFCI Bank (1995-1998); (4) Director/CFO of Bank PDFCI- (1989-1999); (5) Pridana Sekuritas's Financial Advisor Partner (2000-2001); (6) CFO & CBDO of PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (2001-2010); (7) President Commissioner of PT. Glory Kasih Indonesia (2009-present); (8) Commissioner of PT. Kendilo Coal Indonesia (2009-2019); (9) Commissioner of CV Eclat Prima Cemerlang (2005-present); Commissioner of CV Oasis Center Arena (2018-present); Commissioner of CV Oca Fortable 2019-present); (10) Commissioner of CV Oasis Center Arena (2018-present); (11) Commissioner of CV Oca Fortable (2019-present). (12) Director of PT Tiga Kawa Mitra (2022-present).

Rangkap Jabatan

Di Dalam PTK: Ketua Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko (2021-sekarang).

Di Luar PTK: (1) Komisaris PT Glory Kasih Indonesia (2009-sekarang); (2) Komisaris CV Eclat Prima Cemerlang (2005-sekarang); (3) Komisaris Oasis Centre Arena (2018-sekarang); (4) Komisaris CV Oca Fortable (2019-sekarang); (5) Direktur PT Tiga Kawa Mitra (2022-sekarang).

Concurrent Position

Inside PTK: Chairman of the Nomination, Remuneration & Risk Management Committee (2021-present).

Outside PTK: (1) Commissioner of PT Glory Kasih Indonesia (2009-present); (2) Commissioner of CV Eclat Prima Cemerlang (2005-present); (3) Commissioner of Oasis Center Arena (2018-present); (4) Commissioner of CV Oca Fortable (2019-present); (5) Director of PT Tiga Kawa Mitra (2022-present).

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham utama/pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, majority/controller shareholder, or with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.



Susunan dan Profil Direksi

Board of Directors Composition and Profile



Susunan dan Profil Direksi

Board of Directors Composition and Profile

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2022

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors Throughout 2022

Periode 1 Januari s.d 8 Maret 2022 Period January 1 to March 8, 2022	Periode 8 Maret s.d 2 April 2022 Period March 8 to April 2, 2022	Periode 2 April s.d 15 Juli 2022 Period April 2 to July 15, 2022	Periode 15 Juli s.d 19 Juli 2022 Period July 15 to July 19, 2022	Periode 19 Juli s.d 5 Agustus 2022 Period July 19 to August 5, 2022	Periode 5 Agustus s.d 6 Desember 2022 Period August 5, to December 6, 2022	Periode 7 s.d 31 Desember 2022 Period 7 to December 31, 2022	Keterangan Information
Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahanw (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	-
Hadi Purnomo (Direktur Operasi) (Operations Director)	Hadi Purnomo (Direktur Operasi) (Operations Director)						Pada 2 April 2022 Hadi Purnomo diberhentikan dari jabatan Direktur Operasi. On April 2, 2022 Hadi Purnomo was dismissed from the position of Operations Director.
Arsono Kuswardanu (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)							Pada 8 Maret 2022 Arsono Kuswardanu diberhentikan dari jabatan Direktur Pemasaran. On March 8, 2022 Arsono Kuswardanu was dismissed from the position of Marketing Director.
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Operasi) (Finance & HR Director concurrently Acting Operations Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Operasi) (Finance & HR Director concurrently Acting Operations Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Pemasaran) (Finance & HR Director concurrently Acting Marketing Director)	Pada 2 April – 14 Juli dan 19 Juli – 4 Agustus 2022 Afan Aftory menjabat sebagai Plt. Direktur Operasi dan pada 7 Desember 2022 Afan Aftory menjabat sebagai Plt. Direktur Pemasaran. On April 2 – July 14 and July 19 – August 4, 2022 Afan Aftory served as Acting. Director of Operations and on December 7, 2022 Afan Aftory served as Acting. Marketing Director.
	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran merangkap Plt. Direktur Operasi) (Marketing Director concurrently Acting Operations Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)		Imam Bustomi menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 8 Maret 2022 dan pada 15 Juli – 18 Juli 2022 Imam Bustomi menjabat Plt. Direktur Operasi. Pada tanggal 6 Desember 2022 Imam Bustomi mengundurkan diri dari jabatan Direktur Pemasaran. Imam Bustomi served as Marketing Director since March 8, 2022 and on July 15 – July 18, 2022 Imam Bustomi served as Acting. Director of Operations. On December 6, 2022 Imam Bustomi resigned from the position of Marketing Director.
					Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	Slamet Harianto diangkat untuk menjabat Direktur Operasi sejak 5 Agustus 2022. Slamet Harianto was appointed to serve as Operations Director since August 5, 2022.



Susunan dan Profil Direksi

Board of Directors Composition and Profile



Nepos MT Pakpahan

Direktur Utama
President Director

Periode jabatan 15 Juli 2022 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-2.
Term of office from July 15, 2022 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 2nd Period.

Warga Negara Indonesia

Usia 59 tahun
Kelahiran Laguboti, 8 November 1963
Domisili di Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 15 Juli 2019, berdasarkan Akta No. 5 tanggal 17 Juli 2019, untuk masa jabatan hingga 15 Juli 2022. Beliau kembali diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 06 tanggal 19 Juli 2022 untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun).

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya Malang (1989); dan Magister (S2) Teknik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2001).

Perjalanan Karir

Pernah menjabat sebagai VP HSSE Upstream PT Pertamina (Persero) (2017-2019).

Rangkap Jabatan

Di Dalam PTK: tidak ada.
Di Luar PTK: tidak ada.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham utama/pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.

Indonesian citizen

Aged 59
Born in Laguboti, November 8, 1963
Domiciled in South Tangerang, Banten, Indonesia.

Position and Basis of Appointment

Appointed as President Director since July 15, 2019 based on Deed No. 5 dated July 17, 2019 for a term of office until July 15, 2022. He was re-appointed as President Director based on Deed No. 06 dated July 19, 2022 for 1 period of term of office (3 years).

Education

Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Brawijaya University Malang (1989); and Master's Degree in Engineering from Jenderal Soedirman University Purwokerto (2001).

Career History

Previously served as VP HSSE Upstream of PT Pertamina (Persero) (2017-2019).

Concurrent Position

In PTK: none.
Outside PTK: none.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, majority/controlling shareholder, or with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.

Susunan dan Profil Direksi

Board of Directors Composition and Profile

**Afan Aftory**

Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Pemasaran
Finance & HR Director, concurrently serves as Marketing Director

Periode jabatan 1 September 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1.
Term of office from September 1, 2021 (for a period of 1 term of office, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.

Warga Negara Indonesia

Usia 46 tahun
Kelahiran Jakarta, 19 Juni 1976
Domisili di Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM sejak 1 September 2021, berdasarkan Akta No. 5 tanggal 17 September 2021, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.

Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Borobudur (1997); Magister (S2) Manajemen di Universitas Satyagama (1999), dan Pendidikan Profesi Akuntan ("PPAk") di Universitas Indonesia (2004).

Perjalanan Karir

Bergabung dengan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2009. Sejumlah jabatan penting yang pernah dicapai adalah sebagai Vice President Finance PT Pertamina Lubricants (2019-2020), dan Vice President Financial Reporting & Accounting PT Pertamina (Persero) (2020-2021).

Rangkap Jabatan

Di Dalam PTK: PLT Direktur Pemasaran.
Di Luar PTK: tidak ada.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham utama/pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.

Indonesian citizen

Aged 46 years
Born in Jakarta, June 19, 1976
Domiciled in Jakarta, Indonesia.

Position and Basis of Appointment

Appointed as Director of Finance and HR since September 1, 2021, based on Deed No. 5 dated September 17, 2021 for 1 period of term of office (3 years). Previously he had never served on the Board of Directors of the Company.

Education

Bachelor's degree in Accounting Economics from Borobudur University (1997); Master's degree in Management at Satyagama University (1999), and Accountant Professional Education ("PPAk") from the University of Indonesia (2004).

Career History

Joined PT Pertamina (Persero) since 2009. A number of important positions that have been achieved are as Vice President Finance of PT Pertamina Lubricants (2019-2020), and Vice President of Financial Reporting & Accounting of PT Pertamina (Persero) (2020-2021).

Concurrent Position

In PTK: Acting Marketing Director.
Outside PTK: none.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, majority/controlling shareholder, or with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.

Susunan dan Profil Direksi

Board of Directors Composition and Profile



Slamet Harianto

Direktur Operasi
Operation Director

Periode jabatan 5 Agustus 2022 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1.
Term of office from August 5, 2022 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.

Warga Negara Indonesia

Usia 43 tahun
Kelahiran Malang, 22 Februari 1979
Domisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Operasi sejak tanggal 5 Agustus 2022, berdasarkan Akta No.04 tanggal 10 Agustus 2022, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.

Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya Malang (2002); dan Magister (S2) Teknik dari Universitas Indonesia (2011).

Perjalanan Karir

Bergabung dengan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2003. Sejumlah jabatan penting yang pernah dicapai beliau adalah sebagai Kepala Divisi Operasi PT Nusantara Regas (2016-2019), dan Manager LNG Operation PT Pertamina (Persero) (2019-2022).

Rangkap Jabatan

Di Dalam PTK: tidak ada.
Di Luar PTK: tidak ada.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham utama/pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.

Indonesian citizen

Aged 43
Born in Malang, February 22, 1979
Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia.

Position and Basis of Appointment

Appointed as Director of Operations since August 5, 2022, based on Deed No.04 dated August 10, 2022 for 1 period of term of office (3 years). Previously he had never served on the Board of Directors of the Company.

Education

Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Brawijaya University Malang (2002); and Master's degree in Engineering from the University of Indonesia (2011)..

Career History

Joined PT Pertamina (Persero) since 2003. A number of important positions he has achieved are Head of the Operations Division of PT Nusantara Regas (2016-2019), and Manager of LNG Operations of PT Pertamina (Persero) (2019-2022).

Concurrent Position

In PTK: none.
Outside PTK: none.

Affiliation

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, majority/controlling shareholder, or with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.

Profil Pejabat Perusahaan

Profile of Company's Executive Officers

VP di Bawah Direktur Utama



Lahir di Lamongan, pada tanggal 26 November 1982 dan berdomisili di Balikpapan. Beliau meraih gelar MBA dari Institut Teknologi Bandung (2022). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Sr. Analyst HSSE Planning, MS & RM* di PT PHKT Kalimantan.

Born in Lamongan, on November 26, 1982 and domiciled in Balikpapan. He earned an MBA from the Technology Institute of Bandung (2022). Previously he served as *Sr. HSSE Planning Analyst, MS & RM* at PT PHKT Kalimantan.

VP Under President Director



Lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Desember 1977 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma (2011), dan Pasca Sarjana Ekonomi Lalu Lintas Laut dari Rotterdam School of Management Erasmus University Belanda (2013). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Manager Marine Strategic Planning* di PT Pertamina (Persero).

Born in Jakarta on on December 24, 1977 and domiciled in Jakarta. He obtained Bachelor's Degree in Informatics Engineering from Gunadarma University (2011) and Master's Degree in Marine Traffic Economics from Rotterdam School of Management at Erasmus University in the Netherlands (2013). Previously, he served as *Manager of Marine Strategic Planning* at PT Pertamina (Persero).



Lahir di Pekanbaru, pada 2 Juni 1968 dan berdomisili di Tangerang Selatan. Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung (1993), dan Master of Public Relations dari Bond University Australia (1999). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Manager Relations* di PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

Born in Pekanbaru on January 23, 1968 and domiciled in South Tangerang. He obtained Bachelor's Degree in Communication Science from Padjadjaran University, Bandung (1993) and Master of Public Relations from Bond University Australia (1999). Previously, he served as *Manager of Relations* at PT Pertamina Hulu East Kalimantan.



Lahir di Jakarta, pada 23 Januari 1968 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta (1996). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *VP Operation*.

Born in Jakarta on June 2, 1968 and domiciled in Jakarta. Earned her bachelor's degree in management economics from the University of Prof. Dr. Moestopo Jakarta (1996). Previously she served as *VP Operations*.

Profil Pejabat Perusahaan Profile of Company's Executive Officers

VP di Bawah Direktur Keuangan dan SDM



Lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Juli 1976 dan berdomisili di Tangerang. Beliau meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Jayabaya (1999), dan Magister Manajemen Pemasaran dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta (2010). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Manager HR Operations* PIEP Indonesia.

Born in Jakarta on July 27, 1976 and domiciled in Tangerang. He earned his Bachelor's Degree in International Relations from Jayabaya University (1999) and Master's Degree in Marketing Management from Prasetya Mulya School of Management, Jakarta (2010). Previously, he served as Manager of HR Operations at PIEP Indonesia.



Lahir di Bogor, pada 5 Juli 1983 dan berdomisili di Bogor. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung (2005), Sarjana Ekonomi Umum dari Universitas Padjadjaran Bandung (2009), Magister Kenotariatan dari Universitas Padjadjaran Bandung (2008), dan Magister Sains Manajemen dari Universitas Indonesia (2013). Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Manager Compliance & Board Support* PT Pertamina International Shipping.

Born in Bogor, on July 5, 1983 and domiciled in Bogor. He earned his Bachelor of Law from Padjadjaran University, Bandung (2005), Bachelor of General Economics from Padjadjaran University, Bandung (2009), Master of Notary from Padjadjaran University, Bandung (2008), and Master's degree in Management Science from the University of Indonesia (2013). Previously he served as Compliance & Board Support Manager of PT Pertamina International Shipping.

VP under Finance and HR Director



Lahir di Palembang, pada 17 Februari 1977 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sriwijaya (2001), dan Magister Ekonomi Manajemen dari Universitas Diponegoro (2015). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Asset Finance Manager* PT Pertamina (Persero).

Born in Palembang on February 17, 1977 and domiciled in Jakarta. He earned his Bachelor of Economics in Accounting from Sriwijaya University (2001) and Master of Management Economics from Diponegoro University (2015). Previously he served as Asset Finance Manager of PT Pertamina (Persero).

Profil Pejabat Perusahaan

Profile of Company's Executive Officers

VP di Bawah Direktur Operasi



Lahir di Malang, pada 24 September 1967 dan berdomisili di Bekasi. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya (1991). Sebelumnya menjabat sebagai *Manager Marine Facilities & Infrastructure* PT Pertamina (Persero).

Born in Malang on September 24, 1967 and domiciled in Bekasi. He earned his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Brawijaya University (1991). Previously he served as *Manager of Marine Facilities & Infrastructure* of PT Pertamina (Persero).

VP under Operations Director



Lahir di Bandung, pada 11 Juli 1982 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (2006), dan Magister Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (2013). Sebelumnya menjabat sebagai *Manager Asset Management* PT Pertamina (Persero).

Born in Bandung on July 11, 1982 and domiciled in Jakarta. He earned his Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (2006) and Master's Degree in Chemical Engineering from Bandung Institute of Technology (2013). Previously he served as *Asset Management Manager* at PT Pertamina (Persero).

Profil Pejabat Perusahaan Profile of Company's Executive Officers

VP di Bawah Direktur Pemasaran



Lahir di Cilacap, pada 21 April 1979 dan berdomisili di Bandung. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (2003), Pasca Sarjana Teknik Industri dari Universitas Indonesia (2008), dan Pasca Sarjana Business Administration dari Rotterdam School of Management Erasmus University Belanda (2012). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Region Manager Marine I* PT Pertamina (Persero).

Born in Cilacap on April 21, 1979 and domiciled in Bandung. He earned his Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (2003) and Master's Degree in Industrial Engineering from University of Indonesia (2008) and Master's Degree in Business Administration from Rotterdam School of Management at Erasmus University in the Netherlands (2012). Previously, he served as *Region Manager Marine I* PT Pertamina (Persero).



Lahir di Banyuwangi, pada 27 September 1971 dan berdomisili di Bekasi. Beliau meraih gelar *Advance Diploma in Maritime Transportation* dan Ahli Nautika Tingkat II dari Singapore Polytechnic. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *VP Operation*.

Born in Banyuwangi on September 27, 1971 and domiciled in Bekasi. He obtained Advanced Diploma Degree in Maritime Transportation and Tier II Nautical Expert from Singapore Polytechnic. Previously he served as *VP Operations*.

VP under Marketing Director



Lahir di Jakarta, pada 3 Maret 1982 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti (2006), dan Pasca Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2013). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Region Manager Marine V* PT Pertamina (Persero).

Born in Jakarta on March 3, 1982 and domiciled in Jakarta. He earned his Bachelor's Degree in Industrial Engineering from Trisakti University (2006) and Master's Degree in Business Administration from Gadjah Mada University Yogyakarta (2013). Previously, he served as *Region Manager Marine V* of PT Pertamina (Persero).



Lahir di Malang, pada 19 Maret 1968 dan berdomisili di Bekasi. Beliau meraih gelar *Diploma Teknik Kimia* dari Universitas Malang (1990). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Region Manager Marine III* PT Pertamina (Persero).

Born in Malang on March 19, 1968 and domiciled in Bekasi. He earned his Diploma Degree in Chemical Engineering from University of Malang in 1990. Previously, he served as *Region Manager Marine III* of PT Pertamina (Persero).

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Sejalan dengan peralihan kegiatan marine services dari PT Pertamina (Persero) ke PTK pada tahun 2021, peralihan terkait tidak hanya terbatas pada kegiatan bisnis melainkan juga pekerja perbantuan PT Pertamina (Persero) yang sebelumnya mengelola kegiatan *operasional marine services*.

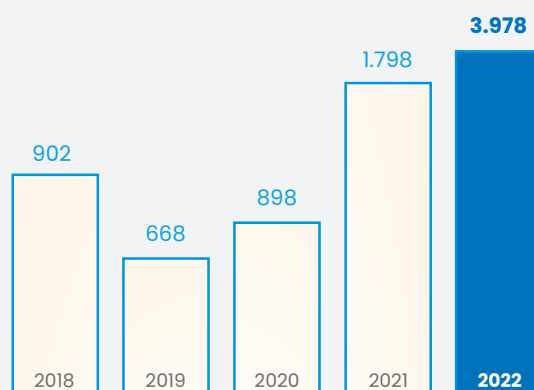
Hingga akhir tahun 2022, PTK mempekerjakan 3.978 karyawan. Jumlah ini meningkat 121,25% dibandingkan jumlah karyawan Perusahaan di tahun 2021 yang mencapai 1.798 orang. Adanya peningkatan karyawan disebabkan oleh terdapatnya proses reorganisasi New PTK dengan bergabungnya organisasi Marine Pertamina ke PTK, sehingga jumlah pekerja bertambah dengan penambahan pekerja perbantuan dari *holding* ke PTK.

In line with the transition of marine services activities from PT Pertamina (Persero) to PTK in 2021, the related transition is not only limited to business activities but also PT Pertamina (Persero)'s seconded employees who previously managed marine services operational activities.

Until the end of 2022, PTK employed 3,978 employees. This number increased by 121.25% compared to the number of Company's employees in 2021 which reached 1,798 employees. The increase in employees was caused by the New PTK reorganization process with the joining of the Marine Pertamina organization to PTK, so that the number of employees increased with the addition of seconded employees from holding to PTK.

Perkembangan Jumlah Karyawan 2018-2022
Development of Total Employees 2018-2022

(orang)
(people)



Di bawah ini disajikan jumlah dan komposisi karyawan tahun 2022 dan perbandingannya dengan tahun 2021.

The following is the number and composition of employees in 2022 and the comparison with 2021.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Employee Composition by Employment Status (persons)

Status Status	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (orang) Number (persons)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Number (persons)	Komposisi Composition (%)	Orang Person	%	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Pekerja Tetap ("PWTT") Permanent Employee	567	14,25	600	33,15	(33)	(5,50)	↓
Pekerja Kontrak ("PWT") Contract Employee	602	15,13	634	35,48	(32)	(5,05)	↓
Pekerja Tidak Tetap ("TKJP") Non-Permanent Employee	2.809	70,61	564	31,37	2.245	398,05	↑
Jumlah Total	3.978	100,00	1.798	100,00	2.180	121,25	↑

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jenjang Jabatan (orang)

The Number of Employees and Employee Composition by Organizational Level/Position (persons)

Level Organisasi Organizational Level	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (orang) Number (persons)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Number (persons)	Komposisi Composition (%)	Orang Person	%	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Eksekutif Executive	13	0,33	22	1,22	(9)	(40,91)	↓
Manager	75	1,89	58	3,23	(13)	(22,41)	↓
Asisten Manager Assistant Manager	144	3,62	28	1,56	(12)	(42,86)	↓
Staf Staff	937	23,55	1.126	62,63	(31)	(2,75)	↓
Non-Staf Non-Staff	2.809	70,61	564	31,37	2.245	398,05	↑
Jumlah Total	3.978	100,00	1.798	100,00	(65)	121,25	↑

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)

The Number of Employees and Employee Composition by Education (persons)

Jenjang Pendidikan Educational Level	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (orang) Number (persons)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Number (persons)	Komposisi Composition (%)	Orang Person	%	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Pasca Sarjana Master's Degree	63	1,58	69	3,84	(6)	(8,70)	↓
Sarjana Bachelor's Degree	725	18,23	489	27,20	236	48,26	↑
Diploma Diploma	716	18,00	175	9,73	541	309,14	↑
SMA dan setara* Senior High School and equivalent*	1.868	46,96	582	32,37	1.286	220,96	↑
Lain-lain (Ijazah Laut) (Marine Diploma)	606	15,23	483	26,86	123	25,47	↑
Jumlah Total	3.978	100,00	1.798	100,00	2.180	121,25	↑

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia (orang)

The Number of Employees and Employee Composition by Age (persons)

Rentang Usia Age Range	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (orang) Number (persons)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Number (persons)	Komposisi Composition (%)	Orang Person	%	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
>55 tahun years old	37	0,93	35	1,95	2	5,71	↑
51-55 tahun years old	459	11,54	245	13,63	214	87,35	↑
41-50 tahun years old	1.257	31,60	565	31,42	692	122,48	↑
31-40 tahun years old	1.394	35,04	582	32,37	812	139,52	↑
21-30 tahun years old	814	20,46	369	20,52	445	120,60	↑
<20 tahun years old	17	0,43	2	0,11	15	750,00	↑
Jumlah Total	3.978	100,00	1.798	100,00	2.180	121,25	↑

Sumber Daya Manusia
Human Resources**Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin**

The Number of Employees and Employee Composition by Age (persons)

Jenis Kelamin Gender	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (orang) Number (persons)	Komposisi Composition (%)	Jumlah (orang) Number (persons)	Komposisi Composition (%)	Orang Person	%	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Laki-laki Male	3.662	92,06	1.594	88,65	2.068	129,74	↑
Perempuan Female	316	7,94	204	11,35	112	54,90	↑
Jumlah Total	3.978	100,00	1.798	100,00	2.180	121,25	↑



Tentang pengembangan SDM dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dapat dilihat pada bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, serta Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Discussion on HR development and fulfillment of labor rights can be seen in the Management Discussion and Analysis chapter on Company Performance, and the Sustainability Report as an integral document of this Annual Report.



Pemegang Saham

Shareholders

■ Di sepanjang tahun 2022 tidak terdapat perubahan kepemilikan saham PTK

Throughout 2022 there was no change in PTK share ownership

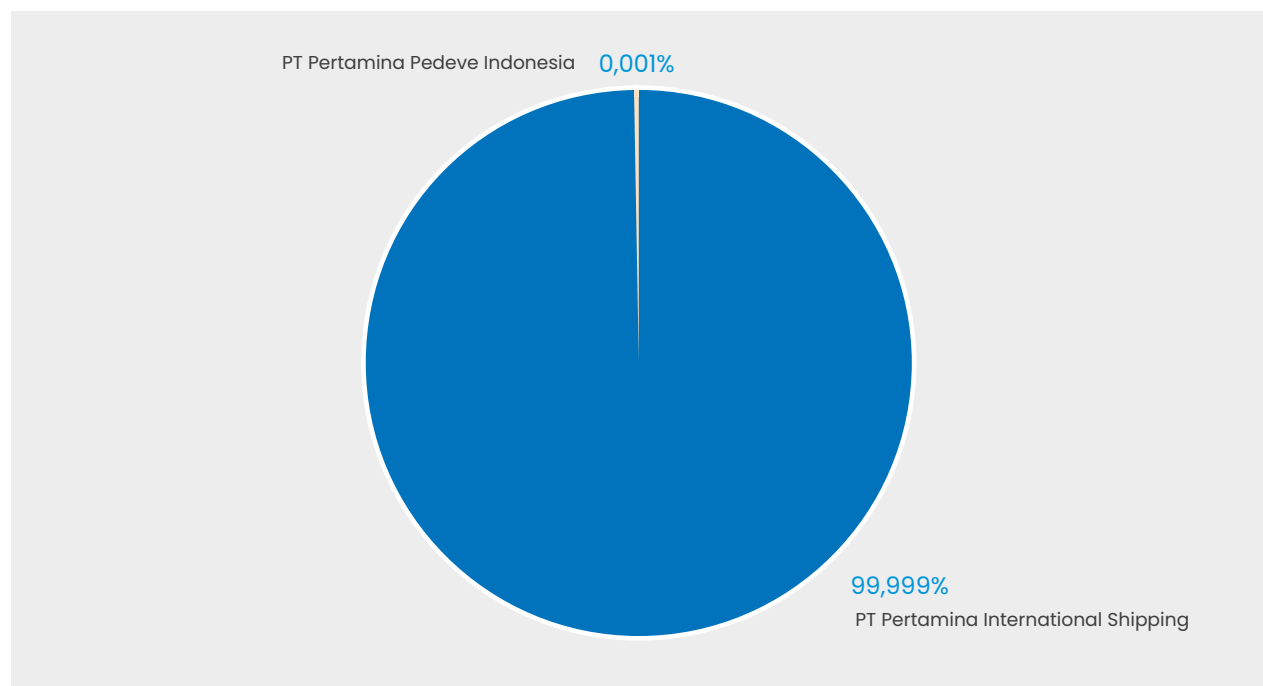
Komposisi Kepemilikan Saham dan Jenis Saham

Composition of Share Ownership and Types of Shares

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Pemegang Saham Shareholder	per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 As of 31 December 2021 and 31 December 2022	
	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (in shares)	Komposisi (%) Composition (%)
Kepemilikan di atas 5% Ownership Above 5%		
PT Pertamina International Shipping		
Saham Seri A Series A Shares	1.234.737	99,933
Saham Seri B Series B Shares	819	0,066
Kepemilikan di bawah 5% Ownership Below 5%		
PT Pertamina Pedeve Indonesia (Saham Seri A) PT Pertamina Pedeve Indonesia (Series A Shares)	10	0,001



Pemegang Saham
Shareholders

Hingga akhir tahun 2022, Perusahaan tidak melakukan penawaran umum saham, dan tidak memiliki kebijakan kepemilikan saham baik oleh manajemen maupun karyawan. Pemegang saham Perusahaan, yaitu PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia, juga melakukan penawaran umum saham dan tidak memiliki kebijakan kepemilikan saham baik oleh manajemen maupun karyawan. Dengan demikian, tidak terdapat manajemen maupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Until the end of 2022, the Company has not exercised public offering of shares, and has no share ownership policy by either management or employees. The Company's shareholders, namely PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, have also not exercised public offering of shares and have no share ownership policy either by management or employees. Thus, neither management nor employees own the Company's shares, either directly or indirectly.

Informasi Mengenai Pemegang Saham
Utama dan Pengendali Sampai Kepada
Pemilik IndividuInformation Regarding Majority and
Controlling Shareholder Up to Individual
Owner

PT Pertamina (Persero) merupakan entitas induk PTK yang memiliki 100,00% saham PTK, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai pemilik saham penuh atau 100,00% dari PT Pertamina (Persero), Pemerintah Republik Indonesia bertindak selaku entitas pemilik akhir PTK

PT Pertamina (Persero) is the parent entity of PTK which owns 100.00% of PTK shares. As a full shareholder or 100.00% of PT Pertamina (Persero), the Government of the Republic of Indonesia acts as the ultimate owner of PTK

PT Pertamina International Shipping
Pemegang Saham Utama/Pengendali
Majority/Controlling Shareholder

Tanggal Pendirian Date of Establishment	: 23 Desember 2016 December 23, 2016
Status Badan Hukum Legal Entity Status	: Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Asing ("PMA") Limited Liability Company ("PT"); Foreign Investment ("PMA")
Kepemilikan Saham Share Ownership	: PT Pertamina (Persero) : 98,880% PT Pertamina Pedeve Indonesia : 0,003% Nippon Yusen Kabushiki Kaisha : 1,117%
Kegiatan Usaha Business Activities	: • Pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia • Layanan logistik offshore dan onshore terintegrasi • Pengangkutan kargo ekspor/impor • Sea transportation between ports in Indonesia • Integrated offshore and onshore logistics services • Transportation of export/import cargo
Alamat Address	: • PT Pertamina International Shipping Gedung Patra Jasa, Lantai 14 Jalan Gatot Subroto, Kavling 32-34 Jakarta 12950 • PT Pertamina International Shipping Grha Pertamina – Tower Pertamina Lantai 19 Jalan Medan Merdeka Timur No. 6 Gambir, Jakarta Pusat, 10110
Telp. Phone	: +6221 52900271 – 522900272
Situs Web Website	: https://www.pertamina-pis.com

PT Pertamina International Shipping

Pemegang Saham Utama/Pengendali

Majority/Controlling Shareholder

Skala Usaha Business Scale	:	Aset: USD3,663,175,930 Assets: USD3.663.175.930
	:	Liabilitas: USD1,789,251,444 Liabilities: USD1.789.251.444
	:	Ekuitas: USD1.873.924.486 Equity: USD1.873.924.486
	:	Pendapatan: USD2,832,006,100 Revenue: USD2.832.006.100
	:	Laba bersih: USD205,008,061 Net profit: USD205.008.061

PT Pertamina Pedeve Indonesia

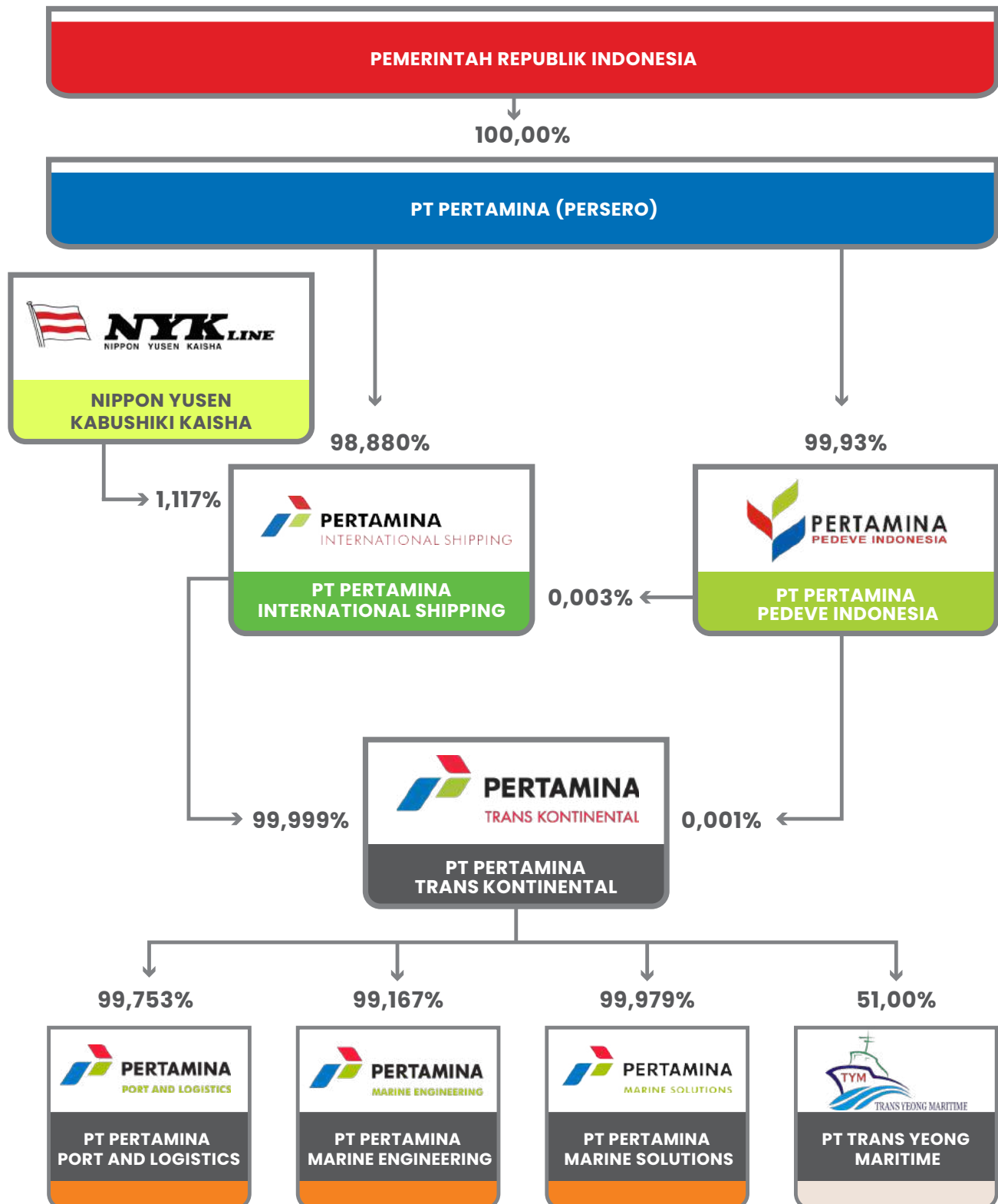
Pemegang Saham Utama

Minority Shareholder

Tanggal Pendirian Date of Establishment	:	26 Januari 1993 January 26, 1993
Status Badan Hukum Legal Entity Status	:	Perseroan Terbatas ("PT") Limited Liability Company ("PT")
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	PT Pertamina Persero: 99,93% PT Pertamina Patra Niaga: 0,07%
Kegiatan Usaha Business Activities	:	Penyertaan modal di Anak Perusahaan ("AP") / afiliasi PT Pertamina (Persero) dan Portofolio investasi Equity participation in Subsidiaries / affiliates of PT Pertamina (Persero) and Investment Portfolio
Alamat Address	:	Gedung Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 4 Jl. Raden Saleh No.44 Cikini Menteng - Jakarta Pusat 10330
Telp. Phone	:	+6221 3911857
Faksimili Fax	:	+6221 3911859
Call Center	:	135
Situs Web Website	:	www.pdv.co.id
Surel Email	:	pdv@pdv.co.id
Skala Usaha Business Scale	:	Aset: Rp3.919.284.000.000 Assets: Rp3,919,284,000,000
	:	Liabilitas: Rp753.350.000.000 Liabilities: Rp753,350,000,000
	:	Ekuitas: Rp3.165.934.000.000 Equity: Rp3,165,934,000,000
	:	Pendapatan: Rp155.821.000.000 Revenue: Rp155,821,000,000
	:	Laba bersih: Rp141.981.000.000 Net profit: Rp141,981,000,000

Struktur Grup dan Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, ventura bersama, serta *special purpose vehicle* ("SPV")

Group Structure and List of Subsidiaries, Associates, Joint Venture and Special Purpose Vehicle ("SPV")





Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Subsidiary and/or Associated Company



PT Pertamina Port and Logistics

Tanggal Pendirian dan Beroperasi Komersial Date of Establishment and Commercial Operation	:	10 Februari 1986 February 10, 1986 Akta pendirian No. 48 tanggal 10 Februari 1986 dibuat di hadapan NY Yetty Taher S.H, M, Notaris di Jakarta Deed of establishment No. 48 dated February 10, 1986 passed before Mrs Yetty Taher S.H, M, Notary in Jakarta
Status Operasi Operational Status	:	Beroperasi Operating
Status Badan Hukum Legal Entity Status	:	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") Limited Liability Company ("PT"); Domestic Investment ("PMDN")
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	PT Pertamina Trans Kontinental : 99,753% PT Pertamina Marine Solutions : 0,247%
Kegiatan Usaha Business Activities	:	- Badan usaha pelabuhan meliputi <i>port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water</i> <i>Logistic service</i> meliputi fasilitas <i>warehouse & open storage</i> <i>Pilotage service and port management</i> - Port business entities include port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water - Logistic service includes warehouse & open storage - Pilotage service and port management
Domisili Domicile	:	Jl. Raya Pelabuhan, Kabil Batam 29467 Kepulauan Riau, Indonesia
Telp. Phone	:	+62778 711 543, 711 126
Faksimili Facsimile	:	+62778 711 842
Situs Web Website	:	www.pertamina-ppl.com
Surel Email	:	marketing.ppl@pertamina.com
Jumlah Aset (Rp) Total Assets (Rp)	:	Rp712.454.144

Struktur Grup dan Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, ventura bersama, serta special purpose vehicle ("SPV")
Group Structure and List of Subsidiaries, Associates, Joint Venture and Special Purpose Vehicle ("SPV")



PT Pertamina Marine Engineering

Tanggal Pendirian dan Beroperasi Komersial Date of Establishment and Commercial Operation	6 November 1991 November 6, 1991 Akta pendirian No. 62 tanggal 6 November 1991, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta Deed of establishment No. 62 dated November 6, 1991, passed before Sinta Susikto, S.H., Notary in Jakarta
Status Operasi Operational Status	Beroperasi Operating
Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") Limited Liability Company ("PT"); Domestic Investment ("PMDN")
Kepemilikan Saham Share Ownership	PT Pertamina Trans Kontinental : 99,167% PT Pertamina Energy Terminal : 0,833%
Kegiatan Usaha Business Activities	Pengerukan, <i>Port Engineering</i> , Teknik Bawah Laut, serta Jasa dan Perdagangan Dredging, Port Engineering, Underwater Engineering, and Services and Trading
Domisili Domicile	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Pertamina Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350, Indonesia
Telp. Phone	+6221 2961 5165
Faksimili Facsimile	+6221 2961 5166
Situs Web Website	www.pertamina-pme.com
Surel Email	headoffice@pertamina-me.com
Jumlah Aset (Rp) Total Assets (Rp)	Rp298.082.330



Struktur Grup dan Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, ventura bersama, serta special purpose vehicle ("SPV")
Group Structure and List of Subsidiaries, Associates, Joint Venture and Special Purpose Vehicle ("SPV")



PT Pertamina Marine Solutions

Tanggal Pendirian dan Beroperasi Komersial Date of Establishment and Commercial Operation	: 6 November 1991 / November 6, 1991 Akta pendirian No. 20 tanggal 5 Juni 1987, dibuat di hadapan Notaris Yudo Paripurno, SH dengan nama awal "PT Peteka Karya Samudera" dan diubah berdasarkan risalah rapat yang telah diaktakan dengan No. 68 pada 21 Januari 1988 menjadi "PT Peteka Karya Gapura" Deed of Establishment No. 20 dated June 5, 1987, passed before Notary Yudo Paripurno, SH with the initial name "PT Peteka Karya Samudera" and had its name altered based on the minutes of meeting notarized in the Deed No. 68 dated January 21, 1988 to become "PT Peteka Karya Gapura"
Status Operasi Operational Status	: Beroperasi Operating
Status Badan Hukum Legal Entity Status	: Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") Limited Liability Company ("PT"); Domestic Investment ("PMDN")
Kepemilikan Saham Share Ownership	: PT Pertamina Trans Kontinental : 99,979% PT Pertamina Marine Engineering : 0,021%
Kegiatan Usaha Business Activities	: Jasa Angkutan, <i>Ship Management</i> , <i>Crewing</i> , Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Jasa Perdagangan dan Kegiatan Usaha yang terkait dan/atau menunjang kegiatan usaha di bidang Jasa Pelayaran, Jasa Angkutan dan Jasa Logistik. Transportation Services, Ship Management, Crewing, Manpower Supply Services, Trade Services, and Business Activities relevant to and/or supporting the activities in Shipping Services, Transportation Services, and Logistics Services sectors.
Domisili Domicile	: Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Pertamina Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350, Indonesia
Telp. Phone	: +6221 6530 7030
Faksimili Facsimile	: +6221 651 0030
Situs Web Website	: www.pertamina-pmsol.com
Surel Email	: pmsol.pusat@pertamina-ms.com
Jumlah Aset (Rp) Total Assets (Rp)	: Rp315.738.540

Struktur Grup dan Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, ventura bersama, serta special purpose vehicle ("SPV")
Group Structure and List of Subsidiaries, Associates, Joint Venture and Special Purpose Vehicle ("SPV")



PT Trans Yeong Maritime

Tanggal Pendirian dan Beroperasi Komersial Date of Establishment and Commercial Operation	: 6 November 1991 November 6, 1991 Akta Pendirian No. 41 tanggal 16 September 2014, dibuat di hadapan Dewantari Handayani, SH, MPA, Notaris di Jakarta Deed of Establishment No. 41 dated September 16, 2014, passed before Dewantari Handayani, SH, MPA, Notary in Jakarta
Status Operasi Operational Status	: Beroperasi Operating
Status Badan Hukum Legal Entity Status	: Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Asing ("PMA") Limited Liability Company ("PT"); Foreign investment ("PMA")
Kepemilikan Saham Share Ownership	: PT Pertamina Trans Kontinental : 51,00% Tong Yeong Tug, Co. Ltd : 49,00%
Kegiatan Usaha Business Activities	: Jasa pelayanan kepelabuhanan laut. Sea port services
Domisili Domicile	: Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Armada Perkapalan Lt. 2 Area Logistic Armada Perkapalan Lt. 2 Jl. Yos Sudarso Kav. 2015 Sunter, Tanjung Priok Jakarta Utara kode pos, Indonesia
Telp. Phone	: +6221 6530 7032
Faksimili Facsimile	: +6221 651 6375
Situs Web Website	: www.tym-shipping.com
Surel Email	: tymho@tym-shipping.com
Jumlah Aset (Rp) Total Assets (Rp)	: 296.073.610.492



Informasi Tentang Kronologis Pencatatan Saham serta Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Information Regarding the Chronology of Share Listing and Other Securities Issuance and Listing

Hingga akhir tahun 2022 Perusahaan tidak melakukan penawaran umum saham serta menerbitkan dan mencatatkan efek lain.

Until the end of 2022 the Company did not conduct public offering of shares and issue and listing of other securities.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institution and Profession

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant and Public Accountant Firm	
Kantor Akuntan Publik ("KAP") Public Accountant Firm	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) Tanda Terdaftar: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partner (PricewaterhouseCoopers) Registered Number: KEP-241/KM.1/2015
Akuntan Publik ("AP") Public Accountant	Daniel Kohar Registrasi: AP.1130 Registration: AP.1130
Alamat Kantor Akuntan Publik (KAP) Address of Public Accountant Firm	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Tel: +62 21 50992901/31192901 Faks: +62 21 52905555/52905050 Situs Web: www.pwc.com/id
Jasa yang Diberikan Services Provided	- Jasa Audit: Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 - Jasa Non Audit: - - Audit Services: Audit of the 2022 Consolidated Financial Statements - Non-Audit Services: -
Periode Penugasan Term of Service	19 Oktober 2022 s.d 13 Maret 2023 October 19, 2022 to March 13, 2023
Biaya Jasa (Fee) Fee	- Jasa Audit: Rp604.000.000,- (exclude VAT) - Jasa Non Audit: - - Audit Services: Rp604,000,000.00 (exclude VAT) - Non Audit Services: -

Informasi Tentang Kronologis Pencatatan Saham serta Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

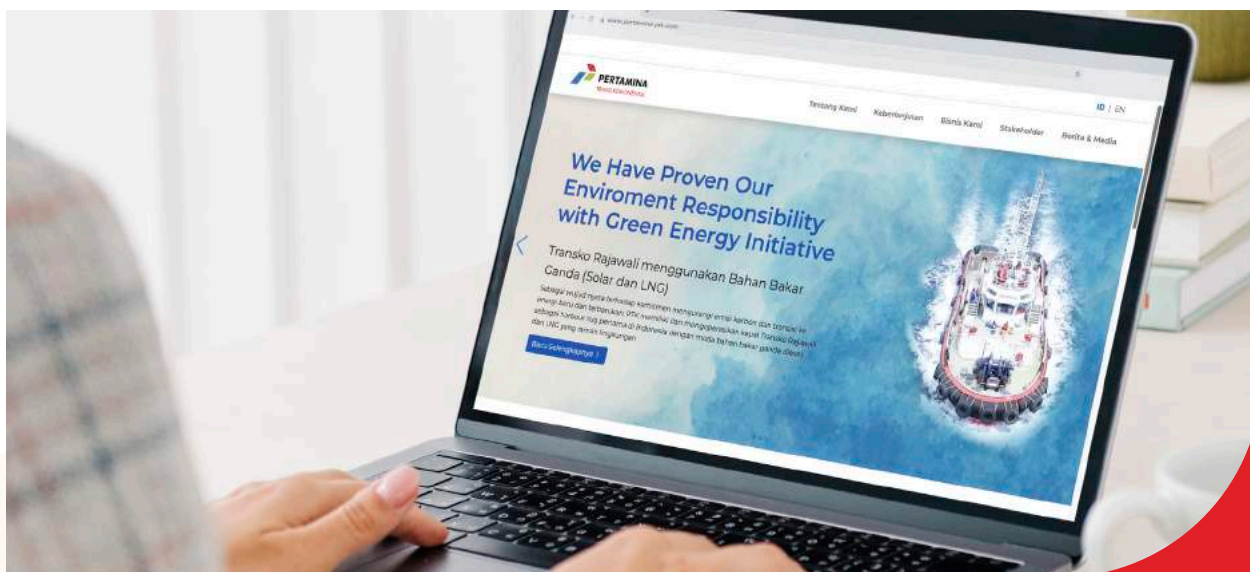
Information Regarding the Chronology of Share Listing and Other Securities Issuance and Listing

NOTARIS NOTARY	
Nama Name	: Miryany Usman, SH
Alamat Address	: Jl. Wijaya I No.9AB, RT.6/RW.4, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170
Nama Name	: Ivan Lazuardi Suwana, SH., M.Kn
Alamat Address	: Grand Slipi Tower Lantai 16 Unit B1, Jl. S. Parman Kav 22-24 Jakarta Barat
Nama Name	: Lenny Janis Ishak, SH
Alamat Address	: Jl. Hang Lekir 9 No.1, RT.5/RW.6, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120
Nama Name	: Fernandia Fabiola, SH., M.Kn
Alamat Address	: Jl. Letda Natsir, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Nama Name	: Dewantari Handayani, SH., MPA
Alamat Address	: Jl. Ciputat Raya No.3, RT.8/RW.6, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310
Nama Name	: Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn
Alamat Address	: DISKURSUS CENTER OFFICE Jl. Pejaten Raya No.Kav. 7, RT.007/RW.5, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510
KONSULTAN HUKUM LAW CONSULTANT	
Nama Name	: Verry Sitorus & Partner
Alamat Address	: Gedung KOPI, lantai 1, Jl. R.P Soeroso No.20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330
Nama Name	: Law Firm Indra, Firman & Associates
Alamat Address	: Jl. Tebet Barat dalam VII No.8, 12830. (021) 8301261
JASA PENILAI APPRAISER	
Nama Name	: Toto Suharto & Rekan Ijin Lisensi: No. 2.09.0055
Alamat Address	: Komp. Rukan Ginza Green Village Blok A No. 19 Jl. KH. Hasyim Ashari, Kel. Neroktog, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15145



Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company's Website



Informasi terkait PTK yang dimuat pada situs web Perusahaan dengan alamat www.pertamina-ptk.com, antara lain sebagai berikut:

Tentang PTK

- Gambaran Perusahaan
- Visi, Misi & Nilai
- Sejarah
- Tata Kelola Perusahaan
- Manajemen Puncak

Keberlanjutan

- *Health, Safety, Security, and Environment*
- Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Bisnis PTK

- Kompetensi Inti
- Aktivitas Bisnis
- Wilayah Operasi
- Armada

Stakeholder

- Laporan Tahunan
- Laporan Keberlanjutan
- Laporan Keuangan
- Penghargaan & Sertifikasi

Berita & Media

- Rilis Berita
- Galeri

Kontak

- Kantor Pusat
- Region
- Anak Perusahaan & Perusahaan Bersama
- Pertamina Clean

Information related to PTK that is published on the Company's website at www.pertamina-ptk.com, among others, is as follows:

About PTK

- Company Overview
- Vision, Mission & Values
- History
- Corporate governance
- Top management

Sustainability

- *Health, Safety, Security, and Environment*
- Social and Environmental Responsibility

PTK Business

- Core Competencies
- Business Activities
- Operational Area
- Fleet

Stakeholders

- Annual report
- Sustainability Report
- Financial statements
- Awards & Certifications

News & Media

- News Releases
- Gallery

Contact

- Head Office
- Regions
- Subsidiaries & Joint Venture Companies
- Pertamina Clean

Pengelolaan operasi dan bisnis yang tangguh menjadi prasyarat dalam memperkuat kelangsungan usaha dan terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan

Resilient management of operations and business is a prerequisite in strengthening business continuity and continuing to create added value for shareholders and all stakeholders.



Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis





Tinjauan Umum dan Industri

General and Industry Review

Makro Ekonomi

Badan Pusat Statistik ("BPS") mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31% dibanding tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Perekonomian domestik tahun 2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang naik 5,01% (*yoy*). Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi COVID-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil pemerintah, salah satunya melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN), merupakan kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2022, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat melemah 9,31%. Pelemahan ini didorong oleh menurunnya pasokan dollar AS di dalam negeri karena adanya arus modal keluar yang dipicu kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed. Dengan kenaikan suku bunga The Fed, investor menilai, menyimpan uangnya di AS lebih menjanjikan imbal hasil lebih besar dan berisiko lebih rendah ketimbang di negara berkembang, termasuk Indonesia. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan terakhir di 30 Desember 2022 ditutup pada level Rp15.592 per Dolar AS. Nilai ini menurun 9,31% dibandingkan perdagangan terakhir di 31 Desember 2021 pada level Rp14.263 per Dolar AS.

Kendati demikian, Rupiah tak sendirian melemah terhadap Dolar AS. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah ini lebih rendah dibandingkan mata uang negara lainnya. Hingga 21 Desember 2022, Rupiah terdepresiasi 8,56%, lebih rendah dibandingkan dengan mata uang lainnya seperti Tiongkok yang terdepresiasi 8,96% dan India sebesar 10,24%.

Tahun 2022 menjadi puncak tertinggi harga minyak dunia. Pemulihan ekonomi setelah dihantam pandemi COVID-19 hingga perang antara Rusia dan Ukraina yang memicu krisis energi turut melambungkan harga minyak ke level tertinggi. Perang Rusia-Ukraina menimbulkan kekacauan pada rantai pasok minyak dunia, di mana Rusia merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Semenjak itu, harga minyak dunia terus menanjak menembus level USD100 per barel untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.

Macro Economics

The Central Bureau of Statistics ("BPS") recorded the Indonesian economy in 2022 managed to grow 5.31% compared to the previous year (*year-on-year/yoy*). The domestic economy in 2022 managed to grow due to high growth in the fourth quarter of 2022 which increased by 5.01% (*yoy*). Even though it recorded negative growth when it was hit by the COVID-19 pandemic in 2020, the national economy continues to show resilience and faster recovery. The mix of various constructive policies and strategies adopted by the government, one of which is through the COVID-19 handling and national economic recovery (PCPEN) program, is the key to success in driving the pace of the national economy.

Throughout 2022, the rupiah exchange rate against the US dollar weakened by 9.31%. This weakening was driven by a decrease in the supply of US dollars in the country due to capital outflows triggered by an increase in the US central bank's benchmark interest rate, The Federal Reserve or The Fed. With the increase in the Fed's interest rate, investors consider that saving their money in the US promises greater returns and lower risk than in developing countries, including Indonesia. Quoting the Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) exchange rate, the rupiah exchange rate at the last trade on December 30, 2022 closed at Rp. 15,592 per US Dollar. This value decreased by 9.31% compared to the last trade on December 31, 2021 at the level of Rp14,263 per US Dollar.

Nevertheless, the Rupiah was not alone in weakening against the US Dollar. In addition, the weakening of the Rupiah exchange rate is lower than other countries' currencies. Until December 21, 2022, the Rupiah depreciated by 8.56%, lower than other currencies such as China which depreciated by 8.96% and India by 10.24%.

Year 2022 was the highest peak in world oil prices. The economic recovery after being hit by the COVID-19 pandemic to the war between Russia and Ukraine which triggered the energy crisis has also boosted oil prices to their highest levels. The Russo-Ukrainian war wreaked havoc on world oil supply chains, in which Russia is one of the world's largest oil producers. Since then, world oil prices have continued to climb to the level of USD 100 per barrel for the first time in recent years.



Harga minyak tertinggi tercatat pada 8 Maret 2022 yang menembus USD133 per barel usai AS melarang impor minyak dari Rusia. Larangan ini merupakan hukuman dari AS lantaran saat itu Rusia habis-habisan menggempur Ukraina. AS bahkan mengancam akan memberikan sanksi ekonomi kepada negara yang tetap keukeuh impor minyak dari Rusia. Ancaman ini membuat pasokan minyak menipis dan harga melonjak. Berbagai negara pun menyatakan mengalami krisis energi dan kenaikan jumlah utang serta inflasi. Pasalnya, harga energi yang tinggi menyebabkan berbagai harga barang-barang naik drastis.

Indonesia juga mengalami tekanan serupa. Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai berkali-kali menyebutkan semua permasalahan terjadi di tahun ini karena serangan Rusia ke Ukraina sehingga membuat Pemerintah Indonesia harus menambah subsidi energi yang tadinya hanya sekitar Rp170 triliun menjadi lebih dari Rp400 triliun.

Jelang akhir tahun, harga minyak berangsur turun ke level terendah. Bahkan lebih kecil dibandingkan pembukaan awal tahun. Pada 9 Desember 2022, minyak mentah Brent tercatat USD76,1 per barel dan WTI sebesar USD71,21 per barel. Anjloknya harga minyak disebabkan para investor meninggalkan pasar karena gejolak dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, aktivitas sektor jasa di Tiongkok juga mencapai titik terendah dalam enam bulan terakhir. Ekonomi Eropa juga melambat karena tingginya biaya energi dan kenaikan suku bunga. Harga minyak terus berfluktuasi di kisaran USD80 per barel, dengan prediksi pada tahun 2023 harga minyak diprediksi masih tetap tinggi setelah ada sinyal pemangkasan pasokan oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC).

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2.K/MG.03/DJM/2023 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Desember 2022 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2023, rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada bulan Desember 2022 ditetapkan sebesar USD76,66 per barel, turun USD10,84 per barel dari USD87,50 per barel pada November 2022.

The highest oil price was recorded on March 8, 2022, which penetrated to USD 133 per barrel after the US banned imports of oil from Russia. This ban was a punishment from the US because at that time Russia was all-out attacking Ukraine. The US has even threatened to impose economic sanctions on countries that remain stubborn about oil imports from Russia. This threat makes oil supplies dwindle and prices soar. Various countries also stated that they were experiencing an energy crisis and an increase in the amount of debt and inflation. This is because high energy prices have caused the prices of various goods to rise drastically.

Indonesia is also experiencing similar pressures. The Finance Minister, Sri Mulyani repeatedly stated that all the problems occurred this year due to Russia's attack on Ukraine, which forced the Indonesian government to increase energy subsidies, which were only around Rp170 trillion to more than Rp400 trillion.

Towards the end of year, oil prices gradually fell to their lowest level. Even smaller than the opening at the beginning of year. On December 9, 2022, Brent crude oil was recorded at USD 76.1 per barrel and WTI at USD 71.21 per barrel. The drop in oil prices was caused by investors leaving the market due to economic turmoil and uncertainty. In addition, service sector activity in China also reached its lowest point in the last six months. The European economy is also slowing due to high energy costs and rising interest rates. Oil prices continue to fluctuate in the range of USD 80 per barrel, with predictions that in 2023 oil prices are predicted to remain high after the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) signaled supply cuts.

Based on the Energy and Mineral Resources Minister Decree No. 2.K/MG.03/DJM/2023 concerning Indonesian Crude Oil Prices for December 2022 which was set for January 2, 2023, the average ICP for Indonesian crude oil in December 2022 was set at USD 76.66 per barrel, down by USD 10.84 per barrel from USD 87.50 per barrel in November 2022.

Faktor yang Berdampak pada Perusahaan dalam Bisnis Jasa Perkapalan, Jasa Marine, dan Logistik Tahun 2022**Lingkup Global dan Nasional****Market Disruption yang Menuntut Transformasi Bisnis/Inovasi Marketing**

Dampak berkepanjangan pandemi COVID-19 turut memberi efek pada terjadinya fenomena ketidakpastian yang mengganggu eksistensi pasar yang sudah ada selama ini. Situasi ini menuntut pelaku bisnis untuk berinovasi dan sifatnya menggantikan cara lama atau pola sebelumnya. Sebagai pemain di industri jasa perkapalan, *marine*, dan logistik, PTK mengusung jargon sebagai *one-stop integrated maritime services provider* yang sejalan dengan visi dan misinya. PTK menyiasati *market disruption* dengan memberi penawaran jasa dalam skema paket *bundling*, mulai dari penyediaan dan operasi kapal, jasa pemanduan-penundaan kapal, penanganan tumpahan minyak di perairan, pengelolaan dan operasional pelabuhan. Di luar paket *bundling*, PTK juga memiliki segmen bisnis jasa pemeliharaan sarfas pelabuhan, pengerukan alur pelayaran, pengelolaan limbah kapal, perbaikan kapal, dan lain-lain—yang ditawarkan secara terpisah dengan skema *by order*.

Artinya, PTK melayani secara *end-to-end* sesuai kebutuhan pelanggan sekaligus memperkuat *branding* sebagai *one-stop integrated maritime services provider*. Tidak hanya itu, strategi PTK ini juga sejalan dengan semangat induk perusahaan, yakni PT Pertamina International Shipping sebagai *Subholding IML* yang berperan dalam distribusi produk migas, di mana PTK turut menjaga kelancaran rantai pasok di sektor jasa *marine* dan logistik, di samping jasa perkapalan.

Digitalisasi Proses Bisnis yang Berkelanjutan

Perkembangan industri 4.0 tidak dapat dihindari. Beberapa tahun ke belakang sampai saat ini, para pelaku bisnis terus berlomba melakukan digitalisasi sembari menciptakan gagasan model bisnis yang baru dan berbeda. Tidak terkecuali dalam industri jasa perkapalan, *marine*, dan logistik – berbagai ide inovasi terus diwujudkan untuk memberikan layanan yang efisien, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan nilai kompetitif. Contoh inovasi pada *smart port* di Singapura yang mampu mengevaluasi informasi/data infrastruktur, lalu lintas, pergerakan kapal, serta perpindahan muatan/kargo. Teknologi ini juga sudah mulai diterapkan di Pelindo (Pelabuhan Tg. Priok) yang menerapkan digitalisasi dalam layanan operasional secara *end-to-end* untuk meningkatkan arus bongkar muat dan efisiensi biaya.

Factors Affecting Companies in the Shipping Services, Maritime Services and Logistics Business in 2022**Global and National Scope****Market Disruption Demanding Business Transformation/Marketing Innovation**

The prolonged impact of the COVID-19 pandemic has also had an effect on the phenomenon of uncertainty that has disrupted the existence of existing markets so far. This situation requires business people to innovate and replace old ways or previous patterns. As a player in the shipping, maritime and logistics services industry, PTK carries the jargon of being a *one-stop integrated maritime services provider* which is in line with its vision and mission. PTK deals with *market disruption* by offering services in a package bundling scheme, starting from the supply and operation of vessels, pilotage-delay services, handling of oil spills in waters, port management and operations. Apart from bundling packages, PTK also has business segments for port infrastructure maintenance services, shipping channel dredging, ship waste management, ship repair, and others – which are offered separately under a *by order* scheme.

This means PTK serves *end-to-end* according to customer needs while at the same time strengthening branding as a *one-stop integrated maritime services provider*. In addition, PTK's strategy is also in line with the spirit of the parent company, namely PT Pertamina International Shipping as *IML Subholding* which plays a role in the distribution of oil and gas products, in which PTK participates in maintaining the smooth supply chain in the maritime and logistics services sector, in addition to shipping services.

Sustainable Digitalization of Business Processes

The development of industry 4.0 is unavoidable. In the past few years to date, business people have continued to compete in digitalization while creating new and different business model ideas. The shipping, maritime and logistics services industry is no exception – various innovative ideas are continuously being realized to provide efficient services, including the use of digital technology to increase competitive value. An example of innovation is the smart port in Singapore to evaluate infrastructure information/data, traffic, ship movements, and cargo/load transfers. This technology has also begun to be implemented at Pelindo (Tg. Priok Port) which implements digitalization in *end-to-end* operational services to improve loading and unloading flows and cost efficiency.



Digitalisasi proses bisnis yang diterapkan PTK secara bertahap pada tahun 2020 dan 2021 tetap berlanjut di 2022. Sebagai upaya dalam menyederhanakan alur kerja, sumber pencarian informasi faktual tentang operasional PTK baik secara *real time* maupun berkala, yang bertujuan memudahkan dalam analisis pendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran – digitalisasi harus mampu menjawab kebutuhan pekerja, perusahaan sebagai pelaku bisnis, serta pihak lain (regulator, pelanggan, Pertamina sebagai *holding*). PTK telah menyusun *roadmap* digitalisasi menuju *system excellence* tahun 2026, di mana pada tahun 2022 *milestone*-nya adalah sebagai *business process enabler* yang memberikan solusi-solusi digital dan migrasi data dari sistem lama ke teknologi baru.

Lifting Migas

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM, pada 2022 realisasi *lifting* minyak bumi Indonesia mencapai 612.000 barel per hari (*barrel per day/BPD*). Kemudian *lifting* gas bumi pada 2022 mencapai 955.000 barel setara minyak per hari (*barrel oil equivalent per day/BOEPD*).

Realisasi *lifting* minyak dan gas (migas) tersebut turun dibanding 2021, sekaligus menjadi level terendah dalam 13 tahun terakhir.

Menurut Hageng Suryo Nugroho, Tenaga Ahli Bidang Energi Kantor Staf Presiden ("KSP"), *lifting* migas Indonesia menurun karena dipengaruhi kondisi lapangan migas dan fasilitas produksi yang sudah tua dimana seharusnya sudah ada lapangan-lapangan minyak baru yang dibuka untuk meningkatkan capaian produksi, namun karena membutuhkan investasi yang sangat besar, maka yang bisa dilakukan Pemerintah adalah memaksimalkan lapangan yang masih ekonomis untuk diproduksi.

Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menaikkan *lifting* migas, salah satunya dengan menambah pengeboran sumur secara masif di sekitar lapangan migas yang sudah ada dengan menjajaki metode pengeboran sumur dalam, mencapai 3.000 feet, untuk mencari cadangan minyak yang lebih besar. Metode *unconventional drilling* ini membutuhkan teknologi yang presisi sehingga membutuhkan biaya tiga kali lipat lebih tinggi. Kendati butuh banyak biaya, pengeboran migas di Indonesia tampaknya masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya, selama periode 2017-2022 realisasi investasi di sektor migas tetap tinggi, bahkan cenderung meningkat.

The digitalization of business processes implemented in stages by PTK in 2020 and 2021 then continued to 2022. As an effort to simplify workflows, a source of factual information search regarding PTK operations both in real time and periodically, which aims to facilitate analysis to support faster decision making and on target – digitalization must be able to answer the needs of workers, companies as business people, as well as other parties (regulators, customers, Pertamina as holding). PTK has prepared a digitalization roadmap towards system excellence in 2026, where in 2022 the milestone was to become a business process enabler that provides digital solutions and data migration from old systems to new technologies.

Oil and Gas Lifting

Based on a report from the Energy and Mineral Resources Ministry, in 2022 the realization of Indonesia's oil lifting reached 612,000 barrels per day (barrels per day/BPD). Then the lifting of natural gas in 2022 reached 955,000 barrels of oil equivalent per day (BOEPD).

The realization of oil and gas lifting has decreased compared to 2021, as well as being the lowest level in the last 13 years.

According to Hageng Suryo Nugroho, Energy Expert at the Office of the Presidential Staff ("KSP"), Indonesia's oil and gas lifting has declined due to the influence of old oil and gas fields and production facilities where new oil fields should have been opened to increase production achievements, but due to the need a very large investment, the Government may maximize fields of which are still economical to produce.

The government is making several efforts to increase oil and gas lifting, one of which is by massively adding well drilling around existing oil and gas fields by exploring methods of deep well drilling, up to 3,000 feet, to seek larger oil reserves. This unconventional drilling method requires precise technology thus the cost is three times higher. Even though it takes a higher cost, oil and gas drilling in Indonesia is likely to continue in the next few years. This is because during the 2017-2022 period investment realization in the oil and gas sector remained high, and even tended to increase.

Sinergi Bisnis PTK

PTK Business Synergy

Sinergi yang terbangun akan mendorong PTK dan seluruh pihak berelasi dapat memanfaatkan fasilitas yang sama sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Efisiensi mendorong kinerja PTK menjadi lebih baik, sehingga akan mengoptimalkan pencapaian pendapatan maupun laba usaha, serta mendukung pengembangan usaha.

The synergies that are built will encourage PTK and all related parties to utilize the same facilities so that efficiency can be increased. Efficiency encourages PTK performance to be better, so that it will optimize the achievement of revenue and operating profit, as well as support business development.

Sinergi Pertamina Group dalam Pendapatan Operasi

Pertamina Group Synergy in Operating Income

Entitas Entity	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)
PT Pertamina Patra Niaga	1.329.911	510.323
PT Pertamina International Shipping	987.960	590.137
PT Kilang Pertamina Internasional	784.205	297.125
PT Pertamina Retail	197.581	181.739
PT Perta Arun Gas	151.294	118.816
PT Patra Logistik	147.539	-
PT Pertamina Hulu Energi OSES	88.435	89.805
PT Pertamina Energy Terminal	87.050	15.540
PT Pertamina Hulu Mahakam	82.521	64.129
PT Pelindo	70.838	-
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	70.801	82.090
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	54.287	40.172
PT PGN LNG Indonesia	19.814	10.777
PT Nusantara Regas	7.944	12.471
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	7.500	5.351
PT Pertamina (Persero)	7.230	1.331.000
PT Pertamina Hulu Energi WMO	5.730	5.667
PT Pertamina Lubricant	4.459	1.022
PT Pratama Mitra Sejati	4.046	-
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	3.762	3.128
PT Kilang Pertamina Balikpapan	3.115	-
PT Pelindo Energi Logistik	2.974	-
PT Pertamina Hulu Rokan	1.837	-
PT Pertamina Hulu Energi NSO	1.388	-
PT Pertamina EP	1.367	6.616
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1.287	1.500
Jumlah Total	4.124.875	3.367.408

Tinjauan Operasional per Segmen Usaha

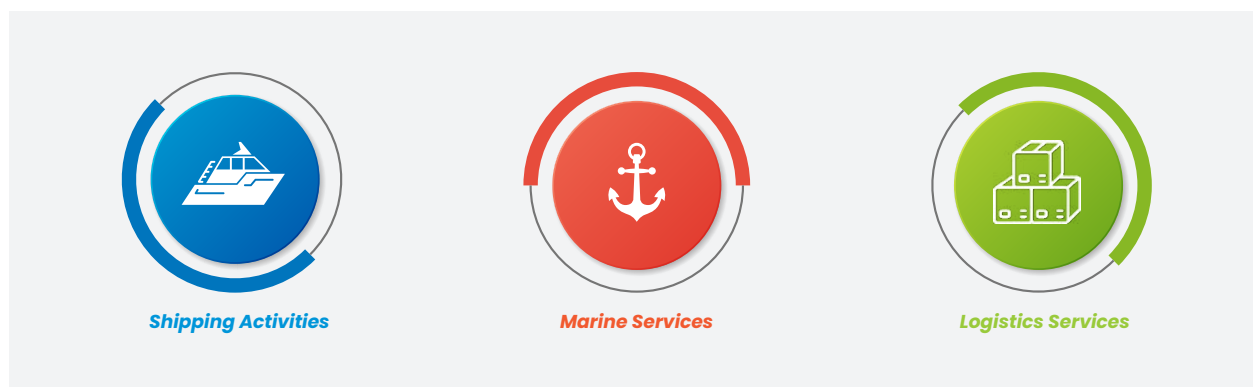
Operational Review by Business Segment

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah berdasarkan Akta No. 104 tanggal 29 April 2021 dari Aulia Taufani, S.H, notaris di Jakarta, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa *shipping activities*, *marine services*, dan *logistics services*, baik di dalam maupun luar negeri. Jasa Perusahaan juga termasuk kegiatan usaha lain terkait usaha di ketiga bidang tersebut.

Based on the Company's Articles of Association, which was most recently amended by Deed No. 104 dated April 29, 2021 from Aulia Taufani, S.H, notary in Jakarta, the Company runs business activities in the sectors of shipping activities, marine services, and logistics services, both at home and abroad. The Company's services also include other business activities related to the three fields.

Segmen Usaha PTK

PTK Business Segment



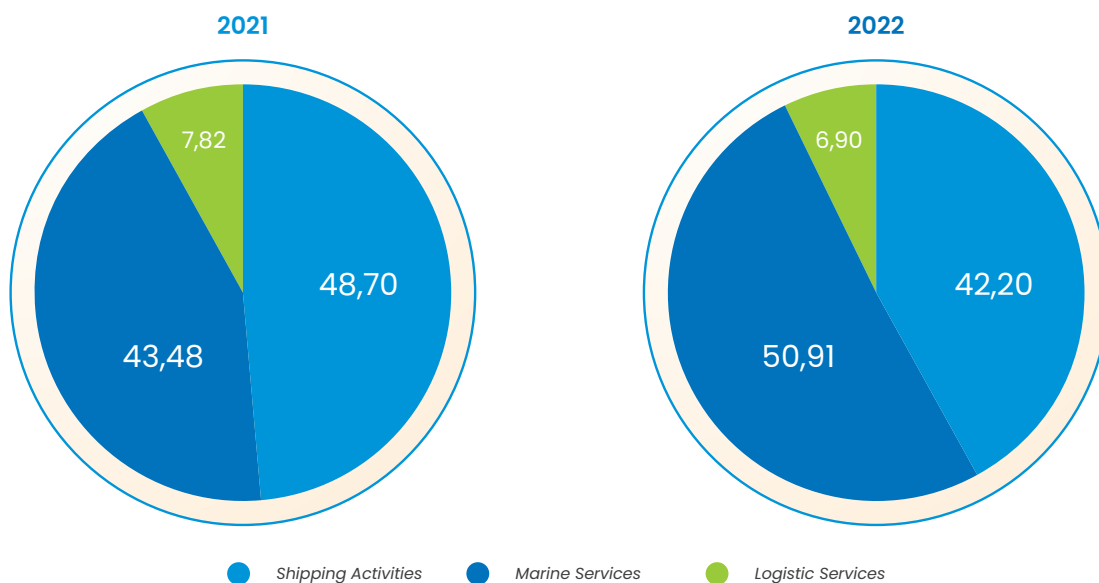
Untuk dapat memberikan gambaran tentang ukuran bisnis dari masing-masing segmen, berikut disampaikan kontribusi setiap segmen atas pendapatan dan laba bruto Perusahaan.

To provide an overview of the business size of each segment, the following is the contribution of each segment to the Company's income and gross profit.

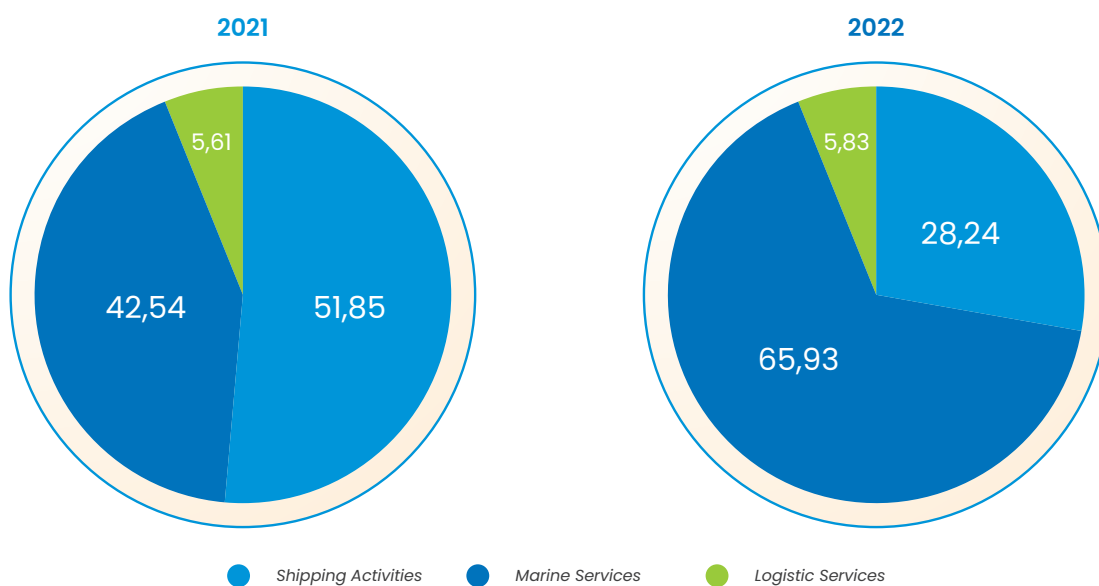
Kontribusi per Segmen Usaha Terhadap Pendapatan Usaha

Business Segment Contribution to Operating Income

Segmen Segment	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Shipping Activities	2.019.115	42,20	1.851.164	48,70	167.951	9,07	↑
Marine Services	2.435.771	50,91	1.652.735	43,48	783.036	47,38	↑
Logistics Services	330.026	6,90	297.088	7,82	32.938	11,09	↑
Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Income	4.784.913	100,00	3.800.987	100,00	983.926	25,89	↑

Sinergi Bisnis PTK
PTK Business Synergy**Kontribusi per Segmen Usaha Terhadap Laba Bruto**
Business Segment Contribution to Gross Profit

Segmen Segment	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million) (1)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million) (2)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million) (3=1-2)	Kontribusi Contribution (%) (3/2)	
Shipping Activities	465.390	28,24	576.695	51,85	(111.305)	(19,30)	↓
Marine Services	1.086.487	65,93	473.065	42,54	613.422	129,67	↑
Logistics Services	96.049	5,83	62.375	5,61	33.674	53,99	↑
Jumlah Laba Bruto Total Gross Profit	1.647.926	100,00	1.112.135	100,00	535.791	48,18	↑



Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa segmen usaha *Marine Services* menjadi bisnis inti Perusahaan dengan kontribusi mencapai 50,91% atas pendapatan usaha dan 65,93% atas laba bruto di tahun 2022.

Berikut di bawah ini disampaikan kinerja masing-masing segmen usaha.

Shipping Activities

Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan Shipping Activities

Perusahaan memiliki *core business* sebagai penyedia kapal dan memberikan jasa operasional kapal, baik kapal milik maupun *brokerage*, dengan sistem sewa berjangka (*time charter*) dengan durasi sewa minimal antara 2-10 tahun, sewa jangka pendek (*spot charter*) berdurasi kurang dari 1 tahun, *Bareboat Charter* dan sistem muatan (*cost of affreightment*), yaitu sistem sewa berdasarkan pada volume muatan.

Perusahaan melakukan sewa-menyewa kapal bekerja sama dengan pihak ketiga untuk berbagai jenis kapal penunjang kegiatan migas dan kapal sarana pelabuhan. Kegiatan *Charter Brokerage (Back-to-Back)* terdiri dari *Back-to-Back Charter Non-Contract of Affreightment ("COA") (time charter)* dan *Back-to-Back Charter COA*.

Produktivitas Segmen Shipping Activities

Produktivitas Segmen Shipping Activities

Productivity of the Ship Exploitation Segment

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022	
					Selisih Difference	%
Armada Kapal Milik Owned Ships						
Jumlah Armada Kapal Milik Total Owned Ships	Unit Units	369	344	125	25	6,77 ↑
Commission Days Kapal Milik Commission Days of Owned Ships	Hari Days	112.270	83.281	36.646	28.989	34,81 ↑
Kapal Milik Existing Existing Vessels	Hari Days	111.529	39.371	30.935	72.158	64,69 ↑
New Vessels	Hari Days	741	43.910	5,711	(43.169)	(5825,77) ↓
Commercial Days Kapal Milik Commercial Days of Owned Ships	Hari Days	116.661	82.883	34.065	33.778	28,95 ↑
Kapal Milik Existing Existing Vessels	Hari Days	115.930	39.108	29.101	76.822	66,26 ↑
New Vessels	Hari Days	731	43.775	4.648	(43.044)	(5888,37) ↓
Muatan Diangkut (Kapal Milik) Loads Loads Transported (Owned Ship)	KL	-	328.765	410.809	(328.765)	(100,00) ↓

From the table and graph above, the business segment of Marine Services is showed as the Company's core business with a contribution of 50.91% to operating revenues and 65.93% to gross profit in 2022.

The following is the performance of each business segment.

Shipping Activities

Ship Exploitation Business Activity, Products and Services

The Company's core business is ship provider and ship operations services, whether owned or brokerage, with a time charter system and a minimum charter duration of 2-10 years, spot charter with the duration of less than 1 year, Bare Boat Charter, and cost of affreightment system, which is a charter system based on cargo volume.

The Company conducts a ship leasing in cooperation with third parties for various supporting vessels for oil and gas activity and port facility vessels. The Charter Brokerage (Back-to-Back) activity consists of Back-to-Back Charter Non-Contract of Affreightment ("Non-COA") (time charter) dan Back-to-Back Charter COA.

Productivity of the Ship Exploitation Segment

Sinergi Bisnis PTK
PTK Business Synergy**Produktivitas Segmen Shipping Activities**
Productivity of the Ship Exploitation Segment

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022	
					Selisih Difference	%
Kapal Back-To-Back Kapal Back-To-Back						
Jumlah Kapal <i>Back-to-Back</i> Total Back-to-Back Ships	Unit Units	26	25	37	1	3,84
<i>Commercial Days Back-to-Back</i>	Hari Days	16.275	7.768	9.842	8.507	52,27
Kantor Pusat Head Office	Hari Days	438	803	1.522	(365)	(83,33) -
<i>Region</i>	Hari Days	15.837	6.965	8.320	8.872	56,02
Muatan Diangkut (<i>Back-to-Back</i>) Loads Transported (Back-to-Back)	KL	293.175	331.996	310.737	(38.821)	(13,24) -
Jumlah <i>Commercial Days</i> Kapal Milik dan <i>Back-to-Back</i> Total Operation Days of Owned ships and Back-to-back	Hari Days	132.936	90.651	43.907	42.285	31,80
Volume Angkut COA COA Freight Volume	KL	293.175	660.761	721.546	(367.586)	(125,38) -

Commercial days back to back kantor pusat menurun dari tahun 2021 dengan jumlah 803 hari ke tahun 2022 dengan jumlah 438 hari. Hal ini disebabkan belum adanya kegiatan STS Floating Storage and Regasification Unit ("FSRU") di PT PGN LNG Indonesia ("PLI") dan Kapal Sancai yang baru dimulai kontraknya di tanggal 20 Desember 2022.

Jumlah volume COA di tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 disebabkan kontrak telah habis dan tidak diperpanjang karena kapal di *charter* langsung oleh PIS (sudah tidak melalui PTK).

Head office commercial days back to back decreased from 2021 with a total of 803 days to 2022 with a total of 438 days. This is due to the absence of STS Floating Storage and Regasification Unit ("FSRU") activities at PT PGN LNG Indonesia ("PLI") and the Sancai Ship, whose contracts have just started on December 20, 2022.

The total COA volume in 2022 decreased compared to 2021 because the contract had expired and was not renewed because the ship was chartered directly by PIS (no longer through PTK).

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Shipping Activities**Vessel Exploitation Segment Revenue and Profitability****Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Shipping Activities**
Vessel Exploitation Segment Revenue and Profitability

Uraian Description	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022	
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%
Pendapatan Kapal Milik Own-Vessels Revenue	1.213.704	1.056.503	1.009.611	157.201	14,88
Pendapatan <i>Back-to-back Charter</i> dan <i>Contract of Affreightment</i> ("COA") Back-to-back Charter and Contract of Affreightment ("COA") Revenue	375.951	313.799	17.136	62.152	19,81

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Shipping Activities
Vessel Exploitation Segment Revenue and Profitability

Uraian Description	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022	
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%
<i>Ship Management</i>	79.685	186.615	200.573	(106.930)	(57,30)
FAME	318.205	284.215	273.719	33.990	11,96
<i>Dockyard Sorong & Bagus Kuning</i> Sorong & Bagus Kuning Dockyard	31.569	10.032	-	21.537	214,69
Jumlah Pendapatan Segmen <i>Shipping Activities</i> Total Revenues from Shipping Activities Segment	2.019.115	1.851.164	1.501.039	167.951	9,07
Beban Pokok Kapal Milik Own-Vessels Cost of Revenue	1.024.424	801.375	622.661	223.049	27,83
Beban Pokok <i>Back-to-back Charter dan Contract of Affreightment</i> ("COA") Back-to-Back Charter and Contract of Affreightment ("COA") Cost of Revenue	251.418	98.420	(2.957)	152.998	155,45
<i>Ship Management</i>	46.456	185.800	148.423	(139.344)	(75,00)
FAME	197.977	179.179	247.298	18.798	10,49
<i>Dockyard Sorong & Bagus Kuning</i> Sorong & Bagus Kuning Dockyard	33.450	9.695	-	23.755	245,03
Jumlah Beban Pokok <i>Shipping Activities</i> Total Cost of Revenues from Shipping Activities	1.553.725	1.274.468	1.015.425	279.257	21,91
Laba Operasi Kapal Milik Own-Vessels Operating Income	189.280	255.128	386.950	(65.848)	(25,81)
Laba Operasi <i>Charter & Brokerage dan Contract of Affreightment</i> (COA) Charter & Brokerage and Contract of Affreightment (COA) Operating Income	124.533	215.379	20.094	(90.846)	(42,18)
<i>Ship Management</i>	33.230	816	52.150	32.414	3972,26
FAME	120.228	105.036	26.420	15.192	14,46
<i>Dockyard Sorong & Bagus Kuning</i> Sorong & Bagus Kuning Dockyard	(1.881)	337	-	(2.218)	(658,16)
Profitabilitas Segmen Pengangkutan/Eksploitasi Kapal Profitability of Ships Exploitation Segment	465.390	576.695	485.615	(111.305)	(19,30)

Perusahaan mencatat pendapatan dari segmen *Shipping Activities* tahun 2022 sebesar Rp 2,02 triliun, mengalami kenaikan 9,07% atau sebesar Rp 167,95 miliar dibandingkan pendapatan segmen *Shipping Activities* tahun 2021 sebesar Rp 1,85 triliun. Hal ini terutama disebabkan atas kegiatan *charter* kapal milik seiring dengan beroperasinya aset *inbreng* tahap 1 dari awal tahun, sedangkan di tahun 2021 baru beroperasi mulai bulan April.

The Company recorded revenue from the Shipping Activities segment in 2022 of Rp2.02 trillion, an increase of 9.07% or Rp167.95 billion compared to the 2021 Shipping Activities segment revenue of Rp1.85 trillion. This was mainly due to the owned vessels charter along with the operation of *inbreng* assets phase 1 from the beginning of year, whereas in 2021 they only started operating in April.

Profitabilitas segmen *shipping activities* tahun 2022 sebesar Rp 465,39 miliar, mengalami penurunan 19,30% atau setara dengan Rp 111,31 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 576,69 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya *bunker* kapal.

The profitability of the shipping activities segment in 2022 was Rp465.39 billion, a decrease of 19.30% or equivalent to Rp111.31 billion compared to 2021 of Rp576.69 billion. The decrease was mainly due to the increase in ship bunker costs.

Sinergi Bisnis PTK
PTK Business Synergy**Marine Services****Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan**

PTK menyediakan Jasa Marine yang di dalamnya termasuk Jasa Keagenan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia baik di Pelabuhan Umum maupun Pelabuhan-Pelabuhan Milik PT Pertamina Group yang meliputi :

1. *Ship Formality*
2. Kebutuhan Kapal dan Kru Kapal termasuk *Provision, Sparepart, dan water supply*
3. Pengurusan ekspor dan impor barang
4. *Bunker handling*
5. Kegiatan pengerukan alur, *waste management*, dan jasa *maintenance* dermaga

Produktivitas Segmen Marine Services**Produktivitas Segmen Marine Services**
Productivity of Marine Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
					Selisih Difference	%	
Keagenan Tanker Tanker Agency							
Charter Call Bosowa Bosowa Charter Call	Call	39	42	48	4	9,52	↑
Keagenan Tanker Region Branch Office Tanker Agency	Call	24.685	22.619	16.106	256	1,13	↑
Keagenan Tanker Pihak Ketiga Third Party Tanker Agency	Call	2.282	2.194	1.984	405	18,46	↑
Jumlah Call Keagenan Kapal C M Pertamina di Pelabuhan Pertamina Total Agency Call of Pertamina C M Ship in Pertamina Port	Call	22.403	20.425	14.122	(149)	(0,73)	↑
Keagenan Umum General Agency							
Region 1	Call	2.744	2.716		28	1,03	↑
Region 2	Call	1.177	1.517		(340)	22,41	↑
Region 3	Call	1.584	1.600		(16)	(1,00)	↓

Segmen *Marine Services* terdiri atas layanan keagenan tanker dan layanan keagenan umum. Pada tahun 2022, layanan keagenan pihak ketiga sebesar 2.599 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan penambahan kapal-kapal pihak ketiga dari kegiatan kapal-kapal PIS yang menjadi pihak Ketiga.

Marine Services**Business Activities, Products and Services**

PTK provides marine services which include agency services at ports in Indonesia, both at public ports and ports owned by PT Pertamina Group, which include:

1. Ship Formalities
2. Ship and Crew needs including provision, spare parts and water supply
3. Management of export and import of goods
4. Bunker handling
5. Channel dredging activities, waste management, and dock maintenance services

Productivity of Marine Services Segment

The Marine Services segment consists of tanker agency services and general agency services. In 2022, third party agency services of 2,599 showed better performance/ decreased performance compared to the previous year. This was mainly due to the addition of third party vessels from the activities of PIS vessels which became third parties.

Sedangkan layanan keagenan CMP sebesar 22.403 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan efisiensi penggunaan kapal-kapal Pertamina yang semula berukuran *small tanker* menjadi *Medium* dan *Large Tanker*.

Meanwhile, CMP agency services of 22,403 showed better performance/decreased performance compared to the previous year. This was mainly due to the efficient use of Pertamina's ships, which were originally small tankers to become Medium and Large Tankers.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Marine Services

Revenue and Profitability of Marine Service Segment

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Marine Services Revenue and Profitability of Marine Service Segment

Uraian Description	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih Difference (Rp-juta)	%	
Pendapatan Segmen <i>Marine Services</i> Pendapatan Segmen Marine Services						
Keagenan Tanker Tanker Agency	334.911	139.044	180.377	195.867	140,87	↑
Keagenan Umum General Agency	143.717	128.616	108.723	15.101	11,74	↑
<i>General Trading</i>	165.326	110.675	180.744	54.651	49,38	↑
<i>Fresh Water Supply</i>	1.644	33.748	63.038	(32.104)	(95,13)	↓
<i>Dredging</i>	33.536	69.874	179.809	(36.338)	(52,01)	↓
<i>Port Operation Services</i>	705.324	364.168	-	341.156	93,68	↑
<i>Periodic Inspection & Port Preventif Maintenance</i>	40.870	35.463	-	5.407	15,25	↑
<i>STS Provider</i>	30.736	20.827	-	9.909	47,58	↑
JAPOM (Jasa Penunjang Operasi Marine) Marine Operation Support Services	253.881	406.865	347.784	(152.984)	(37,60)	↓
Jasa Dermaga Dock Services	5.542	5.307	6.201	235	4,43	↑
<i>Pilotage</i>	35.765	13.779	85.020	21.986	159,56	↑
<i>Oil Spill Response</i> ("OSR")	87.160	58.637	-	28.523	48,64	↑
<i>Ship Chandler</i>	190.446	91.179	-	99.267	108,87	↑
Lain-Lain Usaha Other Business	406.914	174.552	72.207	232.362	133,12	↑
Jumlah Total	2.435.771	1.652.735	1.223.902	783.036	47,38	↑
Beban Pokok Segmen <i>Marine Services</i> Beban Pokok Segmen Marine Services						
Keagenan Tanker Tanker Agency	63.711	29.425	72.072	34.286	116,52	↑
Keagenan Umum General Agency	58.507	84.247	79.454	(25.740)	(30,55)	↓
<i>General Trading</i>	143.756	87.814	156.564	55.942	63,71	↑
<i>Fresh Water Supply</i>	2.627	20.863	37.147	(18.236)	(87,41)	↓
<i>Dredging</i>	32.925	49.522	152.368	(16.597)	(33,51)	↑
<i>Port Operation Services</i>	422.250	242.355	-	179.895	74,23	↑
<i>Periodic Inspection & Port Preventif Maintenance</i>	8.109	25.892	-	(17.783)	(68,68)	↑
<i>STS Provider</i>	679	13.797	-	(13.118)	(95,08)	↓

Sinergi Bisnis PTK
PTK Business Synergy**Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Marine Services**
Revenue and Profitability of Marine Service Segment

Uraian Description	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih Difference (Rp-juta)	%	
JAPOM (Jasa Penunjang Operasi Marine) Marine Operation Support Services	211.211	386.345	316.301	(175.134)	(45,33)	↓
Jasa Dermaga Dock Service	2.453	822	777	1.631	198,41	↑
Pilotage	(55.703)	(30.549)	44.790	(25.154)	82,34	↑
Oil Spill Response ("OSR")	16.460	49.324	-	(32.864)	(66,63)	↓
Ship Chandler	176.146	70.705	-	105.441	149,13	↑
Lain-Lain Usaha Other Business	266.153	149.108	66.087	117.045	78,50	↑
Jumlah Total	1.349.285	1.179.670	925.559	169.615	14,38	↑
Laba Segmen Marine Services Laba Segmen Marine Services						
Keagenan Tanker Tanker Agency	271.200	109.619	108.306	161.581	147,40	↑
Keagenan Umum General Agency	85.210	44.369	29.269	40.841	92,05	↑
General Trading	21.570	22.860	24.180	(1.290)	(5,64)	↓
Fresh Water Supply	(983)	12.885	25.891	(13.868)	(107,63)	↑
Dredging	611	20.352	27.441	(19.741)	(97,00)	↓
Port Operation Services	283.073	121.814	-	161.259	132,38	↑
Periodic Inspection & Port Preventif Maintenance	32.760	9.572	-	23.188	242,25	↑
STS Provider	30.057	7.030	-	23.027	327,55	↑
JAPOM (Jasa Penunjang Operasi Marine) Marine Operation Support Services	42.670	20.520	31.482	22.150	107,94	↑
Jasa Dermaga Dock Service	3.089	4.485	5.424	(1.396)	(31,12)	↓
Pilotage	91.467	44.328	40.229	47.139	106,34	↑
Oil Spill Response ("OSR")	70.700	9.313	-	61.387	659,16	↑
Ship Chandler	14.300	20.474	-	(6.174)	(30,16)	↓
Lain-Lain Usaha Other Business	140.761	25.444	6.121	115.317	453,22	↑
Jumlah Total	1.086.487	473.065	298.343	613.422	129,67	↑

Perusahaan mencatat pendapatan segmen *Marine Services* sebesar Rp 2,43 triliun, mengalami kenaikan 47,38% atau setara dengan Rp783,04 miliar dibandingkan pendapatan segmen *Marine Services* tahun 2021. Hal ini diantaranya disebabkan atas meningkatnya kegiatan *port operation services*, adanya kegiatan baru pada *bunker management* serta meningkatnya kegiatan *pilotage* seiring dengan adanya penambahan 5 lokasi baru.

The Company recorded revenue for the Marine Services segment of Rp2.43 trillion, an increase of 47.38% or equivalent to Rp783.04 billion compared to the revenue of the Marine Services segment in 2021. This was due, among others, to increased port operation services activities, new activities in bunkers management and increased pilotage activities in line with the addition of 5 new locations.



Profitabilitas segmen *Marine Services* tahun 2022 sebesar Rp1,09 miliar, mengalami kenaikan 129,67% atau setara dengan Rp 613,42 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 473,06 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya pendapatan atas kegiatan *port operation services, bunker management* dan *pilotage*.

Logistics Services

Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan Logistics Services

Kegiatan operasi kepelabuhan meliputi kegiatan (1) Administrasi Pelabuhan Khusus, (2) *Recognized Security Organization* ("RSO"), dan (3) *Hydrography, Oceanography* dan Pemetaan ("HOP"), meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

1. *Jasa custom clearance for ships*
Kegiatan administrasi kepabeanan dimana pengurusan dokumen-dokumen suatu barang/cargo yang akan diterima ataupun dikirimkan dari/ke Luar Negeri harus dilengkapi sebelum kapal tiba atau berlayar di Instansi Bea dan Cukai.
2. *Logistic Base (Stevedoring, Cargodoring, Open Yard, Warehousing)*
Logistic Shorebase merupakan bisnis PTK yang dijalankan sendiri (di Tanjung Batu) dan dilaksanakan oleh anak perusahaan, PT Pertamina Port And Logistics ("PPL") d/h Peteka Karya Samudera (di Kabil Batam).
3. *General Service*
General Service merupakan bisnis Pertamina Trans Kontinental yang bersifat umum sebagai penunjang bisnis *shipping*, marine dan Jasa ini diberikan oleh Anak Usaha PTK.
4. *Ship Logistic Supply (Ship Chandler)*
Ship Logistic Supply (Ship Chandler) merupakan bisnis PT Pertamina Trans Kontinental yang dilaksanakan oleh anak perusahaan, PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) d/h Peteka Karya Gapura yang melaksanakan penyediaan bahan makanan bagi 87 Kapal Milik Pertamina International Shipping yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.
5. Mengadakan usaha di bidang *international freight forwarding*, termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman dan pendistribusian barang;
6. Pengelolaan *logistic base*
7. Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran;
8. *Trading* yang meliputi kegiatan pengadaan barang kebutuhan APD, PRF (*Pneumatic Rubber Render*), *freight forwarding*.

The profitability of the Marine Services segment in 2022 was Rp1.09 billion, an increase of 129.67% or equivalent to Rp613.42 billion compared to 2021 of Rp473.06 billion. This increase was in line with the increase in revenue from port operation services, bunker management, and pilotage activities.

Logistics Services

Business Activities and Products and Services of Logistics Service

Port operation activities includes following activities: (1) Special Port Administration, (2) Recognized Security Organization ("RSO"), and (3) Hydrography, Oceanography and Mapping ("HOM"), which includes business activities as follows:

1. Custom clearance services for ships
Customs administration activities where the processing of documents for goods/cargo to be received or sent from/to overseas must be completed before the ship arrives or sails at the Customs and Excise Agency.
2. Logistic Base (Stevedoring, Cargodoring, Open Yard, Warehousing)
Shorebase Logistic is a self-run PTK business (in Tanjung Batu) and executed by a subsidiary, PT Pertamina Port and Logistics (PPL) formerly Peteka Karya Samudera (in Kabil Batam).
3. General Service
General Service is Pertamina Trans Kontinental's general business to support the shipping, marine and logistics service businesses. This service is provided by PTK Subsidiary.
4. Ship Logistic Supply (Ship Chandler)
Ship Logistic Supply (Ship Chandler) is a business of PT Pertamina Trans Kontinental which is carried out by a subsidiary, PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) formerly Peteka Karya Gapura which provides food ingredients for 87 Ships Owned by Pertamina International Shipping operating throughout Indonesia.
5. Conducting business in international freight forwarding, including but not limited to freight services, delivery and distribution of goods;
6. Logistic base management
7. Building and office leasing and management services;
8. Trading which includes procurement of goods for PPE, PRF (*Pneumatic Rubber Render*), freight forwarding.

Sinergi Bisnis PTK
PTK Business SynergyProfitabilitas Segmen *Logistics Services*Pendapatan dan Profitabilitas Segmen *Logistics Services*

Pada tahun 2022, segmen *Logistics Services* menghasilkan pendapatan sebesar Rp330,03 miliar, mengalami kenaikan 11,09% atau setara dengan Rp32,94 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang membukukan pendapatan segmen *Logistics Services* sebesar Rp297,09 miliar. Kenaikan ini terutama atas kegiatan *shorebase* Tanjung Batu karena meningkatnya kegiatan *drilling*.

Profitabilitas segmen *Logistics Services* mengalami kenaikan 53,99% atau setara dengan Rp33,67 miliar dari sebesar Rp62,37 miliar di tahun 2021 menjadi sebesar Rp96,05 miliar di tahun 2022.

Profitability of Logistics Service Segment

Revenue and Profitability of Logistics Service Segment

In 2022, the *Logistics Services* segment generated revenue of Rp330.03 billion, an increase of 11.09% or the equivalent of Rp32.94 billion compared to the previous year, which posted revenue for the *Logistics Services* segment of Rp297.09 billion. This increase was mainly due to Tanjung Batu shorebase activities due to increased drilling activities.

The profitability of the *Logistics Services* segment increased by 153.99% or equivalent to Rp33.67 billion from Rp62.37 billion in 2021 to Rp96.05 billion in 2022.

Kinerja Usaha per Region

Business Performance by Region

Perihal Description	2022				2021				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022	
	Region I	Region II	Region III	Total	Region I	Region II	Region III	Total	Selisih Difference	%
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Jumlah Kapal Milik (unit) Total Owned Ships (units)	23	85	30	138	44	35	17	96	42	43,75 ↑
Operation Days Kapal Milik (hari) Operation Days of Owned Ships (days)	13.480	30.007	356	43.843	14.171	11.666	13.493	39.330	4.513	11,47 ↑
Jumlah Kapal Back to Back (unit) Total Back to Back Ships	4	20	23	47	7	-	23	30	17	56,67 ↑
Operation Days Back to Back (hari) Operation Days of Back to Back (days)	1.400	6.843	7.168	15.411	1.824	-	5.412	7.236	8.175	112,98 ↑
Jumlah muatan COA diangkut (KL) Total COA cargo transported (KL)	-	-	-	-	422.278.619	-	-	422.278.619	(422.278.619)	(100,00) ↓

Kinerja Usaha per Region
Business Performance by Region

Perihal Description	2022				2021				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022	
	Region I	Region II	Region III	Total	Region I	Region II	Region III	Total	Selisih Difference	%
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Persentase Kelebihan <i>Transportation Loss</i> Rata-rata (%) Average <i>Transportation Loss Excess</i> Percentage (%)	-	-	-	-	1	-	-	1	(1)	(100,00) ↑
Jumlah <i>Call</i> Keagenan Non Pertamina (<i>call</i>) Total Non- Pertamina Agency Calls (<i>call</i>)	437	1.183	419	2.039	481	1.514	426	2.421	(382)	(15,78) ↓
Jumlah <i>Call</i> Keagenan Kapal C/M Pertamina (<i>call</i>) Total PERTAMINA C/M Ship Agency Calls (<i>call</i>)	5.750	8.253	7.345	21.348	5.662	7.806	6.847	20.315	1.033	5,08 ↑
Jumlah <i>Call</i> Keagenan Umum (<i>call</i>) Total General Agency Calls (<i>call</i>)	2.744	1.177	1.584	5.505	2.716	1.517	1.600	5.833	(328)	(5,62) ↓
<i>Custom Clearance</i> (<i>call</i>)	-	29		29	-	20	-	20	9	45,00 ↑
<i>Handling Crew</i> (<i>crew</i>)	74	573	7	654	11	252	4	267	387	144,94 ↑
Jumlah <i>Supply Oil Bunker</i> TNI AL (liter) Total Oil Supply of TNI AL Bunker (liter)	20.707	42.805.537	30.795.167	73.621.411	23.019	52.941.338	4.790.020	57.754.377	15.867.034	27,47 ↑
Jumlah <i>Supply Air Kapal</i> (m ³) Total Ship Water Supply (m ³)	-	-	148.416	148.416	7.076	7.809	112.495	127.380	21.036	16,51 ↑
ISPS Code (Pelatihan) (<i>event</i>) ISPS Code (Training) (<i>event</i>)	-	3	-	3	-	-	-	-	3	N/a ↓

Sinergi Bisnis PTK
PTK Business Synergy

Anak Perusahaan

Perusahaan memiliki 3 (tiga) entitas anak, yaitu PT Pertamina Marine Solutions ("PMSol"), PT Pertamina Port and Logistics ("PPL"), dan PT Pertamina Marine Engineering ("PME"). Selain entitas anak tersebut, Perusahaan juga memiliki perusahaan patungan atau ventura Bersama, yaitu PT Trans Yeong Maritime yang kepemilikan sahamnya terbagi antara PTK sebesar 51% dan Tong Yeong Tug, Co., Ltd. sebesar 49%.

Kinerja bisnis anak perusahaan selama 2022 adalah sebagai berikut:

Kinerja Bisnis Anak Perusahaan
Business Performance of the Subsidiary

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
					Selisih Difference	%	
PT Pertamina Port and Logistics							
Cover Storage - Lease	m2	3.178	8.283	8.283	(5.105)	(61,63)	↓
Open Storage - Lease	m2	9.447	9.185	8.343	262	2,85	↑
Cargo Handling	R/T	1.454.256	1.863.867	1.520.565	(409.611)	(21,98)	↓
Fasilitas Dermaga Dock Facilities	Hari	1.444	1.163	1.551	281	24,16	↑
Jumlah Call Kapal Total Ship Call	Call	4.795	2.795	1.768	2.000	71,56	↑
PT Pertamina Marine Solutions							
SDM yang Dikelola Managed HR	crew	6.206	6.814	6.296	(608)	(8,92)	↓
PT Pertamina Marine Engineering							
General Trading	PO	235	233	413	2	0,86	↑
Pengerukan Dredging	Ports	4	4	4	-	-	-
PT Trans Yeong Maritime							
Jumlah Kapal Operasi Total Operating Vessels	Unit	8	8	8	-	0,00	↑
Operation Days of Owned Fleet	Hari	2.878	2.749	2.563	129	4,69	↑

PT Pertamina Port and Logistics ("PPL")

PPL bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang meliputi *port operation and management*, *pilotage*, *logistics service* dan *oil spill response*.

Pada 2022 jumlah pergudangan yang disewakan PPL untuk *cover storage* seluas 3.178 m2, menurun dibandingkan tahun 2021 dan untuk *open storage* seluas 9.447 m2, meningkat dibandingkan tahun 2021. Jumlah *cargo handling* telah tertangani sebesar 1.454.256 R/T, mengalami penurunan 21,98% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.863.867 R/T.

Subsidiaries

The Company has 3 (three) subsidiaries, namely PT Pertamina Marine Solutions ("PMSol"), PT Pertamina Port and Logistics ("PPL"), and PT Pertamina Marine Engineering ("PME"). In addition to these subsidiaries, the Company also has a joint venture company, namely PT Trans Yeong Maritime, whose share ownership is divided between PTK by 51% and Tong Yeong Tug, Co., Ltd. by 49%.

Business performance of the subsidiary diversification activities in 2022 is as follows:

PT Pertamina Port and Logistics ("PPL")

PPL engages in the port sector, which includes loading and unloading activities and warehousing leases as well as cargo handling.

In 2022, the number of warehouses leased by PPL was 3.178 m2, a decrease compared to 2021 and for open storage covering an area of 9,447 m2, an increase compared to 2021. Total cargo handling that was handled achieved 1,454,256 R/T, a decrease by 21.98% compared to the previous year of 1,863,867 R/T.



Jumlah pemakaian fasilitas dermaga pada tahun 2022 mencapai 1.444 hari, mengalami kenaikan 24,16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.163 hari disebabkan pada tahun 2021 terdapat perbaikan 1 *jetty*. Sementara itu, jumlah *call* pemanduan kapal mencapai 4.795 *call*, mengalami kenaikan 71,56% dari tahun 2021 yang mencapai 2.795 *call*.

PT Pertamina Marine Solutions (“PMSol”)

PMSol bergerak di bidang *manpower supply*, *crew agent*, *ship management*, dan *general trading*. Pada tahun 2022, jumlah tenaga kerja PMSol sebanyak 6.206 orang, mengalami penurunan sebesar 8,92% atau setara dengan 608 orang dibandingkan jumlah tenaga kerja di tahun 2021 sebanyak 6.814 orang. Penurunan ini terutama disebabkan beberapa hal berikut:

1. Adanya peralihan crew tanker PTK ke PIS
2. Adanya pengalihan kontrak dari PP Pertamina Patra Niaga ke PTK (setelah RKAP 2022 selesai disusun) sehingga perlu dilakukan penyesuaian jumlah TKJP sesuai dengan kebutuhan PTK yang mengakibatkan pengurangan jumlah TKJP di masing-masing region.
3. Adanya kebijakan terkait dengan jumlah penyediaan TKJP operator di PT Pertamina Retail untuk Pertashop (3 TKJP) dalam jangka waktu 6 bulan dimana dalam setelah jangka waktu tersebut, pemilik Pertashop bebas menentukan TKJP dapat dikelola mandiri (tidak disupport lagi penyediaannya oleh PMSol).

PT Pertamina Marine Engineering (“PME”)

PME bergerak di bidang pengerukan (*dredging*), *port EPC & maintenance*, *waste management*, *underwater work services*. Di tahun 2022, PME telah melakukan pengerukan sebanyak 4 (empat) spot pekerjaan pengerukan, yaitu di PT Pertamina Patra Niaga (Tanjung Batu), PT Gandasari Energi (Banten), Inland CSD Package 2 (PT Pertamina Hulu Mahakam) dan RU III Plaju (PT Kilang Pertamina Internasional).

PT Trans Yeong Maritime (“TYM”)

TYM merupakan perusahaan ventura bersama antara PT Pertamina Trans Kontinental dengan Tong Yeong Tug, Co., Ltd., dari Korea. TYM bergerak di bidang perkapalan. Pada tahun 2022, jumlah *own fleet* TYM sebanyak 8 (delapan) unit. Adapun *operation days of owned fleet* pada tahun 2022 sejumlah 2.878 hari, mengalami kenaikan 4,69% atau setara dengan 129 hari dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 2.749 hari. Kenaikan ini terutama disebabkan kapal-kapal yang beroperasi secara penuh di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 terdapat beberapa kapal yang *off hire*.

Total dock facilities usage in 2022 reached 1,444 days, an increase by 24.16% compared to the previous year of 1,163 days. This increase was due to 1 *jetty* repair in 2021. Total ship guidance calls reached 4,795 calls, an increase by 71.56% from 2021 with 2,795 calls.

PT Pertamina Marine Solutions (“PMSol”)

PMSol engages in the manpower sector, which consists of PTK Ship Crew and JAPOM Pertamina. In 2022, the number PMSol labor supply was 6,206 crews, a decrease by 8.92% or equivalent to 608 personnel from 6,814 personnel in 2021. The decrease was mainly caused by the following:

1. There was a transition of the PTK tanker crew to PIS
2. There was a transfer of contracts from Patra Niaga to PTK (after the 2022 RKAP was completed), so it was necessary to adjust the number of TKJP according to the needs of PTK which resulted in a reduction in the number of TKJP in each region.
3. There was a policy related to the number of TKJP operators provided at Pertamina Retail for Pertashop (3 TKJP) within a period of 6 months stipulating that after the period, Pertashop owners would be free to determine that TKJP could be managed independently (PMSol would no longer support the provision of TKJP operators).

PT Pertamina Marine Engineering (“PME”)

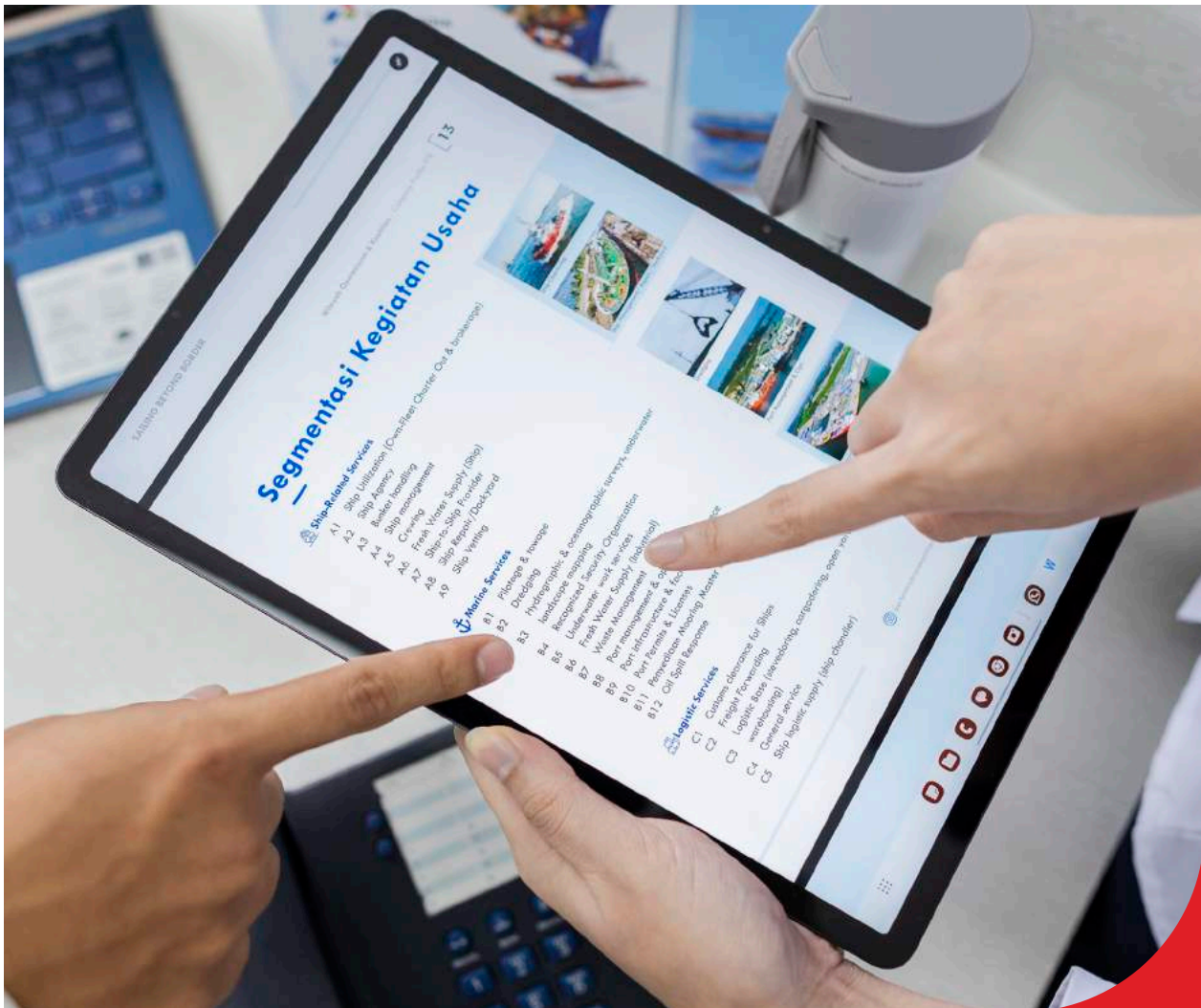
PME engages in dredging and general trading. In 2022, PME has carried out 4 (four) dredging work spots, namely in PT Pertamina Patra Niaga (Tanjung Batu), PT Gandasari Energi (Banten), Inland CSD Package 2 (PT Pertamina Hulu Mahakam) and RU III Plaju (PT Kilang Pertamina Internasional).

PT Trans Yeong Maritime (“TYM”)

TYM is a joint venture between PT Pertamina Trans Kontinental with Tong Yeong Tug, Co., Ltd. from Korea. TYM engages in shipping. In 2022, the number of TYM's own fleets was 8 units. Operation days of the owned fleets in 2022 achieved 2,878 days, an increase by 4.69% or equivalent to 129 days compared to 2,749 days in previous year. The increase was mainly due to the vessels that were fully operational in 2022, whereas in 2021 there were several vessels off hire.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect



Dengan tema pertumbuhan PT PTK tahun 2022 yaitu *"Sailing Beyond Border"*, program utama yang diusung adalah transformasi bisnis dengan strategi pertumbuhan memperbesar pasar eksisting, pengembangan usaha baru serta optimalisasi sinergi dengan Pertamina dan Pertamina Group dengan target pendapatan sebesar Rp5,28 triliun dan laba bersih sebesar Rp559,24 miliar.

Realisasi Pendapatan Operasi 2022 tercatat sebesar Rp4.784,91 miliar atau tercapai 90,64% dari target RKAP 2022, tumbuh 25,89% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2021 dengan pencapaian laba bersih 2022 sebesar Rp733,03 miliar atau tercapai 131,07% dari target RKAP 2022.

With the theme of PT PTK's growth in 2022, namely *"Sailing Beyond Border"*, the main program being carried out was business transformation with a growth strategy to enlarge the existing market, develop new businesses and optimize synergies with Pertamina and the Pertamina Group with a revenue target of Rp5.28 trillion and net profit amounting to Rp559.24 billion.

Realization of Operating Income 2022 was recorded at Rp4,784.91 billion or 90.64% of the 2022 RKAP target, growing 25.89% compared to the realization of the 2022 RKAP target. 2022 target, grew 25.89% compared to the realization of the same period in 2021 with the same period in 2021 with the achievement of 2022 net profit amounted to Rp733.03 billion or achieved 131.07% of the 2022 RKAP target.

Segmentasi Pasar

Terhitung sejak Mei 2021, dengan pelaksanaan restrukturisasi Pertamina di mana Fungsi *Marine* bergabung, PTK bertransformasi bisnis mengusung layanan dengan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori utama yaitu jasa *Shipping Activities*, *Marine Services*, dan *Logistics Services*. Pangsa Pasar PTK adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha industri migas, dengan target pasar Pertamina Group dan Non Pertamina Group. Kegiatan *Ex-Marine Holding* diramu dengan model *Bundling* dan *Unbundling* kepada *Subholding Commercial & Trading* dan *Subholding Refinery & Petrochemical*.

Bisnis Bundling

Bisnis *Port Management Bundling* adalah gabungan dari berbagai layanan bisnis *marine* yang ditawarkan menjadi satu paket bisnis. Bisnis *Bundling* terdiri dari beberapa pekerjaan meliputi:

- *Port Operation*
- Kapal-kapal ringan
- *Pilotage*
- *Oil Spill Response*
- *Port Preventive Maintenance*
- *Periodic Underwater Inspection*
- *STS Support Provider*

Bisnis Unbundling

Bisnis *Port Management Unbundling* adalah suatu layanan *marine* di luar bisnis *bundling*, yang meliputi pekerjaan yaitu:

- Dredging
- *Hydro Oceanography*
- *Port Permit & Licenses*
- *Corrective Maintenance/Revitalization and Engineering Procurement Construction*
- *Port Plan & Periodic Maintenance*
- *Underwater Facilities Minor Maintenance*
- *Docking SPM dan CBM*
- *Waste Management*

Profil Pelanggan

Profil Pelanggan PTK Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Segmen Bisnis Business Segment	Pertamina (IDR Miliar) (IDR Billion)	3 rd Party (IDR Miliar) (IDR Billion)	Total (IDR Miliar) (IDR Billion)	% Per Segmen Per Segment
<i>Shipping Activities</i>	1,679.37	337.34	2,016.71	40%
<i>Marine Services</i>	1,664.72	1,081.24	2,745.96	54%
<i>Logistic Services</i>	153.17	177.01	330.18	6%
Total	3,497.26	1,595.60	5,092.86	100%
% per Pelanggan % per Customer	68.67%	31.33%	100.00%	

Market segmentation

As of May 2021, with the implementation of Pertamina's restructuring where the Marine Function joined, PTK has transformed its business into services by dividing them into 3 (three) main categories, namely *Shipping Activities*, *Marine Services*, and *Logistics Services*. PTK Market Share are business actors engaged in the oil and gas industry, with the target market being the Pertamina Group and Non-Pertamina Group. *Ex-Marine Holding* activities are combined with the *Bundling* and *Unbundling* models for *Commercial & Trading Subholdings* and *Refinery & Petrochemical Subholdings*.

Bundling Business

The *Port Management Bundling* business is a combination of various marine business services offered into one business package. The *Bundling* business consists of several jobs including:

- *Port Operations*
- *Light vessels*
- *Pilotage*
- *Oil Spill Response*
- *Port Preventive Maintenance*
- *Periodic Underwater Inspection*
- *STS Support Provider*

Unbundling business

The *Port Management Unbundling* business is a marine service outside the bundling business, which includes work namely:

- Dredging
- *Hydro Oceanography*
- *Port Permits & Licenses*
- *Corrective Maintenance/Revitalization and Engineering Procurement Construction*
- *Port Plan & Periodic Maintenance*
- *Underwater Facilities Minor Maintenance*
- *Docking SPM and CBM*
- *Waste Management*

Customer Profile

The 2022 PTK customer profile is as follows:

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

- Pelanggan Pertamina Group

Pelanggan Pertamina Group adalah pelanggan PTK di lingkungan Pertamina, antara lain yaitu SH *Commercial & Trading*, PT Pertamina International Shipping, SH *Refinery & Petrochemical*, SH *Upstream* (a.l. Pertamina Hulu Energi, Pertamina Hulu Kalimantan, Pertamina Hulu Rokan), SH Gas (PT Perta Arun Gas), dan SH *Power & NRE*.

Kontribusi pendapatan 2022 yang diperoleh dari Pertamina Group tercatat sebesar 86,20% dari total pendapatan.

- Pelanggan Non Pertamina

Pelanggan Non Pertamina adalah pelanggan PTK yang merupakan entitas di luar lingkungan Pertamina antara lain yaitu Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (K3S), Perusahaan Pelayaran, APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), BUMN dan lain-lain.

Kontribusi pendapatan 2022 yang diperoleh dari Pelanggan Non Pertamina tercatat sebesar 13,80% dari total pendapatan.

- Kontribusi pendapatan per segmen bisnis tahun 2022 tercatat yaitu pendapatan layanan *Marine Services*, sebesar 54%, kemudian layanan *Shipping Activities* sebesar Rp40%, dan layanan *Logistic Services* sebesar 6%.

- Pertamina Group Customers

Pertamina Group Customers are PTK customers within Pertamina, including SH *Commercial & Trading*, PT Pertamina International Shipping, SH *Refinery & Petrochemical*, SH *Upstream* (a.l. Pertamina Hulu Energi, Pertamina Hulu Kalimantan, Pertamina Hulu Rokan), SH Gas (PT Perta Arun Gas), and SH *Power & NRE*.

2022 revenue contribution from Pertamina Group was recorded at 86.20% of total revenue.

- Non-Pertamina Customers

Non-Pertamina Customers are PTK customers who are entities outside Pertamina's environment, including Oil and Gas Cooperation Contract Contractors (K3S), Shipping Companies, APROBI (Indonesian Biofuel Producers Association), SOE and others.

2022 revenue contribution from Non-Pertamina Customers was recorded at 13.80% of total revenue

- Revenue contribution per business segment in 2022 was recorded, namely Marine Services service revenue, amounting to 54%, then Shipping Activities services amounting to 40%, and Logistic Services amounting to 6%.

Karakteristik Pasar dan Iklim Persaingan Bisnis

Karakteristik pasar Jasa yang ditawarkan PTK adalah oligopoli ditandai dengan terbatasnya jumlah perusahaan sejenis di Indonesia yang beraktivitas di dalam industri minyak dan gas. Dibutuhkan modal dan sumber daya yang besar untuk dapat masuk dalam industri ini, mengingat tingginya nilai investasi kapal-kapal yang digunakan, ketatnya persyaratan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan pelanggan, dan luasnya jaringan pelayanan.

Persaingan antar perusahaan dalam industri ini lebih ditentukan oleh penggunaan teknologi di atas kapal, kesesuaian dengan standar keselamatan terbaik, dan lingkup pelayanan yang menyertai. Perubahan harga yang terjadi di pasar, akan diikuti oleh perubahan harga yang ditawarkan perusahaan yang ada dalam industri ini.

Market Characteristics and Business Competition Climate

Characteristic of Services market offered by PTK is oligopoly characterized by the limited number of similar companies in Indonesia that are active in oil and gas industry. Huge amounts of capital and resources are needed to enter this industry, given the high investment value of the ships used, the stringent safety and security requirements set by customers, and the breadth of the service network.

Competition between companies in this industry is more determined by the use of technology on board, compliance with the best safety standards, and the scope of services that accompany it. Price changes that occur in the market will be followed by changes in prices offered by companies in this industry.

Iklim Persaingan

Pesaing PTK untuk tiap jenis layanan, ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Competition Climate

PTK competitors for each type of service are shown in the table below:

Pesaing PTK pada bisnis Jasa Shipping

PTK competitors in Shipping Services business

No.	Lingkup Jasa Scope of Services	PTK Group	Kompetitor Competitors
1	Pelayaran (transportir muatan, <i>offshore support</i>) Shipping (cargo transporters, offshore support)	PTK	PT Samudera Indonesia
2	Distribusi muatan migas Distribution of oil and gas cargo	PTK	PT Pelindo Energi Logistik
3	Penyedia kapal OSV OSV ship provider	PTK	PT Wintermar PT Logindo Samudramakmur, Tbk
4	Penyedia kapal sarpel Sarpel ship provider	PTK	PT Waruna Nusa Sentana
5	Ship management	PTK	PT Samudera Indonesia Ship Management

Pesaing PTK pada bisnis Jasa Marine

PTK competitors in Marine Services business

No.	Lingkup Jasa Scope of Services	PTK Group	Kompetitor Competitors
1	Pandu-tunda kapal (<i>pilotage & towage</i>) Pilotage & towage	PPL	PT Jasa Armada Indonesia/IPC Marine (AP Pelindo II); PT Pelindo Marine Service (AP Pelindo III)
2	Kepelabuhanan/pengelolaan terminal Port/terminal management	PPL	PT Pelabuhan Tanjung Priok (AP Pelindo II); PT Berlian Jasa Terminal Indonesia PT Terminal Teluk Lamong (AP Pelindo III)
3	Penyediaan tenaga kerja dan tenaga alih daya untuk lingkup kepelabuhanan (<i>core dan non-core</i>) Provision of manpower and outsourcing for port scope (core and non-core)	PMSol	PT Pelindo Daya Sejahtera (AP Pelindo III) PT Intan Sejahtera Utama (AP Pelindo IV)
4	Pengerukan alur pelayaran dan reklamasi Shipping lanes dredging and reclamation	PME	PT Pengerukan Indonesia (AP Pelindo II); PT Ambang Barito Nusapersada (Afiliasi Pelindo III) PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (cucu Pelindo III)
5	Pemeliharaan & penyewaan alat-alat fasilitas pelabuhan Maintenance & rental of port facility equipment	PME	PT Portek Indonesia (Afiliasi Pelindo III)
6	Kepelabuhanan, <i>bunker service, fresh water supply, towage</i> Port, bunker service, fresh water supply, towage	PPL	PT Berlian Manyar Sejahtera (cucu Pelindo III)
7	Konstruksi bangunan pelabuhan dan dermaga Harbor and wharf building construction	PME	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (cucu Pelindo III)
8	Pengelolaan limbah Waste management	PME	PT Pelindo Energi Logistik (cucu Pelindo III)
9	Penyedia <i>port equipment & facilities, maintenance & engineering</i> , serta <i>port operator</i> Provider of port equipment & facilities, maintenance & engineering, as well as port operators	PME	PT Equiport Inti Indonesia (AP Pelindo IV)

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

Pesaing PTK pada bisnis Jasa Logistik

PTK competitors focus on Logistics Services business

No.	Lingkup Jasa Scope of Services	PTK Group	Kompetitor Competitors
1	Layanan logistik kepelabuhanan (<i>freight forwarding, cargodoring, stevedoring, bongkar muat</i>) Port logistics services (<i>freight forwarding, cargodoring, stevedoring, loading and unloading</i>)	PME, PPL	PT Indonesia Kendaraan Terminal (AP Pelindo II); PT Terminal Curah Semarang (cucu Pelindo III) PT Berlian Manyar Sejahtera (cucu Pelindo III) PT IPC Terminal Petikemas (AP Pelindo II) PT Samudera Indonesia Logistik Kargo
2	Penyediaan, penyewaan, dan pemeliharaan peralatan utama penunjang kegiatan bongkar muat, Provision, rental and maintenance of main equipment to support loading and unloading activities	PPL	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (AP Pelindo II) PT Samudera Terminal Indonesia
3	Penyediaan fasilitas pergudangan Provision of warehousing facilities	PPL	PT Berkah Multi Cargo Logistik (cucu Pelindo III)
4	Logistik migas dan pengelolaan limbah Oil and gas logistics and waste management	PPL	PT Pelindo Energi Logistik (cucu Pelindo III)

Strategi Pemasaran Tahun 2022

Secara umum Strategi Pemasaran yang dilaksanakan PTK meliputi:

1. Menyediakan layanan bisnis jasa perkapalan, jasa marine, dan jasa logistik secara *end-to-end dengan standard world class*.
2. Mengembangkan kompetensinya di segmen bisnis jasa *marine* lain, meliputi keagenan kapal, agen & transportir BBM ke kapal, operasi dan pengelolaan pelabuhan, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelabuhan, pemanduan-penundaan kapal, pengerukan alur pelayaran (*dredging*), pekerjaan teknik bawah air (*underwater work services*), suplai air baku untuk industri & kapal, pengelolaan limbah (*waste management*), penanganan tumpahan minyak di perairan (*oil spill response*)
3. Menerapkan HSSE & *operational excellence* di seluruh lini bisnis.
4. Mengembangkan kompetensi dan keahlian SDM, pengelolaan aset secara optimal, dan menjaga kesehatan finansial Perusahaan.
5. Digitalisasi proses bisnis untuk penyederhanaan alur kerja, integrasi dan kecepatan akses informasi, serta percepatan pengambilan keputusan.
6. Optimalisasi peluang bisnis di segmen pasar *captive* dengan mengedepankan sinergi antar entitas grup Pertamina dan meningkatkan penetrasi ke pasar *non-captive*.
7. Prioritas pengembangan pada lini bisnis dengan porsi kontribusi pendapatan terbesar, keberlanjutan jangka panjang, dan prospek pertumbuhan tertinggi.
8. Eksplorasi konsep ramah lingkungan (*green strategy*) pada kegiatan bisnis seperti pengurangan emisi karbon dioksida (CO₂) operasional kapal serta konsep penggunaan tenaga surya sebagai sumber tenaga listrik alternatif di gedung kantor, *dockyard*, dan *logistic shorebase*.

Marketing Strategy for 2022

In general, the Marketing Strategy implemented by PTK includes:

1. Providing end-to-end shipping activities, marine services, and logistics services with world class standards.
2. Developing competence in other marine services business segments, including ship agency, fuel agent & transporter to ship, port operation and management, maintenance of port facilities and infrastructure, piloting and delaying ships, dredging, underwater engineering work (underwater work services), raw water supply for industry & ships, waste management, handling of oil spills in waters (oil spill response)
3. Implementing HSSE & operational excellence in all business lines.
4. Developing HR competencies and expertise, optimally manage assets, and maintain the Company's financial health.
5. Digitizing business processes to simplify workflows, integrate and speed access to information, and accelerate decision making.
6. Optimizing business opportunities in captive market segment by prioritizing synergies between Pertamina group entities and increasing penetration into non-captive markets.
7. Prioritizing the development of business lines with the largest portion of revenue contribution, long-term sustainability, and the highest growth prospects.
8. Exploration of eco-friendly concepts (*green strategy*) in business activities such as reducing carbon dioxide (CO₂) emissions from ship operations and the concept of using solar energy as an alternative source of electric power in office buildings, dockyards, and shorebase logistics.



Strategi Pemasaran yang dilakukan PT PTK per segmen bisnis, sebagai berikut:

Shipping Activities

- Pemetaan, penilaian dan evaluasi kembali atas kapal-kapal Pertamina yang dialihkan kepada PTK agar dapat ter-utilisasi secara optimal
- Penambahan jumlah armada untuk penetrasi pasar eksisting dan pengembangan ke segmen pasar penyediaan kapal di *Subholding Upstream*, yaitu dengan pembelian 2 unit *Tugboat* untuk memenuhi kebutuhan di PT Pertamina International Shipping, dan 2 unit kapal jenis *Landing Craft Tank*, kapal pengangkut dengan kemampuan untuk melakukan *approach* ke *platform* dan *jetty*, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengiriman atau pemindahan alat-alat berat untuk kegiatan operasi, untuk pasar *upstream*.
- Melanjutkan penerapan program *Computerized Maintenance Management System* pada seluruh kapal milik guna menjaga kehandalan kapal untuk mencapai target *commission days* dan *commercial days*.
- Meningkatkan HSSE *excellence* dan *operational excellence* melalui program pelatihan/peningkatan kompetensi *crew* guna menjaga kepercayaan pelanggan.
- Menerapkan *e-Procurement* dan strategi kontrak payung dengan *vendor/supplier spare part* terkait pemenuhan *maintenance* kapal untuk mencapai target *commission* dan *commercial days*.

Marine Services

- Investasi penambahan alat penunjang kegiatan *oil spill response* dan teknik bawah air.
- Sertifikasi dan peningkatan kompetensi pekerja untuk pekerjaan *marine* dan *port engineering*, perawatan sarfas pelabuhan, pengerukan alur pelayaran.

Logistic Services

- PSTB dikembangkan menjadi *integrated logistic base* yang tidak hanya menyediakan alat berat dengan kapasitas maksimal 275 ton, tetapi juga menyediakan jasa *point-to-point delivery* dari lokasi PSTB menuju fasilitas pengeboran di tengah laut, dan sebaliknya. Pengembangan *integrated logistic base* tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi tersebut.
- Penambahan bisnis *waste management* di PSTB.
- Tidak hanya di Tanjung Batu, PTK juga memiliki area *logistic shorebase* di Kabil, Batam, yang strategis dan terus dikembangkan potensinya.

Marketing Strategy carried out by PT PTK per business segment, as follows:

Shipping Activities

- Mapping, assessing and re-evaluating Pertamina's ships transferred to PTK to be utilized optimally.
- Adding the number of fleets for penetration of the existing market and development into the market segment for the provision of ships in Subholding Upstream, namely by purchasing 2 units of Tugboats to meet the needs of PT Pertamina International Shipping, and 2 units of ships of the Landing Craft Tank type, carrier vessels with the ability to make approaches to platform and jetty, to facilitate the delivery or transfer of heavy equipment for operations, for the upstream market.
- Continuing the implementation of the Computerized Maintenance Management System program on all owned ships in order to maintain ship reliability to achieve target commission days and commercial days.
- Improving HSSE excellence and operational excellence through training programs/improvement of crew competence in order to maintain customer trust.
- Implementing e-Procurement and umbrella contract strategies with spare part vendors/suppliers related to fulfilling ship maintenance to achieve target commissions and commercial days.

Marine Services

- Investment in additional tools to support oil spill response activities and underwater techniques.
- Certification and improvement of worker competency for marine and port engineering work, port infrastructure maintenance, shipping channel dredging.

Logistic Services

- PSTB was developed into an integrated logistic base that not only provides heavy equipment with a maximum capacity of 275 tons, but also provides point-to-point delivery services from PSTB locations to drilling facilities in the middle of the sea, and vice versa. The development of the integrated logistics base is expected to provide added value for oil and gas companies operating in Kalimantan and Sulawesi regions.
- Addition of waste management business in PSTB.
- Not only in Tanjung Batu, PTK also has a shorebase logistics area in Kabil, Batam, which is strategic and continues to develop its potential.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan berikut ini terintegrasi dengan data operasional per segmen usaha serta laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangannya yang terdapat di dalam laporan tahunan ini. Uraian mengenai analisis kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya yang disajikan ini berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berlaku di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan Laporan Audit yang telah dipublikasikan pada tanggal 13 Maret 2023 dengan pendapat "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material".

The following discussion regarding the analysis of financial performance is integrated with operational data per business segment as well as the consolidated financial statements and notes to the financial statements contained in this annual report. The description of the consolidated financial performance and cash flow analysis presented here is based on the Consolidated Financial Statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its Subsidiaries for the years ended December 31, 2022 and 2021 in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") applicable in Indonesia, which have been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, with an Audit Report published on March 13, 2023 with the opinion "presents fairly, in all material respects".

Analisis Posisi Keuangan Konsolidasian

Jumlah aset Perusahaan mengalami kenaikan 5,14% di tahun 2022 menjadi sebesar Rp8,20 triliun Sementara itu, komposisi Liabilitas dan Ekuitas di tahun 2022 masing-masing sebesar 56,02% dan 43,98%.

Consolidated Financial Position Analysis

The Company's total assets increased by 5.14% in 2022 to Rp8.20 trillion. Meanwhile, the composition of Liabilities and Equity in 2022 was 56.02% and 43.98% respectively.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statement of Financial Position

Posisi Keuangan Financial Position	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%	
Aset Assets						
Aset Lancar Current Assets	3.811.707	3.373.379	2.160.035	438.328	12,99	↑
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	4.390.864	4.428.482	3.836.315	(37.618)	(0,85)	↓
Jumlah Aset Total Assets	8.202.571	7.801.861	5.996.350	400.710	5,14	↑
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity						
Liabilitas Liabilities						
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.613.513	3.133.013	2.320.665	480.500	15,34	↑
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	981.479	1.219.734	1.096.086	(238.255)	(19,53)	↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.594.992	4.352.747	3.416.751	242.245	5,57	↑
Ekuitas Equity	3.607.579	3.449.114	2.579.599	158.465	4,59	↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	8.202.571	7.801.861	5.996.350	400.710	5,14	↑
Kurs Nilai Tukar Akhir Tahun Per 1 USD End of Year Exchange Rate Per 1 USD	15.592	14.278,00	14.105,01	1.314	9,20	↑

ASET

Per 31 Desember 2022, Perusahaan membukukan aset sebesar Rp8,20 triliun, mengalami kenaikan 5,14% atau setara dengan Rp400,71 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7,80 triliun.

Komposisi total aset ini terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar, di mana dalam 3 (tiga) tahun terakhir aset Perusahaan terutama didominasi aset tidak lancar dengan komposisi sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

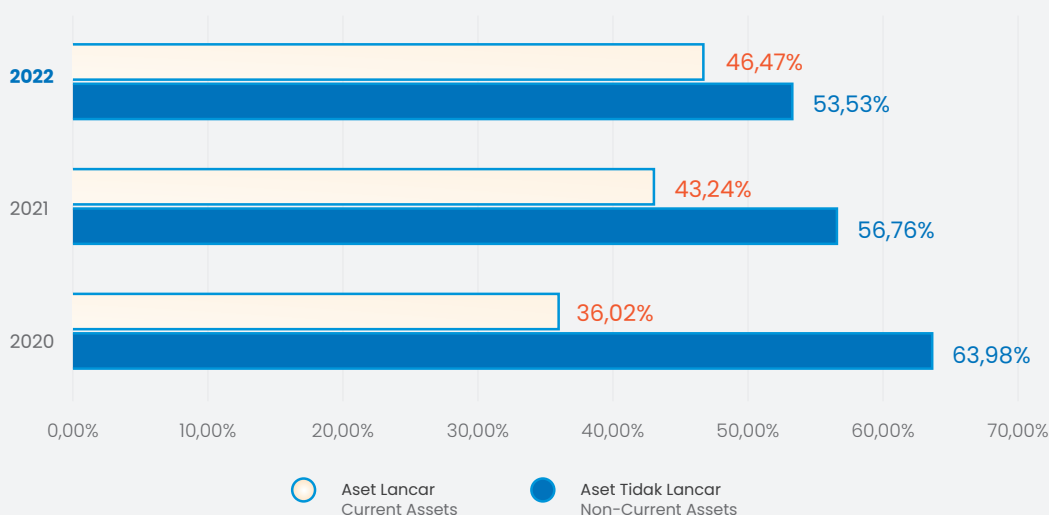
ASSETS

As of December 31, 2022, the Company posted assets of Rp8.20 trillion, an increase by 5.14% or equivalent to Rp400.71 billion compared to the previous year of Rp7.80 trillion.

The composition of total assets consists of current assets and non-current assets, where in the last 3 (three) years the Company's assets were mainly dominated by non-current assets with the composition as shown in the chart below.

Komposisi Aset Berdasarkan Aset Lancar dan Tidak Lancar

Composition of Assets Based on Current Assets and Non-Current Assets

**Aset Lancar**

Current Assets

Aset Lancar Current Assets	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%	
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents	1.125.624	1.263.166	652.483	(137.542)	(10,89)	↓
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted Cash	1.779	592	588	1.187	200,51	↑
Piutang usaha Trade Receivables	1.284.773	1.131.308	625.758	153.465	13,57	↑
Aset kontrak Contract Assets	1.277.205	853.320	802.444	423.885	49,67	↑
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivables	22.798	20.876	20.624	1.922	9,21	↑
Persediaan Inventories	-	65	675	(65)	(100,00)	↓

Tinjauan Keuangan
Financial ReviewAset Lancar
Current Assets

Aset Lancar Current Assets	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%	
Piutang lain-lain Other Receivables	59	6.159	86	(6.100)	(99,04)	↓
Pajak dibayar dimuka - pajak lain-lain Prepaid taxes - other taxes	24.076	17.752	15.808	6.324	35,62	↑
Uang muka dan biaya dibayar di muka Advances and prepayments	75.393	80.141	41.569	(4.748)	(5,92)	↓
Jumlah aset lancar Total Current Assets	3.811.707	3.373.379	2.160.035	438.328	12,99	↑

Aset lancar PTK tahun 2022 sebesar Rp3,81 triliun, mengalami kenaikan 12,99% atau setara dengan Rp438,33 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,37 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan didorong oleh naiknya piutang usaha dari pihak berelasi dan aset kontrak.

PTK current assets in 2022 amounted to Rp 3.81 trillion, an increase by 12.99% or equal to Rp 438.33 billion compared to 2021 of Rp 3.37 trillion. This increase was mainly driven by an increase in trade receivables from related parties and contract assets.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%	
Aset Tetap Fixed Assets	3.861.943	4.035.264	3.520.066	(173.321)	(4,30)	↓
Aset hak-guna Right-of-use assets	309.975	182.009	56.332	127.966	70,31	↑
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	87.616	55.327	43.115	32.289	58,36	↑
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivables	22.798	41.753	61.871	(18.955)	(45,40)	↓
Penyertaan saham Investment in shares	6.661	5.999	8.098	662	11,04	↑
Investasi pada ventura bersama Investment in a joint venture	87.607	84.643	74.425	2.964	3,50	↑
Taksiran Pengembalian pajak Estimated tax refund	-	2.179	68.790	(2.179)	(100,00)	↓
Pajak dibayar dimuka - pajak lain-lain Prepaid taxes - other taxes	-	15.810	-	(15.810)	(100,00)	↓
Aset lain-lain Other assets	14.264	5.498	3.618	8.766	159,44	↑
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	4.390.864	4.428.482	3.836.315	(37.618)	(0,85)	↓

Aset tidak lancar perusahaan tahun 2022 sebesar Rp4,39 triliun, mengalami penurunan 0,85% atau setara dengan Rp37,62 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,43 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya aset tetap PTK.

The Company's non-current assets in 2022 amounted to Rp4.39 trillion, a decrease by 0.85% or equal to Rp 37.62 billion compared to the previous year of Rp 4.43 trillion. This decrease was primarily due to a decrease in PTK fixed assets.

LIABILITAS

Per 31 Desember 2022, Perusahaan membukukan liabilitas sebesar Rp4,59 triliun, mengalami kenaikan 5,57% atau setara dengan Rp242,24 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,35 triliun.

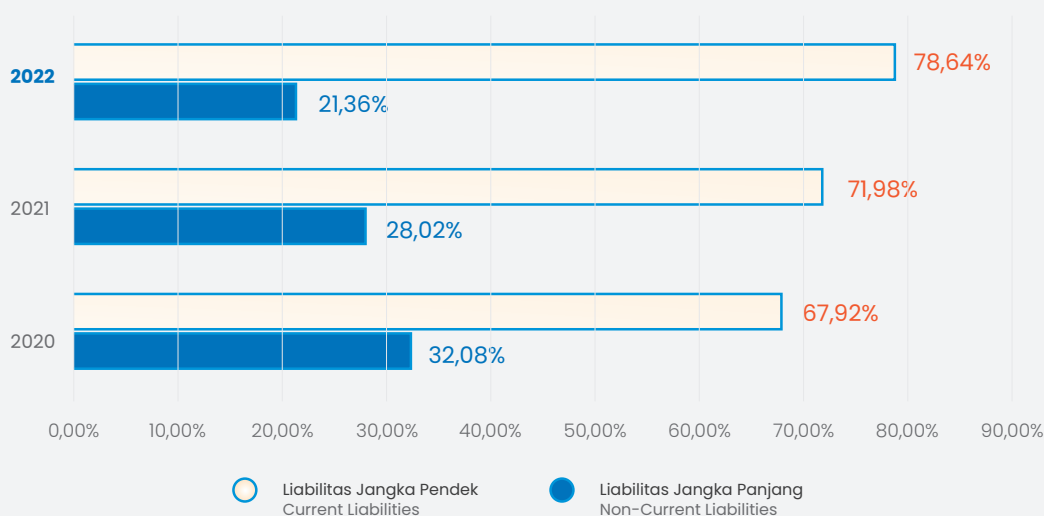
LIABILITIES

As of December 31, 2022, the Company posted liabilities of Rp4.59 trillion, an increase by 5.57% or equal to Rp242.24 billion compared to the previous year of Rp 4.35 trillion.

Komposisi total liabilitas terdiri atas liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, di mana dalam 3 (tiga) tahun terakhir liabilitas Perusahaan terutama didominasi liabilitas jangka pendek dengan komposisi sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

The composition of total liabilities consists of current liabilities and non-current liabilities, where in the last 3 (three) years the Company's liabilities were mainly dominated by current liabilities with the composition as shown in the chart below.

Komposisi Liabilitas Berdasarkan Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang
Composition of Liabilities Based on Current Liabilities and Non-Current Liabilities



Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Peningkatan) Increase (Increase) 2021-2022	
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%
Utang usaha Trade Payables					
Pihak berelasi Related parties	909.546	639.972	456.758	269.574	42,12 ↑

Tinjauan Keuangan
Financial ReviewLiabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%	
Pihak ketiga Third parties	117.952	230.515	189.211	(112.563)	(48,83)	↓
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	1.742.194	1.566.119	1.147.039	176.075	11,24	↑
Liabilitas kontrak Contract liabilities						
Pihak berelasi Related parties	20.136	53.814	105	(33.678)	(62,58)	↓
Pihak ketiga Third parties	87.084	87.639	115.066	(555)	(0,63)	↓
Utang pajak Taxes payable						
Pajak penghasilan Corporate Income Taxes	97.288	35.199	6.320	62.089	176,39	↑
Pajak lain-lain Other Taxes	52.968	47.875	14.115	5.093	10,64	↑
Utang dividen Dividend Payables	64	9.937	-	(9.873)	(99,36)	↓
Bagian jangka pendek atas liabilitas sewa Current portion of long-term lease liabilities	354.455	225.166	27.123	129.289	57,42	↑
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang Current portion of long-term borrowings	231.826	236.777	364.928	(4.951)	(2,09)	↓
Jumlah liabilitas jangka pendek Total current liabilities	3.613.513	3.133.013	2.320.665	480.500	15,34	↑

Liabilitas jangka pendek Perusahaan tahun 2022 sebesar Rp3,61 triliun, mengalami kenaikan 15,34% atau setara dengan Rp480,50 miliar dibandingkan liabilitas jangka pendek tahun 2021 sebesar Rp3,13 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan meningkatnya utang usaha dari pihak berelasi sebesar 42,12% dan biaya yang masih harus dibayar sebesar 11,24%.

The Company's current liabilities in 2022 amounted to Rp 3.61 trillion, an increase by 15.34% or equal to Rp480.50 billion compared to current liabilities in 2021 of Rp 3.13 trillion. The increase was mainly due to an increase in trade payables from related parties by 42.12% and accrued expenses by 11.24%.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%	
Liabilitas Sewa Lease liabilities	81.930	48.815	33.794	33.115	67,84	↑
Pinjaman jangka panjang Long-Term Borrowings	722.993	1.000.607	883.886	(277.614)	(27,74)	↓

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%	
Liabilitas imbalan pascakerja Post-employment benefits obligation	176.556	170.312	178.402	6.244	3,67	↑
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	-	-	4	-	-	-
Jumlah liabilitas jangka panjang Total Non-Current Liabilities	981.479	1.219.734	1.096.086	(238.255)	(19,53)	↓

Liabilitas jangka panjang Perusahaan tahun 2022 sebesar Rp981,48 miliar, mengalami penurunan 19,53% atau setara dengan Rp238,25 miliar dibandingkan liabilitas jangka panjang tahun 2021 sebesar Rp1,22 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan menurunnya pinjaman jangka panjang perusahaan.

The Company's non-current liabilities in 2022 amounted to Rp981.48 billion, a decrease by 19.53% or equal to Rp 238.25 billion compared to non-current liabilities in 2021 of Rp1.22 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in the company's long-term borrowings.

EKUITAS**EQUITY**

Ekuitas Equity	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%	
Modal saham Share capital	1.234.748	1.106.146	693.709	128.602	11,63	↑
Tambahan modal disetor Additional paid in capital	(76.051)	(76.051)	3.000	-	-	-
Rugi komprehensif lain Other comprehensive loss	(80.872)	(101.555)	(117.082)	20.683	(20,37)	↓
Saldo laba: Retained earnings:						
Ditentukan penggunaannya Appropriated	112.796	75.943	75.943	36.853	48,53	↑
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	2.416.562	2.444.631	1.924.029	(28.069)	(1,15)	↓
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interest	396	-	-	396	-	-
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.607.579	3.449.114	2.579.599	158.465	4,59	↑

Jumlah ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3,61 triliun, mengalami kenaikan 4,59% atau setara dengan Rp158,46 miliar dibandingkan jumlah ekuitas tahun 2021 sebesar Rp3,45 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan meningkatnya modal saham dan saldo laba yang ditentukan penggunaannya.

The Company's total equity as of December 31, 2022 amounted to Rp3.61 trillion, an increase by 4.59% or equal to Rp 158.46 billion compared to the total equity in 2021 of Rp 3.45 trillion. The increase was primarily due to an increase in share capital and retained earnings – appropriated.

Tinjauan Keuangan
Financial ReviewAnalisis Laba/(Rugi) dan Penghasilan
Komprehensif Lain KonsolidasianConsolidated Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income

Laba/(Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Profit/(Loss) and Other Comprehensive Income	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%	
Pendapatan usaha Revenue	4.784.913	3.800.987	3.058.197	983.926	25,89	↑
Beban pokok pendapatan Cost of Revenue	(3.136.987)	(2.688.852)	(2.181.550)	(448.135)	16,67	↑
Laba bruto Gross Profit	1.647.926	1.112.135	876.647	535.791	48,18	↑
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(649.316)	(458.185)	(318.096)	(191.131)	41,71	↑
(Beban)/keuntungan lain-lain, bersih Other income/(expenses), net	25.531	25.543	(26.955)	(12)	(0,05)	↓
Pendapatan keuangan Finance income	23.565	6.597	15.075	16.968	257,21	↑
Beban keuangan Finance costs	(99.799)	(54.172)	(58.860)	(45.627)	84,23	↑
Bagian atas laba bersih ventura bersama Share in profit of a joint venture	25.446	28.045	22.283	(2.599)	(9,27)	↓
Beban pajak final Final tax expenses	(18.499)	(17.723)	(26.164)	(776)	4,38	↑
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	954.854	642.240	483.930	312.614	48,68	↑
Beban pajak penghasilan Income tax expenses	(221.826)	(111.701)	(60.553)	(110.125)	98,59	↑
Laba tahun berjalan Profit for the year	733.028	530.539	423.377	202.489	38,17	↑
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain Other comprehensive income/(loss)	20.683	15.527	(9.634)	5.156	33,21	↑
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	753.711	546.066	413.733	207.645	38,03	↑
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:						
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	732.568	530.539	423.377	202.029	38,08	↑
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interest	460	-	-	-	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Total comprehensive income for the year attributable to:						
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	753.251	546.066	413.733	207.185	37,94	↑
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interest	460	-	-	460	100,00	↑



Pendapatan Usaha

Pada tahun 2022, pendapatan usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp4,78 triliun, mengalami kenaikan 25,89% atau setara dengan Rp983,93 miliar dibandingkan pendapatan usaha Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp3,80 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya kegiatan pada segmen *marine services* yang tumbuh 47,38% atau setara dengan Rp783,04 miliar dari Rp1,65 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,43 triliun pada tahun 2022.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perusahaan terdiri dari beban jasa penunjang operasi *marine*, beban penyediaan tenaga kerja, beban sewa kapal, beban keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan, beban perdagangan umum, beban bongkar muat, beban pengerukan, beban penyediaan air bersih, biaya lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar), dan penyusutan.

Pada tahun 2022, beban pokok pendapatan Perusahaan tercatat sebesar Rp3,14 triliun, mengalami kenaikan 16,67% atau setara dengan Rp448,13 miliar dibandingkan beban pokok pendapatan tahun 2021 sebesar Rp2,69 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan seiring dengan meningkatnya kegiatan pada segmen *marine services*.

Laba Bruto

Perusahaan mencatat laba bruto tahun 2022 sebesar Rp1,65 triliun, mengalami kenaikan 48,18% atau setara dengan Rp535,79 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,11 triliun. Kenaikan ini tak lepas dari tumbuhnya pendapatan usaha.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perusahaan terdiri dari biaya karyawan dan kesejahteraan, pemeliharaan bangunan, biaya perlengkapan kantor, biaya hubungan masyarakat, sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah, serta beban lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar).

Beban umum dan administrasi Perusahaan tahun 2022 sebesar Rp649,32 miliar, mengalami kenaikan 41,71% atau setara dengan Rp191,13 miliar dibandingkan beban pokok pendapatan tahun 2021 sebesar Rp458,18 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya biaya personil seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja.

Revenue

In 2022, the Company's revenue was recorded at Rp 4.78 trillion, an increase by 25.89% or equal to Rp 983.93 billion compared to the Company's revenue in 2021 of Rp 3.80 trillion. This increase was mainly due to increased activities in the marine services segment which grew by 47.28% or equivalent to Rp783.04 billion from Rp1.65 trillion in 2021 to Rp2.43 trillion in 2022.

Cost of Revenue

The Company's cost of revenue consists of marine operations support services expenses, labor supply services expenses, boat rental expenses, shipping and port services expenses, general trading expenses, loading and unloading expenses, dredging expenses, clean water supply expenses, other expenses (each under Rp 2 billion), and depreciation.

In 2022, the Company's cost of revenue was recorded at Rp3.14 trillion, an increase by 16.67% or equal to Rp 448.13 billion compared to 2021's cost of revenue of Rp 2.69 trillion. This increase was mainly due to increased activity in the marine services segment.

Gross profit

The Company recorded a gross profit of Rp1.65 trillion, an increase by 48.18% or equal to Rp 535.79 billion compared to 2021 of Rp 1.11 trillion. This increase was mainly due to the growth in revenues.

General and Administrative Expenses

The Company's general and administrative expenses consist of employee costs and welfare, building maintenance, office supplies costs, public relations fees, short-term leases of low value assets, and other expenses (each below Rp2 billion).

The Company's general and administrative expenses in 2022 amounted to Rp649.32 billion, an increase by 41.71% or equal to IDR 191.13 billion compared to general and administrative expenses in 2021 of Rp458.18 billion. This increase was primarily due to an increase in employee costs in line with the increase in the number of employees.

Tinjauan Keuangan
Financial Review**Keuntungan/(Beban) Lain-lain, Bersih**

Keuntungan atau beban lain-lain merupakan keuntungan atau beban yang didapatkan dari laba selisih kurs – neto, penyisihan piutang tak tertagih, pemulihan penurunan nilai piutang usaha dan kontrak aset, klaim atas denda penyerahan kapal, serta keuntungan/beban lain-lain, neto.

Di tahun 2022, Perusahaan membukukan keuntungan lain-lain – bersih sebesar Rp25,53 miliar, mengalami penurunan 0,05% dibandingkan keuntungan lain-lain – bersih tahun 2021 sebesar Rp25,54 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan meningkatnya beban atas penyisihan piutang yang berumur lebih dari 6 bulan.

Pendapatan/(Beban) Keuangan

Pendapatan keuangan didapatkan dari pendapatan atas bunga deposito dan jasa giro. Sedangkan beban keuangan didapatkan dari beban keuangan atas pinjaman jangka panjang dan beban keuangan atas liabilitas sewa.

Di tahun 2022 Perusahaan mencatat beban keuangan sebesar Rp76,23 miliar, meningkat 60,24% dari tahun sebelumnya di mana Perusahaan mencatat beban keuangan sebesar Rp47,57 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya suku bunga pinjaman bank.

Bagian atas Laba Bersih Ventura Bersama

Bagian atas laba bersih ventura bersama merupakan imbal hasil yang didapatkan Perusahaan dari investasi pada ventura bersama, yaitu PT Trans Yeong Maritime ("TYM") di mana Perusahaan memiliki 51% saham TYM.

Pada tahun 2022, bagian atas laba bersih ventura bersama yang berhasil dicatat sebesar Rp25,45 miliar, mengalami penurunan 9,27% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp28,04 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan meningkatnya rugi selisih kurs.

Beban Pajak

Beban pajak Perusahaan terdiri dari beban pajak final dan beban pajak penghasilan.

Other Income/(Expense), Net

Other Income/(Expense) is gains or expenses derived from foreign exchange gain/(loss) – net, bad debt expense, reversal of impairment on trade receivables and asset contracts, Claim from late delivery of vessels, and other gains/expenses, net.

In 2022, the Company posted other income – net of Rp 25.53 billion, a decrease by 0.05% compared to other income – net in 2021 of Rp 25.54 billion. This decrease was primarily due to an increase in the allowance for receivables of more than 6 months.

Finance Income/(Costs)

Finance income is obtained from income from interest of time deposit and current accounts. Meanwhile, finance costs are obtained from finance cost of long-term borrowing and finance costs of lease liabilities.

In 2022 the Company recorded finance costs of Rp 76.23 billion, an increase by 60.24% from the previous year where the Company recorded finance costs of Rp47.57 billion. This increase was mainly due to an increase in bank loan interest rates.

Share in Profit of a Joint Venture

Share in profit of a joint venture represents the returns that the Company obtains from investing in a joint venture, namely PT Trans Yeong Indonesia Maritime ("TYM") in which the Company owns 51% of TYM's shares.

In 2022, the share in profit of a joint venture that was successfully recorded was Rp25.45 billion, a decrease by 9.27% compared to 2021 of Rp 28.04 billion. This decrease was primarily due to an increase in foreign exchange losses.

Tax Expenses

The Company's tax expense consists of final tax expense and income tax expense.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Di tahun 2022, Perusahaan membukukan beban pajak sebesar Rp240,32 miliar, meningkat hingga 85,69% atau setara dengan Rp110,90 miliar dibandingkan beban pajak tahun 2021 sebesar Rp129,42 miliar. Beban pajak final meningkat 4,38%, sedangkan beban pajak penghasilan meningkat hingga 98,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan ini seiring dengan meningkatnya laba sebelum pajak.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perusahaan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha Perusahaan. Di tahun 2022, Perusahaan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp733,03 miliar, mengalami kenaikan 38,17% atau setara dengan Rp202,49 miliar dibandingkan laba tahun berjalan tahun 2021 sebesar Rp530,54 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha.

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik entitas induk

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 sebesar Rp732,57 miliar, meningkat hingga 38,08% atau setara dengan Rp202,03 miliar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp530,54 miliar. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi dasar bagi pemegang saham untuk perhitungan dalam melakukan pembagian dividen.

Analisis Arus Kas Konsolidasian

Kas dan setara kas PTK pada akhir tahun 2022 sebesar Rp1,13 triliun, mengalami penurunan 10,89% atau setara dengan Rp137,54 miliar dibandingkan kas dan setara kas akhir tahun 2021 sebesar Rp1,26 triliun. Penurunan ini terutama didorong oleh arus kas dari aktivitas pendanaan. Saldo akhir kas yang tersedia akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, kebutuhan investasi dan pembayaran angsuran pinjaman bank.

In 2022, the Company posted a tax expense of Rp 240.32 billion, an increase by up to 85.69% or equivalent to Rp 110.90 billion compared to the 2021 tax expense of Rp 129.42 billion. Final tax expense increased by 4.38%, while income tax expense increased by 98.59% compared to the previous year. This significant increase was mainly due to the increase in tax expenses in line with the increase in profit before tax.

Profit for the Year

The Company's profit for the year increased in line with the increase in the Company's revenues. In 2022, the Company posted a profit for the year of Rp 733.03 billion, an increase by 38.17% or equivalent to Rp 202.49 billion compared to the profit for the year 2021 of Rp 530.54 billion. This increase was mainly due to the increase in revenues.

Profit for the year attributable to Owner of the Parent Entity

Profit for the year attributable to owner of the parent entity 2022 amounted to Rp732.57 billion, an increase by 38.08% or equivalent to Rp 202.03 billion compared to 2021 amounting Rp 530.54 billion. Profit for the year attributable to owner of the parent entity is the basis for shareholders to calculate dividends distribution.

Consolidated Cash Flows Analysis

PTK cash and cash equivalents at the end of 2022 amounted to Rp 1.13 trillion, a decrease by 10.89% or equal to Rp137.54 billion compared to cash and cash equivalents at the end of 2021 of Rp1.26 trillion. This decrease was mainly driven by cash flows from financing activities. The cash balance available at the end of the year will be used for working capital needs, investment needs and payment of bank loan installments.

Laporan Arus Kas Konsolidasian Statement of Consolidated Cash Flows	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022	
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities					
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	4.161.889	3.239.063	2.472.407	922.826	28,49 ↑

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Laporan Arus Kas Konsolidasian Statement of Consolidated Cash Flows	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%	
Pembayaran kas kepada pemasok untuk beban operasi Cash paid to suppliers for operating expenses	(2.127.266)	(1.549.391)	(1.506.978)	(577.875)	37,30	↑
Pembayaran kepada karyawan Cash payments to employees	(389.435)	(236.337)	(225.633)	(153.098)	64,78	↑
Pembayaran beban keuangan Cash payments for finance cost	(90.619)	(54.172)	(52.840)	(36.447)	67,28	↑
Pembayaran pajak final Payment of final tax expense	(18.499)	(17.723)	(26.164)	(776)	4,38	↑
Penerimaan kas dari pendapatan keuangan Cash receipts from finance income	23.565	6.597	15.075	16.968	257,21	↑
Pembayaran atas beban pajak penghasilan badan Payment of corporate income tax	(192.055)	(96.421)	(71.198)	(95.634)	99,18	↑
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided from operating activities	1.367.580	1.291.616	604.669	75.964	5,88	↑
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities						
Penerimaan dividen dari ventura bersama Dividends received from joint venture	22.482	17.827	20.941	4.655	26,11	↑
Penerimaan piutang pembiayaan Received from lease receivables	17.033	19.866	19.131	(2.833)	(14,26)	↓
Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets	(414.682)	(806.486)	(773.228)	391.804	(48,58)	↓
Penyertaan saham Investment in shares	-	(4.814)	-	4.814	(100,00)	↓
Arus kas keluar bersih dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali Net cash outflow from restructuring transaction between entities under common control	-	(11.531)	-	11.531	(100,00)	↓
Kompensasi atas pembatalan aset dalam penyelesaian Compensation of cancellation construction in progress	155.400	124.800	-	30.600	24,52	↑
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flows used in investing activities	(219.767)	(660.338)	(733.156)	440.571	(66,72)	↓
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities						
Penerimaan pinjaman Proceeds from borrowings	452.399	461.875	384.514	(9.476)	(2,05)	↓
Pembayaran pinjaman Repayments of borrowings	(744.038)	(476.998)	(248.520)	(267.040)	55,98	↑
Pembayaran dividen Dividend Paid	(723.784)	-	(2)	(723.784)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa Repayments of lease liabilities	(274.620)	(8.149)	(74.437)	(266.471)	3.269,98	↑
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash flows (used in)/provided from financing activities	(1.290.043)	(23.272)	61.555	(1.266.771)	5.443,33	↑

Laporan Arus Kas Konsolidasian Statement of Consolidated Cash Flows	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022	
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	4.688	2.677	(10.938)	2.011	75,12 ↑
Kenaikan/(Penurunan) neto kas dan setara kas Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	(137.542)	610.683	(62.015)	(748.225)	(122,52) ↓
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1.263.166	652.483	714.498	610.683	93,59 ↑
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of the year	1.125.624	1.263.166	652.483	(137.542)	(10,89) ↓

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2022 sebesar Rp1,37 triliun, mengalami kenaikan 5,88% atau setara dengan Rp75,96 miliar dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp1,29 triliun. Peningkatan arus kas aktivitas operasional didorong oleh meningkatnya penerimaan operasional atas kegiatan *bundling unbundling* R&P dan C&T serta kegiatan *Tanker Charter* Milik PIS.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash flows provided from operating activities in 2022 amounted to Rp 1.37 trillion, an increase by 5.88% or equal to Rp75.96 billion compared to the net cash flows provided from operating activities in 2021 of Rp1.29 trillion. The increase in cash flows from operating activities was driven by increased operating revenue from R&P and C&T bundling unbundling activities as well as PIS's Tanker Charter activities.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2022 sebesar Rp219,77 miliar, mengalami penurunan 66,72% atau setara dengan Rp440,57 miliar dibandingkan tahun 2021 di mana Perusahaan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp660,34 miliar. Hal ini terutama disebabkan pembayaran investasi di tahun 2022 merupakan pembayaran sisa *carry over* atas pembelian investasi tahun sebelumnya dan menurunnya realisasi investasi di tahun 2022.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash flows used for investing activities in 2022 amounted to Rp 219.77 billion, a decrease by 66.72% or equal to Rp 440.57 billion compared to 2021 where the Company recorded net cash flows used for investing activities of Rp 660.34 billion. This was mainly due to investment payments in 2022 which were payments for the remaining carry over from investment purchases in the previous year and a decrease in investment realization in 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2022 sebesar Rp1,29 triliun, mengalami kenaikan 5,443,33% atau setara dengan Rp1,27 triliun dibandingkan tahun 2021, dimana Perusahaan menggunakan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp23,27 miliar. Kenaikan yang sangat signifikan ini terutama disebabkan adanya pembayaran dividen Rp723,78 miliar, pembayaran pelunasan dipercepat atas pembiayaan galangan DRU dan Batamec serta pembayaran sewa PSAK 73.

Cash Flows from Financing Activities

Net cash flows used for financing activities in 2022 amounted to Rp 1.29 trillion, an increase by 5,443.33% or equal to Rp1.27 trillion compared to 2021, where the Company used net cash for financing activities of Rp 23.27 billion. This very significant increase was mainly due to the payment of dividends of Rp723.78 billion, accelerated repayment of DRU and Batamec shipyard financing and payment of PSAK 73 leases.

Aktivitas dan Profitabilitas Perusahaan

The Company's Activities and Profitability

Perihal Description	2022	2021	2020	Selisih Difference 2021-2022	
Rasio Aktivitas Activity Ratio					
Perputaran persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	-	-	-	-	-
Perputaran aset (%) Asset turnover (%)	59,33	50,47	50,98	8,86	↑
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Rasio laba bersih terhadap aset (%) Return on Asset (ROA) (%)	8,94	6,80	7,06	2,14	↑
Rasio laba bersih terhadap ekuitas (%) Return on Equity (ROE) (%)	25,50	18,18	19,64	7,32	↑
Imbalan investasi (%) Return on Investment (ROI) (%)	20,42	14,59	13,73	5,83	↑
Margin laba operasi (%) Operating Profit Margin (OPM) (%)	20,87	17,20	18,26	3,67	↑
Margin laba bersih (%) Net Profit Margin (NPM) (%)	15,32	13,96	13,84	1,36	↑

Rasio aktivitas mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam mengefektifkan aset dan persediaan yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari perputaran aset yang mengalami peningkatan dari 50,47% pada tahun 2021 menjadi 59,33% pada tahun 2022.

The activity ratio reflects the Company's ability to streamline its assets and inventories. This can be seen from the asset turnover which has increased from 50.47% in 2021 to 59.33% in 2022.

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari *Return on Asset* ("ROA") yang meningkat dari 6,80% pada tahun 2021 menjadi 8,94% pada tahun 2022, *Return on Equity* ("ROE") yang meningkat dari 18,18% pada tahun 2021 menjadi 25,50% pada tahun 2022, *Return on Investment* ("ROI") yang meningkat dari 14,59% pada tahun 2021 menjadi 20,42% pada tahun 2022, *Operating Profit Margin* ("OPM") yang meningkat dari 17,20% pada tahun 2021 menjadi 20,87% pada tahun 2022 serta *Net Profit Margin* ("NPM") yang meningkat dari 13,96% pada tahun 2021 menjadi 15,32% pada tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya laba bersih perusahaan

The profitability ratio describes the Company's ability to generate profit. This can be seen, among others, from the Return on Assets ("ROA") which increased from 6.80% in 2021 to 8.94% in 2022, Return on Equity ("ROE") which increased from 18.18% in 2021 to 25.50% in 2022, Return on Investment ("ROI") which increased from 14.59% in 2021 to 20.42% in 2022, Operating Profit Margin ("OPM") which increased from 17.20% in 2021 to 20.87% in 2022 and Net Profit Margin ("NPM") which increased from 13.96% in 2021 to 15.32% in 2022. This increase was influenced by the increase in the Company's net profit.

Kemampuan Membayar Utang

Solvency

Rasio Likuiditas Liquidity Ratio	Liquidity Ratio	2021	2020	Selisih Selisih 2021- 2022	
Rasio kas (%) Cash Ratio (%)	31,20	40,32	28,12	(9,12)	↓
Rasio lancar (%) Current Ratio (%)	105,48	107,67	95,92	(2,19)	↓
Jumlah modal sendiri terhadap total aset (%) Total own capital to total assets (%)	43,98	44,21	43,02	(0,23)	↓
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (DER) (%)	127,37	126,20	132,45	1,17	↑
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset (%) Debt to Asset Ratio (DAR) (%)	56,02	55,79	56,98	0,23	↑

Kemampuan membayar utang PTK dinilai cukup baik, baik itu kewajiban jangka pendek maupun untuk kewajiban jangka panjang. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan bahwa Perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Hal ini juga mencerminkan Perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan operasional harian dengan baik.

PTK's solvency is considered quite good, both for current liabilities and for non-current liabilities. The good level of liquidity shows that the Company has no difficulty in paying off its current liabilities. This also means that the Company can carry out daily operational activities properly.

Kemampuan Perusahaan membayar utang jangka pendek dapat dilihat antara lain dari rasio lancar yang mengalami penurunan dari 107,67% pada tahun 2021 menjadi 105,48% pada tahun 2022. Sementara itu, rasio kas yang mengalami penurunan dari 40,32% pada tahun 2021 menjadi 31,20% pada tahun 2022.

The Company's ability to pay short-term debt can be seen, among others, from the current ratio which decreased from 107.67% in 2021 to 105.48% in 2022. Meanwhile, the cash ratio decreased from 40.32% in 2021 to 31.20% in 2022.

Kemampuan Perusahaan membayar utang jangka panjang tercermin pada rasio solvabilitas yang terdiri dari rasio total modal sendiri terhadap total aset serta rasio liabilitas terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* ("DER") dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset atau *Debt to Asset Ratio* ("DAR"). Pada tahun 2022 rasio total modal sendiri terhadap total aset Perusahaan mengalami penurunan dari 44,21% pada tahun 2021 menjadi 43,98% pada tahun 2022. Sedangkan DER dan DAR Perusahaan mencatat kenaikan. Hal ini disebabkan meningkatnya kewajiban jangka pendek.

The Company's ability to pay long-term debt is reflected in the solvency ratio which consists of the ratio of total own capital to total assets and Debt to Equity Ratio ("DER") and Debt to Asset Ratio ("DAR"). In 2022 the ratio of the Company's total own capital to total assets decreased from 44.21% in 2021 to 43.98% in 2022. Meanwhile, the Company's DER and DAR recorded increases. This was due to an increase in current liabilities.

Kolektibilitas Piutang

Accounts Receivable Collectibility

Kolektibilitas Piutang Accounts Receivable Collectibility	2022	2021	2020	Selisih Difference 2021-2022	
Rata-rata periode penagihan piutang (hari) Average receivable collection period (days)	35	72	118	(37)	↓

Tingkat kolektibilitas piutang digunakan untuk mengukur periode waktu yang diperlukan Perusahaan untuk menagih piutang menjadi kas sejak selesainya pekerjaan/jasa dilakukan. Tingkat kolektibilitas piutang terdiri dari *average collection* periode (rata-rata periode penagihan). Rata-rata periode penagihan piutang Perusahaan pada tahun 2022 adalah sebanyak 35 hari, lebih cepat 37 hari dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 72 hari. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- Telah dilakukan pembayaran dari PIS atas kegiatan charter milik PT PIS periode September 2021 s/d Februari 2022.
- Telah dilakukan pembayaran oleh PT PIS atas kegiatan keagenan charter milik PT PIS dan kegiatan tanker import PT PIS periode pekerjaan April 2021 s/d Agustus 2021

The receivables collectibility level is used to measure the period of time required by the Company to collect receivables into cash from the completion of work/ services performed. The receivables collectibility level consists of the average collection period. The average collection period for the Company's receivables in 2022 was 35 days, 37 days faster than in 2021 which was 72 days. This was mainly due to the following:

- Payments have been made from PIS for charter activities owned by PT PIS for the period of September 2021 to February 2022.
- Payment has been made by PT PIS for PT PIS charter agency activities and PT PIS import tanker activities for April 2021 to August 2021 work period.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Struktur Modal menggambarkan pembiayaan permanen yang terdiri atas utang berbasis bunga dan modal sendiri. Perusahaan harus berupaya memiliki alternatif pendanaan yang efisien, salah satunya dengan memiliki struktur modal yang optimal.

Capital structure describes permanent financing consisting of debt and equity. The Company must strive to have efficient funding alternatives, one of which is by having an optimal capital structure.

Struktur modal Perusahaan pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

The Company's capital structure in the last 3 (three) years can be seen in the following table:

Struktur Modal Periode 2020-2022
Capital Structure 2020-2022

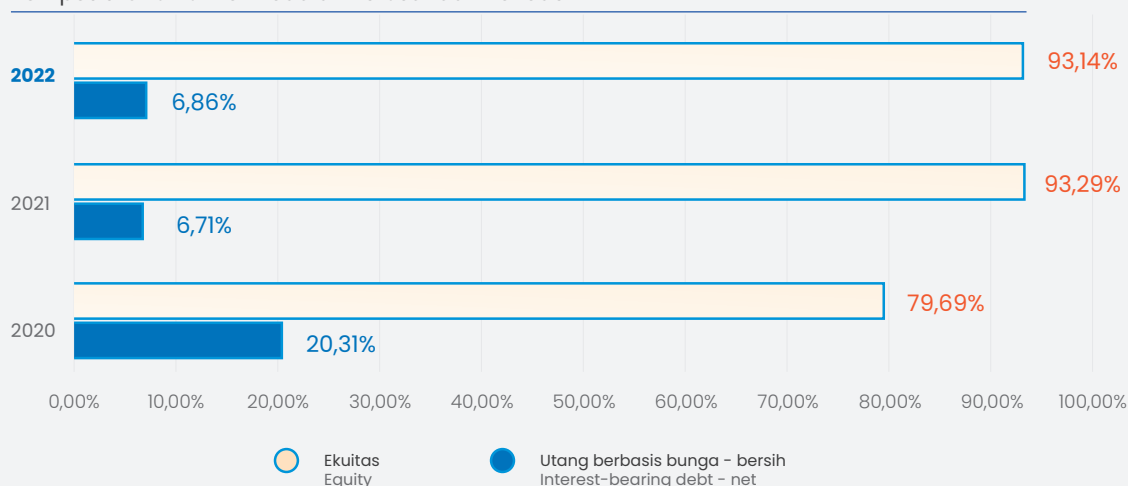
	2022		2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		
	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Selisih (Rp-juta) Different (Rp-juta)	%	
Utang berbasis bunga Interest-bearing Debt									
Liabilitas sewa Lease Liabilities	436.385	11,27	273.981	7,41	60.917	1,88	162.404	59,28	↑
Pinjaman Borrowings	954.819	24,65	1.237.384	33,47	1.248.814	38,58	(282.565)	(22,84)	↓
Jumlah utang berbasis bunga Total Interest-Bearing Debt	1.391.204	35,92	1.511.365	40,88	1.309.731	40,46	(120.161)	(7,95)	↓

Struktur Modal Periode 2020–2022
Capital Structure 2020–2022

	2022		2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021–2022		
	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) (Rp-million)	Kontribusi Contribution (%)	Selisih (Rp-juta) Different (Rp-juta)	%	
Dikurangi kas dan setara kas Net Cash and Cash Equivalents	1.125.624		1.263.166		652.483		(137.542)	(10,89)	↓
Jumlah utang berbasis bunga - bersih Total Interest-Bearing Debt – Net	265.580	6,86	248.199	6,71	657.248	20,31	17.381	7,00	↑
Ekuitas/permodalan sendiri Equity/Own Capital	3.607.579	93,14	3.449.114	93,29	2.579.599	79,69	158.465	4,59	↑
Jumlah struktur modal Ratio of Interest-Bearing Debt to Capital (%)	3.873.159	100,00	3.697.313	100,00	3.236.847	100,00	175.846	4,76	↑
Rasio utang berbasis bunga terhadap modal (%) Ratio of Interest-Bearing Debt to Capital (%)	7,36		7,20		25,48		0,17		

Sebagaimana terlihat pada tabel dan bagan di atas, terlihat bahwa struktur permodalan Perusahaan ditopang oleh ekuitas atau permodalan sendiri. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, komposisi struktur permodalan Perusahaan mengalami sedikit perubahan, di mana terdapat penurunan pinjaman tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 22,84% atau setara dengan Rp282,56 miliar. Penurunan ini sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk melunasi pinjaman yang dimiliki, selaras dengan saldo ekuitas yang terus menguat.

As seen in the table and chart above, the Company's capital structure is supported by equity or own capital. In the last 3 (three) years, the composition of the Company's capital structure has slightly changed, where there is a decrease in borrowings from 2021 to 2022 by 22.84% or equal to Rp 282.56 billion. This decrease is in line with the Company's commitment to repay its borrowings, in line with the equity balance which continues to strengthen.

Komposisi Struktur Permodalan Perusahaan Periode 2020–2022
Komposisi Struktur Permodalan Perusahaan Periode 2020–2022

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Good Investment

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak melakukan ikatan material atas investasi barang modal.

Throughout 2022, the Company did not make any material commitments for capital good investment.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Good Investment

Realisasi penyerapan Anggaran Investasi Perusahaan pada tahun 2022 antara lain atas proyek berikut ini:

The realization of absorption of the Company's Investment Budget in 2022 included the following projects:

1. Kategori *Business Development*
 - a. 2 (dua) unit kapal *landing craft tank* ("LCT")
 - b. 2 (dua) set *tugboat* dan *oil barge* ("TB-OB")
 - c. *Diving equipment* tahap-1 untuk PT Pertamina Marine Engineering
 - d. *Diving equipment* tahap-2 untuk Marine Engineering PTK
 - e. Peralatan *oil spill response* untuk PT Pertamina Port and Logistics
 - f. Pengadaan lahan *shorebase* Kabil, Batam
 - g. Pengadaan *Heavy Equipment* untuk Pertamina *Shorebase* Tanjung Batu
 2. Kategori *Non-Business Development*
 - a. Pengadaan 13 (tiga belas) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran ("SBNP") Balongan
 - b. Pengadaan SBNP (Buoy) Marine Region VI Balikpapan
 - c. Pembangunan pangkalan LLP TBBM Ende
 - d. Proyek perluasan pangkalan Lindung Lingkungan Perairan ("LLP") Makassar
 - e. Proyek pangkalan LLP Tanjung Wangi
 - f. Proyek SBNP Marine Sumatra Bagian Utara
 - g. Perbaikan *vicker dock* di *Dockyard* Bagus Kuning
 - h. Pengadaan Material untuk perbaikan Pintu *Graving* Dok Sorong
 - i. Pengadaan lahan Tanjung Piayu, Batam
1. Business Development category
 - a. 2 (two) units of landing craft tank ("LCT") ships
 - b. 2 (two) sets of tug boats and oil barges ("TB-OB")
 - c. Diving equipment phase-1 for PT Pertamina Marine Engineering
 - d. Phase-2 diving equipment for PTK Marine Engineering
 - e. Oil spill response equipment for PT Pertamina Port and Logistics
 - f. Procurement of land for shorebase Kabil, Batam
 - g. Procurement of Heavy Equipment for Pertamina Shorebase Tanjung Batu
 2. Non-Business Development Category
 - a. Procurement of 13 (thirteen) Shipping Navigation Assistance Facilities ("SBNP") in Balongan
 - b. Procurement of SBNP (Buoy) Marine Region VI Balikpapan
 - c. Construction of the LLP TBBM Ende base
 - d. Makassar Marine Environmental Protection ("LLP") expansion project
 - e. Tanjung Wangi LLP base project
 - f. Northern Sumatra Marine SBNP Project
 - g. Repair of vicker dock at the Bagus Kuning Dockyard
 - h. Procurement of Materials for the repair of the Dock Graving Door at Sorong
 - i. Procurement of land in Tanjung Piayu, Batam

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Good Investment

Realisasi Anggaran Biaya Investasi ("ABI") tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Realization of the Investment Cost Budget ("ABI") in 2022 is as follows:

Plan/Target Tahun 2022 (Juta USD) Plans/Targets Year 2022 (Million USD)	Realisasi Tahun 2022 (Juta USD) Realization Year 2022 (Million USD)	Pencapaian Achievement (%)	Keterangan Information
26,86	11,80	43,9%	Realisasi ABI adalah total drawdown ABI hasil konversi dari IDR ke USD menggunakan kurs <i>closing</i> bulanan dari korporat (<i>holding</i>) dimana kurs yang ditetapkan tiap bulannya berbeda-beda. The realization of ABI is the total ABI drawdown resulting from the conversion from IDR to USD using the monthly closing rate from the corporate (<i>holding</i>) where the rate set each month is different.

Adapun justifikasi atas beberapa mata anggaran investasi yang tidak terealisasi pada tahun 2022 antara lain:

The justifications for several investment budget items that were not realized in 2022 include:

- Terminasi kontrak pada proyek pembangunan 9 (sembilan) unit kapal *harbor tug* 3.200 HP.
- ABI RKAP (termasuk *Recovery plan*) tahun 2022 tidak terealisasi 100%:
 - Proyek pembangunan 1 (satu) unit kapal keruk (*clamshell dredger*) dan 2 (dua) unit *self-propelled split hopper barge* tidak dapat terealisasi karena kenaikan harga bangun yang signifikan dan berdampak pada naiknya *charter rate*, di mana PT Pertamina Marine Engineering memiliki keterbatasan anggaran sewa kapal keruk.
 - Perubahan jumlah kebutuhan kapal SPOB untuk kebutuhan PT Pertamina International Shipping dari sebelumnya 2 (dua) unit menjadi 1 (satu) unit, terbatasnya ketersediaan SPOB di market yang mengakibatkan minimnya penawaran yang masuk dalam tender, serta pada proses *due diligence* pembelian 2 (dua) unit kapal SPOB Jelita Nadia dan Jeanita diketahui pihak *broker* tidak memiliki kuasa resmi untuk menjual kedua kapal.
 - Dinamika peralihan proyek eks-Fungsi Marine PT Pertamina (Persero) kepada PTK, seperti belum selesainya proses novasi kontrak proyek LLP di area Jatimbalinus dan Sulawesi dari Subholding C&T ke PTK, belum tuntasnya perizinan proyek LLP Kendari, dan proses *reengineering* dan *soil investigation* yang terlewat pada proyek LLP di Siak, Tembilahan, dan Pulau Sambu.
- Termination of the contract on the construction project of 9 (nine) units of 3,200 HP harbor tug ships.
- ABI RKAP (including recovery plan) for 2022 was not 100% realized:
 - The construction project of 1 (one) unit dredger (*clamshell dredger*) and 2 (two) units of *self-propelled split hopper barge* could not be realized due to a significant increase in building prices which impacted on rising charter rate, where PT Pertamina Marine Engineering had limited budget for dredger rental.
 - Change in the number of SPOB vessels needed for PT Pertamina International Shipping from previously 2 (two) units to 1 (one) unit, limited availability of SPOB in the market which resulted in a minimum number of bidders entering the tender, as well as in the due diligence process of purchasing 2 (two) units of SPOB ships Jelita Nadia and Jeanita which was found that the broker did not have the official authority to sell the two ships.
 - The dynamics of the transition of PT Pertamina (Persero)'s ex-Marine Function project to PTK, such as the incomplete novation process for the LLP project contract in Jatimbalinus and Sulawesi areas from the C&T Subholding to PTK, the incomplete permitting for the Kendari LLP project, and missed reengineering and soil investigation processes in LLP projects in Siak, Tembilahan and Pulau Sambu.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date

d. Terdapat proyek yang telah masuk dalam RKAP, namun belum memiliki <i>Final Investment Decision</i> sebagai salah satu syarat eksekusi investasi; di antaranya pengadaan alat selam untuk <i>Marine Engineering</i> PTK dan PT Pertamina Marine Engineering. e. Beberapa item dalam rencana investasi masuk dalam kategori pengadaan <i>long lead item</i> dan tidak tersedia di dalam negeri, sehingga mengharuskan impor; di antaranya investasi pengadaan peralatan selam dan pengadaan <i>fire pump</i> untuk <i>Dockyard</i> Bagus Kuning. f. Terdapat mata anggaran investasi kategori <i>phasing out</i> tahun 2022 yang dieksekusi di tahun 2021 atau selesai lebih awal, sehingga secara pencatatan diakui sebagai realisasi investasi tahun 2021; di antaranya proyek digitalisasi IT dan beberapa proyek LLP di Bitung dan Kolonodale.	d. There were projects that had been included in the Work Plan & Budget (RKAP), but did not yet have a Final Investment Decision as a condition for investment execution; including procurement of diving equipment for Marine Engineering of PTK and PT Pertamina Marine Engineering. e. Several items in the investment plan were included in the procurement category of long lead items and are not available domestically, thus requiring imports; including investing in the procurement of diving equipment and the procurement of a fire pump for the Bagus Kuning Dockyard. f. There was an investment budget item for the phasing out category in 2022 which was executed in 2021 or completed earlier, so that the recording was recognized as investment realization in 2021; including IT digitization projects and several LLP projects in Bitung and Kolonodale.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara tanggal laporan akuntan tertanggal 13 Maret 2023 hingga dipublikasikannya laporan tahunan ini tertanggal Mei 2023.

There was no material information and facts that occurred between the date of the accountant's report dated March 13, 2023 until the publication of this annual report dated May 2023.

Pencapaian Target Tahun 2022

Target Achievement 2022

Asumsi-asumsi dalam Menentukan Target Tahun 2022

Dalam penyusunan target yang tertuang dalam RKAP tahun 2022, Perusahaan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

Assumptions in Setting the 2022 Target

The main assumptions used in preparing the 2022 Work Plan & Budget (RKAP) are as follows:

Parameter Parameter	Satuan Unit	RKAP 2022
Kurs Exchange Rate	IDR to 1 USD	IDR 14.350
Suku Bunga Pinjaman Loan Interest Rate	%	2,35%-2,50% + LIBOR (USD) 1,75% - 2,50% + JIBOR (IDR)
Tenor Pinjaman Loan Tenor	Tahun Years	5 sd 7 tahun
Porsi Pinjaman Loan Portion	%	70%-100%
Collection Period	Hari Days	75,85 Hari
Hurdle Rate	%	Shipping (cargo/vessel) USD: 6,63%
		IDR: 9,54%
		Harbour/Marine Service/Port USD: 7,67%
		Service IDR: 9,83%
Jumlah Kapal Milik Total Vessels Owned	Unit	335
Commission Days Kapal Milik Commission Days Vessels Owned	Hari Days	109.820
Commercial Days Kapal Milik Commercial Days Vessels Owned	Hari Days	121.135
Jumlah Muatan BBM yang diangkut Total Vessels Owned	Ribu KL	700
Jumlah Call Keagenan Tanker Total Tanker Agency Calls	Call	22.930
Jumlah Call Keagenan Umum Total General Agency Calls	Call	5.850

Sumber: Buku RKAP PTK 2022
Source: PTK RKAP Book 2022

Pencapaian Target Tahun 2022

Target Achievement 2022

Description	Realisasi 2022 Realization 2022 (1)	Target 2022 Target 2022 (2)	Pencapaian Target Tahun 2022 Target Achievement (%) (1/2)
Operasi dan Pemasaran Operasi dan Pemasaran			
Commission days (Hari) Commission days (Days)	112.270	109.820	102,23 ↑
Commercial Days (satuan) Commercial Days (unit)	115.930	121.135	95,70 ↓
Call Keagenan/Agency Call (satuan) Call Keagenan/Agency Call (unit)	30.231	24.762	106,25 ↑
Charter & Brokerage (satuan) Charter & Brokerage (unit)	272.937	181.784	150,14 ↑
Contract of Affreightment (COA) (satuan) Contract of Affreightment (COA) (unit)	293	700	41,88 ↓

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date

Pencapaian Target Tahun 2022 Target Achievement 2022

Description	Realisasi 2022 Realization 2022 (1)	Target 2022 Target 2022 (2)	Pencapaian Target Tahun 2022 Target Achievement (%) (1/2)	
Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Position				
Aset Assets	8.202.571	8.768.398	93,55	↓
Liabilitas Liabilities	4.594.992	4.682.461	98,13	↓
Ekuitas Liabilities	3.607.579	4.085.937	88,29	↓
Struktur Modal Capital Structure	3.873.159	5.607.584	69,07	↓
Laba/(Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Profit/(Loss) and Comprehensive Income				
Pendapatan usaha Revenue	4.784.913	5.278.874	90,64	↓
Beban pokok pendapatan Cost of Revenue	(3.136.987)	(3.472.477)	90,34	↓
Laba kotor Gross Profit	1.647.926	1.806.397	91,23	↓
Beban overhead Overhead Cost	(649.316)	(977.186)	66,45	↓
Pendapatan/(beban) lain-lain Other Income/(Expense)	(43.756)	(134.899)	32,44	↓
Laba sebelum bunga dan pajak Profit before interest and tax	954.854	694.312	137,53	↑
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(221.826)	(135.068)	164,23	↑
Laba tahun berjalan Profit for the year	733.028	559.244	131,07	↑
EBITDA	1.691.788	1.301.644	129,97	↑
Investasi Investment				
Business Development (USD-ribu thousand)	10.387	23.993	43,29	↓
Non Business Development (USD-ribu thousand)	709	2.867	24,71	↓
SDM dan K3 HR and OHS				
SDM HR				
Pekerja tetap (orang) Permanent employees (persons)	567	591	95,94	↓
Pekerja tidak tetap Non-Permanent employees				
PWT Rekrut Langsung (orang) Directly recruited PWT (persons)	47	48	97,92	↓
TKJP (orang) TKJP (persons)	2.809	3.015	93,17	↓
Number of Accident (NOA) (kejadian) Number of Accidents (NOA) (cases)	-	-	100,00	-
Total Recoverable Incident Rate (TRIR) (satuan) Total Recoverable Incident Rate (TRIR) (unit)	0,16	0,11	145,45	↑



Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date

Operasi dan Pemasaran

Commission Days Audited tahun 2022 tercapai 102,23% dari RKAP 2022 atau 112.270 hari dari target 109.820 hari dan tercapai 134,81% dari realisasi tahun 2021, tingginya peningkatan dari realisasi 2021 disebabkan karena pelaksanaan yang termonitoring atas program *operation excellence* yang dijalankan oleh *Fleet & Ship Management*.

Commercial Days Audited tahun 2022 tercapai 95,70% dari RKAP 2022 atau 115.930 hari dari 121.135 hari yang ditargetkan, hal ini disebabkan *On-hire* Kapal yang terlambat, izin angkut dan sertifikat kapal yang memerlukan waktu lebih lama dan kondisi cuaca yang buruk sehingga tidak bisa beroperasi.

Jumlah *call* Keagenan Audited tahun 2022 tercapai 106,25% atau sebanyak 30.231 *call* dari target 28.780 *call*. Pencapaian ini dapat melebihi target karena di bisnis keagenan mendapatkan *call* keagenan *Charter* Milik Pertamina ("CMP") diluar target RKAP 2022.

Muatan BBM ("COA") Audit tahun 2022 berupa Kapal Milik (TB.1201 & OB.2301, TB.1202 & OB.2302, TB.1203 & OB.2303) tercapai 41,88% atau sebesar 293 KL dari 700 KL yang ditargetkan, hal ini disebabkan perubahan charter kapal yang sebelumnya COA menjadi *Time Charter* ("TC").

Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

- Aktiva Lancar per 31 Desember 2022 berada pada posisi IDR 3,81 Triliun atau 95,75% dari RKAP 2022.
- Aktiva Tidak Lancar pada periode 2022 sebesar IDR 4,39 Triliun atau turun 0,85% dari 2021. Penurunan Aktiva Tetap disebabkan karena menurunnya Aset Tetap sedangkan jika dibandingkan RKAP 2022 lebih rendah 8,28% disebabkan tidak terealisasinya seluruh ABI yang ditargetkan di tahun 2022.

Liabilitas

- Hutang Lancar tercatat IDR 3,61 Triliun atau mencapai 115,34% dari 2021. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan hutang lancar pihak berelasi (hutang usaha dan penerimaan uang muka), serta hutang lain-lain (beban yang masih harus dibayar, hutang pajak serta hutang lain - lain).
- Hutang Jangka Panjang tercatat sebesar IDR 0,98 triliun atau mencapai 80,47% jika dibandingkan dengan 2021 sedangkan jika dibandingkan RKAP 2022 tercapai 64,50% yang disebabkan ABI yang tidak terlaksana serta adanya pelunasan atas hutang.

Operations and Marketing

Commission Days Audited in 2022 reached 102.23% of the 2022 RKAP or 112,270 days of the target of 109,820 days and achieved 134.81% of the 2021 realization. The significant increase from the 2021 realization was due to the monitored implementation of the operation excellence program run by Fleet & Ship Management.

Audited Commercial Days in 2022 achieved 95.70% of the 2022 RKAP or 115,930 days from the targeted 121,135 days. This was due to late Ship On-hire, transport permits and ship certificates which required longer time and bad weather conditions so that they could not operate.

The number of Audited Agency calls in 2022 reached 106.25% or 30,231 calls from the target 28,780 calls. This achievement was able to exceed the target because the number of calls received by the agency business from Pertamina's Chartered Agency was above the 2022 RKAP target.

Audited BBM ("COA") cargo in 2022 in the form of Owned Vessels (TB.1201 & OB.2301, TB.1202 & OB.2302, TB.1203 & OB.2303) achieved 41.88% or 293 KL of the targeted 700 KL, this is due to changes in ship charters from COA to Time Charter ("TC").

Consolidated Financial Position

Assets

- Audited Current Assets as of December 31, 2022 were in the position of Rp3.81 trillion or 95.75% of the 2022 RKAP.
- Non-Current Assets in the 2022 period amounted to IDR 4.39 trillion, a decrease of 0.85% from 2021. The decrease in Fixed Assets was due to a decrease in Fixed Assets while when compared to the 2022 RKAP it was 8.28% lower due to the non-realization of all ABI targeted in 2022.

Liabilities

- Current payables were recorded at Rp3.61 trillion or 115.34% from 2021. This was due to an increase in current payables of related parties (trade payables and receipts of advances), as well as other payables (accrued expenses, taxes payable and other payables).
- Long-term payables were recorded at Rp 0.98 trillion or reaching 80.47% when compared to Audited 2021, while when compared to the 2022 RKAP it reached 64.50% due to ABI not being carried out and debt repayment.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date**Ekuitas**

Ekuitas tercatat sebesar 3,61 Triliun tercapai 104,59% jika dibandingkan dengan *Audited* 2021 yang diperoleh atas peningkatan laba berjalan.

Laba rugi

Pendapatan usaha di bawah target 2022 disebabkan belum tercapainya kegiatan kapal milik karena rencana pengalihan kapal yang beroperasi di SHU kepada PTK di tahun 2022 masih belum dapat terealisasi dan ketidaktersediaan kapal milik sesuai dengan tipe dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh *Subholding Upstream*. Selain itu, kegiatan bundling di bawah target karena adanya tren penurunan jumlah thruput.

Beban pokok pendapatan di bawah target 2022 seiring dengan tidak tercapainya pendapatan usaha.

Beban *overhead* di bawah target 2022 disebabkan adanya efisiensi biaya personal dan biaya IT atas pengadaan perangkat pekerja *ex marine*, telekomunikasi VSAT, *security operations center*, layanan IPPBX, layanan sewa *firewall* dan layanan *end point protection*.

Net beban lain-lain di bawah target 2022 disebabkan adanya pendapatan atas denda kapal Galangan KTU Termin 5, adanya pendapatan atas denda keterlambatan *delivery* kapal pada galangan orela, naiknya pendapatan atas bagi hasil TYM dan turunnya beban penyisihan piutang yang berumur lebih dari 6 bulan.

Beban pajak penghasilan di atas target 2022 seiring dengan meningkatnya laba sebelum pajak.

Laba bersih di atas target 2022 seiring dengan meningkatnya pendapatan lain-lain dan menurunnya beban pokok penjualan serta beban *overhead*.

SDM dan K3

Pengelolaan sumber daya manusia menunjukkan pencapaian berarti berupa dukungan talenta perusahaan di tengah transisi reorganisasi berkelanjutan, kehandalan operasional SDM, dan perwujudan sistem tata kelola dan budaya perusahaan.

- Pembaharuan sistem pengupahan (skala upah) atas komponen remunerasi untuk *alignment* kebijakan remunerasi PT Pertamina (Persero) dan meningkatkan motivasi & kinerja pekerja dalam rangka mencapai target perusahaan pada bulan April 2022.
- Implementasi *Digital Travel Management* ("DTM") untuk efisiensi proses *end to end* proses *travel management* dan data *analytic* berjalan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan, PTK melaksanakan Go Live Aplikasi DTM pada bulan Agustus 2022.

Equity

Equity was recorded at Rp3.61 trillion, realized 104.59% when compared to the Audited 2021 which was obtained from an increase in profit for the year.

Profit and Loss

Operating revenues below the 2022 target were due to the non-achievement of owned vessel activities due to the plan to transfer vessels operating at SHU to PTK in 2022 which have yet to be realized and the unavailability of owned vessels according to the type and specifications required by Subholding Upstream. In addition, bundling activities were below the target due to a downward trend in thruput.

The cost of revenue was below the 2022 target in line with the failure to achieve operating income.

Overhead expenses below the 2022 target were due to efficiency in personal costs and IT costs for procuring equipment for ex-marine workers, VSAT telecommunications, security operations centers, IPPBX services, firewall rental services and end point protection services.

Net other expenses below the 2022 target were due to income from fines for Shipyard KTU Term 5, income from fines for late delivery of ships at the Orela shipyard, increased revenue from TYM profit sharing and decreased allowance for accounts receivable older than 6 months.

Income tax expense above the 2022 target in line with increased profit before tax.

Net profit above the 2022 target was in line with increasing other income and decreasing cost of goods sold and overhead expenses.

HR and K3

Human resource management has shown significant achievements in the form of support for corporate talent amidst a continuous reorganization transition, operational HR reliability, and the realization of a corporate governance system and culture.

- Updating the wage system (wage scale) for remuneration component for the alignment of PT Pertamina (Persero) remuneration policies and increasing employee motivation & performance in order to achieve the Company's target in April 2022.
- Implementation of Digital Travel Management ("DTM") for efficient end-to-end travel management and data analytics processes to run according to a predetermined timeline, PTK implements the Go Live DTM Application in August 2022.



Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date

- Go Live Aplikasi i-AM dengan 11 modul untuk kemudahan pengelolaan SDM dan *employee user interaction* (diantaranya *Learning Administration, Organizational Management, Employee Data, Mobility Service*, dll) pada bulan Mei 2022.
- Persetujuan PT Pertamina (Persero) dan Subholding IML untuk organisasi SH IML Segmen PTK atas dasar reklasterisasi bisnis pada bulan Juni 2022. Persetujuan ini menjadi dasar utama atas penyempurnaan organisasi SH IML keseluruhan sebagai target pencapaian tahun 2023.
- Realisasi pencapaian 138% dari *nominated talent millennial* dari populasi *high flyer* pekerja PTK.
- Realisasi pencapaian 160% perempuan dalam *nominated talent* dari populasi *high flyer* pekerja PTK.
- *Launching Integrated Marine & Logistics ("IML") Academy Subholding IML* sebagai bagian dari program pembelajaran/*upskilling* terintegrasi di Subholding IML sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan bisnis pada November 2023.
- Realisasi *training* sebanyak 46 judul pelatihan dengan 1739 peserta sepanjang tahun 2022.
- Realisasi pencapaian *Individual Goal ("IG")* pekerja secara rata-rata keseluruhan pada pelaksanaan *End-Year People Review ("EYPR")* 2022 sebesar 103.78% atau naik sebesar 1.14% dari pencapaian IG pada EYPR 2021.
- Implementasi atas Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di PTK dan Anak Perusahaan ("AP") PTK sesuai Pedoman No. A05-002/K20000/2022-S9 pada agenda *End-Year People Review (EYPR)* 2022 yang dilaksanakan pada Januari-Februari 2023.
- Mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001:2015 *Quality Management*, ISO 14001:2015 *Environment*, dan ISO 45001:2018 *Occupational Health & Safety*, serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada tahun 2022
- Implementasi dan internalisasi nilai-nilai AKHLAK di lingkungan PTK sebagai pengelolaan *work culture* dan respon atas transformasi bisnis PTK dengan raihan LCV AKHLAK Direktur Utama PTK mencapai maturity level organization culture yaitu *commitment* dengan pencapaian skor 369. Pencapaian ini menjadikan Direktur Utama PTK sebagai satu-satunya *leader* di Subholding IML yang mencapai *level commitment*.
- Go Live i-AM Application with 11 modules to facilitate HR management and employee user interaction (including Learning Administration, Organizational Management, Employee Data, Mobility Service, etc.) in May 2022.
- Approval of PT Pertamina (Persero) and IML Subholding for the SH IML organization of the PTK Segment on the basis of business reclusterization in June 2022. This approval was the main basis for improving the overall SH IML organization as a target for achievement in 2023.
- Realization of the achievement of 138% of nominated millennial talents from the PTK high flyer population.
- Realization of the achievement of 160% women in nominated talent from the high flyer population of PTK workers.
- Launching Integrated Marine & Logistics ("IML") Academy IML Subholding as part of an integrated learning/upskilling program at IML Subholding in accordance with position competencies and business needs in November 2023.
- Realization of 46 training titles with 1739 participants throughout 2022.
- Realization of employee Individual Goal ("IG") achievement as a whole in the 2022 End-Year People Review ("EYPR") implementation of 103.78%, an increase of 1.14% from IG achievement in EYPR 2021.
- Implementation of the Guidelines for Performance Appraisal for the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Committees for the Board of Commissioners in PTK and PTK Subsidiaries ("AP") in accordance with Guideline No. A05-002/K20000/2022-S9 on the 2022 End-Year People Review (EYPR) agenda which was held in January-February 2023.
- Maintaining certification of Integrated Management System ISO 9001:2015 Quality Management, ISO 14001:2015 Environment, and ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety, as well as ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in 2022.
- Implementation and internalization of AKHLAK values in PTK environment as a work culture management and response to PTK business transformation with the achievement of LVC AKHLAK The President Director of PTK reached the maturity level of organization culture, namely commitment with an achievement score of 369. This was the only achievement of a leader in IML Subholding of which was assessed and has reached the level of commitment.

Dalam hal K3, di tahun 2022 Perusahaan mencapai target HSE dengan tidak adanya insiden berkategori NoA, namun dengan adanya dua *recordable incident* realisasi TRIR sebesar 0,16 dari allowable 0,11.

In terms of K3, in 2022 the Company achieved the HSE target with no incidents categorized as NoA, but with two recordable incidents the TRIR realization was 0.16 out of the allowable 0.11.

Prospek dan Rencana Bisnis Tahun 2023

Business Prospects and Plans 2023



Tantangan Bisnis ke Depan

Sebagai perusahaan yang berusaha untuk tumbuh dan berkembang secara konsisten, PTK tentu menghadapi segala tantangan bisnis jasa perkapalan, jasa *marine*, dan logistik, baik dari sisi daya tarik pasar maupun daya saing PTK sendiri di masing-masing fokus bisnisnya:

Future Business Challenges

As a company that strives to grow and develop consistently, PTK certainly faces all business challenges in the shipping activities, marine services, and logistic services, both in terms of market attractiveness and PTK's own competitiveness in each of its business focuses:



Analisis Daya Tarik Pasar dan Daya Saing Usaha di Bisnis Jasa Perkapalan (*Ship-related*)

1. Daya Tarik Pasar
 - a. Menipisnya cadangan migas onshore mendorong investor memburu migas ke *offshore*, serta kecenderungan eksplorasi lebih ke arah Indonesia Timur sejalan dengan program Indonesia *Deep-water Development*.
 - b. Target *lifting migas* yang terus meningkat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia
 - c. Sebagai bagian *Subholding IML*, terdapat peluang mendapat penunjukan langsung kepada PTK untuk pengadaan kapal-kapal yang dibutuhkan Pertamina Group baik untuk *offshore support* maupun *marine support*.
2. Daya Saing Usaha
 - a. Berpengalaman dalam pengelolaan eksploitasi kapal, khususnya OSV (*Offshore Supply Vessel*) dan *Jasa Marine* dan telah mendapat kepercayaan dari beberapa KKKS dalam menyediakan kapal penunjang operasional migas *offshore* seperti PT Total E&P Indonesia (kini PT Pertamina Hulu Mahakam), CNOOC Ses Ltd, PT Conoco Phillips Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia, PHE ONWJ, PHE OSES, dan lain-lain.
 - b. Memiliki reputasi yang baik dalam kinerja HSSE untuk bekerjasama dengan KKKS, telah menerapkan standard *ISM Code* dalam operasional kapal, serta *ISPS Code* dalam operasional pelabuhan.
 - c. Memiliki berbagai jenis armada kapal.
 - d. Memiliki jaringan operasi & pemasaran di seluruh Indonesia.
 - e. Telah terjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pemasok.
 - f. Memiliki SDM yang berpengalaman dan kompeten.
 - g. Kinerja keuangan yang baik serta kepercayaan dunia perbankan dan lembaga keuangan, memungkinkan untuk mendukung perusahaan tumbuh melalui investasi untuk peremajaan armada.
 - h. Kepercayaan mitra untuk menjalin kemitraan dalam investasi kapal.

Analysis of Market Attractiveness and Business Competitiveness in the Shipping Services Business (*Ship-related*)

1. Market Attractiveness
 - a. The depletion of onshore oil and gas reserves has prompted investors to seek offshore oil and gas, as well as the tendency for exploration to be more towards Eastern Indonesia in line with the Indonesia Deep-water Development program.
 - b. The increasing oil and gas lifting target set by the Government of Indonesia
 - c. As part of IML Subholding, there is an opportunity to get direct appointment to PTK to procure ships needed by Pertamina Group for both offshore support and marine support.
2. Business Competitiveness
 - a. Experienced in managing ship exploitation, especially OSV (*Offshore Supply Vessel*) and Marine Services and has won the trust of several PSC Contractors in providing offshore oil and gas operational support vessels such as PT Total E&P Indonesia (now PT Pertamina Hulu Mahakam), CNOOC Ses Ltd, PT Conoco Phillips Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia, PHE ONWJ, PHE OSES, and others.
 - b. Has a good reputation in HSSE performance to cooperate with PSC Contractors, has implemented ISM Code standards in ship operations, and ISPS Code in port operations.
 - c. Has various types of fleets of ships.
 - d. Has a network of operations & marketing throughout Indonesia.
 - e. A good cooperative relationship has been established with suppliers.
 - f. Has experienced and competent human resources.
 - g. Good financial performance and the trust of the world of banking and financial institutions, make it possible to support the Company's growth through investments in fleet rejuvenation.
 - h. Trust partners to establish partnerships in ship investment.

Prospek dan Rencana Bisnis Tahun 2023
Business Prospects and Plans 2023**Analisis Daya Tarik Pasar dan Daya Saing Usaha di Bisnis Jasa Marine**

1. Daya Tarik Pasar
 - a. Pengalaman sebagai operator kegiatan *marine* di Terminal LNG Arun, Dongi Senoro, dan kegiatan di *Fuel* Terminal dan Kilang di PT Pertamina Group
 - b. Pengalaman dalam pengelolaan Jasa *Marine* lainnya antara lain *Dredging*, *Freshwater supply*, jasa teknik bawah air, perawatan sarfas Pelabuhan, *Oil Spill Response*, dan lain lain
 - c. Pengalaman melaksanakan kegiatan keagenan di Seluruh Indonesia dan Luar Negeri dengan pengalaman lebih dari 50 tahun
2. Daya Saing Usaha
 - a. Kantor PTK tersebar di lebih dari 100 (seratus) lokasi di Indonesia
 - b. Sinergi antara anak usaha PT Pertamina Group
 - c. PTK memiliki anak usaha di bidang pelayanan pelabuhan dan BUP, Jasa Teknik dan Perbaikan Pelabuhan serta *Waste Management*, *Jasa Man Power Supply* dan *Crew Kapal*.

Analisis Daya Tarik Pasar dan Daya Saing Usaha di Bisnis Logistic Services

1. Daya Tarik Pasar
 - a. Terdapat potensi pengembangan blok migas baru di wilayah Kalimantan/Sulawesi.
 - b. Adanya peluang sebagai *logistic base (hub)* dengan dibangunnya fasilitas TBBM dan RDMP di wilayah Kalimantan Timur.
 - c. Tren perburuan migas ke *offshore* akan memicu peningkatan kebutuhan jasa *logistic base (shorebase & warehousing)*.
2. Daya Saing Usaha
 - a. Perbaikan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - b. Melakukan investasi alat berat untuk mendukung proses bisnis.
 - c. Memaksimalkan *one stop services* di Peteka *Shorebase* Tanjung Batu.
 - d. Mengembangkan potensi *shorebase* Kabil dan mencari lokasi *shorebase* potensial lainnya di wilayah Indonesia.

Analysis of Market Attractiveness and Business Competitiveness in the Marine Services Business

1. Market Attractiveness
 - a. Experienced as operator of marine activities at Arun LNG Terminal, Dongi Senoro LNG Terminal, and activities at Fuel Terminal and Refinery in PT Pertamina Group
 - b. Experienced in managing other Marine services including Dredging, Freshwater supply, underwater engineering services, Port infrastructure maintenance, Oil Spill Response, and others
 - c. Experienced in carrying out agency activities throughout Indonesia and Overseas with more than 50 years of experience.
2. Business Competitiveness
 - a. PTK offices are spread across more than 100 (one hundred) locations in Indonesia.
 - b. Synergies between PT Pertamina Group subsidiaries
 - c. PTK has subsidiaries in the field of port services and BUP, Engineering Services and Port Repairs and Waste Management, Man Power Supply Services and Ship Crew

Analysis of Market Attractiveness and Business Competitiveness in the Logistic Services Business

1. Market Attractiveness
 - a. There is potential for the development of new oil and gas blocks in the Kalimantan/Sulawesi region.
 - b. There is an opportunity to become a logistics base (hub) with the construction of TBBM and RDMP facilities in the East Kalimantan region.
 - c. The trend of hunting for oil and gas offshore will trigger an increase in the need for logistics base services (shorebase & warehousing).
2. Business Competitiveness
 - a. Improvement of business processes by utilizing information technology
 - b. Conducting investment in heavy equipment to support business processes.
 - c. Maximizing one stop services at Peteka Shorebase Tanjung Batu.
 - d. Developing the potential of Kabil shorebase and looking for other potential shorebase locations in Indonesian territory.



Analisis Makro Ekonomi

Pemerintah menargetkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berada pada kisaran 5 hingga 5,5%. Asumsi tersebut mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan dengan catatan COVID-19 dapat terus dikendalikan, fungsi intermediary perbankan dapat kembali pulih, serta didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif. Tahun 2023 akan menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi. Konsolidasi fiskal diarahkan untuk menyehatkan makro fiskal dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan kebijakan fiskal tahun 2022 akan semakin efektif, *prudent*, dan *sustainable*. Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per dolar AS. Selanjutnya, Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok senilai USD63 per barel. Target ini meningkat dibandingkan APBN 2022 yakni USD45 per barel.

Faktor yang Diprediksi Berdampak pada Perusahaan dalam Bisnis Jasa Perkapalan, Jasa Marine, dan Logistik Tahun 2023

- *Market Disruption* yang menuntut Transformasi Bisnis/Inovasi Marketing
Pandemi COVID-19 diprediksi masih ada pada tahun 2023 dan turut memberi dampak pada terjadinya fenomena ketidakpastian yang mengganggu eksistensi pasar yang sudah ada selama ini. Situasi ini menuntut pelaku bisnis untuk berinovasi dan sifatnya menggantikan cara lama atau pola sebelumnya. Sebagai pemain di industri jasa perkapalan, *marine*, dan logistik, PTK mengusung jargon sebagai *one-stop integrated maritime services provider* yang sejalan dengan visi dan misinya. PTK menyiasati *market disruption* dengan memberikan penawaran jasa dalam skema paket *bundling*, mulai dari penyediaan dan operasi kapal, jasa pemanduan-penundaan kapal, penanganan tumpahan minyak di perairan, pengelolaan dan operasional pelabuhan. Di luar paket *bundling*, PTK juga memiliki segmen bisnis jasa pemeliharaan sarfas pelabuhan, pengerukan alur pelayaran, pengelolaan limbah kapal, perbaikan kapal, dan lain-lain – yang ditawarkan secara terpisah dengan skema *by order*. Artinya, PTK melayani secara *end-to-end* sesuai kebutuhan pelanggan sekaligus memperkuat *branding* sebagai *one-stop integrated maritime services provider*.

Macroeconomic Analysis

The government is targeting the 2023 economic growth projection to be in the range of 5 to 5.5%. This assumption considers various global and national economic dynamics, risks of uncertainty, and potential for economic recovery next year, provided that COVID-19 can be controlled, the banking intermediary function can recover, and is supported by Bank Indonesia's monetary policy and OJK's conducive financial sector policies. Year 2023 will be the foundation for consolidation and reform. Fiscal consolidation is directed at macro-fiscal health in order to accelerate economic recovery and structural reforms. Through accelerating economic recovery, structural reforms, and fiscal reforms, it is hoped that fiscal policy in 2023 will be more effective, prudent, and sustainable. The rupiah exchange rate is estimated to move in the range of Rp.14,350 per US dollar. Furthermore, the price of Indonesian Crude Oil (ICP) is set at USD 63 per barrel. This target is an increase compared to the 2022 State Budget, which was at USD 45 per barrel.

Factors Predicted to Affect Companies in the Business of Shipping Activities, Maritime Services and Logistic Services in 2023

- Market Disruption that demands Business Transformation/Marketing Innovation
The COVID-19 pandemic is predicted to still exist in 2023 and will also have an impact on the phenomenon of uncertainty that disrupts the existence of markets that have existed so far. This situation requires business people to innovate and replace old ways or previous patterns. As a player in the shipping, maritime and logistics services industry, PTK carries the jargon of being a one-stop integrated maritime services provider which is in line with its vision and mission. PTK deals with market disruption by offering services in a package bundling scheme, starting from the provision and operation of vessels, pilotage-delay services, handling of oil spills in waters, port management and operations. Apart from bundling packages, PTK also has business segments for port infrastructure maintenance services, shipping channel dredging, ship waste management, ship repair, and others – which are offered separately under a by order scheme. This means that PTK serves end-to-end according to customer needs while at the same time strengthening branding as a one-stop integrated maritime services provider.

Prospek dan Rencana Bisnis Tahun 2023
Business Prospects and Plans 2023

Tidak hanya itu, strategi PTK ini juga sejalan dengan semangat induk perusahaan, yakni PT Pertamina International Shipping sebagai *Subholding* IML yang berperan dalam distribusi produk migas, di mana PTK turut menjaga kelancaran rantai pasok di sektor jasa *marine* dan logistik, di samping jasa perkapalan.

- Digitalisasi Proses Bisnis yang Berkelanjutan
Perkembangan industri 4.0 tidak dapat dihindari. Beberapa tahun ke belakang sampai saat ini, para pelaku bisnis terus berlomba melakukan digitalisasi sembari menciptakan gagasan model bisnis yang baru dan berbeda. Tidak terkecuali dalam industri jasa perkapalan, *marine*, dan logistik – berbagai ide inovasi terus diwujudkan untuk memberikan layanan yang efisien, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan nilai kompetitif. Contoh inovasi pada *smart port* di Singapura yang mampu mengevaluasi informasi/data infrastruktur, lalu lintas, pergerakan kapal, serta perpindahan muatan/kargo. Teknologi ini juga sudah mulai diterapkan di Pelindo (Pelabuhan Tanjung Priok) yang menerapkan digitalisasi dalam layanan operasional secara *end-to-end* untuk meningkatkan arus bongkar muat dan efisiensi biaya.

Digitalisasi proses bisnis yang diterapkan PTK secara bertahap pada tahun 2021 dan 2022 harus tetap berlanjut pada tahun mendatang. Sebagai upaya dalam menyederhanakan alur kerja, sumber pencarian informasi faktual tentang operasional PTK baik secara *real time* maupun berkala, yang bertujuan memudahkan dalam analisis pendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran – digitalisasi harus mampu menjawab kebutuhan pekerja, perusahaan sebagai pelaku bisnis, serta pihak lain (regulator, pelanggan, Pertamina sebagai *holding*). PTK telah menyusun roadmap digitalisasi menuju *system excellence* tahun 2026, di mana pada tahun 2023 *milestone*-nya adalah sebagai *business process enabler* yang memberikan solusi-solusi digital dan migrasi data dari sistem lama ke teknologi baru.

In addition, PTK's strategy is also in line with the spirit of the parent company, namely PT Pertamina International Shipping as IML Subholding which plays a role in the distribution of oil and gas products, in which PTK participates in maintaining the smooth supply chain in the marine and logistics services sector, in addition to shipping services.

- Sustainable Digitalization of Business Processes
The development of industry 4.0 is unavoidable. In the past few years to date, business people have continued to compete in digitalization while creating new and different business model ideas. The shipping, maritime and logistics services industry is no exception – various innovative ideas are continuously being realized to provide efficient services, including the use of digital technology to increase competitive value. An example of innovation is the smart port in Singapore which is able to evaluate infrastructure information/data, traffic, ship movements, and cargo/load transfers. This technology has also begun to be implemented at Pelindo (Tanjung Priok Port) which implements digitalization in operational services on an end-to-end basis to improve loading and unloading flows and cost efficiency.

The digitalization of business processes implemented in stages by PTK in 2021 and 2022 should continue in the coming year. As an effort to simplify workflow, a source of finding factual information about PTK operations both in real time and periodically, which aims to facilitate analysis to support decision making that is faster and more targeted – digitalization must be able to answer the needs of workers, companies as business people, as well as other parties (regulators, customers, Pertamina as holding). PTK has prepared a digitalization roadmap towards system excellence in 2026, where in 2023 the milestone will be as a business process enabler that provides digital solutions and data migration from old systems to new technologies.

Proyeksi Bisnis Perusahaan Tahun 2023

Company's Business Projection 2023

Perihal Description	Proyeksi Tahun 2023 Terhadap Prognosa Tahun 2022 Projections for 2023 Against Prognosis for 2022 (%)
Operasi dan Pemasaran Operasi dan Pemasaran	
<i>Commission days</i> (satuan) Commission days (unit)	100% s.d 102 % ↑
<i>Commercial Days</i> (satuan) Commercial Days (unit)	100% s.d 102% ↑
<i>Call Keagenan/Agency Call</i> (satuan) Call Keagenan/Agency Call (unit)	88,94% s.d 100% ↑
Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Position	
Aset Assets	86% s.d 92% ↓
Liabilitas Liabilities	84% s.d 90% ↓
Ekuitas Equity	88% s.d 94% ↓
Struktur Modal Capital Structure	98% s.d 104% ↑
Laba/(Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Profit/(Loss) and Other Comprehensive Income	
Pendapatan usaha Revenue	107% s.d 113% ↑
Beban pokok pendapatan Cost of Revenue	113% s.d 119% ↑
Laba kotor Gross Profit	93% s.d 99% ↓
Laba sebelum Pajak penghasilan Profit before Income Tax	73% s.d 79% ↓
Beban pajak penghasilan Income tax expense	109% s.d 115% ↑
Laba tahun berjalan Profit for the Year	67% s.d 73% ↓
SDM dan K3 HR and OHS	
Penurunan <i>Vacant Position</i> Vacant Position Decreasing	15% s.d 10% ↑
Realisasi <i>Training & Sertifikasi</i> Realization of Training and Certification	115% s.d 100% ↑

Prospek dan Rencana Bisnis Tahun 2023
Business Prospects and Plans 2023

Posisi Keuangan dan Struktur Modal

Total Aset pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan menurun jika dibandingkan RJPP 2022 atas penurunan Aset Lancar.

Total Liabilitas tahun 2023 diproyeksikan menurun jika dibandingkan RJPP 2022 atas penurunan hutang lancar dan pelunasan hutang jangka Panjang.

Total Ekuitas tahun 2023 diproyeksikan menurun jika dibandingkan RJPP 2022 disebabkan adanya pembayaran Dividen kepada PT PIS selaku *Subholding* IML, yang belum diproyeksikan sebelumnya dalam RJPP.

Laba Rugi

Pendapatan pada RKAP tahun 2023 ditargetkan meningkat jika dibandingkan RJPP 2022. Pendapatan terbesar pada RKAP 2023 ditargetkan diperoleh dari segmen bisnis *marine services*, pendapatan terbesar kedua berasal dari segmen bisnis *shipping activities* dan selanjutnya pendapatan berasal dari bisnis *logistic service*.

Beban pokok pendapatan ditargetkan meningkat pada RKAP 2023 jika dibandingkan dengan RJPP 2022. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari kegiatan bisnis kapal milik (adanya biaya yang muncul dari kapal baru dan biaya dari kapal-kapal yang menjalani *docking repair*), dan tambahan dari kegiatan *marine service* dan *logistic services* (adanya tambahan kegiatan dari pengerukan, kegiatan pelabuhan, dan *Labour Supply*).

Laba Operasional pada RKAP 2023 ditargetkan menurun jika dibandingkan RJPP 2022 seiring dengan meningkatnya Beban Pokok Pendapatan.

Financial position and capital structure

Total Assets in the 2023 fiscal year are projected to decrease compared to the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2022 due to a decrease in Current Assets.

Total Liabilities in 2023 are projected to decrease when compared to the 2022 RJPP for the reduction of current debt and settlement of long-term debt.

Total Equity in 2023 is projected to decrease when compared to the 2022 RJPP due to dividend payments to PT PIS as IML Subholding, which had not been previously projected in the RJPP

Profit and loss

Revenue in the 2023 RKAP is targeted to increase compared to the 2022 RJPP. The largest revenue in the 2023 RKAP is targeted to be obtained from the marine services business segment, the second largest revenue comes from the shipping activities business segment and the third largest revenue comes from the logistics service business.

The cost of revenue is targeted to increase in the 2023 Company's Work Plan and Budget (RKAP) when compared to the 2022 RJPP. This is due to an increase in owned ship business activities (there are costs arising from new ships and costs from ships undergoing docking repairs), and additional marine activities service and logistics services (additional activities from dredging, port activities, and Labor Supply).

Operating Profit in the 2023 RKAP is targeted to decrease compared to the 2022 RJPP in line with the increase in Cost of Revenue



SDM dan K3

- Penguatan organisasi PTK melalui desain organisasi sesuai kebutuhan dan tantangan perusahaan dan optimalisasi pengisian posisi dalam struktur organisasi. Target *vacant rate position* berada di 10%-15% melalui jalur *rekrutmen* tahunan (*manpower planning*) dan pergerakan pekerja (mutasi) di lingkungan *Subholding* IML maupun di Pertamina group.
- Target realisasi *training*, sertifikasi dan *upskilling* lain ditargetkan 15% lebih tinggi dibanding realisasi pada tahun 2022. Hal ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program IML Academy berkelanjutan di *Subholding* IML serta pelaksanaan distribusi program peningkatan kompetensi pasca perubahan organisasi SH IML Segmen PTK pada tahun 2023.
- PTK juga tetap mempertahankan dan meningkatkan 4 (empat) pilar *Quality Management*, yaitu *Continuous Improvement Program* ("CIP"), *Knowledge Management* ("KM"), *Quality Management Assessment* (QMA), dan *System & Standard Management* ("SSM"). Pada tahun 2023, PTK menargetkan perolehan award kategori *Gold* dan *Platinum* di ajang *Annual Pertamina Quality* ("APQ") Award. Menyelesaian AFI (*action for improvement*) atas OFI (*opportunity for improvement*) hasil penilaian terhadap manajemen mutu perusahaan/ *Quality Management Assessment* ("QMA") berdasarkan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina ("KKEP") tahun 2022. Sinkronisasi sistem tata kerja ("STK") PTK dan SH IML serta pengajian ulang terhadap 100 STK di tahun 2023. Mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO 9001:2015 *Quality Management*, ISO 14001:2015 *Environment*, dan ISO 45001:2018 *Occupational Health & Safety*), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016), serta mendapatkan sertifikasi atas Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2013).
- Perusahaan menetapkan inisiatif-inisiatif program untuk meningkatkan budaya HSSE pekerja dan mendorong pencapaian target kinerja HSSE 2023. Perusahaan optimis dapat mencapai nihil insiden NoA di tahun 2023.

HR and K3

- Strengthening the PTK organization through organizational design according to the Company's needs and challenges and optimizing the filling of positions in organization structure. The vacant rate position target is at 10% -15% through the annual recruitment channel (*manpower planning*) and movement of workers (*mutation*) within the IML Subholding environment and within the Pertamina group.
- Realization of training, certification and other upskilling is targeted to be 15% higher than the realization in 2022. This is done in conjunction with the implementation of the continuous IML Academy program in IML Subholding and distribution implementation of competency development programs after the organizational change of SH IML PTK Segment in 2023.
- PTK also continues to maintain and improve the 4 (four) pillars of *Quality Management*, namely the *Continuous Improvement Program* (CIP), *Knowledge Management* (KM), *Quality Management Assessment* (QMA), and *System & Standard Management* (SSM). In 2023, PTK targets to win *Gold* and *Platinum* category awards at the *Annual Pertamina Quality* (APQ) Award. Completion of AFI (*action for improvement*) on OFI (*opportunity for improvement*) on the results of an assessment of the Company's quality management/ *Quality Management Assessment* (QMA) based on Pertamina's Excellent Performance Criteria (KKEP) in 2022. Synchronization of PTK and SH IML work procedures (STK) and review of 100 STK in 2023. Maintaining certification of *Integrated Management System* (ISO 9001:2015 *Quality Management*, ISO 14001:2015 *Environment*, and ISO 45001:2018 *Occupational Health & Safety*), *Anti-Bribery Management System* (ISO 37001:2016), as well as obtaining certification for the *Information Security Management System* (ISO 27001:2013).
- The Company establishes program initiatives to improve employee HSSE culture and encourage the achievement of 2023 HSSE performance targets. The Company is optimistic to achieve zero incident NoA in 2023.

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

Dasar Pembagian Dividen

Dasar pembagian dividen Perusahaan mengacu pada Anggaran Dasar Pasal 21 tentang Penggunaan Laba, dengan uraian sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perusahaan atau untuk penggunaan lainnya.
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Penggunaan laba bersih untuk tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, dilakukan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perusahaan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perusahaan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perusahaan.
8. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perusahaan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perusahaan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.

Basis of Dividend Distribution

The basis for distributing the Company's dividends refers to Article 21 of the Articles of Association concerning the Use of Profits, with the following description

1. The appropriation of net profit including the amount of provision for allowance for losses is decided by the GMS.
2. The entire net profit after deducted by the provision for allowance as referred to in paragraph 1 of this Article is distributed to shareholders as dividends unless otherwise determined by the GMS.
3. In addition to the appropriation of net profit as referred to in paragraph 2 of this Article, the GMS can determine the appropriation of net profit for other distributions such as bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners. Placement of the net profit in the Company's reserves or for other uses.
4. Dividends as referred to in paragraph 2 of this Article may only be distributed if the Company has a positive profit balance.
5. The appropriation of net profit for tantiem as referred to in paragraph 3 of this Article, is executed as long as it has been budgeted and calculated as expenses in the current year.
6. If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded in the Company's books and in future years the Company will be deemed not to have made a profit as long as the recorded loss has not been covered at all, without prejudice to the provisions of the applicable laws and regulations.
7. The Company may distribute interim dividends before the Company's financial year ends, taking into account the Company's profit projection and financial capacity.
8. Distribution of interim dividends as referred to in paragraph 7 of this Article is determined based on the decision of the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners.
9. In the event after the end of the financial year it turns out that the Company suffers from a loss, the interim dividends that have been distributed must be returned by the shareholders to the Company.
10. The Board of Directors and the Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the losses of the Company, in the event the shareholders are unable to return the interim dividends as referred to in paragraph 9 of this Article.

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

Pembagian Dividen yang Dilakukan dan Kronologis Pembagian Dividen

Berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2022, pemegang saham menetapkan penggunaan Laba Perusahaan Tahun Buku 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Menyetujui pembagian Dividen kepada Pemegang Saham sebesar USD49.100.000,-, secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam Perusahaan, yang berasal dari Laba Bersih Tahun Buku 2021 sebesar USD37.157.795,- dan Laba Ditahan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD11.942.205,-. Pembayaran Dividen tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal ditutupnya Rapat;
- Menyetujui Cadangan Wajib sebesar USD2.500.000, yang dialokasikan dari Laba Ditahan Tahun 2021 yang belum ditentukan penggunaannya.

Kronologis pembagian dan pembayaran dividen tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut,

Dividend Distribution Executed and Chronology of Dividend Distribution

Based on the approval given by the shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") for the 2021 fiscal year held on June 16, 2022, the shareholders determined the appropriation of the Company's profit for the 2021 (two thousand twenty one) financial year, with the following details:

- Approved the distribution of dividends to Shareholders in the amount of USD49,100,000, - proportionally to the portion of share ownership in the Company, which came from Net Profit for the 2021 Fiscal Year of USD37,157,795, - and Retained Earnings as of December 31, 2021 of USD 11,942,205, - Payment of the dividends no later than 30 days from the closing date of the Meeting;
- Approved the Mandatory Reserve of USD2,500,000, which was allocated from the unappropriated 2021 Retained Earnings.

The chronology of dividend distribution and payment for 2018 to 2022 is as follows;

Tahun Pembagian Distribution Year	Tahun Dividen Dividend Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta) Cash Dividend Paid (Rp-million)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per share (Rp/share)
2022	2021	16 Juni 2022 June 16, 2022	23 Juli 2022 July 23, 2022	723.784	653.846
2021	2020	2 Juni 2021 June 02, 2021	-	-	-
2020	2019	9 Juli 2020 July 09, 2020	24 Juli 2020 July 24, 2020	2	1,81
2019	2018	16 Mei 2019 May 16, 2019	-	-	-
2018	2017	14 Mei 2018 May 14, 2018	-	-	-

Kontribusi Kepada Negara

Contribution to the State

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan pencerminan kenegaraan di bidang perpajakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, PTK berkomitmen dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak.

Tahun 2022, PTK sebagai Wajib Pajak telah memberikan kontribusi Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban PPh Badan.

Responsibility for the obligation to pay taxes reflects the statehood in taxation for national development. Therefore, PTK is committed to fulfilling the obligation to pay taxes, as a Taxpayer and as a Tax Withholder.

In 2022, PTK as a Taxpayer made the Company's contribution in fulfilling Corporate Income Tax obligations.

Kontribusi Pajak PTK

PTK's Tax Contribution

Perihal Description	2022 (Rp-juta) (Rp-million)	2021 (Rp-juta) (Rp-million)	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022	
				Selisih (Rp-juta) Difference (Rp-million)	%
Beban Pajak penghasilan Income tax expense	221.826	111.701	67.505	110.125	98,59 ↑

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Proceeds from Public Offering of Shares

Hingga akhir tahun 2022, PTK tidak melakukan penawaran umum saham dan tidak menerbitkan efek di bursa efek manapun. Dengan demikian, PTK tidak memiliki kewajiban menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Until the end of 2022, PTK did not conduct a public offering of shares and did not issue securities on any stock exchange. Thus, PTK has no obligation to convey information related to the realization of the use of proceeds from a public offering.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring

Tidak terdapat informasi material terkait investasi, ekspansi, divestasi dan penggabungan usaha/merger oleh Perusahaan di sepanjang tahun 2022.

There was no material information related to investment, expansion, divestment and business mergers/mergers by the Company throughout 2022.

Informasi Material Terkait Restrukturisasi Utang/Modal

Berdasarkan Akta No. 30 tanggal 29 November 2022 tentang peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor, dan Akta No. 31 tanggal 29 November 2022 tentang Inbreng Aset, Perusahaan telah meningkatkan modal dengan menerbitkan saham baru yang diambil oleh PT Pertamina International Shipping dengan inbreng aset marine non-sarana tambat senilai Rp128.602.000.000 atau sebanyak 128.602 lembar saham seri A. Selain itu Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor untuk saham seri A dari semula Rp1.106.145.000.000 atau sebanyak 1.106.145 lembar saham seri A menjadi Rp1.234.747.000 atau sebanyak 1.234.747 lembar saham seri A.

Material Information Related to Debt/Capital Restructuring

Based on Deed No. 30 dated November 29, 2022 regarding the increase in authorized capital and issued and paid-up capital, and Deed No. 31 dated November 29, 2022 regarding Asset Inbreng, the Company has increased capital by issuing new shares taken by PT Pertamina International Shipping with the inbreng of non-mooring facilities marine assets worth Rp128. 602,000,000 or 128,602 series A shares. In addition, the Company decided to increase the issued and paid-up capital for series A shares from the original Rp1,106,145,000,000 or 1,106,145 series A shares to Rp1,234,747,000 or 1,234,747 series A shares.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Dalam operasionalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (catatan) seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Policy on the Transaction with Related Parties

In its operations, the Company conducts transactions with related parties. All transactions with related parties have been disclosed in the Annual Report and Financial Statements (notes) as defined in PSAK 7: Disclosure of Related Parties.

Nama Pihak Bertransaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi

Related Parties, Nature of Relationship and Transaction

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Perusahaan induk utama Ultimate parent company	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha, liabilitas kontrak, dan modal saham Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables and share capital
PT Pertamina International Shipping ("PIS")	Pemegang saham mayoritas Majority shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha, dan liabilitas kontrak Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables, and contract liabilities.
PT Pertamina Energy Terminal ("PET")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha Revenue, cost of revenue, general and administrative expenses, trade receivables, contract assets and trade payables
PT Kilang Pertamina International ("KPI")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables
PT Perta Arun Gas ("PAG")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables
PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas Placement of Cash and Cash Equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas Placement of Cash and Cash Equivalents
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas Placement of Cash and Cash Equivalents
PT Pertamina Retail ("PTR")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, cost of revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi Offshore NorthWest Java ("PHE ONWJ")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga ("PHSS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Lubricants ("PTPL")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha Revenue and trade receivables
PT PGN LNG Indonesia ("PGN LNG")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina EP ("PEP")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("PHE WMO")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Bina Medika ("Pertamedika")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, dan utang usaha Cost of revenue, general and administrative expenses, and accounts payable
PT Patra Logistik ("Patra Logistik")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan dan liabilitas kontrak Revenue, cost of revenue and contract liabilities
PT Nusantara Regas ("Nusantara Regas")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Kilang Pertamina Balikpapan ("KPB")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset Revenue, and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore ("PHE NSO")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset Revenue, and contract assets
PT Prima Armada Raya ("PAR")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses, and accounts payable
PT Pertamina Training & Consulting ("PTC")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses, and accounts payable
Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas dan pinjaman jangka panjang Placements of cash and cash equivalents, and long-term loans
PT Mitra Tours & Travel ("MTT")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses, and accounts payable
PT Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd. ("PIMD")	Entitas sepengendali Entity under common control	Liabilitas kontrak Contract Liabilities
PT Pertamina Hulu Rokan ("PHR")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan Revenue
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ("PHE JM")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan Revenue
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia ("ATPI")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban pokok pendapatan Cost of Revenue
PT Benggala Laju Abadi ("Benggala")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Banggai Bahtera Laju Abadi ("Banggai")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Aru Bahtera Laju Abadi ("Aru")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Alor Bahtera Laju Abadi ("Alor")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Ararkula Bahtera Laju Abadi ("Ararkula")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
PT Bangkit Bahtera Laju Abadi ("Bangkit")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Liran Bahtera Laju Abadi ("Liran")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Barung Bahtera Laju Abadi ("Barung")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Miangas Bahtera Laju Abadi ("Miangas")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Brass Bahtera Laju Abadi ("Brass")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Damar Bahtera Laju Abadi ("Damar")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Damanusa Bahtera Laju Abadi ("Damanusa")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Bepondi Bahtera Laju Abadi ("Bepondi")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Entitas ventura bersama	Piutang usaha Investment in shares
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Piutang usaha, kontrak aset, dan liabilitas kontrak Trade receivables, contract assets, and contract liabilities
PT Pelindo Marine Service ("Pelindo MS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Piutang usaha Trade receivables
PT Administrasi Medika ("Admedika")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Pratama Mitra Sejati ("PMS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Sigma Cipta Utama ("SCU")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and trade payables
PT Jawa Satu Power ("JSP")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Piutang usaha Trade receivables
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Piutang usaha Trade receivables
PT Peralife Insurance ("Peralife")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Surveyor Indonesia (Persero) ("Surveyor Indonesia")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BKI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT PAL Indonesia ("PAL")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Jasa Armada Indonesia ("IPCM")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah	Utang usaha Trade payables
PT Superintending Company of Indonesia ("SUCOFINDO")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah	Utang usaha Trade payables

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Realisasi saldo dan transaksi Pihak-pihak Berelasi terhadap kinerja keuangan Perusahaan dapat disampaikan sebagai berikut.

Realization of Balances and Transactions of Related Parties

Realization of balances and transactions of Related Parties to the Company's financial performance can be presented as follows.

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi pada Periode Tahun Buku 2022 dan 2021

Realization of Related Party Balance and Transactions in FY2022 and FY2021

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Balance of Related Parties in Assets	2022 Rp-juta Rp-million	2021 Rp-juta Rp-million	Persentase dari Jumlah Aset Percentage from Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			2022	2021	Nominal	Persentase	
			%	%	Rp-juta Rp-million	%	
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents	1.053.667	1.202.541	12,85	15,41	(148.874)	(12,38)	-
Piutang usaha Trade Receivables	1.181.134	1.010.334	14,40	12,95	170.800	16,91	↑
Kontrak aset Contract Assets	1.034.895	712.243	12,62	9,13	322.652	45,30	↑
Penyertaan saham Investment in shares	6.661	5.999	0,08	0,08	662	11,04	↑
Total aset dari pihak-pihak berelasi Total assets from related parties	3.276.357	2.931.117	39,94	37,57	345.240	11,78	↑
Total aset konsolidasian Total consolidated assets	8.202.571	7.801.861			400.710	5,14	↑

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Total consolidated assets	2022 Rp-juta Rp-million	2021 Rp-juta Rp-million	Persentase dari Jumlah Aset Percentage from Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			2022	2021	Nominal	Persentase	
			%	%	Rp-juta Rp-million	%	
Utang usaha Trade payables	909.546	639.972	19,79	14,70	269.574	42,12	↑
Liabilitas kontrak Contract liabilities	20.136	53.814	0,44	1,20	(33.678)	(62,58)	-
Pinjaman jangka panjang Long-term debts	555.563	673.131	12,09	15,46	(117.568)	(17,47)	-
Total Liabilitas dari pihak-pihak berelasi Total liabilities from related parties	1.485.245	1.366.917	32,32	31,40	118.328	8,66	↑
Total liabilitas konsolidasian Total consolidated liabilities	4.594.992	4.352.747			242.245	5,57	↑

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Usaha Related Party Transactions in Revenue	2022	2021	Persentase dari Jumlah Aset Percentage from Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Rp-juta Rp-million	Rp-juta Rp-million	2022	2021	Nominal	Persentase Percentage	
			%	%	Rp-juta Rp-million	%	
Total pendapatan usaha dari pihak-pihak berelasi Total revenue from related parties	4.124.875	3.367.408	86,21	88,59	757.467	22,49	↑
Total pendapatan usaha Total revenue	4.784.913	3.800.987			983.926	25,89	↑

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan Related party transactions in Cost of Revenue	2022	2021	Persentase dari Jumlah Aset Percentage from Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Rp-juta Rp-million	Rp-juta Rp-million	2022	2021	Nominal	Persentase Percentage	
			%	%	Rp-juta Rp-million	%	
Total beban pokok pendapatan dari pihak-pihak berelasi Total cost of revenue from related party	1.505.866	463.845	48,00	17,25	1.042.021	224,65	↑
Total beban pokok pendapatan Total cost of revenue	3.136.987	2.688.852			448.135	16,67	↑

Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Umum dan Administrasi Related party transactions in General and Administrative Expenses	2022	2021	Persentase dari Jumlah Aset Percentage from Total Assets		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Rp-juta Rp-million	Rp-juta Rp-million	2022	2021	Nominal	Persentase Percentage	
			%	%	Rp-juta Rp-million	%	
Beban umum dan administrasi General and Administrative Expenses	57.668	13.780	8,88	3,01	43.888	318,49	↑
Gaji dan imbalan lain bagi manajemen kunci Salaries and other remuneration for key management	20.060	9.854	3,09	2,15	10.206	103,57	↑
Total beban umum dan administrasi dari pihak-pihak berelasi Total General and Administrative Expenses from related parties	77.728	23.634	11,97	5,16	54.094	228,88	↑
Total beban umum dan administrasi Total General and Administrative Expenses	649.316	458.185			191.131	41,71	↑



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Penjelasan tentang kebijakan perusahaan dalam hal mekanisme review atas transaksi afiliasi/pihak berelasi, khususnya penjelasan tentang pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.

- a. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, perusahaan juga mengungkapkan informasi:
 1. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); dan
 2. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).
- b. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan;
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.
- c. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;
- d. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.

Company Policy Regarding Review Mechanism of Transactions and Compliance with Related Regulations and Provisions

Explanation of company policies in terms of review mechanisms for affiliated/related party transactions, particularly explanations regarding compliance with related rules and regulations.

- a. In the event that there is an affiliation, the company also discloses information:
 1. Board of Directors Statement, affiliated transactions have gone through adequate procedures to ensure they are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the arm's length principle; and
 2. Board of Commissioners and audit committee's role in carrying out adequate procedures to ensure the affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by fulfilling the arm's length principle.
- b. For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out routinely, repeatedly and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and carried out routinely, repeatedly, and/or continuously;

In the case of affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, information is added regarding references to disclosure in the said annual financial statements.

- c. For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions which are the implementation result of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions approved by the shareholders, information is added regarding the date of GMS that approves the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions;
- d. If there are no affiliated transactions and/or conflict of interest transactions, then this matter shall be disclosed.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Tidak terdapat peristiwa keuangan yang mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang yang terjadi di tahun 2022.

There were no financial events containing extraordinary and rare events that occurred in 2022.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations that Have Significant Effects on the Company

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 15 ayat 1 "Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT".
Republic of Indonesia Government Regulation Number 35 of 2021 Article 15 paragraph 1 "Employers are required to provide compensation money to Workers/Laborers whose work relationship is based on PKWT".

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Applicable Regulations and/or Legislation	:	Pengusaha dalam hal ini perusahaan wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja waktu tertentu ("PWT") apabila perjanjian berakhir dikarenakan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. The employer, in this case the Company, is obliged to provide compensation money to the specific time worker ("PWT") if the agreement ends due to the expiration of the work agreement period or the completion of a particular job.
Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on Companies	:	Pembayaran uang kompensasi kepada pekerja PWT di tahun 2022 sebesar Rp320.830.946,- Payment of compensation money to PWT workers in 2022 is Rp. 320.830.946,-
Dampak Kualitatif Terhadap Perusahaan Qualitative Impact on the Company	:	Perusahaan telah comply terhadap peraturan perundang-undangan. The Company has complied with laws and regulations.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 pasal 18 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
Government Regulation Number 45 of 2015 article 18 paragraph 3 concerning Implementation of the Pension Guarantee Program.

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Applicable Regulations and/or Legislation	:	- BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar satu (1) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat 3). - BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tersebut paling lama satu (1) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat 4). - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2022 naik sebesar 3.69% (Berita Resmi Statistik BPS No. 14/02/Th. XXV, tanggal 07 Februari 2022). - Batasan upah tertinggi sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun sejak bulan Maret 2022 adalah Rp9.077.600,-. - BPJS Employment annually adjusts the highest wage by using a multiplier factor of one (1) plus the annual growth rate of the previous year's gross domestic product (Article 29 paragraph 3). - BPJS Employment stipulates and announces the adjustment of the wage limit no later than one (1) month after the institution in charge of government affairs in the field of statistics announces the gross domestic product data (Article 29 paragraph 4). - The Central Bureau of Statistics (BPS) has announced the growth of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) in 2022 to increase by 3.69% (Official Statistical Gazette of BPS No. 14/02/Th. XXV, dated February 07, 2022). - The highest wage limit as the basis for calculating the Pension Security Contribution since March 2022 is Rp9,077,600,-.
Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on Companies	:	Perusahaan menyetorkan iuran manfaat jaminan pensiun ("JP") kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan porsi iuran yaitu 2% bagi perusahaan dan 1% dari Basic Salary masing-masing pekerja (PWTT dan PWT) dengan batasan maksimum pengenaan iuran manfaat jaminan pensiun sebesar Rp9.077.600,-. The Company deposits pension benefits contributions ("JP") to BPJS Employment with a contribution portion of 2% for the Company and 1% of each employee's Basic Salary (PWTT and PWT) with a maximum limit for the imposition of pension benefits contributions of Rp9,077,600,-.
Dampak Kualitatif Terhadap Perusahaan Qualitative Impact on the Company	:	Perusahaan telah comply terhadap peraturan perundang-undangan. The Company has complied with laws and regulations.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK/04.00/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Terhadap Jabatan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.
Republic of Indonesia Manpower Minister Circular Letter Number M/5/HK/04.00/VII/2019 dated July 22, 2019 Concerning the Compulsory Implementation of Competency Certification for Positions in the Field of Human Resource Management.

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Applicable Regulations and/or Legislation	:	Penjelasan atas peraturan yaitu dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia ("SDM") Perusahaan yang kompeten, kompetitif, beretika, dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta guna membangun hubungan industrial yang harmonis di perusahaan diperlukan bagian SDM/<i>Human Resources Department</i> ("HRD") yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kemenaker sebagai instansi pembina teknis bidang dibidang Manajemen SDM memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang SDM/HRD 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Surat Edaran. Explanation of the regulations, namely in the framework of creating a competent, competitive, ethical, and compliant Company Human Resources ("HR") and in order to build harmonious industrial relations in the Company, an HR/Human Resources Department ("HRD") section is needed which has the competence in accordance with Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI). The Manpower Ministry as a technical advisory agency in the field of HR Management imposes a mandatory competency certification for workers who hold HR/HRD positions for 2 (two) years from the issuance of the Circular Letter.
Dampak Kuantitatif Terhadap Perusahaan Quantitative Impact on Companies	:	Tidak memiliki dampak secara kuantitatif kepada Perusahaan Have no quantitative impact on the Company
Dampak Kualitatif Terhadap Perusahaan Qualitative Impact on the Company	:	Perusahaan telah comply terhadap peraturan perundang-undangan. The Company has complied with laws and regulations

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies Significantly Affecting the Company



Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan, dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK 22 "Bisnis Kombinasi" tentang acuan kerangka konseptual pelaporan keuangan;
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak;
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 69 "Agrikultur".

Sehubungan dengan amendemen PSAK 71, 55, 60, 62 dan 73, Perusahaan saat ini memiliki pinjaman jangka panjang yang mengacu pada *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") dan *Dolar AS London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") dan berlaku setelah tahun 2022 atau paling lambat tanggal ketika JIBOR dan LIBOR tidak lagi tersedia. Pada tanggal 31 Desember 2022, tolok ukur alternatif belum ditentukan.

Implementation of the following standards, amendments and annual adjustments starting on or after January 1, 2022 did not result in changes to the Company's accounting policies, and had no material impact on the amounts reported in the current or prior periods:

- Amendments to PSAK 22 "Business Combinations" regarding the reference for the conceptual framework of financial reporting;
- Amendments to PSAK 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" regarding onerous contracts - the cost of fulfilling contract;
- Annual adjustment of PSAK 71 "Financial Instruments";
- Annual adjustment of PSAK 73 "Lease";
- Annual adjustment of PSAK 69 "Agriculture".

In connection with the amendments to PSAK 71, 55, 60, 62 and 73, the Company currently has long-term loans that refer to the *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") and *US Dollar London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") and are valid after 2022 or at the latest the date when JIBOR and LIBOR are no longer available. As of December 31, 2022, alternative benchmarks have not been determined.

Informasi Kelangsungan Usaha

Information on Business Continuity

Hal-hal yang Berpengaruh Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan di Tahun 2022

Kelangsungan usaha PTK secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perusahaan telah melakukan tinjauan untuk menetapkan asumsi-asumsi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha berdasarkan kinerja historis dan analisis kemampuan Perusahaan.

Sepanjang tahun 2022, PTK memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan PTK yang SEHAT dan kinerja positif sepanjang tahun. Adapun kendala yang timbul hingga memengaruhi pencapaian target Perusahaan tidak sampai mengganggu kinerja operasional dan kinerja keuangan sehingga PTK dapat melaksanakan seluruh kewajibannya.

Asesmen Manajemen atas Hal-hal Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Manajemen menilai bahwa PTK memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelangsungan usaha Perusahaan akan dapat terjamin dengan baik dan berkelanjutan. Manajemen menilai dengan kinerja keuangan yang positif dari tahun ke tahun memberikan prospek dan jaminan positif terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan ke depan. Selain itu, Perusahaan juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ("SDM"), aktivitas operasional serta fungsi pendukung bisnis lainnya. Dengan berbagai strategi dan upaya yang dilakukan, PTK berkeyakinan dapat terus menjaga kelangsungan usaha serta meningkatkan kontribusi kepada PT Pertamina (Persero).

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen

Asumsi yang menjadi dasar manajemen dalam meyakini kelangsungan usaha PTK di antaranya adalah kinerja dan kondisi keuangan PTK yang sehat; kepuasan pelanggan masih dipertahankan; terkait perkara pengadilan, gugatan hukum, atau masalah serupa dikelola dapat diselesaikan dengan baik; serta opini audit dari auditor yang memiliki reputasi.

Matters Affecting the Continuity of the Company's Business in 2022

The continuity of the PTK business is generally influenced by various factors, both internal and external. The Company has conducted reviews to determine assumptions that may affect the going concern of its business based on historical performance and analysis of the Company's capabilities.

Throughout 2022, PTK ensures that there are no matters that significantly affect the continuity of the Company's business. This can be seen from PTK's HEALTHY financial condition and positive performance throughout the year. The obstacles arising that affect the achievement of the Company's targets do not interfere with operational performance and financial performance so that PTK can carry out all its obligations.

Management's Assessment of Matters with the Potential to Significantly Affect the Company's Business Continuity

Management considers that PTK has better growth potential. This indicates that the continuity of the Company's business will be well guaranteed and sustainable. Management assesses that positive financial performance from year to year provides positive prospects and guarantees for the Company's business continuity going forward. In addition, the Company also continuously improves the quality of Human Resources ("HR"), operational activities and other business support functions. With various strategies and efforts made, PTK believes it can continue to maintain business continuity and increase its contribution to PT Pertamina (Persero).

Assumptions Used by Management in Conducting Assessment

The assumptions that form the basis of management in believing in the continuity of PTK's business include the sound performance and financial condition of PTK; customer satisfaction is still maintained; related to court cases, lawsuits, or similar issues managed to be resolved properly; as well as an audit opinion from a reputable auditor.



Key Performance Indicator ("KPI")

Key Performance Indicator ("KPI")



Key Performance Indikator ("KPI") PTK sesuai Kontrak Manajemen antara Direksi dan Komisaris Perusahaan dengan Pemegang Saham menetapkan 5 (lima) perspektif sebagai berikut:

1. *Financial*
2. *Customer Focus*
3. *Internal Process*
4. *Learning & Growth*
5. *Boundary KPI*

Realisasi KPI tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Perihal Description	Persentase Percentage (%)
<i>Financial</i>	34,97
<i>Customer Focus</i>	16,00
<i>Internal Process</i>	36,13
<i>Learning & Growth</i>	16,16
<i>Boundary KPI</i>	(1,00)
Jumlah Total	102,26

PTK's Key Performance Indicators (KPI) in accordance with the Management Contract between the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and the Shareholders have established 6 (six) perspectives as follows:

1. Financial
2. Customer Focus
3. Internal Process
4. Learning & Growth
5. KPI Boundaries

KPI realization in 2022 is as follows:

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company's Soundness Level

Total Nilai Kinerja Perusahaan pada tahun 2022 sebesar 92,58 dengan klasifikasi "AA" (SEHAT) sesuai dengan RKAP yang sebesar 92,50 (AA).

The total value of the Company's performance in 2022 is 92.58 with the classification "AA" (HEALTHY) in accordance with the RKAP which is 92.50 (AA).

Berikut gambaran penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari aspek yang dinilai:

The following is an overview of the Company Health Level assessment from the assessed aspects:

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company's Soundness Level

	2022		2021	
	Pencapaian Achievement	Nilai Score	Pencapaian Achievement	Nilai Score
I. Kinerja Keuangan I. Financial Performance				
Imbalan kepada Pemegang Saham ("ROE") Return for Shareholders ("ROE")	25,50	20,00	18,18%	20,00
Imbalan Investasi ("ROI") Return on Investment ("ROI")	20,42	15,00	14,59%	15,00
Marjin Laba Operasi ("OPM") Operational Profit Margin ("OPM")	20,87	3,00	17,20%	3,00
Marjin Laba Bersih ("NPM") Net Profit Margin ("NPM")	15,32	3,00	13,96%	3,00
Rasio Kas Cash Ratio	31,20	4,00	40,32%	5,00
Rasio Lancar Current Ratio	105,48	4,00	107,67%	4,00
Periode Penagihan Piutang Accounts Receivable Collection Period	35 hari	1,50	72 hari	2,50
Perputaran Persediaan Inventories Turnover	0 hari	0,00	0 hari	0,00
Perputaran Total Aset Assets Turnover	59,33	3,00	50,47%	3,00
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Ratio of Own Capital to Total Assets	43,98	7,00	44,21%	7,00
Time Interest Earned Ratio ("TIER") Time Interest Earned Ratio ("TIER")	16,65	3,00	20,51	3,00
Nilai Kinerja Keuangan ("NKK") Financial Performance Score ("NKK")	66,00		65,50	
NKK Setelah diproporsionalkan NKK After being proportionalized	66,00		68,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Keuangan Financial Performance Level Classification	Sehat		Sehat	
II. Kinerja Pertumbuhan II. Growth Performance				
Assets Productivity Growth ("ASPG")	47,71	2,00	(6,66)	0,00
Sales Growth ("SALG")	25,89	2,00	24,29	2,00
Net Profit Margin Growth ("NPMG")	9,76	2,00	0,82	0,50
Sales to Total Assets Growth ("STAG")	19,74	2,00	(4,47)	0,00
Net Profit Growth ("NPG")	38,17	2,00	25,31	2,00
Nilai Kinerja Pertumbuhan ("NKP") Growth Performance Score ("NKP")	10,00		4,50	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Pertumbuhan Growth Performance Level Classification	Tumbuh Tinggi		Kurang Tumbuh	

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company's Soundness Level

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company's Soundness Level

	2022		2021	
	Pencapaian Achievement	Nilai Score	Pencapaian Achievement	Nilai Score
III. Kinerja Operasi III. Operational Performance				
Commission Days	105	5,00	101,49	3,00
HSSE	105	5,00	105,00	5,00
Nilai Kinerja Operasi ("NKO") Operational Performance Score ("NKO")	10,00		8,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Operasi Operational Performance Level Classification	Sangat Baik		Sangat Baik	
IV. Nilai Kinerja Administrasi IV. Administrative Performance Score				
Laporan Keuangan Perusahaan Bulanan Monthly Corporate Financial Report	7 hari	1,08	7 hari kalender	2,00
Laporan Manajemen Perusahaan Bulanan Monthly Corporate Management Report	≤16 hari	1,50	≤12 hari kalender	2,00
Laporan Keuangan Tahunan Audited Audited Financial Statements	bulan 2	3,00	bulan 1	3,00
Rancangan RKAP Work Plan and Budget	bulan 10	1,00	bulan 7	3,00
Nilai Kinerja Administrasi ("NKA") Administrative Performance Score	6,58		10,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Administrasi Administrative Performance Level Classification	Kurang Tertib		Tertib	
Kinerja Keuangan Financial Performance	66,00		68,00	
Kinerja Pertumbuhan Growth Performance	10,00		4,50	
Kinerja Operasional Operational Performance	10,00		8,00	
Kinerja Administrasi Administrative Performance	6,58		10,00	
Jumlah Nilai Kinerja Perusahaan Total Company's Performance Score	92,58		90,50	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Perusahaan Company Performance Level Classification	AA SEHAT		AA SEHAT	

Rencana Strategis 2022–2027

Strategic Plan 2022–2027



Adanya pandemi COVID-19 berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja perusahaan pada sektor energi, termasuk Perusahaan dengan bidang usaha industri perkapalan dan jasa *marine*. Beberapa *key issues* tren global dan tren domestik akibat Pandemi COVID-19 yang akan mempengaruhi industri perkapalan dan jasa *marine*, diantaranya:

- Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak negara menerapkan berbagai macam pembatasan terkait lepas sandar kapal ataupun proses pergantian awak kapal.
- Digitalisasi industri *marine* membutuhkan infrastruktur tambahan demi mendukung tren *e-commerce* yang terus berkembang.
- Pengembangan teknologi logistic digital melalui program pendampingan dan peningkatan integrasi data lebih ditingkatkan daripada akses pendanaan.
- Di Indonesia, diperkirakan kebutuhan energi akan kembali normal di tahun 2022. Kebutuhan bahan bakar minyak diproyeksikan akan tetap tumbuh meskipun dengan rata-rata pertumbuhan yang lebih lambat.

The existence of the COVID-19 pandemic has had a direct and indirect impact on the performance of companies in the energy sector, including the Company with the business sector of the shipping industry and marine services. Several key issues of global and domestic trends due to the COVID-19 Pandemic which will affect the shipping industry and marine services, include the following:

- The COVID-19 pandemic has caused many countries to implement various restrictions related to offshore ships or the process of changing crew members.
- The digitalization of the marine industry requires additional infrastructure to support the growing trend of e-commerce.
- The development of digital logistics technology through assistance programs and increased data integration is more enhanced than access to funding.
- In Indonesia, it is estimated that energy demand will return to normal in 2022. The need for fuel oil is projected to continue to grow although at a slower average growth rate.



Selain pandemi, meningkatnya issue terkait energi terbarukan juga turut mempengaruhi industri perkapalan dan jasa *marine*. Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang disertai dengan rencana peraturan terkait pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) menggunakan perusahaan pelayaran dan asuransi Indonesia mempengaruhi jasa keagenan kapal. Hal ini disebabkan industri perkapalan domestik belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kenaikan permintaan yang timbul akibat peraturan baru tersebut, sehingga keagenan kapal impor mengalami penurunan.

Strategi Perusahaan

Demi mewujudkan sasaran strategis di atas, maka pengembangan strategi korporat Perusahaan diarahkan sebagai berikut:

1. Jasa Perkapalan
 - a. Meningkatkan *operational excellence* yang mengutamakan aspek K3LL, kompetensi awak kapal, dan *standard Service Level Agreement* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
 - b. Penambahan jenis dan jumlah armada kapal milik untuk melayani segmen industri minyak & gas melalui sinergi grup Pertamina dan kemitraan strategis.
 - c. Diversifikasi basis pelanggan dalam lingkup grup Pertamina, KKKS, dan pasar potensial di sektor migas dan maritim.
 - d. Efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan kapal melalui beberapa program seperti:
 - i. Penerapan Preventive Maintenance armada kapal secara terkomputerisasi melalui Computerized Maintenance Management System (SAP Modul PM)
 - ii. *Predictive Maintenance* armada kapal melalui penerapan Transko Condition Maintenance System untuk memonitor kondisi peralatan kapal secara terkomputerisasi
 - iii. Pengembangan Kontrak Payung Pengadaan Barang & Jasa Pemeliharaan Kapal
 - e. Pemantauan dan pembaruan sertifikat laik laut kapal (*seaworthiness*) untuk menjaga serta mencapai target hari operasi kapal.
 - f. Divestasi kapal milik yang sudah tidak produktif dan fokus pada operasional kapal dengan prospektus pasar yang lebih menguntungkan.

Apart from the pandemic, increasing issues related to renewable energy have also affected the shipping industry and marine services. Government policies regarding the utilization of biofuels as other fuels accompanied by regulatory plans related to the transportation of CPO (*Crude Palm Oil*) using Indonesian shipping and insurance companies affect ship agency services. This is because the domestic shipping industry does not yet have sufficient capacity to handle the increase in demand arising from the new regulations, so that the agency for import ships has decreased.

Corporate Strategy

To realize the above strategic goals, the development of the Company's corporate strategy is directed as follows:

1. Shipping Services
 - a. Improving operational excellence by prioritizing OHSE aspects, ship crew competencies, and standard Service Level Agreements to meet customer needs.
 - b. Adding the type and number of owned fleets to serve the oil & gas industry segment through Pertamina group synergy and strategic partnerships.
 - c. Diversification of the customer base within the Pertamina group, PSC Contractors, and potential markets in the oil and gas and maritime sectors.
 - d. Efficiency of ship operating and maintenance costs through several programs such as:
 - i. Implementation of computerized fleet preventive maintenance through the Computerized Maintenance Management System (SAP PM Module)
 - ii. Predictive Maintenance of the fleet through the implementation of the Transko Condition Maintenance System to monitor the condition of ship equipment in a computerized manner.
 - iii. Development of Umbrella Contracts for the Procurement of Goods & Ship Maintenance Services
 - e. Monitoring and renewal of ship seaworthiness certificates to maintain and achieve target ship operating days.
 - f. Divestment of unproductive owned ships and focus on ship operations with more favorable market prospects.

Rencana Strategis 2022–2027
Strategic Plan 2022–2027

2. Jasa Marine

- a. Meningkatkan kualitas jasa keagenan kapal agar lebih cepat, efektif, dan efisien dengan tarif kompetitif melalui optimalisasi sistem informasi pada aspek pelayanan administrasi, suplai kebutuhan logistik kapal, serta penyelesaian disbursement.
- b. Mengembangkan kompetensi SDM dan menambah aset produksi dalam bisnis jasa *marine* seperti pengerukan alur pelayaran, pemeliharaan sarfas pelabuhan, teknik bawah air, suplai air baku untuk kapal & industri, penyediaan awak kapal, *ship management*, *waste management*, dan *bunker handling*.
- c. Menambah jumlah pelabuhan dalam bisnis *port operation services* melalui kegiatan *Recognized Security Organization* dan penerapan ISPS Code.

3. Jasa Logistik

- a. Menambah area kerja bidang kepelabuhanan melalui kemitraan dengan pemilik pelabuhan, khususnya pelabuhan strategis dengan aktivitas perkapalan yang sibuk dan frekuensi bongkar-muat yang tinggi.
- b. Membangun logistic shorebase yang berdekatan dengan wilayah eksplorasi blok migas lepas pantai Pertamina dan KKKS sebagai *one-stop services logistic shorebase* berstandar internasional.
- c. Menambah infrastruktur, aset produksi, dan peningkatan kompetensi SDM untuk kegiatan badan usaha pelabuhan (*freight forwarding*, *cargodoring*, *stevedoring*).

4. Digitalisasi

- a. Digitalisasi di seluruh mata rantai bisnis (*end to end*) untuk menunjang produktivitas dan kecepatan pengambilan keputusan.
- b. Meningkatkan *maritime cyber security awareness* pada awak kapal dan operator untuk keamanan pertukaran informasi elektronik.

5. Finansial

- a. Meningkatkan kelancaran arus kas perusahaan melalui restrukturisasi skema pinjaman dari eksternal.
- b. Mendapatkan sumber pendanaan melalui mitra strategis untuk investasi kapal dan proyek lainnya melalui skema pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tingkat suku bunga pinjaman yang terjangkau.
- c. Percepatan perolehan piutang macet untuk menjaga arus kas perusahaan.

2. Marine Services

- a. Improving the quality of ship agency services to make them faster, more effective and efficient at competitive rates through optimizing information systems in the aspect of administrative services, supplying ship logistics needs, and disbursement settlement.
- b. Developing HR competence and add production assets in the marine services business such as shipping channel dredging, port infrastructure maintenance, underwater engineering, raw water supply for ships & industry, crew provision, ship management, waste management, and bunker handling.
- c. Increasing the number of ports in the port operation services business through Recognized Security Organization activities and implementing the ISPS Code.

3. Logistics Services

- a. Increasing the work area in the port sector through partnerships with port owners, especially strategic ports with busy shipping activities and high frequency of loading and unloading.
- b. Building a shorebase logistics adjacent to the Pertamina and PSC Contractors' offshore oil and gas exploration areas as one-stop shorebase logistics services with international standards.
- c. Adding infrastructure, production assets, and increasing HR competencies for port business entity activities (*freight forwarding*, *cargodoring*, *stevedoring*).

4. Digitalization

- a. Digitalization throughout the business chain (*end to end*) to support productivity and speed of decision making.
- b. Increasing maritime cyber security awareness among ship crews and operators for the security of electronic information exchange.

5. Financial

- a. Increasing the smoothness of the Company's cash flow through restructuring of external loan schemes.
- b. Obtaining funding sources through strategic partners for ship investment and other projects through short-term, medium-term, and long-term financing schemes with affordable loan interest rates.
- c. Accelerating the acquisition of bad debts to maintain the Company's cash flow.



6. Organisasi dan Manajemen Portofolio a. Transformasi budaya organisasi yang <i>agile</i> dan kompetitif guna menghadapi dunia persaingan yang VUCA. b. Mengembangkan organisasi serta <i>workforce planning</i> yang mendukung perkembangan bisnis yang selaras dengan arah bisnis induk perusahaan. c. Meningkatkan <i>Strategic People Development & Management</i>. d. Optimalisasi portofolio Anak Perusahaan. 7. Citra Perusahaan a. Penerapan GCG seluruh pekerja untuk komitmen integritas, kepatuhan terhadap hukum, hubungan & lingkungan kerja, serta konflik kepentingan sesuai Tata Nilai AKHLAK. b. Memperluas <i>customer referral & social awareness</i> melalui penggunaan brand "Transko" sebagai identitas perusahaan dalam kegiatan bisnis korporat dan sosial perusahaan pada <i>platform</i> multimedia. c. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan komunitas melalui program CSR dan edukasi.	6. Portfolio Organization and Management a. Transformation of an agile and competitive organizational culture to face the world of VUCA competition. b. Developing an organization and workforce planning that supports business development in line with the main company's business direction. c. Improving Strategic People Development & Management. d. Optimizing the portfolio of Subsidiaries. 7. Corporate Image a. Implementation of GCG by all employees for commitment to integrity, compliance with laws, relations & work environment, as well as conflicts of interest in accordance with AKHLAK Values. b. Expanding customer referrals & social awareness by using the "Transko" brand as a corporate identity in the Company's corporate and social business activities on multimedia platforms. c. Taking on an active role in social and community development activities through CSR and education programs.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Resources Management



Profil dan Komposisi Pekerja

Hingga 31 Desember 2022, jumlah pekerja PTK mencapai 3.978 orang, mengalami kenaikan 121,25% dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 1.798 orang. Kenaikan ini disebabkan oleh terdapatnya proses reorganisasi *New PTK* dengan bergabungnya organisasi Marine Pertamina ke PTK, sehingga jumlah pekerja bertambah dengan penambahan pekerja perbantuan dari *holding* ke PTK.

Perencanaan Tenaga Kerja

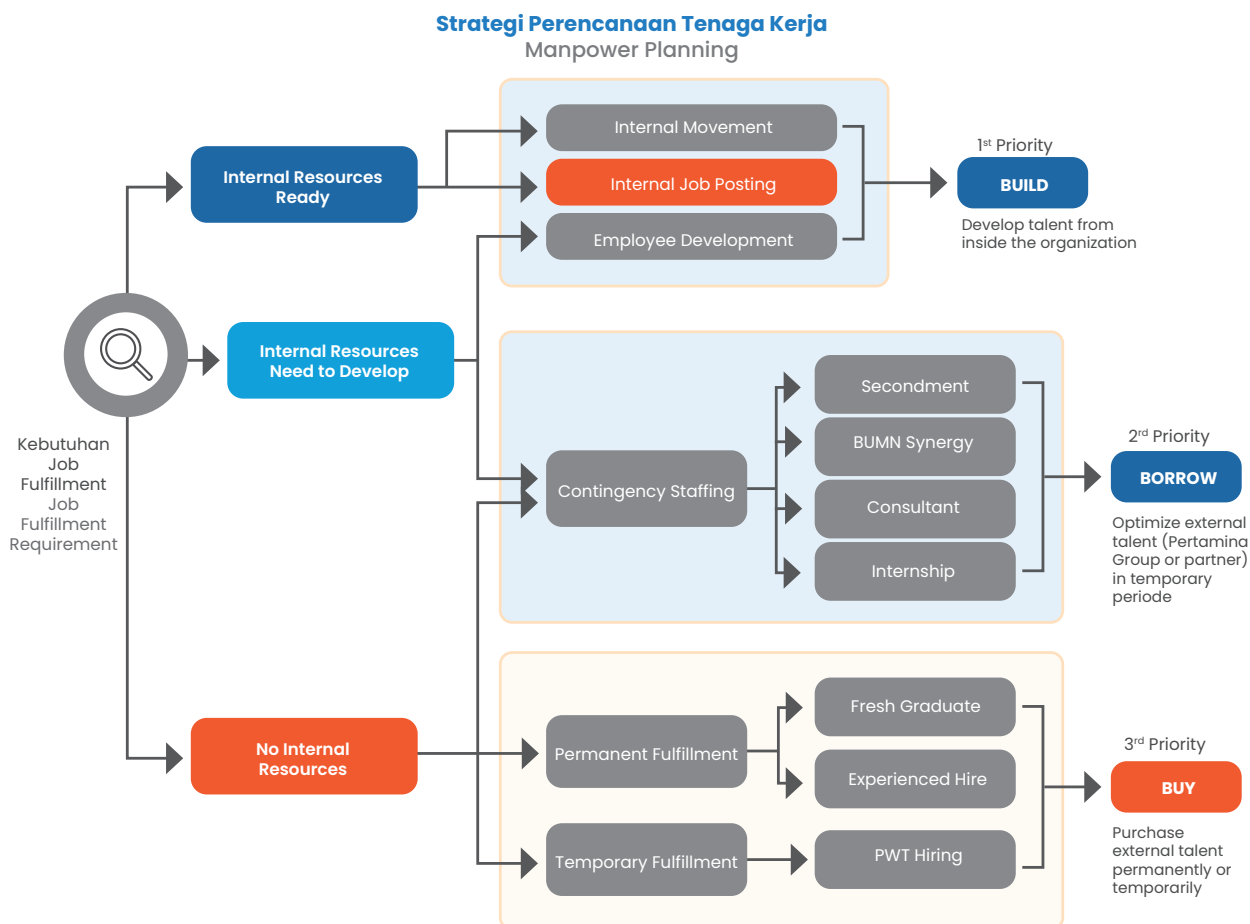
Perencanaan tenaga kerja setiap tahunnya dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan bisnis perusahaan. Terdapat 3 (tiga) strategi pemenuhan tenaga kerja yang diterapkan. Pertama, melalui pengembangan *talent* dari internal organisasi (*Build*); kedua, melalui mekanisme perbantuan baik dari lingkup Pertamina Group maupun BUMN lainnya (*Borrow*); ketiga, melalui mekanisme rekrutmen pekerja waktu tidak tertentu ("PWTT") baik secara *fresh graduate*, *experienced hire*, maupun rekrutmen pekerja waktu tertentu ("PWT").

Worker Profile and Composition

As of December 31, 2022, total PTK employees reached 3,978 employees, an increase of 121.25% compared to 2021 of 1,798 employees. This increase was due to the *New PTK* reorganization process with the joining of the Marine Pertamina organization to PTK, thus total employees increased with the addition of auxiliary employees from holding to PTK.

Manpower Planning

Manpower planning is evaluated annually according to organizational needs and the Company's business development. There are 3 (three) workforce fulfillment strategies implemented. First, through talent development from the internal organization (*Build*); secondly, through an assistance mechanism from both the Pertamina Group and other SOEs (*Borrow*); third, through the mechanism of employees' recruitment for Unspecified Time Employee ("PWTT"), both fresh graduates, experienced hire, and employees' recruitment for a specific time ("PWT").



Pada akhir tahun 2022, *vacancy rate* PTK berada di angka 15,6%. Kondisi ini masih berada pada *range vacancy rate* optimal Pertamina di angka 11% - 15%. Namun demikian, dalam rangka penguatan organisasi untuk mendukung perubahan bisnis dan organisasi sesuai reklasterisasi bisnis serta reorganisasi SH IML, PTK telah mengajukan rencana rekrutmen tenaga kerja untuk tahun 2023 sejumlah 35 posisi yang terdiri dari tenaga *fresh graduate* dan juga *experienced hire*. Rencana rekrutmen ini akan dilakukan secara bersama melalui rekrutmen bersama BUMN dan juga secara mandiri dalam lingkup SH IML.

Rekrutmen pekerja baru berfungsi untuk melakukan regenerasi serta memberikan keseimbangan komposisi pekerja. PTK menyusun program rekrutmen yang komprehensif serta memerhatikan faktor lainnya agar jumlah pekerja yang ada dapat memengaruhi efisiensi kinerja Perusahaan.

At the end of 2022, the PTK vacancy rate was at 15.6%. This condition was still in Pertamina's optimal vacancy rate range of 11% - 15%. However, in order to strengthen the organization to support business and organizational changes in accordance with business reclusterization and SH IML reorganization, PTK has proposed a workforce recruitment plan for 2023 in a total of 35 positions consisting of fresh graduates and also experienced hires. This recruitment plan will be carried out jointly through recruitment with SOEs and also independently within the scope of SH IML.

Recruitment of new employees serves to regenerate and balance the employees composition. PTK prepares a comprehensive recruitment program and pays attention to other factors thus total existing employees may affect the efficiency of the Company's performance.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management

PTK menjunjung tinggi asas kesetaraan kesempatan dalam proses rekrutmen tanpa adanya unsur diskriminasi. Oleh karenanya rekrutmen pekerja PTK dilakukan secara terbuka bagi siapapun. Untuk mendapatkan calon pekerja yang berkualitas terbaik, PTK melakukan rekrutmen secara internal dan eksternal.

Pelaksanaan rekrutmen terakhir dilakukan di tahun 2020 dengan jumlah pekerja baru mencapai 50 (lima puluh) orang. Sementara sesuai kebijakan dari holding dan SH IML, tidak dilakukan rekrutmen pekerja pada tahun 2021 dan 2022. Rencana pelaksanaan rekrutmen berikutnya akan dilakukan di tahun 2023.

PTK upholds the principle of equal opportunity in the recruitment process without any element of discrimination. Therefore, PTK employees' recruitment is carried out openly to anyone. To get the best qualified job candidates, PTK conducts recruitment internally and externally.

The last recruitment was carried out in 2020 with total new employees reaching 50 (fifty) employees. Meanwhile, according to the policies of holding and SH IML, no employee recruitment carried out in 2021 and 2022. The next planned recruitment will be carried out in 2023.

Komposisi Pekerja Baru PTK Periode 2020–2022 (orang)

PTK Composition of New Employees for the 2020–2022 Period (people)

Perihal Subject	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021–2022	
				Selisih Difference	%
Laki-laki Male	–	–	36	–	–
Perempuan Female	–	–	14	–	–
Jumlah Total	–	–	50	–	–

Tingkat Turnover Pekerja

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat *turnover* pekerja sehingga tidak berpengaruh terhadap jalannya operasi Perusahaan. Namun demikian terdapat dinamika pada tahun 2022, sehingga tingkat *turnover* pekerja menjadi sebesar 0,13% atau terdapat 5 (lima) pekerja pada level staff/senior staff atau pada jabatan *non critical* yang mengundurkan diri. PTK telah memasukkan rencana rekrutmen pekerja tahun 2023 untuk mengatasi kekosongan jabatan yang ditinggalkan. Berikut ini kami sajikan statistik komparatif dalam tiga tahun terakhir:

Employee Turnover Rate

Throughout 2021, there was no employee turnover so that it did not affect the Company's operations. However, there are dynamics in 2022, so that the employee turnover rate is 0.13% or there are 5 (five) employees at the staff/senior staff level or non-critical positions who have resigned. PTK has included a worker recruitment plan for 2023 to address the vacancies position left behind. Below we present comparative statistics in the last three years:

Jumlah Turnover Pekerja 2020–2022

Total Employee Turnover 2020–2022

Perihal Subject	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021–2022	
				Selisih Difference	%
Jumlah Pekerja (orang) Total Workers (people)	3.978	1.798	898	2.180	121,25 ↑
Pekerja Mengundurkan Diri (orang) Resigned Workers (people)	5	–	5	5	100,00 ↑
Turnover Pekerja (%) Employee Turnover (%)	0,13	–	0,56	0,13	↑

Pemetaan Kebutuhan Pengembangan SDM

Dalam pengembangan kompetensi Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh manajemen dan pekerja berdasarkan kebutuhan jenjang jabatan. Selama tahun 2022 beragam pelatihan dan sertifikasi telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan tertentu, sesuai kompetensi yang diperlukan masing-masing pekerja.

Berikut adalah pemetaan kebutuhan training berdasarkan level jabatan dan realisasi selama tahun 2022.

Training Berdasarkan Level Jabatan dan Realisasi Tahun 2022

Training Based on Position Level and Realization in 2022

Level Jabatan Position Level	Jumlah Pelatihan Total Training		Tujuan Objective
	Rencana Plan	Realisasi Realization	
Eksekutif Executive	8	12	Meningkatkan <i>skill</i> dan <i>knowledge</i> sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan. Improve skills and knowledge in accordance with the competency needs of the position.
Manager/Setara Manager/Equivalent	15	17	
Sr. Analyst/Sr. Officer/Setara Sr. Analyst/Sr. Officer/Equivalent	25	35	
Analyst/Officer/Setara Analyst/Officer/Equivalent	30	35	
Jr. Analyst/Jr. Officer/Setara Jr. Analyst/Jr. Officer/Equivalent	35	44	

Pelatihan dan Pengembangan

Secara berkesinambungan Perusahaan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pekerja Perusahaan mewujudkannya dengan menyelenggarakan pelatihan bagi para pekerja. Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) jenis program pengembangan pekerja yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pekerja yang memiliki kompetensi, kemampuan serta *know-how* untuk menampilkan kinerja yang mendukung pencapaian strategi perusahaan.

1. Program Pengembangan *General* (*General Program*).
Program ini ditujukan kepada seluruh Pekerja PTK dan berfokus pada pengembangan kompetensi dan keahlian pekerja guna memenuhi gap kompetensi pekerja di jabatannya saat ini.
2. Program Pengembangan *Talent* (*Talent Development*).
Program ini ditujukan kepada para *Talent/Successor* dan pekerja baru PTK dengan tujuan:
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pada *talent/successor* dalam rangka menyiapkan pada *talent/successor* agar dapat menampilkan kinerja yang optimal pada jabatan yang lebih tinggi (*Talent Readiness*).

Mapping HR Development Needs

In developing competence, the Company provides equal opportunities to all management and employees based on the needs of the position level. During 2022 various training and certifications have been carried out to meet specific skill requirements according to the competencies required of each worker.

The following is a mapping of training needs based on a position level and realization for 2022.

Training and development

On an ongoing basis, the Company continues to improve the competence and capabilities of its employees. The Company makes this happen by organizing training for employees. The Company organizes 2 (two) types of employee development programs that aim to ensure the availability of employees with the competence, ability and know-how to perform in a way that supports the achievement of the Company's strategy.

1. General Development Program (*General Program*).
This program is aimed at all PTK employees and focuses on developing employee competencies and skills to meet the competency gaps of workers in their current positions.
2. Talent Development Program.

This program is aimed at Talents/Successors and new PTK employees with the aim of:
 - a. Develop and improve the competence of talents/successors to prepare talents/successors so they can show optimal performance in higher positions (*Talent Readiness*).

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management

- b. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pekerja baru agar menjadi *early professional* di bidangnya serta mengidentifikasi pekerja potensial yang akan dimasukkan ke dalam *talent acceleration pool*.

Technical Training Program

Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan dengan *scope* kegiatan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya *crew* secara jumlah dan sertifikasi (COC, COP) sesuai dengan regulasi serta ketepatan waktu pemenuhannya.
 - a. Pemberdayaan *crew* PWTT.
 - b. *Sourcing* melalui *crew Agent* dengan mengutamakan sinergi bersama anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis *crew agent*.
 - c. Merekrut pelaut-pelaut dengan mensyaratkan terpenuhinya sertifikasi sesuai regulasi serta kecakapan yang dibutuhkan dengan dituangkan ke dalam kontrak *crew agent*.
2. Penyiapan kader-kader pelaut yang terbaik untuk operasional kapal dan pemenuhan *talent management* darat dengan *background shipping* sesuai bisnis inti Perusahaan di masa yang akan datang.
3. Mempertahankan pelaut dengan memberikan sistem remunerasi menarik yang bersaing dengan industri perkapalan sejenis.
 - a. Pemberian *Bonus Performance Crew*.
 - b. Pemberian kompensasi *overstay* awak kapal akibat kebijakan pencegahan COVID-19.

Training Lainnya/Realisasi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan *leadership skill*, jabatan manajerial telah mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan, di antaranya:

Training untuk Jabatan Manajerial
Training for Managerial Positions

Nama Program/Training/ Seminar Name of Program/ Training/Seminar	Waktu Pelaksanaan Time	Jabatan Position	Jumlah Peserta Number of participants	Pelaksana Organizer	Lokasi Location
<i>Leadership SUPREME Mandatory Training</i>	Januari – Desember 2022 January – December 2022	VP dan Manager VPs and Managers	28	HSE Training Center	Jakarta (Online/ Offline)
<i>Workshop Amandemen- PTK 007 Revisi 4 Amendment Workshop- PTK 007 Revision 4</i>	13 – 14 Januari 2022 January 13 – 14, 2022	Manager Procurement & Logistic	1	PT Tender Indonesia Commercial	Jakarta (Online)

- b. Develop and improve the competence of new employees to become early professionals in their fields and identify potential workers who will be included in the talent acceleration pool.

Technical Training Program

Technical competence development is carried out with the following scope of activities:

1. Fulfillment of *crew* in terms of number and certification (COC, COP) according to regulations and timely fulfilment.
 - a. Empowerment of PWTT crew.
 - b. *Sourcing* through *crew agents* by prioritizing synergy with subsidiaries engaged in the *crew agent* business.
 - c. Recruiting seafarers by requiring the fulfilment of certification according to regulations and the skills needed as outlined in the *crew agent* contract.
2. Preparing the best sailor cadres for ship operations and fulfilment of onshore talent management with a shipping background according to the Company's core business in the future.
3. Retain seafarers by providing an attractive remuneration system that competes with similar shipping industries.
 - a. Provision of Performance Crew Bonuses.
 - b. Provision of crew *overstay* compensation due to the COVID-19 prevention policy.

Other Trainings/Realization

In order to improve competency and leadership skills, managerial positions have participated in several trainings and educations, including:

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management

Training untuk Jabatan Manajerial
Training for Managerial Positions

Nama Program/Training/ Seminar Name of Program/ Training/Seminar	Waktu Pelaksanaan Time	Jabatan Position	Jumlah Peserta Number of participants	Pelaksana Organizer	Lokasi Location
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Settlement of Business Disputes Through Arbitration	16 Februari 2022 February 16, 2022	CAE, VP SPBD, VP Finance, VP Fleet & Ship Management, Mgr Legal Counsel, Mgr Business Plan, Commercial & Business Support IA, Mgr BMA, Mgr CCMS, Mgr Procurement & Logistic	9	PT Pertamina Trans Kontinental	Jakarta (Online)
<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices – The Power of Corporate Culture in Driving Corporate Performance</i>	18 Maret 2022 March 18, 2022	VP HSSE	1	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
<i>Executive Education – Directorship Program "High Performance Boards"</i>	22 – 25 Maret 2022 March 22 – 25, 2022	CAE, VP Fleet & Ship Management	2	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices – Merger, Acquisition & Strategic Alliances</i>	31 Maret 2022 March 31, 2022	VP SPBD	1	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
Certification Cohort 3	26 Maret – 02 Juli 2022 March 26 – July 02, 2022	Manager HC Strategic	1	ASEAN Human Development Organisation	Jakarta (Online)
Training & Sertifikasi Public Speaking Public Speaking Training & Certification	30 Mei – 02 Juni 2022 May 30 – June 02, 2022	Chief Audit Executive	1	PCU	Jakarta (Online)
12th Indonesia HR Summit (IHRS) 2022	28 – 29 Juni 2022 June 28 – 29, 2022	Manager HC Strategic	1	PT Multi Taruna Sejati	Bali
Konferensi Auditor Internal, Wisuda Sertifikasi Profesi, dan Munas FKSPI 2022 Internal Auditor Conference, Professional Certification Graduation, and 2022 FKSPI National Conference	29 Juni – 01 Juli 2022 June 29 – July 01, 2022	CAE, Manager Business Plan, Commercial & Business Support IA	2	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation	Yogyakarta
ESG Foundation	08 Juli 2022 July 08, 2022	CAE, VP Legal & Relation, VP SPBD, VP HSSE, VP ME, VP Fleet & Ship Mgt, VP Marketing, VP MRCOS, Sr. Manager Marine Operation Area JBBT, Mgr Relation, Mgr Business Plan, Commercial & Business Support IA, Manager HSSE Regulation & System Mgt, Mgr Vessel Vetting Inspector & TMSA Audit, Mgr IT, Mgr HCS, Mgr BMA, Mgr MOS, Mgr Business Support Reg I & II, Mgr Area Marine HSSE Reg I & III, Head of Bagus Kuning Dockyard	22	PT LAPI ITB	Jakarta (Online)
CSO ISPS Code	18 – 20 Juli 2022 July 18 – 20, 2022	Head of Port & Fleet Security	1	BKI Academy	Jakarta (Online)
<i>Executive Seminar on Business</i>	28 Juli 2022 July 28, 2022	Manager HSSE Regulation & System Management, Mgr Strategic Planning, Mgr HCS	3	FEBINDO dan IICD	Jakarta (Offline)

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources ManagementTraining untuk Jabatan Manajerial
Training for Managerial Positions

Nama Program/Training/ Seminar Name of Program/ Training/Seminar	Waktu Pelaksanaan Time	Jabatan Position	Jumlah Peserta Number of participants	Pelaksana Organizer	Lokasi Location
<i>Certified Risk Associate (CRA)</i>	27 – 28 Agustus 2022 August 27 – 28, 2022	Manager Operation & Fleet Management IA	1	PT Utama Hanriz Indonesia	Jakarta (Online)
<i>Certified Risk Professional (CRP)</i>	27 Agustus – 04 September 2022 August 27 – September 04, 2022	Manager Operation & Fleet Management IA	1	PT Utama Hanriz Indonesia	Jakarta (Online)
Amazing Slide Presentation & Infographic	29 – 31 Agustus 2022 August 29 – 31, 2022	Manager HC Strategic	1	PT Pertamina International Shipping	Jakarta (Online)
Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices – Driving Sustainable Growth Through Supply Chain Resilience	03 Oktober 2022 October 03, 2022	VP Marketing	1	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices – Business Growth Through Merger, Acquisition & Strategic Alliances</i>	10 Oktober 2022 October 10, 2022	CAE, Manager Business Plan, Commercial & Business Support IA, Manager Business Development	3	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
Training Internal Audit of ISO 37001:2016	17 – 18 Oktober 2022 October 17 – 18, 2022	Manager Operation & Fleet Management IA, Manager Business Plan, Commercial & Business Support IA, Manager Procurement & Logistic, Manager Sales & Marketing, Manager Agency Services, Manager Relation	6	PT TUV NORD Indonesia	Kantor Pusat PTK, Jakarta
Seminar Nasional Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) National Seminar on Corruption Crimes (TIPIKOR) Procurement of Goods and Services (PBJ)	20 – 21 Oktober 2022 October 20 – 21, 2022	VP Marine Regulatory, Compliance & Operation, Manager Procurement & Logistic	2	Komite Anti Korupsi Indonesia	Jakarta (Offline)
<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices – Investment Strategies and Portfolio Management</i>	28 Oktober 2022 October 28, 2022	VP Strategic Planning & Business Development, VP Marketing, Manager Business Development	3	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)

Biaya Program Pengembangan Pekerja

Berikut adalah jumlah pelatihan, peserta serta biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan hingga akhir tahun 2022.

Employee Development Program Costs

The following shows the number of trainings, participants and costs incurred by the Company until the end of 2022.

Perihal Subject	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022	
				Selisih Difference	%
Jumlah Pelatihan (pelatihan) Total Training	46	43	42	3	6,98
Peserta (orang) Participant (person)	1.739	1012	1.029	727	71,84
Biaya (Rp-juta) Cost (Rp-million)	1.710	1.597	2.277	113	7,08

Sistem Program Pengembangan Pekerja

Pengelolaan atau pembinaan SDM PTK menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki SDM yang andal. Dalam hal pembinaan SDM, perusahaan telah menyiapkan:

1. Sistem *career path* pekerja, pembuatan *career path* tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pencarian dan pemilihan kandidat dalam proses *Succession Planning* serta tersedianya pemimpin dan pekerja berkualitas;
2. Sistem *talent pool* sebagai salah satu alat pembinaan;
3. *Talent Management System*, merupakan inisiatif strategis fungsi HR. PTK telah mempersiapkan pembuatan penyusunan *Talent Management System*.

Career Path

Dalam rangka mendorong tercapainya *high performance organization*, Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap jabatan telah diisi oleh pekerja yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Evaluasi penempatan pekerja (*placement*) pada prinsipnya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen pekerja melalui proses *Job Person Mapping* ("JPM") serta PRL Pribadi yang merupakan refleksi dari *exposure*, pengalaman dan kapasitas pekerja.

Perusahaan menyadari bahwa mengingat besarnya organisasi, jumlah jabatan dan populasi pekerja, serta mempertimbangkan bahwa penempatan pekerja dalam implementasi RPSDM merupakan perubahan yang sangat mendasar dibandingkan proses penempatan sebelumnya. Dengan demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kondisi yang belum ideal, di mana tidak semua jabatan dapat diisi oleh pekerja yang sesuai/ tidak ada *gap* dalam kapasitas dan kapabilitasnya.

Employee Development Program System

PTK HR management or development is a form of long-term investment for the Company. This aims to ensure that the Company has reliable human resources. In terms of HR development, the Company has prepared the following:

1. Employee career path system, the creation of the career path aims to speed up the process of finding and selecting candidates in the Succession Planning process as well as the availability of quality leaders and employees;
2. The talent pool system as a coaching tool;
3. Talent Management System, a strategic initiative of the HR function. PTK has prepared the preparation of Talent Management System.

Career Path

To encourage the achievement of a high-performance organisation, the Company conducts evaluations to ensure that workers have filled each position with the appropriate capacities and capabilities. Evaluation of worker placement is principally carried out by considering the results of the employee assessment through the Job Person Mapping ("JPM") process and Personal PRL, which reflects the worker's exposure, experience and capacity.

The Company realises that given the organisation's size, number of positions and population of workers, the placement of workers in the RPSDM implementation is a very fundamental change compared to the previous placement process. Thus, in practice, there are still conditions that are not ideal, where not all positions can be filled by appropriate workers/there are no gaps in capacity and capability.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management

Talent Pool

Sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap implementasi *talent management*, maka salah satu langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan memetakan pekerja yang masuk sebagai *Talent Pool*. *Talent Pool* adalah kelompok pekerja yang diidentifikasi sebagai talenta terbaik yang memenuhi kriteria *performance*/nilai kinerja dan potensi/kompetensi yang dipersyaratkan Perusahaan.

Pada prinsipnya *Talent Pool* digunakan perubahan untuk dasar penetapan *successor list* jabatan di PTK dan AP serta dasar penetapan program pengembangan pekerja. Sejalan dengan reorganisasi SH IML, saat ini PTK sedang menyusun *Competency-based talent pool system* PTK Group yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam memetakan *talent* sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan bisnis. Sistem ini juga akan membantu dalam program pengembangan pekerja sesuai kebutuhan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

Talent Pool

As a form of the Company's commitment to implementing talent management, one of the first steps is identifying and mapping employees who enter the Talent Pool. The Talent Pool is a group of workers identified as the best talents who meet the performance criteria/performance values and potential/competencies required by the Company.

In principle, the Talent Pool is used for changes as the basis for determining the successor list of positions in PTK and AP as well as the basis for determining the employee development programs. In line with the reorganization of SH IML, PTK is currently compiling a Competency-based talent pool system for PTK Group which aims to assist management in mapping talent according to competencies and business needs. This system will also assist in employee development programs according to the required job competency requirements

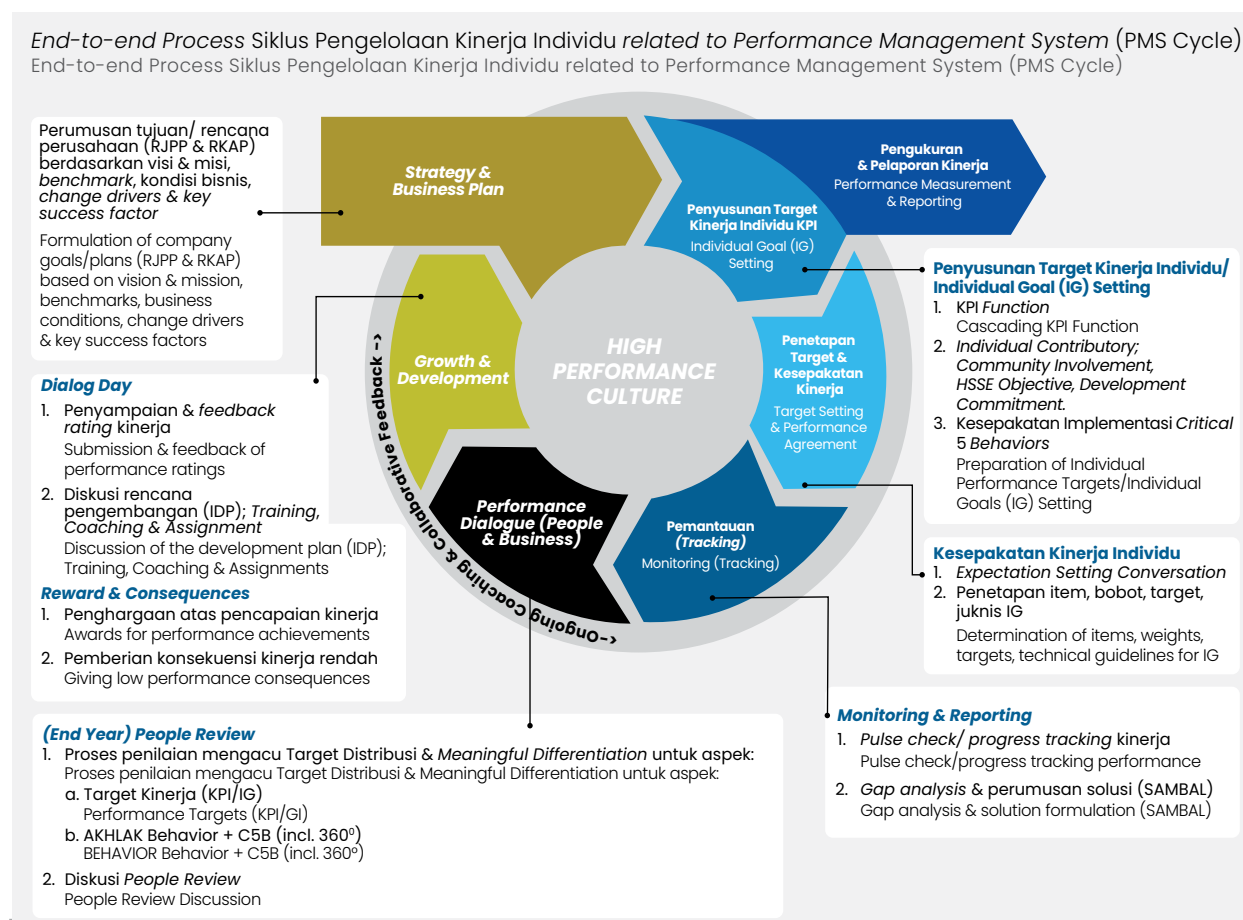
Pengelolaan Kinerja Individu

Individual Performance Management

Pengelolaan Kinerja Individu dalam Performance Management System

Individual Performance Management in the Performance Management System

End-to-end Process Siklus Pengelolaan Kinerja Individu related to Performance Management System (PMS Cycle)
End-to-end Process Siklus Pengelolaan Kinerja Individu related to Performance Management System (PMS Cycle)



Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Resources Management

Pengelolaan kinerja individu merupakan suatu siklus dari *performance management system* ("PMS") yang dimulai dari proses identifikasi dan penyusunan *Key Performance Indicator* ("KPI")/*Individual Goal* ("IG") *setting* hingga proses *dialog day* dengan tujuan untuk membentuk *high performance culture* yang mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Tahapan penilaian kinerja individu dilakukan 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun melalui *Mid-Year People Review* ("MYPR") yang dilakukan pada pertengahan tahun, dan juga *End-Year People Review* ("EYPR") yang dilakukan pada akhir tahun.

Proses pengelolaan kinerja individu dilakukan melalui aplikasi *people review online* yang dapat diakses seluruh Perwira melalui intra Pertamina (I-AM). PTK secara resmi *Go Live* menggunakan aplikasi ini terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021. Penggunaan aplikasi *people review online* telah memudahkan proses penetapan *IG Setting*, *monitoring & reporting*, proses diskusi dan kalibrasi saat MYPR maupun EYPR, serta proses *dialog day*.

Penilaian kinerja individu mengacu pada target distribusi dan *meaningful differentiation* untuk aspek: (1) target kinerja (KPI/IG) dan (2) perilaku nilai budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan *Critical 5 Behavior* (termasuk penilaian 360°), juga atas pencapaian kinerja di luar Sasaran Kerja yang dituangkan dalam *rating*/nilai 1 s/d 8, yang sebarannya pada suatu kelompok penilaian *evaluatee* melalui komparasi nilai yang dibahas di jenjang/kelompok diskusi *People Review* atau diskusi Kalibrasi. Proses diskusi kalibrasi ini dilakukan bersama dengan pimpinan fungsi sebagai evaluator dan dipimpin oleh seorang *Chairman*.

Adapun ringkasan hasil penilaian kinerja individu pada periode EYPR tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini, dengan sebaran persentase didominasi oleh nilai kinerja 6-7 dari total 558 pekerja.

Individual performance management is a cycle from the performance management system ("PMS"), which starts from the process of identifying and preparing Key Performance Indicators ("KPI")/*Individual Goal* ("IG") settings to the process of dialogue day to form a high-performance culture that supports the achievement of the Company's strategic goals. The stages of individual performance evaluation are carried out 2 (two) times in a period of 1 (one) a year through the Mid-Year People Review ("MYPR"), which is conducted in the middle of the year, and also the End-Year People Review ("EYPR") which is carried out at the end of the year.

Managing individual performance is done through the online people review application, which all Officers can access through intra-Pertamina (I-AM). PTK officially *Go Live* uses this application starting December 15, 2021. The online people review application has facilitated setting IG Settings, monitoring & reporting, discussion and calibration processes during MYPR and EYPR, and the dialogue day process.

Individual performance assessment refers to target distribution and meaningful differentiation for the following aspects: (1) performance targets (KPI/IG) and (2) cultural values of AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) and Critical 5 Behaviors (including 360-degree assessment), as well as performance achievements beyond the Job Description, which are reflected in ratings/scores of 1 to 8, distributed among a group of evaluated individuals through a comparison of values discussed in the People Review or Calibration discussion level/group. The calibration discussion process is conducted together with the function leader as the evaluator and is led by a Chairman.

The summary of the results of individual performance assessments in the 2022 EYPR period can be seen in the following table, with the percentage distribution dominated by performance scores of 6-7 out of 558 workers.

Uraian Description	Jumlah Pekerja (people) Number of Workers (person)	Persentase Percentage (%)
Nilai kinerja 6-7 (diatas rata-rata target pencapaian) Performance value 6-7 (above the average target achievement)	332	59
Nilai kinerja 5 Performance value 5	209	37
Nilai kinerja 3-4 Performance rating 3-4	17	3
Nilai kinerja 2 Performance value 2	0	0
Jumlah Total	558	100

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management

Program Kesejahteraan dan Remunerasi

Program kesejahteraan dan sistem remunerasi diberikan dan dievaluasi secara berkala oleh Fungsi *Human Capital* PTK. Program tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan persaingan industri sejenis dan regulasi yang berlaku. Selain itu pemberian program kesejahteraan dan remunerasi yang kompetitif diharapkan untuk dapat meningkatkan performa kinerja pekerja dan perusahaan secara menyeluruh. PTK berkomitmen untuk melaksanakan program kesejahteraan dan sistem remunerasi secara adil dan merata. Berikut adalah rincian komponen remunerasi yang diterima oleh pekerja:

Welfare and Remuneration Program

Welfare programs and remuneration systems are regularly provided and evaluated by the PTK Human Capital Function. The program is carried out by considering similar industry competition and applicable regulations. In addition, providing competitive welfare and remuneration programs is expected to improve the performance of employees and the company performance. PTK is committed to implementing a fair and equitable welfare program and remuneration system. The following details the remuneration components received by employees:

Komponen Remunerasi Pekerja PTK

PTK Employee Remuneration Components

Komponen Remunerasi & Benefit Remuneration & Benefits Components	Status Pekerja Worker Status		Periode Kalkulasi Calculation Period			Tipe Type	
	Staf Staff	Non-Staf Non-Staff	Harian Daily	Bulanan Monthly	Tahunan Annually	Fix Fixed	Variabel Variable
Remunerasi Remuneration							
Gaji Pokok Basic salary	v	v		v		v	
Tunjangan Allowances	v	v	v			v	
Lembur Overtime	v	v	v				v
Benefit Lainnya Other Benefits							
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday allowance	v	v			v	v	
Fasilitas Istirahat Tahunan Annual Rest Facility	v				v	v	
Bonus Bonus	v	v			v		v
Insentif Incentive	v	v			v		v
BPJS							
Ketenagakerjaan Employment	v	v		v		v	
Kesehatan Health	v	v		v		v	
Pensiun Pension	v	v		v		v	

Anggaran Biaya

Berikut rincian biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk kesejahteraan pekerjanya:

Perihal Subject	2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022 Selisih Difference %	
Gaji Pekerja Worker Salary	92.687	63.085	59.146	29.602	46,92 ↑
Tunjangan pekerja Worker benefits	234.615	27.477	38.565	207.138	753,86 ↑
Program Pensiun Pekerja Employee Retirement Program	7.696	5.397	6.785	2.299	42,60 ↑
Bonus dan Penghargaan Bonuses and Awards	114.612	-	28.592	114.612	100,00 ↑
Jumlah Total	449.610	95.959	133.088	353.651	368,54 ↑

Budget

The following details the costs incurred by the Company for the welfare of its employees:

Program Pensiun

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja yang telah mendedikasikan diri kepada Perusahaan, PTK memberikan program pensiun. Program pensiun tersebut terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:

1. Program pensiun diberikan kepada para pekerja yang diangkat pada usia minimum 18 tahun dengan diikutsertakan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kepada para pekerja dengan status Pekerja Waktu Tidak Tertentu ("PWTT") yang telah mencapai usia minimum 46 tahun pada tahun anggaran berjalan dengan masa kerja minimal 15 tahun dapat diberikan uang panjar Penghargaan Atas Pengabdian ("PAP") sebesar 10% yang akan diperhitungkan pada saat PHK atau mencapai usia MPPK (55 tahun). PAP 10% dapat dibayarkan kepada pekerja jika hasil perhitungan PAP 10% lebih kecil atau sama dengan perhitungan penghargaan Masa Kerja. Tabel kecil terhitung pada saat pengajuan panjar PAP 10% setelah dikurangi hutang-hutangnya (jika ada).
2. Program pelatihan persiapan masa purna karya diberikan sebagai persiapan pengelolaan mental pekerja dalam menghadapi masa-masa pensiun. Selain itu pada program pelatihan tersebut juga diberikan pengarahan mengenai kegiatan wirausaha, sehingga para pekerja pensiun yang ingin melanjutkan berkarya di bidang lain mendapatkan modal dasar yang tepat.

Pension Program

As a form of responsibility to employees who have dedicated themselves to the Company, PTK provides a pension program. The pension program consists of 2 (two) programs, namely:

1. The pension program is given to workers who are appointed at a minimum age of 18 years by being included in the Financial Institution Pension Fund ("DPLK") program. Employees with Unspecified Time Worker ("PWTT") status who have reached a minimum age of 46 years in the current fiscal year with a minimum working period of 15 years can be given a down payment for Service Award ("PAP") of 10% which will be calculated at the time of layoffs or reaching MPPK age (55 years). 10% PAP can be paid to workers if the 10% PAP calculation result is less than or equal to the calculation of the Year of Service award. Small table calculated at the time of submitting a PAP down payment of 10% after deducting the debts (if any).
2. Retirement preparation training programs are provided as a preparation for employees' mental management in facing retirement. Apart from that, the training program also provided guidance regarding entrepreneurial activities, so that retired workers who wish to continue working in other fields get the right basic capital.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management

Untuk pekerja yang pensiun, Perusahaan menyiapkan 2 (dua) program, yaitu Dana Pensiun Pertamina ("DPP") dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri (DPLK Tugu Mandiri). Adapun besaran iuran/persentase Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri adalah sebesar 5% kontribusi dari Perusahaan, dan sebesar 5% kontribusi dari pekerja. Besaran manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina dengan iuran per bulan 7,5% dari PHDP (Penghasilan Dana Pensiun) terdiri dari Perusahaan 5,5% dan Pekerja 2%.

Program Penghargaan

PTK memiliki program penghargaan khusus bagi pekerja yang telah menempuh masa kerja selama 10, 15, 20, 25, 30, 35 tahun. Program penghargaan merupakan pengakuan dan ungkapan terima kasih kepada pekerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atas pengabdian dan prestasi yang telah dicapai. Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas ("UTD") dengan beberapa jenjang waktu pengabdian sebagai berikut:

Program Penghargaan Pekerja Tahun 2022
Employee Reward Program in 2022

Masa Kerja Years of service	Jumlah Pekerja Penerima Penghargaan Lencana/Peniti Number of Employees Recipient of Badge/Pin Award
20 tahun 20 years	2 Pekerja 2 Employee

Bagi pekerja yang telah berulang tahun dinas lebih dari 20 tahun ke atas di tahun 2022, diberikan peniti emas dengan memperhitungkan peniti emas yang diperoleh sebelumnya.

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pekerja. Oleh karena itu PTK berupaya memperhatikan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi seluruh pekerja. Diantaranya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai. Fasilitas yang diberikan oleh PTK kepada pekerja adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Koperasi Pertamina Trans Kontinental sebagai sarana usaha yang menyediakan tidak hanya kegiatan koperasi konvensional namun juga mencakup penyediaan barang dan jasa umum yang dibutuhkan oleh Perusahaan;
2. Penyediaan ruang menyusui bagi para pekerja perempuan di lantai 2. Penyediaan ruang ini diharapkan untuk membantu para pekerja perempuan dalam menyediakan nutrisi terbaik kepada anaknya;

For retired workers, the Company has prepared 2 (two) programs, namely the Pertamina Pension Fund ("DPP") and the Tugu Mandiri Financial Institution Pension Fund (DPLK Tugu Mandiri). The contribution amount/percentage of the Tugu Mandiri Financial Institution Pension Fund is 5% contribution from the Company, and 5% contribution from employees. The amount of defined benefit is managed by the Pertamina Pension Fund with monthly contributions of 7.5% of the PHDP (Pension Fund Income) consisting of Companies 5.5% and Employees 2%.

Awards Program

PTK has a special award program for workers who have served 10, 15, 20, 25, 30, 35 years of service. The award program is an acknowledgment and expression of gratitude to employees according to the established criteria for the dedication and achievements that have been achieved. The company gives Service Anniversary awards ("UTD") with several levels of service time as follows:

For workers who have service birthdays of more than 20 years in 2022, a gold pin is given, considering the gold pin previously obtained.

The work environment is one of the factors that affect a worker's performance. Therefore PTK seeks to pay attention to a comfortable and conducive work environment for all workers. Among them by providing adequate supporting facilities. The facilities provided by PTK to workers are as follows:

1. Establishment of the Pertamina Trans Kontinental Cooperative as a business facility that provides not only conventional cooperative activities but also includes the provision of general goods and services needed by the Company;
2. Provision of a breastfeeding room for female workers on the 2nd floor. It is hoped that this provision of space will assist female workers in providing the best nutrition for their children;



Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Management

3. Pembentukan komunitas olahraga, seperti bulu tangkis, voli, futsal, tenis meja, dan basket. Komunitas ini diharapkan dapat menyalurkan hobi dari para pekerja setelah selesainya jam kerja.

Selain program penghargaan diatas, terdapat bentuk program penghargaan untuk pekerja darat dan pekerja laut yang dikelola oleh SH IML yaitu berupa forum *Energizing Club*. Terdapat 2 (dua) pekerja darat dan 1 (satu) pekerja laut PTK yang memperoleh penghargaan pada forum *Energizing Club* SH IML atas kinerja di tahun 2022. Adapun aspek penilaian antara lain terkait pencapaian *individual performance* (KPI/Individual Goal/SMK), *compliance* (GCG), *people development* (*individual development plan*), *core value AKHLAK* (AKHLAK behavior survey), HSSE, serta *Quality & Innovation*.

Survei Kepuasan Pekerja

PTK secara rutin melakukan survei setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kepuasan pekerja terhadap kebijakan yang secara langsung mengatur hak dan kewajibannya didalam perusahaan. Survei Kepuasan Pekerja (SKP) dilakukan dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner secara *online* melalui *broadcast* Pertamina Trans Kontinental.

Berdasarkan *Internal Customer Satisfaction* (ICS) Survey Fungsi *Human Capital* yang telah dilakukan, nilai kepuasan pekerja Fungsi *Human Capital* pada tahun 2022 sebesar 4,38 (dari target 4,00). Beberapa masukan dari pekerja untuk peningkatan kinerja fungsi *Human Capital* antara lain terkait *responsiveness* terkait keluhan pekerja dan peningkatan kompetensi pekerja melalui training.

3. Formation of sports communities, such as badminton, volleyball, futsal, table tennis and basketball. This community is expected to be able to channel hobbies from workers after working hours.

In addition to the above award programs, there is a form of appreciation program for land workers and sea workers managed by SH IML, namely the *Energizing Club* forum. There were 2 (two) land workers and 1 (one) PTK sea worker who received an award at the *Energizing Club* SH IML forum for 2022 performance. The aspects of the assessment included achievement of individual performance (KPI/Individual Goal/SMK), compliance (GCG), people development (individual development plan), AKHLAK core values (AKHLAK behavior survey), HSSE, and Quality & Innovation.

Employee Satisfaction Survey

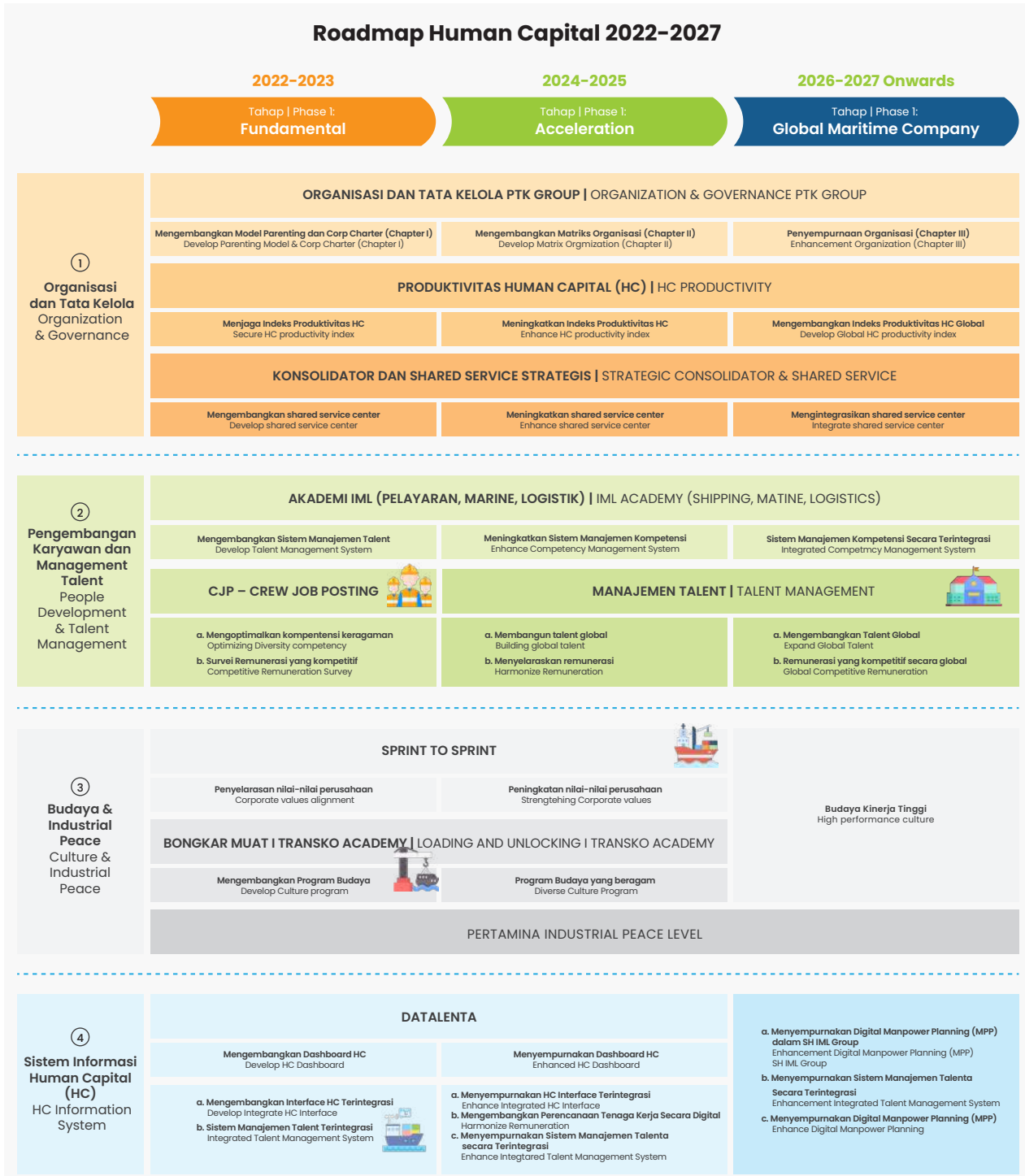
PTK routinely conducts yearly surveys to determine employee satisfaction with policies that directly regulate their rights and obligations within the company. The Employee Satisfaction Survey (SKP) was carried out using the method of distributing questionnaires online through the Pertamina Trans Kontinental broadcast.

Based on the Internal Customer Satisfaction (ICS) Survey of the Human Capital Function that has been carried out, the value of employee satisfaction in the Human Capital Function in 2022 is 4.38 (from the target of 4.00). Several inputs from employees to improve the performance of the Human Capital function include responsiveness related to employee complaints and increasing employee competence through training.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management

Roadmap dan Rencana Ke Depan

Roadmap and Future Plans



Peta jalan pengembangan SDM mengacu kepada visi PTK 2026 menjadi perusahaan global yang kompetitif pada lini bisnisnya. Secara bertahap, berikut fokus Fungsi *Human Capital* secara bertahap:

The HR development roadmap refers to the 2026 PTK vision of becoming a competitive global company in its line of business. Gradually, following the focus of the Human Capital Function in stages:



2022-2023: Strengthening Fundamentals

- Fokus Fungsi *Human Capital* dalam melakukan penetapan organisasi sesuai dengan klusterisasi bisnis PTK Group beserta konsekuensi variabel kelengkapannya (matriks RASCI dan uraian jabatan) akan menjadi perhatian pada tahun 2022 dan 2023. Penyelarasan kebijakan remunerasi untuk memenuhi sisi *compliance* standar Pertamina dan penguatan matriks kompetensi akan dilanjutkan agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan bisnis.
- Peningkatan produktivitas melalui pendekatan kultur yang tepat akan didorong oleh pengembangan penerapan sistem pengelolaan SDM yang lebih baik. *Tool Human Capital Analytics* dan *Career Mapping* akan menjadi sentral perbaikan berkesinambungan yang sehubungan dengan *performance* organisasi dan pengelolaan talenta. Hal ini ditopang juga oleh kampanye intensif terkait kultur kolaboratif antar fungsi untuk mempertinggi resultan pencapaian perusahaan.

2024-2025: Acceleration

- Untuk mempersiapkan pekerja PTK dalam menghadapi perluasan bisnis perusahaan, akan dilakukan pengukuran kompetensi secara bertahap untuk dapat memantau tingkat kompetensi pekerja. Hasil *assessment* akan menjadi material penyesuaian matriks kompetensi. Melalui usaha penyempurnaan layanan berupa penguatan sistem operasional SDM, pemberdayaan *human capital tools*, serta menjadi *culture champion*, diharapkan manajemen Fungsi *Human Capital* dapat proaktif dalam memberikan *insight* dan solusi atas tantangan yang dihadapi perusahaan.
- Melalui perkembangan inkremental pada tahun-tahun sebelumnya praktek SDM PTK diharapkan menjadi *center of excellence* sebagai pusat keunggulan pengelolaan SDM di SH IML maupun di Pertamina Group. Selaras dengan perkembangan dan rencana bisnis PTK, evaluasi struktur organisasi perusahaan akan kembali dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

2026-2027 Onwards: Towards Global Maritime Company

Kelincahan organisasi harus dapat mengimbangi laju bisnis perusahaan yang sedang dalam masa perluasan jangkauan bisnis. Fungsi *Human Capital* berencana akan melakukan *improvement* organisasi untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait hal ini. Sebagai perusahaan global, struktur remunerasi & *benefit* akan tetap dijaga kompetitif dan menjadi salah satu strategi penting dalam *employee retention*. Pembaharuan fundamental matriks kompetensi dan *career mapping* untuk ketahanan organisasi dalam tantangan global akan menjadi perhatian utama dalam menyambut tantangan bisnis global.

2022-2023: Strengthening Fundamentals

- The focus of the Human Capital Function in conducting organization in accordance with PTK Group's business clusterization along with the consequent variables (RASCI matrix and position descriptions) will be a concern in 2022 and 2023. Alignment of remuneration policies to meet Pertamina's compliance standards and strengthening the competency matrix will be continued to match with business needs and challenges.
- Increased productivity through the right cultural approach will be driven by the development of a better HR management system implementation. Human Capital Analytics and Career Mapping tools will be central to continuous improvement with respect to organizational performance and talent management. This is also supported by intensive campaigns on collaborative culture between functions to enhance the resultant achievement of the company

2024-2025: Acceleration

- To prepare PTK employees for the expansion of the company's business, a competency assessment will be conducted in stages to monitor the level of competency of employees. The assessment results will be used as material for adjusting the competency matrix. Through service improvement efforts in the form of strengthening HR operational systems, empowering human capital tools, and becoming a culture champion, it is expected that the Human Capital Function management can be proactive in providing insight and solutions to the challenges faced by the company. and solutions to the challenges faced by the company.
- Through incremental development in the previous years, PTK's HR practice is expected to become a center of excellence for HR management in SH IML and Pertamina Group. In line with PTK development and business plan, an evaluation of the company's organizational structure will be carried out to improve the company's performance. organizational structure will be re-evaluated to improve organizational effectiveness and efficiency.

2026-2027 Onwards: Towards Global Maritime Company

Organizational agility must be able to keep up with the pace of the company's business, which is in a period of business expansion. The Human Capital function plans to make organizational improvements to overcome the problems that arise in this regard. As a global company, the remuneration & benefits structure will be kept competitive and become one of the important strategies in employee retention. Fundamental updating of competency matrix and career mapping for organizational resilience in global challenges will be a concern. organization's resilience in global challenges will be in welcoming global business challenges.

Optimalisasi Teknologi Informasi

Information Technology Optimization

Kinerja Teknologi Informasi Tahun 2022

Kinerja Teknologi Informasi ("TI") PTK dapat dilihat melalui berbagai pencapaian program strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, kinerja pengembangan TI PTK tahun 2022 sesuai dengan program strategis Perusahaan. Berikut ini adalah daftar aplikasi yang dikembangkan di tahun 2022.

Information Technology Performance in 2022

PTK Information Technology ("TI") performance can be seen through the various achievements of the strategic programs that have been set. In general, PTK's IT development performance in 2022 is in accordance with the Company's strategic program. The following is a list of applications developed in 2022.

Daftar Aplikasi yang Dikembangkan di Tahun 2022

List of Apps Developed in 2022

Nama Aplikasi Application Name	Fungsi Function	Deskripsi Description	Status Status	Dasar Pembuatan Aplikasi Basis of Application Development
ICONS (<i>Integrated Contract System</i>) Versi 2	Legal	Aplikasi ICONS merupakan suatu aplikasi yang berfungsi untuk <i>monitoring</i> proses <i>review</i> kontrak secara <i>online</i> , proses <i>approval</i> , penyimpanan data-data kontrak (<i>archiving</i>), dan <i>reminder</i> kontrak kerja yang akan habis masa berlakunya. The ICONS application is an application that functions to monitor the contract review process online, the approval process, storing contract data (<i>archiving</i>), and remind work contracts that will expire.	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi legal. 124/ F1000/2020-SO Application letter requesting a legal function application. 124/ F1000/2020-SO
BAGUS (<i>Bank Guarantee System</i>)	Treasury	Merupakan aplikasi dari Fungsi <i>Treasury</i> yang bertujuan untuk: - Memudahkan tim <i>Treasury & Financing</i> untuk melakukan kegiatan <i>monitoring</i> dan <i>tracking</i> terhadap seluruh kegiatan dan <i>deadline</i> bank garansi untuk pembangunan kapal tertentu. Dapat dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i>. - Sebagai <i>Early Warning</i> atas jangka waktu bank garansi pembangunan kapal sehingga dapat meminimalisir potensi risiko kerugian karena tidak ter-cover jaminan atas <i>progress</i> pembangunan kapal akibat garansi <i>Expired</i>. Is an application of the Treasury Function that aims to: - Facilitate the Treasury & Financing team to monitor and track all activities and bank guarantee deadlines for constructing specific ships. Can be done online and in real time. - As an Early Warning for the duration of the shipbuilding bank guarantee to minimize the potential risk of loss due to not being covered by guarantees for the progress of ship construction due to Expired guarantees.	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. 148/ E1300/2021-SO Letter of application request for application of related functions. 148/ E1300/2021-SO
E-Learning PTK	HCS	Aplikasi <i>e-learning</i> memberikan kemudahan pada fungsi HR dan pekerja antara lain: - Mengelola <i>file</i> terkait <i>Training</i> dan Transko Academy (Shasy, POLS, dan atau War Room). - Eliminasi kebutuhan ruang penyimpanan <i>hardcopy</i>. - Mempermudah proses absensi dan pemberian <i>feedback</i> dari peserta. - Membuat sistem yang dapat mencetak sertifikat secara otomatis. E-learning applications provide convenience to HR functions and employees, including: - Manage files related to Training and Transko Academy (Shasy, POLS, and or War Room). - Eliminate the need for <i>hardcopy</i> storage space. - Simplify the attendance process and provide feedback from participants. - Create a system that can print certificates automatically.	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. 155/ E2100/2021-SO Letter of application request for application of related functions. 155/ E2100/2021-SO

Daftar Aplikasi yang Dikembangkan di Tahun 2022

List of Apps Developed in 2022

Nama Aplikasi Application Name	Fungsi Function	Deskripsi Description	Status Status	Dasar Pembuatan Aplikasi Basis of Application Development
KaryaOne	HCO	Aplikasi Karyaone adalah aplikasi yang bertujuan untuk pengelolaan data dan informasi dapat menyeluruh, terintegrasi, dan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat terhadap tenaga kerja jasa penunjang ("TKJP") di lingkungan PTK. The Karyaone application is an application that aims to manage data and information that can be comprehensive, integrated, and produces fast and accurate information on supporting service workers ("TKJP") in the PTK environment.	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. 235/PTK3120/2021-S0 Letter of application request for application of related functions. 235/PTK3120/2021-S0
Procurement Information System (PROMISE)	Procurement	Aplikasi Promise adalah aplikasi yang bertujuan untuk: - Mempermudah tim <i>Procurement</i> untuk melakukan kegiatan <i>monitoring</i> dan <i>tracking</i> terhadap seluruh vendor/<i>partner</i> dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa. Dapat dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i>. - Mempermudah seluruh pekerja yang terlibat dalam proses pengadaan dalam melakukan <i>monitoring</i> terhadap seluruh proses pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya. - Mempermudah tim <i>Procurement</i> dalam melakukan penilaian terhadap vendor/<i>partner</i> yang sudah menjadi rekanan perusahaan karena aplikasi ini mempunyai fitur yang sangat menuntut vendor/<i>partner</i> untuk terus melakukan <i>update</i> serta <i>monitoring</i> terhadap tanggung jawabnya dalam menyediakan dan mengirimkan barang/jasa. The Promise application is an application that aims to: - Make it easier for the Procurement team to carry out monitoring and tracking activities for all vendors/partners in carrying out goods/services procurement activities. Can be done online and in real time. - Facilitate all workers involved in the procurement process in monitoring the entire procurement process for which they are responsible. - Facilitate the Procurement team in evaluating vendors/partners who are already partners with the company because this application has features that require vendors/partners to continue updating and monitoring their responsibilities in providing and delivering goods/services.	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. 278/E2300/2021-S0 Letter of application request for application of related functions. 278/E2300/2021-S0

Pada tahun 2022, TI PTK berfokus pada proses digitalisasi secara menyeluruh di hampir semua fungsi atau unit bisnis khususnya adalah pada fungsi HSSE atau SMR.

In 2022, PTK IT focused on the overall digitization process in almost all functions or business units, especially the HSSE or SMR functions.

Optimalisasi Teknologi Informasi
Information Technology Optimization

Tata Kelola TI

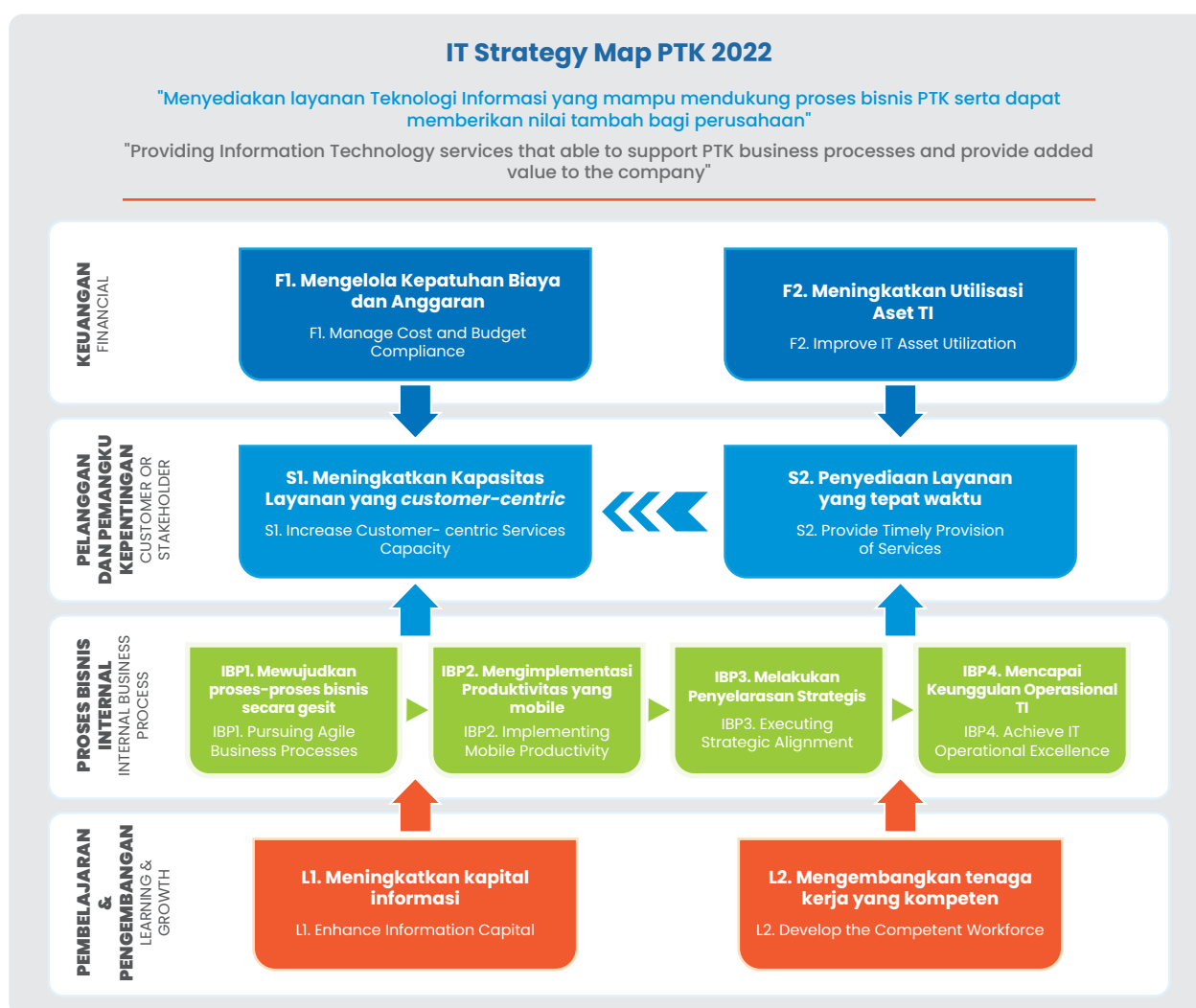
PTK memiliki tata kelola IT pada 5 (lima) bidang terkait, yaitu *IT Policy*, *IT Architecture*, *IT Infrastructure*, *IT Business Application Needs* dan *IT Investment & Prioritisasi*. Adapun kelima bidang tersebut dikelola oleh pihak-pihak yang melakukan perancangan, pengesahan, pengembangan, *monitoring*, *enforcement*.

Gambaran IT Strategy Maps 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

IT Governance

PTK has IT governance in 5 (five) related fields, namely *IT Policy*, *IT Architecture*, *IT Infrastructure*, *IT Business Application Needs* and *IT Investment & Prioritization*. The five fields are managed by parties who carry out the design, validation, development, monitoring, and enforcement.

An overview of the IT Strategy Maps 2022 can be seen in the following image.



Pada tahun 2022, prioritas *Mobile Productivity* merupakan tugas Fungsi IT, setelah pada tahun sebelumnya menitikberatkan pada prioritas *Strategic Alignment*. Target Akhir dari tagline *Mobile Productivity* adalah "Delivering the Always-Connected and Convenient Employee Productivity".

In 2022, the priority of *Mobile Productivity* was the task of the IT Function; after the previous year, it focused on *Strategic Alignment* priorities. The final target of the *Mobile Productivity* tagline is "Delivering the Always-Connected and Convenient Employee Productivity".



Pada gambar di atas terdapat 4 (empat) Perspektif sebagai berikut:

Perspektif Financial, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu:

- F.1. *Manage Cost and Budget Compliance.*
- F.2. *Improve IT Asset Utilization.*

Perspektif *Customer or Stakeholders*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu:

- S.1. *Increase Customer-Centric Services Capacity.*
- S.2. *Provide Timely Provision of Services.*

Pada perspektif *Internal Business Process*, terdapat 4 (empat) *Strategic Objectives*, diantaranya adalah:

- IBP.1. *Pursuing Agile Business Processes.*
- IBP.2. *Implementing Mobile Productivity.*
- IBP.3. *Executing Strategic Alignment.*
- IBP.4. *Achieve IT Operational Excellence.*

Pada perspektif *Learning and Growth*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, diantaranya adalah:

- L.1. *Enhance Information Capital.*
- L.2. *Develop the Competent Workforce.*

Keempat perspektif organisasi tersebut untuk selanjutnya didefinisikan dalam rangka membentuk suatu *linkage* antara *Strategic Objectives* pada IT Strategy Maps PTK 2022. Sebagai contoh, kondisi pada tahun sebelumnya memberikan porsi kepada Fungsi IT sebagai *strategic workforce unit* untuk mendukung kegiatan bisnis PTK, sehingga *Financial Perspective* diletakkan pada posisi teratas dari susunan 4 *Organizational Perspectives*. Beberapa faktor *Financial* seperti *Cost, Budget and Assets* merupakan objek yang perlu dikelola dengan baik demi keberlangsungan layanan IT bagi organisasi atau perusahaan.

Pengelolaan faktor-faktor Financial yang baik, memberikan jaminan bagi Fungsi IT PTK untuk memberikan layanan terbaiknya bagi *Customer or Stakeholders*. Fungsi IT PTK berupaya untuk memberikan layanan kepada para pengguna jasanya, yaitu karyawan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Anak Perusahaan, dengan sebaik-baiknya. Fungsi IT PTK memiliki pandangan untuk dapat memberikan kapasitas layanan yang terukur, terkontrol dan terencana dengan orientasi kepada *Customer or Stakeholders*.

In the picture above, there are 4 (four) perspectives follows:

From a financial perspective, there are 2 (two) *Strategic Objectives*, namely:

- F. 1. *Manage Cost and Budget Compliance.*
- F.2. *Improve IT Asset Utilization.*

Customer or Stakeholders perspective, there are 2 (two) *Strategic Objectives*, namely:

- S.1. *Increase Customer-Centric Services Capacity.*
- S.2. *Provide Timely Provision of Services.*

From the Internal Business Process perspective, there are 4 (four) *Strategic Objectives*, including:

- IBP. 1. *Pursuing Agile Business Processes.*
- IBP. 2. *Implementing Mobile Productivity.*
- IBP. 3. *Executing Strategic Alignments.*
- IBP. 4. *Achieve IT Operational Excellence.*

From the perspective of Learning and Growth, there are 2 (two) *Strategic Objectives*, including:

- L. 1. *Enhance Information Capital.*
- L.2. *Develop the Competent Workforce.*

The four organizational perspectives are henceforth defined to link *Strategic Objectives* on the 2022 PTK IT Strategy Maps. For example, conditions in the previous year provided a portion for the IT Function as a strategic workforce unit to support PTK business activities so that the Financial Perspective is placed at the top of the 4 Organizational Perspectives. Financial factors such as Cost, Budget and Assets must be appropriately managed to maintain IT services for organizations or companies.

Good management of financial factors provides guarantees for the PTK IT function to provide the best service for customers or stakeholders. PTK's IT function strives to provide the best possible service to its service users, namely employees at the Head Office, Branch Offices and Subsidiaries. The PTK IT function has the vision to provide measurable, controlled and planned service capacity with an orientation to the Customer or Stakeholders.

Optimalisasi Teknologi Informasi
Information Technology Optimization

Dalam rangka memberikan layanan kepada *Customer or Stakeholders*, Fungsi IT melaksanakan proses bisnis internal (*Internal Business Process*), yang tertuang dalam 6 (enam) area kerja Fungsi IT, yaitu Infrastruktur TI, Penyelarasan Strategi TI, Manajemen Proses Bisnis, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Aplikasi dan Manajemen Layanan TI. Untuk memastikan proses bisnis internal dapat berjalan dengan baik, maka Fungsi IT memerlukan kemampuan literasi untuk adaptif terhadap perkembangan zaman dan perubahan bisnis terkait bidang usaha PTK. Fungsi IT memerlukan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang kerjanya dan mampu melakukan eksploitasi informasi yang dimiliki sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi atau perusahaan serta dalam rangka mencapai pertumbuhan (*Growth*) dan pembelajaran (*Learning*) yang positif.

Investasi TI

Manajemen menetapkan kebijakan investasi TI tahun 2022 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan strategis dari rencana kerja perusahaan jangka pendek. Untuk itu sasaran kebutuhan belanja TI dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. *IT Support*
Pembelanjaan di bidang operasional bisnis TI meliputi CAPEX dan OPEX yaitu sewa peralatan TI melalui *seat management*, pengadaan perangkat pendukung TI, perbaikan perangkat TI dan lisensi *enterprise agreement* dengan total nilai sebesar Rp19.122 (juta).
2. *IT Infrastructure*
Pembelanjaan bidang IT *infrastructure* meliputi CAPEX dan OPEX yaitu pengadaan *cloud storage*, UPS *Managable*, *Cyber Security network*, *Managed service network* dan SAP dengan total nilai sebesar Rp22.113 (juta).
3. *IT Development*
Pembelanjaan bidang IT *application development* meliputi pengadaan layanan SMS *gateway*, lisensi *developer*, UID SAP, *template* aplikasi, *tools development*, dsb, dengan total nilai sebesar Rp7.304 (juta).

To provide services to Customers or Stakeholders, the IT Function carries out internal business processes, which are contained in 6 (six) work areas of the IT Function, namely IT Infrastructure, IT Strategy Alignment, Business Process Management, Knowledge Management, Application Management and IT Service Management. To ensure that internal business processes can run well, the IT function requires literacy skills to be adaptive to the times and business changes related to the PTK business field. The IT function requires human resources who are competent in their field of work and can exploit the information they have as much as possible to benefit the organization or company and achieve positive growth and learning.

IT investment

Management established an IT investment policy for 2022 that is tailored to the needs and strategic planning of the company's short-term work plan. For this reason, the target IT expenditure needs are divided into three parts, namely as follows:

1. *IT Support*
Expenditures in IT business operations include CAPEX and OPEX, namely IT equipment rental through *seat management*, procurement of IT supporting equipment, repair of IT equipment and enterprise agreement licenses with a total value of Rp19,122 (million).
2. *IT Infrastructure*
Spending in the IT infrastructure sector includes CAPEX and OPEX, namely the procurement of cloud storage, UPS Manageable, Cyber Security Network, Managed service network and SAP with a total value of Rp22,113 (million).
3. *IT Development*
Expenditure in the IT application development sector includes procuring SMS gateway services, developer licenses, SAP UID, application templates, development tools, etc., with a total value of Rp7,304 (million).



Optimalisasi Teknologi Informasi Information Technology Optimization

Sebagai tindak lanjut digitalisasi di PTK Fungsi Teknologi Informasi melakukan investasi pengembangan Big Data yang rencananya akan diimplementasikan di tahun 2023, adapun kegiatan ini bertujuan untuk penguatan infrastruktur di PTK harapannya dapat memberikan layanan yang adaptif mengikuti trend yang ada serta regulasi dari PT Pertamina (Persero) maupun pemerintah.

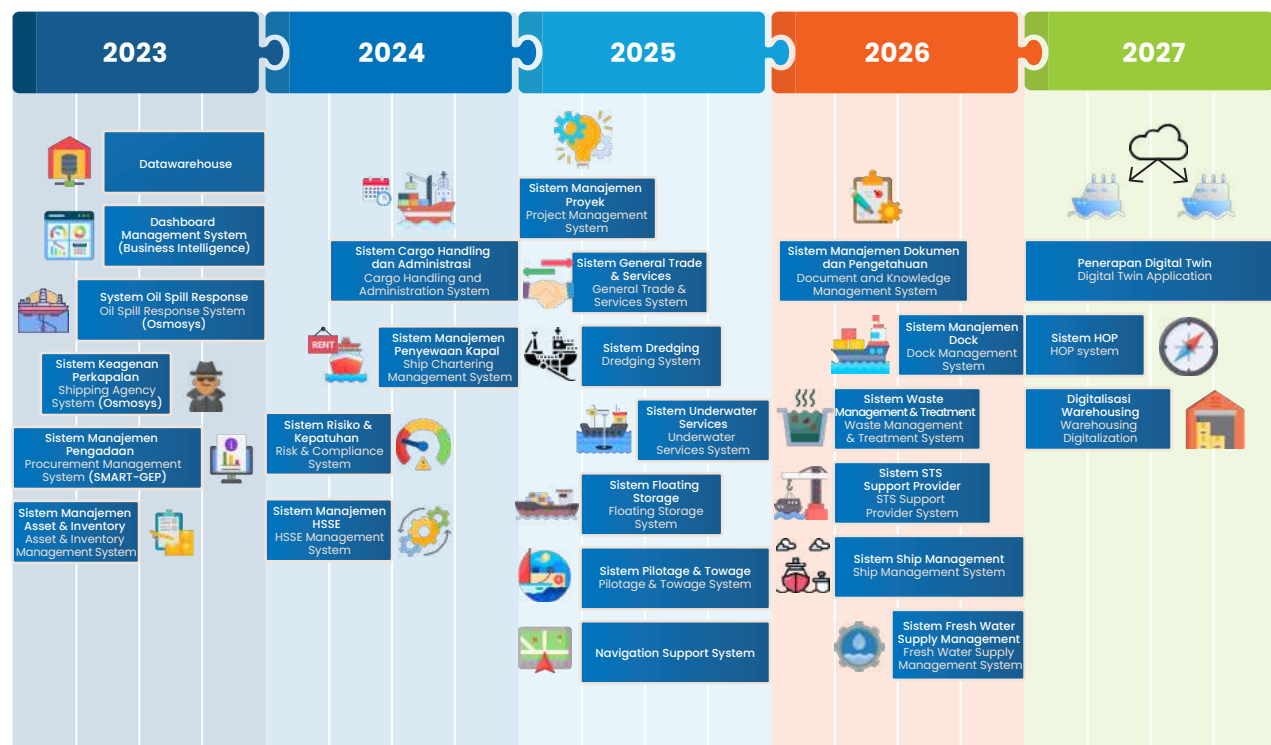
As a follow-up to digitalization at PTK, the Information Technology Function invests in the development of Big Data which is planned to be implemented in 2023, while this activity aims to strengthen infrastructure at PTK, hoping to provide services that are adaptive to existing trends and regulations from PT Pertamina (Persero) and the government.



Roadmap Digitalisasi TI

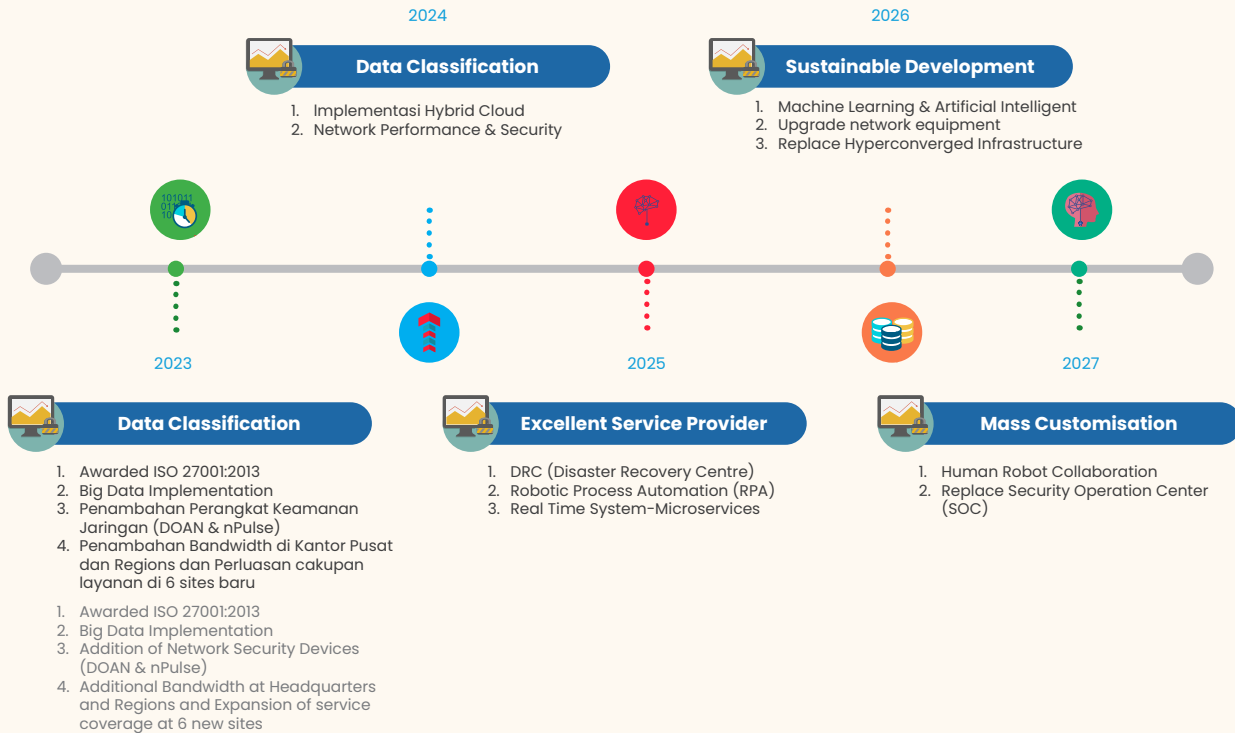
IT Digitization Road Map

Roadmap Initiative Application RJPP PTK 2023-2027



Optimalisasi Teknologi Informasi
Information Technology Optimization**Roadmap Initiative Infrastructure & Cyber Security PTK 2023 – 2027**

PTK Infrastructure & Cyber Security Initiative Roadmap 2023 – 2027

**Strategi TI Ke Depan**

Berdasarkan *blueprint* proses bisnis Perusahaan dan *Roadmap* Digitalisasi Teknologi Informasi, untuk tahun 2023 program pengembangan TI berfokus kepada beberapa program sebagai berikut ini.

TI's Future Strategy

Based on the Company's business process blueprint and Information Technology Digitization Road Map, for 2023 the IT development program focuses on the following programs.

Program Pengembangan TI Tahun 2023

IT Development Program in 2023

Program Program	Deskripsi Description
SHEVIA (<i>Safety Health Education Virtual Immersive Application</i>)	Aplikasi simulasi training dengan menggunakan teknologi Virtual Reality (VR). Adapun fitur yaitu terkait pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi semua karyawan sehingga dapat memberikan pengalaman pelatihan yang imersif, menyenangkan dan menarik sehingga dapat memberikan keterampilan memperkuat pemahaman konsep dan pengembangan kompetensi Training simulation application using Virtual Reality (VR) technology. The features are related to Occupational Safety and Health (K3) training for all employees to provide an immersive, fun and interesting training experience so as to provide skills to strengthen conceptual understanding and competency development

Program Pengembangan TI Tahun 2023
IT Development Program in 2023

Program Program	Deskripsi Description
<i>Big Data</i> PTK	Sebagai tindak lanjut Digitalisasi di PTK Fungsi Teknologi Informasi melakukan investasi pengembangan BIG data yang rencananya akan diimplementasikan di tahun 2023, adapun kegiatan ini bertujuan untuk penguatan infrastruktur di PTK harapannya dapat memberikan layanan yang adaptif mengikuti tren yang ada serta regulasi dari PT Pertamina (Persero) maupun pemerintah As a follow-up to Digitalization at PTK, the Information Technology Function invests in the development of BIG data which is planned to be implemented in 2023, while this activity aims to strengthen infrastructure at PTK, hoping to provide services that are adaptive to existing trends and regulations from PT Pertamina (Persero) and the government.
OSMOSYS	Aplikasi untuk mempermudah monitoring kondisi dan jumlah alat di gudang maupun dilapangan terkait dengan kegiatan Oil Spill, serta untuk monitoring data latihan dan personil di setiap region Application to facilitate monitoring of the condition and number of tools in warehouses and in the field related to Oil Spill activities, as well as for monitoring training data and personnel in each region
Digitalisasi Aset Management Digitalization of Asset Management	Aplikasi untuk monitoring asset -asset yang ada dilingkungan kerja PTK Application for monitoring assets in the PTK work environment
Aplikasi <i>Emergency Response Readiness Wonderful System</i> (Empowers) Emergency Response Readiness Wonderful System (Empowers) Application	Aplikasi untuk mengetahui dan menilai tingkat kesiapan siaga Unit Operasi / Anak Perusahaan dalam menghadapi kegiatan tanggap darurat baik kebakaran maupun tumpahan minyak Application to find out and assess the level of preparedness of Operational Units / Subsidiaries in dealing with emergency response activities, both fires and oil spills.
Aplikasi CSMS IML IML CSMS Application	Aplikasi untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko HSSE pada pekerjaan yang dikontrakan telah dikelola dengan baik oleh pihak Subholding IML dan dilaksanakan oleh Pelaksana Kontrak sehingga Pekerjaan Kontrak dapat dilaksanakan secara efektif dan aman Application to ensure the potential hazards and HSSE risks in the contracted work have been properly managed by the IML Subholding party and carried out by the Contract Executor thus the Contract Work can be carried out effectively and safely.
Aplikasi Anode Calculation Marine Engineering Marine Engineering Anode Calculation Application	Aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam melaksanakan kegiatan reporting dan monitoring terkait dengan inspeksi tiang bawah laut sarana tambat jenis jetty sehingga didapatkan perkiraan kondisi dari anode pada setiap struktur sarana tambat. Application to facilitate users in carrying out reporting and monitoring activities related to inspection of underwater poles for jetty-type mooring facilities thus an estimate of the anodes conditions for each mooring facility structure is obtained.
Digitalisasi Gudang SES SES Warehouse Digitalization	Aplikasi untuk memonitoring peralatan yang dimiliki baik sebagai asset maupun non asset dan consumable, meliputi jadwal sertifikasi peralatan, jadwal perbaikan dan perawatan untuk peralatan, tracking posisi alat, serta berita acara dan dokumen serah terima Application for monitoring equipment owned both as assets and non-assets and consumables, including equipment certification schedules, repair, and maintenance schedules for equipment, tracking equipment position, as well as minutes and handover documents
Aplikasi <i>Vetting</i> dan Inspeksi HSSE HSSE Vetting and Inspection Application	Aplikasi untuk monitoring checklist ketersediaan atau inspeksi pada terminal, dockyard dan shorebase Application for monitoring availability checklists or inspections at terminals, dockyards and shorebases
Aplikasi CMMS CMMS application	Aplikasi maintenance kapal melalui modul plan maintenance SAP Ship maintenance application through the SAP maintenance plan module
<i>Enhancement</i> Aplikasi OBIT 2.0 OBIT 2.0 Application Enhancement	Aplikasi untuk monitoring laporan temuan terkait hal-hal yang berpotensi kecelakaan dilingkungan kerja Application for monitoring report findings related to things that have the potential for accidents in the work environment.
<i>Dashboard Management</i> PTK PTK Management Dashboard	Aplikasi untuk menyajikan visualisasi data keuangan dan operasi PT Pertamina Trans Kontinental yang menggambarkan kinerja perusahaan di berbagai fungsi dan bisnis serta membantu eksekutif perusahaan dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan. Application to present the visualization of PT Pertamina Trans Kontinental financial and operational data which describes the Company performance in various functions and businesses and assists Company executives in supervising and making decisions.

Pemenuhan prinsip tata kelola perusahaan memberikan landasan bagi PTK untuk dapat memperkuat citra perusahaan dan memberikan jaminan akan pertumbuhan yang kuat di masa mendatang

The fulfillment of corporate governance principles provides a foundation for PTK to strengthen its corporate image and assures strong growth in the future



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance





Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company



Dasar-dasar dan Komitmen Penerapan Prinsip Tata Kelola

PTK dituntut untuk dapat berkompetisi, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Perusahaan terus melakukan perbaikan agar dapat menciptakan dan meningkatkan keunggulan kompetitif-nya. Selain itu, PTK juga terus melakukan peningkatan dalam pengelolaan perusahaan. Dengan adanya pengelolaan perusahaan yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan dari pelanggan maupun *stakeholder* lainnya.

PTK meyakini bahwa perusahaan dapat tumbuh besar karena adanya kepercayaan yang tinggi dari seluruh *stakeholder*. Oleh karena itu, PTK selalu berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan perusahaan secara baik.

Fundamentals and Commitment to Implementation of Corporate Governance Principles

PTK is required to be able to compete both in the domestic and international markets. The company continues to make improvements in order to create and enhance its competitive advantage. In addition, PTK also continues to improve its corporate management. With good corporate governance, the trust of customers and other stakeholders will surely increase.

PTK believes that a company can grow big because of the high trust of all stakeholders. Therefore, PTK is always committed to improving and enhancing corporate management in a good way.

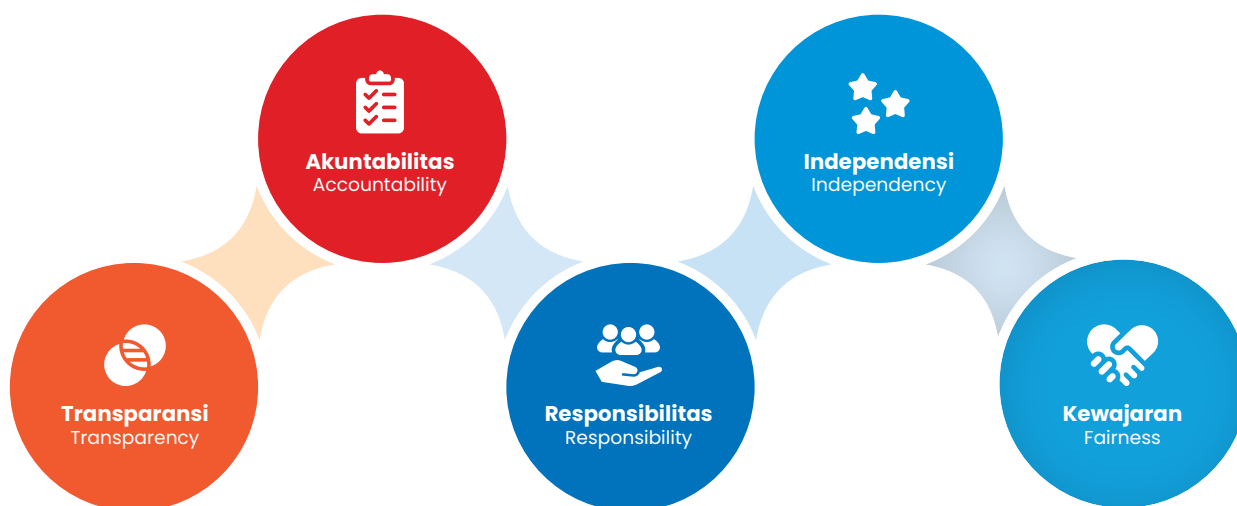
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan perhatian kepada seluruh Stakeholders. Untuk mendukung hal tersebut, Perusahaan perlu untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Prinsip GCG). Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

The company conducts its business activities responsibly, reflecting its concern for all stakeholders. To support this, the company needs to formulate and implement good corporate governance principles (GCG principles). Applying GCG principles is essential, so the company can survive and be resilient in facing increasingly fierce competition.

Prinsip-prinsip GCG di Perusahaan adalah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran (*Fairness*). Penerapan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan tercermin dalam beberapa hal berikut ini:

The GCG principles in the company are Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. The application of GCG principles in the company is reflected in the following:



Prinsip GCG GCG Principles	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparency in carrying out the decision-making process, and transparency in disclosing material and relevant information about the company.
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Clarity of functions, implementation and accountability of the organs so that the management of the company is carried out effectively.
Responsibilitas Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Conformity in the management of the company with laws and regulations and sound corporate principles.
Independensi Independence	Keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Circumstances where the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with laws and regulations and sound corporate principles.
Kewajaran Fairness	Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and laws and regulations.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Dasar Hukum Penerapan GCG

Secara umum implementasi GCG PTK mengacu kepada kaidah dan praktik yang dianut secara universal oleh korporasi global. Secara khusus penerapan GCG PTK mengacu pada ketentuan hukum-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan internal Perusahaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Menteri BUMN No. 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2014.
6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
7. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance ("KNKG").
8. OECD *Principles of Corporate Governance*.
9. *The Asean Corporate Governance Scorecard*.

Melalui penerapan *best practice* GCG, PTK berupaya memberikan nilai lebih kepada pemangku kepentingan diantaranya melalui sikap dan perilaku yang sejalan dengan budaya Perusahaan, memberikan pelayanan yang *excellent*, menjamin akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal serta menciptakan iklim usaha yang sehat demi keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Tujuan Penerapan GCG

Dalam penerapan GCG PTK memiliki tujuan yaitu memaksimalkan nilai Perusahaan dan terlaksananya pengelolaan secara profesional serta mandiri, menciptakan proses pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap seluruh pemangku kepentingan.

GCG Regulatory Framework

In general, the implementation of PTK GCG refers to the universal rules of practice that are universally adopted by global corporations. Specifically the implementation of PTK GCG refers to the provisions of applicable laws and internal company regulations as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 concerning Capital Markets.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure.
4. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.
5. SOEs Minister Regulation No. 1 of 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, which has been amended by the Minister of State SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2014.
6. Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
7. General Guidelines for Indonesian GCG by the National Committee on Governance Policy ("KNKG").
8. OECD Principles of Corporate Governance.
9. The ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Through the implementation of GCG best practices, PTK seeks to provide added value to stakeholders, including through attitudes and behaviours that are in line with the Company's culture, providing excellent service, ensuring accountability through the internal control system and creating a healthy business climate for the sustainability of the Company's business.

GCG Implementation Objectives

In implementing GCG PTK has the objective of maximizing the value of the Company and implementing professional and independent management, creating a decision-making process by all Company organs based on high moral values, compliance with laws and regulations, and supporting the implementation of corporate social responsibility (CSR) to all stakeholders.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Pemegang Saham

Memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham

- Pertamina Trans Kontinental dituntut memberikan dukungan pelayanan kepada aktivitas usaha PT Pertamina International Shipping sebagai Pemegang Saham.
- Pertamina Trans Kontinental dituntut senantiasa memiliki kinerja yang baik, sehat dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan laba dan memberikan kontribusi berupa dividen kepada Pemegang Saham.

Pelanggan & Mitra Kerja

Menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra kerja

- Pertamina Trans Kontinental dituntut memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan guna menjaga kepercayaan pelanggan.
- Pertamina Trans Kontinental dituntut menjaga hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan para mitra kerja guna menjaga kepercayaan para mitra kerja.

Pekerja

Menjadi Tempat Kerja Terpercaya di Mata Pekerja

- Pertamina Trans Kontinental memiliki tanggung jawab membangun hubungan kemitraan dengan pekerja, dengan menjadi tempat kerja yang ideal bagi profesional yang berinvestasi untuk pengembangan karir, dan memastikan lingkungan kerja yang kondusif bagi pekerja.

Pemangku Kepentingan Lain

Menjaga Keseimbangan Kepentingan dari Pemangku Kepentingan Lainnya

- Pertamina Trans Kontinental harus menjaga keseimbangan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan praktik pengelolaan yang sehat.

Otoritas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Aktivitas Usaha yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup

- Sebagai Perusahaan jasa yang memiliki kegiatan usaha di bidang perkapalan, *marine* dan logistik, Pertamina Trans Kontinental harus menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh kesadaran untuk mengelola dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan terhadap lingkungan hidup.

Shareholders

Providing added value to Shareholders

- Pertamina Trans Kontinental is required to provide service support to the business activities of PT Pertamina International Shipping as a Shareholder.
- Pertamina Trans Kontinental is always required to have good, healthy and sustainable performance and be able to generate profits and contribute in the form of dividends to Shareholders.

Customers & Business Partners

Maintain the trust of customers and work partners

- Pertamina Trans Kontinental is required to provide the best service to customers to maintain customer trust.
- Pertamina Trans Kontinental is required to maintain a mutually beneficial cooperative relationship with work partners to maintain the trust of work partners.

Workers

Become a Trusted Workplace in the Eyes of Workers

- Pertamina Trans Kontinental is responsible for building partnerships with workers by becoming an ideal workplace for professionals who invest in career development and ensuring a conducive work environment for workers.

Other Stakeholders

Maintaining the Balance of Interests from Other Stakeholders

- Pertamina Trans Kontinental must balance the interests of various other stakeholders. This is done by prioritizing compliance with applicable regulations and sound management practices.

Environmental Management Authority

Business Activities Related to the Environment

- As a service company with business activities in the shipping, marine and logistics sectors, Pertamina Trans Kontinental must carry out its business activities with full awareness of managing the impact of its business activities on the environment.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Peta Jalan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Road Map

Saat ini PTK berada pada fase *Good Governed Company*. Hal-hal yang dilakukan untuk mendukung tahapan tersebut adalah:

1. Penguatan Budaya Perusahaan.
2. Unit Pengendalian Gratifikasi ("UPG").
3. Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan *assessment* GCG.
4. Penyebarluasan informasi WBS.

Penerapan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2022

PTK secara berkesinambungan terus melakukan sosialisasi penerapan GCG, kepada seluruh pekerja, pejabat Perusahaan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, serta para pemangku kepentingan lain. Selama tahun 2022 terdapat beberapa program/kegiatan sosialisasi GCG yang telah dilaksanakan, antara lain melalui media *banner*, *broadcast*, serta acara Vendor Day.

Selain itu, PTK juga mengembangkan penerapan GCG di tahun 2022 dengan program kerja.

1. Penguatan Komitmen Implementasi GCG
Kegiatan yang dilakukan adalah penandatanganan Pakta Integritas, COC dan COI oleh seluruh Insan PTK.
2. Sosialisasi dan Internalisasi GCG
Kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan GCG bagi pekerja baru, penyegaran GCG bagi seluruh pekerja, pemberian materi GCG dan sosialisasi GCG dalam berbagai media Perusahaan.

Currently, PTK is in the *Good Governed Company* phase. The steps taken to support these stages are:

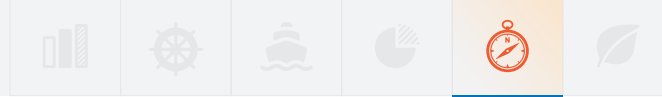
1. Strengthening Corporate Culture.
2. Gratification Control Unit ("UPG").
3. Improved compliance with LHKPN reporting, Gratification and GCG assessment.
4. WBS information dissemination.

Implementation and Strengthening of Corporate Governance in 2022

PTK continuously socialize the GCG implementation to all employees, Company officers including the Board of Commissioners and Directors, as well as other stakeholders. During 2022, there were several GCG socialization programs/activities have been carried out, including through banner media, broadcasts, and Vendor Day events.

In addition, PTK is also developing GCG implementation in 2022 with a work program.

1. Strengthening GCG Implementation Commitment
The activity carried out was signing the Integrity Pact, COC and COI by all PTK personnel.
2. Dissemination and Internalization of GCG
The activities carried out are the introduction of GCG for new employees, refreshment of GCG for all employees, provision of GCG materials and dissemination of GCG in various Company media.



Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan
Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

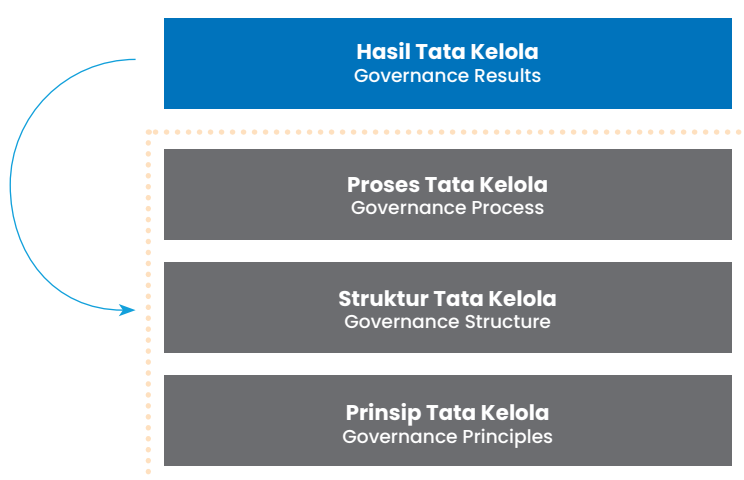
3. Implementasi Pengendalian Gratifikasi
PTK melaksanakan implementasi pengendalian Gratifikasi serta melakukan sosialisasi Gratifikasi.
4. Pengelolaan *Whistleblowing System*
Pengelolaan WBS dilakukan oleh Fungsi WBS PT Pertamina (Persero) dan ditindaklanjuti oleh Fungsi Investigation Audit, WBS & *Fraud Prevention* PT Pertamina (Persero) untuk kemudian dapat dilimpahkan atau dilakukan koordinasi dengan Fungsi Internal Audit *Holding/Subholding/Anak Perusahaan Services* jika dibutuhkan berdasarkan persetujuan CAE *Holding*.
5. Pengukuran Implementasi GCG
Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan *assessment* GCG tahun 2022, dengan pencapaian score pada tahun 2022 berdasarkan penilaian parameter Kementerian BUMN meningkat menjadi 87,200 atau SANGAT BAIK.
6. Penerapan ISO dan SMK3
Dalam rangka melindungi pekerjanya, PTK menerapkan OHSAS 18001:2007, sedangkan untuk menjaga mutu kepada para pelanggan, Perusahaan menerapkan ISO 9001:2008 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
7. Pengukuran Kinerja
Untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan meningkatkan kinerja bisnis, PTK mengikuti *Quality Management Assessment* ("QMA") berdasarkan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina ("KKEP"). *Assessment* dilakukan secara menyeluruh meliputi proses dan hasil kinerja operasional dan manajerial, dan akan diberikan umpan balik berupa agar Perusahaan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus-menerus dan berkesinambungan. KKEP dilaksanakan berdasarkan Keputusan Keputusan Direktur Utama Nomor Kpts-62/C0000/2017-S0, tanggal 3 November 2017 tentang Penilaian dan Pencapaian Kinerja Ekselen Perusahaan Berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) dan Surat Perintah Direktur Utama No. Kpts- 61/C0000/2015-S0 tanggal 3 November 2017 tentang Tim Pelaksana *Quality Management Assessment* ("QMA") Berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina ("KKEP").
3. Implementation of Gratification Control
PTK carries out Gratification control implementation and conducts Gratification socialization.
4. Whistleblowing System Management
WBS management is carried out by the WBS Function of PT Pertamina (Persero) and followed up by the Investigation Audit, WBS & Fraud Prevention Function of PT Pertamina (Persero) and will be delegated or coordinated with the Function of Internal Audit *Holding/Subholding/Services Subsidiary* if needed based on CAE *Holding* approval.
5. Measurement of GCG Implementation
The activity carried out is to carry out a GCG assessment in 2022, with the achievement of a score in 2022 based on the parameter assessment of the Ministry of SOEs increasing to 87.200 or VERY GOOD.
6. Application of ISO and SMK3
To protect its workers, PTK implements OHSAS 18001:2007, while to maintain quality for its customers, the Company implements ISO 9001:2008 and ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.
7. Performance Measurement
PTK follows the Quality Management Assessment ("QMA") based on Pertamina's Excellent Performance Criteria ("KKEP") to make continuous improvements and improve business performance. The assessment is carried out thoroughly, covering operational and managerial performance processes and results. Feedback will be given in the form of a feedback report so that the Company can improve and continuously improve performance. KKEP is carried out based on the Decree of the President Director Number Kpts-62/C0000/2017-S0, November 3, 2017, concerning the Assessment and Achievement of Company Excellence Performance Based on Pertamina's Excellent Performance Criteria (KKEP) and President Director's Order No. KPTS- 61/C0000/2015-S0 dated November 3, 2017, concerning the Quality Management Assessment ("QMA") Implementation Team Based on Pertamina Excellent Performance Criteria ("KKEP").

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Struktur dan Proses/Mekanisme Tata Kelola

Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola atau *Governance Principles* di lingkup Perusahaan terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Ke-2 aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.



Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan Proses Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perusahaan tergambarkan pada organ utama tata kelola Pertamina Trans Kontinental terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk komite dan fungsi yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko, dan Komite Investasi di bawah Dewan Komisaris, serta Fungsi *Corporate Secretary* dan Fungsi *Internal Audit* di bawah Direksi.

Governance Structure and Process/Mechanism

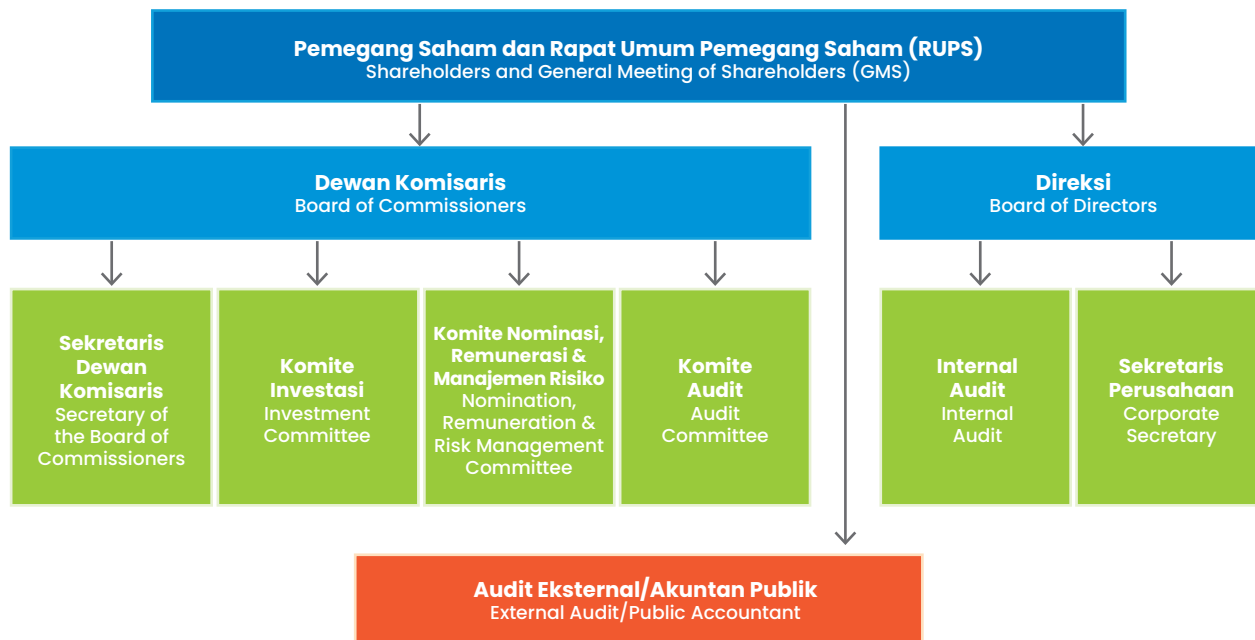
Implementing the Governance Principles within the Company consists of 2 (two) main aspects, namely, the Governance Structure and the Governance Process. These two aspects are continuous with one another, which in the end, will reflect the expected Governance Outcome.

The Governance Structure is an organ or device owned by the Company, an organ or instrument formed due to compliance with applicable laws and regulations, and an organ or device created due to internal needs to improve the implementation of GCG. While the Governance Process is a series of processes, habits, rules, and institutions that affect the management of the Company as a whole. The Governance process includes laws and regulations that apply to the Company, Standard Procedures, Charters, and documents until the rules that regulate the relationship between organs or devices are enacted.

In accordance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the corporate governance structure is described in the main governance organs of Pertamina Trans Kontinental consisting of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), the Board of Commissioners and the Board of Directors. In carrying out their duties, the Board of Commissioners and the Board of Directors form committees and functions, namely the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Nomination, Remuneration & Risk Management Committee, and the Investment Committee under the Board of Commissioners, as well as the Corporate Secretary Function and Internal Audit Function under the Board of Directors.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan
Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance



Agar Struktur Tata Kelola di atas dapat berjalan dengan baik dan memiliki batasan tanggung jawab masing-masing, diperlukan Proses Tata Kelola atau Mekanisme Tata Kelola sebagai aturan main bagi setiap organ dalam Struktur Tata Kelola agar dapat berjalan harmonis. Agar Proses Tata Kelola dapat berjalan dengan baik, diperlukan infrastruktur atau serangkaian pedoman dan kebijakan serta aturan internal, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi Perusahaan berbasis pengelolaan yang akuntabel.

For the above Governance Structure to work appropriately and have limits on their respective responsibilities, a Governance Process or Governance Mechanism is needed as a rule of the game for each organ in the Governance Structure so that it can run harmoniously. For the Governance Process to run appropriately, infrastructure or a series of guidelines and policies and internal rules are needed, which are expected to create an organizational environment based on accountable management.

Kebijakan tersebut dapat dilihat di bawah ini.

This policy can be seen below.

Kebijakan Tata Kelola PTK
PTK's Corporate Governance Policies

Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Guidelines for Corporate Governance

Code of Corporate Governance ditetapkan berdasarkan No. A-002/PTK0300/2022-S9. Pedoman mengatur mengenai: Referensi penerapan tata kelola perusahaan.

- Referensi penerapan tata kelola perusahaan.
- Struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari organ utama (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dan organ pendukung (Corporate Secretary, Internal Audit, Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko, dan Sekretariat Komisaris).
- Proses tata kelola perusahaan yang terdiri dari pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, RJPP dan RKAP, mekanisme rapat, benturan kepentingan, pengelolaan operasional, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya.
- Hubungan antara Pertamina Trans Kontinental dengan Induk dan Anak Perusahaan.
- Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan.

The Code of Corporate Governance is stipulated based on Board of Directors Decree No. A-002/PTK0300/2022-S9. The guidelines regulates:

- References of corporate governance implementation.
- Corporate governance structure, consisting of the main structures (GMS, Board of Commissioners and Board of Directors), and supporting structures (Corporate Secretary, Internal Audit, Commissioner Secretariat Bureau, and Audit Committee).
- Corporate governance process, consisting of appointing and dismissing the Board of Commissioners and Board of Directors, RJPP and RKAP, meeting mechanism, conflict of interest, operational management, financial management, and others.
- Relationship between Pertamina Trans Kontinental the Parent Company, as well as the Subsidiaries.
- Relationship with stakeholders.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Kebijakan Tata Kelola PTK

PTK's Corporate Governance Policies

Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku
Code of Conduct

Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ditetapkan berdasarkan No. A-003/PTK0300/2022-S9, dan menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Pertamina Trans Kontinental dalam mengelola Perusahaan.

The Code of Conduct is stipulated based on Board of Directors Decree No. A-003/PTK0300/2022-S9, and became a reference of conduct to the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees of Pertamina Trans Kontinental in managing the company.

Board Manual

Mengatur mengenai tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Regulate the procedures for working relationships between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Pedoman Komite
Committee Guidelines

Kebijakan mengenai tata cara kerja Komite, meliputi:

- Piagam Komite Audit.
- Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko.
- Piagam Komite Investasi.

Policies on the Committee's work procedure include:

- Audit Committee Charter
- Nomination, Remuneration & Risk Management Committee Charter.
- Investment Committee Charter

Pedoman Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ditetapkan berdasarkan Nomor Pdm-004/F0000/2016-S0. Pedoman mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam benturan kepentingan dan mekanisme pelaporan benturan kepentingan.

The Conflict of Interest Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree No. Pdm-004/F0000/2016-S0. The Guidelines regulate issues related to ethics in conflict of interest and reporting mechanism on conflict of interest.

Pedoman Fungsi Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control Function Guidelines

Pedoman Fungsi Pengendali Gratifikasi ditetapkan berdasarkan No. Pdm-005/F0000/2016-S0. Pedoman mengatur prinsip dasar pengendalian gratifikasi, parameter tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi, serta mekanisme pelaporan gratifikasi.

The Gratification Control Function Guidelines is stipulated based on No. PDM-005/F0000/2016-S0. The Guidelines regulated basic principles of gratification control, follow-up parameter on gratification reporting management, as well as gratification reporting mechanism.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Gratification Management Guidelines

Pedoman Pengendalian Gratifikasi, ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. PDM-004/PTK0300/2022-S9. Pedoman mengatur mengenai gratifikasi. Pedoman tersebut mengatur prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan pihak ketiga.

The Gratification Management Guidelines, Rejection & Receiving Reward/Souvenir, Entertainment Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree No. PDM-004/PTK0300/2022-S9. The guidelines regulate gratification. The Guidelines regulate basic principles, provisions in laws and regulations that organize gratification classification, as well as boundaries of receivment, provision of gift, and gift upon request from a third party.

Prosedur Whistleblowing System
Whistleblowing System Procedure

Prosedur Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. B-008/F1000/2019-S0 yang mengatur mengenai pengelolaan penanganan pengaduan dan penyingkapan *whistleblowing system*. Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) saat ini dikelola oleh Fungsi WBS PT Pertamina (Persero) yang diatur oleh Pedoman Pengelolaan Pengaduan No. A9-001/J00000/2022-S9 Revisi ke-0 berlaku terhitung mulai tanggal 19 Januari 2022.

The Whistleblowing System (WBS) Management Procedure is stipulated based on Board of Directors Decree No. B-008/F1000/2019-S0 that regulates complaint management and whistleblowing system disclosure.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Kebijakan Tata Kelola PTK

PTK's Corporate Governance Policies

Pedoman Sistem *Management* Anti Penyuapan

Anti-Bribery Management System Guidelines

Pedoman Pengelolaan Sistem *Management* Anti Penyuapan No. A-001/PTK0320/2021-S0 yang mengatur pengelolaan Sistem Manajemen Anti Suap di lingkup Perusahaan.

Anti-Bribery Management System Guidelines No. A-001/PTK0320/2021-S0 which regulates the management of the Anti-Bribery Management System within the Company.

Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan

Wealth Reporting Guidelines

Pedoman pelaporan terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. Kpts-547/C0000/2021-C0.

Reporting guidelines related to State Officials' Wealth Reports (LHKPN) are stipulated based on Decree No. Kpts-547/C0000/2021-C0.

Hasil Tata Kelola: Evaluasi, Pemantauan, dan Penilaian Penerapan Tata Kelola

Governance Results: Evaluation, Monitoring, and Assessment of Governance Implementation

6 (enam) Aspek *Assessment* GCG (Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

6 (six) GCG Assessment Aspects
(Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012)

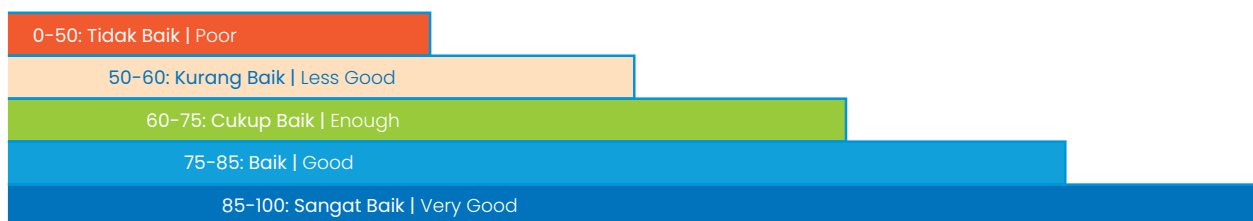


Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Hasil penilaian melalui metode ini menggunakan predikat dengan rentang skor sebagai berikut.

The results of the assessment through this method use predicates with the following score ranges.



Di tahun 2022 PTK melakukan penilaian penerapan GCG dengan rincian informasi sebagai berikut.

In 2022 PTK evaluated the implementation of GCG with detailed information as follows.

Jenis Penilaian Type of Assessment	:	Assessment
Penilai Assessor	:	PT Multi Utama Indo Jasa
Periode Penerapan Pengukuran Measurement Implementation Period	:	Tahun Buku 2022 (1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022) Fiscal Year 2022 (January 1, 2022 to December 31, 2022)
Waktu Pengukuran Measurement Time	:	1 Februari 2023 sd 9 April 2023 February 1, 2023 to April 9, 2023
Waktu Terbit Laporan Hasil Penilaian Publication Time of Assessment Result Report	:	10 Mei 2023 May 10, 2023

Rincian hasil penilaian penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2022 dan perbandingannya penilaian penerapan GCG dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat di bawah ini.

Details of the results of the Company's GCG implementation assessment for the 2022 Fiscal Year and a comparison of the GCG implementation assessments in the last 2 (two) years can be seen below.

Hasil Penilaian Assessment GCG Perusahaan 2020-2022

Results of the 2020-2022 Company GCG Assessment

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Capaian Tahun 2022 Achievement 2022 (Assessment)		Capaian Tahun 2021 Achievement 2021 (Assessment)		Capaian Tahun 2020 Achievement 2020 (Assessment)	
		Skor Score	Capaian Achievement	Skor Score	Capaian Achievement	Skor Score	Capaian Achievement
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Implementation of Sustainable Good Corporate Governance	7,000	6,696	95,650	6,512	93,03	6,924	98,91
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,000	7,620	84,666	5,915	65,72	7,190	79,89
Dewan Komisaris Board of Commissioner	35,000	34,038	97,250	29,256	83,59	28,850	82,43
Direksi Board of Director	35,000	30,856	88,160	30,726	87,79	31,587	90,25
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information disclosure and Transparency	9,000	7,366	81,847	7,095	78,83	7,394	82,16
Aspek Lainnya Other aspects	5,000	0,625	12,500	-	-	-	-

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan
Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Hasil Penilaian Assessment GCG Perusahaan 2020–2022
Results of the 2020–2022 Company GCG Assessment

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Capaian Tahun 2022 Achievement 2022 (Assessment)		Capaian Tahun 2021 Achievement 2021 (Assessment)		Capaian Tahun 2020 Achievement 2020 (Assessment)	
		Skor Score	Capaian Achievement	Skor Score	Capaian Achievement	Skor Score	Capaian Achievement
Nilai rata-rata Average Score	100,000		87,200		79,504		81,944
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification of GCG Implementation Quality		"Sangat Baik" "Very Good"		"Baik" "Good"			

Hasil *Area of Improvement* ("AOI") atau rekomendasi atas *assessment* penerapan GCG yang dilakukan untuk tahun 2022, serta ada atau tidak adanya kesamaan dengan hasil *assessment* untuk tahun buku 2021 dan *self assessment* untuk tahun buku 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The results of the *Area of Improvement* ("AOI") or recommendations for the GCG implementation assessment carried out for 2022 and whether or not there are similarities between the assessment results for the 2021 Fiscal Year and the self-assessment for the 2020 Fiscal Year can be seen in the table below.

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Results of GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 Available in the GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2021 Fiscal Year	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Available in the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2020 Fiscal Year	Rencana Tindak Lanjut Follow up plan

I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance				
1	Terdapat pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (<i>whistleblowing system</i>) There is reporting on the implementation of policies regarding reporting of alleged irregularities in the Company (<i>whistleblowing system</i>)	x	x	Membuat laporan kepada Direksi terkait pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (<i>whistleblowing system</i>) Making reports to the Board of Directors regarding reporting alleged irregularities in the Company (<i>whistleblowing system</i>)
2	Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan <i>whistleblowing system</i> secara berkala. There is regular evaluation and reporting of the implementation of the <i>whistleblowing system</i> policy.	x	x	Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan <i>whistleblowing system</i> secara berkala. Evaluate and report on the implementation of the <i>whistleblowing system</i> policy on a regular basis.
II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners				
1	Menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi yang memuat ketentuan atau materi terkait mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Direksi; dan Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>) bagi anggota Direksi Establish Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Board of Directors, which contains provisions or materials related to the mechanism for selecting or nominating candidates for members of the Board of Directors; and Assessment/Fit and Proper Test for members of the Board of Directors.	v	v	Menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi yang memuat ketentuan atau materi terkait mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Direksi; dan Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>) bagi anggota Direksi Establish Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Board of Directors, which contains provisions or materials related to the mechanism for selecting or nominating candidates for members of the Board of Directors; and Assessment/testing of fit and proper (<i>fit and proper test</i>) for members of the Board of Directors.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan
Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Results of GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 Available in the GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2021 Fiscal Year	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Available in the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2020 Fiscal Year	Rencana Tindak Lanjut Follow up plan
2	Menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris yang memuat materi terkait mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris; dan Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>) bagi calon anggota Dewan Komisaris Establishing Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners that contain material related to the mechanism for screening or nominating candidates for members of the Board of Commissioners; and Assessment/Fit and Proper Test for candidates for members of the Board of Commissioners.	v	v	Menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris yang memuat materi terkait mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris; dan Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>) bagi calon anggota Dewan Komisaris Establish Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners, which contains material related to the mechanism for selecting or nominating prospective members of the Board of Commissioners; and Assessment/Fit and Proper Test) for prospective members of the Board of Commissioners.
3	RUPS mengesahkan atau menyetujui rancangan RJPP atau Revisi RJPP The GMS approves or approves the RJPP draft or RJPP revision	v	x	RUPS mengesahkan atau menyetujui rancangan RJPP atau Revisi RJPP The GMS approves or approves the RJPP draft or RJPP revision
III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board				
1	Dewan Komisaris menyusun kebijakan terkait informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi. Ketentuan ini mengatur memuat bentuk informasi yang harus disampaikan Direksi terdiri atas informasi yang bersifat rutin-berkala dan informasi yang bersifat insidental, standar waktu penyampaian dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi. The Board of Commissioners develops policies related to information that the Board of Directors must provide, and these policies are submitted to the Board of Directors. This provision stipulates that the form of information that the Board of Directors must submit consists of routine-periodical information and incidental information, the standard time for submission and the mechanism for conveying this information by the Board of Directors.	v	v	Dewan Komisaris menyusun kebijakan terkait informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi. Ketentuan ini mengatur memuat bentuk informasi yang harus disampaikan Direksi terdiri atas informasi yang bersifat rutin-berkala dan informasi yang bersifat insidental, standar waktu penyampaian dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi The Board of Commissioners develops policies related to information that the Board of Directors must provide, and these policies are submitted to the Board of Directors. This provision stipulates that the form of information that the Board of Directors must submit consists of information that is routine-periodical and information that is incidental in nature, the standard time for submission and the mechanism for submitting this information by the Board of Directors
2	Pedoman dan Kebijakan Dewan Komisaris mengatur terkait Etika Rapat. The Board of Commissioners' Guidelines and Policy regulates Meeting Ethics.	x	x	Membuat Pedoman dan Kebijakan Dewan Komisaris yang mengatur terkait Etika Rapat Make Board of Commissioners Guidelines and Policies that regulate Meeting Ethics
3	Dalam risalah rapat mencantumkan alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam rapat The minutes of meeting include the reasons for the absence of the Board of Commissioners at the meeting	v	v	Mencantumkan dalam risalah rapat alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam rapat Include in the minutes of meeting the reasons for the absence of the Board of Commissioners at the meeting

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan
Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Results of GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 Available in the GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2021 Fiscal Year	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Available in the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2020 Fiscal Year	Rencana Tindak Lanjut Follow up plan
IV Direksi Board of Directors				
1	SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur. SOPs for the Company's core business processes are carried out consistently and there are no deviations from procedures.	v	x	Menjalankan SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan dan dilaksanakan secara konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur. Carry out SOPs for the Company's core business processes and are implemented consistently and there are no deviations from procedures.
2	Mendokumentasikan penyampaian rancangan RJPP kepada Pemegang Saham/RUPS yang dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan, serta menyampaikan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu sesuai ketentuan yaitu 30 September sebelum tahun periode RJPP berjalan Documenting the submission of the RJPP draft to Shareholders/GMS which is carried out on time, namely 31 October before the current year's RJPP period, as well as submitting the RJPP draft to the Board of Commissioners in a timely manner according to the provisions, namely September 30 before the current year's RJPP period	v	v	Mendokumentasikan penyampaian rancangan RJPP kepada Pemegang Saham/RUPS yang dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan, serta menyampaikan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu sesuai ketentuan yaitu 30 September sebelum tahun periode RJPP berjala Documenting the submission of the RJPP draft to Shareholders/GMS which is carried out on time, namely 31 October before the current year's RJPP period, as well as submitting the RJPP draft to the Board of Commissioners in a timely manner according to the provisions, namely 30 September before the year the RJPP period runs
3	Melakukan pengisian posisi jabatan kosong dalam struktur organisasi Perusahaan atau menetapkan pelaksana tugas atas jabatan kosong tersebut Filling in vacant positions in the Company's organizational structure or assigning task executors for these vacant positions	v	v	Melakukan pengisian posisi jabatan kosong dalam struktur organisasi Perusahaan atau menetapkan pelaksana tugas atas jabatan kosong tersebut Filling in vacant positions in the Company's organizational structure or assigning task executors for these vacant positions
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency				
1	Terdapat pertemuan/ <i>gathering</i> dengan <i>Customer Gathering</i> dan <i>Media Gathering</i> There are meetings/ <i>gatherings</i> with Customer Gathering and Media Gathering	x	x	Melakukan pertemuan/ <i>gathering</i> dengan <i>Customer Gathering</i> dan <i>Media Gathering</i> Conduct meetings/ <i>gatherings</i> with Customer Gathering and Media Gathering

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 Results of GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 Available in the GCG Implementation Assessment Recommendation for the 2021 Fiscal Year	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Available in the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2020 Fiscal Year	Rencana Tindak Lanjut Follow up plan
2	Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan tertinggi dalam <i>Sustainability Reporting Award</i> sebagai contoh Asia <i>Sustainability Reporting Rating/ASRRAT</i> The company participated in and received the highest award in the Sustainability Reporting Award for example the Asia Sustainability Reporting Rating/ASRRAT	v	v	Ikut berpartisipasi dan memperoleh penghargaan tertinggi dalam <i>Sustainability Reporting Award</i> sebagai contoh Asia <i>Sustainability Reporting Rating/ASRRAT</i> Participate and receive the highest award in the Sustainability Reporting Award as an example of the Asia Sustainability Reporting Rating/ASRRAT
3	Perusahaan meraih Penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi The company won awards in the field of publication and information disclosure	v	v	Mengikuti dan mendapatkan Penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi Follow and receive awards in the field of publication and information disclosure
VI Aspek Lainnya Other Aspects				
1	Menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain di bidang/area Perusahaan lain antara lain produk, proses fungsi pendukung kinerja organisasi atau strategi Become best practices or benchmark goals for other companies in other fields/areas of the Company, including products, processes, functions, organizational performance support or strategy	v	v	Menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain di bidang/area Perusahaan lain antara lain produk, proses fungsi pendukung kinerja organisasi atau strategi Become best practices or benchmark goals for other companies in other fields/areas of the Company, including products, processes, functions, organizational performance support or strategy
2	Mencapai kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha Perusahaan atau di industrinya. Achieve the best company performance in the Company's business sector or in its industry.	v	v	Mencapai kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha Perusahaan atau di industrinya dengan mendapatkan penghargaan Achieve the best company performance in the Company's business sector or in its industry by receiving awards

v = Terdapat dalam rekomendasi *Self Assessment* penerapan GCG tahun buku 2020 dan/atau *Assessment* untuk tahun buku 2021x = Tidak terdapat dalam rekomendasi *Self Assessment* penerapan GCG tahun buku 2020 dan/atau *Assessment* untuk tahun buku 2021

v = contained in the GCG Implementation Self Assessment recommendation for the 2020 Fiscal Year and/or the Assessment for the 2021 Fiscal Year

x = Not included in the GCG Implementation Self Assessment recommendation for the 2020 Fiscal Year and/or the Assessment for the 2021 Fiscal Year

Komitmen Perusahaan dalam menyempurnakan implementasi GCG di antaranya dilakukan dengan menindaklanjuti setiap temuan dalam penilaian penerapan GCG yang menjadi rekomendasi dalam area peningkatan atau *Area of Improvement* atas penilaian penerapan GCG. Di tahun 2021, PTK melakukan *assessment* penerapan GCG untuk penilaian tahun buku 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP"). Melalui laporan No. PE.05.03/LGCG-163/D404/1/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang *Assessment Penerapan Good Corporate Governance*

The Company's commitment to perfecting GCG implementation includes following up on any findings in the GCG implementation assessment, which become recommendations in the Area of Improvement for assessing GCG implementation. In 2021, PTK will conduct an assessment of GCG implementation for the 2021 Fiscal Year assessment conducted by the Financial and Development Supervisory Agency ("BPKP"). Through report No. PE.05.03/LGCG-163/D404/1/2022 dated May 30, 2022, concerning the 2021 Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

("GCG") Tahun 2021 pada PT Pertamina Trans Kontinental, BPKP memberikan penilaian skor sebagaimana telah disampaikan di atas, dengan beberapa *Area of Improvement* yang dapat menjadi bagian dari evaluasi bagi PTK untuk meningkatkan penerapan GCG.

Berikut disampaikan hasil *Area of Improvement* atas hasil *assessment* penerapan GCG tahun buku 2021 oleh BPKP, dan upaya PTK untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada.

at PT Pertamina Trans Kontinental, BPKP provides an assessment of the score as stated above, with several Areas of Improvement that can be part of the evaluation for PTK to improve GCG implementation.

Following are the results of the Area of Improvement on the results of the GCG implementation assessment for the 2021 Fiscal Year by BPKP and PTK's efforts to follow up

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2021 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun 2022 Follow Up Until the End of 2022		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
I Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Aspects of Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance				
1	Sesuai dengan kebutuhan pemutakhiran Pedoman, karena adanya perubahan Struktur Organisasi pada PT Pertamina (Persero) dan AP nya menjadi Holding dan SHU serta AP, PTK belum melakukan kajian/telaahan dan belum melakukan pemutakhiran atas Code of CG, Board Manual dan Code of Conduct serta produk turunan lainnya. Sesuai dengan kebutuhan pemutakhiran Pedoman, karena adanya perubahan Struktur Organisasi pada PT Pertamina (Persero) dan AP nya menjadi Holding dan SHU serta AP, PTK belum melakukan kajian/telaahan dan belum melakukan pemutakhiran atas Code of CG, Board Manual dan Code of Conduct serta produk turunan lainnya.	v	2022	Telah dilakukan pemutakhiran pedoman COCG , Board Manual dan Code of Conduct serta produk turunan lainnya The Code of CGG, Board Manual, and Code of Conduct and other derivative products have been updated.
2	Kebijakan tentang pengaturan gratifikasi masih dalam bentuk draft. Kebijakan tentang pengaturan gratifikasi masih dalam bentuk draft.	v	2022	Telah dimutakhirkan Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Gratification Management Guidelines have been updated
II Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS				
1	Belum menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi. Has not yet established the Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Board of Directors.	v	2022	Melakukan penetapan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Performing the determination of the Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Board of Directors
2	Keputusan pemberhentian Direksi belum secara eksplisit mencantumkan alasannya. The decision to dismiss the Board of Directors does not explicitly state the reasons.	v	2022	Mencantumkan alasan pemberhentian Direksi dalam surat keputusan pemberhentian Direksi Include the reason for the dismissal of the Board of Directors in the decision letter for the dismissal of the Board of Directors.
3	Belum menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris. Has not yet stipulated the Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners.	v	2022	Menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris. Establish Guidelines for the Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners.
4	Belum meminta masukan secara formal dari Departemen teknis BUMN/institusi teknis lain untuk calon anggota Komisaris. Has not yet asked for formal input from the SOEs technical department/other technical institutions for prospective members of the Board of Commissioners.	v	2022	Meminta masukan secara formal dari Departemen teknis BUMN/institusi teknis lain untuk calon anggota Komisaris Requesting formal input from the SOEs technical department/other technical institutions for prospective members of the Board of Commissioners

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2021 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2022 Follow Up Until the End of 2022		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
5	Belum melakukan penilaian terhadap calon Dewan Komisaris (dilakukan oleh Holding, BA konsultasi DPKP dengan Kementerian BUMN juga dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Holding. Has not yet conducted an assessment of the candidates for the Board of Commissioners (conducted by Holding, BA DPKP consultation with the Ministry of SOEs also carried out by PT Pertamina (Persero) as Holding.	v	2022	Melakukan penilaian terhadap calon Dewan Komisaris (dilakukan oleh Holding, BA konsultasi DPKP dengan Kementerian BUMN juga dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Holding Conducting an assessment of the candidates for the Board of Commissioners (conducted by Holding, BA DPKP consultation with the Ministry of SOEs is also carried out by PT Pertamina (Persero) as Holding
6	Pengangkatan Dewan Komisaris belum tepat waktu (melebihi 30 hari sejak terjadi kekosongan Komisaris). The appointment of the Board of Commissioners has not been timely (more than 30 days since the vacancy of the Commissioner occurred).	v	2022	Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan tepat waktu The appointment of the Board of Commissioners is carried out on time
7	Pengangkatan Dewan Komisaris belum didukung dengan Berita Acara Pelantikan. The appointment of the Board of Commissioners has not been supported by the Minutes of Inauguration.	v	2022	Membuat Berita Acara Pelantikan atas Pengangkatan Dewan Komisaris Make Minutes of the Inauguration of the Appointment of the Board of Commissioners
8	Belum menetapkan Komisaris Independen yang secara eksplisit dinyatakan dalam SK Pengangkatan. Has not yet appointed an Independent Commissioner which is explicitly stated in the Appointment Decree.	v	2022	Menetapkan Komisaris Independen yang secara eksplisit dinyatakan dalam SK Pengangkatan. Appoint Independent Commissioners who are explicitly stated in the Decree of Appointment.
9	Belum menetapkan aturan yang secara eksplisit menyebutkan maksimal jumlah jabatan yang boleh dipegang oleh seorang Komisaris. Has not yet established a rule that explicitly states the maximum number of positions a Commissioner may hold.	v	2022	Menetapkan aturan yang secara eksplisit menyebutkan maksimal jumlah jabatan yang boleh dipegang oleh seorang Komisaris. Establish rules that explicitly state the maximum number of positions a Commissioner may hold.
10	Belum menetapkan Pedoman Penyusunan RJPP dan RKAP. Has not yet established the Guidelines for the Preparation of RJPP and RKAP.	v	2022	Menetapkan Pedoman Penyusunan RJPP dan RKAP Establish guidelines for preparing RJPP and RKAP
11	Rancangan RJPP belum disahkan/pengelesaian terlambat. Rancangan RJPP periode 2021-2026 tidak disahkan karena adanya revisi menjadi Rancangan RJPP periode 2022-2026. Rancangan Revisi RJPP masih dalam proses penyusunan oleh PTK (SPBD). Still need to ratify the draft RJPP/late ratification. The RJPP draft for the 2021-2026 period still needs to be ratified due to a revision to become the RJPP Draft for the 2022-2026 period. The RJPP Revision Draft is still in the process of being drafted by the PTK (SPBD).	v	2022	Melakukan pengesahan Rancangan RJPP tepat waktu. Approval of the RJPP Draft on time.
12	Pengesahan RKAP - Revisi RKAP terlambat. RKAP Approval - Late RKAP revision.	v	2022	Pengesahan RKAP - Revisi RKAP dilakukan tepat waktu Approval of RKAP - Revision of RKAP is done on time
13	Belum memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan RUPS (perubahan cara pelaksanaan divestasi atas kapal MPV Petrogas Supply 2 dan persetujuan divestasi kapal RIB 4). Has not yet given approval/decision on the proposed corporate action which needs to be approved by the GMS (change in the method of implementing the divestment of the Petrogas Supply 2 MPV vessel and approval of the RIB 4 vessel divestment).	v	2022	Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan RUPS (perubahan cara pelaksanaan divestasi atas kapal MPV Petrogas Supply 2 dan persetujuan divestasi kapal RIB 4). Provide approval/decisions on proposed corporate actions that require approval from the GMS (changes in the method of implementing the divestment of the Petrogas Supply 2 MPV vessel and approval of the RIB 4 vessel divestment).

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan
Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2021 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2022 Follow Up Until the End of 2022		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
14	Belum menetapkan pedoman penilaian kinerja Direksi individu, mengesahkan target kinerja individu Direksi, memberikan penilaian Kinerja Direksi individu. Has not yet established guidelines for evaluating individual Directors' performance, ratified individual Directors' performance targets, provided individual Directors' performance assessments.	v	2022	Menetapkan pedoman penilaian kinerja Direksi individu, mengesahkan target kinerja individu Direksi, memberikan penilaian Kinerja Direksi individu Establish guidelines for evaluating individual Directors' performance, approve individual Directors' performance targets, provide individual Directors' performance assessments
15	Belum menetapkan pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris dan pengesahan target kinerja kolegal Dewan Komisaris. Has not yet established guidelines for assessing the performance of the Board of Commissioners and ratifying the collegial performance targets for the Board of Commissioners.	v	2022	Menetapkan pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris dan pengesahan target kinerja kolegal Dewan Komisaris Establish guidelines for evaluating the performance of the Board of Commissioners and ratification of collegial performance targets for the Board of Commissioners
16	Belum menetapkan pedoman penunjukan auditor eksternal, belum melakukan penelaahan calon-calon Auditor Eksternal. Has not yet established guidelines for the appointment of external auditors, has not conducted a review of external auditor candidates.	v	2022	Menetapkan pedoman penunjukan auditor eksternal, belum melakukan penelaahan calon-calon Auditor Eksternal Establish guidelines for the appointment of external auditors, have not yet conducted a review of external auditor candidates
17	Belum menetapkan kebijakan penggunaan laba bersih Perusahaan. Has not yet set a policy on the use of the Company's net profit.	v	2022	Menetapkan kebijakan penggunaan laba bersih Perusahaan Establish a policy on the use of the Company's net profit
18	Belum menyusun rencana tindak serta aksi untuk menindaklanjuti <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment</i> GCG. Has not yet prepared a plan of action and action to follow up on areas of improvement on the results of the GCG assessment.	v	2022	Menyusun rencana tindak serta aksi untuk menindaklanjuti <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment</i> GCG. Prepare action plans and actions to follow up on areas of improvement on GCG assessment results.
III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board				
1	Belum dilakukan pemutakhiran Pedoman dan Kebijakan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners' Guidelines and Policies have not been updated yet.	v	2022/2023	Pada tahun 2022 difokuskan melengkapi dan memutakhirkan Piagam Komite. Pemutakhiran Pedoman dan Kebijakan Dewan Komisaris direncanakan dilakukan pada tahun 2023. The focus in 2022 was on completing and updating the Committee Charter. Updating the Board of Commissioners' Guidelines and Policies is planned for 2023.
2	Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris baru ditetapkan secara formal pada akhir tahun anggaran (tertanggal 30 Desember 2021). The division of tasks among members of the new Board of Commissioners is formally determined at the end of the fiscal year (dated December 30, 2021).	v	2022	Pembagian tugas Dewan Komisaris telah ditetapkan sejak awal tahun 2022 dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-188-DEKOM.PTK-2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang kemudian direvisi lebih lanjut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-026/DEKOM.PTK/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris bersamaan dengan dibentuknya Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko. The division of duties for the Board of Commissioners has been determined since the beginning of 2022 with reference to the Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-188-DEKOM.PTK-2021 December 30, 2021, concerning the Distribution of Supervisory Duties for the Board of Commissioners, which was further revised with the issuance of Board of Commissioners Decree No. Kpts-026/DEKOM.PTK/2022, dated February 14, 2022, concerning the Distribution of Oversight Duties for the Board of Commissioners along with the establishment of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan
Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2021 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2022 Follow Up Until the End of 2022		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
3	Belum melakukan telaahan dan pemberian pendapat atas rancangan Revisi RJPP (revisi dari Rancangan RJPP 2021-2026 menjadi Rancangan RJPP 2022-2026) sebagai bahan pertimbangan keputusan RUPS. Have not conducted a review and provide opinion on the RJPP Revision draft (revision from the 2021-2026 RJPP Draft to the 2022-2026 RJPP Draft) as material for consideration in the GMS decision.	v	2022	Dewan Komisaris telah menyampaikan masukan tertulis mengenai RJPP melalui Surat Dewan Komisaris No. 150-DEKOM.PTK-2022 tanggal 13 Oktober 2022 (BOD) Arahan DEKOM thd RJPP, RKAP 2023, <i>Profit Enhancement & Cost Optimization</i>, Digitalisasi. Adapun pengajuan/permintaan rekomendasi Dewan Komisaris perihal RJPP dari Direksi masih belum ada hingga berakhirnya tahun 2022. The Board of Commissioners submitted written input regarding the RJPP through the Board of Commissioners Letter No. 150-DEKOM.PTK-2022 dated October 13, 2022, (BOD) Directives from DEKOM on RJPP, RKAP 2023, Profit Enhancement & Cost Opti., Digitalization. As for the proposal/request for recommendations from the Board of Commissioners regarding the RJPP from the Board of Directors, there is still no submission until the end of 2022.
4	Belum ada rencana kerja penunjukkan Auditor eksternal. There is no work plan for the appointment of an external auditor.	v	2023	Dalam Rencana Kerja Anggaran Dewan Komisaris tahun 2023 telah dicantumkan bahwa Komite Audit akan melakukan review atas usulan Manajemen terkait pengadaan dan penunjukan auditor eksternal. Hal ini dikarenakan penunjukan auditor eksternal harus diselaraskan dengan kebijakan dari Subholding Integrated Marine & Logistics maupun Holding PT. Pertamina (Persero). Di tahun 2022, Dewan Komisaris melalui Surat No. 175/DEKOM.PTK/2022 telah memberikan rekomendasi persetujuan terkait pelaksanaan pengadaan jasa audit laporan keuangan di PTK untuk tahun buku 2022, 2023 dan 2024. The Board of Commissioners' 2023 Budget Work Plan has stated that the Audit Committee will review Management's proposals regarding the procurement and appointment of external auditors. This is because the appointment of an external auditor must be aligned with the policies of Subholding Integrated Marine & Logistics and Holding PT. Pertamina (Persero). In 2022, the Board of Commissioners through Letter No. 175/DEKOM.PTK/2022 has provided recommendations for approval regarding the procurement of financial statement audit services at PTK for the 2022, 2023 and 2024 fiscal years.
5	Belum melakukan proses usulan calon Auditor eksternal ke Pemegang Saham. Has not yet carried out the process of proposing candidates for external auditors to the Shareholders.	v	2022	Melalui Surat Dewan Komisaris No. 151/DEKOM.PTK/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan di PT Pertamina Trans Kontinental, Anak Perusahaan, dan Afiliasinya (ditembuskan kepada Pemegang Saham) dalam RUPS telah memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk penetapan KAP (Akta No. 16 tanggal 16 Juni 2022 BA RUPS) Through Letter of the Board of Commissioners No. 151/DEKOM.PTK/2022, dated October 21, 2022, regarding the Recommendation of the Board of Commissioners regarding the Implementation of Procurement of Audit Services (copy to Shareholders) at the GMS, has authorized the Board of Commissioners to determine KAP (Deed No. 16 dated June 16, 2022, Minutes of GMS)

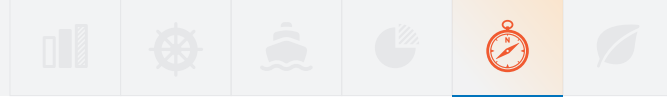
Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan
Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2021 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2022 Follow Up Until the End of 2022		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
6	Belum menetapkan kriteria seleksi bagi calon Direksi yang dimuat dalam Kebijakan Usulan Pencalonan Direksi. Has not yet determined the selection criteria for candidates for the Board of Directors which are contained in the Proposal Policy for the Candidates for the Board of Directors.	x	-	-
7	Belum melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang akan diusulkan ke Pemegang Saham. Has not yet conducted research/examination of the candidates for the Board of Directors who will be proposed to the Shareholders.	x	-	-
8	Belum mengusulkan calon Direksi kepada Pemegang Saham. Has not proposed a candidate for the Board of Directors to the Shareholders.	x	-	-
9	Belum melakukan penilaian kinerja Direksi individual. Have not yet conducted individual Directors performance assessments.	v	2022	Dewan Komisaris mendorong adanya Key Performance Indicator ("KPI") individual Direksi dan sejak tahun 2022, telah ada KPI individual Direksi yang ditetapkan dengan melalui persetujuan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners encourages the existence of individual Key Performance Indicators ("KPI") for the Directors. Since 2022, individual KPIs for the Directors have been established with the approval of the Board of Commissioners.
10	Belum melakukan evaluasi atas kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan PTK. Have not yet evaluated the management policy of PTK's subsidiary/joint venture company.	v	2022	Telah dilakukan Evaluasi/diskusi dan disampaikan kepada Direksi melalui Surat Dewan Komisaris No. 073/DEKOM.PTK/2022 tanggal 28 April 2022 (BOD) Catatan Penting Atas Diskusi Bersama Komisaris dan Direktur AP PTK Evaluation/discussion has been carried out and submitted to the Board of Directors through Letter of the Board of Commissioners No. 073/DEKOM.PTK/2022 dated April 28, 2022, (BOD) Important Notes on Discussions with Commissioners and Directors of AP PTK
IV Direksi Board of Directors				
1	Belum semua deskripsi dan spesifikasi jabatan dalam struktur organisasi PTK ditetapkan karena masih dalam proses revisi. Not all job descriptions and specifications in the PTK organizational structure have been determined because they are still in the revision process.	x	2022	Dalam proses tindak lanjut untuk membuat deskripsi dan spesifikasi jabatan dalam struktur organisasi PTK In the follow-up process to create job descriptions and specifications in the PTK organizational structure
2	Belum menyesuaikan SOP terkait dengan masuknya Fungsi Marine ke dalam struktur PTK. Have not adjusted the SOP related to the inclusion of the Marine Function into the PTK structure.	x	2022	Dalam proses tindak lanjut untuk menyesuaikan SOP terkait dengan masuknya Fungsi Marine ke dalam struktur PTK. In the follow-up process to adjust the SOP related to the inclusion of the Marine Function into the PTK structure.
3	Rancangan RJPP 2021-2026 belum disahkan RUPS, Rancangan Revisi RJPP 2022-2026 masih di Tim Penyusun. The 2021-2026 RJPP draft has not been ratified by the GMS, the 2022-2026 RJPP Revision Draft is still in the Drafting Team.	x	2022-2023	Dalam proses untuk tindak lanjut mensahkan Rancangan RJPP 2022-2026 In the process of following up on ratifying the 2022-2026 RJPP Draft

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2021 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2022 Follow Up Until the End of 2022		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
4	RKAP 2021-Revisi belum disahkan oleh RUPS. 2021-Revised RKAP has not been ratified by the GMS.	v	2022	Mensahkan RKAP 2021-Revisi Ratified the 2021-Revised RKAP
5	Terdapat jabatan yang kosong dalam struktur organisasi. There are vacant positions in the organizational structure.	v	2022	Dalam proses tindak lanjut agar tidak terdapat jabatan yang kosong dalam struktur organisasi In the follow-up process so that there are no vacant positions in the organizational structure
6	Belum memiliki mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja Perusahaan. There is no mechanism yet for the Board of Directors to immediately discuss current issues regarding changes in the business environment and issues that have a major impact on the company's business and the company's performance.	x	2022	Melakukan Dalam proses tindak lanjut untuk melakukan revisi board manual terkait mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja Perusahaan. Undertake In the follow-up process to revise the board manual regarding the mechanism for the Board of Directors to immediately discuss current issues regarding changes in the business environment and issues that have a significant impact on the Company's business and the Company's performance.
7	Proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi belum dilaksanakan tepat waktu sesuai pedoman/mekanisme tentang pengambilan keputusan. The process of making decisions or policies of the Board of Directors has not been carried out in a timely manner according to the guidelines/mechanisms regarding decision making.	v	2022	Melaksanakan proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi tepat waktu sesuai pedoman/mekanisme tentang pengambilan keputusan. Carry out the process of making decisions or policies of the Board of Directors in a timely manner according to the guidelines/mechanisms regarding decision making.
8	Belum dilakukan audit atas penerapan TI. An audit has not been carried out on the implementation of TI.	x	2022	Melakukan audit atas penerapan TI. Conduct an audit on the implementation of TI.
9	Belum ada penetapan kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (<i>risk and legal review</i>) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam RKAP There is no stipulation of risk and legal review evaluation activities on business initiative plans, policies and cooperation plans that will be carried out by the Company in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).	v	2022	Melakukan evaluasi kajian risiko dan legal (<i>risk and legal review</i>) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam RKAP Evaluate risk and legal reviews of planned business initiatives, policies and plans for cooperation that will be carried out by the Company in the RKAP
10	RUPS RJPP tidak terlaksana GMS on Company's Long-Term Plan ("RJPP") is not realized	v	2023	Melaksanakan RUPS RJPP Held GMS on RJPP
11	RUPS RKAP terlambat GMS on Company's Work Plan and Budget ("RKAP") is delayed	v	2023	Melaksanakan RUPS RKAP tepat waktu Held GMS on RKAP in a timely manner
v Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency				
1	Berita dan konten dalam situs web belum dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini. News and content on the website have not been updated according to current conditions.	v	2022	Dilakukan pemutakhiran konten dan nama <i>website</i> Update content and website name



Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2021 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2021 Fiscal Year	Tindak Lanjut Hingga Akhir Tahun Tahun 2022 Follow Up Until the End of 2022		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut Follow-Up Period	Bentuk Tindak Lanjut Follow-Up Form
2	Laporan tahunan belum memuat; • Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan. • Uraian kenaikan pendapatan usaha belum secara spesifik menyebutkan sumber usahanya. • Belum memuat bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun. The annual report has not yet been published; • Description of the substantial components of other income and expenses, to be able to know the results of the Company's operations. • Description of the increase in operating income has not specifically stated the source of the business. • Has not yet included a discussion of the impact of price changes on the Company's sales or net income and the Company's operating profit for 2 (two) years.	v	2022	Membuat laporan tahunan yang memuat uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan. • Uraian kenaikan pendapatan usaha belum secara spesifik menyebutkan sumber usahanya. • Belum memuat bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun. Make an annual report that contains a description of the substantial components of other income and expenses, with a view to find out the results of the Company's operations. • The description of the increase in revenue has not specifically stated the source of business. • Has not yet included a discussion on the impact of price changes on the Company's sales or net revenue and the Company's operating profit for 2 (two) years.
3	Belum memenangkan penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi. Has yet to win other awards in the field of publication and information disclosure	v	2023	Dalam proses tindak lanjut agar menjadi agenda perencanaan di tahun mendatang untuk dapat Berpartisipasi dalam perolehan penghargaan di bidang publikasi. In the follow-up process so that it becomes a planning agenda in the coming year to be able to participate in obtaining awards in the field of publication.
VI	Aspek Lainnya Other Aspects			
Tidak ada rekomendasi No recommendations				

v = telah ditindaklanjuti
x = belum ditindaklanjuti
v = has been followed up
x = not yet followed up

Sejak dilakukan penilaian penerapan GCG pertama kali pada tahun 2016, tercatat hasil atau skor *assessment* GCG menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai rekomendasi yang muncul. *Assessment* juga dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) dalam penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil *assessment* menjadi masukan yang sangat penting bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Berikut disampaikan hasil *assessment* penerapan GCG Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Since the first GCG implementation assessment was carried out in 2016, the GCG assessment results or scores have increased. This reflects the Company's commitment to implementing GCG principles according to the recommended recommendations. The assessment is also linked to applicable regulations and best practices in implementing GCG, so that areas that require improvement/improvement can be identified. The assessment results are an essential input for the Company in making decisions in the future.

The following presents the results of the Company's GCG implementation assessment for the last 5 (five) years.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Perusahaan

Developments in the Implementation of Corporate Governance within the Company

Pencapaian Hasil Assessment Penerapan GCG PTK 2018–2022

Achievement of PTK GCG Implementation Assessment Results 2018–2022

Tahun Year	Jenis Penilaian Type of Assessment	Penilai Assessor	Skor Assessment GCG GCG Assessment Score						Skor Akhir Final Score	Kategori Category
			Aspek I Aspect	Aspek II Aspect	Aspek III Aspect	Aspek IV Aspect	Aspek V Aspect	Aspek VI Aspect		
2022	Assessment	PT Multi Utama Indo Jasa	96,47	84,67	97,25	88,07	81,85	12,50	87,200	"Sangat Baik" "Very Good"
2021	Assessment	BPKP	93,03	65,72	83,59	87,79	78,83	-	79,504	"Baik" "Good"
2020	Self Assessment	Tim Internal Internal Team	98,91	79,89	82,43	90,25	82,16	-	81,944	"Baik" "Good"
2019	Assessment	BPKP	95,30	78,44	76,15	85,63	81,96	-	77,730	"Baik" "Good"
2018	Self Assessment	Tim Internal Internal Team	100	80,81	84,49	84,58	73,46	-	80,06	"Baik" "Good"

Keterangan:

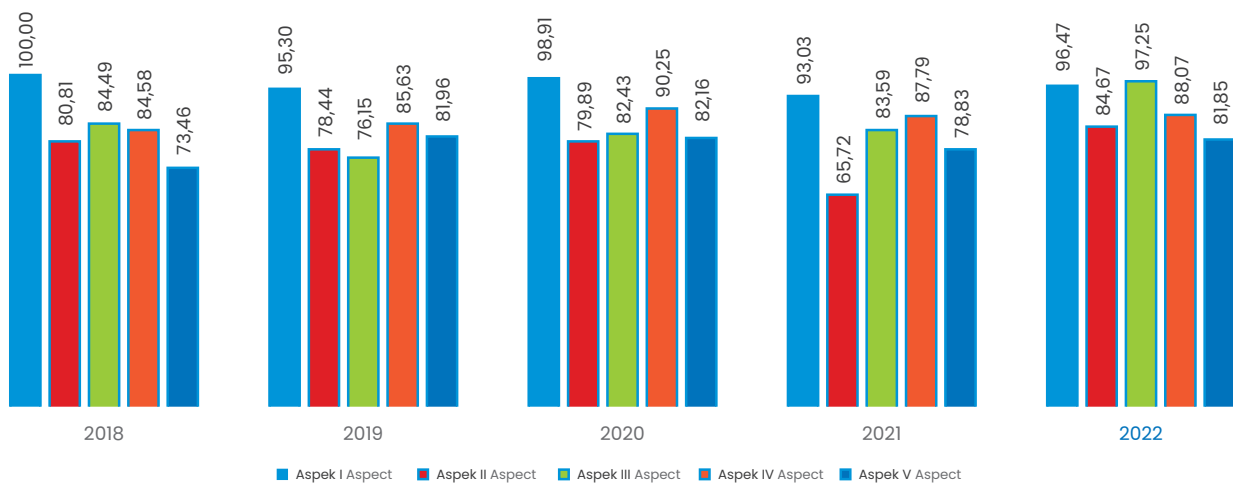
Aspek I : Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
 Aspek II : Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
 Aspek III : Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
 Aspek IV : Direksi
 Aspek V : Pengungkapan Informasi dan Transparansi
 Aspek VI : Aspek Lainnya

Information:

Aspect I : Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance
 Aspect II : Shareholders and GMS/Capital Owners
 Aspect III : Board of Commissioners/Supervisory Board
 Aspect IV : Directors
 Aspect V : Information Disclosure and Transparency
 Aspect VI : Other Aspects

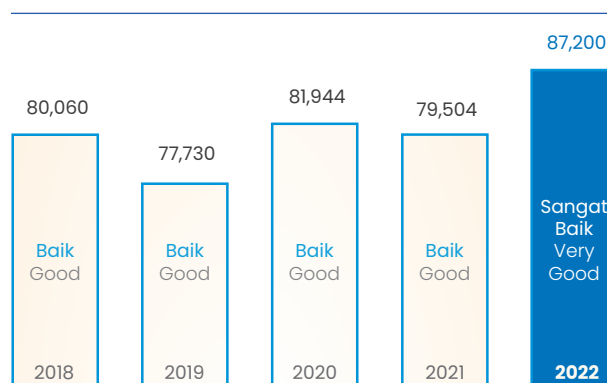
Pencapaian Hasil Assessment Penerapan GCG PTK per Aspek 2018–2022

Achievement of PTK GCG Implementation Assessment Results per Aspect 2018–2022



Tren Skor Assessment Penerapan GCG 2018–2022

GCG Implementation Assessment Score Trend 2018–2022



Struktur Tata Kelola Perusahaan

Structure of Corporate Governance



Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan. Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan yang penting terkait dengan pengelolaan PTK, baik untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS merupakan forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaporkan dan bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. RUPS berwenang mengambil seluruh keputusan yang berkaitan dengan kepentingan usaha PTK dan Anak Perusahaan dan memiliki kekuatan hukum yang sah serta mengikat dalam mengambil keputusan.

Shareholders and General Meeting of Shareholders ("GMS")

Based on Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders ("GMS") has the highest position in the corporate governance structure and has authority that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within specified limits. Shareholders make important decisions related to PTK management for short-term and long-term interests in the GMS in accordance with applicable laws and regulations.

GMS is a forum for the Board of Commissioners and Directors to report and be responsible for implementing their duties and performance to Shareholders. The GMS has the authority to make all decisions relating to the business interests of PTK and its Subsidiaries and has legal force and is binding in making decisions.

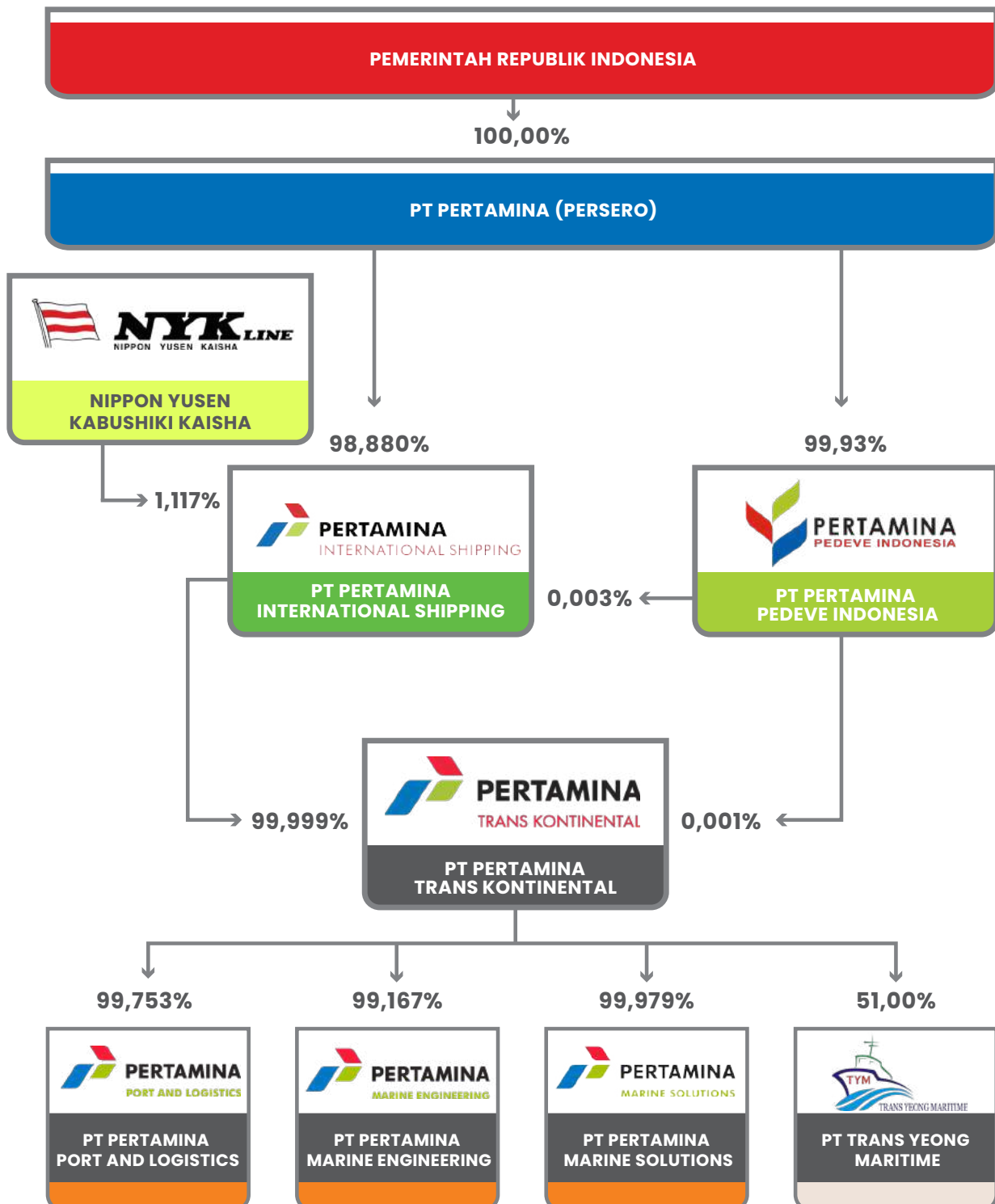
Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Berikut adalah informasi mengenai struktur dan komposisi pemegang saham, serta persentase kepemilikan saham PTK per 31 Desember 2022.

Major and Controlling Shareholders

The following is information regarding the structure and composition of shareholders and the percentage of PTK share ownership as of December 31, 2022.



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

PT Pertamina International Shipping merupakan pemegang saham utama PTK dengan kepemilikan sebesar 99,999%, sedangkan PT Pertamina Pedeve Indonesia sebagai pemegang saham lainnya memiliki saham PTK sebesar 0,001%. PT Pertamina (Persero) merupakan entitas induk PTK yang memiliki 100,00% saham PTK, baik melalui kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Sebagai pemilik saham penuh atau 100,00% dari PT Pertamina (Persero), Pemerintah Republik Indonesia bertindak selaku entitas pemilik akhir PTK.

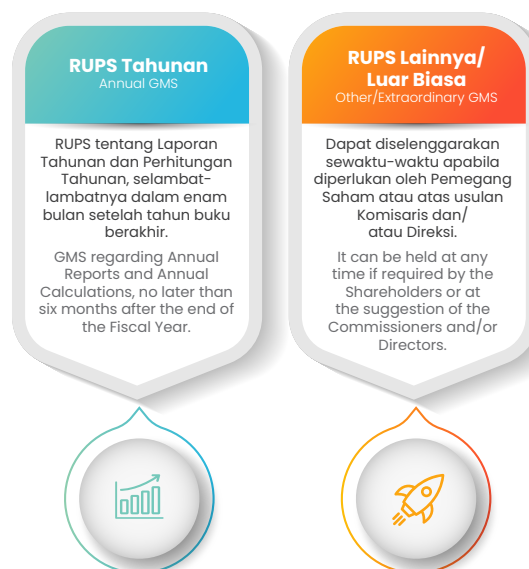
PT Pertamina International Shipping is the main shareholder of PTK with 99.999% ownership, while PT Pertamina Pedeve Indonesia, the other shareholder, owns PTK shares of 0.001%. PT Pertamina (Persero) is the parent entity of PTK which owns 100.00% of PTK shares through direct or indirect ownership. As a total shareholder or 100.00% of PT Pertamina (Persero), the Government of the Republic of Indonesia acts as the ultimate owner of PTK.

Jenis-jenis RUPS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang mengacu kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan, dan RUPS Lainnya atau RUPS Luar Biasa.

Types of GMS

In accordance with the Company's Articles of Association which refers to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the GMS consists of the Annual GMS, and other GMS or Extraordinary GMS.



Selain itu Pemegang Saham juga dapat menyelenggarakan pengambilan Keputusan Sirkuler (RUPS Sirkuler), yakni pengambilan keputusan di luar RUPS (tanpa kehadiran fisik). Ketentuan tentang Keputusan Sirkuler diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pada Pasal 91 diatur bahwa Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik, dengan syarat seluruh Pemegang Saham dengan hak suara memberikan persetujuan tertulis atas usul RUPS yang akan diputuskan.

In addition, Shareholders can also hold Circular Decision-making (Circular GMS), namely decision-making outside the GMS (without being physically present). Provisions regarding Circular Decisions are regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in which Article 91 stipulates that Shareholders can make binding decisions outside the GMS and have the same legal force as the GMS Decisions made physically, provided that all Shareholders with voting rights provide written approval of the proposal of the GMS to be decided.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance**Hak Pemegang Saham**

Berdasarkan CoCG, hak pemegang saham antara lain:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam pada RUPS.
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik kepada Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat waktu dan teratur agar memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yang diterimanya.
3. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktunya RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan.
4. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG.

Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang RUPS

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan jangka panjang Perusahaan dan dilakukan secara wajar dan transparan. Wewenang RUPS adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat mendelegasikan Kuasa RUPS sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga independensi antar-organ Perusahaan. Kuasa RUPS bukan Komisaris Perusahaan.
2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris.
3. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
4. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Direksi dan Komisaris.
5. Menetapkan Auditor Eksternal untuk melakukan Audit keuangan atas laporan keuangan berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris;
6. Menetapkan Remunerasi bagi Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja;

Shareholder Rights

Based on the CoCG, shareholder rights include:

1. Attend and vote in the GMS.
2. Obtain material information (including the right to ask questions) to the Commissioners and Directors regarding finance and other matters relating to the Company in a comprehensive, timely and orderly manner to enable Shareholders to make investment decisions based on the information they receive.
3. Holding a GMS if the Board of Directors and the Board of Commissioners neglect to hold an Annual GMS and at any time an Extraordinary GMS if deemed necessary, for example, if the Company faces a significant decline in performance.
4. Obtain an explanation of the implementation of GCG.

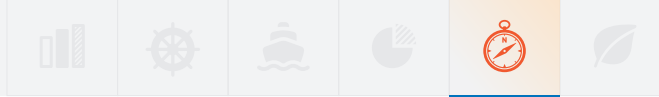
Shareholders only intervene in the duties, functions and powers of the Board of Commissioners and Board of Directors by reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations.

Shareholders, through the General Meeting of Shareholders, have the authority to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

GMS Authority

Decisions taken at the GMS are based on the Company's long-term interests and are carried out fairly and transparently. The authority of the GMS is as follows:

1. The GMS can delegate the Power of Attorney to the GMS in accordance with the provisions contained in the Articles of Association and the applicable laws and regulations. To maintain the independence between the Company's organs. The proxy for the GMS is not a Commissioner of the Company.
2. Appoint and dismiss Directors and Commissioners.
3. Approval of the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
4. Perform performance appraisal collectively as well as each of the Directors and Commissioners.
5. Appoint an External Auditor to conduct a financial audit of the financial statements based on the proposal received from the Board of Commissioners;
6. Determine remuneration for Commissioners and Directors, taking into account performance achievements;



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

7. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik yang terkait dengan Komisaris;
 8. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Komisaris dan Direksi;
 9. Mendelegasikan kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
 10. Menetapkan maksimum masa jabatan Pemangku Jabatan ("PJ") bagi Komisaris dan Direksi;
 11. Menetapkan perhitungan:
 - a. Alokasi laba Perusahaan untuk Laba yang Ditahan dan Cadangan;
 - b. Dividen kepada Pemegang Saham;
 - c. Bonus Direksi, Komisaris dan Pekerja.
7. Establish policies regarding the possibility of conflict related to the Commissioner;
 8. Determine the maximum number of Commissioner positions that may be held concurrently by a Commissioner and a Director;
 9. Delegating to the Commissioners regarding the division of duties and authorities of members of the Board of Directors;
 10. Determine the maximum term of office for Commissioners and Directors;
 11. Set calculation:
 - a. Allocation of Company profits for Retained Profits and Reserves;
 - b. Dividends to Shareholders;
 - c. Directors, Commissioners and Employee Bonuses.

Mekanisme Pelaksanaan RUPS

Ketentuan pelaksanaan RUPS PTK, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun sedangkan RUPS Luar Biasa diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat-tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia;
 - b. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham, menggunakan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar dengan peredaran nasional;
 - c. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
 - d. Dalam pemanggilan harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS;
 - e. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat;
 - f. RUPS dipimpin Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan

GMS Implementation Mechanism

Provisions for the implementation of the PTK GMS, both the Annual GMS and the Extraordinary GMS, are as follows:

1. The Annual GMS is held every year, while the Extraordinary GMS is held at any time based on the need, with the following provisions:
 - a. The GMS is held at the domicile of the Company or at places where the Company conducts its business activities and must be located in the territory of the Republic of Indonesia;
 - b. The GMS is held by prior invitation to the shareholders, using registered letters and/or advertisements in newspapers with national circulation;
 - c. Summons are made no later than 14 (fourteen) days before the GMS is held, excluding the date of the summons and the date the GMS is held;
 - d. The summons must state the agenda, date, time and place for holding the GMS;
 - e. A GMS summons is not required if all shareholders agree on the meeting agenda and decisions are unanimously approved;
 - f. The President Commissioner chairs the GMS. Suppose the President Commissioner is absent or unavailable for any reason that does not need to be proven to a third party. In that case, the GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners who is present and appointed for this purpose by the Meeting. If all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend for any reason that does not need to be proven to a third party, the President Director chairs the GMS. If the President Director is absent or unavailable for any reason which

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Structure of Corporate Governance

kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Rapat;

- g. Dalam hal semua Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir dalam Rapat RUPS.

Ketentuan Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Dalam penentuan kuorum serta pengambilan keputusan pada RUPS Tahunan, Perusahaan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai ketentuan tersebut, RUPS Tahunan dinyatakan kuorum apabila RUPST lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sesuai peraturan yang berlaku melalui prosedur yang transparan dan adil. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang berlaku mensyaratkan jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan.

Hasil RUPS didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan, dan Notaris membuat Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS. Penandatanganan Risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS dan Keputusan Pemegang Saham di Sepanjang Tahun 2022

Di sepanjang tahun 2022, PTK menyelenggarakan 1 kali RUPS. Selain itu, juga mengeluarkan beberapa Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ("KPSSS") dengan rincian sebagai berikut:

does not need to be proven to a third party, the GMS is chaired by another member of the Board of Directors who is present at the meeting and is appointed by the Meeting;

- g. If all members of the Board of Directors are absent or unable to attend due to any reason which does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by one of the members.

Quorum Provisions and Decision Making

In determining the quorum and making decisions at the Annual GMS, the Company refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In accordance with these provisions, an Annual GMS is declared a quorum if the GMS has more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares with voting rights present or represented unless the Law and/or articles of association determine a larger quorum.

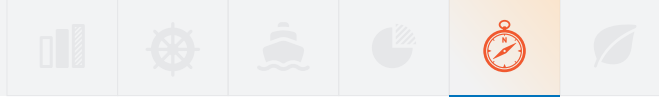
Decision-making at the GMS is based on deliberation for consensus in accordance with applicable regulations through transparent and fair procedures. If a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken based on the majority vote that applies, requiring a more significant number of agreed votes.

Shareholders can also make valid decisions without holding a physical GMS, provided that they have been notified in writing and all Shareholders approve the proposals submitted.

The Corporate Secretary documents the results of the GMS, and the Notary makes the Minutes of the GMS in every GMS. Signing the minutes of the GMS is optional if the minutes are drawn up with a Notary's Minutes. GMS minutes must be documented and kept by the Corporate Secretary.

Implementation of GMS and Shareholders' Resolutions Throughout 2022

Throughout 2022, PTK will hold 1 GMS. In addition, it also issued several Circular Shareholder Resolutions ("KPSSS") with the following details:



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

1. RUPS Tahunan PTK Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022. 2. KPSSS tanggal 7 Januari 2022 tentang Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Direksi di Anak Perusahaan/<i>Joint Venture</i> PT Pertamina Trans Kontinental 3. KPSSS tanggal 8 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pemasaran 4. KPSSS tanggal 23 Mei 2022 tentang Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun 2021 5. KPSSS tanggal 15 Juli 2022 tentang Pengangkatan Kembali untuk Periode Kedua Direktur Utama PTK 6. KPSSS tanggal 27 Juli 2022 tentang Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Direktur Operasi PTK 7. KPSSS tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Direksi di Anak Perusahaan 8. KPSSS tanggal 5 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Direktur Operasi PTK 9. KPSSS tanggal 12 Agustus 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun 2022 10. KPSSS tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tahun Buku 2022, 2023, dan 2024 11. KPSSS tanggal 14 November 2022 tentang Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Direksi di Anak Perusahaan atau <i>Joint Venture</i> PTK 12. KPSSS tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan 13. KPSSS tanggal 29 November 2022 tentang Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor 14. KPSSS tanggal 22 Desember 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Investasi pada RKAP Tahun 2022	1. PTK Annual GMS for Fiscal Year 2021 dated June 16, 2022. 2. KPSSS dated January 7, 2022, concerning the Placement of Company Representatives as Directors in PT Pertamina Trans Kontinental's Subsidiary/<i>Joint Venture</i> 3. KPSSS dated March 8, 2022, concerning Dismissal and Appointment of Marketing Director 4. KPSSS dated May 23, 2022, concerning Revision of the 2021 Corporate Budget Work Plan ("RKAP") 5. KPSSS dated July 15, 2022, concerning Reappointment for the Second Period of PTK President Director 6. KPSSS dated July 27, 2022, concerning the Placement of Company Representatives as PTK Operations Director 7. KPSSS dated August 5, 2022, concerning the Placement of Company Representatives as Directors in Subsidiaries 8. KPSSS dated August 5, 2022, concerning the Appointment of PTK Operations Director 9. KPSSS dated August 12 2022, concerning the 2022 Company Work Plan and Budget ("RKAP") 10. KPSSS dated October 11, 2022, concerning the Establishment of a Public Accounting Firm ("KAP") for the Fiscal Years 2022, 2023 and 2024 11. KPSSS dated November 14, 2022, concerning Placement of Company Representatives as Directors in PTK Subsidiaries or Joint Ventures 12. KPSSS dated November 14, 2022, concerning the Determination of Awards for Performance for the 2021 Fiscal Year and Remuneration for the 2022 Fiscal Year Directors and Board of Commissioners of the Company 13. KPSSS dated November 29, 2022, concerning Additional Issued and Paid-up Capital 14. KPSSS dated December 22 2022, concerning Changes to the Investment Work Plan in the 2022 RKAP

Berikut disampaikan keputusan RUPS di sepanjang tahun 2022.

The following is the resolution of the GMS throughout 2022.

RUPS Tahunan PTK Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022 PTK Annual GMS for Fiscal Year 2021 on June 16, 2022

Hari/Tanggal Day/Date	:	Kamis, 16 Juni 2022 Thursday, June 16, 2022
Waktu Time	:	10.13 s.d 12.00 WIB 10.13 to 12.00 WIB
Tempat Place	:	Kota Administrasi Jakarta Pusat Administrative City of Central Jakarta

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate GovernanceRUPS Tahunan PTK Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022
PTK Annual GMS for Fiscal Year 2021 on June 16, 2022

Kehadiran Attendance	Pemegang Saham • Erry Widiastono-Direktur Utama PT Pertamina International Shipping • Rahmi Amini-Direktur PT Pertamina Pedeve Indonesia Dewan Komisaris • Amir Hamzah-Komisaris Utama • Andi Saiful Haq-Komisaris • Khalid Zabidi-Komisaris • Agustinus Bensik Lomboan-Komisaris Direksi • Nepos Mangaranap Tua Pakpahan-Direktur Utama • Imam Bustomi-Direktur Pemasaran • Afan Aftory-Direktur Keuangan dan SDM
	Shareholders • Erry Widiastono-President Director of PT Pertamina International Shipping • Rahmi Amini-Director of PT Pertamina Pedeve Indonesia Board of Commissioners • Amir Hamzah-President Commissioner • Andi Saiful Haq-Commissioner • Khalid Zabidi-Commissioner • Agustinus Bensik Lomboan-Commissioner Board of Directors • Nepos Mangaranap Tua Pakpahan-President Director • Imam Bustomi-Director of Marketing • Afan Aftory-Director of Finance and HR

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Akta No.16 tanggal 16 Juni 2022 tentang RUPS Tahunan PTK Tahun Buku 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, S.H.

The results of the GMS decision were stated in Deed No. 16 dated June 16, 2022 concerning the 2021 PTK Annual GMS which was made before Notary Miryany Usman, S.H.

Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

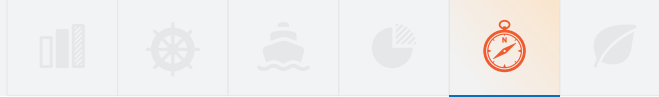
The results of the GMS decisions along with their implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2022 are as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
 The Agenda of the Meeting and its Decisions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions

Agenda Mata Acara 1
 Agenda Item 1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Approval of the Annual Report, including Ratification of the Company's Financial Statements for the 2021 (two thousand twenty-one) fiscal year, accompanied by the granting of full Discharge and Release of Responsibility (*Volledig Acquit Et De Charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners.

**Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat**
The Agenda of the Meeting and its Decisions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions**Keputusan Mata Acara 1**
Decision of Agenda 1

Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor: 00339/2.1025/AU.1/06/1130-4/1/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022 (enam belas Maret dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material" serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan sepenuhnya dari Tanggung Jawab (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sepanjang:

- Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perusahaan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu);
- Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.

Approve the Company's Annual Report for the 2021 fiscal year and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2021, along with its explanations that have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & PARTNERS, as contained in Report Number: 00339/2.1025/AU.1/06/1130-4/1/III/2022 dated March 16, 2022, with the opinion "Fair in All Material Respects" and grant full Release and Discharge of Responsibility (*Volledig Acquit Et De Charge*) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions taken in the fiscal year ending December 31, 2021, as long as

- These actions are reflected in the Company's Annual Report (including Financial Statements) for the fiscal year ending December 31, 2021;
- These actions do not constitute criminal acts and/or unlawful acts.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan
Follow-up on Decision Results

Akta No.16 tanggal 16 Juni 2022 tentang RUPS Tahunan PTK Tahun Buku 2021 oleh Notaris Miryany Usman, S.H.
Deed No. 16 dated June 16, 2022 concerning the 2021 PTK Annual GMS by Notary Miryany Usman, S.H.

Agenda Mata Acara 2
Agenda Item 2

Pengusulan dan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu)
Proposal and Determination of Use of Profits for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty-one)

Keputusan Mata Acara 2
Decision of Agenda 2

Menetapkan penggunaan Laba Perusahaan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan perincian sebagai berikut:

- Menyetujui pembagian Dividen kepada Pemegang Saham sebesar USD49.100.000,- (empat puluh sembilan juta seratus - ribu Dolar Amerika Serikat), secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam Perusahaan, yang berasal dari Laba Bersih Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar USD37.157.795,- (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat) dan Laba Ditahan per tanggal 31 Desember 2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar USD11.942.205,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima Dolar Amerika Serikat);
- Pembayaran Dividen tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditutupnya Rapat.
- Menyetujui Cadangan Wajib sebesar USD2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang dialokasikan dari Laba Ditahan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang belum ditentukan penggunaannya.

Determine the use of the Company's Profit for the 2021 Fiscal Year, with the following details:

- Approve the distribution of Dividends to Shareholders in the amount of USD49,100,000 (forty-nine million one hundred thousand US Dollars), proportionally according to the portion of share ownership in the Company, derived from Net Profit for the 2021 Fiscal Year (two thousand twenty-one) in the amount of USD37,157,795 (thirty-seven million one hundred fifty-seven thousand seven hundred ninety-five US Dollars) and Retained Earnings as of December 31, 2021 (thirty-one December two thousand twenty-two) in the amount of USD11,942,205 (eleven million nine hundred forty-two thousand two hundred five US Dollars);
- The payment of these Dividends shall be made by 30 (thirty) days from the date of closing of the Meeting.
- Approve a Mandatory Reserve of USD2,500,000 (two million five hundred thousand US Dollars) allocated from Retained Earnings for 2021 (two thousand twenty-one) that has not been determined for its use.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan
Follow-up on Decision Results

Deklarasi Pembayaran Dividen tanggal 6 Juli 2022
Declaration of Dividend Payment on July 6, 2022

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance**Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat**
The Agenda of the Meeting and its Decisions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions**Agenda Mata Acara 3:**
Agenda Item 3:

Pengusulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Proposal for the Appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") for the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty-two).

Keputusan Mata Acara 3
Decision on Agenda Item 3

Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik ("KAP") sebagai Auditor Independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode 01 (satu) Januari sampai dengan 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) berikut kewajaran nilai jasanya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perseroan sebelumnya sudah berkonsultasi/berkoordinasi dengan PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING.
Approving the granting of power and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the Public Accounting Firm ("KAP") as an Independent Auditor to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the period of January 1 to December 31, 2022, including the fairness of its service value in accordance with applicable regulations, provided that the KAP appointed by the Company has previously consulted/coordinated with PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan
Follow-up on Decision Results

Akta No.08 tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tahun 2022-2024 oleh Notaris Ivan Lazuardi Suwana, SH, M.Kn
Deed No. 08 dated November 16, 2022 concerning Stipulation of a Public Accounting Firm ("KAP") for 2022-2024 by Notary Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn.

Agenda Mata Acara 4
Agenda Item 4

Pengusulan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu)
Proposal for Performance Awards (Tantiem) to Directors and Board of Commissioners for the 2021 (two thousand twenty-one) Fiscal Year.

Keputusan Mata Acara 4
Decision of Agenda 4

Menetapkan bahwa Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.
Stipulates that Performance Awards (Tantiem) for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty-one) would be determined later and carried out in a circular separate GMS.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan
Follow-up on Decision Results

Akta No.10 tanggal 09 Desember 2022 tentang Kinerja Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Notaris Ivan Lazuardi Suwana, SH, M.Kn
Deed No.10 dated December 09, 2022 concerning Performance for the 2021 Fiscal Year and Remuneration for the 2022 Fiscal Year for the Directors and Board of Commissioners of the Company by Notary Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn

Agenda Mata Acara 5
Agenda for Item 5

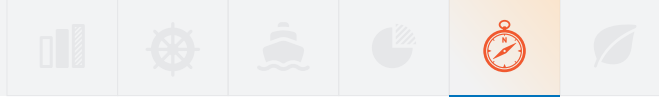
Pengusulan Remunerasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Proposal of Remuneration to the Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2022 (two thousand and twenty-two).

Keputusan Mata Acara 5
Decision of Agenda 5

Menyetujui Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.
Approve the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2022 (two thousand and twenty-two) would be determined later and carried out in a circular separate GMS.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan
Follow-up on Decision Results

Akta No.10 tanggal 09 Desember 2022 tentang Kinerja Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Notaris Ivan Lazuardi Suwana, SH, M.Kn
Deed No.10 dated December 09, 2022 concerning Performance for the 2021 Fiscal Year and Remuneration for the 2022 Fiscal Year for the Directors and Board of Commissioners of the Company by Notary Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn

**KPSSS tanggal 7 Januari 2022 tentang Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Direksi di Anak Perusahaan/Joint Venture PT Pertamina Trans Kontinental****Uraian Keputusan:**

PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Peteka Karya Samudera
Menyetujui usulan pengangkatan Sdr. Albertus Anto Budi Santosa sebagai Direktur PT Peteka Karya Samudera untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Peteka Karya Samudera, atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT Peteka Karya Samudera memutuskan lain.
2. PT Trans Yeong Maritime
Menyetujui usulan pengangkatan Sdr. Irwan Dwi Aprianto sebagai President Director PT Trans Yeong Maritime untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT Trans Yeong Maritime, atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT Trans Yeong Maritime memutuskan lain.
3. Bagi calon Direksi yang diusulkan untuk diangkat sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar PT Peteka Karya Samudera dan/atau PT Trans Yeong Maritime), yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
4. Direksi Perseroan atau Kuasanya agar menindaklanjuti Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Peteka Karya Samudera dan PT Trans Yeong Maritime sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Kuasanya untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris (apabila diperlukan) dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

KPSSS on January 7, 2022, regarding the Placement of the Company's Deputy as Directors in Subsidiaries/Joint Venture PT Pertamina Trans Kontinental**Decision Description:**

PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia as Shareholders, decide the following:

1. PT Peteka Karya Samudera
Approve the proposal to appoint Mr Albertus Anto Budi Santosa as Director of PT Peteka Karya Samudera for a period of 1 (one) term of office in accordance with the provisions of the Articles of Association of PT Peteka Karya Samudera, or until the General Meeting of Shareholders of PT Peteka Karya Samudera decides otherwise.
2. PT Trans Yeong Maritime
Approve the proposal to appoint Mr Irwan Dwi Aprianto as President Director of PT Trans Yeong Maritime for a period of 1 (one) term of office in accordance with the provisions of the Articles of Association of PT Trans Yeong Maritime or until the General Meeting of Shareholders of PT Trans Yeong Maritime decides otherwise.
3. For director candidates proposed to be appointed as referred to in numbers 1 and 2 above who still hold other positions prohibited by laws and regulations, provisions of related agencies/authorities or internal provisions (including the Articles of Association of PT Peteka Karya Samudera and/or PT Trans Yeong Maritime), the person concerned must resign or be dismissed from their position.
4. The Board of Directors or its Proxy shall follow up on this Circular Shareholders' Decision in the General Meeting of Shareholders of PT Peteka Karya Samudera and PT Trans Yeong Maritime in accordance with applicable provisions.
5. Granting power to the Board of Directors or its Proxy to make and declare this Circular Shareholders' Decision in a notarial deed (if necessary) and carry out other legal actions deemed necessary in accordance with applicable provisions.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

KPSSS tanggal 8 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pemasaran

Uraian Keputusan:

PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Arsono Kuswardanu dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran Perseroan, berlaku efektif terhitung mulai tanggal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini ditandatangani, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Imam Bustomi selaku Direktur Pemasaran Perseroan, berlaku efektif terhitung mulai tanggal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini ditandatangani, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan Rapa! Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi:

Direktur Utama	: Sdr. Nepos MT Pakpahan
Direktur Operasi	: Sdr. Hadi Purnomo
Direktur Pemasaran	: Sdr. Imam Bustomi
Direktur Keuangan & SDM	: Sdr. Afan Aftory
3. Bagi Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana angka 2 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perseroan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Kuasanya untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Ini dalam akta notaris dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

KPSSS tanggal 23 Mei 2022 tentang Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun 2021

Uraian Keputusan:

PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan (revisi) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Perseroan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Perseroan tanggal 19 Mei 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun 2021 selanjutnya menjadi sebagaimana termuat dalam Buku Revisi RKAP Perseroan Tahun 2021 (terlampir) yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler.

KPSSS dated March 8, 2022, regarding Termination and Appointment of Marketing Director

Decision Description:

PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, as the Shareholders, decided the following:

1. Respectfully terminate Mr Arsono Kuswardanu from his position as the Company's Marketing Director, effective from the date this Circular Shareholders' Decision is signed, accompanied by thanks for his services to the Company.
2. Appoint Mr Imam Bustomi as the Company's Marketing Director, effective from the date this Circular Shareholders' Decision is signed, for a period of 1 (one) term of office as referred to in the Company's Articles of Association or until the Company's General Meeting of Shareholders decides otherwise. Thus, the composition of the Company's Board of Directors becomes:

President Director	: Mr Nepos MT Pakpahan
Operation Director	: Mr Hadi Purnomo
Marketing Director	: Mr Imam Bustomi
Finance & HR Director	: Mr Afan Aftory
3. Members of the Board of Directors appointed as referred to in point 2 above who still hold other positions prohibited by laws and regulations or the Company's Articles of Association must resign or be terminated from their position.
4. Grant power to the Company's Board of Directors or its Proxy to make and declare this Circular Shareholders' Decision in a notarial deed and carry out other necessary legal actions in accordance with applicable provisions.

KPSSS dated May 23, 2022, concerning Revision of the 2021 Corporate Budget Work Plan ("RKAP")

Decision Description:

PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, as Shareholders, decide the following matters:

1. Approved the changes (revisions) to the Company's Work Plan and Budget ("RKAP") for 2021 as referred to in the Company's Circular Shareholders Decree dated May 19, 2021, concerning the Company's Work Plan and Budget ("RKAP") for 2021 to become as contained in the RKAP Revision Book Company Year 2021 (attached) which is an integral part of the Circular Shareholder Resolutions.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

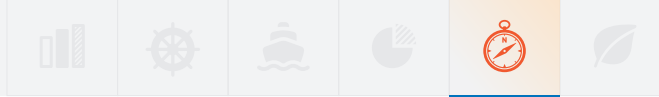
2. Menyetujui Tingkat Kesehatan Perusahaan ("TKP") Perseroan dengan klasifikasi tingkat kinerja perusahaan perusahaan sebesar 92,00 (kategori: "Sehat AA") yang tercantum didalam Buku Revisi RKAP Perseroan Tahun 2021 dengan keterangan sebagai berikut:
2. Approve the Company's Corporate Soundness Level ("TKP") with a company performance level classification of 92.00 (category: "Healthy AA") listed in the Company's Revised 2021 RKAP Book with the following information:

a	Nilai Kinerja Keuangan ("NKK") Financial Performance Score ("NKK")	:	64,00
b	Nilai Kinerja Pertumbuhan ("NKP") Growth Performance Score ("NKP")	:	8,00
c	Nilai Kinerja Operasional ("NKO") Operational Performance Score ("NKO")	:	10,00
d	Nilai Kinerja Administrasi ("NKA") Administrative Performance Score ("NKA")	:	10,00
Total (NKK+NKP+NKO+NKA)		:	92,00 (Sehat AA) Healthy AA

3. Menyetujui *Key Performance Indicator* ("KPI") Kesepakatan Kinerja Perseroan Tahun 2021 yang tercantum didalam Buku Revisi RKAP Perseroan Tahun 2021.
3. Approved the Key Performance Indicators ("KPI") Company Performance Agreement for 2021 listed in the Company's 2021 Revised RKAP Book.
4. Direksi Perseroan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Revisi RKAP Perseroan Tahun 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan Revisi RKAP Perseroan Tahun 2021.
4. The Company's Board of Directors is responsible for implementing the Company's 2021 RKAP Revision, and the Company's Board of Commissioners is responsible for overseeing the implementation of the 2021 Company RKAP Revision.
5. Memberikan arahan-arahan kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. Revisi RKAP Perseroan Tahun Buku 2021 yang disahkan merupakan pedoman kerja bagi Direksi dalam pengelolaan Perseroan dan sebagai sarana pemantauan serta pengawasan bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan/pengawasan Revisi RKAP tahun 2021, yang meliputi laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan berkala lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - a. The approved revision of the Company's RKAP for the 2021 Fiscal Year is a working guideline for the Board of Directors in managing the Company and as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners. Furthermore, the Board of Directors and Commissioners are asked to submit periodic reports to Shareholders promptly on the implementation/supervision of the 2021 RKAP Revision, which includes quarterly and semi-annual reports and other regular reports in accordance with applicable regulations.
 - b. Mengupayakan pertumbuhan laba dan market share serta mengedepankan cost leadership melalui efisiensi pada semua lini operasi (termasuk sentralisasi pengadaan) secara berkesinambungan.
 - b. Striving for profit growth and market share, as well as prioritizing cost leadership through efficiency in all lines of operations (including procurement centralization) on an ongoing basis.
 - c. Menjaga likuiditas keuangan Perseroan.
 - c. Maintaining the Company's financial liquidity.
 - d. Menyelaraskan sinergi antar Pertamina Grup dalam rangka mengoptimalkan peran kontribusi positif Perseroan terhadap peningkatan kinerja Pertamina Grup dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Align synergies between Pertamina Group to optimize the role of the Company's positive contribution to improving the performance of Pertamina Group while taking into account the applicable laws and regulations.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

- e. Memastikan target-target investasi yang telah ditetapkan dalam Revisi RKAP Tahun 2021 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan nilai tambah bagi Perseroan.
 - f. Memastikan terlaksananya inisiatif strategis dalam rangka mencapai target Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP").
 - g. Meningkatkan *awareness* terhadap budaya *Health, Safety, Security and Environment* ("HSSE") dalam seluruh kegiatan operasional maupun non operasional sehingga menciptakan situasi kerja yang aman dan kondusif. Aspek HSSE agar ditingkatkan termasuk dalam rangka mengantisipasi adanya pengambilalihan lahan secara ilegal oleh pihak lain, dokumentasi/sertifikasi tanah/lahan, dan tuntutan masyarakat terkait isu lingkungan.
 - h. Melakukan *cascading* Revisi KPI Perseroan sampai dengan tingkat individu dengan mengacu pada Revisi Kontrak Manajemen antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sebagai dasar penilaian kinerja tahun 2021.
 - i. Mengupayakan pencapaian target pada Revisi RKAP Tahun 2021 secara maksimal dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ("GCG") dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan langkah antisipasi (*contingency plan*) sehingga target Revisi RKAP dimaksud tetap dapat tercapai.
 - j. Melakukan adaptasi model bisnis terhadap disrupsi pasar dan teknologi.
 - k. Melakukan perbaikan prosedur dan policy dalam rangka penguatan internal control dan governance.
 - l. Melakukan akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
 - m. Melakukan *monitoring* kinerja dan menciptakan terobosan melalui *strategic initiatives*.
 - n. Meningkatkan kapasitas dan kehandalan infrastruktur hilir yang memadai.
 - o. Meminimalisasi *oil losses* pada *supply & distribution*.
 - p. Mengembangkan bisnis *global/overseas* secara efektif dengan memprioritaskan target kawasan yang potensial.
6. Memberikan arahan-arahan kepada Dewan Komisaris Perseroan agar:
- a. Meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi Perseroan; dan
 - b. Menyusun target-target dalam bentuk Revisi *Key Performance Indicator* ("KPI") Dewan Komisaris.
- e. Ensuring that the investment targets set in the 2021 RKAP Revision can be implemented on time, on target, and provide added value to the Company.
 - f. Ensuring the implementation of strategic initiatives to achieve the Company's Long Term Plan ("RJPP") target.
 - g. Increasing awareness of the Health, Safety, Security and Environment ("HSSE") culture in all operational and non-operational activities to create a safe and conducive work situation. HSSE aspects to be improved include the context of anticipating illegal land acquisition by other parties, land/land documentation/certification, and community demands regarding environmental issues.
 - h. Conduct cascading Revision of the Company's KPIs down to the individual level with reference to the Revision of Management Contracts between the Directors, Board of Commissioners and Shareholders as the basis for evaluating performance in 2021.
 - i. Maximize the achievement of targets in the 2021 RKAP Revision while still referring to the principles of Good Corporate Governance ("GCG") and professionalism in accordance with statutory provisions and preparing contingency plans so that the RKAP Revision target can still be achieved.
 - j. Adapting business models to market and technological disruptions.
 - k. Making improvements to procedures and policies to strengthen internal control and governance.
 - l. Accelerating competitiveness through innovation and strengthening the quality of human resources.
 - m. Monitor performance and create breakthroughs through strategic initiatives.
 - n. Increase the capacity and reliability of adequate downstream infrastructure.
 - o. Minimizing oil losses in supply & distribution.
 - p. Develop global/overseas business effectively by prioritizing potential regional targets.
6. Provide directions to the Board of Commissioners of the Company so that:
- a. Increasing its role in supervising the Board of Directors of the Company; and
 - b. Develop targets in the form of a Revised Key Performance Indicator ("KPI") for the Board of Commissioners.



Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Kuasanya untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

KPSSS tanggal 15 Juli 2022 tentang Pengangkatan Kembali untuk Periode Kedua Direktur Utama PTK

Uraian Keputusan:

PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengangkat kembali untuk periode kedua Sdr. Nepos MT. Pakpahan selaku Direktur Utama Perseroan, berlaku efektif terhitung mulai tanggal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini ditandatangani, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi:
Direktur Utama : Sdr. Nepos MT Pakpahan
Direktur Operasi : Vacant
Direktur Pemasaran : Sdr. Imam Bustomi
Direktur Keuangan & SDM : Sdr. Afan Aftory
2. Bagi Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana angka 2 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perseroan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris (apabila diperlukan) dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

KPSSS tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Direktur Operasi PTK.

Uraian Keputusan:

PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan pengangkatan Sdr. Slamet Harianto sebagai Direktur Operasi PT Pertamina Trans Kontinental untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina Trans Kontinental memutuskan lain.

7. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors or their Proxy to make and declare this Circular Shareholders' Decision in a notarial deed and carry out other necessary legal actions in accordance with applicable regulations.

KPSSS dated July 15, 2022 concerning Reappointment for the Second Period of PTK President Director

Decision Description:

PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, as Shareholders, decide the following matters:

1. Appointed again for the second term Mr Nepos MT. Pakpahan, as the President Director of the Company, is effective as of the date this Circular Shareholders' Resolution is signed for a period of 1 (one) term of office as referred to in the Company's Articles of Association or until the General Meeting of Shareholders of the Company decides otherwise. Thus the composition of the Board of Directors of the Company becomes:
President Director : Mr. Nepos MT Pakpahan
Operation Director : Vacant
Marketing Director : Mr Imam Bustomi
Finance & HR Director : Mr Afan Aftory
2. For Members of the Board of Directors appointed as referred to in number 2 above who are still serving in other positions prohibited by laws and regulations or the Company's Articles of Association, the person concerned must resign or be dismissed from that position.
3. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors (with the right of substitution) to make and declare this Circular Shareholder Resolution in a notarial deed (if necessary) and carry out other essential legal actions in accordance with applicable regulations.

KPSSS dated August 5, 2022 concerning the Placement of Company Representatives as PTK Operations Director.

Decision Description:

PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, as Shareholders, decide the following matters:

1. Approve the proposed appointment of Mr Slamet Harianto as Operations Director of PT Pertamina Trans Kontinental for a period of 1 (one) term of office as referred to in the Articles of Association or until the General Meeting of Shareholders of PT Pertamina Trans Kontinental decides otherwise.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

2. Bagi calon Direktur Operasi PT Pertamina Trans Kontinental yang diusulkan untuk diangkat sebagaimana angka 1 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi /otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar PT Pertamina Trans Kontinental), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
3. Direksi Perseroan atau Kuasanya agar menindaklanjuti Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam RUPS PT Pertamina Trans Kontinental sesuai ketentuan yang berlaku, serta dengan memperhatikan catatan dalam Rekomendasi Komisaris Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

KPSSS tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Direksi di Anak Perusahaan.

Uraian Keputusan:

PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan pengangkatan Sdr. Yada Prawira Ganta sebagai Direktur PT Pertamina Marine Engineering (d.h PT Peteka Karya Jala) untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina Marine Engineering memutuskan lain.
2. Bagi calon Direksi yang diusulkan untuk diangkat sebagaimana angka 1 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar PT Pertamina Marine Engineering), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
3. Direksi Perseroan atau Kuasanya agar menindaklanjuti Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina Marine Engineering sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris (apabila diperlukan) dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

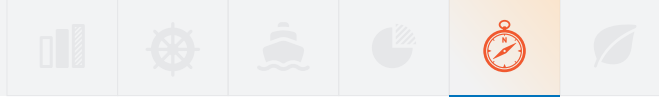
2. For candidates for the Director of Operations of PT Pertamina Trans Kontinental who are proposed to be appointed as referred to in number 1 above who are still serving in other positions prohibited by laws and regulations, provisions of related agencies/ authorities as well as internal regulations (including the Articles of Association of PT Pertamina Trans Kontinental), then the person concerned must resign or be dismissed from his position.
3. The Board of Directors of the Company or their Proxy to follow up on this Circular Shareholders' Resolution in the GMS of PT Pertamina Trans Kontinental according to the applicable provisions, as well as taking into account the notes in the Recommendations of the Company's Commissioners.
4. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors (with the right of substitution) to make and state this Circular Shareholder Resolution in a notarial deed and carry out other legal actions deemed necessary in accordance with applicable regulations.

KPSSS dated August 5 2022, concerning the Placement of Company Representatives as Directors in Subsidiaries.

Decision Description:

PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, as Shareholders, decide the following matters:

1. Approve the proposed appointment of Mr Yada Prawira Ganta as Director of PT Pertamina Marine Engineering (formerly PT Peteka Karya Jala) for a period of 1 (one) term of office as referred to in the Company's Articles of Association, or until the General Meeting of Shareholders of PT Pertamina Marine Engineering decides otherwise.
2. For candidates for the Board of Directors who are proposed to be appointed as referred to in number 1 above who are still serving in other positions prohibited by laws and regulations, provisions of related agencies/ authorities as well as internal provisions (including the Articles of Association of PT Pertamina Marine Engineering), then the person concerned must resign or be dismissed from that position.
3. The Board of Directors of the Company or their Proxies to follow up on this Circular Shareholders' Resolution in the Rapa! General Shareholders of PT Pertamina Marine Engineering in accordance with applicable regulations.
4. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors (with the right of substitution) to make and declare this Circular Shareholder Resolution in a notarial deed (if necessary) and carry out other essential legal actions in accordance with applicable regulations.

**KPSSS tanggal 12 Agustus 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun 2022.****Uraian Keputusan:**

PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Perseroan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Buku RKAP Perseroan Tahun 2022 yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler.
2. Menyetujui Tingkat Kesehatan Perusahaan ("TKP") Perseroan dengan klasifikasi tingkat kinerja perusahaan sebesar 93,00 (kategori: Sehat "AA") yang tercantum didalam Buku RKAP Perseroan Tahun 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

a	Nilai Kinerja Keuangan ("NKK") Financial Performance Score ("NKK")	:	69,00
b	Nilai Kinerja Pertumbuhan ("NKP") Growth Performance Score ("NKP")	:	5,50
c	Nilai Kinerja Operasional ("NKO") Operational Performance Score ("NKO")	:	10,00
d	Nilai Kinerja Administrasi ("NKA") Administrative Performance Score ("NKA")	:	8,50
Total (NKK+NKP+NKO+NKA)		:	93,00 (Sehat AA) Healthy AA

3. Menyetujui *Key Performance Indicator* ("KPI")/ Kesepakatan Kinerja Perseroan Tahun 2022 yang tercantum didalam Buku RKAP Perseroan Tahun 2022.
4. Direksi Perseroan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RKAP Perseroan Tahun 2022 dan Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan RKAP Tahun 2022.
5. Memberikan arahan-arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun Buku 2022 yang disahkan merupakan pedoman kerja bagi Direksi dalam pengelolaan Perseroan dan sebagai sarana pemantauan serta pengawasan bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan/pengawasan RKAP tahun 2022, yang meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan berkala lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPSSS dated August 12, 2022, regarding the 2022 Work Plan and Corporate Budget ("RKAP").**Decision Description:**

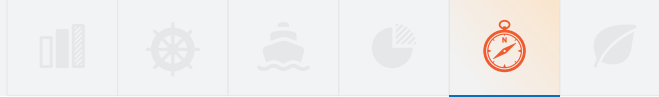
PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, as Shareholders, decide the following matters:

1. Approved the Company's 2022 Corporate Work Plan and Budget ("RKAP") as referred to in the Company's 2022 RKAP Book, which is an integral part of the Circular Shareholders' Resolutions.
2. Approve the Company's Corporate Soundness Level ("TKP") with a company performance level classification of 93.00 (Category: Healthy "AA") listed in the Company's 2022 RKAP Book with the following information:

3. Approved the *Key Performance Indicator* ("KPI")/ Company Performance Agreement for 2022 listed in the Company's 2022 RKAP Book.
4. The Company's Board of Directors is responsible for implementing the Company's 2022 RKAP, and the Board of Commissioners is responsible for overseeing the performance of the 2022 RKAP.
5. Provide directions to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:
 - a. The approved Company Work Plan and Budget ("RKAP") for the 2022 Fiscal Year is a working guideline for the Board of Directors in managing the Company and as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners. Furthermore, the Board of Directors and Board of Commissioners are asked to submit periodic reports to Shareholders promptly on the implementation/supervision of the 2022 RKAP, which includes monthly reports, quarterly reports and other regular reports in accordance with applicable regulations.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

- b. Mengupayakan pencapaian target pada RKAP tahun 2022 secara optimal baik yang terkait dengan target operasional maupun keuangan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan analisis sensitivitas secara berkala terhadap faktor-faktor strategis dan material serta menyiapkan langkah antisipasinya (*contingency plan*) apabila terdapat kondisi di luar asumsi yang bersifat material.
- c. Mengupayakan pelaksanaan inisiatif strategis baik yang sudah tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") tahun 2020-2024 maupun berbagai strategic mapping yang telah disusun sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan berbagai inisiatif tersebut agar disertai dengan *project management* yang lebih baik dan juga dilaporkan secara berkala kepada Pemegang Saham;
- d. Memastikan pelaksanaan program kerja terkait ketahanan energi dan ketahanan iklim nasional dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah baik pusat dan daerah.
- e. Menuntaskan segala regulasi dan ketentuan yang diperlukan pasca Legal Establishment Subholding dan stakeholder yang melingkupinya, baik dalam tataran internal maupun eksternal terkait pelaksanaan tugas Pertamina secara konsolidasian.
- f. Penarikan pinjaman eksternal agar dilakukan dengan *prudent* dan *selective* dengan tetap memperhatikan aspek *timing*, *sizing*, dan *pricing* sehingga dapat dicapai *terms & condition* yang paling optimal, serta persyaratan yang tidak memberatkan kinerja keuangan di masa yang akan datang.
- g. Memastikan risiko valas dan fluktuasi komoditas khususnya *crude* dan produk BBM telah dilakukan pengelolaan sebaik-baiknya termasuk melakukan *review* atas kebijakan kecukupan *hedge ratio* yang ada.
- h. Meningkatkan *awareness* terhadap budaya *Health, Safety, Security and Environment* ("HSSE") dalam seluruh kegiatan operasional maupun non operasional di tingkat korporat, unit operasi, anak perusahaan maupun mitra kerja perusahaan sehingga menciptakan situasi kerja yang aman dan kondusif.
- b. Optimally strive to achieve the targets in the 2022 RKAP related to operational and financial targets while still referring to GCG principles and professionalism in accordance with statutory provisions, conducting periodic sensitivity analyses of strategic and material factors and preparing steps anticipation (*contingency plan*) if there are conditions beyond the assumptions that are material.
- c. Strive to implement strategic initiatives, both those already stated in the Company's Long Term Plan ("RJPP") for 2020-2024, as well as various strategic mappings that have been prepared in accordance with the targets set. Implementation of these various initiatives should be accompanied by better project management and also reported periodically to Shareholders;
- d. Ensuring that the implementation of work programs related to national energy security and climate resilience can run well and receive support from Ministries/Government Agencies, both central and regional.
- e. Completing all the necessary regulations and provisions after the Legal Establishment Subholding and the surrounding stakeholders, both internally and externally, related to implementing Pertamina's tasks on a consolidated basis.
- f. Withdrawal of external loans should be made prudently and selectively while considering the aspects of timing, sizing and pricing so that the most optimal terms & conditions can be achieved, as well as requirements that are not burdensome to financial performance in the future.
- g. Ensuring that foreign exchange risk and commodity fluctuations, incredibly crude and fuel products, have been managed as well as possible, including reviewing the existing hedge ratio adequacy policy.
- h. Increase awareness of the Health, Safety, Security and Environment ("HSSE") culture in all operational and non-operational activities at the corporate level, operating units, subsidiaries and business partners to create a safe and conducive work situation.



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

- i. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar melaksanakan *cascading* KPI kolegal sesuai dengan tingkatan pejabat pemilik KPI dengan mengacu pada Kontrak Manajemen antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham sebagai dasar penilaian kinerja tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.
- j. Memperhatikan catatan/arahan Dewan Komisaris Perseroan dalam Surat Dewan Komisaris Perseroan.
6. Memberikan arahan-arahan kepada Dewan Komisaris Perseroan agar:
 - a. Meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi Perseroan.
 - b. Menyusun target-target dalam bentuk KPI Dewan Komisaris Perseroan.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau kuasanya untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham ini dalam akta notaris dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

KPSSS tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tahun Buku 2022, 2023, dan 2024.

Uraian Keputusan:

PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 khusus terkait agenda Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tahun Buku 2022.
2. Memutuskan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") bagi Perseroan untuk Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Dewan Komisaris Perseroan agar melakukan evaluasi setiap tahun atas kinerja Kantor Akuntan Publik ("KAP") dan mengusulkan kembali kepada RUPS Perseroan untuk penetapan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk periode Tahun buku 2023.
 - c. Proses Pengadaan serta Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024 agar dikonsultasikan/dikoordinasikan dengan PT Pertamina International Shipping.

- i. The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, should carry out cascading collegial KPIs in accordance with the level of officials who own the KPI by referring to the Management Contract between the Directors, Board of Commissioners and Shareholders as the basis for evaluating performance in 2022 as stipulated in BUMN Minister Regulation No. PER-11/MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for SOEs Directors.
- j. Paying attention to the notes/directions of the Company's Board of Commissioners in the Letter of the Company's Board of Commissioners.
6. Provide directions to the Board of Commissioners of the Company so that:
 - a. Increasing its role in supervising the Board of Directors of the Company.
 - b. Setting targets in the form of KPIs for the Company's Board of Commissioners.
7. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors or their proxies to make and declare this Shareholders' Decision in a notarial deed and carry out other necessary legal actions in accordance with applicable regulations.

KPSSS dated October 11, 2022, regarding establishing a Public Accounting Firm ("KAP") for the 2022, 2023 and 2024 Fiscal Years.

Decision Description:

PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, as Shareholders, decide the following matters:

1. Revoke and declare the decision of the Company's Annual GMS for the 2021 Fiscal Year related explicitly to appointing a Public Accounting Firm ("KAP") for the 2022 Fiscal Year.
2. Decide on the Appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") for the Company for the 2022, 2023 and 2024 Fiscal Years with the following conditions:
 - a. Granted power and delegated authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office ("KAP") to conduct an examination of the Company's Financial Statements for 2022, 2023 and 2024 Fiscal Years along with the amount of the value of their services, in accordance with applicable rules and regulations.
 - b. The Board of Commissioners of the Company should conduct an annual evaluation of the performance of the Public Accounting Firm ("KAP") and propose to return to the Company's GMS to establish a Public Accounting Firm ("KAP") for the 2023 Fiscal Year.
 - c. The procurement process and the appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") for 2022, 2023 and 2024 Fiscal Years should be consulted/coordinated with PT Pertamina International Shipping.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

3. Keputusan-keputusan pada agenda lain sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 pada tanggal 16 Juni 2022, yang tidak direvisi melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini, dinyatakan tetap berlaku.
 4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan agar melaksanakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dengan telah melengkapi dan memenuhi kebutuhan internal, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta melengkapi semua proses dan administrasi.
 5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris (apabila diperlukan) dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Decisions on other agendas as decided in the Company's Annual GMS for the 2021 Fiscal Year on June 16, 2022, which are not revised through this Circular Shareholders' Resolution, remain valid.
 4. The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company will carry out this Circular Shareholder Resolution by completing and fulfilling internal needs, applicable laws and regulations and the principles of good corporate governance (*Good Corporate Governance*) as completing all processes and administration.
 5. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors (with the right of substitution) to make and declare this Circular Shareholder Resolution in a notarial deed (if necessary) and carry out other essential legal actions in accordance with applicable regulations.

KPSSS tanggal 14 November 2022 tentang Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Direksi di Anak Perusahaan atau *Joint Venture* PTK.

Uraian Keputusan:

PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

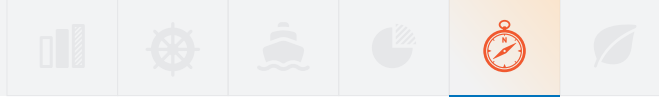
1. Menyetujui usulan penempatan Sdr. Eka Candra Dinata sebagai Direktur PT Pertamina Marine Solution (d.h PT Peteka Karya Gapura) sebagai wakil Perseroan dengan alas an pengisian jabatan vacant, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina Marine Solution memutuskan lain.
2. Bagi calon Direksi yang diusulkan untuk diangkat sebagaimana angka 1 di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar PT Pertamina Marine Solution), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
3. Direksi Perseroan atau Kuasanya agar menindaklanjuti Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina Marine Solution sesuai ketentuan yang berlaku.

KPSSS dated 14 November 2022 concerning the Placement of Company Representatives as Directors in PTK Subsidiaries or Joint Ventures.

Decision Description:

PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, as Shareholders, decide the following matters:

1. Approve the proposed placement of Mr Eka Candra Dinata as Director of PT Pertamina Marine Solution (formerly PT Peteka Karya Gapura) as a representative of the Company on the grounds of filling a vacant position for a period of 1 (one) term of office as referred to in the Company's Articles of Association, or until the General Meeting of Shareholders PT Pertamina Marine Solution decided otherwise.
2. For candidates for the Board of Directors who are proposed to be appointed as referred to in number 1 above who are still serving in other positions prohibited by laws and regulations, provisions of related agencies/ authorities as well as internal regulations (including the Articles of Association of PT Pertamina Marine Solution), then the person concerned must resign or be dismissed from that position.
3. The Board of Directors of the Company or their Proxy to follow up on this Circular Shareholders' Resolution in the General Meeting of Shareholders of PT Pertamina Marine Solution in accordance with applicable regulations.



Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris (apabila diperlukan) dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.

KPSSS tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 Direksi dan Dekom Perseroan.

A. PENGHARGAAN ATAS KINERJA TAHUNAN

2. Menetapkan Penghargaan Atas Kinerja Tahunan dalam bentuk Tantiem kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- Direktur Utama: Maksimum Rp2.236.185.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah).
 - Anggota Direksi: 85% x Tantiem Direktur Utama.
 - Komisaris Utama: 45% x Tantiem Direktur Utama.
 - Anggota Komisaris: 90% x Tantiem Komisaris Utama.
- Dengan mengikuti ketentuan dan rincian sebagai berikut:
- Besaran maksimum Penghargaan atas Kinerja Tahunan dalam bentuk Tantiem Tahun Buku 2021 sebagaimana diatur di atas bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib mempertimbangkan kemampuan Perseroan dan ketersediaan anggaran Perseroan Tahun Buku 2021.
 - Penghargaan atas Kinerja Tahunan dalam bentuk Tantiem diberikan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada Tahun Buku 2021 secara proporsional sesuai dengan lamanya hari yang bersangkutan menduduki jabatan dalam Tahun Buku 2021.
 - Untuk keperluan perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud butir ii di atas, jumlah hari dalam Tahun Buku 2021 ditetapkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari yang dimulai sejak 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
 - Pemberian Penghargaan atas Kinerja Tahunan dalam bentuk Tantiem tidak diberlakukan kepada Pelaksana Tugas Harian, Pelaksana Tugas, atau istilah lain dengan maksud yang sama.

4. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors (with the right of substitution) to make and declare this Circular Shareholder Resolution in a notarial deed (if necessary) and carry out other necessary legal actions in accordance with applicable regulations.

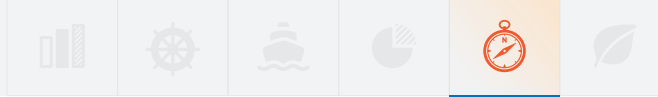
KPSSS dated November 14, 2022, concerning the Determination of Awards for Performance for the 2021 Fiscal Year and Remuneration for the 2022 Fiscal Year for Directors and the Company's Board of Commissioners.

A. AWARD FOR ANNUAL PERFORMANCE

2. Establish Annual Performance Awards in the form of Tantiem to Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2021 Fiscal Year, with the following details:
- President Director: Maximum Rp2,236,185,000.00 (two billion two hundred thirty-six million one hundred and eighty-five thousand Rupiah).
 - Members of the Board of Directors: 85% x Tantiem President Director.
 - President Commissioner: 45% x Tantiem President Director.
 - Members of the Board of Commissioners: 90% x Tantiem for the President Commissioner.
- By following the terms and details as follows:
- The maximum amount of Awards for Annual Performance in the form of Tantiem for Fiscal Year 2021 as stipulated above for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company must consider the Company's capabilities and the availability of the Company's budget for Fiscal Year 2021.
 - Awards for Annual Performance in the form of Tantiem are given to Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who serve in the 2021 Fiscal Year in proportion to the number of days the person concerned holds office in the 2021 Fiscal Year.
 - For the purposes of the proportional calculation referred to in point ii above, the number of days in the 2021 Fiscal Year is set at 365 (three hundred sixty-five) days from January 01, 2021, to December 31, 2021.
 - Awards for Annual Performance in the form of Tantiem are not applied to Daily Task Executors, Task Executors, or other terms with the same purpose.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

v. Pajak atas Penghargaan atas Kinerja Tahunan dalam bentuk Tantiem yang dibayarkan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris di atas ditanggung oleh penerima. 3. Bagi Direksi atau Pekerja Pertamina Grup yang merangkap jabatan menjadi Anggota Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2021 tidak berhak menerima pembayaran Penghargaan atas Kinerja Tahunan dalam bentuk Tantiem (bersifat probono). Penghargaan atas Kinerja Tahunan dalam bentuk Tantiem bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang dirangkap oleh Direksi atau Pekerja Pertamina Grup pada Tahun Buku 2021 akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Perusahaan Asal pejabat dimaksud sebagai penghasilan lain-lain. 4. Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, wajib memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran sebagai persyaratan untuk memperoleh Penghargaan atas Kinerja Tahunan dalam bentuk Tantiem bagi yang bersangkutan. 5. Dalam hal Perseroan memiliki kewajiban pembayaran Dividen maka Penghargaan atas Kinerja Tahunan dalam bentuk Tantiem dibayarkan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah Perseroan melakukan pembayaran Dividen Tahun Buku 2021 sebagaimana diputuskan oleh RUPS Perseroan. B. REMUNERASI 3. Menetapkan pemberian Gaji/Honorarium dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: a. Gaji/Honorarium i. Direktur Utama: Rp110.744.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah) (net). ii. Direktur: 85% dari Gaji Direktur Utama. iii. Komisaris Utama: 45% dari Gaji Direktur Utama. iv. Komisaris: 90% dari Honorarium Komisaris Utama. b. Tunjangan Perumahan (termasuk biaya utilitas) bagi Anggota Direksi diberikan secara bulanan sebesar 40% dari Gaji, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: i. Tunjangan Perumahan diberikan paling banyak sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). ii. Tunjangan Perumahan diberikan apabila Perseroan tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan Direksi.	v. Taxes for Awards for Annual Performance in the form of Tantiem paid to Members of the Board of Directors and Board of Commissioners above are borne by the recipient. 3. Pertamina Group Directors or employees who hold concurrent positions as Members of the Company's Board of Commissioners in the 2021 Fiscal Year are not entitled to receive payment of Annual Performance Awards in the form of Tantiem (probono). Awards for Annual Performance in the form of Tantiem for Members of the Company's Board of Commissioners who are concurrently the Directors or Employees of the Pertamina Group in the 2021 Fiscal Year will be paid by the Company to the Company of origin of the officials referred to as other income. 4. For Members of the Company's Board of Commissioners who hold concurrent positions as Members of the Board of Commissioners in other companies must meet the percentage of attendance at the Company's Board of Commissioners meetings for one year of at least 75% (seventy-five per cent) attendance as a requirement to obtain an Award for Annual Performance in Tantiem form for those concerned. 5. If the Company has an obligation to pay dividends, then the Annual Performance Award in the form of Tantiem is paid to Members of the Board of Directors and Board of Commissioners after the Company makes dividend payments for the 2021 Fiscal Year as decided by the Company's GMS. B. REMUNERATION 3. Determine the salary/honorarium and allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows: a. Salary/Honorarium i. President Director: Rp110,744,000.00 (one hundred and ten million seven hundred and forty-four thousand Rupiah) (net). ii. Director: 85% of the President Director's Salary. iii. President Commissioner: 45% of the President Director's Salary. iv. Commissioner: 90% of the President Commissioner's Honorarium. b. Housing Allowances (including utility costs) for Members of the Board of Directors are given monthly at 40% of Salary, subject to the following provisions: i. Housing Allowance is given a maximum of Rp27,500,000.00 (twenty-seven million five hundred thousand Rupiah). ii. Housing Allowances are given if the Company does not provide Board of Directors office facilities.

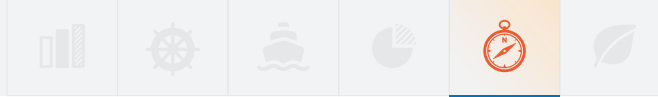


Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

- iii. Dalam hal terdapat masa jabatan yang berpadanan, maka Tunjangan Perumahan dihitung dan diberikan secara proporsional.
 - c. Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar 20% dari Honorarium masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
 - d. Tunjangan Hari Raya Keagamaan ("THRK") bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - i. Anggota Direksi: 1 (satu) kali Gaji.
 - ii. Anggota Dewan Komisaris: 1 (satu) kali Honorarium.
 - iii. THRK Dewan Komisaris hanya diberikan kepada Dewan Komisaris yang bukan berasal dari Pekerja dan/atau Anggota Direksi PT Pertamina International Shipping dan/atau Pertamina (Persero) dan/atau Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - iv. Bagi Direksi Perseroan yang berasal dari Pertamina Grup, pembayaran THRK dilakukan secara proporsional sesuai masa kerja dan Upah/Gaji di masing-masing Perusahaan.
 - e. Asuransi Purna Jabatan diberikan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama menjabat dengan premi yang ditanggung oleh Perseroan paling banyak (maksimum) 25% dari Gaji/Honorarium dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat SVP Human Capital Development PT Pertamina (Persero) No. 193/K10000/2021-S8 tanggal 2 Juli 2021 perihal Penyesuaian Premi Asuransi Purna Jabatan (Aspurjab) bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi Pertamina (AP/PTP) dan/atau perubahannya.
 - f. Pajak atas Gaji/Honorarium/Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perseroan.
4. Honorarium dan Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana keputusan angka 1 di atas mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Anggota Direksi Pertamina Grup atau Pekerja Pertamina Grup yang merangkap jabatan menjadi Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak berhak menerima penghasilan/remunerasi yang terdiri dari namun tidak terbatas pada Honorarium, Tunjangan Transportasi dan THRK.
 - iii. In the event that there is an equivalent term of office, the Housing Allowance is calculated and given proportionally.
 - c. Transportation allowance for Members of the Company's Board of Commissioners is 20% of the Honorarium of each Member of the Board of Commissioners.
 - d. Religious Holiday Allowance ("THRK") for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company by following the following provisions:
 - i. Members of the Board of Directors: 1 (one) time salary.
 - ii. Members of the Board of Commissioners: 1 (one) time Honorarium.
 - iii. THRK for the Board of Commissioners is only given to those, not from Workers and/or Members of the Board of Directors of PT Pertamina International Shipping and/or Pertamina (Persero) and/or the Company and/or Affiliates of the Company.
 - iv. For Company directors from the Pertamina Group, THRK payments are made proportionally according to the length of service and Wages/Salaries in each Company.
 - e. Retirement Insurance is given to Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company during their term of office with a premium borne by the Company at most (maximum) 25% of Salary/Honorarium in 1 (one) year with conditions as stipulated in the PT Pertamina SVP Human Capital Development Letter (Persero) No. 193/K10000/2021-S8 dated July 2, 2021, concerning Adjustment of Post-Employment Insurance Premiums (Aspurjab) for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of Subsidiaries/Pertamina Affiliated Companies (AP/PTP) and/or their amendments.
 - f. Tax on salary/honorarium/allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is borne and becomes the burden of the Company.
4. Honorarium and Allowances for Members of the Board of Commissioners, as referred to in decision number 1 above, follow the following provisions:
- a. Members of the Pertamina Group Board of Directors or Pertamina Group employees who hold concurrent positions as Members of the Company's Board of Commissioners are not entitled to receive income/remuneration consisting of but not limited to Honorarium, Transportation Allowances and THRK.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

- b. Penghasilan/remunerasi yang terdiri dari namun tidak terbatas pada Honorarium, Tunjangan Transportasi dan THRK bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang dirangkap oleh Anggota Direksi atau Pekerja Pertamina Grup akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Perusahaan Asal pejabat dimaksud sebagai penghasilan lain-lain.
5. Menetapkan pemberian fasilitas Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
- Fasilitas kendaraan ringan bagi Anggota Direksi Perseroan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengacu pada ketentuan yang berlaku di *Subholding Integrated Marine Logistics* dan/atau PT Pertamina (Persero);
- i. Jenis fasilitas Kendaraan Ringan Penumpang ("KRP") yang diberikan wajib memperhatikan level kesetaraan Pertamina *Reference Level* ("PRL") Direksi;
- ii. Dalam hal jenis fasilitas KRP yang ada pada saat penetapan RUPS ini diberlakukan, belum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.a.1) di atas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib menggunakan KRP dimaksud sampai berakhirnya masa sewa KRP. Setelah masa sewa KRP berakhir, Anggota Direksi wajib menggunakan jenis fasilitas KRP sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.a.1) di atas.
- b. Fasilitas bantuan hukum (termasuk Asuransi *Director's & Officers Liability*) bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan/atau *Subholding Integrated Marine Logistics* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN terkait.
- c. Fasilitas komunikasi dan sarana teknologi informasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan *Subholding Integrated Marine Logistics* dan/atau PT Pertamina (Persero).
- d. Fasilitas Kesehatan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- i. Diberikan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta seorang istri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak kandung dan/atau anak tiri dan/atau anak angkat yang sah menurut hukum dan tercatat di Perseroan dalam bentuk *inkind* atau penggantian
- b. Income/remuneration consisting of but not limited to Honorarium, Transportation Allowances, and THRK for Members of the Company's Board of Commissioners who are concurrently members of the Board of Directors or Employees of the Pertamina Group will be paid by the Company to the Company of origin of the said office as other income.
5. Determine the provision of facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:
- Light vehicle facilities for Members of the Board of Directors of the Company by following the following conditions:
- a. Referring to the provisions in force at Subholding Integrated Marine Logistics and/or PT Pertamina (Persero);
- i. The type of Light Passenger Vehicle ("KRP") facility provided must take into account the level of equality of the Pertamina Reference Level ("PRL") of the Directors;
- ii. In the event that the type of KRP facility that existed at the time the determination of this GMS was enacted did not refer to the provisions referred to in point 8.3.a.1) above, then the member of the Board of Directors concerned must use the said KRP until the end of the KRP lease period. After the KRP lease period ends, Members of the Board of Directors are required to use the type of KRP facility as referred to in point 8.3.a.1) above.
- b. Legal aid facilities (including Director's & Officer's Liability Insurance) for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in accordance with the provisions applicable within PT Pertamina (Persero) and/or Subholding Integrated Marine Logistics and applicable laws and regulations, including Ministerial Regulations related SOEs.
- c. Communication and information technology facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company per the applicable provisions within the Subholding Integrated Marine Logistics and/or PT Pertamina (Persero).
- d. Health Facilities by following the following conditions:
- i. Given to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners along with a wife or husband and a maximum of 3 (three) biological children and/or stepchildren and/or adopted children who are legal and registered in the Company in the form of in-kind or



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

- (*reimbursement*) yang besarnya sesuai dengan kewajiban/kepentingan dan dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
- ii. Fasilitas Kesehatan yang diberikan meliputi fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan tambahan dengan batasan periode pemberian dan biaya yang telah ditetapkan Perseroan.
 - iii. Pemeriksaan kesehatan berkala atau *medical check-up* dalam rangka *fit to work* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Diberikan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta seorang istri atau suami.
 - Dilaksanakan 1 (satu) kali setahun.
 - Dilakukan di *provider* dalam negeri yang ditunjuk oleh Perseroan.
 - iv. Pada dasarnya *benefit* layanan Kesehatan diberikan di dalam negeri. Jika atas indikasi medis dan atau karena keterbatasan fasilitas dan teknologi di dalam negeri serta berdasarkan rekomendasi dokter yang merawat dapat diberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri atas persetujuan Perseroan melalui *medical board* dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
 - v. Anggota Direksi/Dewan Komisaris dan keluarga inti yang menjadi tanggungannya, didaftarkan oleh Perseroan pada program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bagi Anggota Direksi Pertamina Grup atau Pekerja Pertamina Grup yang merangkap jabatan menjadi Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak berhak menerima fasilitas yang terdiri dari namun tidak terbatas pada fasilitas komunikasi dan sarana teknologi informasi serta Fasilitas Kesehatan yang sudah diterima di jabatan definitif (*no double facilities*), kecuali fasilitas lain yang belum diterima namun diperlukan untuk melaksanakan penugasan sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Cuti Tahunan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Anggota Direksi Perseroan berhak mendapat Cuti Tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja setiap tahun tanpa diberikan Tunjangan Cuti Tahunan apabila telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- reimbursement* the amount is in accordance with fairness/appropriateness and taking into account the Company's capabilities.
- ii. Health facilities include basic and additional health facilities with a limited provision period and costs determined by the Company.
 - iii. Periodic health check-ups or medical check-ups in the context of fit to work are carried out with the following conditions:
 - Given to members of the Board of Directors and Board of Commissioners and a wife or husband.
 - Conducted 1 (one) time a year.
 - Conducted at domestic providers appointed by the Company.
 - iv. Health service benefits are provided within the country. If due to medical indications and/or due to limited facilities and technology in the country and based on the recommendation of the treating doctor, a referral can be given to seeking treatment abroad based on the Company's approval through the medical board, taking into account the Company's financial capacity.
 - v. Members of the Board of Directors/Board of Commissioners and the nuclear family who are their dependents are registered by the Company in the BPJS Kesehatan National Health Insurance program in accordance with applicable laws and regulations.
6. Members of the Board of Directors of Pertamina Group or Employees of Pertamina Group who hold concurrent positions as Members of the Company's Board of Commissioners are not entitled to receive facilities consisting of but not limited to communication facilities and information technology facilities as well as Health Facilities that have been accepted in definitive positions (*no double facilities*), except for other facilities that have not been received but are required to carry out assignments as Members of the Company's Board of Commissioners.
7. Annual Leave following the following conditions:
- a. Members of the Company's Board of Directors are entitled to Annual Leave of 12 (twelve) working days each year without being given Annual Leave Allowances if they have worked for at least 12 (twelve) consecutive months.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

- b. Izin pelaksanaan Cuti Tahunan bagi Anggota Direksi Perseroan diberikan oleh Komisaris Utama Perseroan. Komisaris Utama Perseroan dapat menunda Cuti Tahunan yang dimohonkan oleh Anggota Direksi Perseroan berdasarkan alasan kepentingan operasional.
 - c. Anggota Direksi Perseroan yang melaksanakan ibadah sehingga membutuhkan waktu untuk tidak melaksanakan tugas melebihi dari hak Cuti Tahunan, yang bersangkutan wajib mendapatkan izin dari Dewan Komisaris Perseroan.
 - d. Dalam hal Anggota Direksi Perseroan berasal dari Pekerja Pertamina Grup, maka Perhitungan hari Cuti Tahunan diberlakukan secara proporsional meneruskan sisa Cuti Tahunan pada tahun berjalan dalam kapasitasnya sebagai Pekerja Pertamina Grup.
8. Bantuan biaya pindah diberikan bagi Anggota Direksi Perseroan yang berasal dari Pekerja Pertamina Grup dengan jarak kepindahan lebih dari 60 kilometer sesuai ketentuan internal Perseroan atau mengacu kepada ketentuan yang berlaku di *Subholding Integrated Marine Logistics* atau mengacu kepada Tata Kelola Organisasi PT Pertamina (Persero) No. TKO B09-002/K10310/2020-S9 tentang Pemberian Bantuan Biaya Penempatan Pekerja Baru, Biaya Pindah, dan Biaya Pemulangan dan/atau perubahannya dengan penyetaraan sesuai Pertamina *Reference Level* ("PRL") Jabatan.
 9. Keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022.
 10. Menyatakan tidak berlaku seluruh Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Perseroan sebelumnya yang bertentangan dengan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Perseroan ini.
 11. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris serta melaksanakan tindakan hukum lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

KPSSS tanggal 29 November 2022 tentang
Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor.

Uraian Keputusan:

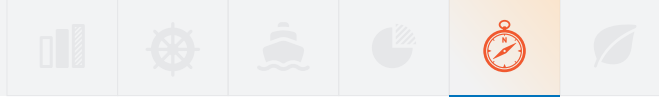
PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- b. Permission to implement Annual Leave for Members of the Company's Board of Directors is granted by the President Commissioner of the Company. The President Commissioner of the Company may postpone the Annual Leave requested by Members of the Company's Board of Directors based on operational reasons.
 - c. Members of the Company's Board of Directors who carry out religious services so that they need time not to carry out their duties beyond the Annual Leave entitlement must obtain permission from the Company's Board of Commissioners.
 - d. In the event that the members of the Company's Board of Directors come from Pertamina Group employees, the calculation of annual leave days is applied proportionally to continue the remaining annual leave in the current year in their capacity as Pertamina Group workers.
8. Transfer fee assistance is given to Members of the Board of Directors of the Company who come from Pertamina Group Workers with a transfer distance of more than 60 kilometres in accordance with the Company's internal provisions or referring to the applicable requirements in Subholding Integrated Marine Logistics or referring to the Organizational Governance of PT Pertamina (Persero) No. TKO B09-002/K10310/2020-S9 concerning Providing Assistance for the Cost of Placement of New Employees, Moving Costs, Repatriation Costs and/or changes thereof with the equivalent according to the Pertamina Reference Level ("PRL") Position.
 9. As stipulated in this Circular Shareholder Resolution, the decision is effective starting January 01, 2022.
 10. Declare that all previous Circular Shareholders' Resolutions of the Company are invalid and are contrary to this Circular Shareholders' Resolution of the Company.
 11. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors (with the right of substitution) to make and declare this Circular Shareholder Resolution in a notarial deed and carry out other necessary legal actions per applicable regulations.

KPSSS dated November 29, 2022 concerning
Additional Issued and Paid-up Capital.

Decision Description:

PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, as Shareholders, decide the following matters:

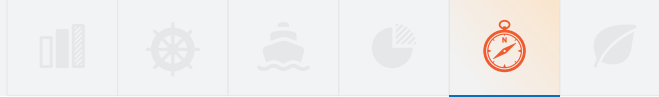


Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

1. Menyetujui Penambahan Modal dan Penerbitan Saham Baru, di mana seluruh saham baru Perseroan akan diambil bagian oleh PT Pertamina International Shipping atas pemasukan atau inbreng Aset Eks Fungsi *Marine* dan *Shipping* dengan nilai sebesar Rp128.602.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus dua juta Rupiah) atau setara dengan 128.602 (seratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua) lembar saham Seri A baru.
Bahwa, sehubungan dengan Penambahan Modal dan Penerbitan Saham Baru, PT Pertamina Pedeve Indonesia sepakat untuk mengesampingkan hak yang dimilikinya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, perjanjian atau apa pun lainnya, untuk mengambil bagian atas saham baru tersebut.
 2. Menyetujui:
 - a. Perubahan struktur modal Perseroan karena Penambahan Modal, dari semula:
Modal Ditempatkan dan Disetor: Rp1.106.145.000.000 (satu triliun seratus enam miliar seratus empat puluh lima juta Rupiah) saham Seri A; dan Rp819.000 (delapan ratus Sembilan belas ribu Rupiah) saham Seri B dengan modal ditempatkan dan disetor dibagi menjadi 1.106.145 (satu juta seratus enam ribu seratus empat puluh lima) lembar saham Seri A masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan 819 (delapan ratus Sembilan belas) lembar saham Seri B masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi: Modal Ditempatkan dan Disetor Rp1.234.747.000.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) saham Seri A; dan Rp819.000 (delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah) saham Seri B dengan modal ditempatkan dan disetor dibagi menjadi 1.234.747 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) lembar saham Seri A masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan 819 (delapan ratus sembilan belas) lembar saham Seri B masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah). Modal Dasar tetap sebesar Rp4.424.580.819.000 (empat triliun empat ratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah) yang terbagi atas 4.424.580 (empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) lembar saham Seri A masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan 819 (delapan ratus sembilan belas) lembar saham Seri B masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah).
 - b. Komposisi pemegang saham Perseroan.
1. Approved the Capital Increase and Issuance of New Shares, in which PT Pertamina International Shipping will take up all of the Company's new shares for the income or inbreeding of the Ex-Marine and Shipping Function Assets with a value of Rp128,602,000,000 (one hundred twenty-eight billion six hundred and two million Rupiah) or equivalent to 128,602 (one hundred twenty-eight thousand six hundred and two) new Series A shares.
Whereas, in connection with the Capital Increase and Issuance of New Shares, PT Pertamina Pedeve Indonesia agreed to waive its rights based on the Company's Articles of Association, laws and regulations, agreements or anything else to take part in the new shares.
 2. Approve:
 - a. Changes in the Company's capital structure due to Capital Addition from the beginning:
Issued and Paid-up Capital: Rp1,106,145,000,000 (one trillion one hundred six billion one hundred forty-five million Rupiah) Series A shares; and Rp819,000 (eight hundred and nineteen thousand Rupiah) Series B shares with issued and paid-up capital divided into 1,106,145 (one million one hundred six thousand one hundred and forty-five) Series A shares, each share having a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiah) and 819 (eight hundred and nineteen) Series B shares, each share having a nominal value of Rp1,000 (one thousand Rupiah) becomes: Issued and Paid-up Capital Rp1,234,747,000,000 (one trillion two hundred thirty four billion seven hundred forty seven million Rupiah) Series A shares; and Rp819,000 (eight hundred nineteen thousand Rupiah) Series B shares with issued and paid up capital divided into 1,234,747 (one million two hundred thirty four thousand seven hundred and four 1,000,000 (one million Rupiah) and 819 (eight hundred and nineteen) Series B shares, each share has a nominal value of Rp1,000 (one thousand Rupiah). Amounting to Rp4,424,580,819,000 (four trillion four hundred twenty-four billion five hundred eighty million eight hundred nineteen thousand Rupiah) divided into 4,424,580 (four million four hundred twenty-four thousand five hundred and eighty) Series shares Each share has a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiah), and 819 (eight hundred and nineteen) Series B shares each share has a nominal value of Rp1,000 (one thousand Rupiah).
 - b. The composition of the Company's shareholders.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi: Dari modal dasar tersebut di atas telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 28% (dua puluh delapan persen) atau sejumlah 1.234.747 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) lembar saham Seri A dan 819 (delapan ratus sembilan belas) lembar saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.234.747.819.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian terhadap saham-saham tersebut dengan nilai nominal saham sebagaimana disebutkan pada bagian akhir akta ini, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Setoran lama dengan nilai sebesar Rp1.106.145.819.000 (satu triliun seratus enam miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah);
 - b. Inbreng aset-aset marine non sarana tambat dengan nilai sebesar Rp128.602.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus dua juta Rupiah). Sehingga, untuk selanjutnya komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - i. PT Pertamina International Shipping sebanyak 1.234.737 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.234.737.000.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) dan 819 (delapan ratus sembilan belas) lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp819.000 (delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah);
 - ii. PT Pertamina Pedeve Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham Seri A atau dengan nilai nominal Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah); JUMLAH: 1.234.747 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.234.747.000.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) dan 819 (delapan ratus sembilan belas) lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp819.000 (delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah).
 4. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP Perseroan tahun 2022 dalam rangka melaksanakan pengurusan Aseel Eks Fungsi *Marine* dan *Shipping* dalam rangka Penambahan Modal (apabila ada).
3. Approved the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association to become: Of the authorized capital mentioned above, 28% (twenty-eight per cent) or a total of 1,234,747 (one million two hundred thirty-four thousand seven) has been issued and fully paid up hundred and forty-seven) Series A shares and 819 (eight hundred and nineteen) Series B shares with a total nominal value of Rp1,234,747,819,000 (one trillion two hundred thirty-four billion seven hundred forty-seven million eight hundred nineteen thousand Rupiah) by the shareholders who have subscribed to these shares with the nominal value of the shares as stated at the end of this deed, the details are as follows:
 - a. Old deposit with a value of Rp1,106,145,819,000 (one trillion one hundred six billion one hundred forty-five million eight hundred and nineteen thousand Rupiah);
 - b. Inbred marine assets non-mooring facilities with a value of Rp128,602,000,000 (one hundred twenty-eight billion six hundred and two million twenty-eight billion six hundred and two million Rupiah). Thus, henceforth the composition of the Company's shareholders is as follows:
 - i. PT Pertamina International Shipping of 1,234,737 (one million two hundred thirty-four thousand seven hundred thirty-seven) Series A shares with a nominal value of Rp1,234,737,000,000 (one trillion two hundred thirty-four billion seven hundred thirty-seven million Rupiah) and 819 (eight hundred and nineteen) Series B shares with a nominal value of Rp819,000 (eight hundred and nineteen thousand Rupiah);
 - ii. PT Pertamina Pedeve Indonesia in the amount of 10 (ten) Series A shares or with a nominal value of Rp10,000,000 (ten million Rupiah); TOTAL: 1,234,747 (one million two hundred thirty-four thousand seven hundred forty-seven) Series A shares with a nominal value of Rp1,234,747,000,000 (one trillion two hundred thirty-four billion seven hundred forty-seven million Rupiah) and 819 (eight hundred and nineteen) Series B shares with a nominal value of Rp819,000 (eight hundred and nineteen thousand Rupiah).
 4. Carry out other actions that have yet to be stipulated in the Company's 2022 RKAP to manage Ex-Marine and Shipping Function Assets in the context of Additional Capital (if any).



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

5. Direksi Perseroan (dengan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan) agar melaksanakan Keputusan Sirkuler ini dengan telah melengkapi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, ketentuan internal dan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), melengkapi semua proses dan administrasi, serta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan menguntungkan Perseroan, dengan memperhatikan: (i) catatan/arahan dalam KPSSS PIS dan catatan/arahan Dewan Komisaris PT Pertamina International Shipping dalam Surat Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) catatan/arahan Dewan Komisaris Perseroan dalam Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 176/DEKOM.PTK/2022.
6. Menyetujui untuk menunjuk dan memberikan kuasa, dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk: (i) menyatakan keputusan-keputusan tersebut di atas di hadapan Notaris (apabila diperlukan), (ii) membuat, menandatangani dan menyampaikan setiap akta sehubungan dengan Keputusan Sirkuler ini dan untuk mengatur pemberitahuan atas dan/atau untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang yang terkait, termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan (iii) juga untuk melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang diperlukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini.
5. The Board of Directors of the Company (with the supervision of the Board of Commissioners of the Company) to carry out this Circular Decree by completing and fulfilling the provisions of the applicable laws and regulations, internal provisions and principles of good corporate governance (*Good Corporate Governance*), completing all processes and administration, and carried out with the principle of prudence and benefiting the Company, taking into account: (i) notes/directions in the KPSSS PIS and notes/directions of the Board of Commissioners of PT Pertamina International Shipping in the Letter of the Board of Commissioners in accordance with the authority of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in accordance with the Articles of Association Company, and (ii) notes/directions of the Company's Board of Commissioners in the Company's Board of Commissioners Letter No. 176/DEKOM.PTK/2022.
6. Agree to appoint and authorize, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, both jointly and individually, to: (i) declare the above decisions before a Notary (if necessary), (ii) make, sign and submit every deed in connection with this Circular Decree and to arrange for notification of and/or to obtain approval from the relevant authorities, including but not limited to the Minister of Law and Human Rights, and (iii) also to carry out any and all matters and actions required or required by the applicable laws and regulations to implement this Circular Shareholders Resolution.

KPSSS tanggal 22 Desember 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Investasi pada RKAP Tahun 2022

Uraian Keputusan:

PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia selaku Para Pemegang Saham, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Rencana Kerja Anggaran Perseroan ("RKAP") Tahun 2022 dengan penambahan 6 (enam) rencana kerja investasi *Business Development* dan 1 (satu) rencana kerja investasi *Non Business Development* dengan rincian sebagai berikut:
2. Penambahan 6 (enam) rencana kerja investasi *Business Development* dan 1 (satu) rencana kerja investasi *Non Business Development*, tidak merubah total nilai ABI yang telah ditetapkan pada RKAP Tahun 2022, yaitu sebesar USD26,860,785 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Dolar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:

KPSSS dated December 22, 2022, concerning Changes to the Investment Work Plan in the 2022 RKAP

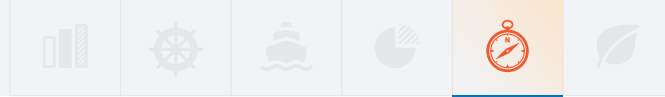
Decision Description:

PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia, as Shareholders, decide the following matters:

1. Approved changes to the Company's 2022 Work Budget Plan ("RKAP") with the addition of 6 (six) Business Development investment work plans and 1 (one) Non-Business Development investment work plan with the following details:
2. The addition of 6 (six) Business Development investment work plans and 1 (one) Non-Business Development investment work plan does not change the total ABI value set in the 2022 RKAP, which is USD 26,860,785 (twenty-six million eight hundred six twenty thousand seven hundred and eighty-five United States Dollars) with details as follows:

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

3. Memberikan arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengupayakan pencapaian target pada RKAP Tahun 2022 secara optimal baik yang terkait dengan target operasional maupun keuangan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan analisis sensitivitas secara berkala terhadap faktor-faktor strategis dan material serta menyiapkan langkah antisipasinya (*Contingency Plan*), apabila terdapat kondisi di luar asumsi yang bersifat material. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk terlaksana dan terselesaikannya hal-hal tersebut, termasuk untuk mengadakan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen sebagaimana diperlukan.
4. Direksi Perseroan (dengan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan) agar melaksanakan Keputusan Sirkuler ini dengan telah melengkapi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan internal dan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), melengkapi semua proses dan administrasi, serta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan menguntungkan Perseroan, dengan memperhatikan: (i) catatan/arahan dalam KPSSS PIS dan catatan/arahan Dewan Komisaris PT Pertamina International Shipping dalam Surat Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) catatan/arahan Dewan Komisaris Perseroan dalam Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 173/DEKOM. PTK/2022.
5. Menyetujui untuk menunjuk dan memberikan kuasa, dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk: (i) menyatakan keputusan-keputusan tersebut di atas di hadapan Notaris (apabila diperlukan), (ii) membuat, menandatangani dan menyampaikan setiap akta Sehubungan dengan Keputusan Sirkuler ini dan untuk mengatur pemberitahuan atas dan/atau untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang yang terkait, termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan (iii) juga untuk melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang diperlukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini.
3. Provide direction to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to strive for optimal achievement of the targets in the 2022 RKAP, both related to operational and financial targets, while still referring to GCG principles and professionalism in accordance with statutory provisions, conducting sensitivity analyzes periodically on strategic and material factors as well as preparing anticipatory steps (*Contingency Plan*) if there are conditions beyond the assumptions that are material. To give authority to the Company's Board of Directors to take other necessary actions to implement and resolve these matters, including to hold and/or sign documents as required.
4. The Board of Directors of the Company (with the supervision of the Board of Commissioners of the Company) to carry out this Circular Decree by completing and fulfilling the provisions of the applicable laws and regulations, internal provisions and principles of good corporate governance (*Good Corporate Governance*), completing all processes and administration, and carried out with the principle of prudence and benefiting the Company, taking into account: (i) notes/directions in the KPSSS PIS and notes/directions of the Board of Commissioners of PT Pertamina International Shipping in the Letter of the Board of Commissioners in accordance with the authority of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in accordance with the Articles The basis of the Company, and (ii) the notes/directions of the Company's Board of Commissioners in the Letter of the Company's Board of Commissioners No. 173/DEKOM. PTK/2022.
5. Agree to appoint and authorize, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, both jointly and individually, to (i) state the above decisions before a Notary (if necessary), (ii) make, sign and submit every deed in connection with this Circular Decree and to arrange for notification of and/or to obtain approval from the relevant authorities, including but not limited to the Minister of Law and Human Rights, and (iii) also to carry out any and all matters and actions required or required by the applicable laws and regulations to implement this Circular Shareholders Resolution.



RUPS yang Diselenggarakan di Tahun 2021 dan Pelaksanaan Keputusan RUPS oleh Manajemen

Berikut disampaikan hasil keputusan RUPS dan keputusan sirkuler pemegang saham di sepanjang tahun 2021, serta pelaksanaan hasil keputusan oleh manajemen hingga akhir tahun 2022.

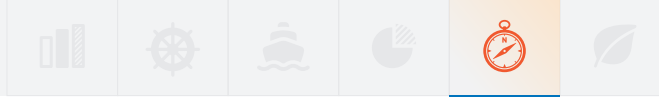
GMS to be Held in 2021 and Implementation of GMS Decisions by Management

The following is the results of the resolutions of the GMS and circular resolutions of shareholders throughout 2021, as well as the implementation of the resolutions by management until the end of 2022.

Hasil Keputusan Results of Management	Tindak Lanjut Manajemen Follow Up Decisions
RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 2 Juni 2021 Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2020 on June 2, 2021	
Pemegang saham menerima Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2020 Shareholders received the Company's Annual Report for the 2020 Fiscal Year	
- Pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan untuk Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana termuat dalam Laporan No. 00063/2.1025/AU.1/06/11303/1/11/2021 tanggal 19 Desember 2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material". Shareholders approved the Company's Annual Report for the 2020 Fiscal Year. They ratified the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2020, along with their explanations which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as contained in Report No. 00063/2.1025/AU.1/06/11303/1/11/2021 dated December 19, 2021, with the opinion "reasonable in all material respects". - Pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan kepengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang: - Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perusahaan (termasuk laporan keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. - Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum. Shareholders provide full release and discharge from responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners for supervisory actions carried out in the Fiscal Year ending December 31, 2020, provided that: - These actions are reflected in the Company's Annual Report (including financial statements) for the Fiscal Year ending December 31, 2020. - These actions are not criminal acts and/or acts against the law.	Keputusan telah dilembagakan melalui Akta Berita Acara RUPS No. 01 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, notaris di Jakarta. Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah dipublikasikan pada tanggal 19 Februari 2021. The decision has been institutionalized through Deed of Minutes of GMS No. 01 dated June 2, 2021 made before Fessy Farizqoh Alwi, notary public in Jakarta. Financial Report The Company's financial statements for the fiscal year ended on December 31 December 2020 has been published on February 19 2021.
RUPS menetapkan penggunaan Laba Perusahaan Tahun Buku 2020 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. The GMS determines the use of the Company's Profit for the 2020 Fiscal Year to be determined later and will be carried out in a circular separate GMS.	Di tahun 2021 Perusahaan tidak membayarkan dividen untuk hasil usaha tahun buku 2020. In 2021, the Company did not pay dividends for the 2020 financial year.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

Hasil Keputusan Results of Management	Tindak Lanjut Manajemen Follow Up Decisions
RUPS memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik ("KAP") dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perusahaan dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT Pertamina International Shipping. The GMS authorizes and delegates authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm ("KAP") to examine the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2021, along with the amount of the value of its services, in accordance with applicable rules and regulations, provided that the KAP appointed by the Company is consulted/coordinated in advance with PT Pertamina International Shipping.	Dewan Komisaris melalui konsultasi dengan PT Pertamina International Shipping selaku pemegang saham utama PTK telah menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan surat penunjukan No. SP - 001/PIS5100/2021-S7 tanggal 28 Juni 2021. Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2022. The Board of Commissioners, in consultation with PT Pertamina International Shipping, as the main shareholder of PTK, has appointed KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan to conduct a general audit of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2021, with letter of appointment No. SP - 001/PIS5100/2021-S7 dated June 28, 2021. The Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2021, were published on March 16, 2022.
RUPS menetapkan usulan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2020 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. The GMS determines the proposed performance award (Tantiem) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2020 Fiscal Year, which will be determined later and carried out in a separate circular GMS.	Perusahaan telah membayarkan seluruh remunerasi dan tantiem sesuai dengan keputusan pemegang saham. The company has paid all remuneration and bonuses according to the decision of the shareholders.
RUPS menetapkan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2020 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. The GMS determines the remuneration proposal for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2020 Fiscal Year to be determined later and will be carried out in a circular separate GMS.	
Keputusan Sirkuler tanggal 27 Januari 2021 Circular Decision of January 27, 2021	
Penghapusan Sebagian Ketentuan Terkait Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris. Elimination of Partial Provisions Related to Directors' Salaries and Board of Commissioners' Honorarium.	Akta No. 03 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penghapusan Sebagian Ketentuan Terkait Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Deed No. 03 dated February 11, 2021 concerning the Elimination of Part of the Provisions Related to Directors' Salaries and Honorarium for the Board of Commissioners by Notary Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn.
Pengalihan Aset Saham PT Pertamina (Persero) ke PT Pertamina International Shipping ("PIS"). Transfer of Share Assets of PT Pertamina (Persero) to PT Pertamina International Shipping ("PIS").	Akta No. 69 tanggal 28 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PTK, Pengalihan Aset Saham PT Pertamina (Persero) ke PT Pertamina International Shipping ("PIS") oleh Notaris Aulia Taufani, SH. Deed No. 69 dated April 28, 2021 concerning Statement of PTK Shareholders' Decision, Transfer of Share Assets of PT Pertamina (Persero) to PT Pertamina International Shipping ("PIS") by Notary Aulia Taufani, S.H.
Perubahan Anggaran Dasar PTK. Changes to PTK Articles of Association.	Akta No. 104 tanggal 29 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina Trans Kontinental oleh Notaris Aulia Taufani, SH. Deed No. 104 dated April 29, 2021 concerning Statement of Shareholders' Decision on Amendment to the Articles of Association of PT Pertamina Trans Kontinental by Notary Aulia Taufani, S.H.



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

Hasil Keputusan Results of Management	Tindak Lanjut Manajemen Follow Up Decisions
Keputusan Sirkuler tanggal 19 Mei 2021 Circular Decision of May 19, 2021	
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun 2021 Company Work Plan and Budget ("RKAP") for 2021	Akta No. 21 tanggal 31 Mei 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun 2021 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Deed No. 21 dated May 31 2021 concerning the 2021 Work Plan and Company Budget ("RKAP") by Notary Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn.
Keputusan Sirkuler tanggal 28 Mei 2021 Circular Decision of May 28, 2021	
Pengangkatan Komisaris Utama. Assignment of President Commissioner.	Akta No. 22 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengangkatan Komisaris Utama oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Deed No. 22 dated May 31, 2021 concerning the Appointment of the President Commissioner by Notary Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn.
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PTK Tahun Buku 2020. Minutes of PTK Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2020.	Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PTK Tahun Buku 2020 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Deed No. 01 dated June 2, 2021 concerning the Minutes of PTK Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2020 by Notary Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn.
Perjanjian Fasilitas Term Loan PTK oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PTK Term Loan Facility Agreement by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Akta No. 03 tanggal 3 Juni 2021 tentang Perjanjian Fasilitas Term Loan PTK No.WCO.KP/225/TLN/2021 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Deed No. 03 dated June 3, 2021 concerning PTK Term Loan Facility Agreement No.WCO.KP/225/TLN/2021 by Notary Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn.
Keputusan Sirkuler tanggal 1 September 2021 Circular Decision of September 1, 2021	
Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Keuangan & SDM PT Pertamina Trans Kontinental. Dismissal and Appointment of Finance & HR Director of PT Pertamina Trans Kontinental.	Akta No. 05 tanggal 17 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Keuangan & SDM PTK oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Deed No. 05 dated September 17, 2021 concerning Dismissal and Appointment of PTK Finance & HR Director by Notary Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn.
Keputusan Sirkuler tanggal 12 November 2021 Circular Decision of November 12, 2021	
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental. Dismissal and Appointment of PT Pertamina Trans Kontinental Board of Commissioners Members.	Akta No. 16 tanggal 23 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PTK oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Deed No. 16 dated November 23, 2021 concerning Dismissal and Appointment of PTK Board of Commissioners Members by Notary Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn.
Keputusan Sirkuler tanggal 9 Desember 2021 Circular Decision of December 9, 2021	
Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental. Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pertamina Trans Kontinental.	Akta No. 41 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PTK oleh Notaris Dewantari Handayani, SH., MPA. Deed No. 41 dated December 24, 2021 concerning Appointment of PTK Board of Commissioners Members by Notary Dewantari Handayani, S.H., MPA.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

Hasil Keputusan Results of Management	Tindak Lanjut Manajemen Follow Up Decisions
Keputusan Sirkuler tanggal 10 Desember 2021 Circular Decision of December 10, 2021	
Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Komisaris di Anak Perusahaan/ <i>Joint Venture</i> PT Pertamina Trans Kontinental. Placement of Company Representative as Commissioner in a Subsidiary/ <i>Joint Venture</i> of PT Pertamina Trans Kontinental.	Akta No. 42 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Komisaris di Anak Perusahaan/ <i>Joint Venture</i> PT Pertamina Trans Kontinental oleh Notaris Dewantari Handayani, SH., MPA. Deed No. 42 dated December 24, 2021 concerning Placement of a Company Representative as Commissioner in a Subsidiary/ <i>Joint Venture</i> of PT Pertamina Trans Kontinental by Notary Dewantari Handayani, S.H., MPA.
Keputusan Sirkuler tanggal 10 Desember 2021 Circular Decision of December 10, 2021	
Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2020. Determination of Awards for the Annual Performance of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2020.	Akta No. 43 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2020 oleh Notaris Dewantari Handayani, SH., MPA. Deed No. 43 dated December 24, 2021 concerning Determination of Awards for the Annual Performance of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2020 by Notary Dewantari Handayani, S.H., MPA.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terkait pelaksanaan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Dewan Komisaris bertugas memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam menentukan arah dan tujuan pencapaian kinerja Perusahaan. Segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar PTK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki *Board Manual* yang mengatur tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pertamina Trans Kontinental pada pasal 15 ayat 8 bahwa "Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan".

Susunan Dewan Komisaris

Di sepanjang tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Length of service
Amir Hamzah	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No. 22 tanggal 31 Mei 2021 Deed No. 22 of May 31, 2021	Periode jabatan 28 Mei 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1. Term of office from May 28, 2021 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	Akta No. 23 tanggal 23 September 2020 Deed No. 23 of September 23, 2020	Periode jabatan 11 September 2020 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1. Term of office from September 11, 2020 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.
Khalid Zabidi	Komisaris Commissioner	Akta No. 16 tanggal 24 November 2021 Deed No. 16 of November 24, 2021	Periode jabatan 12 November 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1. Term of office from November 12, 2021 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.
Agustinus Bensik Lomboan	Komisaris Commissioner	Akta No. 40 tanggal 29 Desember 2021 Deed No. 40 of December 29, 2021	Periode jabatan 9 Desember 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1. Term of office from December 9, 2021 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.

Board of Commissioners

The Board of Commissioners has a supervisory function related to implementing the Company's management by the Board of Directors. The Board of Commissioners is tasked with providing direction and advice to the Board of Directors in determining the direction and objectives of achieving the Company's performance. All implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners refers to the PTK Articles of Association and the applicable laws and regulations. In carrying out its duties, the Board of Commissioners has a Board Manual which regulates the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners must apply corporate governance principles in every activity it undertakes.

Provision of Office Terms

In accordance with the Articles of Association of PT Pertamina Trans Kontinental in article 15, paragraph 8, that "The term of office for members of the Board of Commissioners is set at 3 (three) years and can be reappointed for 1 (one) term of office".

Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2022 there were no changes to the composition of the Board of Commissioners.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

Informasi tentang Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan. *Code of Corporate Governance* telah mengatur ketentuan mengenai Komisaris Independen PTK yaitu sekurang-kurangnya 20% dari Anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan. Syarat-syarat untuk jabatan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi;
2. Tidak bekerja pada departemen/lembaga atau badan lainnya di lingkungan Pemerintahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
3. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
4. Tidak mempunyai keterikatan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produksi kepada Perusahaan dan afiliasinya;
5. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan;
6. Hingga akhir tahun 2022 seluruh Komisaris PTK berasal dari Independen yang diangkat oleh RUPS.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memegang prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam memberikan keputusan strategis terkait Perusahaan yang bebas dari tekanan atau kepentingan pihak tertentu. Dewan Komisaris juga senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan.

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Information about Independent Commissioners

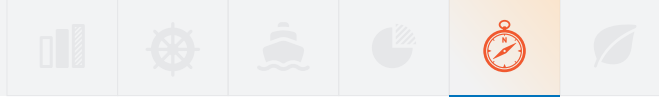
Independent commissioners are members of the Commissioners who are not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and controlling shareholders. They are free from business relationships or other relationships that may affect their ability to act independently or solely in the Company's interests. The Code of Corporate Governance has regulated provisions regarding PTK Independent Commissioners, namely that at least 20% of the members of the Board of Commissioners must come from people outside the Company. The requirements for the position of Independent Commissioner are as follows:

1. Not serving as a Director in an affiliated company;
2. Have not worked for a department/institution or other agency within the Government within the last three years;
3. Have not worked for the Company or its affiliates within the last three years;
4. Has no financial ties, either directly or indirectly, with the Company or other companies that provide services and products to the Company and its affiliates;
5. Free from conflicts of interest and business activities or other relationships that may hinder or interfere with the ability of the Commissioner concerned to act or think freely within the scope of the Company;
6. Until the end of 2022, all PTK Commissioners are independents appointed by the GMS.

Independence of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners adheres to the principle of independence in carrying out its duties, including in making strategic decisions related to the Company that are free from pressure or the interests of certain parties. The Board of Commissioners also always avoids conflicts of interest in financial and family relationships with fellow members of the Board of Commissioners, Directors, Controlling Shareholders and external parties who have business relations with the Company.

This is in accordance with the Regulation of the State Minister of BUMN No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the State Minister for BUMN No. PER-01/MBU/2011 concerning implementing Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

Sesuai Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan yang mengatur kriteria independensi sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
2. Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan Perusahaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
3. Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
4. Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Hubungan keuangan hanya sebatas status sebagai Anggota Dewan Komisaris yang mewakili Pemegang Saham, dan anggota Direksi merupakan pekerja PT Pertamina (Persero) yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk ditempatkan di Perusahaan sesuai penugasan dari PT Pertamina (Persero).

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan pedoman kerja (*Board Manual*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Komisaris yang dapat menjadi acuan bagi Komisaris dalam melaksanakan tugas untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. *Board Manual* telah disahkan melalui Kesepakatan bersama Diwan Komisaris dan Direksi tanggal 25 Juni 2018.

Board Manual PTK mengatur beberapa hal mengenai Dewan Komisaris, diantaranya adalah tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko, Komite Investasi dan Risiko Usaha, dan Sekretariat Dewan Komisaris), struktur organisasi dan prinsip dasar hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris (meliputi benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Direksi dan Dewan Komisaris), tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi

In accordance with Article 13, paragraph 3 of the Minister of State Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011, Members of the Board of Commissioners must meet the provisions governing the independence criteria as follows:

1. Has no financial relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders;
2. The Board of Commissioners has no management relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders;
3. The Board of Commissioners does not have a share ownership relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders;
4. The Board of Commissioners has no family relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders.

The financial relationship is only limited to the status as Members of the Board of Commissioners representing Shareholders, and members of the Board of Directors are employees of PT Pertamina (Persero) who have passed the fit and proper test to be placed in the Company according to the assignment from PT Pertamina (Persero).

Guidelines and Rules of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has been equipped with work guidelines (*Board Manual*) for their duties and responsibilities. The *Board Manual* contains instructions for the Board of Commissioners' work procedures, which can be used as a reference for Commissioners in carrying out their duties to achieve the Company's vision and mission so that it is hoped that standards will be achieved in accordance with GCG principles. The *Board Manual* has been ratified through Joint agreement of the Diwan of Commissioners and Directors dated June 25, 2018.

The PTK *Board Manual* regulates several matters concerning the Board of Commissioners, including the duties, authorities and obligations of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners, supporting organs of the Board of Commissioners (Audit Committee, Nomination, Remuneration & Risk Management Committee, Investment and Business Risk Committee, and Secretariat of the Board of Commissioners), organizational structure and basic principles of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners (including conflict of interest and ethics of office, as

Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

mencakup di dalamnya komunikasi formal serta komunikasi dan pertemuan informal, dan penggunaan waktu, sarana, dan fasilitas.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan pada umumnya yang dilaksanakan Direksi, dan juga memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap Anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada Persero dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
3. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil kepentingan Perusahaan selain honorarium dan fasilitas yang ditentukan oleh RUPS.

Kewenangan

Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

well as basic principles of the relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners), procedures for the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors including formal communication as well as informal communication and meetings, and the use of time, facilities and facilities. time, facilities, and amenities.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Articles of Association and the Board Manual, namely supervising management policies, the general management of the Company carried out by the Board of Directors, and also providing advice to the Board of Directors including overseeing the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and The Company's Articles, provisions of the Articles of Association and GMS Resolutions, as well as applicable laws and regulations, are for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

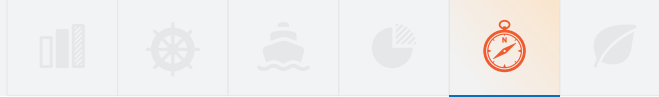
In carrying out these duties, each Member of the Board of Commissioners must:

1. Comply with the Articles of Association and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;
2. Have good faith, be full of caution and be responsible to the Persero, in this case, represented by the GMS, in carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company;
3. It is prohibited to carry out transactions that have a conflict of interest and take the interests of the Company apart from the honorarium and facilities determined by the GMS.

Authority

The authorities of the Board of Commissioners are as follows:

1. Look at books, letters and other documents; check cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets;
2. Entering the grounds, buildings, and offices used by the Company;
3. Ask for an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding issues related to the management of the Company;



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; 5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris; 7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; 9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu; 10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; 11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.	4. Know all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors; 5. Requesting the Directors and/or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors to attend the meetings of the Board of Commissioners; 6. Appoint the Secretary to the Board of Commissioners; 7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; 8. Establish committees other than the Audit Committee, if deemed necessary, by taking into account the Company's capabilities; 9. Using experts for some issues and within a certain period at the expense of the Company, if deemed necessary; 10. Carry out management actions of the Company under certain conditions for a certain period in accordance with the provisions of the Articles of Association; 11. Attend meetings of the Board of Directors and provide views on matters discussed; 12. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki kewajiban antara lain:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
3. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
5. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;
6. Mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Induk Perusahaan dan dinyatakan berlaku bagi Perusahaan dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

Obligations of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has obligations, among others:

1. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors;
2. Follow the development of the Company's activities, provide opinion and advice to the GMS regarding any issues deemed necessary for the management of the Company;
3. Report immediately to the GMS if there are signs of a decline in the Company's performance;
4. Research and review the periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report;
5. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS Decisions;
6. Comply with other provisions that apply to the Parent Company and are stated to apply to the Company and/or other requirements determined and approved by the GMS.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

Program Pengenalan Dewan Komisaris

Perusahaan melaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dengan tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Perusahaan ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Pelaksanaan Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru menjabat diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Program Pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris Baru Perusahaan.

Materi pengenalan diberikan oleh *Corporate Secretary* kepada anggota Dewan Komisaris. Selain pemaparan atas Perusahaan, dalam program pengenalan Perusahaan juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang, diantaranya Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP"), Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP"), Anggaran Dasar Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman GCG, Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, *Charter* Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain itu, guna memahami secara langsung proses bisnis Perusahaan, program pengenalan Perusahaan juga meliputi kunjungan langsung ke Unit/Unit Bisnis Perusahaan.

Pada tahun 2022 PTK tidak mengangkat Dewan Komisaris baru, dengan demikian program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru tidak dilaksanakan.

Kunjungan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja guna mendapatkan masukan-masukan di lapangan terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kunjungan kerja yang telah dilakukan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tanggal Date	Kunjungan Visit	Dewan Komisaris dan Organ Pendukung yang Berkunjung Visiting Board of Commissioners and Supporting Organs
26-28 Januari 2022 January 26-28, 2022	PTK dan AP PTK area Batam PTK and AP PTK Batam area	Bpk. Khalid Zabidi Mr. Khalid Zabidi
06-08 April 2022 April 06-08, 2022	Region I – Medan Region I – Medan	Bpk. Khalid Zabidi dan bpk. Harry Mulia (Komite Audit) Mr. Khalid Zabidi and Mr Harry Mulia (Audit Committee)
11-12 April 2022 April 11-12, 2022	Region I – Medan Region I – Medan	Bpk. Agustinus Bensik Lomboan dan bpk. Wimbo Hapsara (Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko/KNRMR) Mr. Agustinus Bensik Lomboan and Mr Wimbo Hapsara (Nomination, Remuneration & Risk Management Committee/KNRMR)

Board of Commissioners Introduction Program

The Company carries out an induction program for new members of the Board of Commissioners to provide an overview of business activities, plans of the Company, work guidelines and other matters that are the responsibility of the Board of Commissioners. Implementing the Induction Program for newly appointed members of the Board of Commissioners is regulated in the Board of Directors Decree concerning Guidelines for the Company's New Board of Directors and Board of Commissioners Introduction Program.

Introductory material is given by the Corporate Secretary to members of the Board of Commissioners. Apart from the Company's presentation, the Company introduction program also provides supporting documents, including Annual Reports, Company Work Plans and Budgets ("RKAP"), Company Long Term Plans ("RJPP"), Company Articles of Association, Board Manuals, GCG Guidelines, Company Ethical Standards, Work Program for the Board of Commissioners and Supporting Committees for the Board of Commissioners, Charter for Supporting Committees for the Board of Commissioners, as well as regulations related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners. In addition, in order to directly understand the Company's business processes, the Company introduction program also includes direct visits to the Company's Business Units/Units.

In 2022 PTK did not appoint a new Board of Commissioners. Thus the introduction program for new members of the Board of Commissioners was not implemented.

Visit of the Board of Commissioners

Throughout 2022, the Board of Commissioners conducted working visits to obtain inputs regarding implementing supervisory duties and providing advice to the Directors. Work visits that the Board of Commissioners carried out are as follows:

Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

Tanggal Date	Kunjungan Visit	Dewan Komisaris dan Organ Pendukung yang Berkunjung Visiting Board of Commissioners and Supporting Organs
12-13 April 2022 April 12-13, 2022	Region I – Batam (MWT) Region I – Medan	Bpk. Agustinus Bensik Lomboan Mr. Agustinus Bensik Lomboan
19-20 April 2022 April 19-20, 2022	Region III – Makassar Region III – Makassar	Bpk. Andi Saiful Haq dan bpk. Aldo Maudy Gantirta (Komite Investasi) Mr. Andi Saiful Haq and Mr Aldo Maudy Gantirta (Investment Committee)
20-21 April 2022 April 20-21, 2022	Region III – Sorong Region III – Sorong	Bpk. Andi Saiful Haq dan bpk. Edward Situmorang (Komite Audit) Mr. Andi Saiful Haq and Mr Edward Situmorang (Audit Committee)
22 April 2022 April 22, 2022	Region II Surabaya Region II Surabaya	Bpk. Hamdi Zainal (Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko/ KNRMR) Mr. Hamdi Zainal (Committee for Nomination, Remuneration & Risk Management/KNRMR)
25-26 April 2022 April 25-26, 2022	Region III – Balikpapan Region III – Balikpapan	Bpk. Khalid Zabidi dan bpk. Harry Mulia (Komite Audit) Mr. Khalid Zabidi and Mr Harry Mulia (Audit Committee)
30 November – 03 Desember 2022 November, 30 – December 03, 2022	Region II – Surabaya Region II – Surabaya	Bpk. Amir Hamzah, bpk. Andi Saiful Haq, bpk. Khalid Zabidi, bpk. Agustinus Bensik Lomboan. (Dekom) Bpk. Hamdi Zainal, bpk. Harry Mulia, bpk. Wimbo Hapsara, bpk. Edward Situmorang, bpk. Aldo Maudy Gantirta, ibu Dian Vita Alpha Suandi & bpk. Sudarlindo Warman Esa (Perangkat Dekom) Mr. Amir Hamzah, Mr. Andi Saiful Haq, Mr. Khalid Zabidi, Mr. Agustinus Bensik Lomboan. (Dekom) Mr. Hamdi Zainal, Mr. Harry Mulia, Mr. Wimbo Hapsara, Mr. Edward Situmorang, Mr. Aldo Maudy Gantirta, Mrs. Dian Vita Alpha Suandi & Mr. Sudarlindo Warman Esa (Board of Commissioners)

Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko, Komite Investasi, dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan setiap triwulan. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja Komite Audit selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu.

Penilaian kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Audit dilakukan dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat Komite Audit, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis bagi Komite Audit, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi.

Selain itu, penilaian kinerja Komite Audit dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan

Assessment of the Performance of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners, in carrying out their duties, is assisted by committees that are directly responsible to the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, the Nomination, Remuneration & Risk Management Committee, the Investment Committee, and the Secretary to the Board of Commissioners.

Audit Committee Performance Assessment

Assessment of the performance of the Audit Committee is carried out quarterly. Performance appraisal is carried out to assess the performance of the Audit Committee as a group and its members as individuals.

The Board of Commissioners carries out performance appraisal on the performance of the Audit Committee carried out with indicators of performance evaluation as determined by the Board of Commissioners, including the level of attendance at Audit Committee meetings, the level of attendance at internal meetings of the Board of Commissioners, the level of written contribution to the Audit Committee, accuracy of written recommendations, accuracy of recommendations verbal, active role (initiative) and innovation.

In addition, the performance assessment of the Audit Committee is carried out based on the realization and completion of work programs listed in the Audit Committee Work Plan and reported to the Board of

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Structure of Corporate Governance

Komite Audit yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang audit, kecukupan proses pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Pada tahun 2022, berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode 360 derajat dan AKHLAK *Behavioural Survey* (ABS), kinerja anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Skor Nilai Score	Predikat Kinerja Performance Predicate
1	Harry Mulia	92,5	High
2	Edward Situmorang	94,2	High

Penilaian Kinerja Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko ("KNRM")

Penilaian kinerja KNRM dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja KNRM selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu.

Penilaian kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kinerja KNRM dilakukan dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat KNRM, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis bagi KNRM, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi.

Selain itu, penilaian kinerja KNRM dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja KNRM dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan KNRM yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang nominasi, remunerasi, dan pengawasan atas manajemen risiko. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota KNRM untuk periode jabatan berikutnya.

Commissioners in the Audit Committee report, which includes the implementation of committee duties in the field of auditing, adequacy of internal control processes and preparation of financial statements. The results of this assessment will be used as material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Audit Committee for the next term of office.

In 2022, based on an assessment carried out using the 360 degree method and the AKHLAK *Behavioural Survey* (ABS), the performance of members of the Audit Committee is as follows:

Performance Assessment of the Nomination, Remuneration & Risk Management Committee ("KNRM")

KNRM performance evaluation is carried out at least once a year. Performance appraisal is carried out to assess the performance of the KNRM as a group and its members as individuals.

Performance appraisal is carried out by the Board of Commissioners on KNRM performance using performance appraisal indicators as determined by the Board of Commissioners, including the level of attendance at KNRM meetings, the level of attendance at internal meetings of the Board of Commissioners, the level of written contributions to KNRM, the accuracy of written recommendations, the accuracy of oral recommendations, the role active (initiative) and innovative.

In addition, the KNRM performance assessment is carried out based on the realization and completion of work programs listed in the KNRM Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the KNRM report, which includes the implementation of committee duties in the areas of nomination, remuneration and oversight of risk management. The Board of Commissioners will consider the results of this assessment to reappoint and/or dismiss members of the KNRM for the next term of office.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

Pada tahun 2022, berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode 360 derajat dan AKHLAK *Behavioural Survey* ("ABS"), kinerja anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

In 2022, based on an assessment carried out using the 360 degree method and the AKHLAK *Behavioural Survey* ("ABS"), the performance of members of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee is as follows:

No.	Nama Name	Skor Nilai Score	Predikat Kinerja Performance Predicate
1	Wimbo Hapsara	91,2	High
2	Hamdi Zainal	95,0	High

Penilaian Kinerja Komite Investasi

Seperti halnya kedua komite di atas, penilaian kinerja Komite Investasi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris meliputi tingkat kehadiran dalam rapat Komite Investasi, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis bagi Komite Investasi, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi. Penilaian kinerja Komite Investasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja Komite Investasi selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu.

Investment Committee Performance Assessment

As with the two committees above, the Investment Committee's performance appraisal is carried out by the Board of Commissioners with performance appraisal indicators as determined by the Board of Commissioners, including the level of attendance at Investment Committee meetings, the level of attendance at internal meetings of the Board of Commissioners, the level of written contributions to the Investment Committee, the accuracy of written recommendations, the accuracy of oral recommendations, active role (initiative) and innovation. The Investment Committee performance evaluation is conducted every 3 (three) months. Performance appraisal is carried out to assess the performance of the Investment Committee as a group and its members as individuals.

Selain itu, penilaian kinerja Komite Investasi dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Investasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Investasi yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang investasi. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Investasi untuk periode jabatan berikutnya.

In addition, the performance evaluation of the Investment Committee is carried out based on the realization and completion of work programs listed in the Investment Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Investment Committee report, which includes the implementation of the committee's duties in the investment sector. The results of this assessment will be used as material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Investment Committee for the next term of office.

Pada tahun 2022, berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode 360 derajat dan AKHLAK *Behavioural Survey* (ABS), kinerja anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

In 2022, based on an assessment carried out using the 360 degree method and the AKHLAK *Behavioural Survey* (ABS), the performance of members of the Investment Committee is as follows:

No.	Nama Name	Skor Nilai Score	Predikat Kinerja Performance Predicate
1	Aldo Maudy	95,9	High

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

Direksi

Direksi memiliki fungsi utama dalam pengelolaan Perusahaan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja setiap tahunnya. Pelaksanaan tugas Direksi mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada tata tertib kerja (*Board Manual*) yang mengatur tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 Ayat 7 masa jabatan anggota Direksi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Di sepanjang tahun 2022 perubahan susunan Direksi dengan kronologi sebagai berikut.

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2022

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors Throughout 2022

Periode 1 Januari s.d 8 Maret 2022 Period January 1 to March 8, 2022	Periode 8 Maret s.d 2 April 2022 Period March 8 to April 2, 2022	Periode 2 April s.d 15 Juli 2022 Period April 2 to July 15, 2022	Periode 15 Juli s.d 19 Juli 2022 Period July 15 to July 19, 2022	Periode 19 Juli s.d 5 Agustus 2022 Period July 19 to August 5, 2022	Periode 5 Agustus s.d 6 Desember 2022 Period August 5, to December 6, 2022	Periode 7 s.d 31 Desember 2022 Period 7 to December 31, 2022	Keterangan Information
Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	-
Hadi Purnomo (Direktur Operasi) (Operations Director)	Hadi Purnomo (Direktur Operasi) (Operations Director)						Pada 2 April 2022 Hadi Purnomo diberhentikan dari jabatan Direktur Operasi. On April 2, 2022 Hadi Purnomo was dismissed from the position of Operations Director.
Arsono Kuswardanu (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)							Pada 8 Maret 2022 Arsono Kuswardanu diberhentikan dari jabatan Direktur Pemasaran. On March 8, 2022 Arsono Kuswardanu was dismissed from the position of Marketing Director.

Board of Directors

The Board of Directors primarily manages the Company to achieve the targets set and improve performance every year. The implementation of the duties of the Board of Directors refers to the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations. It is guided by the work rules (*Board Manual*), which regulate the procedures for working relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Directors must apply corporate governance principles in every activity it undertakes.

In carrying out their duties, the Board of Directors is responsible to the GMS. The responsibility of the Board of Directors to the GMS is a manifestation of accountability in managing the Company in accordance with GCG principles.

Provision of Office Terms

According to Article 11 Paragraph 7 of the Company's Articles of Association, the term of office for members of the Board of Directors is set at 3 (three) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.

Composition and Term of Office of the Board of Directors

Throughout 2022 changes in the composition of the Board of Directors with the following chronology.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

Kronologi Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2022

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors Throughout 2022

Periode 1 Januari s.d 8 Maret 2022 Period January 1 to March 8, 2022	Periode 8 Maret s.d 2 April 2022 Period March 8 to April 2, 2022	Periode 2 April s.d 15 Juli 2022 Period April 2 to July 15, 2022	Periode 15 Juli s.d 19 Juli 2022 Period July 15 to July 19, 2022	Periode 19 Juli s.d 5 Agustus 2022 Period July 19 to August 5, 2022	Periode 5 Agustus s.d 6 Desember 2022 Period August 5, to December 6, 2022	Periode 7 s.d 31 Desember 2022 Period 7 to December 31, 2022	Keterangan Information
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Operasi) (Finance & HR Director concurrently Acting Operations Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Operasi) (Finance & HR Director concurrently Acting Operations Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)	Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Pemasaran) (Finance & HR Director concurrently Acting Marketing Director)	Pada 2 April - 14 Juli dan 19 Juli - 4 Agustus 2022 Afan Aftory menjabat sebagai Plt. Direktur Operasi dan pada 7 Desember 2022 Afan Aftory menjabat sebagai Plt. Direktur Pemasaran. On April 2 - July 14 and July 19 - August 4, 2022 Afan Aftory served as Acting. Director of Operations and on December 7, 2022 Afan Aftory served as Acting. Marketing Director.
	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran merangkap Plt. Direktur Operasi) (Marketing Director concurrently Acting Operations Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)		Imam Bustomi menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 8 Maret 2022 dan pada 15 Juli - 18 Juli 2022 Imam Bustomi menjabat Plt. Direktur Operasi. Pada tanggal 6 Desember 2022 Imam Bustomi mengundurkan diri dari jabatan Direktur Pemasaran. Imam Bustomi served as Marketing Director since March 8, 2022 and on July 15 - July 18, 2022 Imam Bustomi served as Acting. Director of Operations. On December 6, 2022 Imam Bustomi resigned from the position of Marketing Director.
				Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)		Slamet Harianto diangkat untuk menjabat Direktur Operasi sejak 5 Agustus 2022. Slamet Harianto was appointed to serve as Operations Director since August 5, 2022.

Susunan Direksi per 31 Desember 2022

Composition of the Board of Directors as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President director	Akta No. 5 tanggal 17 Juli 2019 dan diangkat kembali berdasarkan KPSS tanggal 15 Juli 2022. Deed No. 5 dated July 17, 2019 and reappointed based on KPSS dated July 15, 2022.	Periode jabatan 15 Juli 2022 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-2. Term of office from July 15, 2022 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 2nd Period.
Slamet Harianto	Direktur Operasi Operations Director	Akta No. 4 tanggal tanggal 10 Agustus 2022 Deed No. 4 dated August 10, 2022	Periode jabatan 5 Agustus 2022 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1. Term of office from August 5, 2022 (for a period of 1 term, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.
Afan Aftory	Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Pemasaran Finance & HR Director concurrently Acting Marketing Director	Akta No. 5 tanggal 17 September 2021 Deed No. 5 dated September 17, 2021	Periode jabatan 1 September 2021 (untuk jangka waktu 1 kali periode masa jabatan, 3 tahun atau ketika RUPS memutuskan lain), Periode ke-1. Term of office from September 1, 2021 (for a period of 1 term of office, 3 years or when the GMS decides otherwise), 1st Period.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance**Pedoman dan Tata Tertib Direksi**

Board Manual merupakan bagian dari *soft structure* GCG sekaligus merupakan perwujudan komitmen Direksi terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Selain itu, *Board Manual* juga merupakan wujud komitmen Direksi terhadap pemenuhan ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, serta standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Penyusunan dan penerapan *Board Manual* diharapkan dapat mendorong terwujudnya hal-hal terkait fungsi Direksi, sebagai berikut:

1. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta organ-organ lain Perusahaan.

Board Manual PTK disesuaikan dengan perkembangan industri dan usaha yang dijalankan Perusahaan. Selain itu penyempurnaan terhadap *Board Manual* juga dilaksanakan sesuai kebutuhan Direksi. *Board Manual* akan dievaluasi secara berkala untuk kemudian direvisi. *Board Manual* PTK paling akhir telah disahkan melalui kesepakatan Bersama Direksi tanggal 25 Juni 2018.

Board Manual PTK mengatur beberapa hal mengenai Direksi, diantaranya adalah tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi; rapat Direksi, organ pendukung Direksi (*Corporate Secretary* dan *Internal Audit*), struktur organisasi dan prinsip dasar hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris (meliputi benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Direksi dan Dewan Komisaris), tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi mencakup di dalamnya komunikasi formal serta komunikasi dan pertemuan informal, dan penggunaan waktu, sarana, dan fasilitas.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan;

Board of Directors Guidelines and Rules

The Board Manual is part of the GCG soft structure and a manifestation of the Board of Directors' commitment to implementing GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. In addition, the Board Manual is also a form of the Board of Directors' commitment to complying with the provisions of the applicable laws/regulations, the Company's Articles of Association, and ethical standards in force in the Company.

The preparation and implementation of the Board Manual are expected to encourage the realization of matters related to the functions of the Board of Directors, as follows:

1. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors are more apparent.
2. Make it easier for organs under the Board of Directors to understand the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors as well as other organs of the Company.

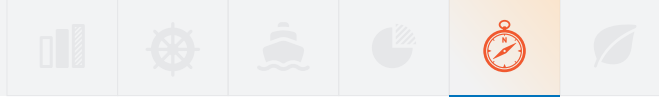
The PTK Board Manual is adjusted to the development of the industry and businesses run by the Company. In addition, improvements to the Board Manual are also carried out according to the needs of the Board of Directors. The Board Manual will be evaluated periodically and then revised. The most recent PTK Board Manual was ratified through a joint agreement of the Directors on June 25, 2018.

PTK Board Manual regulates several matters concerning the Board of Directors, including the duties, authorities and obligations of the Board of Directors; meetings of the Board of Directors; supporting organs of the Board of Directors (*Corporate Secretary* and *Internal Audit*); organizational structure and basic principles of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners (covering conflicts of interest and office ethics, as well as the basic principles of the relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners), the working relationship of the Board of Commissioners and The Board of Directors includes formal communication as well as informal communication and meetings, and the use of time, means and facilities.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The duties and responsibilities of the Board of Directors are regulated in the Articles of Association and the Board Manual as follows:

1. Lead and manage the Company in accordance with the interests and objectives of the Company;



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan; 3. Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan; 4. Memenuhi ukuran kinerja yang jelas lengkap dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan; 5. Menyelenggarakan sistem pengendalian <i>intern</i> yang efektif dan memberikan asersi mengenai pengendalian <i>intern</i>; 6. Melaksanakan manajemen risiko; 7. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi; 8. Menindaklanjuti temuan-temuan audit Internal Audit dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris; 9. Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, penanganan HSSE dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi; 10. Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS; 11. Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2. Master, maintain and manage the Company's assets; 3. Realizing the implementation of RJPP and RKAP, including achievement of financial and non-financial targets; 4. Fulfill clear, complete and balanced performance measures, both from financial and non-financial aspects, to determine the achievement of the Company's mission and objectives; 5. Implementing an effective internal control system and providing assertions regarding internal control; 6. Carry out risk management; 7. Building and utilizing information technology; 8. Follow up on the audit findings of the Internal Audit and External Auditor and report them to the Commissioners; 9. Report relevant information to the Commissioners, including regarding succession/transfer/promotion of key (senior) managers, HR development programs, risk management accountability, HSSE handling and information technology utilization performance; 10. Organize GMS and make minutes of GMS; 11. Pay attention to stakeholders' interests in accordance with ethical values and applicable laws and regulations.

Hak, Kewajiban, dan Wewenang Direksi

Dalam melakukan tindakan pengurusan Perusahaan, Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
2. Mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan aturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
4. Mengidentifikasi peluang bisnis;
5. Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
6. Menyelenggarakan program pengenalan bagi Direksi baru yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban Manajemen Risiko, pelaksanaan L2K3, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;

Rights, Obligations and Authorities of the Board of Directors

In carrying out the management of the Company, the Board of Directors has the following authorities:

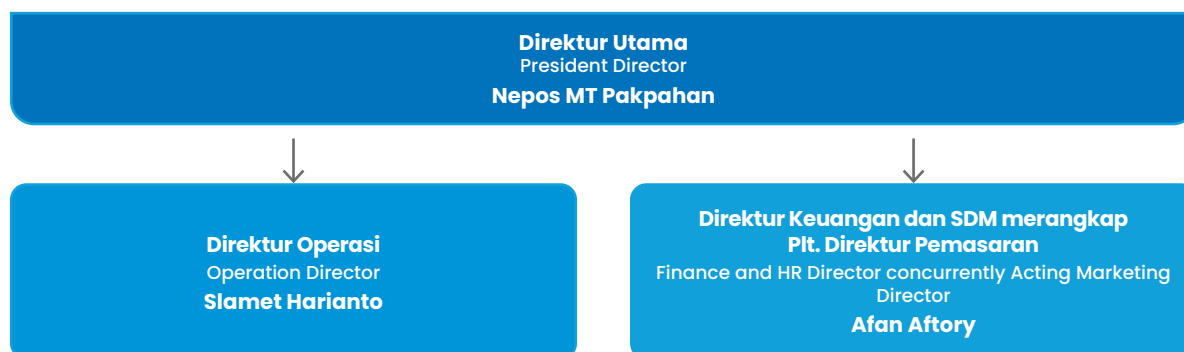
1. Establish policies related to the management of the Company, including procedures in the field of employment;
2. Appoint and dismiss workers based on the Company's internal rules and applicable laws and regulations;
3. Regulate the issue of delegation of authority/authorization of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court. Prepare the Company's Long Term Plan and Work Plan and Company Budget;
4. Identify business opportunities;
5. Develop and implement accounting systems in accordance with Financial Accounting Standards;
6. Organized an induction program for new Directors that is relevant to the Commissioners, including regarding succession/transfer/promotion of key (senior) managers, HR development programs, responsibility for Risk Management, implementation of L2K3, and performance in the use of information technology;

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance

7. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS; 8. Memperhatikan kepentingan <i>Stakeholders</i> sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Menyusun dan menyelenggarakan program pembelajaran (<i>knowledge skill</i>) bagi Direksi; 10. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan; 11. Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan; 12. Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab dan wewenang Manajemen serta ukuran kinerja pada setiap tingkatan/level; 13. Menandatangani kontrak Manajemen setiap tahun yang memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang telah ditetapkan; 14. Menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan Perusahaan; 15. Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan lain, dalam Laporan Tahunan Perusahaan.	7. Holding a General Meeting of Shareholders (GMS) and making minutes of the GMS; 8. Pay attention to the interests of Stakeholders in accordance with ethical values and applicable laws and regulations; 9. Develop and organize learning programs (knowledge skills) for the Board of Directors; 10. Provide accountability and all information regarding the condition and operation of the Company; 11. Signing a statement of having no conflict of interest; 12. Define clearly the duties, responsibilities and authorities of management as well as performance measures at each level/level; 13. Sign a Management contract every year which contains promises or statements of the Board of Directors to fulfil all the targets that have been set; 14. Prepare and publish the Company's Annual Report; 15. Include his and/or his family's share ownership in other companies in the Company's Annual Report.

Pembagian Tugas Direksi

Distribution of Duties of the Board of Directors



Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan membagi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

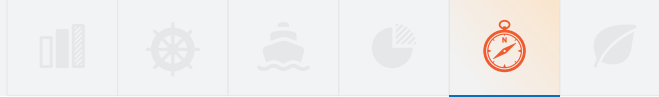
Direktur Utama (Nepos MT Pakpahan)

Bertindak atas nama Direksi dalam menentukan, memutuskan dan menetapkan penyusunan strategi, perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan pengoperasian kapal-kapal milik Perusahaan perkapalan dan pihak-pihak pengguna jasa yang membutuhkan/mempergunakan jasa Perusahaan, baik yang bergerak di bidang pencarian minyak lepas pantai maupun sektor lain yang bersifat khusus dalam bidang angkutan laut maupun jasa kepelabuhan, agar

In carrying out their activities, members of the Company's Board of Directors divide the duties and responsibilities as follows:

President Director (Nepos MT Pakpahan)

Act on behalf of the Board of Directors in determining, deciding and stipulating the preparation of strategies, planning and implementation of all operating activities of ships owned by shipping companies and service user parties who need/use the services of the Company, both those engaged in the search for offshore oil and other sectors special services in the field of sea transportation and port services, in order to obtain optimal profit and develop market share by taking into account business



Struktur Tata Kelola Perusahaan Structure of Corporate Governance

memperoleh profit optimal dan mengembangkan pangsa pasar dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan.

Direktur Operasi (Slamet Harianto)

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan penyusunan strategi serta pengembangan usaha terkait pelaksanaan operasional Perusahaan khususnya meningkatkan keandalan operasi kapal sehingga *commission days* dapat tercapai. Melalui penguatan operasional, diharapkan pelaksanaan Bisnis Perusahaan dapat memperoleh profit optimal dengan tetap memperhatikan etika Bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan.

Plt Direktur Pemasaran (Afan Aftory)

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan dalam penyusunan strategi dan pengembangan usaha serta mengidentifikasi kegiatan komersial baru (*new venture*) yang mendorong pertumbuhan bisnis PTK melalui pemasaran dan penjualan (*marketing & sales*) jasa sewa kapal dan jasa *marine* kepada pelanggan dari segmen perusahaan *oil & gas* dan perusahaan non *oil & gas*, untuk tujuan peningkatan pendapatan dan memperoleh profit optimal bagi perusahaan melalui kegiatan komunikasi pemasaran yang profesional, dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Perusahaan.

Direktur Keuangan & SDM (Afan Aftory)

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan kelancaran dalam pengelolaan dana Perusahaan sehingga dapat menjamin likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam menetapkan kebijakan dengan manajemen akuntansi dan perbendaharaan serta penyiapan laporan/data keuangan yang akurat dan tepat waktu serta kegiatan *Human Resources & General Affair* untuk seluruh pekerja Perusahaan untuk menjadikan pekerja PTK sebagai sumber daya unggul, strategis yang mampu mengelola Perusahaan secara profesional.

Program Pengenalan untuk Direksi yang Baru Ditunjuk/Menjabat

Sejalan dengan kebijakan di Dewan Komisaris, PTK juga telah memiliki kebijakan dan mekanisme bagi anggota Direksi yang baru ditunjuk/menjabat diberikan informasi terkait Perusahaan secara komprehensif dan representatif. Informasi yang diberikan ini merupakan bentuk pengenalan dari Perusahaan kepada anggota Direksi terpilih. Kegiatan ini dilaksanakan melalui

ethics and guided by the policy lines stipulated by the Company's Board of Commissioners.

Operations Director (Slamet Harianto)

Deciding, controlling and directing the preparation of strategies and business development related to implementing the Company's operations, significantly improving the reliability of ship operations so that *commission days* can be achieved. Through functional strengthening, the implementation of the Company's business can obtain optimal profits while still paying attention to business ethics and being guided by the policy lines set by the Company's Board of Commissioners.

Acting Marketing Director (Afan Aftory)

Deciding, controlling and directing the preparation of strategy and business development, as well as identifying new commercial activities (*new ventures*) that encourage PTK business growth through marketing and sales (*marketing & sales*) of charter boats and marine services to customers from the oil & gas company segment and companies non-oil & gas, to increase revenue and to obtain optimal profit for the Company through professional marketing communication activities, taking into account business ethics and guided by the policy lines set by the Company.

Finance & HR Director (Afan Aftory)

Deciding, controlling and directing the smooth running of the Company's funds to ensure liquidity, solvency and profitability in establishing policies with accounting and treasury management as well as preparing accurate and timely financial reports/data as well as Human Resources & General Affair activities for all Company employees to make PTK workers as superior, strategic resources capable of managing the Company professionally.

Introduction Program for Newly Appointed / Occupied Directors

In line with the policies of the Board of Commissioners, PTK also has policies and mechanisms for newly appointed/serving members of the Board of Directors to be given comprehensive and representative information regarding the Company. The information provided is a form of introduction from the Company to selected members of the Board of Directors. This activity is carried

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Structure of Corporate Governance

koordinasi Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Sekretaris Dewan Komisaris bila ada anggota Dewan Komisaris baru yang terpilih juga baru dilantik.

Program pengenalan bagi Anggota Direksi baru mencakup beberapa hal:

1. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi dan Misi, nilai dan budaya Perusahaan, tujuan dan strategi Perusahaan, unit usaha dan Anak Perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen Risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah strategis lainnya;
2. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta pendelegasian wewenang;
3. Penjelasan mengenai *stakeholders* utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan;
4. Pengenalan operasi Perusahaan;
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan;
6. Aspek *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan.

Pada pelaksanaannya, program pengenalan Direksi PTK dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/Anak Perusahaan, pengkajian dokumen, atau kegiatan lain yang dianggap sesuai.

Di tahun 2022 PTK mengangkat Imam Bustomi untuk menjabat Direktur Pemasaran, dan Slamet Harianto untuk menjabat Direktur Operasi. Program pengenalan Perusahaan bagi Imam Bustomi dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022 di Jakarta dihadiri oleh Direktur Pemasaran, VP legal & Relation. Sedangkan program pengenalan Perusahaan bagi Slamet Harianto dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022 di Jakarta dihadiri oleh Direktur Pemasaran, VP legal & Relation.

Informasi tentang Komite di Bawah Direksi

Per 31 Desember 2022 PTK tidak memiliki komite yang berada di bawah Direksi.

out through the coordination of the Corporate Secretary in collaboration with the Secretary of the Board of Commissioners if there are members of the Board of Commissioners who have also been newly appointed.

The induction program for new members of the Board of Directors includes several things:

1. Description of the Company concerning Vision and Mission, values and culture of the Company, objectives and strategies of the Company, business units and subsidiaries, financial performance and operations, short-term and long-term business plans, application of information technology, Risk Management, conditions of business competition, and other strategic issues;
2. An explanation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the delegation of authority;
3. Explanation of the Company's primary stakeholders and corporate social responsibility;
4. Introduction to the Company's operations;
5. Laws and regulations related to the Company's business activities;
6. Aspects of Good Corporate Governance within the Company.

In practice, the PTK Board of Directors induction program can include presentations, meetings, visits to companies/subsidiaries, document reviews, or other appropriate activities.

In 2022 PTK appointed Imam Bustomi as Marketing Director, and Slamet Harianto as Operations Director. Introduction program Company introduction program for Imam Bustomi was conducted on March 22, 2022 in Jakarta, attended by the Director of Marketing, VP Legal & Relation. While the Company introduction program for introduction program for Slamet Harianto was conducted on August 19, 2022 in Jakarta attended by Marketing Director, VP Legal & Relations. Marketing Director, VP Legal & Relations.

Information about the Committees under the Board of Directors

As of December 31, 2022, PTK did not have a committee under the Board of Directors.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* untuk kemajuan dan kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Hal yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga dapat dicapai kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

1. Terlaksananya dengan baik internal control dan manajemen risiko;
2. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
3. Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
5. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Komisaris, Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual Dewan Komisaris, anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif dikarenakan keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang.

Hingga akhir tahun 2022 Perusahaan belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Working Relations of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a relationship of checks and balances for the progress and health of the Company. According to their respective functions, the Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the continuity of the Company's business in the long term. What must be done by the Board of Commissioners and the Board of Directors together in accordance with their respective functions so that the Company's long-term business continuity can be achieved is reflected in the following:

1. Well-implemented internal control and risk management;
2. Achieving reasonable returns for Shareholders;
3. The interests of Stakeholders are adequately protected;
4. Implementation of a succession of leadership and management in all lines of the organization;
5. Fulfillment of GCG implementation.

Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is a combination of the desired characteristics in terms of the organs of the Board of Commissioners, Board of Directors and individual members of the Board of Directors, according to the needs of the Company. The combination is determined by considering the appropriate expertise, knowledge and experience in the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the Company's goals. Thus, consideration of the characteristics referred to will impact the accuracy of the nomination process and the collegial appointment of individual members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the Board of Directors. The diverse composition of the Board of Commissioners and Board of Directors will encourage more objective and comprehensive decision-making because decisions consider various perspectives.

As of the end of 2022 the Company did not yet have a specific policy regulated the diversity of the Board of Commissioners and Directors composition.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan perusahaan sehingga *assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan anak usaha dari BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Berdasarkan *Board Charter* Dewan Komisaris, penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat berdasarkan kriteria umum, antara lain:

1. Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris;
2. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan pemegang saham;
4. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris atau Komite dengan unit kerja lainnya.

Selain itu, kinerja Dewan Komisaris dapat dinilai menurut faktor lainnya baik secara individual maupun kolektif sebagai berikut:

1. Integritas (misalnya benturan kepentingan yang muncul);
2. Pengetahuan dan pemahaman Dewan Komisaris atas nilai-nilai misi, rencana jangka panjang Perusahaan, dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun;
3. Partisipasi Dewan Komisaris dalam rapat-rapat, termasuk kemampuan mereka untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perusahaan;
4. Kemampuan Dewan Komisaris dalam mengikuti isu-isu dan tren yang berpengaruh terhadap Perusahaan dan menggunakan informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja Perusahaan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang;
5. Hubungan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Komisaris, dengan Direksi, dan pihak-pihak lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors have a central role in the movement of the Company's growth. Hence, an assessment of these two organs is a must, mainly because the Company is a subsidiary of a BUMN, which is directed to apply GCG principles to BUMN standards as well as an assessment of this implementation.

Board of Commissioners' Performance Assessment

Based on the Board of Commissioners' Board Charter, the performance appraisal of the Board of Commissioners can be found on general criteria, including:

1. Attendance at internal meetings of the Board of Commissioners;
2. Attendance at meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Attendance at meetings of the Board of Commissioners with shareholders;
4. Attendance at meetings of the Board of Commissioners or Committees with other work units.

In addition, the performance of the Board of Commissioners can be assessed according to other factors, both individually and collectively, as follows:

1. Integrity (for example, conflicts of interest that arise);
2. Knowledge and understanding of the Board of Commissioners on mission values and the Company's long-term plans, and reflecting this understanding on important issues throughout the year;
3. Participation of the Board of Commissioners in meetings, including their ability to convey, provide arguments and provide solutions regarding the Company's strategic issues;
4. The ability of the Board of Commissioners to follow issues and trends that affect the Company and use this information to assess and direct the Company's performance, not only from year to year but also in the long term;
5. The relationship between the Board of Commissioners and fellow members of the Board of Commissioners, with the Board of Directors and other parties, is regulated in the Articles of Association and laws and regulations.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham, di mana Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerja pengawasannya dalam RUPS. Untuk menentukan kinerja Dewan Komisaris, Pemegang Saham menetapkan *Key Performance Indicators* ("KPI") Dewan Komisaris yang tertuang dalam rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.

Assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out by Shareholders, where the Board of Commissioners is accountable for its supervisory performance in the GMS. To determine the performance of the Board of Commissioners, Shareholders determine the Board of Commissioners' Key Performance Indicators ("KPI"), which are contained in the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris telah dapat memenuhi target pencapaian KPI kinerja selama tahun 2022 sebagaimana terlihat di bawah ini.

Overall, the Board of Commissioners has met the target of achieving performance KPIs for 2022, as shown below.

Parameter Parameter	Target 2022 Target 2022	Real YTD TW IV Real YTD TW IV
Rutinitas Kegiatan Dewan Komisaris Routine Activities of the Board of Commissioners		
Pelaksanaan Rapat Implementation of the Meeting	12	39
Pelatihan Dewan Komisaris/Komite Board of Commissioners/Committee Training	6	16
Kunjungan Dewan Komisaris/Komite Visit of the Board of Commissioners/Committee	5	9
Service Level Agreement Service Level Agreement		
Pendapatan/Saran RKAP RKAP Income/Suggestions	20	4.17
Pendapatan/Saran RJPP RJPP Income/Suggestions	40	1.0
Persetujuan/Rekomendasi Atas Permintaan Direksi Approval/Recommendation at the Request of the Board of Directors	15	3.48
Administrasi & Pelaporan Administration & Reporting		
Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS/RUPSLB Attendance of the Board of Commissioners at the GMS/EGMS	100	100
Pelaporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Board of Commissioners Supervision Reporting to Shareholders	4	4
Pelaporan Kinerja Direksi kepada Pemegang Saham Reporting on the performance of the Board of Directors to Shareholders	2	4

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dengan acuan Indikator KPI Direksi. Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya pada RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Pemegang Saham menetapkan KPI Direksi yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS.

Board of Directors Performance Assessment

The Board of Commissioners and Shareholders assess the performance of the Board of Directors regarding the Directors' KPI Indicators. The Board of Directors is accountable for its performance at the GMS. In evaluating the performance of the Board of Directors, Shareholders determine the KPI of the Board of Directors, which consists of the following:

1. Implementation of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association.
2. Implementation of the resolutions of the GMS.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

3. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yang mencakup 3 (tiga) aspek utama yaitu:
 - a. Aspek Keuangan
 - b. Aspek Operasional
 - c. Aspek Administrasi
4. Indikator Kinerja Pendukung Lainnya.

Berikut disampaikan pencapaian target KPI kinerja Direksi selama tahun 2022.

3. Assessment of the Soundness of the Company which includes 3 (three) main aspects, namely:
 - a. Financial aspect
 - b. Operational Aspect
 - c. Administrative Aspect
4. Other Supporting Performance Indicators.

The following is the achievement of the Directors' performance KPI targets for 2022.

No	KPI	Bobot (%)		Realisasi YTD Desember 2022 December 2022 YTD realization	
		Sub	Total	Perf.	%WP
A. Financial					34,97
1	EBITDA SH Integrated Marine Logistics	5	35	110%	5,50
2	EBITDA PTK	8		110%	8,80
3	ROIC ≥ WACC	2		110%	2,20
4	Shipping & Marine Cost per Unit	4		73%	3,20
5	Net Profit Margin	6		110%	6,60
6	Cash From Operation	6		110%	6,60
7	Realisasi Investasi ("ABI") Investment Realization ("ABI")	4		52%	2,07
B. Customer Focus					16,00
1	% Non-Captive Market	5	15	110%	5,50
2	Customer Satisfaction Index	5		100%	5,00
3	New Entry Market Capture	5		110%	5,50
C. Internal Process					36,13
1	Total Recordable Incident Rate ("TRIR")	5	35	110%	5,00
2	Pemenuhan ALD/ADD ALD/ADD fulfillment	4		105%	4,20
3	Mendapatkan Mitra Kerja Sama IML yang Strategis Getting Strategic IML Collaboration Partners				
	• Dockyard Business	3		100%	3,00
	• Shore-Based Logistic Business	3		110%	3,30
4	Commission Days	7		104%	7,28
5	Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN") Use of Domestic Component Level ("TKDN")	5		110%	5,50
6	Realisasi Investasi (Progress Fisik) Investment Realization (Physical Progress)	4		86%	3,45
7	Pencapaian Unlock Value Pertamina SH IML (Strategic Partnership) Pertamina SH IML (Strategic Partnership) Unlock Value Achievement	4		110%	4,40
D. Learning & Growth					16,16
1	Pencapaian Roadmap Transformasi Digital (Digitalisasi Proses Bisnis) Achievement of Digital Transformation Roadmap (Digitalization of Business Processes)	5	15		5,50
2	Program Strategic Initiatives (Cost Optimization) Strategic Initiatives Program (Cost Optimization)	4			4,36
3	Penurunan Emisi Karbondioksida (CO2e) Reducing Carbon Dioxide (CO2e) Emissions	3			3,30
4	Penyelesaian Roadmap Green Energy Business Completion of Green Energy Business Roadmap	3			3,00
Subtotal			100,00		103,26

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

No	KPI	Bobot (%)		Realisasi YTD Desember 2022 December 2022 YTD realization	
		Sub	Total	Perf.	%WP
E. Boundary KPI					(1,00)
1	Number of Accident ("NOA")				(3,00)
2	Pelaporan e-LHKPN e-LHKPN reporting				0,00
3	Peningkatan Nilai Sinergi Grup Pertamina Pertamina Group Synergy Value Increase				2,00
4	Pengelolaan Risiko Risk Management				0,00
5	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal & Eksternal Follow-up on Internal & External Audit Results Recommendations				0,00
					102,26

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan suksesi kepemimpinan PTK mengacu pada kebijakan induk Perusahaan yaitu PT Pertamina International Shipping. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suksesi kepemimpinan Perusahaan berasal dari internal PTK dan eksternal PTK baik dari PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina (Persero) maupun Anak Perusahaan Pertamina yang lainnya.

Dalam mekanisme suksesi Direksi, PTK mengadakan pelatihan baik internal maupun eksternal serta pengembangan kompetensi khususnya kompetensi *leadership* dan kompetensi pejabat perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Hal tersebut guna mempersiapkan bakal calon anggota Direksi yang selanjutnya akan diajukan kepada pemegang saham dalam RUPS serta mengikuti *fit and proper test*.

Adapun penentuan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi menjadi kewenangan Pemegang Saham, yaitu PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia.

Kriteria Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dan memenuhi kualifikasi pedoman serta kebijakan *Corporate Governance* dan *Board Manual*. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, dedikasi dan iktikad baik serta rasa tanggung jawab;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
3. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

Nomination of the Board of Commissioners and Directors

PTK's leadership succession policy refers to the parent company's policy, namely PT Pertamina International Shipping. Based on these provisions, the succession of the Company's leadership comes from PTK internal and external PTK, both from PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina (Persero) and other Pertamina subsidiaries.

In the Board of Directors succession mechanism, PTK conducts internal and external training and competency development, especially leadership competencies and competencies of company officials who meet the requirements for promotion. This is to prepare prospective members of the Board of Directors, which will then be submitted to shareholders at the GMS and to take a fit and proper test.

The determination of nominations for the Board of Commissioners and Directors is the authority of the Shareholders, namely PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia.

Criteria for the Board of Commissioners

The Shareholders appoint the Board of Commissioners and fulfil the qualification guidelines and policies of Corporate Governance and the Board Manual. All members of the Board of Commissioners have met the following criteria or requirements:

1. Have integrity, dedication and good faith, as well as a sense of responsibility;
2. Having adequate knowledge of the Company's business sector;
3. Have sufficient time to perform their duties;

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

4. Memiliki kemampuan melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
5. Memiliki hubungan yang luas dan bermanfaat bagi Perusahaan;
6. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

4. Can carry out legal actions and has never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or Commissioners who have been found guilty of causing a company to go bankrupt or has been convicted of a crime that is detrimental to state finances within five years before his appointment;
5. Having extensive and beneficial relationships for the Company;
6. Does not represent the interests of certain political parties.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

RUPS memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan aspek integritas serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

Sedangkan dalam proses pemberhentian, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS. Hal tersebut terjadi jika terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi memberikan kerugian bagi Perusahaan atau melalaikan kewajibannya. RUPS juga memiliki wewenang untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang terbukti melanggar.

Kriteria Direksi

Penunjukan anggota Direksi Perusahaan harus memenuhi kriteria antara lain: tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; tidak pernah melakukan tindakan tercela, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan sejenis, dan atau lembaga lain; dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

Anggota Direksi PTK wajib memenuhi seluruh persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, *Board Manual* dan CoCG Perusahaan, yaitu:

1. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur dan perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;

Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

The GMS has the authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners have taken into account aspects of integrity and competence in accordance with the Company's business needs.

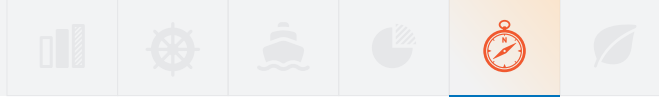
Meanwhile, in the dismissal process, members of the Board of Commissioners may be temporarily dismissed by the GMS. This happens if it is proven to have acted contrary to the Articles of Association or there are indications of causing losses to the Company or neglecting its obligations. The GMS also has the authority to dismiss members of the Board of Commissioners who are proven to have violated it.

Criteria for the Board of Directors

Appointment of members of the Company's Board of Directors must meet the following criteria, including never having been declared bankrupt or guilty of causing a company to be declared bankrupt; has never committed a disgraceful act, has never been punished for committing a crime, does not have a dual position as Commissioner, Director or Executive Officer in a similar company, and or other institution; and has no financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or the Company's Shareholders.

PTK Board of Directors members must fulfil all fit and proper requirements, which have been regulated in the Company's Articles of Association, Board Manual and CoCG, namely:

1. Have expertise, integrity, leadership, experience, honesty and good behavior and high dedication to advancing and developing the Company;



Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit serta tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
4. Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga antara Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris;
5. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.
2. Able to carry out legal actions and have never been declared bankrupt and have never been a member of the Board of Directors or Commissioner who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
3. Never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances within five years before his appointment;
4. Not allowed to have family relationships between members of the Board of Directors and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
5. Does not represent the interests of certain political parties.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengacu pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan Perusahaan. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian tersebut meliputi:

1. Tahap pertama adalah pengajuan usulan calon Direksi Anak Perusahaan oleh Direksi PT Pertamina International Shipping selaku Pemegang Saham dengan meminta persetujuan tertulis dari Direksi PT Pertamina International Shipping dan disetujui oleh RUPS PT Pertamina International Shipping sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan;
2. Prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Perusahaan melalui tahap evaluasi, proses penjurangan, proses penilaian melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) serta dan ketentuan-ketentuan perihal formulasi penilaian, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau pedoman yang berlaku di PT Pertamina International Shipping;
3. Sebelum meminta Persetujuan RUPS, Direksi PT Pertamina International Shipping akan meminta persetujuan dan pendapat Direksi PT Pertamina International Shipping terkait rekomendasi calon Direksi Anak Perusahaan. Prosedur permintaan persetujuan tersebut, meliputi:
 - a. Direksi Pertamina menyampaikan calon Direksi Anak Perusahaan kepada Menteri BUMN setelah memperoleh persetujuan Direksi.
 - b. RUPS Pertamina memberikan penetapan tertulis.
 - c. Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak Manajemen.

Appointment and Dismissal of Directors

Provisions for appointing and dismissing the Board of Directors refer to the Company's Articles of Association and statutory requirements. The appointment and dismissal procedures include:

1. The first stage is the submission of proposals for candidates for the Directors of the Subsidiary by the Directors of PT Pertamina International Shipping as Shareholders by requesting written approval from the Directors of PT Pertamina International Shipping and approved by the GMS of PT Pertamina International Shipping before being determined in the GMS of the Subsidiary;
2. The procedure for appointing candidates for members of the Company's Board of Directors goes through the evaluation stage, the selection process, the assessment process through the fit and proper test and the provisions regarding the formulation of the assessment, while still referring to the applicable laws and regulations and/or guidelines that apply at PT Pertamina International Shipping;
3. Before requesting the approval of the GMS, the Directors of PT Pertamina International Shipping will seek the approval and opinion of the Directors of PT Pertamina International Shipping regarding the recommendations for candidates for the Directors of a Subsidiary. The procedure for requesting approval includes the following:
 - a. Pertamina's Board of Directors submits candidates for Subsidiary Directors to the Minister of SOEs after obtaining the Directors' approval.
 - b. Pertamina's GMS provides a written determination.
 - c. The elected Directors sign the Management contract.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

RUPS memiliki kewenangan dalam pemberhentian Direksi yang disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemberhentian tersebut dapat disebabkan antara lain:

1. Masa jabatannya berakhir;
2. Mengundurkan diri;
3. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
4. Meninggal dunia;
5. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi, Perusahaan menjadikan indikator pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, kemampuan keuangan Perusahaan juga dijadikan pertimbangan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan.

Kebijakan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pencapaian kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi. Pertimbangan lain adalah ketentuan yang berlaku baik di internal PT Pertamina International Shipping, ketentuan yang berlaku di lingkup PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN, maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 113;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
3. Anggaran Dasar Perusahaan.

Prosedur dan Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan dan pemegang saham. Mekanisme penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PTK tergambar dalam skema di bawah ini.

The GMS has the authority to dismiss the Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. Such termination may be due to, among other things:

1. The term of office ends;
2. Resigned;
3. Losing Indonesian citizenship;
4. Died;
5. Dismissed based on GM's decision.

Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

In determining the income of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company takes the indicators of KPI achievement and the soundness level of the Company in accordance with the management contract a consideration. In addition, the Company's financial capability is also considered, as well as other relevant factors.

The policy of providing remuneration for the Board of Commissioners and Directors refers to the performance achievements of the Board of Commissioners and Directors. Another consideration is the provisions that apply both within PT Pertamina International Shipping. These requirements apply within the scope of PT Pertamina (Persero) as a BUMN and laws and regulations in Indonesia.

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Article 113;
2. SOE Minister Regulation No. PER-12/MBU/11/2020 concerning the Fifth Amendment to the Minister of BUMN Regulation No. PER-04/MBU/2014 Determination of Income for Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
3. Company Articles of Association

Procedures and Mechanisms for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

The amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through the GMS by considering the results of studies conducted by the Company and shareholders. The mechanism for determining the remuneration for the PTK Board of Commissioners and Board of Directors is illustrated in the scheme below.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Manajemen mengajukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan industri, pencapaian kinerja Perusahaan yang signifikan, tantangan dan/atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan. Pengajuan tersebut diberikan kepada pemegang saham melalui *Vice President Subsidiary Joint Venture (SVJ)* PT Pertamina International Shipping.

Management proposes remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, considering the complexity of the business and industry, significant Company performance achievements, challenges and/or specific assignments given. The proposal was presented to shareholders through the Vice President Subsidiary Joint Venture (SVJ) of PT Pertamina International Shipping.

VP SVJ PT Pertamina International Shipping melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kepada *Human Resource (HR)* PT Pertamina International Shipping untuk menentukan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

VP SVJ PT Pertamina International Shipping conducted a study and compiled recommendations to the Human Resources (HR) of PT Pertamina International Shipping to determine the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors.

(HR) PT Pertamina International Shipping melakukan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada Direksi PT Pertamina International Shipping dalam bentuk risalah rapat Direksi secara sirkuler.

(HR) PT Pertamina International Shipping conducts studies and prepares recommendations to the Directors of PT Pertamina International Shipping in the form of minutes of meetings of the Board of Directors circularly.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Pertamina International Shipping, HR PT Pertamina (Persero) menyampaikan kepada SVJ Pertamina (Persero) untuk menyelenggarakan RUPS secara sirkuler guna menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTK.

After obtaining approval from the Directors of PT Pertamina International Shipping, HR of PT Pertamina (Persero) informed SVJ Pertamina (Persero) to hold a circular GMS to determine the remuneration for members of the PTK Board of Commissioners and Directors.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan indikator Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PTK mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020; sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha.
2. Faktor kompleksitas usaha.
3. Tingkat inflasi.
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menetapkan penghasilan Direksi PTK, Perusahaan menjadikan indikator pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, kemampuan keuangan Perusahaan juga dijadikan pertimbangan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan.

Indicators for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

In setting the Remuneration indicators for the Board of Commissioners and Board of Directors, PTK refers to the Minister of BUMN Regulation No. PER-12/MBU/11/2020; as follows:

1. Business scale factor.
2. Business complexity factor.
3. Inflation rate.
4. The condition and financial capability of the Company.
5. Other relevant factors may not conflict with laws and regulations.

In determining the income of PTK Directors, the Company takes the indicators of KPI achievement and the level of the soundness of the Company in accordance with the management contract a consideration. In addition, the Company's financial capability is also considered, as well as other relevant factors.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan besaran remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020. Dalam penetapan tersebut, remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi antara lain gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Directors

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Directors

Determination of the amount of remuneration refers to the Minister of BUMN Regulation No. PER-12/MBU/11/2020. In this determination, the remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors includes salary or honorarium, fixed allowances and facilities, carried out by taking into account the business scale factor, business complexity factor, inflation rate, condition and financial capability of the Company, and other factors, which is relevant.

The structure and components of remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows.

Remunerasi Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Remuneration	Remunerasi Direksi The Board of Directors' Remuneration
Honorarium Honorarium	Gaji Salary
Tunjangan - Tunjangan Transportasi - Tunjangan Hari Raya Keagamaan - Asuransi Purna Jabatan Allowances - Transportation allowance - Religious holiday allowance - Retirement Insurance	Tunjangan - Tunjangan Transportasi - Tunjangan Hari Raya Keagamaan - Asuransi Purna Jabatan Allowances - Transportation allowance - Religious holiday allowance - Retirement Insurance
Fasilitas - Fasilitas Kesehatan - Fasilitas Bantuan Hukum Facility - Medical facility - Legal Aid Facility	Fasilitas - Fasilitas Kendaraan Ringan - Fasilitas Kesehatan - Fasilitas Bantuan Hukum - Fasilitas Komunikasi dan Sarana Teknologi Informasi Facility - Light Vehicle Facilities - Medical facility - Legal Aid Facility - Communication facilities and Information Technology facilities
Tantiem	Tantiem

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The structure and components of remuneration received by the Board of Commissioners and Directors in 2021 are as follows:

Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Directors

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji Salary	Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama Honorarium of the President Commissioner is 45% of the Salary of the President Director Honorarium Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama. Commissioner's Honorarium is 90% of the President Commissioner's Honorarium.	Gaji Direktur Utama: 100% President Director's Salary: 100% Gaji Direktur sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama. The Director's salary is 85% of the President Director's salary.
Tunjangan Allowances	Tunjangan Transportasi Dewan Komisaris sebesar 20% Honorarium Komisaris Utama/Komisaris The Board of Commissioners' Transportation Allowance is 20% of the Honorarium of the President Commissioner/Commissioner Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat dengan premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak (maksimum) 25% dari Honorarium dalam satu tahun. Retirement Insurance is provided during tenure with a premium borne by the Company at most (maximum) 25% of Honorarium in one year.	- Tunjangan Perumahan (termasuk didalamnya Tunjangan Utilities) - Direktur Utama: 100% - Direksi: 85% dari Tunjangan Perumahan Direktur Utama - Housing Allowance (including Utilities Allowance) - President Director: 100% - Directors: 85% of the President Director's Housing Allowance Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat dengan premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak (maksimum) 25% dari Gaji dalam satu tahun. Retirement Insurance is provided during tenure with a premium borne by the Company at most (maximum) 25% of Salary in one year
Fasilitas Kesehatan Medical facility	-	Fasilitas kesehatan Direksi dan keluarga dengan biaya pengobatan sesuai kemampuan Perusahaan. Health facilities for the Directors and their families with medical expenses according to the Company's capabilities.
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	-	- Direktur Utama: 1 (satu) unit kendaraan Sedan Kap 2400 cc, A/T Gasoline - Direktur: kendaraan SUV Kap. 2500 cc A/T Diesel, Kap 2700 cc A/T Gasoline atau Sedan Kap. 2000 cc A/T Gasoline - President Director: 1 (one) unit of 2400 cc Sedan Kap, A/T Gasoline - Director: SUV Kap. 2500 cc A/T Diesel, Kap 2700 cc A/T Gasoline or Sedan Kap. 2000 cc A/T Gasoline

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Directors

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas komunikasi dan sarana teknologi informasi Communication facilities and information technology facilities	Fasilitas komunikasi yang terdiri dari Data dan Voice dibayarkan oleh Perusahaan dengan batasan maksimum: - Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama - Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama Diberikan alat komunikasi/alat kerja satu kali selama masa jabatan berupa: - Notebook + Modem (dan simcard data) - Tablet PC - Handphone Communication facilities consisting of Data and Voice are paid by the Company with a maximum limit of: - President Commissioner is 45% of the President Director - Commissioner is 90% of the President Commissioner Given a communication tool/work tool once during the term of office in the form of: - Notebook + Modem (and data simcard) - Tablet PCs - Mobile phone	Fasilitas komunikasi yang terdiri dari Data dan Voice dibayarkan oleh Perusahaan dengan batasan maksimum: - Direktur Utama 100% - Direktur sebesar 90% dari Direktur Utama Diberikan alat komunikasi/alat kerja satu kali selama masa jabatan berupa: - Notebook + Modem (dan simcard data) - Tablet PC - Handphone Data and Voice are paid by the Company with a maximum limit of: - President Director 100% - Director is 90% of President Director Given a communication tool/work tool once during the term of office in the form of: - Notebook + Modem (and data simcard) - Tablet PCs - Mobile Phone

Tantiem

Ketentuan mengenai pemberian tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, mengacu pada Keputusan RUPS.

Penetapan penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan. Faktor-faktor lain yang relevan termasuk di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Tantiem

Provisions regarding the awarding of tantiem to the Board of Commissioners and Directors of the Company refer to the GMS Decision.

Determination of income in the form of Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives that are variable in nature (*merit rating*) is carried out by considering the Company's performance and financial capabilities, as well as other relevant factors. Other relevant factors include the generally accepted level of income in a similar industry.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Struktur Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Structure of Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Insentif Direktur Utama 100% dari Insentif Direktur Utama President Commissioner's incentive is 45% of the President Director's incentive.	Insentif Komisaris Utama 45% dari insentif Direktur Utama. President Directors' Incentive is 100% of the President Director Incentive
Insentif Anggota Direksi Lain 85% dari Insentif Direktur Utama Incentive for Members of Other Commissioners is 90% of the President Commissioner's incentive	Insentif Anggota Komisaris Lain 90% dari insentif Komisaris Utama Incentive for Other Members of the Board of Directors is 85% of the President Director's Incentive

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Berdasarkan hasil keputusan Pemegang Saham secara sirkuler tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan penghargaan atas kinerja Tahun Buku 2021 dan remunerasi Tahun Buku 2022 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Transparency of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors for 2022

Based on the resolution of the Shareholders circularly dated November 14, 2022 concerning Determination of awards for the performance of the Financial Year 2021 and remuneration for the Financial Year 2022 of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

The remuneration received by the Board of Commissioners and Directors in 2022 can be described as follows:

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2022

Remuneration for the Board of Commissioners in 2022

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Masa Menjabat di Tahun 2022 Term of Office in 2022	Penghasilan per Bulan Income per Month		Jumlah Penghasilan per Bulan Total Income per Month (Rp)	Jumlah Penghasilan per Tahun Total Income per Year (Rp)
		Honorarium Honorarium (Rp)	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance (Rp)		
Amir Hamzah (Komisaris) (Commissioner)	1 tahun penuh	49.834.800	9.966.960	59.801.760	717.621.120
Andi Saiful Haq (Komisaris) (Commissioner)	1 tahun penuh	44.851.320	8.970.264	53.821.584	645.859.008
Khalid Zabidi (Komisaris) (Commissioner)	1 tahun penuh	44.851.320	8.970.264	53.821.584	645.859.008
Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris Utama) (President Commissioner)	1 tahun penuh	44.851.320	8.970.264	53.821.584	645.859.008
Jumlah (Rp) Total					

Remunerasi Direksi Tahun 2022

Board of Directors' Remuneration for 2022

Direksi Board of Directors	Masa Menjabat di Tahun 2022 Term of Office in 2022	Penghasilan per Bulan Income per Month		Jumlah Penghasilan per Bulan Total Income per Month (Rp)	Jumlah Penghasilan per Tahun Total Income per Year (Rp)
		Honorarium Honorarium (Rp)	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance (Rp)		
Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	1 tahun penuh	110.744.000	27.500.000	138.244.000	1.658.928.000
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM merangkap Plt. Direktur Pemasaran) (Finance & HR Director concurrently Acting Marketing Director)	1 tahun penuh	94.132.400	27.500.000	121.632.400	1.459.588.800
Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	01 Ags 2022 s.d 31 Desember 2022	94.132.400	27.500.000	121.632.400	1.459.588.800
Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	09 Mar 2022 s.d 07 Des 2022	94.132.400	27.500.000	121.632.400	1.094.691.600
Hadi Purnomo (Direktur Operasi) (Operations Director)	01 Januari 2022 s.d 02 April 2022	94.132.400	27.500.000	121.632.400	364.897.200
Arsono Kuswardanu (Direktur Pemasaran) (Marketing Director)	01 Januari s.d 28 Feb 2022	94.132.400	27.500.000	121.632.400	232.571.842
Jumlah (Rp) Total					

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

	Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Fasilitas Kesehatan Medical facility	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Tantiem/ Insentif Kinerja Tantiem/ Performance Incentives	Jumlah Remunerasi Tahun 2022 Total Remuneration for 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	49.834.800	1149.504.400	55.928.926	-	503.308.900	420.708.820	2.896.906.966
	44.851.320	1149.504.400	52.091.226	-	593.135.800	633.958.200	3.119.399.954
	44.851.320	1149.504.400	34.818.025	-	254.832.400	86.843.325	2.216.708.478
	44.851.320	1149.504.400	33.365.725	-	226.981.900	39.947.773	2.140.510.126
							10.373.525.524

	Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Fasilitas Kesehatan Medical facility	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Tantiem/ Insentif Kinerja Tantiem/ Performance Incentives	Jumlah Remunerasi Tahun 2022 Total Remuneration for 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	110.744.000	332.232.000	36.700.480	-	1.330.750.900	1.565.329.500	3.667.233.500
	94.132.400	282.397.200	46.355.028	-	764.476.300	444.725.121	2.280.843.521
	-	117.665.500	28.065.821	-	254.136.300	-	1.577.254.300
	94.132.400	211.797.900	119.475.120	-	360.841.600	-	1.321.114.590
	-	70.599.300	0	-	574.568.250	1.387.022.569	1.822.519.069
	70.466.345	47.066.200	18.574.815	-	805.354.900	1.387.022.569	1.737.126.955
							12.406.091.936

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi**Rapat Dewan Komisaris**

Kebijakan mengenai rapat Dewan Komisaris PTK adalah sebagai berikut:

1. Rapat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Rapat Dewan Komisaris yang bersifat rutin/terjadwal terdiri dari:
 - a. Rapat internal Dewan Komisaris, dilaksanakan setiap bulan.
 - b. Rapat gabungan dengan Direksi dilaksanakan sekali dalam satu bulan dengan agenda tetap konsultasi.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, dan/atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;
3. Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis;
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang tertua masa jabatannya;
6. Keputusan rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa. Apabila melalui jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pimpinan rapat, kecuali mengenai diri orang pengambilan keputusan dilakukan dengan pemilihan secara tertutup;
7. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara dan ditambah satu suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakili dengan disertai surat kuasa. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat. Lembar keputusan rapat harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat yang hadir;

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting**Board of Commissioners Meeting**

PTK Board of Commissioners meeting policy is as follows:

1. Meetings are held at least once a month. Board of Commissioners meetings regular/ scheduled consist of:
 - a. Board of Commissioners Internal meetings, held every month.
 - b. Joint meetings with the Directors are held once a month with a fixed agenda of consultations.
2. The Board of Commissioners meetings can be held outside the regular schedule, if deemed necessary by one or more Members of the Board of Commissioners, and/or written requests from one or more Members of the Board of Commissioners;
3. This Board of Commissioners Meeting is an immediate and strategic meeting;
4. Meetings of the Board of Commissioners can be held through teleconferencing media, video conferences, or other electronic facilities that allow all participants of the Board of Commissioners' meeting to see and hear each other directly and participate in meetings;
5. The Board of Commissioners meeting is chaired by President Commissioner. In this case where the President Commissioner is not attending, the meeting will be chaired by the oldest Board of Commissioners members with the longest serving period;
6. The Board of Commissioners' meeting Resolutions shall be determined by collective consensus, if no agreement is reached then the decision will be taken by voting. If the number of agree and not agree votes are equal, the meeting resolutions will be taken the same as the Chairman of the meeting, except in the event where the decision making is taken through closed voting;
7. Each of the Board of Commissioners member is entitled to cast one vote and another additional vote for the Board of Commissioners member who are represented with a power of attorney. A blank vote (abstained) is considered to approve the proposal submitted at the meeting and is responsible for the results of the meeting's decision. The meeting decision sheet must be signed by the meeting Chairman and all attending participants;

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

8. Dewan Komisaris mengakui bentuk rapat tanpa melalui kehadiran fisik, atau disebut rapat sirkuler, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam bentuk rapat sirkuler bukanlah keputusan yang bersifat strategis, bukan merupakan sebuah keputusan atas sebuah tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS, permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas, dan keputusan yang diambil disetujui secara tertulis oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

8. The Board of Commissioners acknowledges a meeting without physical presence, or known as circular meeting, provided the decision taken in the form of a circular meeting is not a strategic decision, it is not a decision on the actions of the Board of Directors that requires the approval of the Board of Commissioners/GMS, the problem has been known before/discussed, and decision staken were agreed in writing by all members of the Board of Commissioners.

Sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, maka pada setiap rapat dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Begitu pula dengan risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir.

As a form of monitoring and evaluation of the resolutions of the Board of Commissioners' meetings, each meeting minutes are signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Commissioners present. Likewise with the minutes of the joint meeting of the Board of Commissioners and Directors, signed by the Chair of the Meeting and all members of the Board of Commissioners and Directors present.

Risalah rapat-rapat tersebut dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris di tempat kedudukan Perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut. Salinan risalah rapat gabungan diberikan juga kepada Direksi.

Minutes of internal and joint meeting is developed and administered by Secretary of the Board of Commissioners at the Company's domicile. Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive a copy of the minutes meeting, regardless members of the Board of Commissioners present or not present in the meeting. The copy of joint minutes meeting is also provided to the Board of Directors.

Di sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 kali. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dan hasil rapat-rapat tersebut.

Throughout 2022 the Board of Commissioners has held 20 meetings. The following shows the frequency and attendance of the Board of Commissioners at meetings and the results of these meetings.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2022
Frequency of Attendance of the Board of Commissioners in its Internal Meetings in 2022

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Amir Hamzah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	20	20	100
Andi Saiful Haq (Komisaris) (Commissioner)	20	17	85
Khalid Zabidi (Komisaris) (Commissioner)	20	20	100
Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris) (Commissioner)	20	17	85
Rata-Rata Average			92,5

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Hasil Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

Results of the 2022 Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1	11 Januari 2022 January 11, 2022	Proses Pengawasan Dekom PTK dan Antisipasi Target RKAP 2022 PTK Board of Commissioners Supervision Process and Anticipation of the 2022 RKAP Target	AH, ASH, KZ, ABL, MIZF, ES, AMG, HM, WH, DVAS, SLWE
2	03 Februari 2022 February 03, 2022	Pembahasan Pembagian Tugas Dekom Discussion on the Division of the Board of Commissioners Duties	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, DVAS, SLWE
3	11 Februari 2022 February 11, 2022	Sharing Session Hasil Kunjungan ke Batam Sharing Session Results of a Visit to Batam	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, WH, DVAS, SLWE
4	15 Februari 2022 February 15, 2022	Pembahasan Rolling Out RJPP PTK 2021-2026 PTK 2021-2026 RJPP Rolling Out Discussion	AH, ASH, KZ, ABL, HM, WH, DVAS, SLWE
5	28 April 2022 April 28, 2022	Pembahasan Draft KPI Direksi PTK PTK Directors' KPI Draft Discussion	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, WH, HZ, DVAS, SLWE
6	27 Mei 2022 May 27, 2022	Pembahasan Draft Revisi KPI Direksi PTK PTK Board of Directors' KPI Revision Draft Discussion	AH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, HZ, DVAS, SLWE
7	30 Mei 2022 May 30, 2022	Diskusi Temuan Hasil Kunjungan Visit Findings Discussion	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, HZ, DVAS, SLWE
8	21 Juni 2022 June 21, 2022	Pembahasan Issue untuk Rapat Koordinasi dengan Dekom PIS Discussion of Issues for Coordination Meetings with the PIS Board of Commissioners	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, WH, HZ, DVAS, SLWE
9	05 Juli 2022 July 05, 2022	Pembahasan Pencapaian Kinerja Revenue Ytd. Mei 2022 Discussion of Ytd Revenue Performance Achievement. May 2022	AH, ASH, KZ, ABL, HM, HZ, DVAS, SLWE
10	15 Juli 2022 July 15, 2022	Diskusi Tanggapan atas Surat CAE Discussion of Responses to CAE Letters	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, WH, HZ, DVAS, SLWE
11	25 Juli 2022 July 25, 2022	Rencana Improvement Berdasarkan Hasil Assessment GCG BPKP Improvement Plan Based on BPKP GCG Assessment Results	AH, KZ, ES, AMG, HM, HZ, DVAS, SLWE
12	09 Agustus 2022 August 09, 2022	Penyeragaman Persepsi Dekom Terkait Usulan Perubahan AD PTK Uniform Perception of the Board of Commissioners Regarding the Proposed Amendments to PTK AD	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, WH, HZ, DVAS, SLWE
13	29 September 2022 September 29, 2022	- Antisipasi Perubahan RJPP - Saran-saran untuk Profit enhancement and recovery 2023 terutama yang menambah kompetensi bisnis. - Investasi Progress dan Antisipasi bila tidak tercapai - Peningkatan Kualitas Pengawasan Dekom terhadap masing-masing Direksi. - Anticipate changes to the RJPP - Suggestions for Profit enhancement and recovery in 2023, especially those that increase business competency. - Investment Progress and Anticipation if not achieved - Improvement of the Board of Commissioners' Supervision Quality to Each Director.	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, WH, HZ, DVAS, SLWE
14	07 Oktober 2022 October 07, 2022	- Pembahasan isu penting PTK, a.l: RJPP 2022-2026, Revenue & Profit Enhancement, Investasi, strategi & Pengembangan Kompetensi Marketing. - Evaluasi Kinerja Dekom - Discussion of PTK important issues, a.l: 2022-2026 RJPP, Revenue & Profit Enhancement, Investment, strategy & Marketing Competency Development. - Board of Commissioners Performance Evaluation	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, HZ, DVAS, SLWE
15	24 Oktober 2022 October 24, 2022	Progress 11 (sebelas) Potensi Program Quick Win di PME Progress of 11 (eleven) Potential Quick Win Program in PME	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, WH, HZ, DVAS, SLWE
16	10 November 2022 November 10, 2022	Penyusunan RKA Dekom 2023 Preparation of the Board of Commissioners 2023 RKA	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, WH, DVAS, SLWE
17	24 November 2022 November 24, 2022	GCG Dekom Board of Commissioners GCG	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, HZ, SLWE.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Hasil Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

Results of the 2022 Board of Commissioners Meeting

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
18	12 Desember 2022 December 12, 2022	- Strategi Pengawasan Mekanisme Koordinasi antara Pusat, Region dan AP/JV - Update isu penting lainnya - Coordination Mechanism Oversight Strategy between Central, Region and AP/JV - Update other important issues	AH, ASH, KZ, ABL, ES, AMG, HM, HZ, WH, DVAS.
19	21 Desember 2022 December 21, 2022	Diskusi Upaya Meningkatkan Peluang Bisnis Baru di Pertamina Group Discussion on Efforts to Increase New Business Opportunities at Pertamina Group	AH, ASH, KZ, ABL, AMG, HM, HZ, WH, DVAS, SLWE
20	28 Desember 2022 December 28, 2022	Eksekusi RKA Dekom 2023 Execution of the Board of Commissioners 2023 RKA	AH, KZ, ES, AMG, HM, HZ, SLWE.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengadakan rapat gabungan sebagai bentuk kerja sama dan koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat gabungan diselenggarakan dalam rangka pembahasan terkait rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 19 kali. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan dan hasil rapat gabungan.

Board of Commissioners and Directors Joint Meeting

The Board of Commissioners and Directors regularly hold joint meetings as a form of cooperation and coordination between them. The joint meeting was held in the context of discussion related to work plans, operations, business opportunities, and strategic issues that require the approval of the Board of Commissioners.

Throughout 2022 the Board of Commissioners and Directors held 19 joint meetings. The following shows the frequency and attendance of their joint meetings and the results.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan Tahun 2022

Frequency of the Board of Commissioners and Directors Attendance at Joint Meetings in 2022

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Amir Hamzah (Komisaris Utama) (Commissioner)	19	19	100
Andi Saiful Haq (Komisaris) (Commissioner)	19	16	84
Khalid Zabidi (Komisaris) (Commissioner)	19	19	100
Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris) (Commissioner)	19	19	100
Direksi Board of Directors			
Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	19	17	89
Slamet Harianto (Direktur Operasi)**** (Operations Director)****	7	7	100

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan Tahun 2022

Frequency of the Board of Commissioners and Directors Attendance at Joint Meetings in 2022

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Plt. Direktur Pemasaran) (Finance & HR Director/Acting Marketing Director)	19	18	95
Imam Bustomi (Direktur Pemasaran)*** (Marketing Director)***	13	13	100
Hadi Purnomo (Direktur Operasi)** (Operations Director)**	8	8	100
Arsono Kuswardanu (Direktur Pemasaran)* (Marketing Director)*	5	5	100
Rata-rata Average			96,8

*) Pada 8 Maret 2022 Arsono Kuswardanu tidak lagi menjabat Direktur Pemasaran.

**) Pada 2 April 2022 Hadi Purnomo tidak lagi menjabat Direktur Operasi.

***) Imam Bustomi menjabat Direktur Pemasaran sejak 8 Maret 2022. Pada 6 Desember 2022 Imam Bustomi tidak lagi menjabat Direktur Pemasaran.

****) Slamet Harianto menjabat Direktur Operasi sejak 27 Juli 2022.

*) On March 8, 2022 Arsono Kuswardanu no longer served as Marketing Director.

**) On April 2, 2022 Hadi Purnomo no longer serve as Operations Director.

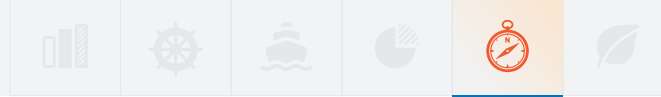
***) Imam Bustomi has served as Marketing Director since March 8, 2022. On December 6, 2022 Imam Bustomi no longer served as Marketing Director.

****) Slamet Harianto has been serving as Operations Director since July 27, 2022.

Hasil Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Results of the 2022 Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1	06 Januari 2022 January 06, 2022	- Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 30 November 2021 sesuai dengan Notulen Rapat No. NR. 169/DEKOM.PTK - Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD November 2021 - Follow-Up Report of the BOD BOC Meeting on November 30, 2021 in accordance with the Minutes of Meeting No. NR. 169/DEKOM.PTK - PTK Operational, Financial and Investment Performance Report for YTD Realization of November 2021	AH, ASH, KZ, ABL, HP, AK, AA.
2	14 Januari 2022 January 14, 2022	- Update Realisasi Strategy Recovery Plan Ytd. Desember 2021. - Organisasi PTK 2.0 - Update Realization Strategy Recovery Plan for YTD of December 2021. - PTK Organization 2.0	AH, ASH, KZ, ABL, NP, HP, AK, AA.
3	21 Januari 2022 January 21, 2022	Pemaparan Rencana Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022 Presentation of the 2022 Board of Commissioners Supervision Plan	AH, ASH, KZ, ABL, NP, HP, AK, AA
4	02 Februari 2022 February 02, 2022	- Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 06 Januari 2022 sesuai dengan Notulen Rapat No. NR. 003/DEKOM.PTK - Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD Desember 2021 - Follow-Up Report of the BOD BOC Meeting on January 6, 2022 in accordance with the Minutes of Meeting No. NR. 003/DEKOM.PTK - PTK Operational, Financial and Investment Performance Report for YTD Realization of December 2021	AH, ASH, KZ, ABL, HP, AK, AA
5	10 Maret 2022 March 10, 2022	- Inisiatif Profit Enhancement & Cost Efficiency 2022 - Paparan Hasil Kunjungan Dekom ke Batam 2022 Profit Enhancement & Cost Efficiency Initiative - Exposure to the Results of the Board of Commissioners' Visit to Batam	AH, ASH, KZ, ABL, NP, HP, AK, AA



Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Hasil Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Results of the 2022 Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
6	11 Maret 2022 March 11, 2022	- Tindak lanjut BOD-BOC Meeting 02 Februari 2022 sesuai dengan Notulen Rapat No. NR-023/DEKOM.PTK/2022 - Kinerja Ytd. Januari 2022 - Tindak lanjut Komentar Umum Kinerja Januari 2022 - Masukan Dewan Komisaris Terkait RJPP PTK - Follow up of BOD-BOC Meeting February 02, 2022 in accordance with Minutes of Meeting No. NR-023/DEKOM.PTK/2022. - YTD Performance of January 2022 - Follow up on January 2022 Performance General Comments - Input from the Board of Commissioners regarding PTK RJPP	AH, ASH, KZ, ABL, NP, HP, AA
7	25 Maret 2022 March 25, 2022	- Digitalisasi PTK Tahun 2022 - Masukan Dewan Komisaris Terkait RJPP PTK - Digitalization of PTK in 2022 - Input from the Board of Commissioners regarding PTK RJPP	AH, ASH, KZ, ABL, NP, HP, AA, IB
8	06 April 2022 April 06, 2022	Kontribusi Komisaris Anak Perusahaan dan Tata Cara Koordinasi Dewan Komisaris – Direksi PTK Group Contribution of Subsidiary Commissioners and Coordination Procedures for the Board of Commissioners – Directors of PTK Group	AH, ASH, KZ, ABL, NP, HP, AA, IB
9	07 April 2023 April 07, 2023	- Tindak lanjut Rapat BOD-BOC tanggal 11 Maret 2022 sesuai dengan Notulen Rapat No. NR-041/DEKOM.PTK/2022 - Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD Februari 2022 berikut tindak lanjut atas tanggapan Dekom - Follow up on the BOD-BOC Meeting on March 11, 2022 in accordance with the Minutes of Meeting No. NR-041/DEKOM.PTK/2022 - PTK Operational, Financial and Investment Performance Report for YTD Realization of February 2022 including follow-up to the Board of Commissioners' responses	AH, ASH, KZ, ABL, NP, AA, IB
10	27 Mei 2022 May 27, 2022	- Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 07 April 2022 sesuai dengan Notulen Rapat No. NR-057/DEKOM.PTK/2022 - Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD Maret 2022, termasuk tindak lanjut atas tanggapan Dekom sebagaimana Surat 019/SET/DEKOM.PTK/2022 - Follow-Up Report of the BOD BOC Meeting dated April 07, 2022 in accordance with the Minutes of Meeting No. NR-057/DEKOM.PTK/2022 - PTK Operational, Financial and Investment Performance Report for YTD Realization of March 2022, including follow-up on the Board of Commissioners' response as referred to in Letter 019/SET/DEKOM.PTK/2022	AH, KZ, ABL, NP, AA, IB
11	10 Juni 2022 June 10, 2022	- Kebijakan pelaksanaan ABI di Perusahaan - Usulan upaya perbaikan kebijakan implementasi ABI - Upaya recovery ABI di tahun 2022 - ABI implementation policy in the Company - Proposed efforts to improve ABI implementation policies - ABI recovery efforts in 2022	AH, ASH, KZ, ABL, NP, AA, IB
12	14 Juli 2022 July 14, 2022	- Laporan Tindak lanjut Rapat BOD-BOC tgl. 27 Mei 2022 - Pemaparan Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK Realisasi Ytd April dan Mei 2022, termasuk jawaban atas tanggapan Dekom terhadap laporan dimaksud - BOD-BOC Meeting Follow-up Report dated May 27, 2022 - Presentation of PTK Operational, Financial and Investment Performance Reports for YTD Realization of April and May 2022, including answers to the Board of Commissioners' responses to the said report	AH, ASH, KZ, ABL, NP, AA, IB
13	16 Agustus 2022 August 16, 2022	- Laporan Tindak lanjut Rapat BOD-BOC tgl. 14 Juli 2022 sesuai dengan Notulen Rapat No. NR-108/DEKOM.PTK/2022 - Pemaparan Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK Realisasi Ytd Juni 2022, termasuk jawaban atas tanggapan Dekom terhadap laporan dimaksud - Rencana HSSE Campaign Program 2022 - Follow-up Report of the BOD-BOC Meeting dated July 14, 2022 in accordance with the Minutes of Meeting No. NR-108/DEKOM.PTK/2022. - Presentation of PTK Operational, Financial and Investment Performance Report for YTD Realization of June 2022, including answers to the Board of Commissioners' response to the said report. - HSSE Campaign Program Plan 2022	AH, ASH, KZ, ABL, NP, AA, IB, SH

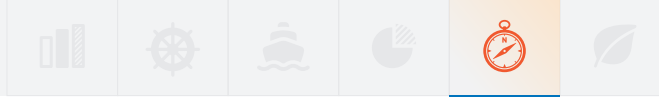
Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Hasil Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Results of the 2022 Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
14	24 Agustus 2022 August 24, 2022	Pemaparan program strategis <i>marketing</i> berikut rencana eksekusinya untuk mencapai target RKAP 2022 Presentation of the strategic marketing program and its execution plan to achieve the 2022 RKAP target	AH, KZ, ABL, NP, AA, IB, SH.
15	16 September 2022 September 16, 2022	- RJPP 2022 – 2026 - Implementasi Organisasi PTK 2.0 - Realisasi & Prognosa <i>Cost Optimization & Profit Enhancement</i> 2022 – 2026 RJPP - Implementation of PTK Organization 2.0 - Realization & Prognosis <i>Cost Optimization & Profit Enhancement</i>	AH, ASH, KZ, ABL, NP, AA, IB, SH.
16	23 September 2022 September 23, 2022	- Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 16 Agustus 2022 sesuai dengan Notulen Rapat No. NR-114/DEKOM.PTK/2022 - Pemaparan Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD Juli 2022, berikut tanggapan pertanyaan Dekom atas laporan tersebut - Follow-up Report of the BOD BOC Meeting on August 16, 2022 in accordance with the Minutes of Meeting No. NR-114/DEKOM.PTK/2022 - Presentation of the PTK Operational, Financial and Investment Performance Report for YTD realization of July 2022, along with the response to questions from the Board of Commissioners on the report.	AH, ASH, KZ, ABL, NP, AA, IB, SH.
17	06 Oktober 2022 October 06, 2022	- Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 23 September 2022 sesuai dengan Notulen Rapat No. NR-138/DEKOM.PTK/2022 - Pemaparan Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD Agustus 2022, berikut tanggapan pertanyaan Dekom atas laporan tersebut - Persiapan Pengalihan Aset PTK ke Anak Perusahaan (<i>Spin Off</i>) - Follow-Up Report of the BOD BOC Meeting on September 23, 2022 in accordance with the Minutes of Meeting No. NR-138/DEKOM.PTK/2022 - Presentation of the PTK Operational, Financial and Investment Performance Report for YTD realization of August 2022, along with responses to questions from the Board of Commissioners on the report - Preparation for the Transfer of PTK Assets to a Subsidiary (<i>Spin Off</i>)	AH, KZ, ABL, NP, AA, IB, SH.
18	17 November 2022 November 17, 2022	- Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 06 Oktober 2022 sesuai dengan Notulen Rapat No. NR-143/DEKOM.PTK/2022 - Pemaparan Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD September 2022, berikut tanggapan pertanyaan Dekom atas laporan tersebut - Revisi ABI RKAP 2022 - Follow-Up Report of the BOD BOC Meeting on October 06, 2022 in accordance with the Minutes of Meeting No. NR-143/DEKOM.PTK/2022 - Presentation of the PTK Operational, Financial and Investment Performance Report for YTD realization of September 2022, along with responses to questions from the Board of Commissioners on the report - Revision of ABI RKAP 2022	AH, ASH, KZ, ABL, NP, AA, IB, SH.
19	1-2 Desember 2022 December 1-2, 2022	- Pembahasan RKAP Tahun 2023 <i>People Development</i> - Kebijakan Layanan Pelanggan <i>Top Risk</i> PTK Tahun 2023 - Discussion of the 2023 RKAP - People Development - Customer Service Policy - PTK Top Risks in 2023	AH, ASH, KZ, ABL, NP, AA, IB, SH.



Rapat Direksi

Rapat Direksi dilaksanakan untuk membahas permasalahan operasional atau untuk mengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan Perusahaan. Berdasarkan *Board Manual* Perusahaan, Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri seluruh anggota Direksi secara fisik.

Ketentuan pelaksanaan Rapat Direksi berdasarkan *Board Manual*:

1. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila:
 - a. Dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
 - c. Pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan;
4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi;
6. Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat;
7. Rapat Direksi dapat diadakan dengan cara konferensi antara para Anggota Direksi yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap Anggota Direksi dapat saling mendengar/berkomunikasi dan berpartisipasi dalam Rapat;
8. Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi rapat dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.

Disepanjang tahun 2022 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 19 kali. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Direksi dalam rapat dan hasil rapat-rapat tersebut.

Board of Directors Meeting

The Board of Directors meeting is conducted to exchange views on operational issues or to make decisions on the Company's policies. According to the Company's Board Manual, the Board of Directors meeting should be held periodically and attended by all members of the Board of Directors physically.

Provisions on the implementation of the Board of Directors meeting are based on the Board Manual:

1. Board of Directors meetings are held regularly at least once in 1 (one) month.
2. Directors' meetings can be held at any time if:
 - a. Considered necessary by one or more members of the Board of Directors.
 - b. By written request of one or more members of the Board of Commissioners.
 - c. Shareholders who have the largest number of shares by mentioning the matters that will be discussed.
3. Summons to the Board of Directors meetings are conducted in writing by members of the Board of Directors who are entitled to represent the Company and submitted within a period of no later than 3 (three) days before the meeting is held.
4. Meeting summons must include the event, date, time and place of the meeting.
5. Directors' meetings are held at the Company's place of domicile or at the place of the Company's business activities or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.
6. Prior meeting summons are not required if all members of the Board of Directors are present at the meeting.
7. Board of Directors meetings can be held by conference between Directors who are in different places, through conference calls, video conferences or other communication equipment that enable each member of the Board of Directors to listen/communicate with each other and participate in the Meeting.
8. Meeting materials are prepared by the Corporate Secretary. Meeting material can be delivered together with the invitation.

Throughout 2022 the Board of Directors has held meetings 19 times. The following shows the frequency and attendance of the Directors at meetings and the results of their meetings.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Frekuensi Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi Tahun 2022

Frequency of the Board of Directors Attendance at its 2022 Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	19	19	100%
Slamet Harianto (Direktur Operasi)**** (Operations Director)	9	9	100%
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Plt. Direktur Pemasaran) (Finance & HR Director/Acting Marketing Director)	19	16	84%
Imam Bustomi (Direktur Pemasaran)*** (Marketing Director)***	17	15	88%
Hadi Purnomo (Direktur Operasi)** (Operations Director)**	3	3	100%
Arsono Kuswardanu (Direktur Pemasaran)* (Marketing Director)*	1	1	100%
Rata-rata Average			95%

*) Pada 8 Maret 2022 Arsono Kuswardanu tidak lagi menjabat Direktur Pemasaran.

**) Pada 2 April 2022 Hadi Purnomo tidak lagi menjabat Direktur Operasi.

***) Imam Bustomi menjabat Direktur Pemasaran sejak 8 Maret 2022. Pada 6 Desember 2022 Imam Bustomi tidak lagi menjabat Direktur Pemasaran.

****) Slamet Harianto menjabat Direktur Operasi sejak 27 Juli 2022.

*) On March 8, 2022 Arsono Kuswardanu no longer served as Marketing Director.

**) On April 2, 2022 Hadi Purnomo no longer served as Operations Director.

***) Imam Bustomi has served as Marketing Director since March 8, 2022. On December 6, 2022 Imam Bustomi no longer served as Marketing Director.

****) Slamet Harianto has been serving as Operations Director since July 27, 2022.

Rapat Direksi Tahun 2022

Board of Directors' Meeting 2022

No.	Tanggal Date	Rapat Agenda	Peserta Participant
1	31 Januari 2022 January 31, 2022	- Safety Performance YTD Desember 2021 - Kinerja YTD Desember 2021 - Tindak Lanjut NR BOD BOC Meeting tanggal 6 Januari 2022 - Safety Performance YTD December 2021 - Performance YTD December 2021 - Follow up on NR BOD BOC Meeting on January 06, 2022	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Arsono Kuswardanu (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Hadi Purnomo (Direktur Operasi/Operations Director) - Chief Audit Executive - VP HSSE - VP SPBD - VP Fleet & Ship Management - VP Marketing - VP Marine Business Unit - VP Finance - GM Marine Business & Operations Region I - GM Marine Business & Operations Region II - GM Marine Business & Operations Region III - Manager Fleet & Ship Management - Manager Legal Counsel - VP Legal & Relation

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Rapat Direksi Tahun 2022

Board of Directors' Meeting 2022

No.	Tanggal Date	Rapat Agenda	Peserta Participant
2	9 Maret 2022 March 9, 2022	- Tindak lanjut notulen rapat BOD BOC tanggal 02 Februari 2022. - Kinerja YTD Januari 2022. - Tindak Lanjut Komentar Umum Kinerja PTK Januari 2022 - Follow up on BOD BOC minutes of meeting on February 2, 2022. - Performance YTD January 2022. - Follow-up on General Comments on PTK Performance January 2022	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Hadi Purnomo (Direktur Operasi/Operations Director) - VP HSSE - VP SPBD - Chief Audit Executive - VP Marketing - VP Marine Business Unit - VP Marine Regulatory Compliance & Operation Support - VP Finance - VP Human Capital - VP Corporate Business Support - VP Fleet & Ship Management - GM Marine Business & Operation Region I - GM Marine Business & Operation Region II - GM Marine Business & Operation Region III - GM Peteka Shorebase Tanjung Batu - Manager Marine & Fleet Project Management - Manager Legal Counsel - VP Legal & Relation
3	22 Maret 2022 March 22, 2022	- Klasifikasi Jenis Perikatan - Kebijakan untuk Pekerjaan Retroaktif - ICON Versi 2.0 - Classification of Types of Engagement - Policy for Retroactive Work - ICON Version 2.0	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Hadi Purnomo (Direktur Operasi/Operations Director) - VP L&R - VP CBS - Mgr IT - Mgr Legal - VP Legal & Relation
4	5 April 2022 April 5, 2022	- Tindak lanjut notulen rapat BOD BOC tanggal 11 Maret 2022. - Kinerja YTD Februari 2022. - Tindak Lanjut Komentar Umum Kinerja YTD Februari 2022. - Follow up on BOD BOC minutes of meeting on March 11, 2022. - Performance YTD February 2022. - Follow-up on General Comments of Performance YTD February 2022.	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Plt Direktur Operasi (Acting Operations Director) - VP HSSE - VP SPBD - Chief Audit Executive - VP Marketing - VP Marine Business Unit - VP Marine Regulatory Compliance & Operation Support - VP Finance - VP Human Capital - VP Corporate Business Support - VP Fleet & Ship Management - GM Marine Business & Operation Region I - GM Marine Business & Operation Region II - GM Marine Business & Operation Region III - GM Peteka Shorebase Tanjung Batu - Manager Marine & Fleet Project Management - VP Legal & Relation
5	25 Mei 2022 May 25, 2022	- BOD Weekly Meeting – TOP Issues Direktorat dan Fungsi - BOD Weekly Meeting – TOP Issues of Directorates and Functions	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - VP L&R - VP HC - VP HSSE - Pjs VP Finance - VP Marine Eng - VP Fleet - Pjs VP CBS - MFPM - IT Legal

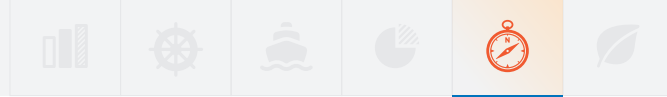
Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Rapat Direksi Tahun 2022

Board of Directors' Meeting 2022

No.	Tanggal Date	Rapat Agenda	Peserta Participant
6	25 Mei 2022 May 25, 2022	- Tindak Lanjut BOD BOC Meeting tanggal 7 April 2022 - Kinerja YTD Maret 2022 - Tindak Lanjut Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen YTD Maret 2022 - Follow up on BOD BOC Meeting on April 07, 2022 - Performance YTD March 2022 - Follow up on the Board of Commissioners' Responses to the Management Report YTD March 2022.	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Plt Direktur Operasi (Acting Operations Director) - VP HSSE - VP Strategic Planning & Business Develop - Chief Audit Executive - VP Legal & Relation - PT PPL - PT PMSol - PT PME
7	31 May 2022 May 31, 2022	BOD Weekly Meeting – TOP Issues Direktorat dan Fungsi BOD Weekly Meeting – TOP Issues of Directorates and Functions	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Plt Direktur Operasi (Acting Operations Director) - VP L&R - VP HSSE - VP SPBD - VP MBU - VP Marine Eng - VP Fleet - VP Marketing - MFPM - Legal & Relation
8	7 Juni 2022 June 7, 2022	Rencana Investasi PTK PTK Investment Plan	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Plt Direktur Operasi (Acting Operations Director) - VP HSSE - VP Strategic Planning & Business Develop - Chief Audit Executive - VP Legal & Relation
9	9 Juni 2022 June 9, 2022	BOD Weekly Meeting – TOP Issues Direktorat dan Fungsi BOD Weekly Meeting – TOP Issues of Directorates and Functions	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Plt Direktur Operasi (Acting Operations Director) - VP L&R - VP HSSE - VP SPBD - VP Marine Eng - VP Fleet, Legal & Relation
10	13 Juli 2022 July 13, 2022	- Kinerja YTD Mei 2022 - Tindak Lanjut Komentar Umum Kinerja YTD April Mei 2022 - Performance YTD May 2022. - Follow up on General Comments of Performance YTD April May 2022	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Plt Direktur Operasi (Acting Operations Director) - VP HSSE - VP SPBD - Chief Audit Executive - VP Marketing - VP Marine Business Unit - VP Marine Regulatory Compliance & Operation Support - VP Finance - VP Human Capital - VP Corporate Business Support - VP Fleet & Ship Management - GM Marine Business & Operation Region I - GM Marine Business & Operation Region II - GM Marine Business & Operation Region III - GM Peteka Shorebase Tanjung Batu - PT PPL - PT PMSol - PT PME



Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Rapat Direksi Tahun 2022

Board of Directors' Meeting 2022

No.	Tanggal Date	Rapat Agenda	Peserta Participant
11	15 Agustus 2022 August 15, 2022	- Dry Run BOD BOC Meeting - Kinerja YTD Juni 2022 - Tindak Lanjut BOD BOC Meeting tanggal 14 Juli 2022 - Tindak Lanjut Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen YTD Juni 2022 - Program Kampanye HSSE - Dry Run BOD BOC Meeting - Performance YTD June 2022 - Follow up on BOD BOC Meeting on July 14, 2022 - Follow up on the Board of Commissioners' Responses to the Management Report YTD June 2022 - HSSE Campaign Program	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Slamet Harianto (Direktur Operasi/Operations Director) - VP HSSE - VP SPBD - Chief Audit Executive - VP Marketing - VP Marine Business Unit - VP Marine Regulatory Compliance & Operation Support - VP Finance - VP Human Capital - VP Corporate Business Support - VP Fleet & Ship Management - GM Marine Business & Operation Region I - GM Marine Business & Operation Region II - GM Marine Business & Operation Region III - GM Peteka Shorebase Tanjung Batu - PT PPL - VP Legal & Relation - Pjs Manager Marine Engineering & Fleet Proje
12	15 Agustus 2022 August 15, 2022	- Dry Run BOD BOC Meeting - Kinerja YTD Juni 2022 - Tindak Lanjut BOD BOC Meeting tanggal 14 Juli 2022 - Tindak Lanjut Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen YTD Juni 2022 - Program Kampanye HSSE - Dry Run BOD BOC Meeting - Performance YTD June 2022 - Follow up on BOD BOC Meeting on July 14, 2022 - Follow up on the Board of Commissioners' Responses to the Management Report YTD June 2022 - HSSE Campaign Program	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - PTH Direktur Pemasaran (Acting Marketing Director) - Slamet Harianto (Direktur Operasi/Operations Director) - VP HSSE - VP SPBD - Chief Audit Executive - VP Marketing - VP Marine Business Unit - VP Marine Regulatory Compliance & Operation Support - VP Finance - VP Human Capital - VP Corporate Business Support - VP Fleet & Ship Management - GM Marine Business & Operation Region I - GM Marine Business & Operation Region II - GM Marine Business & Operation Region III - GM Peteka Shorebase Tanjung Batu - PT PPL - VP Legal & Relation - Pjs Manager Marine Engineering & Fleet Proje
13	15 Agustus 2022 August 15, 2022	- Pembaruan dan rolling out RJPP 2022-2026, termasuk perubahan bisnis di PTK dan AP - Implementasi Organisasi PTK 2.0 - Realisasi dan prognosa Cost Optimization & Profit Enhancement, termasuk prognosa pencapaian profit di akhir tahun 2022 - Pembahasan issue penting lainnya - Updating and rolling out RJPP 2022-2026, including business changes in PTK and AP - Implementation of PTK Organization 2.0 - Cost Optimization & Profit Enhancement realization and prognosis, including profit achievement prediction at the end of 2022 - Discussion on other important issues	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - PTH Direktur Pemasaran (Acting Marketing Director) - Slamet Harianto (Direktur Operasi/Operations Director) - VP HSSE - VP SPBD - VP Finance - VP Marketing - VP Fleet & Ship Management - Pjs VP MBU - VP Legal & Relation - Relation

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Rapat Direksi Tahun 2022

Board of Directors' Meeting 2022

No.	Tanggal Date	Rapat Agenda	Peserta Participant
14	21 September 2022 September 21, 2022	- Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 16 Agustus 2022 - Pemaparan Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD Juli 2022, berikut tanggapan pertanyaan Dewan Komisaris atas laporan tersebut. - Report on the Follow-up of the BOD BOC Meeting on August 16, 2022 - Presentation on PTK Operational, Financial and Investment Performance Report for the realization YTD July 2022, along with the responses to questions from the Board of Commissioners on the report.	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Slamet Harianto (Direktur Operasi/Operations Director) - VP HSSE - VP SPBD - Chief Audit Executive - VP Marketing - VP Marine Business Unit - VP Marine Regulatory Compliance & Operation Support - VP Finance - VP Human Capital - VP Corporate Business Support - VP Fleet & Ship Management - GM Marine Business & Operation Region I - GM Marine Business & Operation Region II - GM Marine Business & Operation Region III - GM Peteka Shorebase Tanjung Batu - PT PPL - PT PMSol - PT PME - PT TYM - VP Legal & Relation
15	22 September 2022 September 22, 2022	BOD Weekly Meeting – TOP Issues Direktorat dan Fungsi BOD Weekly Meeting – TOP Issues of Directorates and Functions	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Slamet Harianto (Direktur Operasi/Operations Director) - VP HSSE - VP SPBD - VP MBU - MFPM
16	3 Oktober 2022 October 3, 2022	BOD Weekly Meeting	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Slamet Harianto (Direktur Operasi/Operations Director) - L&R - VP HSSE - VP SPBD
17	10 Oktober 2022 October 10, 2022	- Dry Run materi pertemuan dengan CEO PIS - Update issue Lahan Kabil Batam - Dry Run meeting material with the CEO of PIS - Update the issue of Kabil Batam Land	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Slamet Harianto (Direktur Operasi/Operations Director) - VP HSSE - VP HC - Legal & Relation - SPBD
18	20 Oktober 2022 October 20, 2022	BOD Weekly Meeting	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Imam Bustomi (Direktur Pemasaran/Marketing Director) - Slamet Harianto (Direktur Operasi/Operations Director) - VP HSSE - VP HC - VP FINANCE - Legal & Relation - SPBD
19	22 Desember 2022 December 22, 2022	BOD Weekly Meeting	- Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama/President Director) - Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/ Plt Direktur Pemasaran/ Finance & HR Director/Acting Marketing Director) - Slamet Harianto (Direktur Operasi/Operations Director) - Legal & Relation - VP HSSE - VP SPBD

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi, antara lain pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya.

Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris dan Direksi PTK telah mengikuti pelatihan, seminar ataupun *workshop*, seperti yang tertera di bawah ini.

Board of Commissioners and Directors Competency Development

The Board of Commissioners and Directors always improve their knowledge and competence through competency development programs, including training, seminars and other activities.

Throughout 2022, PTK Board of Commissioners and Directors have participated in training, seminars or workshops, as listed below.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Board of Commissioners and Directors Competency Training and Development in 2022

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Amir Hamzah (Komisaris Utama) (President Commissioner)			
Pelatihan Training	<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "The Power of Corporate Culture in Driving Corporate Performance"</i>	18 Maret 2022 March 18, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Pelatihan Training	<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Investment Strategies and Portfolio Management"</i>	28 Oktober 2022 October 28, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Andi Saiful Haq (Komisaris) (Commissioner)			
Pelatihan Training	<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Merger, Acquisition & Strategic Alliances"</i>	31 Maret 2022 March 31, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Khalid Zabidi (Komisaris) (Commissioner)			
Pelatihan Training	<i>Directorship Program "High Performance Boards"</i>	22-25 Maret 2022 March 22-25, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Pelatihan Training	<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Business Growth Through Merger, Acquisition & Strategic Alliances"</i>	10 Oktober 2022 October 10, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris) (Commissioner)			
Pelatihan Training	<i>Directorship Program "High Performance Boards"</i>	22-25 Maret 2022 March 22-25, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Pelatihan Training	<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Business Growth Through Merger, Acquisition & Strategic Alliances"</i>	10 Oktober 2022 October 10, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Pelatihan Training	<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Investment Strategies and Portfolio Management"</i>	28 Oktober 2022 October 28, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)			
Forum Sharing	<i>Sharing & Synergy PTK - Pelecehan Seksual di Tempat Kerja PTK Sharing & Synergy - Sexual Harassment at the Workplace</i>	25 Agustus 2022 August 25, 2022	PT Pertamina Trans Kontinental
Forum Sharing	<i>Sharing & Synergy PTK - Komitmen Pimpinan terhadap Safety PTK Sharing & Synergy - Leadership Commitment to Safety</i>	16 September 2022 September 16, 2022	PT Pertamina Trans Kontinental
Pelatihan Training	<i>Executive Education - Board Ready "High Performance Boards"</i>	16 September 2022 September 16, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Finance & HR Director)			
Pelatihan Training	<i>Executive Briefing & Upskilling Enterprise Risk Management 2022</i>	12 Januari 2022 January 12, 2022	PT Pertamina (Persero)

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Board of Commissioners and Directors Competency Training and Development in 2022

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Pelatihan Training	Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Settlement of Business Disputes Through Arbitration	16 Februari 2022 February 16, 2022	PT Pertamina Trans Kontinental
Forum Sharing	Sharing & Synergy PTK - Implementasi Buffer Tugboat di PTK untuk Memastikan Keandalan Operasi Tugboat pada Kegiatan Sandar Lepas Kapal di Pelabuhan PTK Sharing & Synergy - Implementation of Tugboat Buffers in PTK to Ensure the Reliability of Tugboat Operations in Ship Docking Activities at Ports	17 Februari 2022 February 17, 2022	PT Pertamina Trans Kontinental
Forum Sharing	Sharing & Synergy PTK - Komitmen Pimpinan terhadap Safety PTK Sharing & Synergy - Leadership Commitment to Safety	16 September 2022 September 16, 2022	PT Pertamina Trans Kontinental
Pelatihan Training	Executive Education - Board Ready "High Performance Boards"	24-25 November 2022 November 24-25, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)			
Webinar	Meningkatkan Derajat Kesehatan Pekerja dengan Program Stay Fit di PT Pertamina Geothermal Energy Improving Workers' Health Degrees with the Stay Fit Program at PT Pertamina Geothermal Energy	13 April 2022 April 13, 2022	TRACO Mobile Learning
Pelatihan Training	Respectful Workplace (Mobile Learning)	31 Mei 2022 May 31, 2022	PT Pertamina (Persero)
Webinar	Boost Your Career to be an Emerging Leader	18 Juli 2022 July 18, 2022	PT Pertamina (Persero)
Pelatihan Training	Executive Education - Board Ready "High Performance Boards"	24-25 November 2022 November 24-25, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Imam Bustomi (Direktur Pemasaran) (Operations Director) Periode tgl Februari s.d tgl November 2022 Periode 8 Maret s.d 6 Desember 2022			
Forum Sharing	Sharing & Synergy PTK - Komitmen Pimpinan terhadap Safety PTK Sharing & Synergy - Leadership Commitment to Safety	16 September 2022 September 16, 2022	PT Pertamina Trans Kontinental
Pelatihan Training	Fundamental Behaviour Based Safety (BBS)	30 Oktober 2022 October 30, 2022	TRACO Mobile Learning
Pelatihan Training	AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)	30 Oktober 2022 October 30, 2022	TRACO Mobile Learning
Pelatihan Training	Executive Education - Board Ready "High Performance Boards"	24-25 November 2022 November 24-25, 2022	PT Pertamina Training & Consulting

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan tanggung jawabnya secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak manapun lainnya. Hubungan afiliasi yang timbul antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Affiliation Disclosure of the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders

The Board of Commissioners and Directors conduct their responsibilities independently and receive no intervention from shareholders or any other party. Affiliation arises between the Board of Directors, Board of Commissioners and Major Shareholders, are presented in the table below.

Hubungan Afiliasi Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Affiliation of the Board of Directors with the Board of Commissioners and Shareholders

Nama Name	Hubungan Afiliasi dengan Affiliation with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Amir Hamzah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	x	x	x
Andi Saiful Haq (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x
Khalid Zabidi (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x
Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris) (Commissioner)	x	x	x
Direksi Board of Directors			
Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	x	x	x
Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	x	x	x
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Pt. Direktur Pemasaran) (Finance & HR Director/Acting Marketing Director)	x	x	x

v: Ya | x = Tidak
v: Yes | x = No

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Concurrent Positions Disclosure of the Board Of Commissioners And Directors

The Board of Commissioners and Directors have concurrent positions in other companies as described in the following table.

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	Jabatan di Perusahaan Lain Positions in Other Companies	Jabatan Lainnya Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Amir Hamzah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	-	-
Andi Saiful Haq (Komisaris) (Commissioner)	- Komisaris Institute for Transformation Studies (INTRANS) - Staf Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional - Commissioner of the Institute for Transformation Studies (INTRANS) - Staff of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/ Head of the National Defense Agency	-
Khalid Zabidi (Komisaris) (Commissioner)	- Komisaris PT Sejabat (2021-sekarang) - Commissioner of PT Sejabat (2021-present)	-
Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris) (Commissioner)	- Komisaris PT Glory Kasih Indonesia (2009-sekarang) - Komisaris CV Eclat Prima Cemerlang (2005-sekarang) - Komisaris Oasis Centre Arena (2018-sekarang) - Komisaris CV Oca Fortable (2019-sekarang). - Commissioner of PT Glory Kasih Indonesia (2009-present) - Commissioner of CV Eclat Prima Cemerlang (2005-present) - Commissioner of Oasis Centre Arena (2018-present) - Commissioner of CV Oca Fortable (2019-present).	-
Direksi Board of Directors		
Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	-	-
Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)	-	-
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Pt. Direktur Pemasaran) (Finance & HR Director/Acting Marketing Director)	-	-

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan tidak melakukan penawaran umum saham dan tidak memiliki kebijakan terkait program kepemilikan saham bagi manajemen, dengan demikian tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

Share Ownership Disclosure of the Board Of Commissioners and Directors

The Company conducts no public offering of shares and has no policy related to the share ownership program for management, thus there are no members of the Board of Commissioners and Directors who own the Company's shares.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	Saham PTK PTK Shares	Saham Perusahaan Lain (>50%) Other Companies' Shares (>50%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Amir Hamzah (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Nihil	Nihil
Andi Saiful Haq (Komisaris) (Commissioner)		PT Intrans 30%
Khalid Zabidi (Komisaris) (Commissioner)		PT Sejabat 20% PT Tamaca 49%
Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris) (Commissioner)		CV Eclat Prima Cemerlang Jakarta 100% CV Eclat Bali Cemerlang 100% CV Oasis Centre Arena Jakarta 10% CV OCA Portable Palembang 10% CV Citra Gemilang Laundry Jakarta 50% PT Tiga Kawa Mitra Tangerang 20% PT Glory Kasih Indonesia Jakarta 70% PT Alam Kawa Mitra Tangerang 15%
Direksi Board of Directors		
Nepos MT Pakpahan (Direktur Utama) (President Director)	Nihil	Nihil
Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Operations Director)		
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM/Plt. Direktur Pemasaran) (Finance & HR Director / Acting Marketing Director)		

Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan
Statement of No-Conflict of Interest

DEWAN KOMISARIS

PERTAMINA
TRANS KONTINENTAL

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN**
No. SP-014/DEKOM.PTK/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDI SAIFUL HAQ
NIK : 73.7109.120575.0015
Tempat/Tanggal Lahir : Sopping, 12 Mei 1975
Alamat : Apartemen Taman Rasuna Tower 10 Unit 17B
Wisma Palm Rb. 001/001 Kel. Menteng Atas Kac. Setia Budi
Jakarta Selatan
Jabatan : Komisaris
PT Pertamina Trans Kontinental

Dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa saya tidak mempunyai benturan kepentingan terhadap PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") yang membuat saya tidak patut untuk melakukan tindakan berikut ini:

1. Melaksanakan jasa apapun atau memiliki peran apapun dalam perusahaan lain atau usaha pesaing yang sedang atau akan melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
2. Memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau organisasi manapun yang saat ini sedang melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
3. Memiliki anggota keluarga atau teman yang memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau organisasi yang saat ini melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/fasilitas PTK untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan;
5. Mewakili PTK dalam transaksi dengan perusahaan lain dimana saya atau anggota keluarga saya atau teman saya memiliki kepentingan;
6. Menerima hadiah uang atau hiburan dari pemasok atau mitra usaha, atau dari agen manapun, atau bertindak sebagai, atau mewakili pemasok atau mitra usaha dalam transaksinya dengan PTK, selain daripada yang diuraikan dalam kebijakan PTK mengenai hadiah dan hiburan;
7. Menggunakan informasi rahasia dan data bisnis PTK untuk kepentingan pribadi atau dengan cara yang merugikan kepentingan PTK;
8. Mengungkapkan kepada individu atau organisasi atau pihak manapun di luar PTK setiap informasi, program, data keuangan, formula, proses, atau rahasia milik PTK dalam memenuhi tanggung jawab saya terhadap PTK;
9. Melaksanakan setiap tindakan lainnya, yang tidak disebut secara spesifik di atas ini yang dianggap merugikan kepentingan PTK.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 12 Januari 2023
PT Pertamina Trans Kontinental


(ANDI SAIFUL HAQ)
Komisaris

PT Pertamina Trans Kontinental
R. Sunda Baru No. 38
Sukarno, 10130
Telp: +62 21 510 0000 F: +62 21 510 0002
www.ptk-indonesia.com

Andi Saiful Haq

DEWAN KOMISARIS

PERTAMINA
TRANS KONTINENTAL

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN**
No. SP-043/DEKOM.PTK/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KHALID ZABIDI
NIK : 317406200740008
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 20 September 1974
Alamat : J. RM. Kahi I Gg. Kranji No. 3
Rt. 005/006 Cijayur Jagakarsa
Jakarta Selatan
Jabatan : Komisaris
PT Pertamina Trans Kontinental

Dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa saya tidak mempunyai benturan kepentingan terhadap PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") yang membuat saya tidak patut untuk melakukan tindakan berikut ini:

1. Melaksanakan jasa apapun atau memiliki peran apapun dalam perusahaan lain atau usaha pesaing yang sedang atau akan melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
2. Memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau organisasi manapun yang saat ini sedang melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
3. Memiliki anggota keluarga atau teman yang memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau organisasi yang saat ini melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/fasilitas PTK untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan;
5. Mewakili PTK dalam transaksi dengan perusahaan lain dimana saya atau anggota keluarga saya atau teman saya memiliki kepentingan;
6. Menerima hadiah uang atau hiburan dari pemasok atau mitra usaha, atau dari agen manapun, atau bertindak sebagai, atau mewakili pemasok atau mitra usaha dalam transaksinya dengan PTK, selain daripada yang diuraikan dalam kebijakan PTK mengenai hadiah dan hiburan;
7. Menggunakan informasi rahasia dan data bisnis PTK untuk kepentingan pribadi atau dengan cara yang merugikan kepentingan PTK;
8. Mengungkapkan kepada individu atau organisasi atau pihak manapun di luar PTK setiap informasi, program, data keuangan, formula, proses, atau rahasia milik PTK dalam memenuhi tanggung jawab saya terhadap PTK;
9. Melaksanakan setiap tindakan lainnya, yang tidak disebut secara spesifik di atas ini yang dianggap merugikan kepentingan PTK.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 08 Maret 2023
PT Pertamina Trans Kontinental


(KHALID ZABIDI)
Komisaris

PT Pertamina Trans Kontinental
R. Sunda Baru No. 38
Sukarno, 10130
Telp: +62 21 510 0000 F: +62 21 510 0002
www.ptk-indonesia.com

Khalid Zabidi

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Directors

Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan

Statement of No-Conflict of Interest



SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN No. SP-045/DEKOM.PTK/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AGUSTINUS BENSIK LOMBOAN
NIK : 3174050708640014
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 07 Agustus 1964
Alamat : Jl. Jarak Purut Dalam No. 17 Cilandak Timur Ampara
Jakarta Selatan
Jabatan : Komisaris
PT Pertamina Trans Kontinental

Dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa saya tidak mempunyai benturan kepentingan terhadap PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") yang membuat saya tidak patut untuk melakukan tindakan berikut ini:

1. Melaksanakan jasa apapun atau memiliki peran apapun dalam perusahaan lain atau usaha pesaing yang sedang atau akan melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
2. Memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau organisasi manapun yang saat ini sedang melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
3. Memiliki anggota keluarga atau teman yang memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau organisasi yang saat ini melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/fasilitas PTK untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan;
5. Mewakili PTK dalam transaksi dengan perusahaan lain dimana saya atau anggota keluarga saya atau teman saya memiliki kepentingan;
6. Menerima hadiah uang atau hiburan dari pemasok atau mitra usaha, atau dari agen manapun, atau bertindak sebagai, atau mewakili pemasok atau mitra usaha dalam transaksinya dengan PTK, selain daripada yang diuraikan dalam kebijakan PTK mengenai hadiah dan hiburan;
7. Menggunakan informasi rahasia dan data bisnis PTK untuk kepentingan pribadi atau dengan cara yang merugikan kepentingan PTK;
8. Mengungkapkan kepada individu atau organisasi atau pihak manapun di luar PTK setiap informasi, program, data keuangan, formula, proses, atau rahasia milik PTK dalam memenuhi tanggung jawab saya terhadap PTK;
9. Melaksanakan setiap tindakan lainnya, yang tidak disebut secara spesifik di atas ini yang dianggap merugikan kepentingan PTK.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 08 Maret 2023
PT Pertamina Trans Kontinental

(AGUSTINUS BENSIK LOMBOAN)
Komisaris



PT Pertamina Trans Kontinental
Jl. Kuntur Raya No. 29
Jakarta 10450
T +62 21 319 23005 F +62 21 310 6804
www.ptk-idneng.com

Agustinus Bensik Lomboan



SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN No. SP-134/DEKOM.PTK/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AMIR HAMZAH
NIK : 83271062408580004
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 24 Agustus 1958
Alamat : Komplek Bogor Baru Blok D9 No. 8
Tegalega Bogor
Jabatan : Komisaris Utama
PT Pertamina Trans Kontinental

Dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa saya tidak mempunyai benturan kepentingan terhadap PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") yang membuat saya tidak patut untuk melakukan tindakan berikut ini:

1. Melaksanakan jasa apapun atau memiliki peran apapun dalam perusahaan lain atau usaha pesaing yang sedang atau akan melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
2. Memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau organisasi manapun yang saat ini sedang melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
3. Memiliki anggota keluarga atau teman yang memiliki kepentingan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan atau organisasi yang saat ini melakukan kerjasama usaha dengan PTK;
4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/fasilitas PTK untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan;
5. Mewakili PTK dalam transaksi dengan perusahaan lain dimana saya atau anggota keluarga saya atau teman saya memiliki kepentingan;
6. Menerima hadiah uang atau hiburan dari pemasok atau mitra usaha, atau dari agen manapun, atau bertindak sebagai, atau mewakili pemasok atau mitra usaha dalam transaksinya dengan PTK, selain daripada yang diuraikan dalam kebijakan PTK mengenai hadiah dan hiburan;
7. Menggunakan informasi rahasia dan data bisnis PTK untuk kepentingan pribadi atau dengan cara yang merugikan kepentingan PTK;
8. Mengungkapkan kepada individu atau organisasi atau pihak manapun di luar PTK setiap informasi, program, data keuangan, formula, proses, atau rahasia milik PTK dalam memenuhi tanggung jawab saya terhadap PTK;
9. Melaksanakan setiap tindakan lainnya, yang tidak disebut secara spesifik di atas ini yang dianggap merugikan kepentingan PTK.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 22 September 2022
PT Pertamina Trans Kontinental

(AMIR HAMZAH)
Komisaris Utama



PT Pertamina Trans Kontinental
Jl. Kuntur Raya No. 29
Jakarta 10450
T +62 21 319 23005 F +62 21 310 6804
www.ptk-idneng.com

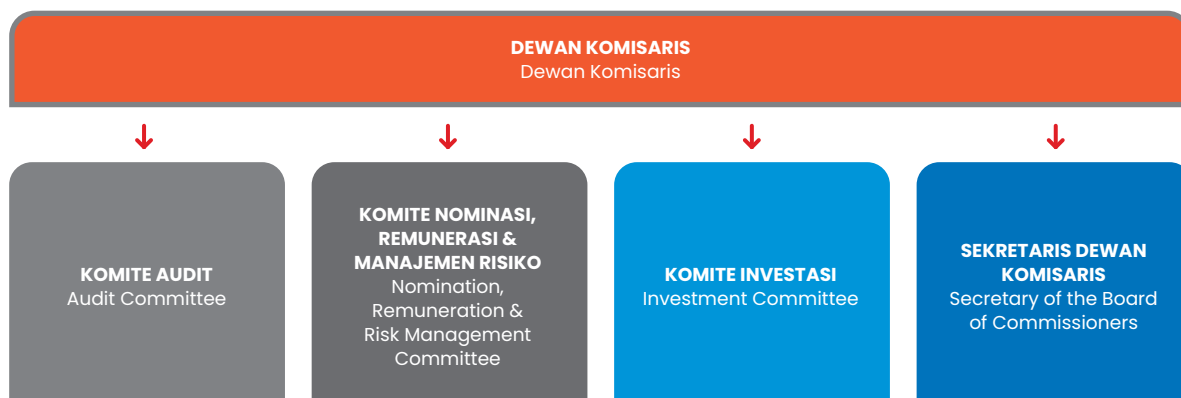
Amir Hamzah

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organs

Dalam meningkatkan kesesuaian struktur organ pendukung Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021, dan kelengkapan struktur Dewan Komisaris, maka pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian komite, dari sebelumnya Komite Audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha (KIRU) menjadi Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko, dan Komite Investasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-025/DEKOM.PTK/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko.

In improving the conformity of the Board of Commissioners supporting organs structure in accordance with the SOE Minister Regulation No. PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021, and completeness of the Board of Commissioners structure, then in 2022 a committee adjustment was conducted, from previously the Audit Committee and Investment & Business Risk Committee (KIRU) to the Audit Committee, Nomination, Remuneration & Committee Risk Management and Investment Committee as outlined in the Board of Commissioners Decision Letter No. Kpts-026/DEKOM.PTK/2022 dated February 14, 2022 concerning the Establishment and Appointment of the Nomination, Remuneration and Risk Management Investment Committee



Komite Audit

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan, terutama dalam masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan GCG, kebijakan akuntansi Perusahaan, pengawasan internal, pemeriksaan oleh akuntan publik serta sistem pelaporan keuangan dan informasi lainnya.

Komite Audit dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan tugas Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris harus memenuhi asas profesionalisme, objektivitas dan independen.

Komite Audit dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris selaku ketua merangkap anggota Komite Audit. Ketua komite audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Audit Committee

Audit Committee was established to assist the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function of the Company's management, especially in matters related to Good Corporate Governance (GCG) implementation, corporate accounting policies, internal supervision, audits by public accountants and financial reporting systems and other information.

In carrying out its duties, the Audit Committee is under and reports to the Board of Commissioners. The Audit Committee duty implementation report submitted to the Board of Commissioners shall comply with professionalism, objectivity, and independency principles.

The Audit Committee is formed by the decision of the Board of Commissioners. Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The audit committee is chaired by one of the members of the Board of Commissioners as chairman and concurrently a member of the Audit Committee. The Audit Committee Chairman has the right to propose a placement for the members of the audit committee if one of the members of the audit committee ends, resigns or is dismissed.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organs

Ketentuan Masa Jabatan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, anggota Komite Audit diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun. Keanggotaan Komite Audit dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai keputusan Dewan Komisaris.

Bagi anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris, masa jabatannya menyesuaikan dengan jabatannya sebagai Komisaris.

Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) anggota ahli yang bukan pekerja PTK serta diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.

Penentuan anggota Komite Audit mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan sebagai anggota Komite Audit, yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik, pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup.

Anggota Komite Audit terpilih yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan sewaktu-waktu meskipun jabatannya belum berakhir, dengan syarat antara lain:

1. Mengundurkan diri.
2. Kehilangan kewarganegaraan.
3. Meninggal dunia.
4. Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan.

Term of Office Provision

As stated in the SOE Minister Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, members of the Audit Committee are appointed for a maximum term of 3 (three) years and can be extended to 1 (one) time for 2 (two) years. Membership of the Audit Committee can be ended at any time before the term of office ends according to the decision of the Board of Commissioners.

For members of the Audit Committee who are Commissioners, their term of office conforms to their position as Commissioners.

Audit Committee Membership

The Audit Committee membership consists of at least 1 (one) Commissioner and 2 (two) expert members who are not PTK workers and are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Chairman is a Member of the Board of Commissioners who is an Independent Commissioner or Member of the Board of Commissioners who can act independently.

Appointment of members of the Audit Committee refers to the provisions of the SOE Minister Regulation No. PER-12/MBU/2012. These provisions stipulate the requirements for membership of the Audit Committee, namely:

1. Having good integrity, insights as well as sufficient work experience in the field of supervision/inspection;
2. Not having personal interest/involvement that may cause negative impacts and conflict of interest toward the Company;
3. Having adequate insights to study and comprehend financial statements;
4. Capable to communicate effectively and provide sufficient time.

The elected members of the Audit Committee who are not Members of the Board of Commissioners have a maximum term of office of three years and can be extended once for two years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Dismissal of members of the Audit Committee can be done at any time even though his position has not ended, with the following conditions:

1. Resigns.
2. Lost of the citizenship.
3. Passed-away.
4. Performs any actions that cause loss to the Company.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

5. Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit.
6. Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.

5. Violates or unable to fulfil the requirements as a member of the Audit Committee, as regulated in the Audit Committee Charter.
6. Unable to perform its duties and responsibilities based on the statement given by the Board of Commissioner.

Susunan dan Profil Komite Audit

Di sepanjang tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan Komite Audit.

Audit Committee Composition and Profile

Throughout 2022 there were no changes to the composition of the Audit Committee.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2022

Audit Committee Composition as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Khalid Zabidi	Ketua/Komisaris Chairman/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 162/DEKOM.PTK/2021 tanggal 25 November 2021 Board of Commissioners Decision Letter No. 162/DEKOM.PTK/2021 dated November 25, 2021	Mengikuti masa jabatannya sebagai Komisaris Following his term of office as Commissioner	
Harry Mulia	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-162/DEKOM.PTK/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Board of Commissioners Decision Letter No. SK-162/DEKOM.PTK/2022 dated October 31, 2022	1 November 2022 s.d 31 Oktober 2023 November 01, 2022 to October 31, 2023	Ke-2
Edward Situmorang	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-162/DEKOM.PTK/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Board of Commissioners Decision Letter No. SK-162/DEKOM.PTK/2022 dated October 31, 2022	06 November 2022 s.d tgl 05 November 2023	Ke-3/3

Khalid Zabidi
Ketua Komite Audit/Komisaris
Audit Committee Chairman/Commissioner

Profil Ketua Komite Audit, Khalid Zabidi, dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam bagian Profil Dewan Komisaris.
The profile of the Audit Committee Chairman, Khalid Zabidi, is presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section.



Harry Mulia

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Periode menjabat: 1 November 2022 s.d 31 Oktober 2023, Periode ke-2
Term of Office: November 01, 2022 to October 31, 2023, 2nd Period

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Palembang, 20 Mei 1964, berusia 58 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil di Universitas Sriwijaya (1988). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai *Manager* IA RU V Balikpapan (2013) mencakup Internal Audit RU V Balikpapan, *Manager* IA Jakarta (2013-2014) mencakup pengawasan Pertamina Pengolahan Pusat, Ka SPI PT PDSI (2014-2017), *Manager* JBB PT. Pertamina (Persero) (2017-2018) mencakup IA RU VI Balongan & MOR 3 Jakarta, *Chief Internal Audit* PT Pertamina Gas (2018-2020) sd Purna Bakti 1 Juni 2020.

Per 31 Desember 2022, beliau tidak memiliki rangkap jabatan lainnya.

Indonesian citizen domiciled in Jakarta. Born in Palembang on May 20, 1964. Currently 58 years old. He earned a Bachelor's Degree in Civil Engineering from Sriwijaya University in 1988. During his career, he served as *Manager* IA RU V Balikpapan (2013) covering Internal Audit RU V Balikpapan, *Manager* IA Jakarta (2013-2014) covering supervision of Pertamina Processing Center, Head of SPI PT PDSI (2014-2017), *Manager* JBB PT Pertamina (Persero) (2017-2018) covering IA RU VI Balongan & MOR 3 Jakarta, *Chief Internal Audit* PT Pertamina Gas (2018-2020) until June 1, 2020.

As of December 31, 2022, he has no other concurrent positions.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Bandung, 12 April 1979, berusia 43 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (2001). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai West Area 1 Audit Assistant Manager di PHE ONWJ (2018).

Saat ini beliau menjabat sebagai Manager Group Finance & ICoFR Internal Audit PT Pertamina (Persero).

Indonesian citizen domiciled in Jakarta. Born in Bandung on April 12, 1979. Currently 43 years old. He earned his Bachelor's Degree from University of Indonesia in 2001. During his career, he served as West Area 1 Audit Assistant Manager at PHE ONWJ (2018). He currently serves as Manager of Group Finance & ICoFR Internal Audit of PT Pertamina (Persero).

Independensi Anggota Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit bersifat independen. Adapun seluruh anggota tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen Perusahaan termasuk menjabat salah satu jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan maupun Anak Perusahaan.

Independency of Audit Committee Members

Audit Committee membership is independent. All members are not affiliated with the Company's management, including serving at any position in the Company's organization structure and its subsidiaries.

Independensi Komite Audit

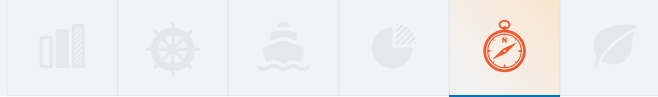
Audit Committee Independency

Kriteria Independensi Independency Criteria	Khalid Zabidi	Harry Mulia	Edward Situmorang
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit non audit pada PTK dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris. An insider of the Public Accounting Firm who has provided non-audit - audit services to PTK in the last 1 (one) year before being appointed by the Commissioner.	X	X	X
Memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan. Has a personal interest/attachment that can have a negative impact and conflict of interest on the SOE concerned.	X	X	X
Mempunyai hubungan afiliasi dengan PTK Direksi dan Komisaris. Has an affiliation with PTK Directors and Commissioners.	X	X	X
Memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PTK. Has a direct or indirect business affiliation related to PTK business activities.	X	X	X

v: ya | x = tidak
v: yes | x = no

Independensi Komite Audit tertuang dalam Surat No. SP-048/DEKOM.PTK/2022 tanggal 25 Maret 2022 di mana dalam surat tersebut terdapat pernyataan bahwa Komite Audit tidak memiliki benturan kepentingan.

The independence of the Audit Committee is stated in Letter No. SP-048/DEKOM.PTK/2022 dated 25 March 2022 in which the letter contains a statement that the Audit Committee has no conflict of interest.



Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit PTK ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 119/DEKOM.PTK/2022 tanggal 27 Agustus 2022. Piagam Komite Audit tersebut mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait fungsi pengawasan, meliputi:

1. Menjaga kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, Undang-Undang, dan ketentuan hukum serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;
2. Menegakkan disiplin organisasi dan pengendalian internal untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan (*abuse*);
3. Meningkatkan kualitas pengungkapan hal-hal yang bersifat pelaporan keuangan, sistem akuntansi dan kebijakan manajemen risiko;
4. Mempelajari ruang lingkup, keakuratan, kemandirian dan objektivitas Auditor Eksternal dan Audit Internal serta efektivitas biaya Audit Eksternal;
5. Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
7. Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non audit yang ditugaskan kepada Auditor Independen;
8. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan;
9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris perihal risiko yang dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menerima, menelaah dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;

Audit Committee Charter

The Audit Committee has an Audit Committee Charter as a work guideline in conducting its duties and responsibilities in supervising and providing advice to the Board of Commissioners. The PTK Audit Committee Charter was established based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 119/DEKOM.PTK/2022 dated August 27, 2022. The Audit Committee Charter regulates various matters related to the implementation of the duties, responsibilities and obligations of the Chairman and Members of the Audit Committee.

Audit Committee Duty, Responsibility, and Authority

Duties of the Audit Committee include to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities related to the supervisory function, including:

1. Maintain compliance with the Articles of Association, laws and applicable legal provisions and Company policies;
2. Uphold organizational discipline and internal control to prevent fraud and abuse;
3. Improve the quality of disclosure on matters of financial reporting, accounting systems and risk management policies;
4. Examine the scope, accuracy, independency and objectivity of the External Auditor and Internal Audit as well as the cost effectiveness of the External Audit;
5. Conduct its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations;
6. Review financial information that will be published such as financial statements, projections and other financial information;
7. Conduct an evaluation to provide preapproval for non-audit services assigned to the Independent Auditor;
8. Review the effectiveness of the Company's internal controls;
9. Report to the Board of Commissioners regarding the risks faced by the Company and the implementation of Risk Management by the Directors;
10. Examine any violation of errors in the decisions of the Board of Directors meetings or irregularities in the results of the decisions of the Board of Directors meetings;
11. Receive, examine and forward to interested parties and monitor the follow up of complaints relating to the Company;

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

12. Melakukan *self-evaluation* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Audit;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit juga berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan pelaksanaan tugas kegiatan Komite Audit.
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain berisi fakta lapangan, analisa kesimpulan dan saran.

Wewenang Komite Audit yaitu:

1. Komite Audit, jika diperlukan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, pekerja, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Audit Internal;
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

Berdasarkan piagam Komite Audit, ini bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain meliputi:

1. Penelaahan atas informasi keuangan dilakukan mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan menjadi akurat, andal dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan melalui: a. *Review* atas hasil pemeriksaan Auditor Independen atau Auditor Internal; b. *Review* dalam atau selama proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.
2. Seleksi, penunjukan dan pengawasan pekerjaan Auditor Independen. Dalam rangka audit umum atas keuangan Perusahaan, Komite Audit berperan melaksanakan:
 - a. Seleksi dan penunjukkan Auditor Independen.
 - Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan calon Auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;

12. Conduct self-evaluation of the effectiveness of the duties implementation and periodically update the Audit Committee Work Guidelines;
13. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners based on the provisions of the applicable laws and regulations;
14. In carrying out its duties, the Audit Committee is also guided by the applicable laws and regulations.

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners. The accountability of Audit Committee is conveyed to the Board of Commissioners in the form of reports as follows:

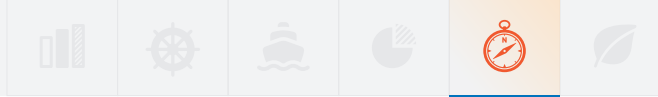
1. Annual Report, detailing the implementation of duties of the Audit Committee activities;
2. Report, containing each implementation of duties of the Audit Committee, such as facts from the field, conclusion and recommendation analysis.

The Audit Committee's authorities are:

1. When necessary, the Audit Committee has the authority to have full, free, and unlimited access to records, employees, funds, assets, as well as other company resources related to the implementation of its duties;
2. Upon implementing its authority, the Audit Committee commits to cooperate with Internal Audit;
3. When necessary, with a written approval from the Board of Commissioners, the Audit Committee has the capability to employ experts and/or consultants in assisting the Audit Committee.

In order to perform its duties and responsibilities, scope of work of the Audit Committee covers the following:

1. Analysis on financial information is carried out in order to be published by the Company in an accurate, reliable, and trusted manner. The analysis may be performed by: a. Reviewing the Independent Auditor or Internal Auditor findings; b. Reviewing the preparation process of financial information that will be published.
2. Selection, appointment, and supervision of the Independent Auditor work. To carry out a general audit on the Company's finance, the Audit Committee has the role of:
 - a. Selecting and appointing an Independent Auditor.
 - Selecting and recommending candidates for Independent Auditor who will audit the Company's Financial Statements to the Board of Commissioners;



Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

- Dalam proses seleksi Auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik.
- b. Pengawasan pekerjaan Auditor Independen dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan oleh Auditor Independen, Komite Audit harus memastikan bahwa Auditor Independen memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku umum:
 - Melakukan tinjauan Audit *Planning* dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan;
 - Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh Auditor dengan Manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat Auditor dengan manajemen dan hal lainnya yang perlu mendapat perhatian, maka harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis.
- 3. Memastikan agar Auditor Independen mengkomunikasikan hal-hal berikut ini sesuai standar audit:
 - a. Tingkat tanggung jawab Auditor dalam mengevaluasi pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan;
 - b. Pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi berikut pelaksanaannya;
 - c. Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern;
 - d. Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan;
 - e. Salah saji yang tidak dikoreksi oleh Manajemen dalam Laporan Keuangan dengan alasan yang tidak material;
 - f. *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan manajemen atau pekerja yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan;
 - g. Pertimbangan manajemen yang dipakai sebagai dasar estimasi akuntansi;
 - h. Koreksi Audit yang signifikan;
 - i. Tanggung jawab Auditor dalam mengevaluasi informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, prosedur yang telah dilaksanakan untuk itu dan hasilnya;
 - j. Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip-prinsip akuntansi, lingkup audit dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan Auditor dalam laporan auditnya;
- Throughout the selection process, referring to the provisions on legality, competency, and independency of an public accountant.
- b. Supervising the Independent Auditor Work In the implementation of general audit on the financial statements by an Independent Auditor, the Audit Committee should ensure the Independent Auditor has the competence and experience in administering the generally accepted Public Accountant Professional Standards and Accounting Principles:
 - Reviewing the Audit Planning and audit program adequacy as well as monitoring implementation of field audit activity.
 - Monitoring the discussion of audit findings carried out by the Auditor and management. If there is any dissenting opinion between the Auditor and management, and other issues requiring attention, it is mandatory to report to the Board of Commissioners in written.
- 3. Ensuring the Independent Auditor to communicate the following as per the audit standards:
 - a. Level of responsibility of an Auditor in evaluating internal control and presentation of financial statements;
 - b. Selection and changes in accounting policies along with its implementation;
 - c. Significant shortcoming in the design and implementation of internal control;
 - d. Method of recording, reporting and significant impact from extraordinary transactions to the financial statements;
 - e. Uncorrected misstatement by the Management in Financial Statements with immaterial reasons;
 - f. Frauds toward the laws and regulations conducted by the management or employees causing uncorrected misstatement in the financial statements;
 - g. Management consideration used as an estimation basis of accounting;
 - h. Significant Audit Correction;
 - i. Responsibilities of an Auditor in evaluating other information in documents containing audited financial statements, procedures conducted based on the audited information, and the results;
 - j. Disagreement with the management on the implementation of accounting principles, scope of audit, disclosure in the financial statements and words used by the Auditor in its audit report;

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

- k. Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut serta hambatan dalam pelaksanaan audit.
4. Memastikan konsep laporan keuangan audit diterima 10 hari sebelum diterbitkan oleh Perusahaan untuk dibicarakan dengan Auditor dan manajemen untuk menilai apakah Auditor sesuai dengan temuan Audit dan pengungkapannya telah memadai;
5. Memastikan bahwa Auditor menyampaikan representasi tertulis yang menyatakan penilaiannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan dan Manajemen terhadap peraturan perundangan dan efektivitas pengendalian internal;
6. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan Auditor Independen kepada Dewan Komisaris, jika terbukti kuat bahwa independensi Auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa Auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar akuntan publik.

Pelaksanaan Tugas Khusus

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis;
2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
3. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
 - a. Dilakukan melalui tinjauan (*review*) terhadap semua pencatatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani pihak terkait;
 - c. Jika dianggap perlu, melakukan Audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Auditor Internal.
4. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada Anggota Komite Audit dan Anggota Dewan Komisaris.

- k. Consultation established by the management with other Public Accountant Firm and opinion of the Auditor toward the consulted issues, as well as obstacles in the audit implementation.
4. Ensuring the concept of an audited financial statements to be received in 10 days prior to the publication by the Company in order to be discussed by the Auditor and management to evaluate whether the Auditor is in accordance with the findings and its disclosure is adequate;
5. Ensuring the Auditor submits a written representation, stating its evaluation on issues related to the Company and Management compliance to the laws and regulations, as well as the effectivity of internal control;
6. Having the capability to recommend termination of employment with the Independent Auditor to the Board of Commissioners, if strongly proven that the Auditor's independency could be disrupted or proven that the examination conducted by the Auditor is not in line with the public accountant standards.

Implementation of Specific Assignment

1. Distribution of special duties to the Audit Committee by the Board of Commissioners is conducted through a written order;
2. Special duties may include but not limited to investigation to the allegation of errors in the Board of Directors' meeting resolution or fraud in the implementation of the Board of Directors' meeting resolution;
3. Implementation of special duties of the Audit Committee, among which could be performed by:
 - a. Reviewing all records, documents, and other necessary information, including Minutes of Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners' Meeting;
 - b. Proposing questions to the Board of Directors and its staff, to which the results to be included in Question & Answer Minutes of Meeting, signed by related parties;
 - c. If deemed necessary, performing investigative Audit which is conducted by cooperating with Internal Auditor.
4. The Audit Committee is obligated to submit special duties implementation report with maximum confidentiality level, limited to Members of the Audit Committee and Members of the Board of Commissioners.

Rapat Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Rapat Komite Audit dipimpin Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

Setiap pelaksanaan Rapat dituangkan dalam risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Di sepanjang tahun 2022 Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 6 kali. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Komite Audit dalam rapat dan hasil rapat-rapat tersebut.

Frekuensi Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2022

Frequency of Audit Committee Meeting Attendance in 2022

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Khalid Zabidi (Ketua) (Chairman)	6	6	100
Harry Mulia (Anggota) (Member)	6	6	100
Edward Situmorang (Anggota) (Member)	6	6	100
Rata-rata Average			100

Hasil Rapat Komite Audit Tahun 2022

Results of the 2022 Audit Committee Meeting

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1	11 Januari 2022 January 11, 2022	Perubahan Tindak Lanjut Internal Audit s.d. 31 Desember 2021 Changes in Internal Audit Follow up to December 31, 2021	Khalid Zabidi (Ketua/Komisaris) (Chairman/Commissioner) Harry Mulia (Anggota) (Member) Edward Situmorang (Anggota) (Member)
2	07 Maret 2022 March 07, 2022	Rencana Kerja Komite Audit untuk Kegiatan Pengawasan Tingkat Ketaatan Region Discussion on Internal Audit Performance 2022	Khalid Zabidi (Ketua/Komisaris) (Chairman/Commissioner) Harry Mulia (Anggota) (Member) Edward Situmorang (Anggota) (Member)

Audit Committee Meeting

In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee's Meeting is held at least once a month. The Meeting of Audit Committee has the capability to make decisions if the attendance amounts to 2/3 of the total members. The meeting is chaired by Chairman of Audit Committee or the most senior of the Members of Audit Committee if the Chairman is unable to attend. If deemed necessary, the Audit Committee is allowed to invite other parties related to the meeting material.

Description of the Meeting implementation is stated in minutes of meeting. The minutes of meeting is signed by the meeting chairman and distributed to all attending and non-attending members of the Audit Committee. Dissenting opinion that occurs in the meeting to be included in the minutes of meeting along with the underlying reasons.

Throughout 2022 the Audit Committee held 6 meetings. The following shows the frequency and attendance of the Audit Committee at meetings and the results of these meetings.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

Hasil Rapat Komite Audit Tahun 2022

Results of the 2022 Audit Committee Meeting

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
3	24 Juni 2022 June 24, 2022	Pembahasan Kinerja Internal Audit 2022 Discussion on Internal Audit Performance 2022	Khalid Zabidi (Ketua/Komisaris) (Chairman/Commissioner) Harry Mulia (Anggota) (Member) Edward Situmorang (Anggota) (Member)
4	23 September 2022 September 23, 2022	Kinerja Fungsi Internal Audit PTK YTD Agustus 2022 PTK Internal Audit Function Performance YTD August 2022	Khalid Zabidi (Ketua/Komisaris) (Chairman/Commissioner) Harry Mulia (Anggota) (Member) Edward Situmorang (Anggota) (Member)
5	23 November 2022 November 23, 2022	Diskusi <i>Progress</i> Kinerja Audit dengan Komite Audit Audit Performance Progress Discussion with Audit Committee	Khalid Zabidi (Ketua/Komisaris) (Chairman/Commissioner) Harry Mulia (Anggota) (Member) Edward Situmorang (Anggota) (Member)
6	27 Desember 2022 December 27, 2022	Diskusi <i>Progress</i> Kinerja Audit dengan Komite Audit per November 2022 Discussion on Audit Performance Progress with Audit Committee as of November 2022	Khalid Zabidi (Ketua/Komisaris) (Chairman/Commissioner) Harry Mulia (Anggota) (Member) Edward Situmorang (Anggota) (Member)

Program Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2022, program pengembangan kompetensi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Competency Development Program

Throughout 2022, the Audit Committee competency development program was as follows:

Pelatihan Komite Audit

Audit Committee Training

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Khalid Zabidi (Ketua Komite Audit) (Audit Committee Chairman)			
Pelatihan Training	<i>Directorship Program "High Performance Boards".</i>	Online/22-25 Maret 2022 Online/March 22-25, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Pelatihan Training	<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Business Growth Through Merger, Acquisition & Strategic Alliances"</i>	Online/10 Oktober 2022 Online/October 10, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Harry Mulia (Anggota Komite Audit) (Audit Committee Member)			
	<i>Executive Education Directorship Program High Performance Boards</i>	Online / 22-25 Maret 2022 Online/March 22-25, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Pelatihan Training	<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices - Driving Sustainable Growth Through Supply Chain Resilience</i>	Online/03 Oktober 2022 Online/October 03, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
	<i>Investigasi dan Pelaporan Insiden (Incident Investigation & Reporting)</i>	PTK It. 4 / 8-10 November 2022	HSSE PTK

Pelatihan Komite Audit
Audit Committee Training

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Edward Situmorang (Anggota Komite Audit) (Audit Committee Member)			
Pelatihan Training	Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices – Investment Strategies and Portfolio Management	28 Oktober 2022 October 28, 2022	PT Pertamina Training & Consulting

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah menjalankan tugas dan berbagai kegiatan, meliputi:

1. Rapat Kerja dengan Fungsi Internal Audit.
2. Melakukan Penelaahan dan membahas Laporan Keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan yang akan dipublikasikan.
3. Turut serta dalam proses pemilihan Auditor Independen Tahun Buku 2022.
4. Membuat Tanggapan Laporan Kegiatan Perusahaan.
5. Melakukan evaluasi atas Rencana Kerja Fungsi Internal Audit, Efektivitas Fungsi Audit dan membahas Hasil Audit Fungsi Internal Audit.
6. Memantau Tindak Lanjut Manajemen atas rekomendasi dari hasil Audit Internal dan Eksternal.
7. Melakukan Audit Khusus atas permintaan Dewan Komisaris, jika diperlukan.

Penelaahan Informasi Keuangan dan Kinerja Keuangan

Untuk mendorong agar informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh Perusahaan secara akurat, andal dan dapat dipercaya, Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Tahunan dan berdiskusi dengan manajemen dan Internal Audit mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian antara lain Laporan Rugi/Laba dan Pendanaan untuk investasi kapal.

Pengawasan atas Pekerjaan Auditor Eksternal

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pekerjaan Auditor Eksternal, Komite Audit melakukan beberapa aktivitas yaitu:

1. Menelaah dan berdiskusi dengan auditor independen Perusahaan mengenai rencana audit dan implementasinya.

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Activities

Throughout 2022, the Audit Committee has carried out various duties and activities, including:

1. Work Meetings with the Internal Audit Function.
2. Reviewed and discussed quarterly, semi-annual and annual Financial Reports that would be published.
3. Participated in the process of selecting the Independent Auditor for the 2022 Fiscal Year.
4. Generated Responses to Company Activity Reports.
5. Evaluated the Work Plan of the Internal Audit Function, the Effectiveness of the Audit function and discussed the Audit Results of the Internal Audit Function.
6. Monitored Management Follow-up on recommendations from Internal and External Audit results.
7. Conducted a Special Audit at the request of the Board of Commissioners, if necessary.

Financial Information and Financial Performance Review

To encourage financial information that is presented and published by the Company accurately, reliably, and trustworthy, the Audit Committee has reviewed the Monthly, Quarterly and Annual Financial Statements and discussed with management and Internal Audit regarding matters that require attention including the Loss/Profit Report and Financing for ship investment.

Supervision of The Work of The External Auditor

In carrying out the oversight function of the work of the External Auditor, the Audit Committee carries out several activities, namely:

1. Review and discuss with the Company's independent auditors the audit plan and its implementation;

Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs

2. Melakukan *monitoring* terhadap proses pelaporan keuangan dengan mendiskusikan hasil audit atas Laporan Keuangan konsolidasi Perusahaan.
3. Menelaah temuan-temuan penting dari auditor eksternal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi internal auditor melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Menelaah dan berdiskusi dengan Auditor Internal Perusahaan mengenai aktivitas audit selama tahun 2022 dan rencana Audit Internal tahun 2023.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Audit Internal dan menelaah temuan-temuan penting dari auditor internal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.
3. Komite Audit bersama dengan Internal Auditor telah melakukan diskusi dan rapat terkait dengan hal temuan hasil Pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
4. Internal Auditor telah menerbitkan 6 Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan yang direncanakan dan menyampaikan 117 Rekomendasi.

Selama tahun 2022 Komite Audit telah melaksanakan 8 kali pertemuan dengan Auditor Internal untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan serta hal-hal yang menjadi perhatian Perusahaan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan

Komite Audit telah melakukan penelaahan dan pengawasan atas kepatuhan Perusahaan pada hukum dan peraturan, termasuk melakukan pemantauan peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang usaha Perusahaan serta perkara/sengketa yang terkait dengan Perusahaan dan kegiatan usaha Perusahaan.

Melakukan Identifikasi Hal-hal yang Memerlukan Perhatian Dewan Komisaris

Komite Audit menyampaikan masukan dalam bentuk Rekomendasi terkait dengan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil analisa dan telaah atas Laporan Manajemen maupun Laporan Keuangan yang diterbitkan setiap bulan.

2. Monitor the financial reporting process by discussing the audit results of the Company's consolidated financial statements;
3. Review important findings from external auditors and monitor the implementation of audit recommendations.

Evaluate The Effectiveness of Internal Control and The Implementation of the Internal Audit Function

The Audit Committee evaluates the effectiveness of internal control and the implementation of the main duties and functions of the internal auditor through the following activities:

1. Review and discuss with the Company's Internal Auditors the audit activities during 2021 and the 2022 Internal Audit plan;
2. Evaluate the implementation of Internal Audit and review important findings from internal auditors and monitor the implementation of audit recommendations;
3. The Audit Committee together with the Internal Auditor has conducted discussions and meetings related to the findings of the Audit results and the follow-up;
4. The Internal Auditor has issued 6 Audit Results Reports (LHA) as planned and submitted 117 Recommendations

During 2022, the Audit Committee has held 8 meetings with the Internal Auditor to discuss the Report of the Audit Results carried out as well as matters of concern to the Company.

Compliance with Regulation and Legislation

The Audit Committee has reviewed and supervised the Company's compliance with laws and regulations, including monitoring the regulations and laws related to the Company's business fields, cases/disputes and business activities.

Identify Issues That Require the Attention of The Board of Commissioners

The Audit Committee submits input in the form of Recommendations related to matters that require the attention of the Board of Commissioners based on the results of the analysis and review of Management Reports and Financial Reports that are published every month.

Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko

PTK membentuk Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko ("KNRM") dengan tugas utama membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, pendampingan, *monitoring* pelaksanaan *talent management* dan KPI Direksi, serta manajemen risiko di lingkup PTK.

Ketentuan Masa Jabatan

Dalam Piagam KNRM diatur bahwa masa jabatan anggota KNRM paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 2 (dua) tahun. Keanggotaan anggota KNRM dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai keputusan Dewan Komisaris.

Susunan dan Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

KNRM baru dibentuk di tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan No. Kpts-025/DEKOM.PTK/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko.

Nomination, Remuneration and Risk Management Committee

PTK formed the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee ("KNRM") with the main task of assisting the Board of Commissioners in supervising, mentoring, monitoring the implementation of talent management and Directors' KPI, as well as risk management within the scope of PTK.

Term of Office Provisions

The KNRM Charter stipulates the term of office of KNRM members is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years. Membership of KNRM members can be ended at any time before the term of office ends according to the Board of Commissioners' decision.

Composition and Profile of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee

The new KNRM was formed in 2022 based on Decision Letter No. Kpts-025/DEKOM.PTK/2022 dated February 14, 2022 concerning the Establishment and Appointment of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee.

Susunan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko per 31 Desember 2022

Composition of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Agustinus Bensik Lomboan	Ketua/Komisaris Chairman/ Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-025/DEKOM.PTK/2022 tanggal 14 Februari 2022 Board of Commissioners Decision Letter No. Kpts-025/DEKOM.PTK/2022 dated February 14, 2022	Mengikuti masa jabatannya sebagai Komisaris Following his term of office as Commissioner	
Wimbo Hapsara	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-004/DEKOM.PTK/2022 tanggal 06 Januari 2022 Board of Commissioners Decision Letter No. Kpts-004/DEKOM.PTK/2022 dated January 06, 2022	11 Januari 2022 s.d 10 Januari 2023 January 11, 2022 to January 10, 2023	Ke-1 First
Hamdi Zainal	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-028/DEKOM.PTK/2022 tanggal 22 Februari 2022 Board of Commissioners Decision Letter No. Kpts-028/DEKOM.PTK/2022 dated February 22, 2022	1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2023 March 1, 2022 to February 28, 2023	Ke-1 First

Agustinus Bensik Lomboan

Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko/Komisaris

Chairman of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee/Commissioner

Profil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko, Agustinus Bensik Lomboan, dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam bagian Profil Dewan Komisaris.

Profile of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee Chairman, Agustinus Bensik Lomboan, is presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs**Wimbo Hapsara**

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko
Member of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee

Periode menjabat: 11 Januari 2022 s.d 10 Januari 2023, Periode ke-1
Term of Office: January 11, 2022 to January 10, 2023, First Period

Warga negara Indonesia, berdomisili Bekasi Lahir di Bojonegoro, 16 November 1981, berusia 41 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Sepuluh November (2006). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Manager Investment Management dan periode menjabat 2023 sampai dengan sekarang (per 31 Desember 2022).

Per 31 Desember 2022, beliau tidak memiliki rangkap jabatan lainnya.

Warga negara Indonesia, berdomisili Bekasi Lahir di Bojonegoro, 16 November 1981, berusia 41 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Indonesian citizen, domiciled in Bekasi. Born in Bojonegoro, November 16, 1981, 41 years old. He earned his Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Sepuluh November University (2006). During his career, he has served as Manager of Investment Management and served from 2023 to the present (as of December 31, 2022).

As of December 31, 2022, he has no other concurrent positions.

**Hamdi Zainal**

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko
Member of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee

Periode menjabat: 1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2023, Periode ke-1
Term of Office: March 01, 2022 to February 28, 2023, First Period

Warga negara Indonesia, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Lahir di Martapura, 2 April 1955, berusia 67 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Krisnadwipayana (1991). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai 1) Head of Region BPMIGAS Jawa Papua Maluku {Japalu} (2008 - 2009) 2) VP MR Exxon Mobil Indonesia & PEPC - BPMigas (2010); 3) Staf Ahli Deputy Pengendalian Operasi SKKMigas (2011); 4) Staf Khusus Unit Percepatan Proyek Banyu Urip SKK Migas (2014); 5) Wakil Sekretaris Koperasi Bina Petro Mandiri SKKMigas (2014); 6) Sekretaris Koperasi Bina Metro Mandiri SKKMigas (2015).

Per 31 Desember 2022, beliau tidak memiliki rangkap jabatan lainnya.

Indonesian citizen, domiciled in Bekasi, West Java. Born in Martapura, April 02, 1955, 67 years old. He earned a Bachelor of Science in Public Administration from Krisnadwipayana University (1991). During his career, he has served as 1) Head of Region BPMIGAS Java Papua Maluku {Japalu} (2008 - 2009) 2) VP MR Exxon Mobil Indonesia & PEPC - BPMigas (2010); 3) Expert Staff to the Deputy of Operation Control SKKMigas (2011); 4) Special Staff Unit Banyu Urip Project Acceleration Unit SKK Migas (2014); 5) Deputy Secretary of Bina Petro Mandiri Cooperative SKKMigas (2014); 6) Secretary of Bina Metro Mandiri Cooperative SKKMigas (2015).

As of December 31, 2022, he has no other concurrent positions.

Independensi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Seluruh anggota KNRM tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen Perusahaan, termasuk menjabat salah satu jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan maupun Anak Perusahaan.

Independency of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee Members

All members of KNRM have no affiliation with the Company's management, including holding a position in the Company's organization structure or its Subsidiaries.

Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Independency of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee

Kriteria Independensi Independency Criteria	Agustinus Bensik Lomboan	Wimbo Hapsara	Hamdi Zainal
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit non audit pada PTK dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris. He/She is a person in a Public Accounting Firm who has provided non-audit - audit services to PTK in the last 1 (one) year before being appointed by the Commissioner.	X	X	X

Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Independency of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee

Kriteria Independensi Independency Criteria	Agustinus Bensik Lomboan	Wimbo Hapsara	Hamdi Zainal
Memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan. Has a personal interest/attachment that can have a negative impact and conflict of interest on the SOE concerned.	x	x	x
Mempunyai hubungan afiliasi dengan PTK Direksi dan Komisaris. Has an affiliation with PTK Directors and Commissioners.	x	x	x
Memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PTK. Has a direct or indirect business affiliation related to PTK business activities.	x	x	x

v: ya | x = tidak
v: yes | x = no**Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko**

KNRM memiliki Piagam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Piagam KNRM PTK ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 042/DEKOM.PTK/2022 tanggal 21 Maret 2022. Piagam KNRM tersebut mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Ketua dan Anggota KNRM.

Nomination, Remuneration and Risk Management Committee Charter

KNRM has a Charter as a work guideline in carrying out its duties and responsibilities in supervising and providing advice to the Board of Commissioners. The KNRM PTK Charter was established based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 042/DEKOM.PTK/2022 dated March 21, 2022. The KNRM Charter regulates various matters related to the implementation of the duties, responsibilities and obligations of the Chairman and Members of the KNRM.

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

KNRM didalam menjalankan tugasnya melakukan pendampingan, pengawasan, serta *monitoring* pelaksanaan pengelolaan nominasi, remunerasi dan risiko PTK, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kinerja Keuangan serta tingkat risiko yang disampaikan Direksi melalui laporan kinerja manajemen setiap bulan.
2. *Review* atas identifikasi risiko jangka pendek dalam usulan RKAP maupun *rolling out* rencana jangka Panjang (RJPP).
3. *Review* bersama dengan Komite Investasi terkait rencana investasi maupun divestasi yang tersebut dalam rencana kerja PTK, khususnya untuk aspek penerapan tingkat risiko usaha.
4. *Monitoring* dan *review* secara periodik atas pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan yang meliputi kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sesuai rencana dan target kinerja Direksi.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee

In carrying out its duties, KNRM provides assistance, supervision, and monitoring the implementation of PTK nomination, remuneration and risk management, with the following duties and responsibilities:

1. Monitor and evaluate the realization of financial performance and the level of risk submitted by the Board of Directors through management performance reports every month.
2. Review the short-term risk identification in the proposed RKAP and rolling out long-term plans (RJPP).
3. Joint review with the Investment Committee regarding the investment and divestment plans mentioned in the PTK work plan, especially for the aspect of implementing business risk index.
4. Periodic monitoring and review of risk management implemented by the Company and its Subsidiaries which includes compliance in implementing risk management policies set according to the Board of Directors' performance plans and targets.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

5. Memberikan masukan dan pendapat bagi Dewan Komisaris atas efektivitas kebijakan pengurusan perusahaan dari aspek manajemen risiko.
6. Rapat koordinasi dengan fungsi Manajemen Risiko dan pelaksanaan pengelolaan risiko terkait *monitoring* pelaksanaan mitigasi risiko bulanan sesuai dengan identifikasi risiko yang telah ditetapkan dan status kendala serta tindak lanjut yang diperlukan.
7. *Review* atas pembaruan status manajemen risiko (*updating risk management plan*) yang disampaikan Direksi PTK secara periodik.
8. Melakukan evaluasi usulan KPI individu anggota Direksi serta melakukan *monitoring* secara periodik atas realisasinya.
9. Melakukan telaah terhadap Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Karir yang dilakukan oleh Direksi.
10. Membuat rekomendasi terkait remunerasi dan *tantien/insentif* kinerja untuk Direksi PTK berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direksi. Komite NRM akan melakukan telaah untuk kemudian menyusun rekomendasi atas usulan yang diajukan tersebut kepada Dewan Komisaris sebelum kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai rekomendasi dari Dewan Komisaris.
11. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diperoleh *selected talent list*.
12. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan anak dan/atau perusahaan patungan, sebelum diajukan kepada RUPS.
13. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan
14. Melakukan evaluasi strategi pengelolaan risiko baik operasional, pengembangan Perusahaan dan investasi.
15. Kunjungan langsung (*site visit*) ke *region* maupun wilayah kerja PTK sebagai bagian dari tahapan *close monitoring*.

KNRM memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite mempunyai wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan tentang kegiatan operasional, keuangan, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
3. Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari rekan kerja antara lain Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite lain, Tim Sumber Daya Manusia, Tim Keuangan, Tim *Enterprise Risk Management* dan atau fungsi-fungsi operasional Perusahaan, termasuk Anak Perusahaan.

5. Provide input and opinion to the Board of Commissioners on the effectiveness of the Company's management policies from the aspect of risk management.
6. Coordinate meetings with the Risk Management function and the implementation of risk management related to monitoring the implementation of monthly risk mitigation in accordance with the risk identification that has been determined and the status of obstacles and the necessary follow-up.
7. Periodically review the updating risk management plan submitted by the PTK Board of Directors.
8. Evaluate individual KPI proposals for members of the Board of Directors and periodically monitor their realization.
9. Review the Career Development Policies and Procedures carried out by the Board of Directors.
10. Generate recommendations regarding remuneration and performance bonuses/incentives for the PTK Directors based on suggestions submitted by the Directors. The NRM Committee will conduct a review and then generate recommendations on the proposal submitted to the Board of Commissioners before submitting it to the Shareholders as a recommendation from the Board of Commissioners.
11. Validate and calibrate the Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners to obtain a selected talent list.
12. Evaluate prospective Company Representatives who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint ventures, before being submitted to the GMS.
13. Evaluate the Board of Directors' proposal regarding the Company's organization structure.
14. Evaluate risk management strategies both operational, Company development and investment.
15. Direct visits (*site visits*) to regions and working areas of PTK as part of the close monitoring stage.

KNRM has the following authorities:

1. The Committee works collectively and independently in carrying out its duties and is responsible to the Board of Commissioners.
2. The Committee has the authority to obtain Company information regarding operational activities, finances, assets and other resources of the Company related to the implementation of duties.
3. Request and/or obtain cooperation from colleagues including the Secretariat of the Board of Commissioners and other Committees, Human Resources Team, Finance Team, Enterprise Risk Management Team and/or operational functions of the Company, including Subsidiaries.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

4. Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Piagam (*Charter*) termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan KNRM dengan persetujuan Dewan Komisaris.
5. Apabila diperlukan komite dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu komite terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Berdasarkan Piagam KNRM, Rapat KNRM dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan atau triwulanan. Rapat KNRM dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Rapat KNRM dipimpin Ketua KNRM atau Anggota KNRM paling senior, apabila Ketua KNRM berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, KNRM dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat KNRM.

Setiap pelaksanaan Rapat dituangkan dalam risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota KNRM yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Di sepanjang tahun 2022 KNRM melaksanakan rapat sebanyak 1 kali. Rapat ini merupakan rapat internal KNRM, di luar rapat yang dilakukan oleh KNRM bersama fungsi terkait. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran KNRM dalam rapat dan hasil rapat-rapat tersebut.

4. Compile, evaluate, amend and implement the Charter including determining the procedures and scope of implementation of the KNRM work with the approval of the Board of Commissioners.
5. If necessary, the committee may employ experts and/or consultants to assist the committee related to the Company's business development plan with the written approval of the Board of Commissioners and at the expense of the Company allocated from the Board of Commissioners' budget.

Nomination, Remuneration and Risk Management Committee Meetings

Based on the KNRM Charter, KNRM Meetings are held at least once in 3 months or quarterly. The KNRM meeting may generate decisions if attended by at least 2/3 of the total members. The KNRM meeting is led by the KNRM Chairman or the most senior KNRM Member, if the KNRM Chairman is unable to attend. If deemed necessary, the KNRM may invite other parties related to the meeting material to attend the KNRM meeting.

Each meeting implementation is stated in the minutes of meeting. The minutes of meeting are signed by the meeting chairman and distributed to all KNRM members who attended the meeting or not. Dissenting opinion that occurs at the meeting will be included in the minutes of meeting accompanied by reasons for the dissenting opinion.

Throughout 2022, KNRM held 1 meeting. This meeting is an internal KNRM meeting, outside of meetings held by KNRM with related functions. The following shows the frequency and attendance of KNRM in meetings and the results of these meetings. .

Frekuensi Kehadiran Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko Tahun 2022

Frequency of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee Meetings Attendance in 2022

Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko Nomination, Remuneration and Risk Management Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Agustinus Bensik Lomboan (Ketua) (Chairman)	1	1	100
Wimbo Hapsara (Anggota) (Member)	1	1	100
Hamdi Zainal (Anggota) (Member)	1	1	100
Rata-rata Average			100

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

Hasil Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko Tahun 2022

Results of the 2022 Nomination, Remuneration and Risk Management Committee Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1	04 Maret 2022 March 04, 2022	- Perubahan Struktur Organisasi Sesuai Dengan Arahan Pemegang Saham - Monitoring Sistem Manajemen <i>Third Parties Employee</i> di Region - Changes to the Organization Structure in accordance with the directions of the Shareholders - Monitoring the Third Party Employee Management System in the Region	ABL, WH, HZ

Program Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2022, program pengembangan kompetensi KNRM adalah sebagai berikut.

Competency Development Program

Throughout 2022, the KNRM competency development program was as follows.

Pelatihan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Nomination, Remuneration and Risk Management Committee Training

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer

Agustinus Bensik Lomboan (Ketua KNRM)
(KNRM Chairman)

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti Agustinus Bensik Lomboan dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik sub bab Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti Agustinus Bensik Lomboan dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik sub bab Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Hamdi Zainal (Anggota KNRM)
(KNRM Member)

Di sepanjang tahun 2022 Hamdi Zainal tidak mengikuti kegiatan terkait pengembangan kompetensi.
Throughout 2022, Hamdi Zainal did not take part in activities related to competency development.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

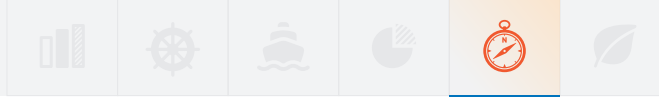
Sepanjang tahun 2022, KNRM telah menjalankan tugas dan berbagai kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kinerja Keuangan serta tingkat risiko tahun 2022 yang disampaikan Direksi melalui laporan kinerja manajemen setiap bulan.
2. *Review* atas identifikasi risiko jangka pendek dalam usulan RKAP tahun 2022 maupun *rolling out* Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP").
3. *Review* bersama dengan Komite Investasi terkait rencana investasi maupun divestasi yang tersebut dalam rencana kerja PTK tahun 2022, khususnya untuk aspek penerapan tingkat risiko Usaha.

Brief Report on the Implementation of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee Activities

Throughout 2022, KNRM has carried out various duties and activities, including:

1. Monitored and evaluated the realization of financial performance and the 2022 risk level submitted by the Board of Directors through management performance reports every month.
2. Reviewed the short-term risk identification in the proposed 2022 RKAP and rolling out long-term plans ("RJPP").
3. Joint reviewed with the Investment Committee regarding the investment and divestment plans mentioned in the 2022 PTK work plan, especially for the aspect of applying the Business risk level.



Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

4. *Monitoring* dan *review* secara periodik Pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan yang meliputi kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sesuai rencana dan target kinerja Direksi tahun 2022.
 5. Memberikan masukan dan pendapat bagi Dewan komisaris atas efektivitas kebijakan pengurusan perusahaan dari aspek manajemen risiko.
 6. Rapat koordinasi dengan Fungsi Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko terkait *monitoring* pelaksanaan mitigasi risiko bulanan sesuai dengan identifikasi risiko yang telah ditetapkan dan status kendala serta tindak lanjut yang diperlukan.
 7. *Review* atas pembaruan status manajemen risiko (*updating risk management plan*) yang disampaikan Direksi PTK secara periodik.
 8. Melakukan evaluasi usulan *Key Performance Indicator* individu anggota Direksi serta melakukan *monitoring* secara periodik atas realisasinya.
 9. Melakukan telaah terhadap Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Karir yang dilakukan oleh Direksi
 10. Membuat rekomendasi terkait remunerasi dan tantien/insentif kinerja untuk Direksi PTK berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direksi. Komite NRM akan melakukan telaah untuk kemudian menyusun rekomendasi atas usulan yang diajukan tersebut kepada Dewan Komisaris sebelum kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai rekomendasi dari Dewan Komisaris.
 11. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diperoleh *selected talent list*.
 12. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan anak dan/atau perusahaan patungan, sebelum diajukan kepada RUPS.
 13. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
 14. Melakukan evaluasi strategi pengelolaan risiko baik operasional, pengembangan Perusahaan dan investasi.
 15. Kunjungan langsung (*site visit*) ke *region* maupun wilayah kerja PTK sebagai bagian dari tahapan *close monitoring*.
4. Monitored and reviewed periodically Risk management that has been carried out by the Company and Subsidiaries which includes compliance in implementing risk management policies stipulated according to the Board of Directors' 2022 performance plans and targets.
 5. Provided input and opinion to the Board of Commissioners on the effectiveness of the Company's management policies from the risk management aspect.
 6. Coordinated meetings with the Risk Management Function and Implementation of Risk Management related to monitoring the implementation of monthly risk mitigation in accordance with the risk identification determined and the status of constraints and the necessary follow-up.
 7. Periodically reviewed the updating risk management plan submitted by the PTK Board of Directors.
 8. Evaluated the proposed Key Performance Indicators for individual members of the Board of Directors and periodically monitored their realization.
 9. Reviewed the Career Development Policies and Procedures carried out by the Board of Directors
 10. Generated recommendations regarding remuneration and performance bonuses/incentives for the PTK Directors based on suggestions submitted by the Directors. The NRM Committee conducted a review and then generated recommendations on the proposal submitted to the Board of Commissioners before submitting it to the Shareholders as a recommendation from the Board of Commissioners.
 11. Validated and calibrated the Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners to obtain a selected talent list.
 12. Evaluated prospective Company Representatives who would be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint ventures, before being submitted to the GMS.
 13. Evaluated the Board of Directors' proposal regarding the Company's organization structure.
 14. Evaluated risk management strategies both operational, Company development and investment.
 15. Direct visits (*site visits*) to regions and working areas of PTK as part of the close monitoring stage.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

Komite Investasi

Komite Investasi berfungsi sebagai organ yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan investasi di Perusahaan. Komite Investasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Dalam Piagam Komite Investasi diatur bahwa masa jabatan anggota Komite Investasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun. Keanggotaan anggota Komite Investasi dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai keputusan Dewan Komisaris.

Susunan dan Profil Anggota Komite Investasi

Di tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan Komite Investasi.

Investment Committee

The Investment Committee functions as an organ that assists the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties on the planning and implementation of investments in the Company. The Investment Committee is directly responsible to the Board of Commissioners.

Term of Office Provision

The Investment Committee Charter stipulates the term of office for members of the Investment Committee with a maximum of 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years. Membership of the Investment Committee members can be ended at any time before the term of office ends according to the Board of Commissioners' decision.

Composition and Profile of Investment Committee Members

In 2022 there was no change in the composition of the Investment Committee.

Susunan Komite Investasi per 31 Desember 2022
Composition of the Investment Committee as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Andi Saiful Haq	Ketua/Komisaris Chairman/Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-187/DEKOM.PTK/2021 tanggal 30 Desember 2021	Mengikuti masa jabatannya sebagai Komisaris Following his Term of Office as Commissioner	
Aldo Maudy Gantirta	Anggota Member	Board of Commissioners Decision Letter No. SK-187/DEKOM.PTK/2021 dated December 30, 2021	9 Oktober 2021 s.d 8 Oktober 2023 October 09, 2021 to October 08, 2023	Ke-2 Second

Andi Saiful Haq
Ketua Komite Investasi/Komisaris
Chairman of the Investment Committee/Commissioner

Profil Ketua Komite Investasi, Andi Saiful Haq, dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam bagian Profil Dewan Komisaris.
Profile of the Investment Committee Chairman, Andi Saiful Haq, is presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners Profile section.

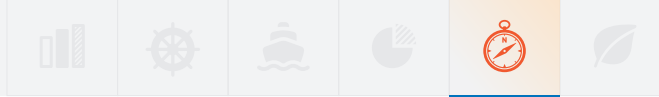


Aldo Maudy Gantirta

Anggota Komite Investasi
Member of the Investment Committee

Periode menjabat: 9 Oktober 2021 s.d tgl bln 2024, Periode ke-1
Term of Office: October 09, 2021 to October 08, 2024, First Period

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Kelahiran Jakarta, 25 Mei 1985, berusia 37 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Atma Jaya (2006). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PTK (2020-2021), selain itu beliau juga menjabat sebagai *Advisor I Upstream, Gas*, dan *NRE Government Assignment PT Pertamina (Persero)* (2020-Maret 2023). Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta, May 25, 1985, 37 years old. He holds a Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Atma Jaya University (2006). Previously, he served as Secretary of the PTK Board of Commissioners (2020-2021). Currently he also serves as *Advisor I Upstream, Gas*, and *NRE Government Assignment of PT Pertamina (Persero)* (2020-March 2023).



Piagam Komite Investasi

Komite Investasi memiliki Piagam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Investasi PTK ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 008/DEKOM.PTK/2022 tanggal 8 Januari 2022. Piagam Komite Investasi tersebut mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komite Investasi.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Investasi

Komite Investasi dalam melakukan tugas pendampingan, pengawasan, serta *monitoring* pelaksanaan investasi PTK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas perencanaan investasi PTK termasuk anak perusahaannya.
2. Melakukan *monitoring* eksekusi pelaksanaan investasi berdasar rencana kerja PTK dan analisa paska investasi (*post mortem evaluation*).
3. Melakukan *review* atas permohonan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana Perusahaan, antara lain:
 - a. Investasi, Divestasi, usulan FUPP.
 - b. Pembentukan Anak Perusahaan.
 - c. Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
 - d. *Marketing*.
 - e. *IT Development*.
4. Melakukan evaluasi kebijakan investasi baik operasional dan pengembangan Perusahaan.
5. Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris termasuk Anak Perusahaan dalam seluruh aktivitas Perusahaan.
6. Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris terkait pengelolaan investasi, pemasaran, dan IT apabila diminta.
7. Membuat rencana kerja tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan atas kebijakan investasi Perusahaan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan investasi.

Komite Investasi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Investment Committee Charter

The Investment Committee has a Charter as a work guideline in carrying out its duties and responsibilities in supervising and providing advice to the Board of Commissioners. The PTK Investment Committee Charter was established based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 008/DEKOM.PTK/2022 dated January 08, 2022. The Investment Committee Charter regulates various matters related to the implementation of the duties, responsibilities and obligations of the Chairman and Members of the Investment Committee.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Investment Committee

In carrying out its duties, the Investment Committee assists, oversees, and monitors the implementation of PTK investments with the following duties and responsibilities:

1. Evaluating the investment planning and risk level of PTK including its subsidiaries.
2. Monitoring the execution of investment implementation based on PTK work plans and post-investment analysis (*post mortem evaluation*).
3. Reviewing requests from the Board of Directors to the Board of Commissioners regarding the Company's plans, including:
 - a. Investment, Divestment, FUPP proposal.
 - b. Establishment of Subsidiaries
 - c. Long Term Company Plan
 - d. Marketing
 - e. IT Development
4. Evaluating investment policies both operational and development of the Company.
5. Reporting and providing recommendations to the Board of Commissioners including subsidiaries in all Company activities.
6. Providing reference materials and information for the needs of the Board of Commissioners regarding investment management, marketing and IT when requested.
7. Creating an annual work plan that is aligned with the annual work plan on the Company's investment policy.
8. Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners related to investment.

The Investment Committee has the following authorities:

1. The Committee works collectively and independently in carrying out its duties and is responsible to the Board of Commissioners.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organs

- Komite mempunyai wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan tentang investasi, penggunaan dana terkait investasi, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari rekan kerja antara lain Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite lain, Tim Investasi, Panitia Lelang Investasi dan/atau fungsi-fungsi operasional Perusahaan, termasuk Anak Perusahaan.
- Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Piagam (*Charter*) termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite Investasi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Apabila diperlukan komite dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu komite terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.

- The Committee has the authority to obtain Company information regarding investments, use of investment-related funds, assets and other resources of the Company related to the implementation of duties.
- Requesting and/or obtaining cooperation from colleagues including the Secretariat of the Board of Commissioners and other Committees, Investment Team, Investment Auction Committee and/or operational functions of the Company, including Subsidiaries.
- Preparing, evaluating, amending and implementing the Charter, including determining the procedures and scope of work of the Investment Committee with the approval of the Board of Commissioners.
- If necessary, the committee may employ experts and/or consultants for assistance related to the Company's business development plan with the written approval of the Board of Commissioners and at the expense of the Company allocated from the Board of Commissioners' budget.

Rapat Kerja Komite Investasi

Komite Investasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Ketua Komite Investasi. Pelaksanaan rapat dapat digabung bersama dengan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap bulan. Melalui Dewan Komisaris, Komite Investasi dapat meminta Direksi atau Pekerja untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan. Setiap hasil rapat akan dituangkan dalam risalah rapat.

Di sepanjang tahun 2022 Komite Investasi melaksanakan rapat sebanyak 3 kali. Rapat ini merupakan rapat yang dipimpin oleh Komite Investasi, di luar rapat gabungan Dewan Komisaris yang membahas mengenai investasi. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Komite Investasi dalam rapat dan hasil rapat-rapat tersebut.

Investment Committee Working Meeting

The Investment Committee holds meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year chaired by its chairman. It can be a joint meeting with the Board of Commissioners which are held every month. Through the Board of Commissioners, the Investment Committee may request Directors or Employees to attend meetings and provide the necessary information. The results of each meeting will be recorded in the minutes of meeting.

Throughout 2022, the Investment Committee held 3 meetings. This meeting is a meeting chaired by the Investment Committee, apart from the joint meeting of the Board of Commissioners which discusses investment. The following shows the frequency and attendance of the Investment Committee at meetings and the results of these meetings.

Frekuensi Kehadiran Rapat Komite Investasi Tahun 2022
Frequency of Investment Committee Meetings Attendance in 2022

Komite Investasi Investment Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Andi Saiful Haq (Ketua) (Chairman)	3	2	67,6%
Aldo Maudy Gantirta (Anggota) (Member)	3	3	100%
Rata-rata Average			83%

Hasil Rapat Komite Investasi Tahun 2022

Results of the 2022 Investment Committee Meeting

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
1	25 Februari 2022 February 25, 2022	Pembahasan Progress Investasi Pembangunan Kapal Yang Terkendala Discussion of Shipbuilding Investment Progress Constrained	Andi Saiful Haq, Aldo Maudy Gantirta, Fungsi SPBD, Internal Audit, Finance, Legal & Relation.
2	10 Agustus 2022 August 10, 2022	Pembahasan Mekanisme Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran ("RKA") Investasi di dalam Anggaran Dasar Discussion on the Mechanism for Amending the Investment Work Plan and Budget ("RKA") in the Articles of Association	Andi Saiful Haq (Ketua/Head) Aldo Maudy Gantirta (Anggota/Member) Fungsi SPBD Legal & Relation
3	10 November 2022 November 10, 2022	Pembahasan Revisi Buku RKAP PTK 2022 (Revisi List Proyeksi Investasi) dan Persiapan Proses KPS3 Discussion of Revision of PTK 2022 RKAP Book (Revision of Investment Projection List) and Preparation of KPS3 Process	Aldo Maudy Gantirta (Anggota/Member) Fungsi SPBD Legal & Relation

Program Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2022 program pengembangan kompetensi Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Competency Development Program

Throughout 2022 the competency development program for the Investment Committee was as follows:

Pelatihan Komite Investasi

Investment Committee Training

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Andi Saiful Haq (Ketua Komite Investasi) (Investment Committee Chairman)			
Pelatihan Training	<i>Merger, Acquisition & Strategic Alliance</i>	31 Maret 2022 March 31, 2022	PT Pertamina Training & Consulting
Aldo Maudy Gantirta (Anggota Komite Investasi) (Investment Committee Member)			
Pelatihan Training	<i>Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices - Driving Sustainable Growth Through Supply Chain Resilience</i>	03 Oktober 2022 October 03, 2022	PT Pertamina Training & Consulting

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2022 Komite Investasi telah menjalankan tugas dan berbagai kegiatan, meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kinerja investasi tahun berjalan yang disampaikan Direksi melalui laporan kinerja manajemen setiap bulan.
2. Melakukan *review* atas rencana investasi jangka pendek dalam usulan RKAP tahun 2022 berikut revisinya, serta *rolling out* rencana jangka panjang (RJPP).

Brief Report on the Implementation of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee Activities

Throughout 2022 the Investment Committee has carried out various duties and activities, including:

1. Monitored and evaluated the realization of investment performance for the year submitted by the Board of Directors through monthly management performance reports.
2. Reviewed short-term investment plans in the 2022 RKAP proposal and its revisions, as well as rolling out the long-term plan (RJPP).

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organs

3. Melakukan *review* atas rencana divestasi atau usulan FUPP yang tersebut dalam rencana kerja PTK tahun berjalan.
4. *Monitoring* dan *review* secara periodik kegiatan investasi yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan yang meliputi kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan investasi yang telah ditetapkan termasuk bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko terkait penerapan tingkat risiko usaha terhadap rencana dan target kinerja Direksi tahun berjalan.
5. Memberikan masukan dan pendapat bagi Dewan Komisaris atas efektivitas kebijakan investasi dan pengurusan perusahaan terkait aspek Pemasaran dan IT.
6. Melakukan rapat koordinasi dengan fungsi *Strategic Planning & Business Development* ("SPBD") dan pelaksana eksekusi proyek investasi terkait pencapaian realisasi fisik bulanan dan status kendala serta tindak lanjut yang diperlukan.
7. Melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Pemasaran dan yang terkait dalam hal penerapan pencapaian target kinerja di bidang Pemasaran dan IT.
8. Melaksanakan kunjungan langsung (*site visit*) ke beberapa proyek investasi sebagai bagian dari tahapan *close monitoring*.
3. Reviewed the divestment plan or FUPP proposal mentioned in the PTK work plan for the year.
4. Periodic monitored and reviewed of investment activities that have been carried out by the Company and its Subsidiaries including compliance in implementing established investment policies including working with the Risk Management Committee regarding the application of business risk levels to the Board of Directors' performance plans and targets for the year.
5. Provided input and opinion to the Board of Commissioners on the effectiveness of investment policies and company management related to marketing and IT aspects.
6. Conducted coordination meetings with the Strategic Planning & Business Development ("SPBD") function and executors of investment project execution regarding the achievement of monthly physical realization and the status of constraints and the necessary follow-up.
7. Conducted coordination meetings with the Directorate of Marketing and related parties in terms of implementing the achievement of performance targets in Marketing and IT.
8. Conducted site visits to several investment projects as part of the close monitoring phase.

Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PTK membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang bertugas membantu dan mendukung kelancaran kegiatan dan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam melakukan pengurusan Perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Sekretaris Dewan Komisaris berperan membantu Dewan Komisaris dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi serta mengkoordinasikan penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Secretary to the Board of Commissioners

Board of Commissioners in PTK has established Secretariat of the Board of Commissioners which is in charge to assist and support smooth running of the activities and duties of the Board of Commissioners in supervising and providing advice to the Board of Directors in managing the Company. This is in accordance with the SOE Minister Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Role of Secretary to the Board of Commissioners is to assist the Board of Commissioners in carrying out administrative activities and coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of the Secretary to the Board of Commissioners are carried out by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.

Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs

Ketentuan Masa Jabatan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun. Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai keputusan Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-123/DEKOM.PTK/2021 tanggal 7 Oktober 2021, Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan dijabat oleh Dian Vita Alpha Suandi.



Dian Vita Alpha Suandi

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Periode menjabat: 09 Oktober 2022 s.d 08 Oktober 2023, Periode ke-2
Term of Office: October 09, 2022 to October 08, 2023, 2nd Period

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Yogyakarta, 4 September 1982, berusia 40 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (2004). Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Advisor I Project Management Office - Upstream* PT Pertamina (Persero) (2020-Maret 2023). Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Yogyakarta, September 4, 1982, 40 years old. He holds a Bachelor's Degree in Industrial Engineering from the Bandung Institute of Technology (2004). Currently he also serves as *Advisor I Project Management Office - Upstream* of PT Pertamina (Persero) (2020-March 2023).

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - a. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris.
 - b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
 - c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
 - d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
 - e. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.
 - f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Term of Office Provision

As stated in the SOE Minister Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the Secretary to the Board of Commissioners is appointed for a maximum term of 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years. The position of Secretary to the Board of Commissioners can be ended at any time before the term of office ends according to the Board of Commissioners' decision.

Board of Commissioners' Secretary Profile

Based on the Board of Commissioners Decision Letter No. SK-123/DEKOM.PTK/2021 dated October 07, 2021, the position of Secretary to the Company's Board of Commissioners is held by Dian Vita Alpha Suandi.

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

The Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners are as follows:

1. The Secretary of the Board of Commissioners conducts activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties in the form of:
 - a. Preparing meetings including materials for the Board of Commissioners' briefing sheet.
 - b. Preparing minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's articles of association.
 - c. Administering the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
 - d. Arranging the Board of Commissioners' Work Plan and Budget.
 - e. Drafting the Reports of the Board of Commissioners.
 - f. Conducting other duties of the Board of Commissioners.

Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat melaksanakan tugas lain berupa: Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
 - a. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui pemberian informasi, *review*, kajian, dan laporan kepada Dewan Komisaris agar fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan efektif, yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu menyusun Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2022 dan Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2023.
2. Memantau, *me-review* dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaruan/penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris serta piagam komite-komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
4. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain: Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi dokumen/surat menyurat Komisaris termasuk mempersiapkan surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan Komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.

2. In addition to carrying out the duties referred to above, the Secretary to the Board of Commissioners as the leader of the Secretariat, carries out other tasks in the form of:
 - a. Ensuring that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and applies GCG principles.
 - b. Providing information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested.
3. Coordinating Committee members, if needed in order to expedite the duties of the Board of Commissioners;
4. As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Duties Implementation of the Secretary to the Board of Commissioners in 2022

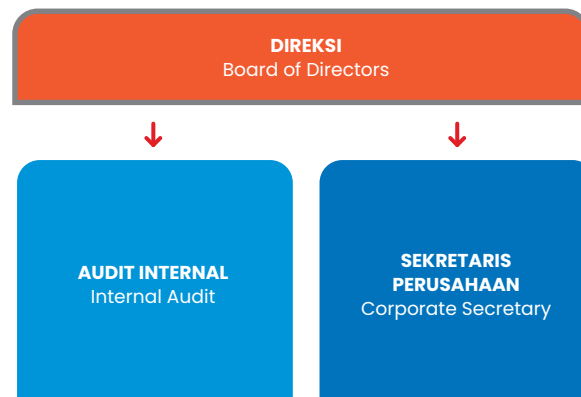
Throughout 2022, Secretary to the Board of Commissioners has carried out his/her functions and duties to assist and support the implementation of the Board of Commissioners' duties in carrying out supervision of the Board of Directors' duties and responsibilities implementation through providing information, reviews, studies, and reports to the Board of Commissioners. Therefore, the supervisory function of the Board of Commissioners has run effectively, which generally includes the following:

1. Assisted in compiling the Board of Commissioners' Work Plan Realization for 2022 and the Board of Commissioners' Work Plan for 2023.
2. Monitored, reviewed and informed developments of the latest laws and regulations to be submitted to the Board of Commissioners, including the preparation, renewal/adjustment of the Board of Commissioners' Decision Letter and the charters of the committees under the Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.
3. Coordinated and held the Board of Commissioners meetings including preparing meeting schedules, meeting materials, compiling and administering the minutes of the Board of Commissioners' meetings, submitting suggestions and opinions of the Board of Commissioners based on the results of the Board of Commissioners meeting to the Board of Directors and monitoring the follow-up of the Board of Commissioners' suggestions and opinions.
4. Assisted and supported the implementation of the duties of the Committees under the Board of Commissioners as part of the duties of the Board of Commissioners based on applicable regulations, including: Conducting administrative duties related to the smoothness of the Commissioners' duties, namely managing, storing and administering the Commissioners' documents/correspondence, including preparing approval letters as well as strategic input/suggestions from the Board of Commissioners to be submitted to the Board of Directors.

Organ Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Organs

Direksi membentuk Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal dalam rangka mendukung kinerja Direksi khususnya pada aspek keadministrasian dan pengawasan internal.

The Board of Directors forms a Corporate Secretary and Internal Audit in order to support its performance, especially in the administration and internal control aspects.



Sekretaris Perusahaan

Kewajiban membentuk Sekretaris Perusahaan berlaku bagi Perusahaan sebagai Anak Perusahaan BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN berikut perubahannya. Fungsi tersebut adalah untuk menjamin bahwa penyelenggaraan administrasi dan tindakan korporasi yang dilakukan Perusahaan telah mematuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip GCG, melindungi Perusahaan dari sisi hukum, membina relasi dengan lembaga pemerintahan terkait serta memastikan pengelolaan dokumen perusahaan. Peranan dan tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi BUMN tetapi juga bagi seluruh entitas anaknya.

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemegang Saham, bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen dan notulen rapat, penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat serta menangani hubungan dengan para Pemangku Kepentingan, masyarakat, serta pihak-pihak internal.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Keputusan No. SKMJ-0003/K20500/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan dari Manager Relations PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur menjadi *Corporate Secretary* PT Pertamina Trans Kontinental, jabatan Sekretaris Perusahaan dipercayakan kepada Frits Tommy H. Sibuea.

Corporate Secretary

Obligation to appoint a Corporate Secretary applies to the Company as a SOEs subsidiary as stipulated in the SOE Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 01, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOE and its amendments. This function is to ensure that the administration and corporate actions carried out by the Company comply with the prevailing laws and regulations and are in accordance with the principles of GCG, protect the Company from the legal side, maintain relationships with relevant government agencies and ensure the management of company documents. These roles and responsibilities do not only apply to SOEs but also to all their subsidiaries.

The Corporate Secretary acts as a representative of the Company in dealing with Shareholders, is responsible for document administration and minutes of meeting, formulating policies, planning and controlling corporate communications as well as handling relationships with Stakeholders, the public, and internal parties.

Corporate Secretary Officer

Based on Decision Letter No. SKMJ-0003/K20500/2020-S8 concerning Transfer of Position from Manager Relations of PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur to Corporate Secretary of PT Pertamina Trans Kontinental, the position of Corporate Secretary was entrusted to Frits Tommy H. Sibuea.

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

Frits Tommy H. Sibuea
Sekretaris Perusahaan/Vice President (VP) Legal & Relation
 Corporate Secretary/Vice President (VP) Legal & Relations
Menjabat sejak 1 Desember 2020
 Served since December 01, 2020

Warga negara Indonesia, berdomisili Tangerang, Banten. Lahir di Pekanbaru, 2 Juni 1968, berusia 54 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung (1993), dan Pascasarjana dari Bond University Australia (1999). Sebelum menjabat sebagai *Corporate Secretary* PTK, beliau pernah menjabat sebagai *Manager Relations* – PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Indonesian citizen, domiciled in Tangerang, Banten. Born in Pekanbaru, June 02, 1968, 54 years old. He earned a Bachelor's Degree in Communication from Padjadjaran University, Bandung (1993), and a Master's Degree from Bond University Australia (1999). Prior to serving as *Corporate Secretary* of PTK, he served as *Manager Relations* – PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

Fungsi Jabatan

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh *Vice President (VP) Legal & Relation* yang memiliki posisi strategis untuk:

1. Mengelola hubungan perusahaan dengan media, investor, *community*, dan *stakeholders*.
2. Memastikan dan menetapkan kegiatan protokoler direksi di PTK.
3. Mengelola perencanaan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, serta taat aturan melalui perencanaan dan pelaksanaan program komunikasi dan *public relations* yang komprehensif, dilakukan untuk membangun dan memelihara citra positif korporasi PT Pertamina Trans Kontinental di mata masyarakat dan *stakeholders* sebagai perusahaan yang kompetitif dan peduli.
4. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum (baik litigasi maupun non-litigasi) dan kehumasan perusahaan.
5. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan regulasi pemerintah, yang semuanya itu memiliki komitmen kepatuhan/*compliance*.

Selain itu pelaksanaan fungsi jabatan tersebut juga termasuk menjalankan fungsi *Legal Counsel* dan fungsi sebagai *Relations*, sebagai berikut:

- Fungsi *Legal Counsel*
 - a. Memberikan layanan legal terkait kegiatan operasional Perusahaan, dengan mengacu kepada *Key Business Issues* dan *Key Legal Issues* yang sudah ditetapkan sebelumnya.
 - b. Mengidentifikasi dan perumusan aspek-aspek hukum, penyusunan rekomendasi pertimbangan hukum, penanganan perkara (perdata, pidana, dan publik).
 - c. Melakukan *drafting/reviewing* perjanjian/dokumentasi legal, negosiasi perjanjian, standarisasi perjanjian/dokumentasi legal yang bersifat rutin, rencana, usulan, dan implementasi proses pengadaan jasa hukum eksternal yang ditujukan bagi user.
 - d. Memberi masukan/usulan Pertamina terhadap rancangan peraturan perundang-undangan

Position Function

Vice President (VP) Legal & Relations as Corporate Secretary has a strategic position to:

1. Manage the Company's relationship with the media, investors, community, and stakeholders.
2. Ensure and determine the protocol activities of the directors in PTK.
3. Manage the planning and implementation of *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, and comply with regulations through planning and implementing a comprehensive communication and public relations program, carried out to build and maintain a positive corporate image of PT Pertamina Trans Kontinental in the eyes of the public and stakeholders as a competitive and caring company.
4. Provide legal considerations and assistance (both litigation and non-litigation) and corporate public relations.
5. Ensure the Company's compliance with the implementation of government regulations, all of which have a commitment to compliance.

In addition, the implementation of the Position Function is also included in the *Legal Counsel* function and functions as a *Relations*, as follows:

- Legal Counsel Function
 - a. Provide legal services related to the Company's operational activities, with reference to *Key Business Issues* and *Key Legal Issues* previously determined.
 - b. Identify and formulate legal aspects, compiling recommendations for legal considerations, handling cases (civil, criminal, & public).
 - c. Draft/review legal agreements/documentation, negotiation agreements, standardize regular legal agreements/documentation, plan, propose, and implement the external legal service procurement process aimed at users.
 - d. Provide feedback/suggestions for Pertamina on the existing draft laws and regulations related to

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

maupun peraturan perundang-undangan yang telah ada terkait kegiatan bisnis perusahaan sesuai ruang lingkup PTK berdasarkan kebijakan pembagian kewenangan dengan Fungsi Legal Pertamina (*Holding*) serta interpretasi atas suatu ketentuan peraturan internal perusahaan.

- Fungsi Relations
 - a. Mengelola relasi dan komunikasi perusahaan, baik dengan investor/komunitas keuangan, regulator, *stakeholder*, mitra kerja sama, media dan pelanggan eksternal perusahaan.
 - b. Mengelola kegiatan Program Kemitraan, Bina Lingkungan, dan *Corporate Social Responsibility*.
 - c. Menyusun Sistem & Tata Kerja dan *Compliance*.
 - d. Memastikan terlaksananya *corporate activity* (kegiatan pekerja, RUPS, aktivitas Dewan Komisaris dan Direksi, dan *corporate event* lainnya), untuk mendukung terbentuknya persepsi positif dan reputasi korporasi.
 - e. Memastikan terbinanya hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait.

the Company's business activities in accordance with the scope of PTK based on the policy of authority division with Pertamina's Legal Function (*Holding*) and interpretation of a provision of the Company's internal regulations.

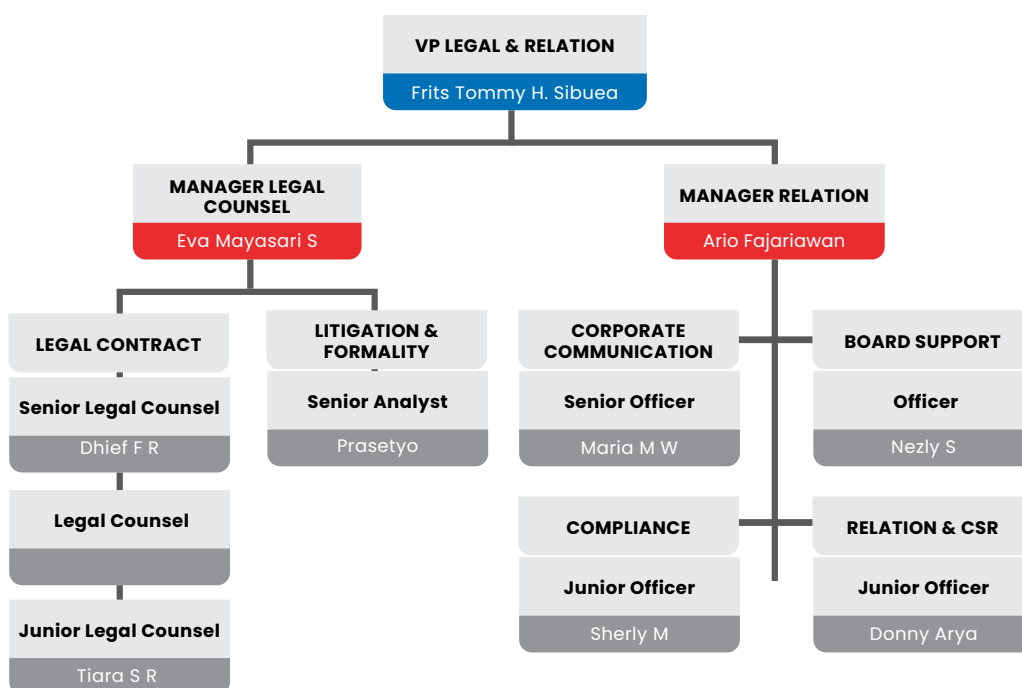
- Relations Function
 - a. Manage company relations and communications, both with investors/ financial community, regulators, stakeholders, cooperation partners, media and external customers of the Company.
 - b. Manage the activities of the Partnership Program, Community Development, and Corporate Social Responsibility.
 - c. Develop System & Work Procedures and Compliance.
 - d. Ensure the implementation of corporate activities (employee activities, GMS, Board of Commissioners and Directors activities, and other corporate events, to support the formation of positive perceptions and corporate reputation.
 - e. Ensure the establishment of good relations with related parties.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan PTK bertanggung jawab kepada Direksi atas pelaksanaan tugasnya. Adapun struktur organisasi struktur unit Corporate Secretary dapat dilihat di bawah ini.

Corporate Secretary Organization Structure

The PTK Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors for carrying out his/her duties. The organization structure of the Corporate Secretary unit is as follows:



Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

Per 31 Desember 2022, Sekretaris Perusahaan memiliki 10 karyawan yang bertugas pada fungsi-fungsi seperti yang telah dijelaskan pada bagan di atas.

As of December 31, 2022, the Corporate Secretary has 10 employees in charge of the functions described in the chart above.

Jabatan Position	Jumlah Personel (orang) Total Employees
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary	1
Manager Legal Counsel	1
Manager Relations	1
Senior Legal Counsel	1
Senior Analyst Litigation & Formality	1
Senior Corporate Communication	1
Officer Board Support	1
Junior Legal Counsel	1
Junior Officer Compliance	1
Junior Officer Relation & CSR	1
Total	10

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

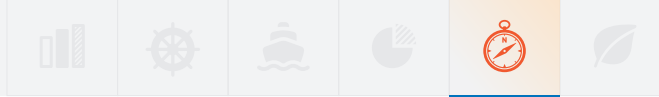
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan merekomendasi sistem tata kerja *Legal & Relation* kepada direksi berdasarkan pedoman yang berlaku.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran jangka pendek dan jangka panjang corporate secretary serta memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaannya.
3. Memastikan pengesahan dokumen RJPP dan RKAP dalam RUPS sesuai dengan target yang ditentukan.
4. Mengkoordinir agenda rapat direksi dan rapat manajemen.
5. Membangun, memelihara, dan meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan *stakeholders*, serta meminimalisir dan mengindarkan perusahaan dari timbulnya citra negatif, permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi serta kehumasan yang berdampak pada Perusahaan.
6. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program-program CSR secara efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, sebagai bagian dari kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat.
7. Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG.
8. Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan pemerintah baik secara internal maupun eksternal perusahaan.
9. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan Perusahaan, termasuk agenda

Duties, Responsibilities, and Authority of Corporate Secretary

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Evaluate and recommend Legal & Relations work system to the Board of Directors based on the prevailing guidelines.
2. Prepare short-term and long-term work plans & budgets for the Corporate Secretary as well as monitor, and evaluate their implementation.
3. Ensure the ratification of the RJPP and RKAP documents at the GMS in accordance with the specified targets.
4. Coordinate the agenda of the Board of Directors meetings and management meetings.
5. Build, maintain, and enhance the Company's positive image in the eyes of the public and stakeholders, as well as minimize and prevent the Company from creating a negative image, litigation and non-litigation legal issues and public relations with an impact on the Company.
6. Evaluate and monitor the implementation of CSR programs effectively, in accordance with predetermined plans and on target, as part of corporate compliance while enhancing the Company's positive image in the eyes of the public.
7. Ensure reports on activities of development, guidance, implementation and enforcement of the principles of Good Corporate Governance.
8. Communicate the Company's and Government's policies both internally and externally to the Company.
9. Organize corporate secretarial administration activities, including the agenda of the Board



Organ Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Organs

Direksi, pemeliharaan *database*, dokumen asli, dan laporan-laporan Perusahaan.

10. Menyetujui dan memastikan kegiatan protokoler Direksi Perusahaan.
11. Mengendalikan data dan informasi manajemen yang akurat dan valid bagi kepentingan Perusahaan dan pemegang saham secara periodik dan tahunan.
12. Memastikan terbarunya peraturan-peraturan perundangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan proses bisnis dan produk (*compliance issue*), serta perijinan dan aspek hukum lain bagi Perusahaan dan anak perusahaan secara tepat waktu.
13. Menyetujui laporan bulanan/periodik.

Wewenang Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki kewenangan yaitu:

1. Atas sepengetahuan Direksi mengadakan dan membina hubungan dengan para pihak sebagai upaya meningkatkan loyalitas para *stakeholder*;
2. Memberikan keterangan pers (*press release*) mengenai kebijakan Perusahaan;
3. Memberikan pertimbangan hukum kepada Direksi dalam merumuskan suatu peraturan atas kebijakan;
4. Merekomendasikan konsep perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh Direksi;
5. Mengkoordinasikan penyusunan *Annual Report*;
6. Atas persetujuan Direksi mewakili Perusahaan dalam rangka menyelesaikan perselisihan hukum dengan pihak lain di dalam maupun di luar pengadilan;
7. Menunjuk *lawyer*/penasihat hukum, notaris untuk sebagai mitra penyelesaian perkara hukum dan formalitas dokumen Perusahaan.

Pedoman Kerja dan Laporan Berkala Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memberikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta tugas lainnya dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi. Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi rencana kerja dan sistem tata kerja Corporate Secretary;
2. Membangun, memelihara dan meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan, serta meminimalisir dan menghindarkan Perusahaan dari timbulnya citra negatif, permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi serta kehumasan yang berdampak pada Perusahaan;
3. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan Perusahaan, pengelolaan arsip, dokumen asli, dan laporan-laporan Perusahaan;

of Directors, database maintenance, original documents, and company reports.

10. Approve and ensure the protocol activities of the PTK directors.
11. Control accurate and valid management data and information for the benefit of the Company and shareholders periodically and annually.
12. Ensure the updating of laws and regulations and other regulations related to business processes and products (*compliance issue*), as well as permits and other legal aspects for the Company and its subsidiaries in a timely manner.
13. Approve monthly/periodic reports.

Corporate Secretary Authority

The Corporate Secretary holds the authority, as follows:

1. At the knowledge of the Board of Directors establishes and fosters relationships with parties in an effort to increase the loyalty of stakeholders;
2. Provide a press statement (*press release*) regarding company policy;
3. Provide legal considerations to the Board of Directors in formulating a regulation on policy;
4. Recommend the concept of a cooperation agreement that will be signed by the Board of Directors;
5. Coordinate the preparation of Annual Reports;
6. With the approval of the Board of Directors representing the Company in order to resolve legal disputes with other parties inside and outside the court;
7. Appoint lawyers/legal advisors, notaries to be partners in solving legal cases and corporate document formalities.

Work Guidelines and Periodic Reports of The Corporate Secretary

The Corporate Secretary provides periodic reports on the implementation of his duties and responsibilities as well as other duties in assisting the implementation of the Board of Directors' duties. Throughout 2022, the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities with the following details:

1. Planning, directing, monitoring and evaluating the work plan and work system of the Corporate Secretary;
2. Building, maintaining and enhancing the Company's positive image in the eyes of the public and stakeholders, as well as minimizing and avoiding the Company from the emergence of negative images, litigation and non-litigation legal issues and public relations with an impact on the Company;
3. Carrying out corporate secretarial administration activities, managing archives, original documents, and company reports;

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

4. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (<i>briefing sheet</i>) serta membuat risalah rapat Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan; 5. Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan Pemerintah, baik secara internal maupun eksternal Perusahaan; 6. Mengendalikan data dan informasi manajemen yang akurat dan valid bagi kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham secara periodik dan tahunan; 7. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program-program CSR secara efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, sebagai bagian dari kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat; 8. Memastikan ter-updatenya peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan proses bisnis dan produk (<i>compliance issue</i>), serta perizinan dan aspek hukum lain bagi Perusahaan dan Anak Perusahaan secara tepat waktu; 9. Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG.	4. Preparing meetings including meeting materials (<i>briefing sheets</i>) and preparing minutes of meetings of the Directors in accordance with the provisions of the Company's articles of association; 5. Communicating Company and Government policies, both internally and externally of the Company; 6. Controlling data and management information that is accurate and valid for the interests of the Company and the Shareholders periodically and annually; 7. Evaluating and monitoring the implementation of CSR programs effectively, in accordance with pre-determined plans and on target, as part of corporate compliance while enhancing the Company's positive image in the eyes of the public; 8. Ensuring the updating of laws and regulations relating to business processes and products (<i>compliance issues</i>), as well as licensing and other legal aspects for the Company and its subsidiaries in a timely manner; 9. Ensuring reports on the activities of developing, guiding, implementing and enforcing GCG principles.

Sepanjang tahun 2022 Sekretaris Perusahaan telah melakukan program kerja yang terdiri dari berbagai kegiatan dan penyampaian laporan. Realisasi program kerja Sekretaris Perusahaan tersebut antara lain:

1. *Training/Pelatihan*
Mengikuti berbagai pelatihan/*training* dalam rangka Pengembangan Kompetensi Pelatihan/*training* Sekretaris Perusahaan tahun 2022.
2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan Koordinasi Keputusan Sirkuler Pemegang Saham
Selama tahun 2022, PTK telah melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu, di sepanjang tahun 2022 Pemegang Saham telah mengeluarkan 13 keputusan secara sirkuler yang telah dijelaskan pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bagian Rapat Umum Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini.
3. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris:

Selama tahun 2022 Direksi telah mengadakan rapat internal Direksi sebanyak 19 kali rapat dan 19 kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. Adapun rincian penyelenggaraan Rapat Direksi telah diuraikan pada Bab Direksi Laporan Tahunan ini. Sedangkan Rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris telah diuraikan pada Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Throughout 2022, the Corporate Secretary has carried out a work program consisting of various activities and submission of reports. The realization of the work program for the Corporate Secretary includes:

1. *Training*
Participating in various trainings in the context of Competency Development for Corporate Secretary Training in 2022.
2. General Meeting of Shareholders ("GMS") and Coordination of Shareholder Circular Decisions

During 2022, PTK has conducted Annual GMS 1 (one) time. In addition, in the year 2022, Shareholders have issued 13 circular resolutions which explained in the Chapter on Corporate Governance General Meeting of Shareholders sub-section in this Annual Report.

3. Organizing and documenting the Board of Directors Meeting and its Joint Meeting with the Board of Commissioners
During 2022 the Board of Directors has held 19 internal meetings and 19 joint meetings with the Board of Commissioners. The details of the Board of Directors meeting have been described in the Board of Directors Chapter of this Annual Report. Meanwhile, joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners have been described in the Chapter of the Board of Commissioners in this Annual Report.

4. Penyampaian laporan berkala:

Sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap tahunnya kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

4. Submission of periodic reports

As an accountability for the implementation of his duties, the Corporate Secretary has prepared and submitted a Periodic Report annually to the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders.

Penyampaian Laporan Berkala
Submission of periodic reports

Jenis Laporan Submission of Periodic Reports	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Pemegang Saham Shareholders
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2022 Management Report Quarter I 2022	v	v	v
Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2022 Management Report Quarter II 2022	v	v	v
Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2022 Management Report Quarter III 2022	v	v	v
Laporan Manajemen tahun 2022 Management Report 2022	v	v	v
Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Annual Report 2022	v	v	v
Laporan Sekretaris Perusahaan Semester I tahun 2022 Corporate Secretary Report Semester I 2022	v	v	v
Laporan Sekretaris Perusahaan Semester II tahun 2022 Corporate Secretary Report Semester II 2022	v	v	v

v: ya | x = tidak
v: yes | x = no

5. Menyusun dan me-review pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan PTK, serta mensosialisasikan dan memantau implementasinya.

6. Pelaksanaan Program CSR:

Selama tahun 2022 PTK telah melaksanakan berbagai program CSR sebagaimana disampaikan pada Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

7. Menerbitkan Siaran Pers:

Sekretaris Perusahaan selalu berupaya membangun komunikasi positif dan persepsi publik di antaranya melalui siaran pers.

5. Compiling and reviewing the guidelines for the Procedure for Letters and Archives of PTK, as well as to socialize and monitor their implementation.

6. Implementation of CSR Programs

During 2022 PTK has carried out various CSR programs as presented in the Sustainability Report as an integral document of this Annual Report.

7. Publishing a Press Release

The Corporate Secretary always strives to build positive communication and public perception, among others, through press releases.

Pengelolaan Akses Data dan Informasi Perusahaan

PTK menerapkan budaya Perusahaan dalam setiap kegiatan bisnisnya untuk mencapai visi dan misi Perusahaan dengan menerapkan GCG melalui Pedoman Kode Etik Perusahaan. Pedoman Kode Etik Perusahaan digunakan oleh seluruh Insan PTK sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di dalam Perusahaan maupun di luar Perusahaan.

Management of Access to Company Data and Information

PTK implements corporate culture in all its business activities to achieve the Company's vision and mission by implementing GCG through the Company's Code of Conducts Guidelines. The Company's Code of Conducts guidelines are used by all PTK Personnel as a basis for carrying out their duties and making decisions in accordance with prevailing regulations both within the Company and outside the Company.

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

PTK menjamin tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada publik melalui berbagai media. PTK mempertimbangkan kemudahan akses setiap *stakeholder* termasuk masyarakat agar informasi dan data perusahaan dapat tersampaikan dengan baik, cepat dan aktual dengan perantara media *online* seperti *website* dan PTK portal serta media cetak seperti *Annual Report* dan *Sustainability Report* yang sebagian di antaranya disediakan juga dalam bentuk yang bisa diakses secara *online*. Namun PTK juga menyediakan media informasi secara langsung melalui siaran pers dan Forum Komunikasi Internal untuk insan PTK.

Alamat Kantor Korespondensi

Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450
Telp: (+6221) 31923005
Fax: (+6221) 3106804
E-mail: pusat.ptk@pertamina-ptk.com
Situs web: www.pertamina-ptk.com

Keterbukaan dalam Komunikasi Internal

Komunikasi internal merupakan sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan terbentuknya hubungan timbal balik antar pihak internal dalam organisasi. Oleh karena itu, PTK senantiasa menciptakan komunikasi dua arah kepada pekerja melalui berbagai media komunikasi.

Komunikasi internal di perusahaan dibangun dalam aktivitas-aktivitas operasional seperti *meeting* internal, *townhall meeting*, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi internal dalam bentuk selain aktivitas operasional melalui kegiatan *employee gathering/family gathering*.

Keterbukaan dalam Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal merupakan bentuk transparansi kepada pihak eksternal. Komunikasi eksternal dengan para pemangku kepentingan senantiasa dijaga agar tercipta hubungan timbal balik antara Perusahaan dan pemangku kepentingan. Selain itu komunikasi eksternal juga sebagai bentuk kewajiban pemenuhan keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulator.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") merupakan forum bagi pemegang saham dalam memutuskan arah Perusahaan serta forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada para pemegang saham.

PTK guarantees availability of corporate information and data access to public through various media. PTK considers accessibility for each stakeholder, including the community therefore company information and data can be conveyed properly, quickly, and accurately with online media intermediaries such as websites and PTK portals as well as print media such as Annual Reports and Sustainability Reports, some of which are also provided online to be accessed easily. However, PTK also provides direct media information via press releases and Internal Communication Forum for PTK personnels.

Correspondence Office Address

Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450
Phone: (+6221) 31923005
Fax: (+6221) 3106804
E-mail: pusat.ptk@pertamina-ptk.com
Website: www.pertamina-ptk.com

Disclosure in Internal Communication

Internal communication is a means of communication carried out to disseminate information, both conveying and receiving, and the establishment of reciprocal relationships between internal parties in the organization. Therefore, PTK always creates two-way communication to employees through various communication media.

Internal communication in the company is built in operational activities such as internal meetings, townhall meetings, and others. Whereas internal communication in the form of other than operational activities through employee gathering/family gathering.

Disclosure in External Communication

External communication is a means of transparency to external parties. External communication with stakeholders is always maintained in order to create a reciprocal relationship between the Company and stakeholders. In addition, external communication is also a form of obligation to fulfill the disclosure of information as stipulated by the regulator.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is a forum where the shareholders decide the direction of the Company and a forum for the Board of Commissioners and Board of Directors to report and being responsible upon their duty implementation and performance to shareholders.

Laporan Tahunan

PTK rutin menerbitkan laporan tahunan yang menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan pada tahun buku tersebut. Laporan tahunan didistribusikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Laporan Keberlanjutan

PTK juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan Perusahaan secara menyeluruh melalui Laporan Keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan akan disampaikan kepada pemegang saham, regulator, organisasi massa, media massa dan masyarakat.

Siaran Pers

Sebagai bentuk informasi kepada pemangku kepentingan dalam bentuk berita. Sepanjang tahun 2022, PTK telah melakukan siaran pers untuk beberapa berita mengenai informasi positif perusahaan.

Situs Web

PTK menyediakan layanan akses informasi dan data perusahaan melalui situs web perusahaan di alamat www.pertamina-ptk.com. Informasi terkait perusahaan yang dimuat pada situs web perusahaan.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

PTK berupaya menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan guna menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Sebab pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada (perusahaan).

PTK melakukan hubungan dan komunikasi dengan seluruh *stakeholder*-nya melalui kegiatan CSR, vendor day, publikasi berita melalui *website*, publikasi melalui sosial media, penerbitan bulletin cetak dan e-buletin dan siaran pers di media *online* serta publikasi berita melalui media cetak yang memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan antara kepatuhan aturan yang berlaku dengan kinerja Perusahaan.

Dalam upaya menjaga komunikasi yang baik kepada pihak *stakeholder*, selama tahun 2022 telah melakukan berbagai rangkaian aktivitas yang dijelaskan di bawah ini.

Aktivitas Pemangku Kepentingan Stakeholders Activities

Aktivitas Activity	Frekuensi Frequency
CSR	27 Program
Vendor Day	3 kali pertahun 3 times a year
Publikasi Berita News Publication	2 kali Setiap bulan 2 times Every month

Annual Report

PTK regularly publishes annual report that presents information regarding the Company's performance during the fiscal year. The annual report is distributed to shareholders and stakeholders.

Sustainability Report

PTK also provides comprehensive information regarding the Company's activities through the Sustainability Report. Sustainability Report will be submitted to our shareholders, regulators, mass organizations, mass media and public.

Press Release

As a manifestation of information to stakeholders in form of news. Throughout 2022, PTK has distributed press releases regarding some news about positive Company's information.

Website

PTK provides corporate information and data access through the official website at www.pertamina-ptk.com. Information related to the Company are also presented on the official website.

Relationships with Stakeholders

PTK strives to maintain good relations and communication with stakeholders to maintain the sustainability of the Company's business. Because stakeholders are parties who have interests both directly and indirectly to the Company.

PTK engages and communicates with all of stakeholders through CSR activities, vendor days, news publications through websites, publications through social media, publishing bulletins and e-bulletins and press releases in online media and news publications through print media who has the responsibility to integrate compliance with applicable rules and company performance.

In effort to maintain good communication with stakeholders, during 2022, various series of activities have been carried out which are described as follows:

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

Berbagai media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, siklus bisnis, dan pencapaian kinerja Perusahaan dapat juga dilihat pada tabel di bawah ini:

The various communication media used by the Company to convey data and information related to the operational activities, business cycle and achievement of the Company's performance can also be seen in the table below:

Kepada To	Bentuk Komunikasi Communication Form
Regulator Regulators	Surat dan laporan Letters and Reports
Pemegang Saham Shareholders	RUPS dan media massa. GMS and Mass Media
Lembaga Publik Public Institution	Notaris & Konsultan Hukum Notary & Legal Consultant
Konsumen Consumer	Media cetak dan media <i>online</i> , Indeks Kepuasan Pelanggan Print Media and Online Media, Customer Satisfaction Index
Pekerja Worker	Manajemen <i>Review</i> , Pelatihan, Media Komunikasi Internal Management Review, Training, Internal Communication Media
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	Media Cetak dan media <i>online</i> nasional, <i>Annual Report</i> , Sosial Media (Instagram) Print Media and National Online Media, Annual Report, Social Media (Instagram)
Mitra Kerja dan Rekanan Partners and Vendors	<i>Vendor Day</i> , <i>Vendor Rating</i>
Organisasi Profesi Professional Organization	INSA
Masyarakat/Umum General Public	Sosial media, media cetak dan media <i>online</i> <i>Social Media</i> , <i>Print Media</i> and <i>Online Media</i>

*) Situs web tidak dimasukkan ke bagian ini karena sifatnya yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.
*) Websites are not included in this section because they are open and accessible to the public.

Program Pengembangan Kompetensi

SDM Sekretaris Perusahaan senantiasa melakukan *upgrade* pengetahuan maupun kemampuan pada setiap tahunnya, guna meningkatkan kualitas perannya dalam membantu Direksi untuk mengembangkan roda bisnis Perusahaan.

Competency Development Program

The HR of the Corporate Secretary regularly upgrades their knowledge and skills every year, in order to improve the quality of their role in assisting the Board of Directors in developing the Company's business wheels.

Sepanjang tahun 2022 Sekretaris Perusahaan mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Throughout 2022 the Corporate Secretary participated in the competency development program as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Corporate Secretary Competency Development Program for 2022

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Frits Tommy H. Sibuea – VP Legal & Relation	Pelatihan Training	Leadership SUPREME Mandatory Training	08 Juli 2022 July 08, 2022	HSE Training Center
Frits Tommy H. Sibuea – VP Legal & Relation	Pelatihan Training	Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Training: ESG Foundation	08 Juli 2022 July 08, 2022	PT LAPI ITB
Ario Fajariawan – Manager Relation	Pelatihan Training	Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Training: ESG Foundation	08 Juli 2022 July 08, 2022	PT LAPI ITB
Ario Fajariawan – Manager Relation	Pelatihan Training	Training Internal Audit ISO 37001:2016 Internal Audit Training of ISO 37001:2016	17 – 18 Oktober 2022 October 17 – 18, 2022	PT TUV NORD Indonesia

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2022
Corporate Secretary Competency Development Program for 2022

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Maria Mardiana Wati	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Program Sertifikasi Uji Kompetensi Public Relation Tahun 2022 Angkatan V 2022 Public Relations Competency Test Certification Program Batch V	10 – 18 Maret 2022 March 10-18, 2022	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PUBLIC RELATIONS INDONESIA Indonesian Certification Agency in Public Relations
Dony Arya Adhitama	Pelatihan Training	Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Training: ESG Foundation	08 Juli 2022 July 08, 2022	PT LAP I ITB
Sherly Margareth	Pelatihan Training	Training Internal Audit ISO 37001:2016 Internal Audit Training of ISO 37001:2016	17 – 18 Oktober 2022 October 17-18, 2022	PT TUV NORD Indonesia

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan strategi maupun rencana kerja terkait penyampaian informasi kepada publik. Dalam pelaksanaan internalisasi GCG, sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan secara berkesinambungan dalam upaya membudayakan penerapan GCG di seluruh lingkungan Perusahaan. Evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan diukur dengan KPI Sekretaris Perusahaan.

Corporate Secretary Performance Evaluation

The Corporate Secretary has implemented strategies and work plans related to conveying information to the public. In carrying out GCG internalization, the Corporate Secretary has carried out various activities on an ongoing basis in effort to cultivate the implementation of GCG throughout the Company. Evaluation of the Corporate Secretary performance is measured by the Corporate Secretary KPI.

Audit Internal

Internal Audit adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* dan *consulting* secara independen dan obyektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan (PT Pertamina (Persero) selaku *Holding*, PT Pertamina International Shipping selaku *Subholding Integrated Marine Logistics*, PT Pertamina Trans Kontinental dan Anak Perusahaan) dalam mencapai tujuannya. Fungsi Internal Audit mempunyai beberapa tanggung jawab di antaranya adalah melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis perusahaan serta memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai. Peran pengawasan oleh Fungsi Internal Audit adalah berupa kegiatan audit (*assurance provider*) maupun konsultasi yang dilaksanakan secara independen dan obyektif. Dalam perkembangannya, peran konsultasi semakin proaktif dengan menjadi *problem solver*, *insight generator*, dan *trusted advisor*.

Internal Audit

Internal Audit is a function that provides assurance and consulting services independently and objectively by doing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve governance, risk management and internal control to provide added value to the Company (PT Pertamina (Persero) as Holding, PT Pertamina International Shipping as Integrated Marine Logistics Subholding, PT Pertamina Trans Kontinental and Subsidiaries) in achieving its goals. The Internal Audit function has several responsibilities including carrying out supervisory activities through assurance and consulting activities in all areas of the Company's operational and business activities and ensuring that aspects of integrity, objectivity, confidentiality and competence are implemented adequately. The role of supervision by the Internal Audit Function is in the form of audit activities (*assurance provider*) and consultations which are carried out independently and objectively. In its development, the role of consulting has become more proactive by becoming a problem solver, insight generator, and trusted advisor.

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

Kegiatan audit tetap dilaksanakan bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atau memberikan penilaian atas kecukupan pengendalian internal perusahaan adalah dalam rangka memberikan opini atas penilaian tersebut. Metodologi *Risk Based Audit* (RBA) digunakan pada kegiatan audit dengan tujuan menilai kecukupan pengendalian internal dengan pendekatan *integrated* atau *non integrated* audit. Pendekatan *integrated* audit bertujuan untuk menghasilkan opini yang lebih komprehensif mencakup aspek bisnis dan teknologi informasi yang melekat pada proses bisnis perusahaan. Sedangkan *non integrated* audit bertujuan menghasilkan opini yang fokus terhadap aspek bisnis perusahaan.

Kegiatan konsultasi bertujuan untuk memberikan alternatif solusi permasalahan yang dihadapi manajemen terkait peran Internal Audit sebagai internal konsultan perusahaan dari aspek pengelolaan risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen.

Dasar Penerapan Pengawasan Internal

Fungsi Internal Audit PTK dibentuk berdasarkan:

1. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab VI pasal 67, 68 dan 69 dengan sebutan fungsi Internal Audit.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.
3. Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN No. S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan *Good Corporate Governance*, yang diperbarui dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

Piagam Audit Internal

Piagam internal audit telah disahkan yang tertuang dalam piagam internal audit antara Direksi dan Komisaris tanggal 31 Desember 2022. Piagam Internal Audit (Audit Charter) yang menginformasikan tentang visi, misi, tujuan, ruang lingkup, prinsip utama, kedudukan, independensi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta standar pelaksanaan.

Audit activities are still carried out with the aim of assessing compliance with applicable regulations or providing an assessment of the adequacy of the Company's internal control in order to provide an opinion on this assessment. The Risk Based Audit (RBA) methodology is used in audit activities with the aim of assessing the adequacy of internal control with an integrated or non-integrated audit approach. The integrated audit approach aims to produce a more comprehensive opinion covering business and information technology aspects that are inherent in the Company's business processes. Meanwhile, the non-integrated audit aims to generate opinions that focus on the Company's business aspects.

Consultation activities aim to provide alternative solutions to problems faced by management related to Internal Audit's role as an internal company consultant from the aspects of risk management, control, and corporate governance without taking over management's duties and responsibilities.

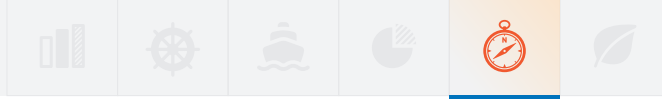
Basic Implementation of Internal Control

PTK Internal Audit function is formed based on:

1. Law No.19 of 2003 concerning State Owned Enterprises Chapter VI articles 67, 68 and 69 with the title Internal Audit function.
2. SOE Minister Regulation Number: PER-01/MBU/2011 dated August 01, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE, as last amended by SOE Minister Regulation Number: PER-09/MBU/2012 dated July 06, 2012 concerning the Amendment to the SOE Minister Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.
3. SOE Ministry Secretary Letter No. S-168/MBU/2008 dated June 27, 2008 concerning indicators/parameters of assessment and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance which was updated by the SOE Ministry Secretary Decree Number: SK-16/S.MBU 2012.
4. Company Articles of Association.

Internal Audit Charter

The internal audit charter has been ratified as stated in the internal audit charter between the Board of Directors and the Board of Commissioners on December 31, 2022. The Internal Audit Charter informs about the vision, mission, objectives, scope, main principles, position, independency, authority, duties and responsibilities and implementation standards.



Pengangkatan dan Pemberhentian

Audit Internal Perusahaan dipimpin oleh Chief Audit Executive yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Profil Chief Audit Executive

Perusahaan mengangkat Triana Aria Rini sebagai Chief Audit Executive Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi No. KptsP-049/C0000/2017-S22 tanggal 27 November 2017.

Triana Aria Rini
Chief Audit Executive
Menjabat sejak 1 Desember 2017
Served since December 01, 2017

Warga negara Indonesia, berdomisili Jakarta, Indonesia. Lahir di Jakarta, 23 Januari 1968, berusia 54 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof Dr Mustopo (1996). Memulai karier di PTK pada tahun 1990, dengan jabatan penting yang pernah diemban adalah Manager Region Tanjung Priok (2011-2013). Beliau pernah ditunjuk sebagai Direktur PT Peteka Karya Gapura (2013-2016), dan VP Operation (2016-2017).

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, Indonesia. Born in Jakarta, January 23, 1968, 54 years old. She earned a Bachelor of Economics in Management from Prof. Dr. Mustopo University (1996). Started her career at PTK in 1990, with an important position she had held as Tanjung Priok Region Manager (2011-2013). She was appointed as Director of PT Peteka Karya Gapura (2013-2016), and VP Operation (2016-2017).

Struktur Organisasi dan Kedudukan Unit Audit Internal

Ketentuan tentang kedudukan Audit Internal dan hubungannya dengan organ lain dalam Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Internal Audit dipimpin oleh seorang Chief Audit Executive yang di dalam struktur organisasi Perusahaan kedudukannya berada langsung di bawah Direktur Utama.
2. Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
3. Secara struktural, Chief Audit Executive menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama.
4. Secara fungsional, Chief Audit Executive menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Komite Audit.
5. Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif dalam diskusi terkait remunerasi Chief Audit Executive untuk memutuskan persetujuannya.
6. Dewan Komisaris melalui Komite Audit dapat melakukan komunikasi dengan Chief Audit Executive untuk memastikan ketepatan ruang lingkup penugasan, kecukupan sumber daya, dan tidak

Appointment and Dismissal

Internal Audit is led by Chief Audit Executive who is appointed and dismissed by the President Director after first obtaining a recommendation from the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero) and obtained approval from the Board of Commissioners.

Chief of Internal Audit Profile

The Company appointed Triana Aria Rini as the Company's Chief Audit Executive based on the Board of Directors Decision Letter No. KptsP-049/C0000/2017-S22 dated November 27, 2017.

Organization Structure and Position of the Internal Audit Unit

Provisions regarding the position of Internal Audit and its relationship with other organs in the Company are as follows:

1. Internal Audit is led by a Chief Audit Executive whose position in the Company's organization structure is directly under the President Director.
2. The Chief Audit Executive is appointed and dismissed by the President Director after first obtaining a recommendation from the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero) and obtaining the approval of the Board of Commissioners.
3. Structurally, the Chief Audit Executive establishes communication, coordination and reports on its activities to the President Director.
4. Functionally, the Chief Audit Executive establishes communication, coordination and reports on its activities to the Audit Committee.
5. The Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee plays an active role in discussions regarding the remuneration of the Chief Audit Executive to decide on its approval.
6. The Board of Commissioners through the Audit Committee can communicate with the Chief Audit Executive to ensure the accuracy of the scope of assignments, adequacy of resources, and no

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

ada pembatasan akses data serta informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam menjalankan kegiatannya.

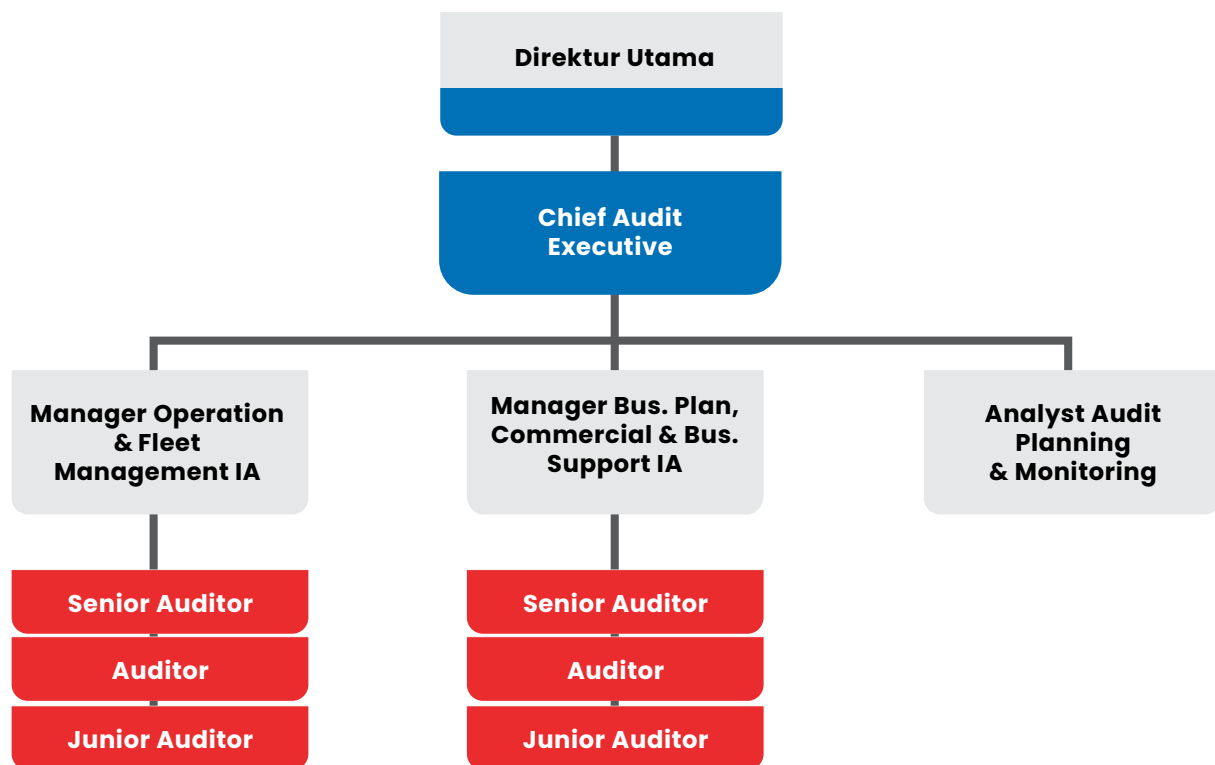
7. Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif dalam memberikan persetujuan Piagam Internal Audit.

restrictions on access to data and information needed by Internal Audit in carrying out its activities.

7. The Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee plays an active role in approving the Internal Audit Charter.

Berikut adalah struktur organisasi Unit Internal Audit PTK:

The following is PTK Internal Audit Unit organization structure:



Hingga akhir tahun 2022, jumlah personel Internal audit sebanyak 8 orang.

As of the end of 2022, total Internal audit personnel are 8 people.

Jabatan Position	Jumlah Personel (orang) Total Personnel (people)
Chief Audit Executive	1
Manager Operation & Fleet Management IA	1
Manager Bus. Plan, Commercial & Bus. Support IA	1
Senior Auditor	1
Auditor	2
Analyst Audit Planning & Monitoring	1
Junior Auditor	1
Jumlah Total	8

Kualifikasi Audit Internal

Internal auditor membutuhkan kemampuan yang spesifik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu parameter yang menjadi tolak ukur kemampuan dan keahlian auditor adalah pengalaman baik dari segi operasional, bisnis, dan pendukung lainnya. Selain pengalaman dan strata pendidikan, sertifikasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keahlian auditor internal.

Per 31 Desember 2022, sebanyak 8 orang karyawan Audit Internal Perusahaan telah memiliki sertifikasi profesi. Berikut adalah sertifikasi profesi yang telah diperoleh oleh internal auditor Perusahaan.

Internal Audit Qualification

Internal auditors require specific abilities to carry out their duties and responsibilities. One of the parameters used to measure the ability and expertise of an auditor is experience from an operational, business, and other support perspective. In addition to experience and educational background, certification is also an important factor in increasing the expertise of internal auditors.

As of December 31, 2022, 8 employees of the Company's Internal Audit have professional certification. The following are professional certifications obtained by the Company's internal auditors.

Sertifikasi Profesi Internal Auditor

Internal Auditor Professional Certification

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Triana Aria Rini	Chief Audit Executive	QIA, CRA, CRP
Dandy Damba Satria	Manager Operation & Fleet Management IA	QIA, CFE
Ginik Windaryati	Manager Bus. Plan, Commercial & Bus. Support IA	QIA, CRMP
Arip Maulana	Senior Auditor	QIA
Fajar Nugroho	Auditor	QIA
Arlidyasari	Auditor	QIA
Almira Mahsa	Junior Auditor	Audit Tingkat Dasar Basic Level Audit
Arini Putri Setoaty	Analyst Audit Planning & Monitoring	QIA

Visi dan Misi Fungsi Audit Internal

Vision and Mission of the Internal Audit Function

Visi Vision

Menjadi Internal Audit yang profesional dan terpercaya dengan menerapkan standar internasional profesi Internal Audit untuk mendukung visi dan misi Perusahaan.

To become a professional and trusted Internal Audit by applying international standards of the Internal Audit profession to support the Company's vision and mission.

Misi Mission

Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pemberian jasa *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko secara independen dan objektif.

Provide added value to the Company by providing independent and objective risk-based assurance, advice and insight services.

Tujuan Purpose

- Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
- Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan *advice*, *insight* dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.
- Assist the Company to achieve its objectives effectively and efficiently by evaluating and recommending improvements in the effectiveness of corporate governance, risk management and internal control;
- Assist the Company's management and other stakeholders by providing advice, considerations and recommendations that are useful for increasing the effectiveness and efficiency of the Company.

Organ Pendukung Direksi
Board of Directors Supporting Organs

Value**Powerful**

Keberadaan Internal Audit secara tegas diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

The existence of Internal Audit is expressly regulated in Law no. 19 of 2003 on SOE.

United

Satu kesatuan dan berinteraksi dalam wadah Internal Audit yang solid.

One unit and interacting in a solid Internal Audit.

Respected

Bermartabat serta diakui hasil kinerjanya.

Dignified and recognized for its performance results.

Energized

Auditor yang energik dan tersertifikasi dengan kualifikasi yang membanggakan.

Energetic and certified auditor with proud qualifications.

Kode Etik Internal Audit

1. Integritas (*Integrity*)

Internal Audit Perusahaan menghasilkan kepercayaan dan menyediakan dasar kehandalan penilaian yaitu: bersikap jujur, objektif, cermat, loyalitas, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wajib menghormati, mendukung nama baik Perusahaan dari sisi hukum maupun etika.

2. Objektivitas (*Objectivity*)

Internal Audit Perusahaan harus dapat menjalankan objektivitas yang profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Auditor membuat penilaian dengan kondisi yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau oleh pihak lain dalam membuat penilaian.

3. Konfidensial (*Confidentiality*)

Internal Audit Perusahaan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi pemberi informasi kecuali ada kewajiban hukum atau profesi yang mengharuskan dilakukan hal tersebut dan auditor wajib berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang dibutuhkan pada saat menjalankan tugas.

4. Kompetensi (*Competency*)

Internal Audit Perusahaan harus menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman secara profesional dalam melaksanakan tugas. Untuk itu auditor internal wajib secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas layanan sesuai dengan standar profesi auditor internal serta kebijakan dan peraturan Perusahaan.

5. Berwawasan Luas dan Jauh Ke Depan (*Visionary*)

Internal Audit Perusahaan harus mampu mengantisipasi potensi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan Perusahaan dan membangun komunikasi yang efektif antar auditor Perusahaan.

6. Sanksi

Terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik di atas, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan.

Internal Audit Code of Conducts

1. Integrity

Internal Audit of the Company earns trust and provides a basis for the reliability of the assessment, namely: being honest, objective, careful, loyal, as well as being responsible for carrying out duties and being obliged to respect, support the Company's reputation from the legal and ethical sides;

2. Objectivity

Internal Audit of the Company shall be able to carry out professional objectivity in gathering, evaluating and communicating information about the audited activity or process. The auditors prepare an audit with relevant conditions without being influenced by personal interests or by other parties in making judgments;

3. Confidentiality

Internal Audit of the Company respects the value and ownership of information obtained and does not disclose information without the authorization of the information provider unless there is a legal or professional obligation that requires it to be done and the auditor must be careful in using and maintaining the required information when performing the duties;

4. Competency

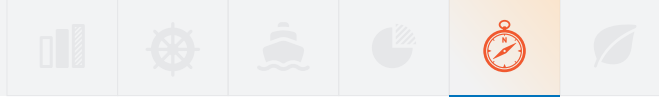
Internal Audit of the Company shall address professional knowledge, expertise and experience in carrying out its duties. Therefore, the internal auditors are required to continuously improve the ability, effectiveness and quality of services in accordance with the professional standards of internal auditors and company policies and regulations;

5. Visionary

Internal Audit of the Company must be able to anticipate the potential for various problems that can affect the achievement of Company's goals and build effective communication between the Company's auditors;

6. Sanctions

Workers who violate the above code of conducts will be sanctioned according to company regulations.



Independensi

1. Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit dilarang terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
2. Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit wajib menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, objektif dalam menjalankan penugasan dan mengungkapkan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap independensi.
3. Auditor yang direkrut dari Fungsi Bisnis PT Pertamina (Persero), *Subholding*, Anggota *Subholding*, dan Anak Perusahaan *Services* dapat melakukan audit di fungsi bisnis sebelumnya minimal 1 (satu) tahun sejak kepindahannya ke Fungsi Internal Audit dengan tetap mengedepankan aspek independensi dan objektivitas.
4. Chief Audit Executive menyampaikan kepada Direktur Utama/Komisaris Utama/Komite Audit jika terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.
5. Chief Audit Executive dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, tanpa kehadiran Manajemen.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan Internal Audit meliputi, namun tidak terbatas pada, pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan. Ruang lingkup tersebut dilaksanakan terhadap seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan (PT Pertamina Trans Kontinental dan Anak Perusahaan) untuk meyakinkan hal-hal sebagai berikut:

1. Regulasi yang berpengaruh signifikan pada Perusahaan telah dipatuhi.
2. Pekerja melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku.
3. Interaksi antar unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
4. Risiko diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik.
5. Program, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
6. Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
7. Informasi finansial, manajerial, dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.

Independency

1. The Chief Audit Executive and all Internal Audit staff are prohibited from being involved in the Company's operational activities that may influence with the independency of carrying out their duties.
2. The Chief Audit Executive and all Internal Audit staff are required to maintain an impartial attitude, avoid conflicts of interest, be objective in carrying out assignments and disclose if there is a potential conflict of interest and interference with independency.
3. Auditors recruited from the Business Function of PT Pertamina (Persero), *Subholding*, *Subholding Members*, and *Services Subsidiaries* can audit the previous business function at least 1 (one) year after moving to the Internal Audit Function while still prioritizing the aspects of independency and objectivity.
4. The Chief Audit Executive conveys to the President Director/President Commissioner/Audit Committee if there are interventions in determining the scope of the audit, conducting audits and reporting audit results.
5. The Chief Audit Executive can communicate and interact directly with the Board of Commissioners and the Audit Committee, without the presence of Management.

Scope

The scope of the Internal Audit assignment includes, but is not limited to, testing and evaluating the adequacy and effectiveness of internal control, risk management, and governance processes in achieving the Company's goals and objectives. The scope is implemented in all areas of the Company's operational and business activities (PT Pertamina Trans Kontinental and Subsidiaries) to ensure the following:

1. Regulations with a significant impact on the Company have been complied with.
2. Workers carry out their activities in accordance with applicable policies, standards, procedures and laws.
3. Interaction between internal and external work units is carried out in an accountable manner and is within the corridor of applicable governance.
4. Risks are identified and mitigated properly.
5. Programs, work plans, and objectives have been achieved effectively.
6. The quality of internal control is continuously improved.
7. Significant financial, managerial and operational information is available in an accurate, reliable and timely manner.

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

8. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
9. Aspek bisnis telah dikelola dengan baik dan optimum.

Lingkungan Perusahaan yang menjadi lingkup kerja Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Operasi.
2. Direktorat Keuangan.
3. Direktorat Pemasaran.
4. Corporate Secretary.
5. Fungsi-fungsi yang secara struktural berada dibawah Direktur Utama.
6. Marine Business & Operation Region I, II & III.
7. Anak Perusahaan serta badan Usaha yang dibentuk.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
2. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai.
3. Menyusun dan mengusulkan *Annual Audit Plan* (AAP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, dan *resources* yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, dan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
4. Melakukan *review* AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
5. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervisi dan didukung dengan kertas kerja yang memadai, serta rekomendasi, *advice*, dan *insight* yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh *Auditee*.
7. Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
8. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan *assurance* dan *consulting* dengan *Internal Audit Subholding*, Anggota *Subholding*, dan Anak Perusahaan *Services*.

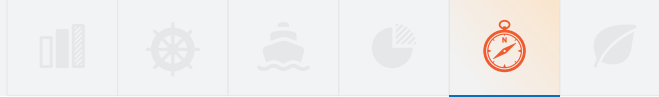
8. Resources are obtained economically, used efficiently, and adequately protected.
9. The business aspect has been managed properly and optimally.

The Company's environment as scope of work of Internal Audit is as follows:

1. Directorate of Operations.
2. Directorate of Finance.
3. Directorate of Marketing.
4. Corporate Secretary.
5. Structural functions under the President Director.
6. Marine Business & Operation Region I, II & III.
7. Branch Offices, Subsidiaries and Business Entities formed.

Duties and Responsibilities

1. Carry out supervisory activities through assurance and consulting activities in all areas of the Company's operational and business activities.
2. Ensure the aspects of integrity, objectivity, confidentiality and competence are applied adequately.
3. Prepare and propose an Annual Audit Plan (AAP) which includes, among others, the assignment object, assignment schedule, and resources needed to obtain approval from the President Director, and the Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee.
4. Conduct ongoing AAP reviews, to ensure compliance with the Company's business processes and risks, as well as the scope and objectives of the assignment.
5. Communicate limited resources for the implementation of assignments, changes in AAP, and changes in policy direction to the President Director, and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. Ensure that each assignment is carried out under supervision and supported by adequate working papers, and the recommendations, advice, and insights submitted can be implemented by the *Auditee*.
7. Ensure that the Internal Audit Function collectively has/acquires adequate knowledge, skills and competencies.
8. Coordinate the management of Internal Audit activities which are not limited to assurance and consulting activities with the Internal Audit Subholding, Subholding Members, and Services Subsidiaries.



9. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko.
 10. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
 11. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional Perusahaan.
 12. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit.
 13. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya yang relevan.
 14. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
 15. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/pemeriksaan oleh auditor eksternal.
 16. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyungkapan melalui *Whistleblowing System* (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 17. Membantu pelaksanaan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan di PT Pertamina Trans Kontinental dan Anak Perusahaan.
 18. Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (*improvement program*) kegiatan Internal Audit.
 19. Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
 20. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
 21. Berkoordinasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit yang dikelola secara tersentralisasi di *Holding* sesuai dengan Tabel RASCI yang telah disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
9. Test and evaluate the effectiveness of control and risk management.
 10. Carry out compliance checks with related laws and regulations.
 11. Identify alternative improvements and increase the Company's operational efficiency.
 12. Carry out coordination with the Audit Committee.
 13. Report the results of supervision to the President Director and other relevant Directors.
 14. Monitor the implementation of follow-up on the results of internal, external and other supervisory institutions and report periodically to the President Director and the Audit Committee.
 15. Carry out coordination of audit/ examination activities by external auditors.
 16. Coordinate with the Company's Supervisory Function in carrying out follow-up on complaints/disclosures through the Whistleblowing System (WBS) and complaints from the public or other parties in accordance with applicable regulations.
 17. Assist in carrying out investigative audits on issues that may cause losses to the Company at PT Pertamina TransKontinental and the Subsidiaries.
 18. Carry out evaluation and quality improvement (*improvement program*) of Internal Audit activities.
 19. Reporting the results of Internal Audit activities to the President Director, and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
 20. Carry out other assignments as mandated by the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.
 21. Coordinate with the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero) in the implementation of Internal Audit activities which are managed centrally in Holding in accordance with the RASCI Table which has been approved by the President Director of PT Pertamina (Persero).

Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki kewenangan untuk:

1. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Internal Audit.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
3. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

Authority

In carrying out its duties, Internal Audit has the authority to:

1. Have unrestricted access to all data, documents, functions, activities, and other company resources including requesting information or explanations from all officials/workers in the context of carrying out Internal Audit duties.
2. Determine the scope, methods, methods, techniques, strategies and audit approaches.
3. Carry out direct communication with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

4. Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
5. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
6. Mengadakan rapat secara berkala dan pada saat diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
7. Menentukan arah kebijakan, struktur organisasi, pengelolaan pembinaan karier pekerja (mutasi dan/atau promosi), pengelolaan *manpower*, pelaksanaan penugasan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan terbatas dalam lingkup Internal Audit Perusahaan dan Anak Perusahaan setelah berkonsultasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina International Shipping.
8. Melaksanakan kegiatan *assurance & consulting* dan dapat menjadi bagian dari tim audit investigasi di Perusahaan dan Anak Perusahaan melalui mekanisme yang ditetapkan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero).

Standar Pelaksanaan

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit harus menaati Sistem Tata Kerja Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit yang mengacu kepada International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di Perusahaan.
2. Jika dalam pengelolaan Fungsi Internal Audit harus dilakukan tidak sesuai dengan Standards, maka Chief Audit Executive harus mengungkapkan hal tersebut dan menyampaikannya kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Mekanisme dan Prosedur Internal Audit

Mekanisme dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu sarana untuk memastikan pengelolaan Perusahaan telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip GCG dan prinsip korporasi yang sehat serta taat kepada peraturan perundang-undangan.

Selain Piagam Internal Audit, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Fungsi Internal Audit juga berpedoman pada Pedoman Internal Audit, Pedoman Investigasi dan Prosedur yang terdiri dari:

- a. Pedoman Pengelolaan Fungsi Internal Audit No. A-001/J00000/2015-S9 Revisi ke-3 berlaku terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2018

Implementation Standards

1. In carrying out their duties, the Chief Audit Executive and all Internal Audit staff must comply with the Internal Audit Work Procedure System and the Internal Audit Code of Conducts which refers to the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) set by The Institute of Internal Auditors as well as other policies. relevant and applicable in the Company.
2. If the management of the Internal Audit Function must be carried out not in accordance with the Standards, the Chief Audit Executive must disclose this matter and submit it to the President Director, and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Internal Audit Mechanisms & Procedures

Internal control mechanisms and systems are one of the means to ensure that the Company's management is carried out in accordance with GCG principles and corporate principles that are sound and comply with laws and regulations.

Apart from the Internal Audit Charter, the Internal Audit Function is guided by the Internal Audit Guidelines, Investigation Guidelines and Procedures which consist of:

- a. Guidelines for the Management of Internal Audit Function No. A-001/J00000/2015-S9 3rd Revision effective from October 18, 2018

- b. Pedoman Pengelolaan Pengaduan No. A9-001/J00000/2022-S9 Revisi ke-0 berlaku terhitung mulai tanggal 19 Januari 2022
- c. Pedoman Audit No. Pdm-001/G0000/2013-S0 revisi ke 01 Perihal Pedoman Audit Khusus Mengenai Audit Kecurangan (Investigasi).
- d. Pedoman Audit No. Psd-008/G0000/2018-S0 revisi ke 00 Perihal Prosedur Pemberian Data dan Peminjaman Dokumen Kepada Auditor Eksternal (KAP).
- e. Pedoman Audit No. Psd-009/G0000/2018-S0 revisi ke 0 Perihal Prosedur Cash Opname.
- b. Guidelines for Complaint Management No. A9-001/J00000/2022-S9 Revision 0 effective from January 19, 2022
- c. Audit Guidelines No. Pdm-001/G0000/2013-S0 01th revision Regarding Special Audit Guidelines Concerning Fraud Audits (Investigations).
- d. Audit Guidelines No. Psd-008/G0000/2018-S0 00th revision Regarding Procedures for Providing Data and Borrowing Documents to External Auditors (KAP).
- e. Audit Guidelines No. Psd-009/G0000/2018-S0 revision 0 Regarding Cash Opname Procedures.

Pengembangan Kompetensi

Selain sertifikasi, keikutsertaan dalam seminar/*training*/konferensi profesi baik di dalam dan luar negeri, magang dan pembekalan terhadap perkembangan organisasi dan bisnis PTK maupun pembekalan terhadap pemahaman industri, juga diberikan secara rutin setiap tahun kepada pekerja AI melalui program *refreshing auditor*.

Sepanjang tahun 2022 Unit Audit Internal mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut.

Competency Development

In addition to certification, participation in seminars/*training*/professional conferences both at home and abroad, internships and debriefing on organizational and business development of PTK as well as debriefing on industry understanding, are also given annually to IA employees through the *refreshing auditor* program.

Throughout 2022 the Internal Audit Unit participated in the competency development program as follows.

Program Pengembangan Kompetensi Auditor Internal Tahun 2022 Internal Auditor Competency Development Program for 2022

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Triana Aria Rini – Chief Audit Executive	Pelatihan Training	<i>Agile Auditing</i> Lanjutan Advanced Agile Auditing	24 – 25 Februari 2022 February 24–25, 2022	PT Pertamina (Persero)
	Seminar	Konferensi Auditor Internal, Wisuda Sertifikasi Profesi, dan Munas FKSPI 2022 Internal Auditor Conference, Professional Certification Graduation, and 2022 FKSPI National Conference	29 Juni – 01 Juli 2022 June 29 – July 01, 2022	YPIA
Ginik Windaryati – Manager Business Plan, Commercial & Business Support IA	Pelatihan Training	<i>Agile Auditing</i> Lanjutan Advanced Agile Auditing	24 – 25 Februari 2022 February 24–25, 2022	PT Pertamina (Persero)
	Pelatihan Training	Internal Audit Training of ISO 37001:2016	17 – 18 Oktober 2022 October 17–18, 2022	PT TUV NORD Indonesia
Dandy Damba Satria – Manager Operation & Fleet Management IA	Pelatihan Training	<i>Agile Auditing</i> Lanjutan Advanced Agile Auditing	24 – 25 Februari 2022 February 24–25, 2022	PT Pertamina (Persero)
	Pelatihan Training	Internal Audit Training of ISO 37001:2016	17 – 18 Oktober 2022 October 17–18, 2022	PT TUV NORD Indonesia
Arip Maulana – Senior Auditor	Pelatihan Training	Refreshment Audit for Auditor Team Leader	7 – 9 Maret 2022 March 07–09, 2022	PT Pertamina (Persero)
Fajar Nugroho – Auditor	Pelatihan Training	<i>Agile Auditing</i> Lanjutan Advanced Agile Auditing	24 – 25 Februari 2022 February 24–25, 2022	PT Pertamina (Persero)
	Pelatihan Training	Internal Audit Training of ISO 37001:2016	17 – 18 Oktober 2022 October 17–18, 2022	PT TUV NORD Indonesia
Arlidyasari – Auditor	Pelatihan Training	<i>Agile Auditing</i> Lanjutan Advanced Agile Auditing	24 – 25 Februari 2022 February 24–25, 2022	PT Pertamina (Persero)

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

Program Pengembangan Kompetensi Auditor Internal Tahun 2022

Internal Auditor Competency Development Program for 2022

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Arini Putri Setoaty – Analyst Audit Planning & Monitoring	Pelatihan Training	Refreshment Audit for Auditor Team Member	14 – 16 Maret 2022 March 14-16, 2022	PT Pertamina (Persero)
	Pelatihan Training	<i>Agile Auditing</i> Lanjutan Advanced Agile Auditing	24 – 25 Februari 2022 February 24-25, 2022	PT Pertamina (Persero)
	Pelatihan Training	<i>Agile Auditing</i> Lanjutan Advanced Agile Auditing	24 – 25 Februari 2022 February 24-25, 2022	PT Pertamina (Persero)
	Pelatihan Training	Internal Audit Training of ISO 37001:2016	17 – 18 Oktober 2022 October 17-18, 2022	PT TUV NORD Indonesia
Almira Mahsa – Junior Auditor	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Program Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar Basic Level Qualified Internal Auditor (QIA) Certification Program	17 – 29 Januari 2022 January 17 – 29, 2022	YPIA
	Pelatihan Training	<i>Agile Auditing</i> Lanjutan Advanced Agile Auditing	24 – 25 Februari 2022 February 24-25, 2022	PT Pertamina (Persero)
	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	QIA tingkat Lanjutan QIA Advanced level	30 Maret – 14 April 2022 March 30-April 14, 2022	PT Pertamina (Persero)
	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Internal Auditor (CIA)	9 Agustus – 8 September 2022 August 09- September 08, 2022	PT Pertamina (Persero)
	Pelatihan Training	Internal Audit Training of ISO 37001:2016	17 – 18 Oktober 2022 October 17-18, 2022	PT TUV NORD Indonesia

Realisasi Audit

Fungsi Internal Audit telah melaksanakan seluruh *Annual Audit Plan* ("AAP") yang direncanakan di awal tahun 2022 sesuai proses bisnis Perusahaan sebagai berikut:

Pelaksanaan Tugas Internal Audit Tahun 2022

Implementation of Internal Audit Duties in 2022

Audit Realization

The Internal Audit function has carried out the entire Annual Audit Plan ("AAP") planned for early 2022 according to the Company's business processes as follows:

Annual Audit Plan (AAP)	Rencana Plan	Realisasi Realization
Audit atas Pengadaan/Pembangunan Kapal Baru Audit on Procurement/Construction of New Ships	Februari – Juli 2022 February – July 2022	Februari – Juli 2022 February – July 2022
Konsultasi Formal – Pendampingan Pembangunan Kapal Baru (<i>Harbour Tug</i>) Formal Consultation – Assistance in Building New Ships (<i>Harbour Tug</i>)	Februari – Juli 2022 February – July 2022	Februari – Desember 2022 February – December 2022
Audit atas Pengelolaan Keagenan Kapal Audit of Ship Agency Management	Februari – Juli 2022 February – July 2022	Februari – Juli 2022 February – July 2022
Audit Charter Kapal Milik Owned Ship Charter Audit	Juli – Oktober 2022 July – October 2022	Juli – Desember 2022 July – December 2022
Audit atas Proses Bisnis PT Pertamina Marine Solutions (PT PMSol) Audit of PT Pertamina Marine Solutions (PT PMSol) Business Process	Juli – September 2022 July – September 2022	Juli – Desember 2022 July – December 2022
Audit atas Kebijakan dan Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN") di PT Pertamina Trans Kontinental Audit of Policy and Implementation of Domestic Component Level ("TKDN") at PT Pertamina Trans Kontinental	November-Desember 2022 November-December 2022	Oktober – Desember 2022 October – December 2022

Hasil Temuan Audit Internal 2022

Posisi *outstanding* tindak lanjut rekomendasi per 31 Desember 2022, baik temuan Internal Auditor maupun Eksternal Auditor, dengan posisi sebagai berikut:

2022 Internal Audit Findings

Outstanding Position of follow-up on recommendations as of December 31, 2022, both findings of the Internal Auditor and External Auditor, with the following positions:

Hasil dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal Results and Follow-up on Findings

Annual Audit Plan (AAP)	Jumlah Rekomendasi Total Recommendation	Selesai Completed	Belum Selesai In progress
Audit atas Proses Pengadaan Spareparts Kapal Audit of Ship Spare Parts Procurement Process	9	9	-
Audit atas Kegiatan Bunker Kapal-kapal Milik PTK Audit of PTK Ship Bunker Activities	5	5	-
Audit atas Kegiatan Operasional Bisnis PT PKS Audit of PT PKS Business Operational Activities	22	22	-
Audit atas Proses Kontrak Bisnis Audit of Business Contract Process	17	17	-
Audit atas Pengadaan/Pembangunan Kapal Baru Audit on Procurement/Construction of New Ships	18	9	9
Audit atas Pengelolaan Keagenan Kapal Audit of Ship Agency Management	43	17	26
Audit Charter Kapal Milik Owned Vessel Charter Audit	18	-	18
Audit atas Proses Bisni PT Pertamina Marine Solutions (PT PMSol) Audit of PT Pertamina Marine Solutions (PT PMSol) Business Process	14	-	14
Audit atas Kebijakan dan Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di PT Pertamina Trans Kontinental Audit of Policy and Implementation of Domestic Component Level (TKDN) at PT Pertamina Trans Kontinental	7	-	7
Jumlah Total	153	79	74

Hasil dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Eksternal (BPK RI) Results and Follow-Up of External Audit Recommendations (BPK RI)

Proses Bisnis Business Process	Jumlah Rekomendasi Total Recommendation	Selesai Completed	Belum Selesai In progress
LHP Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Piutang Usaha untuk Meningkatkan Laba Perusahaan Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero), <i>Subholding</i> dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur LHP Performance on the Effectiveness of Accounts Receivable Management Activities to Increase Company Profits in 2019 to Semester I of 2021 at PT Pertamina (Persero), Subholding and Subsidiaries in Jakarta, West Java and East Java.	11	3	8
LHP Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Piutang Usaha untuk Meningkatkan Laba Perusahaan Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero), <i>Subholding</i> dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur LHP with Specific Purposes for Revenue, Expenditure, and Investment Management in 2019 to 2021 at PT Pertamina International Shipping and Other Related Agencies in DKI Jakarta, East Java, Riau Islands and Japan.	23	12	11
Jumlah Total	34	15	19

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

Terkait dengan tindak lanjut atas Audit Eksternal (BPK RI) status penentuan selesai/belum selesai atas penyelesaian rekomendasi temuan merupakan wewenang BPK RI, Fungsi Internal Audit menjadi *counterpart*/fasilitator penyelesaian rekomendasi sebagaimana terdapat pada tabel di atas.

Audit Khusus di Luar Rencana Kerja

Sepanjang Tahun 2022, Internal Audit tidak melaksanakan audit khusus sebagai penugasan yang diberikan di luar Program Kerja Audit Tahunan 2022/Non AAP (Annual Audit Plan) dengan rincian sebagai berikut:

Regarding the follow-up on the External Audit (BPK RI) the status of determining completed/not yet completed on the completion of findings recommendation is the authority of BPK RI, the Internal Audit Function becomes the counterpart/facilitator for completing recommendations as contained in the table above.

Special Audit outside the Work Plan

Throughout 2022, Internal Audit did not carry out special audits as an assignment given outside of the 2022 Annual Audit Work Program/Non AAP (Annual Audit Plan) with details as follows:

No	Judul Penugasan Assignment Title	No SP SP No.	Tanggal SP SP Date	Sifat Audit Audit Nature	Jangka Waktu Time Period	Progress
1	Perpanjangan Penelaahan atas Indikasi Penyalahgunaan ROB Bunker Tug Boat dan Wewenang Rekrutmen Pekerja TKJP di marine Region - Plaju Extension of Indication Study of Abuse of ROB Bunker Tug Boat and Authority for Recruitment of TKJP Workers in the Marine Region - Plaju	No. Print- 003/ PIS0300/2022-SO	1 Maret 2022 July 27, 2022	Penelaahan Non AAP Non-AAP Study	1 Maret 2022 s.d 14 April 2022 March 01, 2022 to April 14, 2022	Finished
2	Audit Investigasi atas Indikasi Fraud dalam Pelaksanaan Kegiatan Supply Fresh Water PT Peteka Karya Tirta di Wilayah Dumai Audit Investigation of Indications of Fraud in the Implementation of PT Peteka Karya Tirta's Fresh Water Supply Activities in Dumai Region	No. Print- 012/ PIS0300.2022-SO	27 Juli 2022 July 27, 2022	Investigasi Investigation	1 Agustus 2022 s.d. 30 November 2022 August 01, 2022 to November 30, 2022	Finished
3	Audit Pedalaman atas Pengembalian Kerugian Perusahaan dari Kegiatan Keagenan di Integrated Fuel Terminal Tanjung Uban Audit in depth for the Company's Return on Losses from Agency Activities at Tanjung Uban Integrated Fuel Terminal	No. Print- 014/ PIS0300/2022-SO	8 November 2022 November 08, 2022	Non AAP	8 November 2022 s.d. 21 November 2022 November 08, 2022 to November 21, 2022	Finished

Rencana Kerja Tahun 2023

Unit Audit Internal telah menyusun rencana kerja kedepan. Berikut adalah rencana tugas objek audit yang akan dilakukan oleh Unit Internal Audit pada tahun 2023.

2023 Work Plan

The Internal Audit Unit has prepared a future work plan. The following is the audit object task plan to be carried out by the Internal Audit Unit in 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 2023 Work Plan

Annual Audit Plan (AAP)	Rencana Plan
Audit atas Pengelolaan Piutang PT Pertamina Trans Kontinental Audit on Receivable Management of PT Pertamina Trans Kontinental	Februari-Mei 2023 February-May 2023
Audit atas Pencapaian Target <i>Commission Days</i> Kapal Audit on Achievement of Ship's Target <i>Commission Days</i>	Februari-Mei 2023 February-May 2023
Audit atas Kinerja PT Trans Yeong Maritime Audit on the Performance of PT Trans Yeong Maritime	Mei-Agustus 2023 May-August 2023
Audit atas Implementasi Kerjasama <i>Port Management Bundling</i> terkait Kegiatan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Marine & Jasa Konstruksi Audit on Implementation of <i>Port Management Bundling</i> Cooperation related to Port Service Activities, Marine Services & Construction Services	Mei-Agustus 2023 May-August 2023
Audit atas Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN") Audit on Implementation of Domestic Component Level ("TKDN")	September-November 2023

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal

Audit Internal menjalankan fungsinya sebagai pendamping auditor eksternal dengan memberikan dukungan kepada auditor eksternal, menjembatani antara auditor dengan *auditee* dan melakukan pembahasan temuan auditor dengan *auditee*.

Monitoring of Follow-up to External Audit Results

IA performs its function as a companion to the external auditor by providing support to the external auditor, bridging the auditor and the auditee, and discussing the auditor's findings with the auditee.

Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi

Fungsi Internal Audit secara berkala melaksanakan pertemuan dengan Dirut, Komisaris dan/atau Komite Audit yang bertujuan untuk memastikan terciptanya *stakeholder relationship* yang berkesinambungan antara Fungsi Internal Audit dengan Direktur Utama, Komisaris dan Komite Audit, serta memastikan informasi kegiatan Fungsi Internal Audit beserta pencapaiannya disampaikan secara tepat waktu kepada Manajemen Fungsi IA/ CAE Holding, Direktur Utama dan Komite Audit. Frekuensi pertemuan yang dilakukan selama tahun 2022 adalah sebanyak 8 (delapan) pertemuan.

Implementation of Meetings and Coordination

The Internal Audit function regularly holds meetings with the President Director, Commissioners and/or the Audit Committee with the aim of ensuring the creation of a sustainable stakeholder relationship between the Internal Audit Function and the President Director, Commissioners and Audit Committee, as well as ensuring that information on the activities of the Internal Audit Function and its achievements is conveyed in a timely manner time to IA/CAE Holding Function Management, President Director and Audit Committee. The frequency of meetings held during 2022 was 8 (eight) meetings.

Audit Independen/Akuntan Publik

Independent Audit/Public Accountant

Auditor eksternal merupakan badan independen yang telah memenuhi persyaratan dalam melakukan audit umum dan memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku.

Audit eksternal terkait pengelolaan atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Independen. Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PwC").

External auditor is an independent body that has fulfilled the requirements in conducting general audits and provides opinions related to the suitability of the presentation of the company's financial statements with the prevailing Financial Accounting Standards ("SAK").

An external audit related to the management of the Company's Financial Statements is carried out by an Independent Public Accounting Firm. The Financial Report for the 2022 Fiscal Year was carried out by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners ("PwC").

Penunjukan Akuntan Publik

Sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan menggunakan jasa KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan yang terkait kewajaran, semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penunjukan KAP sebagai Auditor Eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

Skema sederhana tentang hubungan organ internal GCG dan Akuntan Publik sebagai organ eksternal dapat dilihat di bawah ini.

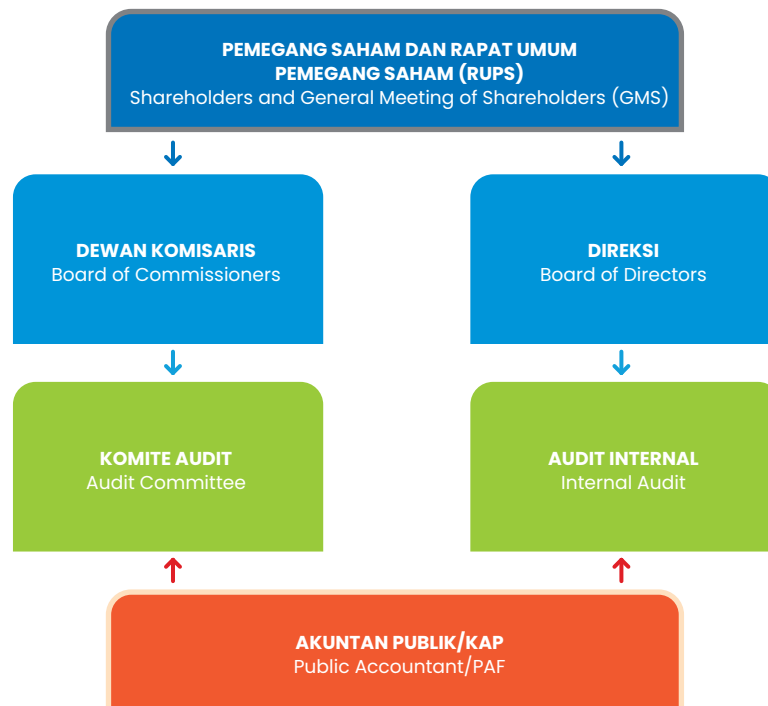
Appointment of Public Accountant

In accordance with the prevailing laws and regulations, the Company through Public Accounting Firm (KAP) performs an audit to the financial statements related to fairness in all material aspects, financial position, business results, changes in equity and cash flows, as per the generally accepted accounting principles in Indonesia.

The appointment of the KAP as the External Auditor to audit the Company's Financial Statements is determined through the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and/or the Audit Committee. The appointed External Auditor is not allowed to have a conflict of interest with the Company in order to guarantee the independency and quality of audit results. The External Auditor is responsible for expressing an opinion on the compliance of the audited Company's Financial Statements with generally accepted Financial Accounting Standards.

A simple scheme of the relationship between GCG internal organs and Public Accountants as external organs can be seen below.

Audit Independen/Akuntan Publik
Independent Audit/Public Accountant



Akuntan Publik Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 16 Juni 2022 terkait penunjukan Akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Pemegang Saham memutuskan menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik ("KAP") sebagai Auditor Independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 berikut kewajiban nilai jasanya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perusahaan sebelumnya sudah berkonsultasi/berkoordinasi dengan PT Pertamina International Shipping.

Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS tersebut yang telah dituangkan melalui Akta No. 16 tanggal 16 Juni 2022 tentang RUPS Tahunan PTK Tahun Buku 2021 pada Agenda Mata Acara 3 telah dikeluarkan KPSSS tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tahun Buku 2022, 2023, dan 2024 dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan RUPS Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2021 khusus terkait agenda Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2022.

Public Accountant in 2022

Based on the Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 16, 2022 regarding the appointment of a public Accountant to audit the Company's Financial Statements ended on December 31, 2022, the Shareholders decided to approve the granting of power of attorney and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to designate a Public Accounting Firm ("KAP") as Independent Auditor to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the period of January 01 to December 31, 2022 along with the fairness of the value of their services in accordance with applicable regulations, provided that the KAP appointed by the Company has previously consulted/coordinated with PT Pertamina International Shipping.

Following up on the results of the GMS Resolution as outlined in Deed No. 16 dated June 16, 2022 concerning the PTK Annual GMS for the 2021 Fiscal Year on the Agenda for Agenda 3, KPSSS issued it on October 11, 2022 regarding Determination of a Public Accounting Firm ("KAP") for the Fiscal Years of 2022, 2023 and 2024 with the following resolutions:

1. Revoked and declared no effect the Company's Annual GMS Resolution for the 2021 Fiscal Year specifically regarding the agenda for the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the 2022 Fiscal Year.

Audit Independen/Akuntan Publik
Independent Audit/Public Accountant

2. Memutuskan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") bagi Perusahaan untuk Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik ("KAP") dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk periode Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Dewan Komisaris Perusahaan agar melakukan evaluasi setiap tahun atas kinerja Kantor Akuntan Publik ("KAP") dan mengusulkan kembali kepada RUPS Perusahaan untuk penetapan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk periode Tahun buku 2023.
 - c. Proses Pengadaan serta Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk Tahun Buku 2022, 2023 dan 2024 agar dikonsultasikan/dikoordinasikan dengan PT Pertamina International Shipping.
 3. Keputusan-keputusan pada agenda lain sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2021 pada tanggal 16 Juni 2022, yang tidak direvisi melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini, dinyatakan tetap berlaku.
 4. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan agar melaksanakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dengan telah melengkapi dan memenuhi kebutuhan internal, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta melengkapi semua proses dan administrasi.
 5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris (apabila diperlukan) dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam Akta No.08 tanggal 16 November 2022 terkait penunjukan Akuntan Publik, telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin Registrasi KEP-241/KM.1/2015 dan Akuntan Publik Daniel Kohar No. Registrasi AP.1130 dengan imbalan jasa senilai Rp604.000.000,- (exclude VAT) untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2022.
2. Decided on the Appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") for the Company for the 2022, 2023 and 2024 Fiscal Years with the following conditions:
 - a. Granted power and delegated authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm ("KAP") to conduct an examination of the Company's Financial Statements for the 2022, 2023 and 2024 Fiscal Years along with the amount of their services, in accordance with applicable rules and regulations.
 - b. The Company's Board of Commissioners is to conduct an annual evaluation of the Public Accounting Firm ("KAP") performance and propose to return to the Company's GMS for the appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") for the 2023 fiscal year.
 - c. The procurement process and the appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") for the 2022, 2023 and 2024 Fiscal Years should be consulted/ coordinated with PT Pertamina International Shipping.
 3. Resolutions on other agendas as decided in the Company's Annual GMS for the 2021 Fiscal Year on June 16, 2022, which were not revised through this Circular Shareholders' Resolution, were declared to remain valid.
 4. The Company's Board of Directors and Commissioners to carry out this Circular Shareholder Resolution by completing and fulfilling internal needs, applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance as well as completing all processes and administration.
 5. Granted power of attorney to the Company's Board of Directors (with the right of substitution) to make and declare this Circular Shareholder Resolution in a notarial deed (if necessary) and carry out other legal actions deemed necessary in accordance with applicable regulations stipulated in Deed No. 08 dated November 16, 2022 regarding the appointment of a Public Accountant, has appointed the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers) No. Registration Permit KEP-241/KM.1/2015 and Public Accountant Daniel Kohar No. AP.1130 registration with a service fee of Rp604,000,000,- (excluding VAT) to carry out an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.

Audit Independen/Akuntan Publik
Independent Audit/Public Accountant

Akuntan Publik Tahun 2022

Public Accountant in 2022

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	:	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 No. Permit: KEP-241/KM.1/2015
Akuntan Publik Public Accountant	:	Daniel Kohar, No. Registrasi AP.1130 Daniel Kohhar, Registration No. AP.1130
Tahun Audit Audit Year	:	Tahun Buku 2022 2022 Fiscal Year
Periode Penugasan Assignment Period	:	17 Oktober 2022 s.d 13 Maret 2023 October 17, 2022 – March 13, 2023
Jasa Services	:	Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 Consolidated Financial Statements Audit for the 2022 Fiscal Year
Jasa Lainnya Other Services	:	-
Biaya Fee	:	Rp604.000.000,- (exclude VAT)
Waktu Terbit Laporan Keuangan Teraudit Time of Publication of Audited Financial Statements	:	13 Maret 2023 March 13, 2023
Opini Opinion	:	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion

Daftar Akuntan Publik

Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan 7 (tujuh) tahun terakhir dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Perusahaan.

List of Public Accountants

For the purpose of transparency, the following is a list of Public Accounting Firms, Accountants for the last 7 (seven) years and the fees paid in auditing the Company's financial statements.

Daftar Akuntan Publik 2016–2022

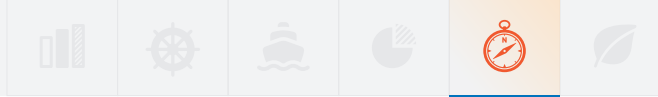
List of Public Accountants 2016–2022

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Professional Fee (Rp)
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Daniel Kohar No. Reg: AP. 1130	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	Rp604 juta (exclude VAT) Rp604 million (exclude VAT)
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Daniel Kohar No. Reg: AP. 1130	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	592 juta 592 million

Audit Independen/Akuntan Publik
Independent Audit/Public Accountant

Daftar Akuntan Publik 2016–2022
List of Public Accountants 2016–2022

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Professional Fee (Rp)
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Daniel Kohar No. Reg: AP. 1130	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	606 juta 606 million
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Daniel Kohar No. Reg: AP. 1130	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	598 juta 598 million
2018	Purwantono, Sungkono & Surja (Ernst & Young) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Purwantono, Sungkono & Surja (Ernst & Young) (PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Said Amru No. Reg: AP. 1294	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	566 juta 566 million
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Daniel Kohar No. Reg: AP. 1130	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	570 juta 570 million
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Yusron No. Reg: AP. 0243	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	591 juta 591 million
2015	Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo dan Rekan (Crowe Horwath) No. Izin: 854/KMC1/2015 Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo and Partners (Crowe Horwath) No. Permit: 854/KMC1/2015	Nunu Nurdyaman No. Reg: AP. 0269	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion	475 juta 475 million



Tindak Lanjut Temuan Audit KAP

Tidak lanjut temuan audit KAP senantiasa di-*monitoring* untuk memastikan bahwa seluruh temuan tersebut telah terealisasi seluruhnya dan memberikan nilai tambah bagi PTK. Pada tahun 2022 tidak terdapat temuan atas audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.

Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

Komite Audit berkoordinasi dengan Internal Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja, baik dari segi keuangan maupun operasional. PTK berupaya menindaklanjuti setiap temuan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga secara efektif mampu menekan temuan-temuan ditahun berikutnya.

Efektivitas dan Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik Eksternal dan Direksi

Efektivitas dan Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik Eksternal dan Direksi Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan regular dalam bentuk: rapat koordinasi pada saat *opening meeting* dan *exit meeting* penyampaian hasil audit serta pola komunikasi pada saat proses audit berlangsung.

Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK-RI")

Selain pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, Audit Eksternal juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") Tahun 2022 yang melakukan pemeriksaan mengenai Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Investasi Tahun 2019 s.d. 2021 pada PT Pertamina International Shipping dan Instansi terkait lainnya.

PAF Finding's Follow Up

Furthermore, PAF audit findings are constantly monitored to ensure that all these findings have been fully realized and provide added value for the PTK. In 2022, there were no findings on the audit of the 2022 Fiscal Year Financial Statements.

Effectiveness of Audit Activity by the Public Accountant

The Audit Committee coordinates with Internal Audit to review effectiveness of the external audits implementation to ensure that all findings can be followed up according to the assigned authority and improve performance, both from financial and operational perspective. PTK strives to follow up any audit findings by the Public Accounting Firm, therefore they can effectively suppress the findings in the coming year.

Communication Effectiveness and Frequency of External Public Accountants and Board of Directors

During the audit activity conducted by the Public Accountant, communication and cooperation between the Public Accountant and the Board of Directors were carried out intensively and regularly in form of: coordination meetings during the kick-off and exit meetings, submission of audit results and communication activity during the audit process.

Audit by the Audit Board of Indonesia ("BPK-RI")

In addition to the audit carried out by the Public Accounting Firm, the External Audit was also carried out by the Audit Board ("BPK") in 2022 which conducted audits regarding Audits with Specific Purposes for Revenue, Expenditure and Investment Management in 2019 to 2021 at PT Pertamina International Shipping and other related agencies.

Manajemen Risiko

Risk Management

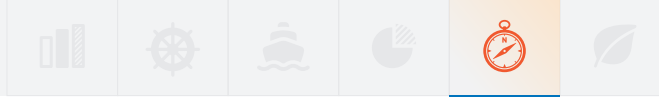


Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis/mengevaluasi, mengelola dan mengkaji ulang risiko Perusahaan secara efektif agar tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dampak risiko seminimal mungkin. Penerapan manajemen risiko pada perusahaan guna menghindari atau meminimalkan potensi kerugian (*potential loss*); mengoptimalkan peluang (*opportunity*); mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif; meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham; meningkatkan tata kelola yang sehat; mengantisipasi perubahan lingkungan yang pesat; serta mengintegrasikan korporat.

Manajemen risiko yang diterapkan mencakup pada risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas usaha. Risiko utama yang dihadapi timbul dari instrumen operasional, seperti kegiatan tertundanya penyelesaian pembangunan kapal, tidak tercapainya target penjualan (*commercial days*) kapal milik, kecelakaan kerja, kebakaran, dan ledakan pada kapal milik dan tidak tercapainya target *commission days*. Sedangkan risiko lainnya adalah risiko keuangan yang terdiri dari tingginya angka piutang.

Risk management is an effort to identify, analyze/ evaluate, manage and review the Company's risks effectively therefore the established company goals can be achieved with minimal risk impact. Implementation of risk management in the Company is to avoid or minimize potential losses; optimize opportunities; maintain a conducive work environment; increase shareholder value; improve healthy governance; anticipating rapid environmental changes; and integrating corporates.

The risk management implemented includes risks faced in performing the business activities. The main risks faced arise from operational instruments, such as delayed completion of vessels construction activities, non-achievement of sales targets (*commercial days*) of owned vessels, work accidents, fires, and explosions on owned vessels and non-achievement of commission days targets. Meanwhile, the other risk is financial risk which consists of high number of receivables.



Fungsi utama dari manajemen risiko yang dijalankan Perusahaan adalah mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan tata cara Perusahaan. Secara rutin, Perusahaan menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan dinamika bisnis Perusahaan dan praktik pasar terbaik.

Kebijakan Manajemen Risiko

Dasar pelaksanaan atau pengelolaan risiko perusahaan tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko PT Pertamina International Shipping No. A4-001/H30000/2021-S9 revisi ke-0 tanggal 26 Juli 2021, yang telah diratifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan No. Kpts-1343/PTK0000/2021-S0 tentang Ratifikasi Pedoman Manajemen Risiko PT Pertamina International Shipping dan Tata Kerja Organisasi Manajemen Risiko *Ongoing Business* No. B-008/I0000/2020-S0 revisi ke-0 tanggal 19 Maret 2020. Pedoman manajemen risiko senantiasa ditinjau dan diperbarui secara berkala.

Pedoman berlaku untuk aktivitas atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dan menjadi acuan Anak Perusahaan. Pedoman ini mencakup antara lain:

1. Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi terkait.
3. Prinsip Manajemen Risiko.
4. Kerangka Manajemen Risiko.
5. Proses Manajemen Risiko.
6. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.

PTK memiliki Traktat Manajemen Risiko yang ditandatangani Direksi tanggal 30 Maret 2022. Traktat Manajemen Risiko merupakan pengembangan prinsip-prinsip manajemen risiko yang tertera dalam Pedoman Manajemen Risiko. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Direksi PTK terhadap penerapan sistem manajemen risiko berbasis integrasi korporasi yang juga dikenal dengan *Enterprise Risk Management* ("ERM") di PTK, serta sebagai landasan bagi seluruh jajaran Perusahaan.

The main functions of risk management performed by the Company are to identify all key risks, measure these risks and manage the risks position as per the Company's policies and procedures. The Company routinely analyses the risk management policy and system to align with its business dynamics and best market practices.

Risk Management Policy

The basis for implementing or managing company risk is stated in the PT Pertamina (Persero) Risk Management Guidelines No. A4- 001/H30000/21-S9 0th revision dated July 26, 2021 which has been ratified in accordance with PT Pertamina Trans Kontinental President Director Decision Letter No. Kpts-1343/ PTK0000/2021-S0 concerning Ratification of PT Pertamina International Shipping's Risk Management Guidelines and Working Procedures of the Ongoing Business Risk Management Organization No. B-008/I0000/2020-S0 0th revision dated March 19, 2020. The risk management guidelines are regularly reviewed and updated.

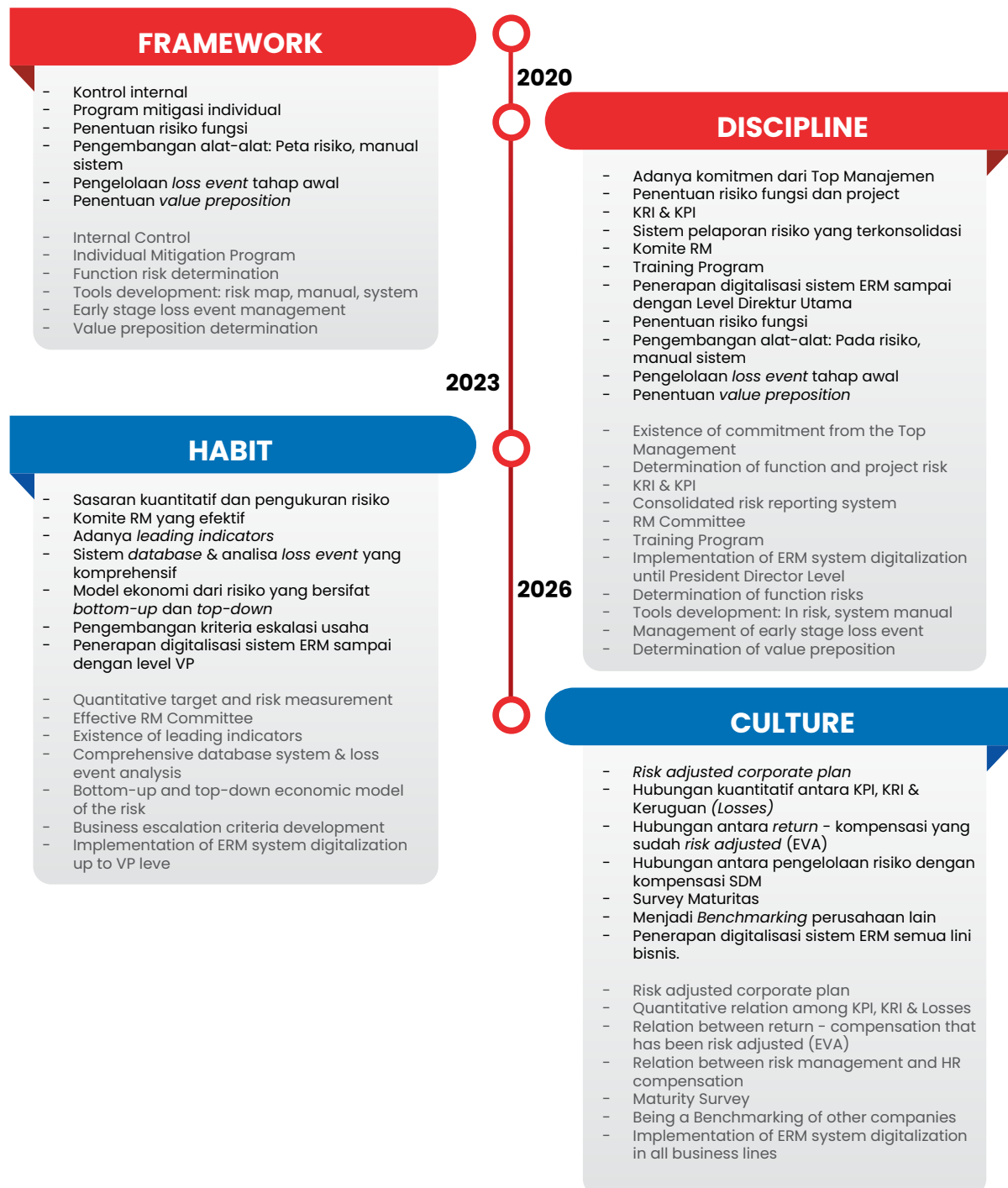
The guidelines apply to activities or business activities related to the Company's interests and become a reference for Subsidiaries. These guidelines include, among others:

1. Risk Management Policy.
2. Duties & Responsibilities of related Functions.
3. Principles of Risk Management.
4. Risk Management Framework.
5. Risk Management Process.
6. Implementation of Risk Management Policy.

PTK has a Risk Management Tract signed by the Board of Directors on March 30, 2022. This Risk Management Tract constitutes a development of the risk management principles stated in the Risk Management Guidelines. This is a form of commitment of PTK's Board of Directors toward the implementation of risk management system based on corporation integration (*Enterprise-wide Risk Management/ERM*) at PTK, as well as a foundation for all levels in the Company.

Peta Jalan Manajemen Risiko Perusahaan

Enterprise Risk Management Road Map

Roadmap Implementasi Enterprise Risk Management PTK
PTK Enterprise Risk Management Implementation Roadmap

Sesuai *roadmap* implementasi ERM, pada tahun 2022 PTK berada pada posisi transisi menuju *Stage 3: DISCIPLINE* di mana pada tahap ini PTK sudah memiliki/menjalankan seluruh kegiatan berikut:

1. Stage 2: *Framework*
 - Kontrol internal
 - Program mitigasi individual
 - Penentuan risiko fungsi
 - Pengembangan alat-alat: Peta risiko, manual sistem
 - Pengelolaan *loss event* tahap awal
 - Penentuan *value preposition*
2. Stage 2: *Discipline*
 - Adanya komitmen dari top manajemen
 - Penentuan risiko fungsi dan *project*
 - KRI & KPI
 - Sistem pelaporan risiko yang terkonsolidasi
 - Komite RM
 - *Training* program
 - Penerapan digitalisasi sistem ERM sampai dengan level Direktur Utama
 - Penentuan risiko fungsi
 - Pengembangan alat-alat: peta risiko, manual sistem

Untuk mencapai Stage 2: *Discipline* secara penuh, PTK harus menyelesaikan beberapa tahapan akhir yang sepenuhnya terkait dengan pengelolaan *loss event* tahap awal dan penentuan *value preposition*. Kedua kegiatan tersebut saat ini baru dilaksanakan untuk *top risk* Perusahaan, sedangkan risiko fungsi atau *region* masih belum optimal dilaksanakan. Kegiatan tersebut rencananya secara bertahap akan dilakukan pada tahun selanjutnya.

Struktur dan Sistem Pengelolaan Risiko

Struktur manajemen risiko PTK berawal dari pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan Risiko Usaha (IRU) serta Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Selain itu, Perusahaan juga memiliki fungsi pendukung untuk menerapkan pengelolaan risiko antara lain fungsi *Budgeting & Management Analysis*, manajemen risiko fungsi, serta manajemen risiko Anak Perusahaan.

In accordance with the ERM implementation roadmap, in 2022 PTK was in a transitional position towards Stage 3: DISCIPLINE where at this stage PTK already had/run all the following activities:

1. Stage 2: Framework
 - Internal Control
 - Individual Mitigation Program
 - Function risk determination
 - Tools development: risk map, manual, system
 - Early stage loss event management
 - Value preposition determination
2. Stage 2: Discipline
 - Existence of commitment from the Top Management
 - Determination of function and project risk
 - KRI & KPI
 - Consolidated risk reporting system
 - RM Committee
 - Training Program
 - Implementation of ERM system digitalization up to President Director Level
 - Determination of function risks
 - Tools development: In risk, system manual

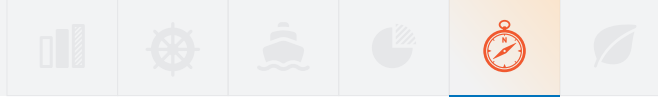
To reach Stage 3: fully DISCIPLINE, PTK must complete several final stages which were fully related to the initial loss event management and determination of value prepositions. These two activities were currently only being carried out for the Company's top risk, while the function or region risks have not yet been implemented. The activity was planned to be carried out in stages in the upcoming years.

Risk Management Structure and System

Risk management structure in PTK is started from the active supervision of the Board of Commissioners through the Investment and Business Risk Committee (IRU) and the Board of Directors through the Risk Management Committee. In addition, the Company also has supporting functions to implement risk management, including the Strategic Planning Business Development (SPBD) function, Risk Management Function, and Risk Management of Subsidiaries.

Manajemen Risiko
Risk ManagementStruktur Manajemen Risiko
Risk Management Structure

Nama Name	Keterangan Description
Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Committee	Komite Investasi dan Risiko Usaha merupakan komite dibawah Dewan Komisaris yang bertujuan untuk mendukung fungsi pengawasan serta memberikan nasihat dan rekomendasi terhadap risiko usaha. The Business Risk and Investment Committee is a committee under the Board of Commissioners that aims to support the supervisory function and provide advice and recommendations on business risks.
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Direksi dalam rangka menangani hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko di Perusahaan. The Risk Management Committee is a committee consisting of a Board of Directors in order to handle matters relating to Risk Management in the Company.
Chief Risk Officer ("CRO")	Merupakan pejabat setingkat Direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko Korporat/ <i>Subholding</i> /Anak Perusahaan. He/She is a Director-level official in charge of the Corporate/ <i>Subholding</i> / Subsidiary Risk Management Function
<i>Budgeting & Management Analysis</i>	Merupakan unit yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi sebagai penanggung jawab manajemen risiko Perusahaan, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing Direktorat dan fungsi leher Direksi. It is a unit that is given the authority and responsibility by the Company's Board of Directors as the Company's risk management unit, to coordinate the implementation of risk management in each Directorate and neck function.
Manajemen Risiko Fungsi Functional Risk Management	Merupakan PIC Manajemen Risiko Fungsi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi melalui pejabat tertinggi pada satu fungsi (satuan kerja) terkait untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing fungsi. A PIC for Risk Management Function that is delegated the authority and responsibility by the Board of Directors through the highest official in a function (work unit) related to coordinating implementation of risk management in each function.
Manajemen Risiko Anak Perusahaan Subsidiary Risk Management	Merupakan fungsi manajemen risiko anak perusahaan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direktur Anak Perusahaan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing Anak Perusahaan. A risk management function in subsidiary that is delegated authority and the responsibility by the Director of subsidiaries to coordinate the implementation of risk management in each subsidiary.



Satuan Kerja Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara terintegrasi dikelola oleh Fungsi *Budgeting & Management Analysis* yang disupervisi Direktur Keuangan dan SDM. Secara spesifik pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab dari *Assistant Manager Risk Management*. Fungsi *Budgeting & Management Analysis* dikelola oleh pimpinan tertinggi fungsi dengan jabatan Manager dan terbagi atas 2 sub-fungsi yang terdiri dari *Budgeting & Reporting* dan *Risk Management*.

Secara aktif, Fungsi *Budgeting & Management Analysis* melakukan komunikasi dan pertemuan (rapat) dengan Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Strategi Penerapan Manajemen Risiko

Strategi penerapan manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan mencakup:

1. Penetapan Batas Toleransi Risiko.
2. Penyusunan *Risk Profile* termasuk di dalamnya pembuatan skala prioritas dan penetapan rencana *Risk Treatment* (Penanganan Risiko).
3. Pemantauan dan pelaporan pengelolaan risiko.
4. Pengembangan budaya risiko.
5. Penyediaan infrastruktur Manajemen Risiko.

Mekanisme Manajemen Risiko

Dalam rangka membangun kapabilitas pengelolaan risiko pada proses bisnis, Perusahaan menggunakan pendekatan 3LOD (*Three Lines of Defence*), dengan menerapkan mekanisme pertahanan secara berlapis dalam mengelola risiko.

Lini pertahanan yang pertama terletak pada setiap fungsi sebagai *Risk Owner*. Lini pertahanan kedua adalah pada unit manajemen risiko dan lini pertahanan ketiga berada pada fungsi Internal Audit. Berikut merupakan gambar penerapan konsep 3LOD.

Risk Management Work Unit

The integrated risk management function is managed by the Budgeting & Management Analysis Function which is supervised by the Finance and HR Director. Specifically, risk management is the responsibility of the Risk Management Assistant Manager. The Budgeting & Management Analysis function is managed by the highest leadership function with the position of Manager and is divided into 2 sub-functions consisting of Budgeting & Reporting and Risk Management.

Actively, the Budgeting & Management Analysis Function conducts communication and meetings with the Investment and Business Risk Committee.

Risk Management Implementation Strategy

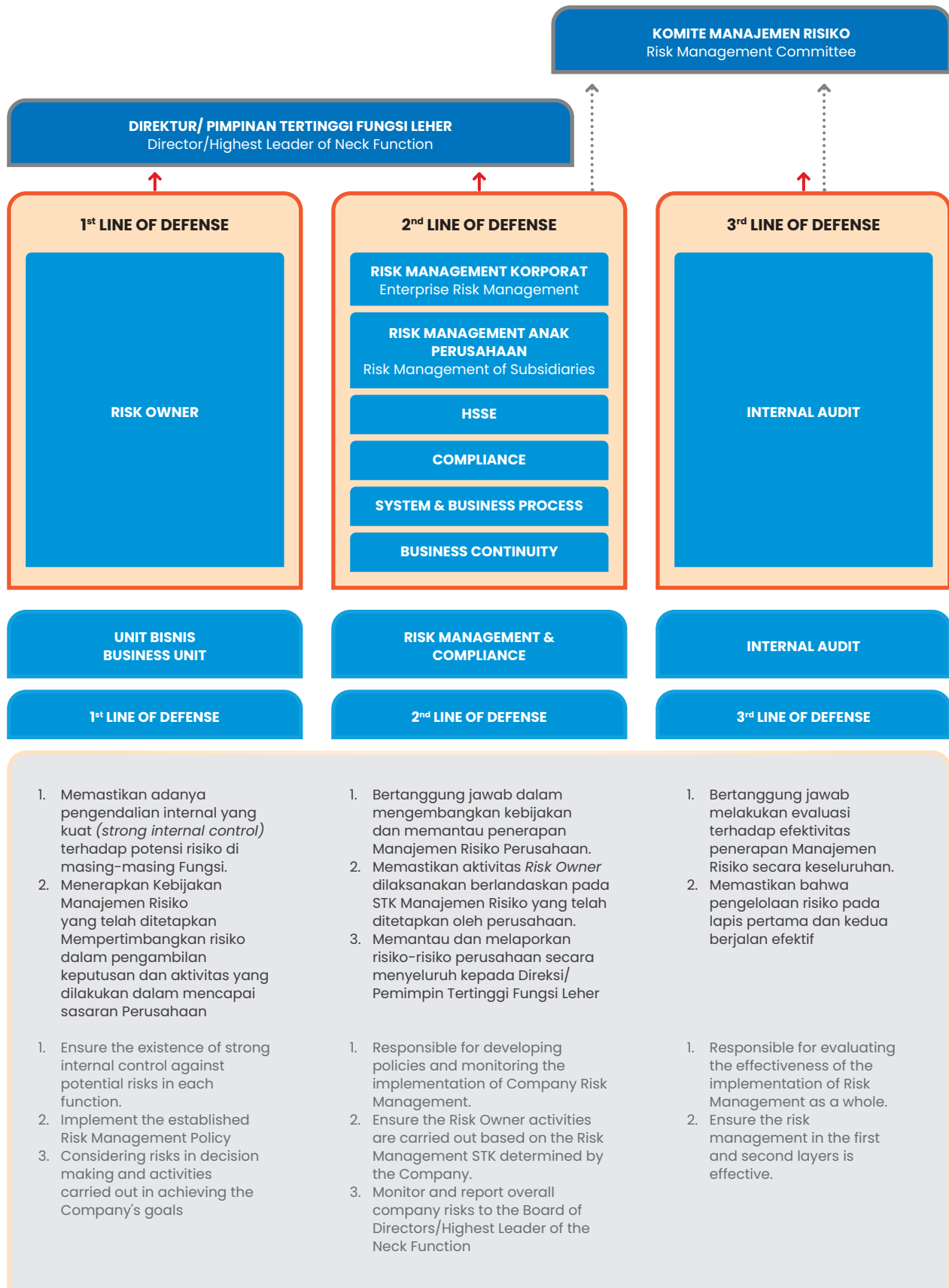
Strategies of the risk management implementation cover:

1. Stipulation of Risk Tolerance Limits.
2. Preparation of Risk Profile includes the creation of a priority scale and the establishment of a Risk Treatment plan.
3. Risk management monitoring and reporting.
4. Risk culture development.
5. Provision of Risk Management infrastructure.

Risk Management Mechanism

In order to build risk management capabilities in business processes, the Company uses a 3LOD (Three lines of defense) approach, by implementing defense mechanisms in layers to manage risk.

The first line of defense lies in every function as a Risk Owner. The second line of defense is the risk management unit and the third line of defense is the Internal Audit function. The following is a picture of the implementation of the 3LOD concept:

Manajemen Risiko
Risk Management

Proses manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Perusahaan pada setiap kegiatan dan atau transaksi usaha, baik itu aktivitas ongoing business ataupun aktivitas investasi. Aktivitas *ongoing business* merupakan serangkaian kegiatan PTK yang telah berjalan secara rutin sesuai dengan proses bisnis Perusahaan berdasarkan prinsip kelangsungan usaha. Sedangkan aktivitas investasi adalah serangkaian kegiatan penggunaan sumber daya dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan. Proses manajemen risiko *Ongoing Business* maupun Investasi sesuai aktivitas usaha PTK yaitu:

1. *Scope, Context & Criteria* (Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria).
2. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko).
3. *Risk Treatment* (Penanganan Risiko).
4. *Communication & Consultation* (Komunikasi dan Konsultasi).
5. *Monitoring & Review* (Pemantauan dan Tinjauan).
6. *Recording & Reporting* (Pencatatan dan Pelaporan).

Peningkatan Kesadaran Risiko Melalui Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Perusahaan berupaya meningkatkan kompetensi serta sertifikasi profesional di bidang Manajemen Risiko guna meningkatkan pengembangan budaya sadar risiko (risk consciousness) dan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*). Kegiatan pelatihan terkait manajemen risiko yang dilaksanakan tahun 2022 diantaranya:

The risk management process aims to protect the Company in every business activity and or transaction, whether it is ongoing business activity or investment activity. Ongoing business activities are a series of PTK activities carried out regularly in accordance with the Company's business processes based on the principle of business continuity. While investment activity is a series of activities using resources in order to increase the Company's value. The Ongoing Business and Investment risk management processes are in accordance with PTK business activities, namely:

1. *Scope, Context & Criteria*.
2. *Risk Assessment*.
3. *Risk Treatment*.
4. *Communication & Consultation*.
5. *Monitoring & Review*.
6. *Recording & Reporting*.

Increasing Risk Awareness Through Risk Management Competency Development

The Company seeks to improve competency and professional certification in the field of Risk Management in order to enhance the development of a culture of risk awareness and knowledge sharing. Training activities related to risk management carried out in 2022 include:

Pelatihan Terkait Manajemen Risiko tahun 2022 Training Related to Risk Management in 2022

Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Sasaran Peserta Target Participants	Jumlah Peserta Total Participants	Kesimpulan Agenda Agenda Conclusion
<i>Executive Briefing & Upskilling Enterprise Risk Management 2022</i>	Daring, 12 Januari 2022 Online, January 12, 2022	Tim Manajemen PTK PTK Management Team	104	<i>Upskilling Enterprise Risk Management Level Management</i>
Klinik Room Tindak Lanjut Percepatan investasi Clinic Room of Follow Up on Acceleration of investment	Daring, 9 september 2022 Online, September 9, 2022	<i>Project Owner</i> dan Koordinator Project Owner and Coordinator	18	<i>Coaching clinic penyusunan risk register project</i> Coaching clinic for compiling a risk register project

Manajemen Risiko
Risk Management

Profil Risiko Perusahaan dan Mitigasi Risiko

Perusahaan melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang diklasifikasikan menjadi beberapa risiko, yaitu *Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk*, serta *Reporting Risk*. Berikut uraian terkait jenis dan mitigasi risiko.

Company Risk Profile and Risk Mitigation

The Company manages risks of which are classified into several risks, namely Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk, and Reporting Risk. The following is a description regarding the types and mitigation of risks.

Jenis Risiko Perusahaan dan Mitigasinya
Type of Company Risks and Their Mitigation

Jenis Risiko Risk Type	<i>Business Strategy Growth & Sustainability Business Continuity</i>
Penjelasan Jenis Risiko Explanation of Risk Type	Tertundanya Penyelesaian Pembangunan Kapal Delayed Completion of Ship Building
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	• Usulan pengakhiran kontrak lebih awal • Memenuhi kelengkapan administrasi pengakhiran sesuai kontrak dan pedoman investasi PTK • Proposed early termination of contract • Fulfill the administrative completeness of termination according to PTK investment contract and guidelines
Jenis Risiko Risk Type	<i>Operational-Sales & Marketing-Marketing Strategy</i>
Penjelasan Jenis Risiko Explanation of Risk Type	Tidak tercapainya target penjualan (<i>commercial days</i>) kapal milik Failure to achieve sales targets (<i>commercial days</i>) owned ships
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	1. Melakukan pricing strategy dan harga jual mengacu pada pergerakan harga komoditi yang terkait langsung dengan produk 2. Melakukan evaluasi komponen biaya HPP bersama dengan Fungsi terkait 3. Melakukan identifikasi atas pemenuhan kompetensi pekerja dengan melakukan pelatihan/<i>sharing knowledge</i> dll sesuai dengan kebutuhan 4. Lebih aktif dalam melakukan <i>marketing approach seperti courtesy visit</i> untuk mendapatkan peluang pasar 5. Pembuatan <i>profiling customer</i> 6. Mengumpulkan dan memilah data terkait dengan potensi pekerjaan (e.g forum sinergi) untuk kemudian dipetakan pekerjaan yang bisa diambil oleh PTK Grup 7. Berlangganan data <i>market intelligence</i> 8. Penggunaan <i>social media</i> sebagai media promosi 9. Berkoordinasi dengan Fungsi Fleet & Ship Management dan RCOS untuk melakukan <i>repositioning</i> kapal sesuai dengan spek dan performa kapal sehingga akses pasar lebih optimal 10. inventarisir potential partner (<i>Ship owner</i>) beserta armadanya 11. Penanganan keluhan customer untuk penyelesaian dan tindak lanjut (penerimaan keluhan dan tindakan lanjut keluhan) sesuai SLA 2 (dua) Hari Kalender 12. melakukan mekanisme forecasting harga komoditas yg terkait langsung dengan produk (AHTS KKKs crude) 13. pengusulan hedging harga penawaran dan kontrak jangka Panjang 14. melakukan studi/portofolio bisnis pemasaran kapal 1. Carry out a pricing strategy and selling prices refer to commodity price movements of which directly related to product 2. Evaluate HPP cost components together with related Functions 3. Identify the fulfillment of employee competencies by conducting training/knowledge sharing etc. as needed 4. Be more active in carrying out marketing approaches such as courtesy visits to gain market opportunities 5. Creating customer profiling 6. Collect and sort data related to job potential (e.g synergy forum) to then map out jobs that can be taken by PTK Group 7. Subscribe to market intelligence data 8. Use of social media as promotional media 9. Coordinate with the Fleet & Ship Management Function and RCOS to reposition ships according to ship specifications and performance thus market access is more optimal 10. inventory of potential partners (Ship owners) and their fleets 11. Handling customer complaints for settlement and follow-up (reception of complaints and follow-up of complaints) according to SLA 2 (two) Calendar Days 12. Conduct a forecasting mechanism for commodity prices of which directly related to product (AHTS PSC Contractors Crude) 13. Proposal for hedging bid prices and long-term contracts 14. Conduct studies/portfolio of ship marketing business


Jenis Risiko Perusahaan dan Mitigasinya
Type of Company Risks and Their Mitigation

Jenis Risiko Risk Type	Operational-HSSE-Safety
Penjelasan Jenis Risiko Explanation of Risk Type	Kecelakaan kerja, kebakaran, dan ledakan pada kapal milik Occupational accidents, fires and explosions on owned ships
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	- Memperbaiki substandard condition salah satunya dengan pengadaan APD yang memadai di kapal, diantaranya FRC (<i>Fire retardant cloth</i>) - Mendorong perubahan budaya safety di PTK yang salah satunya dengan pengelolaan OBIT, mulai dari kampanye, pemantauan, analisa, dan evaluasi program - Pelaksanaan Pelatihan HSSE kepada seluruh level pekerja sesuai jadwal dan usulan ke fungsi HC - Pengisian jabatan vacant Manager dan usulan staff Officer dan TKJP - Fleet Owner dalam memenuhi rekomendasi hasil vetting perlu melakukan pengadaan perlengkapan safety di kapal - Tetap melanjutkan penyampaian laporan BMKG secara berkala (rutin) kepada crew kapal - Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap regulasi dan monitoring atas tindak lanjutnya - Familiarisasi HSSE kepada pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan operasional di PTK - Implementasi program CSMS dalam siklus pengadaan barang/jasa - Improving substandard conditions, one of which is by procuring adequate PPE on board, including FRC (<i>Fire retardant cloth</i>) - Encouraging changes in safety culture in PTK, one of which is the management of OBIT, starting from campaigns, monitoring, analysis, and program evaluation - Implementation of HSSE Training for all levels of workers according to the schedule and proposal to the HC function - Filling in the position of Vacant Manager and proposals for Staff Officers and TKJP - Fleet Owners in fulfilling the recommendations for vetting results need to procure safety equipment on board - Continue to submit BMKG reports periodically (routinely) to the ship's crew - Monitoring compliance with regulations and monitoring the follow-up - HSSE familiarization to third parties involved in operational activities at PTK - Implementation of the CSMS program in the goods/services procurement cycle
Jenis Risiko Risk Type	Financial Management-Financial Operation-Credit Management
Penjelasan Jenis Risiko Explanation of Risk Type	Tingginya Angka Piutang High Receivable Rates
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	- Revisi SLA di internal PTK sesuai dengan STO yang baru tentang batas waktu pengumpulan kelengkapan dokumen pendukung penagihan - Penyederhanaan syarat-syarat penagihan di dalam kontrak yang ada - Melakukan konfirmasi angka piutang, monitoring progress dunning letter dan rekonsiliasi rutin saldo piutang - Melakukan meeting koordinasi terkait dengan progres piutang dengan menetapkan target penyelesaian piutang disetiap wilayah - Melakukan upskilling PIC yang melakukan system penagihan - Penghapusan syarat dalam kontrak untuk coklit dilakukan 3 bulan, dan agar ada penggunaan <i>general term contract</i> yang baku - Pengembangan sistem ICONS (v2) dimana terdapat early warning / notifikasi kepada user dan fungsi <i>Legal Counsel</i> ketika kontrak akan berakhir - Mengaktifkan tim PMO - Revision of SLA in internal PTK in accordance with the new STO regarding the deadline for submitting complete billing supporting documents - Simplification of billing requirements in existing contracts - Confirming accounts receivable figures, monitoring the progress of dunning letters and routine reconciliation of receivable balances - Conducting coordination meetings related to the progress of accounts receivable by setting targets for settlement of receivables in each region - Upskilling the PIC who performs the billing system - Elimination of conditions in the contract for matching research methods is carried out for 3 months, and thus there is the use of a standard general term contract - Development of the ICONS system (v2) where there is an early warning / notification to the user and the Legal Counsel function when the contract is about to end - Activate the PMO team

Manajemen Risiko
Risk ManagementJenis Risiko Perusahaan dan Mitigasinya
Type of Company Risks and Their Mitigation

Jenis Risiko Risk Type	<i>Operational-Operational Excellence-Operational Performance</i>
Penjelasan Jenis Risiko Explanation of Risk Type	Tidak tercapainya target commission days Not achieving target commission days
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	1. Pengembangan lanjutan untuk system pemeliharaan yang terintegrasi dengan menggunakan platform mySAP modul <i>Plant Maintenance</i> di kapal milik PTK 2. <i>Monitoring</i>, mereviu dan mengevaluasi performa kapal-kapal (khususnya kapal-kapal KKR) 3. Pelaksanaan <i>sharing knowledge</i> dan pelatihan terkait pengoperasian dan pemeliharaan kapal terhadap seluruh <i>crew</i> kapal dan <i>owner superintendent</i> oleh pihak ketiga yang berkompeten (<i>maker</i> dan <i>authorized agent</i>) 4. Pelaksanaan <i>daily monitoring</i> terhadap operasi kapal melalui program <i>Basic Operation Care</i> 5. Pengembangan kontrak payung untuk pengadaan barang & jasa lainnya diatas kapal. 1. Advanced development of an integrated maintenance system using the mySAP platform Plant Maintenance module on PTK's ships 2. Monitoring, reviewing and evaluating the performance of ships (especially KKR ships) 3. Implementation of knowledge sharing and training related to the operation and maintenance of ships for all ship crew and superintendent owners by competent third parties (makers and authorized agents) 4. Implementation of daily monitoring of ship operations through the Basic Operation Care program 5. Development of umbrella contracts for procurement of other goods & services on board.

Monitoring Realisasi Mitigasi Risiko
Perusahaan Tahun 2022

Dari realisasi atas mitigasi risiko (tindak lanjut) terhadap 5 (lima) risiko korporat berbasis RKAP di tahun 2022, Perusahaan telah melakukan penanganan risiko dengan langkah-langkah sebagaimana yang terdapat dalam mitigasi tersebut diatas, yang dapat disimpulkan bahwa realisasi atas mitigasi risiko tersebut telah dilakukan dengan baik.

Monitoring risiko di tahun 2022 disusun dan dilakukan secara menyeluruh pada proses bisnis di setiap unit kerja melalui tahapan proses pemantauan (*monitoring*) risiko yang diikuti dengan proses komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan di tahun 2022, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan atas mitigasi risiko (tindak lanjut) yang telah di susun oleh unit kerja telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan potensi risiko dapat diminimalisir dan dikendalikan. *Monitoring* realisasi mitigasi risiko dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Direksi dan Dekom PTK melalui laporan manajemen serta dilaporkan kepada PT Pertamina International Shipping selaku *Subholding Shipping* dan PT Pertamina (Persero) melalui sistem ERMS.

Monitoring on Enterprise Risk Mitigation
Realization in 2022

Based on realization of risk mitigation (follow-up) for 5 (five) RKAP-based corporate risks in 2022, the Company has carried out risk management with steps as contained in the mitigation mentioned above, which can be concluded that the realization of the risk mitigation has been carried out properly.

Risk monitoring in 2022 was compiled and carried out comprehensively in business processes in each work unit through the stages of the risk monitoring process followed by continuous communication and coordination processes in 2022, to ensure the effectiveness of the implementation of risk mitigation (follow-up) arranged by the work unit has been done well and in accordance with the predetermined plan. Therefore, the potential risk was expected to be minimized and controlled. Monitoring of risk mitigation realization was carried out every month and reported to the Board of Directors and the PTK Board of Commissioners through management reports and reported to PT Pertamina International Shipping as Subholding Shipping and PT Pertamina (Persero) through the ERMS system.

Manajemen Risiko Risk Management

PTK telah mempunyai kriteria mengenai batas tingkat risiko yang dapat diterima. Dengan adanya pembaruan daftar risiko Perusahaan, maka dilakukan analisis/pengukuran ulang untuk menentukan prioritas pengelolaannya berdasarkan tingkat atau nilai risikonya. Daftar risiko yang teridentifikasi tersebut seluruhnya akan dikelola Perusahaan dengan mempertimbangkan rencana perlakuan yang sesuai. Setelah diterapkannya rencana perlakuan diharapkan risiko Perusahaan akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelum dilakukan perlakuan tersebut.

Hasil analisis/pengukuran terhadap risiko yang teridentifikasi menunjukkan tingkat risiko setelah dilakukan pengendalian/pengelolaan adalah menurun. Untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima diperlukan upaya peningkatan pengendalian yang ada atau alternatif perlakuan risiko yang lain.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas sistem manajemen risiko dilakukan di tahun 2018, yaitu dengan melakukan pengukuran maturitas risiko. Berdasarkan pengukuran tersebut, tingkat maturitas pelaksanaan manajemen risiko PTK berdasarkan kerangka kerja ISO 31000:2018 adalah 3,73 (*mature growth*).

Dengan perincian untuk aspek *principles* berada pada tahap *advance*, aspek *framework* dalam aspek *growth* dan aspek *process* dalam tahap *mature growth*, dengan rincian:

1. Aspek *Principles* berada dalam tahap *Advance*.
2. Aspek *Framework* dalam tahap *Mature Growth*.
3. Aspek *Process* dalam tahap *Mature Growth*.

Pencapaian ini menandakan bahwa ERM telah terdokumentasi dan terkoordinasi, serta dijalankan secara terukur pada tiap fungsi organisasi. ERM terimplementasi secara komprehensif serta terdapat perangkat formal kendali ERM pada tingkat eksekutif. Integrasi ERM dengan perencanaan strategis dan penilaian kinerja perusahaan belum sempurna, namun telah terdapat tahap evaluasi *framework* ERM yang sistematis.

PTK already has criteria regarding acceptable risk level limits. With the updating of the Company's risk list, analysis/re-measurement was carried out to determine the priorities for management based on the level or value of risk. The list of identified risks all be managed by the Company by considering the appropriate treatment plan. After implementing the treatment plan, it was expected that the Company's risk would be lower than before the treatment was carried out.

The results of the analysis/measurement of the identified risks showed that the level of risk after controlling/management was decreasing. To reduce risk to an acceptable level, it was necessary to improve existing controls or alternative risk treatments.

Risk Management System Effectiveness Review

An evaluation of the risk management system was carried out in 2018 by measuring risk maturity. Based on these measurements, the maturity level of implementing PTK risk management based on the ISO 31000:2018 framework is 3.73 (*mature growth*).

Detail aspects of the principles are including the advance, framework, growth, and process aspects in the mature growth stage, with detail, as follows:

1. Principles Aspect in Advance stage.
2. Framework Aspect in Mature Growth stage.
3. Process Aspect in Mature Growth stage.

This achievement indicated that Enterprise Risk Management (ERM) had been documented and coordinated, and carried out in a measurable manner at each organizational function. ERM was implemented comprehensively and formal tools for ERM control at the executive level were in place. ERM integration with strategic planning and evaluation of company performance was not perfect, but there had been a systematic evaluation phase of the ERM framework.

Manajemen Risiko
Risk Management**Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko**

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pengelolaan risiko perusahaan, berbagai upaya telah dilaksanakan PTK di antaranya melakukan integrasi manajemen risiko serta pengembangan dan pengintegrasian aplikasi manajemen risiko. Integrasi manajemen risiko dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *three lines of defense*, yaitu pendekatan yang sistematis dan efektif karena dapat meningkatkan komunikasi dan kontrol dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab (*accountability and segregation of duties*) sehingga dapat mendukung terciptanya budaya risiko, pemahaman dan kesadaran risiko yang lebih baik.
2. *Risk Based Audit* (RBA).
3. *Risk Based Budgeting* (RBB) yaitu menyelaraskan perumusan RKAP dengan pengelolaan risiko untuk memastikan pencapaian target perusahaan.

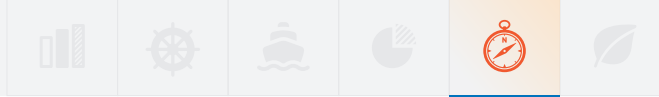
Di sisi lain, pengelolaan risiko akan lebih mudah dan cepat dengan adanya digitalisasi. Untuk itu PTK menerapkan aplikasi *Enterprise Risk Management System* (ERMS) Pertamina untuk mengintegrasikan *top risk* seluruh anak perusahaan PT Pertamina International Shipping.

Risk Management Improvement and Enhancement

In order to improve and enhance the Company's risk management, PTK has carried out various efforts, including integrating risk management and developing and integrating risk management applications. Risk management integration is carried out through the following activities:

1. Implementation of three lines of defense, namely a systematic and effective approach because it can improve communication and control by clarifying duties and responsibilities (*accountability and segregation of duties*) so as to support the creation of a risk culture, better understanding and risk awareness.
2. Risk Based Audit (RBA).
3. Risk Based Budgeting (RBB), namely aligning the RKAP formulation with risk management to ensure the achievement of company targets.

On the other hand, risk management will be easier and faster with digitalization. For this reason, PTK applies Pertamina's Enterprise Risk Management System (ERMS) application to integrate the top risks of all subsidiaries of PT Pertamina International Shipping.



Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Pengendalian internal adalah suatu proses yang melibatkan seluruh personil yang ada dalam organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, sampai dengan karyawan tingkat bawah. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN, Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk menunjang organ Komite Audit, Internal Audit dan Audit Eksternal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan aktivitas dan pengelolaan Perusahaan.

Pembentukan Sistem Pengendalian Internal juga dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Perusahaan untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip penerapan GCG. Upaya pengendalian internal ini secara khusus diterapkan dalam aspek-aspek penting seperti aspek operasional, keuangan, SDM, dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan. Selain itu, sistem pengendalian internal juga dimaksudkan untuk menekan potensi risiko usaha maupun praktik penyimpangan etika bisnis yang berdampak negatif pada kinerja Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan PTK merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh pekerja, baik pada jajaran pimpinan sampai dengan staf. Hal tersebut dilakukan untuk membangun komitmen yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal PTK telah mengacu pada prinsip-prinsip *Internal Control Integrated Framework* yang ditetapkan Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Proses perancangan sistem pengendalian internal PTK telah mengacu kepada kerangka COSO dengan memperhatikan 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan ditujukan untuk:

1. Mengamankan aset.
2. Mengupayakan efisiensi dan efektivitas operasi Perusahaan.
3. Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi/finansial dan manajemen.
4. Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku.

Internal control is a process that involves all personnel in the organization from the Board of Commissioners, Directors, management, to lower-level employees. Internal control is designed to provide reasonable assurance in order to achieve the company's objectives. In the SOE Minister Regulation Number PER-09/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in SOE, the Internal Control System is designed to support the organs of the Audit Committee, Internal Audit and External Audit in the implementation of the function of monitoring activities and Company management.

The establishment of Internal Control System is also intended to realize the Company's commitment to comply with and comply with the principles of GCG implementation. This internal control effort is specifically applied to important aspects such as operational, financial, HR aspects, as well as compliance with laws and regulations. In addition, the internal control system is also intended to reduce potential business risks and business ethics deviation practices that have negative impact on the Company's performance.

The Internal Control System implemented by PTK is an integral process for actions and activities that are carried out continuously by all employees, from the leadership to the staff. This is done to build a complete commitment in order to achieve organizational goals. The PTK Internal Control System has referred to the Internal Control Integrated Framework principles set by Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Internal Control System Conformity with COSO Framework

In PTK, the internal control system designing process has complied to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO) framework by considering 5 components, such as control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and supervision. The implementation of internal control system is aimed to:

1. Secure assets.
2. Encourage efficiency and effectivity in the Company's operation.
3. Develop reliability and comprehensiveness in accounting/financial information and management.
4. Guarantee compliance to policy and procedure as well as the prevailing laws and regulations.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System**THREE LINES OF DEFENSE**

Sesuai COSO, PTK telah menerapkan mekanisme *Three Line of Defense* sebagai aktivitas penerapan pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara terpadu.

In accordance with COSO, PTK has implemented third line of defense mechanism as part of the internal control implementation and integrated corporate governance.

FIRST LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh masing-masing unit atau satuan kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing:

- Pengetahuan dan pemahaman atas proses bisnis, proses kerja utama.
- Identifikasi potensi risiko pada tugas yang menjadi wewenang dari setiap unit.
- Pengendalian dan pelaksanaan mitigasi potensi risiko.

Managed by each unit or task force in accordance with respective functions and duties:

- Knowledge and insight on business process, and main work process.
- Potential risks identification on the duties that have been authorized to each unit.
- Control and implementation of potential risks mitigation.

SECOND LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang berada pada unit *strategic & planning* dan fungsi *compliance* yang berada pada unit *Corporate Secretary*.

- Peningkatan fungsi *check & balance* mendukung operasi Perusahaan.
- Sosialisasi kesadaran terhadap penerapan tata kelola Perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko pada semua unit kerja dan tingkatan organisasi.
- Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi.
- Penyempurnaan pedoman dan kebijakan operasional dan non-operasional.

Managed by risk management function under the strategic & planning unit and compliance function under the Corporate Secretary unit

- Increasing check & balance function in support of the Company's operation.
- Socializing awareness to the implementation of corporate governance, compliance and risk management in all work units and organizational levels.
- Implementing integrated risk management.
- Improving operational and non-operational manuals and policies.

THIRD LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh Unit Audit Intern.

- Pelaksanaan audit internal sesuai program kerja audit tahunan.
- Pelaksanaan audit surprise untuk mengukur kesadaran akan penerapan tata kelola perusahaan.
- Kepatuhan dan manajemen risiko.
- Database temuan audit internal dan eksternal sebagai masukan untuk peningkatan.
- Kualitas setiap unit/fungsi.

Managed by the Internal Audit Unit

- Implementation of internal audits in accordance with the annual audit work program.
- Implementation of a surprise audit to measure awareness of the corporate governance implementation.
- Compliance and risk management.
- Database of internal and external audit findings as input for improvement the quality of each unit/function.

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Penerapan Elemen Pengendalian Internal

PTK menerapkan elemen-elemen pengendalian internal dengan merujuk kepada COSO - *Internal Control Framework*.

- **Lingkungan Pengendalian**
PTK berkomitmen membangun lingkungan pengendalian yang baik melalui penerapan serangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi.
- **Penilaian Risiko**
PTK menerapkan sistem manajemen risiko dan melakukan pemetaan serta mitigasi risiko atas risikorisiko yang teregritasi: *governance risk, strategy and planning risk, finance risk, operational/infrastructure risk, compliance risk, reporting risk*.
- **Aktivitas Pengendalian**
PTK memiliki pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan non-operasional. Mekanisme pengendalian terhadap risiko diterapkan dalam bentuk *Three Line of Defense*.
- **Komunikasi dan Informasi**
PTK memiliki sistem manajemen informasi yang baik dan terus mendorong komunikasi yang terbuka dengan seluruh pihak untuk memperoleh informasi yang memadai untuk proses pengambilan keputusan.
- **Aktivitas Pemantauan**
PTK memiliki mekanisme pemantauan dalam bentuk Rapat Kerja, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris-Direksi, Rapat Direksi dan berbagai aktivitas pengendalian lainnya.

Pembaruan Terkait Pengendalian Internal

Guna mengefektifkan pelaksanaan sistem pengendalian internal, Perusahaan melakukan pembaruan terkait pengendalian internal yang telah mulai diterapkan pada tahun 2019. Pembaruan tersebut meliputi:

1. Sinergi Internal Audit Pertamina Group di PT Pertamina (Persero) selaku *Holding* dan PT Pertamina International Shipping selaku *Subholding*.
2. Melakukan pembaruan proses bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam *Audit Universe* dan diimplementasikan melalui *Audit Management System* ("AMS").
3. Koordinasi *review Annual Audit Plan* ("AAP") secara periodik yang melibatkan seluruh Fungsi Internal Audit di *Pertamina Group* sesuai perubahan proses bisnis, arahan *Top Management* baik di *Holding* maupun *Subholding* serta melibatkan *stakeholder* terkait.

Implementation of Internal Control Elements

PTK implements elements of internal control by referring to COSO - Internal Control Framework.

- **Control Environment**
PTK is committed to build a good control environment through a series of standards, processes, and structures which serve as basis for internal control implementation across the organization.
- **Risk Assessment**
PTK implements risk management system and performs risk mapping and mitigations over the integrated risks: governance risk, strategy and planning risk, finance risk, operational/infrastructure risk, compliance risk, and reporting risk.
- **Control Activities**
PTK has a manual and policies for operational and non-operational activities. The control mechanism to risks is applied in the form of Third Line of Defense.
- **Communication and Information**
PTK has good information management system and strives to promote open communication with all parties to acquire sufficient information for decision making.
- **Monitoring Activity**
PTK has a monitoring mechanism in form of Coordination Meeting, Board of Commissioners Meeting, Management Meeting, Board of Directors Meeting, and other various control activities.

Updates Related to Internal Control

In order to have an effective internal control system, the Company has made updates regarding internal controls which have been implemented in 2019. These updates include:

1. Pertamina Group Internal Audit Synergy at PT Pertamina (Persero) as Holding and PT Pertamina International Shipping as Subholding.
2. Updating the Company's business processes as outlined in the Audit Universe and implemented through the Audit Management System ("AMS").
3. Coordinate periodic Annual Audit Plan ("AAP") reviews involving all Internal Audit Functions at Pertamina Group according to changes in business processes, Top Management directives both in Holding and Subholding and involving relevant stakeholders.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System**Pengendalian Keuangan**

Sejalan dengan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, PTK melakukan pengendalian atau pengelolaan terkait keuangan sebab hal tersebut menjadi faktor penting dalam kelancaran aktivitas operasional dan bisnis perusahaan. Pengendalian/pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sehat sehingga perusahaan dapat meminimalisir pemborosan, penyimpangan, serta mengoptimalkan arus keuangan perusahaan.

Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan

Tujuan pengelolaan keuangan adalah memaksimalkan laba serta mengejar tingkat pertumbuhan Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (*cost consciousness*). Perusahaan menganalisa dan mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menangani risiko yang terjadi.

Pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Terkait prosedur, kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik, serta sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai guna menjauhkan perusahaan dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terkait proses pencatatan, kesalahan penyajian, hingga pelaporan keuangan perusahaan.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan dalam bentuk rencana jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dasar penyusunan anggaran adalah program kerja dan dikoordinasikan antar fungsi/kantor region untuk menyinergikan usulan anggaran setiap fungsi/kantor *region* dengan menganut prinsip *bottom-up* dan *top-down*. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis setiap fungsi kantor region dengan mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya, dan analisis terhadap peluang pasar yang kemungkinan besar bisa dicapai. Anggaran Perusahaan terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran biaya dan anggaran investasi. Perusahaan telah melakukan pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi dalam pengelolaan keuangan.

Financial Control

In line with the implementation of effective internal control system, PTK carries out financial control or management because it is an important factor in the smooth running of the Company's operational and business activities. Financial control/management is carried out with sound principles thereby the Company can minimize waste, fraud, and optimize its financial flow.

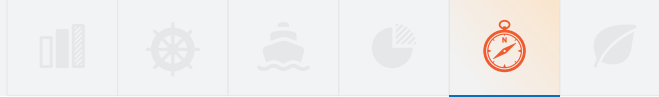
Financial Management Basic Principles

Financial management holds the purpose of maximizing profit as well as pursuing growth level of the Company through an implementation of work program based on cost consciousness principle. The Company analyses and anticipated all possible risks and performs necessary measures to address the risks.

The Company's financial management is carried out professionally, transparently, and based on the principle of prudence. Related to procedures, policies and regulations relating to financial management, it is prepared and evaluated periodically, and in accordance with Financial Accounting Standards and prevailing laws and regulations. Companies must create an adequate internal control system to keep the company away from various high-risk issues related to the recording process, misrepresentation, to the Company's financial reporting.

Financial Management Planning

The Company's financial management is carried out in the form of short-term, medium-term, and long-term plans. The basis for preparing a budget is a work program and is coordinated between functions/branch offices to synergize the proposed budget of each function/branch office by adopting the bottom-up and top-down principles. The Board of Directors has set realistic revenue and cost targets for each branch office function by considering the needs, resources, and analysis of market opportunities that are likely to be achieved. The Company's budget consists of an income budget, a cost budget, and an investment budget. The Company has segregated duties between the functions of verification, recording and reporting, depositing and depositing funds as well as authorization in financial management.



Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada RKAP dan mempertimbangkan asas manfaat. Direksi dan Dewan Komisaris menyusun kebijakan mengenai transaksi-transaksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, selain yang diatur dalam Anggaran Dasar. Setiap keputusan Dewan Komisaris terkait dengan transaksi-transaksi yang melalui persetujuan Komisaris, wajib ditaati Direksi.

Direksi menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan mengenai pendelegasian dan batas kewenangan untuk mempercepat proses aktivitas dengan tetap memperhatikan risiko. Pengeluaran-pengeluaran yang belum dicantumkan dalam RKAP dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Direksi.

Perubahan revisi rencana kerja dan anggaran harus melalui prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan Direksi dan dilakukan dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan memberikan apresiasi terhadap fungsi/kantor region yang dapat mencapai target kinerjanya.

Pengendalian Pengelolaan Keuangan

Setiap fungsi/kantor region harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada Direksi. Manajer fungsi/kepala region bertanggung jawab untuk *me-monitor*, mengevaluasi dan mengefektifkan realisasi RKAP pada fungsi/kantor *region*-nya.

Perusahaan melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP dan analisis terhadap penyimpangan (*variance*) yang dilakukan oleh fungsi kantor region secara keseluruhan. Adapun pemantauan pengelolaan keuangan kantor *region* menjadi tanggung jawab Fungsi *Financial Accounting*.

Perusahaan menetapkan kebijakan yang jelas mengenai pelimpahan wewenang pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang. Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Direksi.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan

Setiap fungsi/kantor region/anak perusahaan wajib mengirimkan laporan keuangan ke Direktur Keuangan. Perusahaan melakukan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh fungsi/kantor *region* serta anak perusahaan.

Financial Management Implementation

Activities of the Company are carried out by referring to RKAP and considering benefits principle. The Board of Directors and Board of Commissioners prepare policies on transactions requiring approval from the Board of Commissioners, aside from the regulations in the Articles of Association. Each decision made by the Board of Commissioners related to transactions that require approval from the Board of Commissioners must be obeyed by the Board of Directors.

The Board of Directors stipulates a financial management policy on the delegation and limit of authority to accelerate activity process by consistently considering the risks. Expenditures that have yet to be stated in RKAP could be made possible after obtaining an approval from the Board of Directors.

Changes in the revision of work plan and budget should undergo procedures/ provisions stipulated by the Board of Directors and be based on justifications that can be held accountable for. The Company gives appreciation to functions/branch offices that could achieve its performance target.

Financial Management Control

Each function/branch office should be account for financial management to the Board of Directors. The manager of function/ branch office is responsible for monitoring, evaluating, and making the realization of RKAP effective in its function/branch office.

The Company carries out an evaluation over the RKAP implementation and analysis on the variance performed by the branch office function as a whole. The monitoring of financial management at a branch office became the responsibility of Financial Accounting Function.

The Company stipulates a clear policy on the delegation of authority on giving authorization for cash expenditure. The Board of Commissioners monitors the financial management accomplished by the Board of Directors.

Financial Management Reporting

Each function/branch office/subsidiary is obligated to submit financial statements to Finance Director. The Company performs the consolidated financial statements from all functions/branch offices as well

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Direktur Keuangan harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur akuntansi diterapkan secara konsisten dan dilaksanakan oleh seluruh fungsi/kantor *region*. Direksi bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Penyampaian laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan tepat waktu, untuk dikonsolidasikan oleh induk perusahaan.

Pengendalian Operasional

Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan pengiriman jasa. Proses bisnis kunci PTK terdiri dari kegiatan pemasaran dan operasi kapal (*Marketing and Operation*), keagenan kapal, *port operation and service* untuk pelabuhan khusus migas.

Prinsip Dasar Pengelolaan Operasional

- Tujuan bisnis perusahaan adalah terus melakukan, menguntungkan, dan ditujukan untuk kelangsungan hidup (*going concern*) Perusahaan.
- Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan jasa yang profesional dan penuh integritas.

Perencanaan Pengelolaan Operasional

- Direktur utama memastikan bahwa tujuan manajemen didefinisikan dalam semua proses kunci.
- Rencana dan pengembangan proses yang diperlukan untuk merealisasikan jasa perusahaan tertuang dalam Rencana Kerja Pendapatan dan Laba Tahunan ("RKPL").
- *Management Representative* ("MR") dan *Designated Person Ashore* ("DPA") berwenang untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memelihara sistem manajemen.

Pelaksanaan Pengelolaan Operasional

- Melaksanakan operasional perusahaan sesuai RKAP dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas biaya.
- Pemilik proses kunci dan proses *owner* memimpin pelaksanaan kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Utama.
- Jasa diberikan kepada pelanggan mengacu pada TOR (*Term of Reference*) untuk pekerjaan dalam dokumen kontrak yang telah disepakati.

as subsidiaries. Finance Director should ensure the accounting policies and procedures are implemented consistently and by all functions/branch offices. The Board of Directors is responsible in preparing the financial statements, in accordance with the prevailing financial accounting standards in Indonesia. The submission of audited financial statements should be handled in a timely manner in order to be consolidated by the parent company.

Operational Control

The Company administers the business activities starting by identifying the needs and ended with service delivery. The key business process of PTK consists of Marketing and Operation, ship agencies, port operation and service for oil and gas special port.

Basic Principles of Operational Management

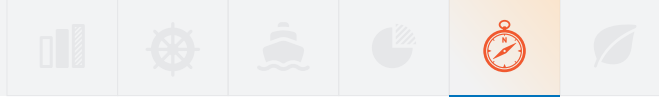
- The business objective of the Company continuously performs, benefits, and is aimed for the Company's going concern.
- Fulfilling the customers' needs with professional service and integrity.

Operational Management Planning

- President Director ensures the management objectives are defined in all key processes.
- Required process planning and development for company services realization are regulated in Annual Revenues and Profit Budget Plan ("RKPL").
- Management Representative ("MR") and Designated Person Ashore ("DPA") hold the authority to develop, implement, and maintain the management system.

Operational Management Implementation

- Performing company operational in accordance with RKAP by considering cost efficiency and effectivity.
- Owner of key process and owner process are in charge of implementing operational activities to achieve the objectives stipulated and agreed by the President Director.
- Services provided for the customers refer to TOR (*Term of Reference*) designed for the jobs in the agreed contract.



Pengendalian dan Pelaporan

- Pelaporan realisasi kegiatan operasional Perusahaan dilakukan oleh unit/fungsi yang terkait secara berkala kepada Direksi.
- Semua jasa yang diberikan kepada pelanggan dikaji dan ditinjau. Bila mana ada perubahan persyaratan dalam perjanjian maka perubahan diberitahukan kepada pelanggan dan fungsi yang bersangkutan.

Evaluasi dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal menjaga keamanan harta milik Perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut dilakukan oleh fungsi audit internal untuk *memonitoring* kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Perusahaan melakukan evaluasi melalui pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan operasional dan menyampaikan hasilnya kepada Direksi dan Kantor Region, untuk segera ditindaklanjuti.

Pengendalian internal dalam hal keuangan perusahaan dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal atas pelaporan keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting*/"ICOFR"). Pelaksanaan ICOFR sebagai tinjauan (*review*) dalam hal keuangan Perusahaan, telah dilaksanakan Internal Audit selama kurun waktu periode pelaporan. Kesimpulan hasil sertifikasi yang dilaksanakan oleh *Control Group*, memperlihatkan tingkat kecukupan dan efektivitas ICOFR berada pada tingkat efektif.

Pengendalian internal atas operasional Perusahaan dilaksanakan melalui mekanisme *Internal Control Review* ("ICR") oleh Internal Audit melalui mekanisme audit operasional. Hasil tinjauan yang dilakukan selama tahun 2022 memperlihatkan perusahaan telah melaksanakan standar prosedur operasi sesuai praktik-praktik terbaik pengelolaan jasa *marine*.

Control And Reporting

- Reporting of the realization of company's operational activities is conducted by related units/functions periodically to the Board of Directors.
- All of the services provided to the customers to be analyzed and reviewed. If there is any change of requirements in the agreement, notification should be made to the customers and functions concerned.

Internal Control System Evaluation And Effectivity

Evaluation to the effectiveness of the internal control system to safeguard the security of Company property, examine the accuracy and accuracy of accounting data, encourage efficiency, and help encourage compliance with established management policies. The evaluation is carried out by the internal audit function to monitor the adequacy and effectiveness of internal control. The Company evaluates through monitoring of the followup results of operational checks and submits the results to the Directors and Branch Offices, for immediate action.

The internal control in finance is realized through an internal supervision mechanism over the financial statements (*Internal Control Over Financial Reporting*/"ICOFR"). The implementation of ICOFR as a review in the Company's finance has been conducted by the Internal Audit throughout the reporting period. The conclusion of certification results, developed by Control Group, depicts the ICOFR level of adequacy and effectivity at effective level.

Internal control over the Company's operations is carried out through the Internal Control Review ("ICR") mechanism by the Internal Audit through the operational audit mechanism. The results of the review conducted during 2022 indicated that the Company had implemented standard operating procedures in accordance with marine services management best practices.

Perkara Penting

Important Cases

Permasalahan Hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut.

Legal Issues

The issues and/or legal cases faced by the Company, its subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Directors throughout 2021-2022 were as follows.

Permasalahan Hukum Legal Cases	2021		2020	
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal
Perusahaan Company				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of completion	2	-	-	-
Jumlah Total	2	-	-	-
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of completion	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-
Entitas Anak Subsidiaries				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of completion	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan Total	3	-	-	-

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

PERKARA #01: Perkara Gugatan Sewa Aset Lahan di Lahan Bagus Kuning

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. PT BATUBARA MANDIRI (PENGGUGAT)
2. PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL (TERGUGAT)
3. PT PERTAMINA (PERSERO) (TURUT TERGUGAT)

POKOK PERKARA:

Sewa Aset Lahan di Lahan Bagus Kuning Palembang

STATUS PERKARA:

Proses Perkara di Pengadilan Negeri Batam

Details of legal issues faced by the Company in 2022 were as follows.

CASE #01: LAWSUIT FOR LAND ASSETS IN BAGUS KUNING LAND

PARTIES IN DISPUTE:

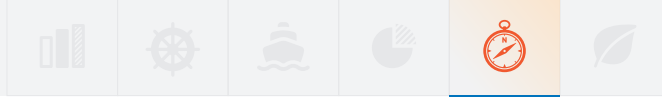
1. PT BATUBARA MANDIRI (PLAINTIFF)
2. PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL (DEFENDANT)
3. PT PERTAMINA (PERSERO) (CO-DEFENDANT)

SUBJECT MATTER:

Lease Land Assets in Bagus Kuning Land, Palembang

CASE STATUS:

Case Process at Batam District Court

**RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:**

Tuntutan Gugatan Kerugian Materiil dan Immateriil oleh Penggugat yaitu PT Batubara Mandiri kepada PT Pertamina Trans Kontinental sebesar Rp298.964.469.881,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah).

TINDAK LANJUT:

Hingga tanggal 31 Desember 2022, proses pemeriksaan perkara masih berlangsung di Pengadilan Negeri Batam.

Perkara #02: Perkara Kegagalan Pembangunan 3 (tiga) Unit Kapal Harbour Tug Oleh Galangan PT Dok Bahari Nusantara ("DBN")**PIHAK YANG BERPERKARA:**

1. PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL ("PTK") (PEMOHON)
2. PT DOK BAHARI NUSANTARA ("DBN") (TERMOHON)

POKOK PERKARA:

Bahwa PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") dan PT Dok Bahari Nusantara ("DBN") sebelumnya telah menandatangani Perjanjian kerja sama mengenai pembangunan 3 (tiga) unit kapal harbour tug 3200 HP. Dimana berdasarkan Perjanjian diketahui bahwa DBN berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) unit Kapal tersebut dengan jangka waktu pembangunan selama 13 (tiga belas) bulan dan penambahan 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender terhitung sejak Tanggal Efektif Perjanjian yaitu tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Adapun DBN tidak kunjung menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) unit Kapal tersebut, serta melalui Surat DBN No. 11.03/A/DBNPTK/SPb/XI/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Pembangunan 3 (tiga) Unit Kapal Harbour Tug 3200 HP, DBN menyatakan tidak mampu menyelesaikan pembangunan kapal dan bersedia menerima terminasi kontrak dan bekerja sama penuh dalam mendukung proses administrasi yang diperlukan termasuk dalam melakukan pencairan *Refund Guarantee*.

STATUS PERKARA:

Proses Perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")

RISKS FACED THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS:

Lawsuit Claims for Material and Immaterial Losses by the Plaintiff, namely PT Batubara Mandiri against PT Pertamina Trans Kontinental in total of Rp298,964,469,881.00 (two hundred ninety-eight billion nine hundred sixty four million four hundred sixty nine thousand eight hundred and eighty one Rupiah).

FOLLOW-UP:

As of December 31, 2022, the case examination process is still ongoing at the Batam District Court.

Case #02: Development Failure Case of 3 (Three) Harbor Tug Ship Units by PT Dok Bahari Nusantara ("DBN") Shipyard**PARTIES IN DISPUTE:**

1. PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL ("PTK") (APPLICANT)
2. PT DOK BAHARI NUSANTARA ("DBN") (RESPONDENT)

SUBJECT MATTER:

Whereas PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") and PT Dok Bahari Nusantara ("DBN") had previously signed a cooperation agreement regarding the construction of 3 (three) units of 3200 HP harbour tug ships. Where based on the Agreement it is known that DBN is obliged to complete the construction of the 3 (three) units of the Ship with a construction period of 13 (thirteen) months and an additional 73 (seventy-three) calendar days from the Effective Date of the Agreement, namely September 18, 2019 until December 30, 2020;

Meanwhile, DBN has not yet completed the construction of the 3 (three) ships, and through DBN Letter No. 11.03/A/DBNPTK/SPb/XI/2021 dated November 11, 2021 regarding the Construction of 3 (three) Units of Harbor Tug 3200 HP Ships, DBN stated that it was unable to complete the ship construction and was willing to accept contract termination and fully cooperate in supporting the necessary administrative processes included in disbursing the Refund Guarantee.

CASE STATUS:

Case Process at the Indonesian National Arbitration Board ("BANI")

Perkara Penting
Important Cases**RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:**

Bahwa PT Pertamina Trans Kontinental tidak mendapatkan sejumlah 3 (tiga) Unit kapal yang telah diperjanjikan oleh karena itu PTK mengajukan tuntutan kerugian sebagaimana yang telah disampaikan melalui Surat Permohonan Pendaftaran Gugatan di BANI dengan No.45092/XI/ARB-BANI/2022 tanggal 10 November 2022 di bawah ini :

- Selisih Harga Pembelian 3 Unit Kapal Baru Rp78.987.000.000;
- Penyewaan 3 Kapal Pengganti Rp11.299.031.407;
- Pengawasan Pembangunan Kapal Rp358.411.571;
- Pembayaran Atas Biaya Bagi Hasil/ Bunga Bank Rp7.224.746.290,88

RISKS FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF CLAIMS:

PT Pertamina Trans Kontinental did not receive the 3 (three) unit ships that had been agreed upon, therefore PTK filed a claim for losses as submitted through the Letter of Application for Registration of Lawsuit at BANI with No.45092/XI/ARB-BANI/2022 dated November 10, 2022 below:

- The difference in the purchase price of 3 new ships is Rp78.987.000.000;
- Rental of 3 substitute ships Rp11,299,031,407;
- Supervision of Ship Building Rp358,411,571;
- Payment of Profit Sharing Fees/ Bank Interest Rp7,224,746,290.88.

Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Berikut disampaikan transparansi sanksi administrasi yang diterima Perusahaan di tahun 2022.

Disclosure of Administrative Sanctions by Related Authorities

The following is a transparency of administrative sanctions received by the Company in 2022.

Entitas Entity	Sanksi Administratif Administrative Sanction
Perusahaan Company	Nihil None
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors	Nihil None
Entitas Anak Subsidiaries	Nihil None

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Tidak terdapat laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

Report on Company Activities that Pollute the Environment

There are no reports of Company activities that pollute the environment.

Upaya Meminimalisir Risiko Hukum

PTK berupaya secara berkesinambungan untuk terus meminimalisir risiko hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Secara konsisten melaksanakan program *Legal Risk Awareness* termasuk namun tidak terbatas pada sosialisasi format kontrak baku dan sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan bisnis perusahaan, sebagai salah satu upaya pencegahan risiko hukum dan peningkatan kualitas pemahaman aspek hukum bagi seluruh pekerja maupun calon pekerja secara berjenjang dan sesuai dengan kebutuhan bisnis PTK.

Efforts to Minimize Legal Risks

PTK continuously strives to minimize legal risks against the company in carrying out business activities which are reflected in the following activities:

- Consistently implement the Legal Risk Awareness program including but not limited to socialization of standard contract formats and socialization of regulations related to the company's business, as an effort to prevent legal risks and improve the quality of understanding of legal aspects for all workers and prospective workers in stages and in accordance with PTK's business needs.



Perkara Penting
Important Cases

2. Memperkuat budaya Perusahaan dan integritas melalui sosialisasi dan pengukuran pemahaman pekerja terhadap integritas.
 3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi.
 4. Penegakan disiplin pekerja.
2. Strengthening corporate culture and integrity through socialization and measurement of employees' understanding of integrity.
 3. Establishment of Gratification Control Unit.
 4. Employee discipline enforcement



Kode Etik

Code of Conducts



Pedoman Perilaku merupakan salah satu bentuk komitmen dalam rangka penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan merupakan sekumpulan komitmen yang berisi tentang kewajiban, larangan dan hubungan dengan *stakeholders* lainnya. *Code of Conduct* mengatur kewajiban yang harus ditaati setiap insan Perusahaan.

Perusahaan senantiasa menjalankan bisnis operasional secara jujur, beretika, berintegritas, dan berupaya melakukan yang terbaik. Untuk mendukung komitmen tersebut, PTK menerapkan kode etik dan etika bisnis yang harus dipatuhi semua pihak perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan, serta menciptakan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Kode etik merupakan pedoman perilaku profesional seluruh insan perusahaan. Termasuk jajaran manajemen yaitu Dewan Komisaris dan Direksi.

Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan Sebagai Landasan Utama

Perusahaan telah menetapkan kode etik sesuai dengan visi dan misi Perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dalam berinteraksi, baik dengan pihak di dalam lingkungan Perusahaan maupun pihak luar. Kode etik Perusahaan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di lingkungan Perusahaan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan pegawai yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh pegawai. Seluruh pegawai diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan dan menerapkan kode etik dalam kegiatan sehari-hari.

The Code of Conduct is a form of commitment in the context of implementing and enforcing Good Corporate governance and is a set of commitments containing obligations, prohibitions, and relationships with other stakeholders. The Code of Conduct regulates the obligations that shall be complied by every employee of the Company.

The Company always runs the operational business honestly, ethically, with integrity, and strives to do the best. To support this commitment, PTK has prevailed a code of conducts and business ethics that shall be complied to by all parties in the Company. This was done to maintain the trust of stakeholders, and create sustainable performance growth. The code of conduct refers to a code of professional behavior for all employees of the Company, also the management, including the Board of Commissioners and Directors.

Vision, Mission, and Corporate Values as the Main Foundation

The Company has established a code of conducts in accordance with its vision and mission which serves as a guideline of behavior for all employees in interacting, both with parties within the Company and external parties. The Company's code of conduct is introduced to all levels within the Company and is written in the employment contract for employee recruitment which must be understood and signed by all employees. All employees are expected to behave according to the Company's values and apply a code of conduct in their daily activities.



VISI | VISION

MENJADI PERUSAHAAN JASA MARINE YANG TERINTEGRASI DENGAN SKALA GLOBAL PADA TAHUN 2026

To be an Integrated Marine Service Company on Global Scale in 2026

MISI | MISSION

MELAKSANAKAN KEGIATAN BISNIS YANG BERORIENTASI PADA ASPEK HSE, KEHANDALAN OPERASIONAL DAN MENGUTAMAKAN KEPUASAN PELANGGAN DALAM BIDANG:

1. **PENYEDIAAN JASA PERKAPALAN SEKTOR ENERGI;**
2. **PENYEDIAAN LAYANAN MARINE;**
3. **PENYEDIAAN JASA LOGISTIK.**

Carrying out business activities oriented to HSE aspects, operational reliability, and prioritizing customer satisfaction in the fields of:

1. Providing shipping services in the energy sector;
2. Providing marine services;
3. Providing logistics services

NILAI-NILAI UTAMA PERUSAHAAN | CORPORATE VALUES

- **AMANAH | TRUSTWORTHY**
MEMEGANG TEGUH KEPERCAYAAN YANG DIBERIKAN.
Uphold the trust given.
- **KOMPETEN | COMPETENT**
TERUS BELAJAR DAN MENGEMBANGKAN KAPABILITAS.
Continuous learning and capability improvement.
- **HARMONIS | HARMONIOUS**
SALING PEDULI DAN MENGHARGAI PERBEDAAN MUTUAL.
Mutual care and value diversity.
- **LOYAL | LOYAL**
BERDEDIKASI DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA
Dedicated and prioritize the interest of the National and Country.
- **ADAPTIF | ADAPTIVE**
TERUS BERINOVASI DAN ANTUSIAS DALAM MENGERAKKAN ATAUPUN MENGHADAPI PERUBAHAN
Continuously innovating and enthusiast in driving and facing the change.
- **KOLABORATIF | COLLABORATIVE**
MEMBANGUN KERJA SAMA YANG SINERGIS
Build synergistic cooperation.

Kode Etik
Code of Conducts**Pokok-Pokok dalam Pedoman Perilaku & Etika Bisnis ("CoC")**

Pedoman Perilaku PTK termaktub dalam Pedoman COC No. A-002/F1000/2019-S0 Revisi ke-00. Pedoman Kode Etik tersebut dimutakhirkan secara berkala sebagai komitmen perusahaan untuk menjaga etika bisnis perusahaan yang berkesinambungan. Pedoman tersebut berlaku bagi:

1. Insan PTK.
2. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama PTK.
3. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya, yaitu badan hukum/usaha lain yang dikendalikan oleh PTK, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan PTK. Secara umum, muatan Kode Etik Perusahaan yang dimiliki PTK adalah sebagai berikut:

Principles of the Code of Business Conduct & Ethics ("CoC")

PTK Code of Conduct is contained in the COC Guidelines No. A-002/F1000/2019-S0 Revision-0. The Code of Conducts is updated regularly as a commitment of the Company to maintain sustainable corporate business ethics. These guidelines apply to:

1. PTK personnel.
2. External parties acting for and on behalf of PTK.
3. Subsidiaries and corporate structures under them, namely legal entities/other businesses controlled by PTK, either directly or indirectly.
4. Partners who cooperate with PTK. In general, the contents of the Company's Code of Conducts owned by PTK are as follows:

Pokok-pokok Pedoman Perilaku
Code of Conduct Contents

Bab Chapter	Uraian Description	
Umum General	• Pendahuluan • Tujuan • Ruang Lingkup • Pengertian • Referensi	• Introduction • Objectives • Scope • Definition • Reference
Visi, Misi dan Tata Nilai Unggulan Perusahaan Vision, Mission, and Core Values of the Company	• Visi dan Misi • Tata Nilai Unggulan Perusahaan	• Vision and mission • Core Corporate Values
Prinsip-prinsip GCG, Perilaku Integritas Insan PTK GCG Principles, Integrity Behavior of PTK Personnel	• Integritas • Persaingan Usaha Yang Sehat • Sikap Kerja Profesional	• Integrity • Healthy competition • Professionalism
Persaingan Sehat Fair Competition	• Persaingan Usaha yang Sehat • Proses Pengadaan Penyedia Barang/Jasa • Informasi Penting	• Fair Business Competition • Procurement process for providers of goods/services • Important Information
Kerahasiaan Data dan Transparansi Data Confidentiality and Transparency	• Kerahasiaan Data dan Informasi • Pelaporan Akuntansi dan Keuangan • Pengelolaan Arsip	• Data and Information Confidentiality • Accounting and Financial Reporting • Archival Management
Sikap Profesional Professional Attitude	• Sikap Kerja Profesional • Berani Mengungkapkan Masalah • Pengambilan Keputusan • Hak Kekayaan Intelektual • Menghindari Diskriminasi • Kesempatan Karir yang Sama • Standar Ketenagakerjaan • Bebas Narkoba dan Minuman Keras • Aktivitas Politik • Media Massa • Organisasi Profesi	• Professional Work Attitude • Courage in Disclosing Any Issues • Decision Making • Intellectual Property Rights • Avoiding Discrimination • Equal Career Opportunity • Free from Drugs and Alcohol Beverages • Political Activity • Mass Media • Organizational Profession

Pokok-pokok Pedoman Perilaku
Code of Conduct Contents

Bab Chapter	Uraian Description	
Komitmen Terhadap Pemangku Kepentingan Lainnya Commitment to Other Stakeholders	- Komitmen Terhadap Pemegang Saham - Komitmen Terhadap Pekerja - Komitmen Terhadap Serikat Pekerja - Komitmen Terhadap Anak Perusahaan - Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa - Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator - Komitmen Terhadap Legislatif - Komitmen Terhadap Investor, Kreditur dan Bank - Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi - Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan - Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial	- Commitment to Shareholders - Commitment to Employees - Commitment to Labor Union - Commitment to Subsidiaries - Commitment to Goods/ Services Provider - Commitment to Government as a Regulator - Commitment to Legislative - Commitment to Investor, Creditor, and Bank - Commitment to Business Partners, Research Institution, and Universities - Commitment to Health, Safety, Security (HSE), and Environment - Commitment to Community and Social Responsibility
Whistleblowing System	- Ruang Lingkup - Struktur - Fungsi Pengelola - Saluran Penyampaian Pelaporan	- Scope - Structure - Management function - Reporting channel

Pemberlakuan Pedoman Perilaku kepada Seluruh Insan PTK

Setiap insan PTK harus memiliki komitmen untuk dapat menyelaraskan diri dengan sistem nilai dan budaya kerja di Perusahaan. Oleh karena itu, seluruh insan PTK wajib menempatkan diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya kerja yang dianut Perusahaan, yang dikodifikasikan dalam *Code of Conduct*. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari setiap insan PTK di lingkungan unit kerja masing-masing.

Code of Conduct PTK wajib dilaksanakan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pimpinan Unit sampai dengan pekerja. *Code of Conduct* PTK dilaksanakan secara konsisten sebagai budaya kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Sosialisasi dan Penegakan Pedoman Perilaku

Perusahaan memastikan bahwa setiap insan PTK mengetahui, memahami, dan menerapkan kode etik baik di lingkungan dalam maupun di lingkungan luar perusahaan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi pedoman CoC bagi seluruh insan Perusahaan. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan *internal event* kepada seluruh pekerja pada segala tingkatan termasuk tenaga *outsourcing*.

Code of Conduct Enforcement to All PTK Personnel

Every personnel of PTK shall be committed to align with the value system and work culture in the Company. Therefore, all PTK personnel are obliged to adapt to align and unite their beliefs and determination to adopt work attitudes and behaviors in accordance with the value system and work culture adopted by the Company, which are codified in the Code of Conduct. The successful application of the code of conduct is the responsibility of every PTK personnel in each work units.

PTK Code of Conduct shall be implemented starting from the Board of Commissioners, Board of Directors, Unit Heads up to the employees. PTK Code of Conduct is implemented consistently as a work culture in daily operational activities.

Code of Conduct Socialization and Enforcement

The Company ensures that every PTK personnel has acknowledged, understood and applied the Code of Conducts inside and outside the Company. An initiative to achieve this purpose is through the CoC guidelines socialization for all people of the company. The socialization was carried out by using various media and internal event opportunities to all employees at all levels including the outsourcing personnel.

Kode Etik

Code of Conducts

Pada tahun 2022 PTK telah melaksanakan program komunikasi *compliance* di antaranya:

In 2022 PTK has implemented compliance communication programs including:

No.	Program/Kegiatan Program/Activities	Pihak Terkait Related Party	Saluran Komunikasi Communication Channel
1	Sosialisasi Ketentuan Gratifikasi dan Anti Penyuapan di PTK pada acara Vendor Day Socialization of Gratification and WBS Provisions in PTK at the Vendor Day event	Mitra Kerja PTK PTK Partners	Zoom
2	Sosialisasi melalui media tertulis Socialization through written media	Pekerja & Mitra Kerja PTK PTK Workers and Partners	Email Broadcast, Poster, Townhall
3	Sosialisasi GCG di Kantor Pusat & Cabang GCG Socialization at the Head Office & Branches	Seluruh Pekerja PTK All PTK workers	Email/Event Broadcast, Spanduk, Slide Presentasi Email/Event Broadcast, Banners, Presentation Slides
4	Sosialisasi GCG di Kapal GCG Socialization on Ships	Seluruh Crew Kapal All Ship Crew	Tatap muka bersamaan dengan program Fungsi Manning Face-to-face with the Manning Function program
5	Sosialisasi Cara Penyampaian LHKPN Socialization of LHKPN Submission Methods	Wajib Laporkan LHKPN Baru Required to Report New LHKPN	Slide Presentasi Presentation Slides
6	<i>Refreshing</i> Cara Penyampaian LHKPN Refreshing How to submit LHKPN	Wajib Laporkan LHKPN Existing Required to Report Existing LHKPN	Slide Presentasi Presentation Slides
7	Pemantauan progress pengisian LHKPN <i>Monitoring the progress of filling out the LHKPN</i>	Wajib Laporkan LHKPN Mandatory Report LHKPN	Email/Event Broadcast, wa /telp
8	Sosialisasi Ketentuan Gratifikasi dan Anti Penyuapan di PTK pada acara Vendor Day Socialization of Gratification and Anti-Bribery Provisions in PTK at the Vendor Day event	Mitra Kerja PTK PTK Partners	Zoom

Perilaku Integritas Insan PTK

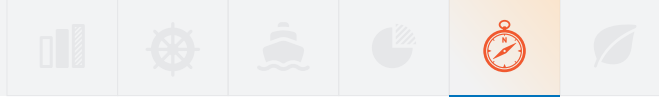
Selain pedoman CoC, PTK juga memiliki pedoman perilaku integritas. Berikut adalah muatan pedoman perilaku integritas insan PTK:

1. Insan PTK mematuhi hukum, peraturan dan undang-undang, baik yang berlaku pada wilayah setempatnya berada/ditugaskan, maupun pada tingkat nasional dan internasional termasuk peraturan internal Perusahaan;
2. Insan PTK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu kewajibannya terhadap Perusahaan. Insan PTK menghindari situasi di mana kepentingan pribadi (langsung maupun tidak langsung), aktivitas di luar, atau kepentingan keuangan, bertentangan, tampak bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan kepentingan PTK;
3. Insan PTK tidak akan terlibat dalam tindakan suap dan/atau korupsi, baik sebagai pihak yang memberi maupun sebagai pihak yang menerima dan tidak menawarkan atau menerimanya bila menurut pertimbangan Insan PTK, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan;

Integrity Conduct of PTK Personnel

In addition to the CoC guidelines, PTK also has a code of integrity behavior. The following is the content of the PTK personnel integrity behavior guidelines:

1. Personnel of PTK comply with the prevailing laws and regulations in areas they are located/assigned in, or on national and international levels, including the Company's internal regulations;
2. Personnel of PTK uphold the responsibility in ensuring personal interest outside work does not interfere with its obligations to the Company. The personnel avoid any situations in which the personal interest (direct and indirect), outside activities, or financial interest, conflict or seem to be conflicted with or have the potentials of conflicting with the interest of PTK;
3. Personnel of PTK will not be involved in any bribery and/or corruption, either as provider or recipient, and will not offer or receive it if according to the personnel of PTK the action could impact or gives the impression of impacting decision making;



4. Insan PTK tidak mendukung pemberian uang/fasilitas/hadiah atau janji kepada petugas pemerintahan atau lembaga pemerintah dengan tujuan memperoleh atau memperpanjang perizinan dan lain sebagainya;
 5. Setiap peristiwa penipuan, penggelapan dan pencurian yang terjadi di PTK atau yang berkaitan dengan PTK akan segera diselidiki, dilaporkan, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup akan dikenakan hukuman yang sepatutnya;
 6. PTK memiliki hubungan baik dengan Pusat Pelaporan untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di PTK. Untuk itu, insan PTK tidak mentolerir tindakan pencucian uang yang dilakukan di lingkungan PTK.
4. Personnel of PTK provide no support to provision of money/facilities/reward or promises to government officials or government institutions with the aim of obtaining or extending licenses and others;
 5. Every fraud, embezzlement, and robbery occurred at PTK or has relations to PTK will be investigated, reported, and after completing sufficient investigation appropriate punishment will be charged;
 6. Personnel of PTK has good relationship with Center of Financial Transaction Reporting and Analysis to jointly prevent and eradicate money laundering at PTK. Therefore, Personnel of PTK does not tolerate any money laundering in PTK environment.

Persaingan Usaha yang Sehat

Dalam menjalankan komitmen sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai GCG, PTK senantiasa menjaga persaingan usaha yang sehat kepada pemangku kepentingan. PTK berkomitmen untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan patuh pada undang-undang antimonopoli dan persaingan sehat di Indonesia dan peraturan setempat di mana PTK menjalankan kegiatan bisnis/operasionalnya.

Terkait dengan kegiatan bisnis dan persaingan usaha tersebut, seluruh insan PTK harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat, dan hanya melakukan bentuk praktik bisnis yang adil dan etis. Sehingga apabila dalam kegiatan operasionalnya, insan PTK menghadapi tindakan yang mengarah pada pertentangan prinsip persaingan usaha yang sehat diwajibkan melakukan konsultasi dengan fungsi legal atau hukum perusahaan.

Sikap Kerja Profesional

Selain menerapkan pedoman CoC serta pedoman perilaku integritas, insan PTK juga harus membangun sikap profesional yang ditandai dengan sikap-sikap sebagai berikut:

1. Dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja, Insan PTK dituntut untuk bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi masukan, solid dan bersinergi untuk mencapai visi dan misi PTK.
2. Insan PTK melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan tanggung jawab.
3. Sesama Insan PTK tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat.

Fair Business Competition

In carrying out its commitment as a company that upholds the values of GCG, PTK always maintains fair business competition to stakeholders. PTK is committed to ensuring that the Company's business activities are compliant with antitrust and fair competition laws in Indonesia and local regulations where PTK operates its business/operations.

Related to business activities and business competition, all PTK employees must be aware of efforts that lead to unfair business competition, and only engage in fair and ethical business practices. If in its operational activities, PTK people face actions that lead to a conflict of principles of fair business competition, they are required to consult with the legal functions in the Company.

Professional Work Attitude

In addition to applying CoC guidelines and integrated behavior guidelines, PTK personnel shall also develop professional attitudes which are characterized by the following attitudes:

1. In interacting with co-workers, Personnel of PTK are required to present mutual trust, sincerity, honesty; and warn each other as well as provide inputs, show strength, able to perform synergy for the achievement of vision and mission of PTK.
2. Personnel of PTK performs each work with good intention and full of responsibility.
3. Among Personnel of PTK should not pressure or intimidate, humiliate, abuse or provoke, and not cause unfair competition.

Kode Etik

Code of Conducts

4. Insan PTK berperilaku disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja.
5. Insan PTK menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.

4. Personnel of PTK shall present discipline behavior, not neglecting any work activities prior to receiving permission from the supervisor, and/or not performing other activities for personal interest or interest of parties outside the Company without permission during the working hours.
5. Personnel of PTK keep the confidentiality of documents and information on the Company.

Standar Etika Usaha

Standar Etika Usaha mengatur etika Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan, termasuk diantaranya kepada para pekerja, pelanggan, penyedia barang dan jasa (pemasok), kreditur, masyarakat, pesaing, pemerintah, media massa. Penerapan standar etika usaha bertujuan untuk memastikan Perusahaan memenuhi komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Pemenuhan komitmen tersebut tetap dilaksanakan dalam kaidah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Business Ethic Standard

Business Ethics Standards regulate the Company's ethics toward Stakeholders, including to the employees, customers, goods and services provider (suppliers), creditors, community, competitors, government, and mass media. The implementation of business ethics standards aim to ensure the Company fulfilling its commitments to the stakeholders. The fulfillment of commitment is consistently performed based on the prevailing laws and regulations.

Standar Etika Usaha Terhadap Pemangku Kepentingan
Business Ethics Standards for Stakeholders

	Uraian Description
Komitmen Terhadap Pemegang Saham Commitment to Shareholders	PTK berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (<i>shareholder value</i>) seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan, dan kepentingan lain dari pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTK strives to increase shareholder value optimally and continuously, such as level of profit, growth rate, and other interests of the shareholders as per the prevailing laws and regulations.
Komitmen Terhadap Pekerja Commitment to Employees	PTK menghargai pekerja sebagai aset Perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, suku, hambatan fisik, gender, dan usia, yang kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten. PTK memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan Perusahaan. PTK respects employees as assets of the Company without discriminating race, skin color, religion, ethnicity, physical challenges, gender, and age, as well as those which capacity should be honed through education and training consistently. PTK gives rewards to outstanding employees, and imposes strict sanctions to individuals who are negligent about their duties, or violate the Company's provisions.
Komitmen Terhadap Serikat Pekerja Commitment to Labor Union	PTK menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dalam usaha mencapai tujuan Perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis. PTK places Labor Union as the Company's partner in its endeavors to achieve the Company's objectives for dynamic and harmonious industrial relationship.
Komitmen Terhadap Anak Perusahaan Commitment to Subsidiaries	Hubungan kerjasama dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan (perusahaan afiliasi) ditujukan untuk membangun sinergi dan citra yang lebih baik juga agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan. Cooperative relationship with subsidiaries and joint ventures (affiliations) is aimed to build better synergy and image as well as to increase the Company's performance.
Komitmen Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Commitment to Goods and Services Providers	PTK memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang/jasa atau rekanan sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi Perusahaan. PTK melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. PTK menghindari bisnis dengan penyedia barang/jasa atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan atau Perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme. PTK maintains good communication with goods/services provider or partners as strategic partners with a role of guaranteeing the availability of goods and services supply required for the Company's operation continuity. PTK performs transparent goods and services procurement as per the prevailing provisions. Moreover, the Company avoids business with goods/services provider or partners which may have conflict of interest with officials and/ or the Company that may have an indication of causing corruption, collusion, and nepotism.

Standar Etika Usaha Terhadap Pemangku Kepentingan
Business Ethics Standards for Stakeholders

	Uraian Description
Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator Commitment to Government as Regulator	PTK mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. PTK mendukung program nasional maupun regional khususnya dibidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. PTK complies with and support laws and regulations related to the Company's operation, including adherence to tax payment, retribution, employment, and environment issues. The Company supports national and regional programs, especially in technology, education, social, economy, and culture.
Komitmen Terhadap Legislatif Commitment to Legislative	PTK menyediakan informasi yang relevan tentang Perusahaan bagi legislatif dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. PTK memperhatikan dan memberikan respon terhadap masukan dari legislatif yang membawa kepentingan masyarakat luas sesuai kepentingan dan kemampuan Perusahaan. PTK provides relevant information on the Company for legislative by continuously referring to the prevailing provisions. The Company observes and provides response to any inputs from the legislative that may aspire the community interest in accordance with the Company's interest and capability.
Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Commitment to Business Partners, Research Facilities, and Universities	PTK melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha strategis yang resmi dan memiliki reputasi yang baik. Menjamin akurasi informasi layanan dan produk yang akan dipasarkan oleh mitra usaha strategis. PTK enters into clear and mutually beneficial business engagements in writing only with strategic business partners that are official and have a good reputation. Guarantee the accuracy of service and product information to be marketed by strategic business partners.
Komitmen terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan Commitment to Health, Safety, Security and Environment ("HSSE")	Merupakan tanggung jawab PTK untuk menciptakan tempat bekerja yang aman dan sehat serta menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja yang sesuai bagi semua Insan PTK dan kontraktor untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera dan wabah penyakit di tempat kerja. PTK akan melakukan kegiatannya dengan memperhatikan lindungan lingkungan. PTK menggunakan sumber daya energi dan sumber daya alam secara efisien serta berusaha mencegah terjadinya polusi terhadap lingkungan. A form of responsibility for PTK in creating a safe and healthy work environment, as well as providing appropriate work equipment and protection for all Personnel of PTK and contractors to prevent accidents, injuries, and infectious diseases in the workplace. PTK will perform its activities by paying Attention to environmental protection. Moreover, the Company uses energy and natural resources efficiently as well as strives to prevent pollution toward the environment
Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial Commitment to Surrounding Communities and Social Responsibility	PTK menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/ operasionalnya. PTK expects its presence could contribute the utmost benefits to the community residing around the locations in which it performs its business/operational

Kode Etik
Code of Conducts**Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik**

Seluruh insan PTK wajib mematuhi Kode Etik. Pelanggaran terhadap Kode Etik, etika bisnis yang berlaku atau undang-undang, akan dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat ditolerir dan akan dikenai tindakan pendisiplinan. Hal ini juga bisa mengakibatkan pemberian hukuman atau sanksi bagi setiap pelanggarnya.

Terkait kepatuhan terhadap kode etik, etika bisnis, dan peraturan yang berlaku, PTK memiliki *Chief Compliance Officer* ("CCO") yang melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan praktik-praktik GCG. Sehingga apabila terdapat pelanggaran terhadap pedoman perilaku perusahaan akan ditindaklanjuti oleh CCO, yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan. Manajemen puncak (Direksi atau Dewan Komisaris) akan memutuskan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung Insan PTK yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan diberikan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan. Namun, PTK juga menghormati hak membela diri dari Insan PTK yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Pedoman Perilaku sebagai Kode Etik, mulai dari teguran tertulis, pemberian surat peringatan, penurunan golongan upah sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Tidak ada sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik, dalam realisasi penegakan Kode Etik Perusahaan, selama tahun 2021 dan 2022.

Sanctions for Code of Conducts Violation

All PTK personnel shall comply with the Code of Conducts. Violations against the Code of Conducts, prevailing business ethics or the law, will be considered as intolerable behavior and will result in disciplinary punishment. This may also result in the imposition of penalties or sanctions for each violator.

In terms of compliance with the code of conducts, business ethics, and applicable regulations, PTK has a compliance monitoring function, the Chief Compliance Officer ("CCO"). Therefore, in the case of violation against the company's code of conduct, it will be followed up by the CCO, which will provide the results of its study to the top management of the Company. The top management (the Board of Directors or the Board of Commissioners) will decide on corrective actions or preventive actions that must be carried out by the direct supervisor of PTK's employees who are proven to have committed violations.

Sanctions to the performed violations are aligned with the provisions in Joint Working Agreement ("PKB") and other prevailing provisions at the Company. PTK respects self-defense rights displayed by Personnel of PTK who allegedly perform violations and accept the explanation to be taken as a consideration in determining the form of disciplinary consequences. The sanctions imposed in the violation of Behavior Manual as Code of Conduct starting from written warning, warning letter, salary grade demotion up to work termination.

Total Code of Conducts Violations

There are no sanctions imposed related to the enforcement of the Code Ethics, in the realization of the Company's Code of Ethics enforcement, during 2021 and 2022.

Evaluasi Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

PTK terus berupaya untuk membenahi dan memperbaiki agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berbagai metode sosialisasi terus digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap individu. Upaya ini dilakukan dengan menyempurnakan *code of conduct* agar berlaku efektif dan implementatif.

Keberadaan *Code of Conduct* di PTK semakin baik dengan terus didorong oleh peningkatan kesadaran baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Hal tersebut seiring dengan dilakukannya upaya-upaya yang konsisten dan berkesinambungan sosialisasi terhadap *Code of Conduct* tersebut melalui berbagai media di antaranya dengan pemasangan banner ditempat-tempat umum dan sosialisasi lainnya. Selain itu adanya peningkatan laporan juga dapat berarti bahwa pihak eksternal dan internal Perusahaan semakin mempercayai kredibilitas dan independensi pengelolaan *Code of Conduct*.

Evaluation on the Whistleblowing System Management

PTK continues to strive to prepare and improve so that it can run effectively and efficiently. Various methods of socialization are continuously used to increase understanding and awareness of each individual. This effort was made by improving the code of conduct to make it effective and implementable.

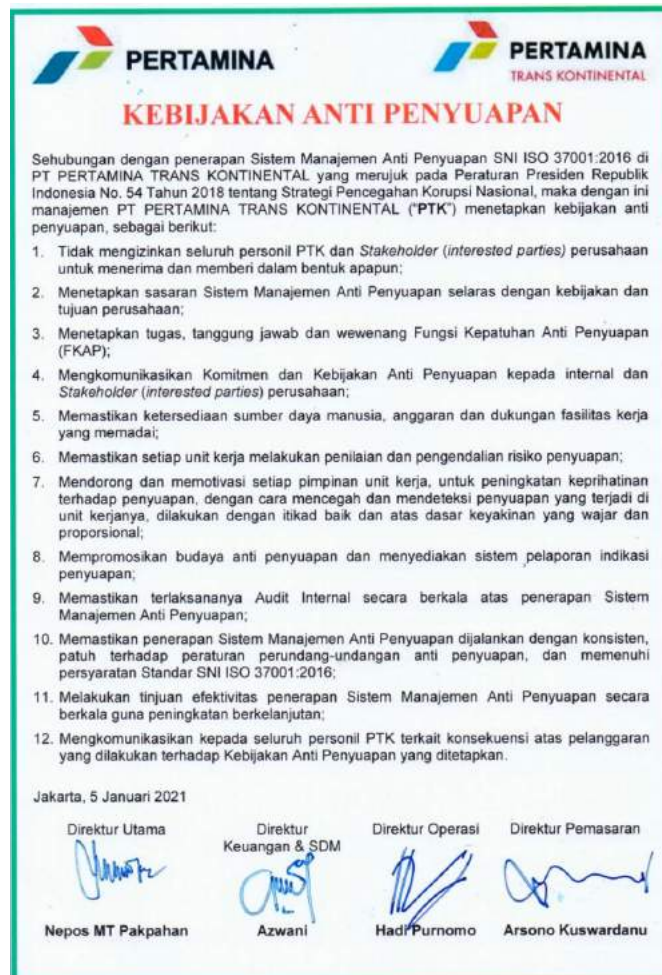
The existence of the code of conduct in PTK will be getting better and is continuously driven by increased awareness from both internal and external parties of the Company. This is in line with the consistent and continuous efforts to socialize the code of conduct through various media, including the installation of banners in public places and other socializations. In addition, an increase in reports may also mean that external and internal parties of the Company are increasingly trusting in the credibility and independence of managing the Code of Conducts.

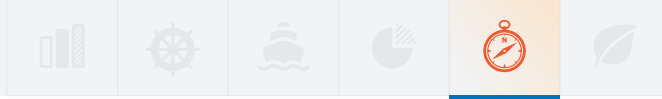
Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Untuk dapat memberikan keyakinan atas pelaksanaan anti korupsi di lingkup PTK, Perusahaan memiliki pedoman pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ("SMAP") yang telah disahkan melalui Direktur Utama melalui ketetapan No. A-001/PTK0320/2021-S0 pada Desember 2021. Pedoman ini diharapkan dapat membantu PTK untuk menghindari atau mengurangi biaya, risiko dan kerugian yang disebabkan penyuapan, mempromosikan kepercayaan dan keyakinan dalam penanganan bisnis dan meningkatkan reputasi Perusahaan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, PTK mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan SMAP yang berdasarkan SNI ISO 37001:2016 tentang SMAP.

To be able to provide confidence in the implementation of anti-corruption within the PTK scope, the Company has guidelines for the management of the Anti-Bribery Management System ("SMAP") which have been ratified by the President Director through Decision Letter No. A-001/PTK0320/2021-S0 in December 2021. This guideline is expected to help PTK to avoid or reduce costs, risks and losses caused by bribery, promote trust and confidence in handling business and enhance the Company's reputation. To achieve these goals, PTK adopts, develops, and implements SMAP based on SNI ISO 37001:2016 regarding SMAP.





Kebijakan Terkait Gratifikasi

Gratification Related Policy

Pedoman Pengendalian Gratifikasi No.A-004/PTK0300/2022-S9 tanggal 30 November 2022 merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Code of Conduct* ("CoC") dan ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi dibuat untuk membantu pekerja PT Pertamina Trans Kontinental dalam memahami definisi dan konsep Gratifikasi serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila berhadapan dengan Gratifikasi.

Pengelola laporan gratifikasi ada pada Fungsi *Compliance* dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berwenang untuk menerima dan menelaah atas Laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi Insan PT Pertamina Trans Kontinental yang dilaporkan melalui *Compliance Online System* atau *service.compliance@pertamina.com*.
2. Berwenang untuk mengajukan usulan terkait tindak lanjut atas laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi.
3. Berwenang mengusulkan pengelolaan/peruntukan/penyaluran barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan Pertamina Trans Kontinental.
4. Berwenang untuk melakukan koordinasi dengan KPK terkait laporan Gratifikasi.
5. Berwenang meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi dari Insan PT Pertamina Trans Kontinental kepada KPK melalui Pertamina.
6. Memberikan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi dari Insan PT Pertamina Trans Kontinental yang telah dilaporkan kepada Pertamina yang kemudian dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") minimal 1 (satu) tahun sekali kepada *Chief Officer Compliance*.
7. Berwenang untuk melaksanakan sosialisasi terkait Gratifikasi dan melaksanakan kegiatan lainnya yang terkait.

Gratification Control Guidelines No.A-004/PTK0300/2022-S9 dated November 30, 2022 is a further elaboration of the Code of Conduct ("CoC") and the provisions in the Corruption Eradication Commission's Gratification Control Guidelines of 2015, as well as Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Gratification Control Guidelines were created to assist employees of PT Pertamina Trans Kontinental in understanding the definition and concept of Gratification and knowing what actions to take when dealing with Gratification.

The manager of the gratification report is in the Compliance Function with the following duties and responsibilities:

1. Authorized to receive and review Reports of acceptance/rejection of PT Pertamina Trans Kontinental's Personnel Gratification reported through the Compliance Online System or service. *compliance@pertamina.com*.
2. Authorized to submit suggestions related to follow-up on reports of acceptance/rejection of Gratification.
3. Authorized to propose the management/allocation/distribution of Gratification goods which are the authority of Pertamina Trans Kontinental.
4. Authorized to coordinate with KPK regarding Gratification reports.
5. Authorized to forward reports of acceptance/rejection of Gratification from PT Pertamina Trans Kontinental personnel to the KPK through Pertamina.
6. Provide reports of acceptance/rejection of Gratification from PT Pertamina Trans Kontinental personnel which have been reported to Pertamina which is then reported to the Corruption Eradication Commission ("KPK") at least once a year to the Chief Compliance Officer.
7. Authorized to carry out socialization related to Gratification and carry out other related activities.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PTK mengacu pada:

The implementation of procurement of goods and services in PTK refers to:

No.	Subyek Subject	Judul Title	Nomor Agenda Agenda Number	Masa Berlaku Validity Period
1	Pedoman Guidelines	Pengadaan Barang /Jasa PTK Procurement of PTK goods/ services	A-001/PTK3300/2021-S9	24 November 2021 November 24, 2021
2	Pedoman Guidelines	Pengadaan Jasa Sewa Kapal Procurement of Ship Rental Services	A-002/PTK3300/2021-S9	15 Desember 2021 December 15, 2021
3	Pedoman Guidelines	Pengelolaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Management of the Use of Domestic Products (P3DN)	A5-001/R0000/2020-S9 (Ratifikasi)	23 Desember 2021 December 23, 2021
4	Tata Kerja Organisasi ("TKO") Organizational Work Procedure	Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat Procurement of Goods/Services in an Emergency	B-001/PTK3320/2021-S9	17 Desember 2021 December 17, 2021
5	Tata Kerja Organisasi ("TKO") Organizational Work Procedure	Pelaksanaan Registrasi dan Update Data Penyedia Barang/Jasa Implementation of Registration and Data Update of Goods/ Services Providers	B-002/PTK3320/2021-S9	17 Desember 2021 December 17, 2021
6	Tata Kerja Organisasi ("TKO") Organizational Work Procedure	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Goods/Services Procurement Planning	B-003/PTK3320/2021-S9	17 Desember 2021 December 17, 2021
7	Tata Kerja Organisasi ("TKO") Organizational Work Procedure	Pelaksanaan Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa Selection Implementation of the Provision of Goods/ Services	B-004/PTK3320/2021-S9	17 Desember 2021 December 17, 2021
8	Tata Kerja Organisasi ("TKO") Organizational Work Procedure	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa Implementation of Performance Assessment and Correction of Sanctions to Goods/Services Providers	B5-005/I00100/2019-S9 (Ratifikasi/Ratification)	1 Agustus 2019 August 01, 2019
9	Tata Kerja Organisasi ("TKO") Organizational Work Procedure	Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/ Material Inspection and Receipt of Goods/ Materials	B-006/PTK3320/2021-S9	17 Desember 2021 December 17, 2021
10	Tata Kerja Organisasi ("TKO") Organizational Work Procedure	Pelaksanaan Penerbitan Kontrak Dan Amandemen Kontrak Implementation of Contract Issuance and Contract Amendment	B-001/PTK3320/2022-S9	6 Januari 2022 January 06, 2022
11	Tata Kerja Organisasi ("TKO") Organizational Work Procedure	Pengadaan Jasa Sewa kapal melalui Tender Terbatas dan Atau Penunjukkan langsung Procurement of ship rental services through limited tenders and or direct appointments	B-001/PTK3320/2022-S9	27 April 2022 April 27, 2022
12	Tata Kerja Organisasi ("TKO") Organizational Work Procedure	Pengadaan Jasa Sewa Kapal Melalui Tender Terbuka Procurement of ship rental services through limited tenders and or direct appointments	B-002/PTK3320/2022-S9	27 April 2022 April 27, 2022
13	Tata Kerja Individu ("TKI") Individual Work Procedures ("TKI")	Pengambilan Opsi, Substitusi & Perpanjangan Masa Sewa Option Taking, Substitution & Lease Term Extension	B-003/PTK3320/2022-S9	27 April 2022 April 27, 2022
14	Tata Kerja Individu ("TKI") Individual Work Procedures ("TKI")	Pelaksanaan Negosiasi Secara Manual Implementation of Manual Negotiations	C-001/PTK3320/2021-S9	17 Desember 2021 December 17, 2021

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Policy

No.	Subyek Subject	Judul Title	Nomor Agenda Agenda Number	Masa Berlaku Validity Period
15	Tata Kerja Individu ("TKI") Individual Work Procedures ("TKI")	Pembuatan <i>Owner Estimate</i> /Harga Perhitungan Sendiri Generate an Owner Estimate/Self Calculation Price	C-002/PTK3320/2021-S9	17 Desember 2021 December 17, 2021
16	Tata Kerja Individu ("TKI") Individual Work Procedures ("TKI")	Pelaksanaan <i>Risk Assesment</i> dalam Rangka Penentuan Besaran Jaminan Pelaksanaan dan Denda Maksimal Implementation of Risk Assessment in Determining the total Performance Guarantee and Maximum Fines	No. C5-001/I30000/2021-S9 (Ratifikasi)	12 April 2021 April 12, 2021
17	QHSSE-MS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) dan ISO 37001:2016 QHSSE-MS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) and ISO 37001:2016			

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan 12 (dua belas) prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- Adil**
Berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- Akuntabel**
Berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- Bertanggung jawab**
Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- Berwawasan HSE**
Berarti memenuhi dan memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan.
- Efektif**
Berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.
- Efisien**
Berarti diusahakan dengan menggunakan dana, daya, fasilitas yang sekecil-kecilnya, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Integritas**
Berarti pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan.

Principles of Goods/Services Procurement

In the process of implementing the goods/services procurement, 12 (twelve) principles are used, as follows:

- Fair**
Means It is not discriminatory in giving treatment to all potential providers of goods/services and does not lead to providing benefits to certain parties, in any way and or for any reason;
- Accountable**
Means it must achieve the target and be accountable so that it keeps away from potential abuse and irregularities;
- Be responsible**
Means achieving physical, financial and beneficial goals for the smooth running of the business in accordance with the principles and policies as well as the applicable provisions in the procurement of goods/services;
- Having HSE insight**
Means fulfilling and paying attention to occupational health and safety aspects as well as environmental protection;
- Effective**
Means it must be in accordance with the needs that have been determined and can provide the maximum benefit in accordance with the objectives set by the Company;
- Efficient**
Means it is managed by using the smallest amount of funds, power, facilities to achieve the targets set in the shortest time and can be accounted for;
- Integrity**
Means the implementation of the procurement of goods/services must be fully committed to meeting procurement ethics;

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Policy

8. Kehati-hatian

Berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi atau tindakan atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan immaterial terhadap Perusahaan selama proses pengadaan, proses pelaksanaan/pekerjaan, dan paska pelaksanaan pekerjaan.

9. Kemandirian

Berarti suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Kompetitif

Berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

11. Penerapan GCG

Berarti menjalankan prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha, sehingga perusahaan dapat dijalankan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan.

12. Transparan

Berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administrasi termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan penyedia barang/jasa harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa.

8. Prudence

Means always paying attention to or should suspect any information or action or form as a precautionary measure to avoid material and immaterial losses to the Company during the procurement process, execution/work process, and post-work implementation.

9. Independency

Means a condition in which the procurement of goods/services is professionally managed without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the prevailing laws and regulations.

10. Competitive

Means it must be carried out through healthy selection and competition among providers of equal goods/services and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures.

11. Implementation of GCG

Means implementing the principles that underlie a company management process and mechanism based on laws and regulations and business ethics, so that the company can run properly and be accountable to all stakeholders.

12. Transparent

Means all provisions and information, both technical and administrative, including procedures for evaluation, results of evaluation and determination of providers of goods/services must be open to providers of goods/services.

Kriteria Utama dan Ukuran Kinerja *Excellent*

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menjadi kriteria Utama dan ukuran kinerja selaku Pelaku Pengadaan barang/jasa, antara lain:

1. Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan SLA.
2. Pengiriman barang & Penyelesaian Pekerjaan Tepat waktu dan kualitas terjamin atau sesuai dengan apa yang diinginkan Fungsi Peminta Pengadaan.
3. Pekerja di Fungsi Pengadaan melaksanakan Prinsip Pengadaan Barang/jasa dengan baik Plus ditambah dengan nilai AKHLAK.
4. *Saving Cost* dari pengadaan barang dan jasa.

Main Criteria & Measures for Excellent Performance

In the implementation of the procurement of goods/services, the main criteria and performance measures as actors in the procurement of goods/services are, among others:

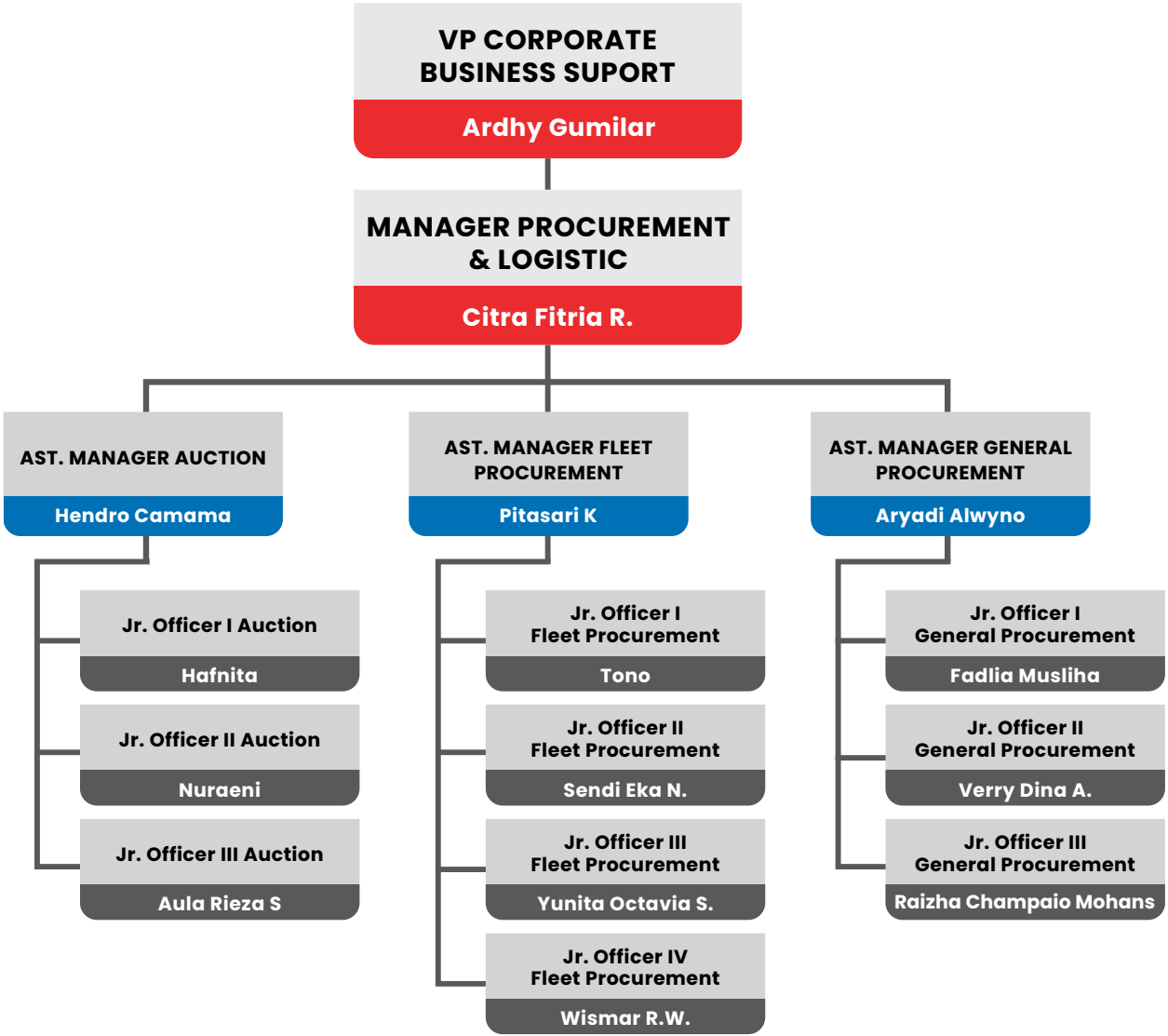
1. Carry out work in accordance with SLA.
2. Delivery of goods & Completion of Work On time and guaranteed quality or in accordance with what is desired Procurement Request Function.
3. Workers in the Procurement Function carry out the Principles of Procurement of Goods/ Services well plus the value of AKHLAK.
4. Saving Cost from procurement of goods & services.

Struktur Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di PTK dikelola oleh Fungsi *Procurement* berada di bawah Direktorat Keuangan dan SDM yang diuraikan dalam bagan di bawah ini.

Structure of Goods and Services Procurement Management

The goods and services procurement in PTK is managed by the Procurement Function under the Directorate of Finance and Human Resources which is described in the chart below.



Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Policy

Adapun *Job desk Fungsi Procurement* adalah sebagai berikut:

Procurement Function Job desks are as follows:

Auction	Fleet Procurement	General Procurement
Melaksanakan proses Pendaftaran Rekanan (SKT) serta mengevaluasi dokumen administrasi rekanan dan menentukan atau memilih penyedia barang/jasa sesuai pedoman barang/jasa. Carry out the Partner Registration process (SKT) and evaluate the administrative documents of partners and determine or choose a provider of goods/ services according to the guidelines for goods/ services.	Melaksanakan proses pengadaan manual/Auction serta memilih penyedia barang/jasa melalui proses <i>tender</i> untuk seluruh permintaan pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan kapal milik (kapal) dan Kapal-kapal Ringan Milik Pertamina (kapal). Carry out manual procurement process/ Auction and select goods/ services providers through a tender process for all requests for procurement of goods/ services related to owned vessels (ships) and Pertamina's Light Vessels (ships).	Melaksanakan proses pengadaan manual/Auction serta memilih penyedia barang/jasa melalui proses <i>tender</i> untuk seluruh permintaan pengadaan barang/jasa oleh fungsi pengguna (diluar kebutuhan <i>fleet</i> /kapal). Carry out manual/auction procurement processes as well as select providers of goods/ services through a tender process for all requests for procurement of goods/ services by user functions (excluding fleet/ ship needs)
Melaksanakan <i>Monitoring</i> dan Pemberitahuan Informasi ke Penyedia barang/jasa melalui surat atau email untuk melaksanakan perpanjangan SKT & CSMS yang telah berakhir Jangka Waktunya. Carry out Monitoring and Notification of Information to providers of goods/services by letter or email to carry out the extension of SKT & CSMS which has expired.	Mengevaluasi, mengusulkan dan meng-input proses pengadaan di sistem <i>E-Proc</i> untuk seluruh permintaan pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan kapal milik (kapal) dan Kapal-kapal Ringan Milik Pertamina (kapal). Evaluate, propose and input the procurement process in the E-Proc system for all requests for procurement of goods/ services related to owned vessels (ships) and Pertamina's Light Vessels (ships).	Mengevaluasi, mengusulkan dan menginput proses pengadaan di sistem <i>E-Proc</i> untuk seluruh permintaan pengadaan barang/jasa oleh fungsi pengguna (di luar kebutuhan <i>fleet</i> /kapal). Evaluate, propose and input the procurement process in the E-Proc system for all requests for procurement of goods/ services by user functions (excluding fleet/ ship needs).
Mengevaluasi penyedia barang/jasa atas pengadaan/pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu dan pembuatan laporan kinerja penyedia barang/jasa. Evaluate goods/service providers for procurement/ work that has been carried out for a certain period and making reports on the performance of goods/ services providers.	Mengadakan koordinasi dan <i>monitoring</i> dengan Fungsi Pengguna atas penyerahan barang/jasa yang dikirim/ dikerjakan oleh penyedia barang/jasa guna memastikan barang/jasa dapat diterima sesuai dengan kebutuhan (spesifikasi, kualitas, kuantitas dan tepat waktu). Coordinate & monitor with the User Function on the delivery of goods/ services sent/done by the provider of goods/services to ensure goods/ services can be received according to needs (specifications, quality, quantity and on time).	Merencanakan terhadap kebutuhan dari fungsi pengguna untuk dilaksanakan kontrak payung dan melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak yang telah dilaksanakan. Planning for the needs of user functions to carry out umbrella contracts and evaluating the contracts that have been implemented.
Melaksanakan <i>Monitoring</i> dan Pemberitahuan Informasi Teguran/Sanksi kepada penyedia barang/jasa yang tidak mematuhi aturan/pedoman barang/jasa. Carry out Monitoring and Notification of Information on Reprimand/Sanctions to providers of goods/services who do not comply with the rules/ guidelines for goods/services.	Merencanakan terhadap kebutuhan dari fungsi pengguna untuk dilaksanakan kontrak payung dan melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak yang telah dilaksanakan. Planning for the needs of user functions to carry out umbrella contracts and evaluating the contracts that have been implemented.	Mengadakan koordinasi dan <i>monitoring</i> dengan Fungsi Pengguna atas penyerahan barang/jasa yang dikirim/ dikerjakan oleh penyedia barang/jasa guna memastikan barang/jasa dapat diterima sesuai dengan kebutuhan (spesifikasi, kualitas, kuantitas dan tepat waktu). Coordinate & monitor with the User Function on the delivery of goods/ services sent/done by the provider of goods/services to ensure goods/services can be received according to needs (specifications, quality, quantity and on time).
Mengadakan koordinasi dengan fungsi-fungsi terkait dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Sosialisasi <i>Vendor</i> , Pelatihan CSMS dan <i>Vendor Day</i> . Coordinate with related functions and providers of goods/services in the implementation of Vendor Outreach, CSMS Training and Vendor Day.	Memastikan kualitas dan kuantitas dari barang/jasa yang tersedia di pasar. Ensuring the quality and quantity of goods/services available in the market.	Melakukan evaluasi dan perencanaan terhadap sumber-sumber pengadaan baru. Evaluate and plan for new procurement sources.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

Auction	Fleet Procurement	General Procurement
Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan sistem tata kerja (TKO)/Pedoman /KPI/Risk Register/ Ofi to Afi/Action Plan/RKAP Fungsi Procurement. Planning, monitoring and evaluating the preparation of the work system (TKO)/ Guidelines/ KPI/Risk Register/Ofi to Afi/ Action Plan/RKAP Procurement Function.		Memastikan kualitas dan kuantitas dari barang/jasa yang tersedia di pasar. Ensuring the quality and quantity of goods/services available in the market.
Melaksanakan proses pengadaan manual/Auction serta memilih penyedia barang/jasa melalui proses tender untuk permintaan kontrak payung pengadaan barang/jasa dan pengadaan jasa sewa kapal Carry out the manual/auction procurement process and select goods/ services providers through a tender process for requests of umbrella contracts for the procurement of goods/services and ship rental services.		
Merencanakan terhadap kebutuhan dari fungsi pengguna untuk dilaksanakan kontrak payung dan melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak yang telah dilaksanakan. Planning for the needs of the user function to carry out umbrella contracts and evaluating the contracts that have been implemented.		

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

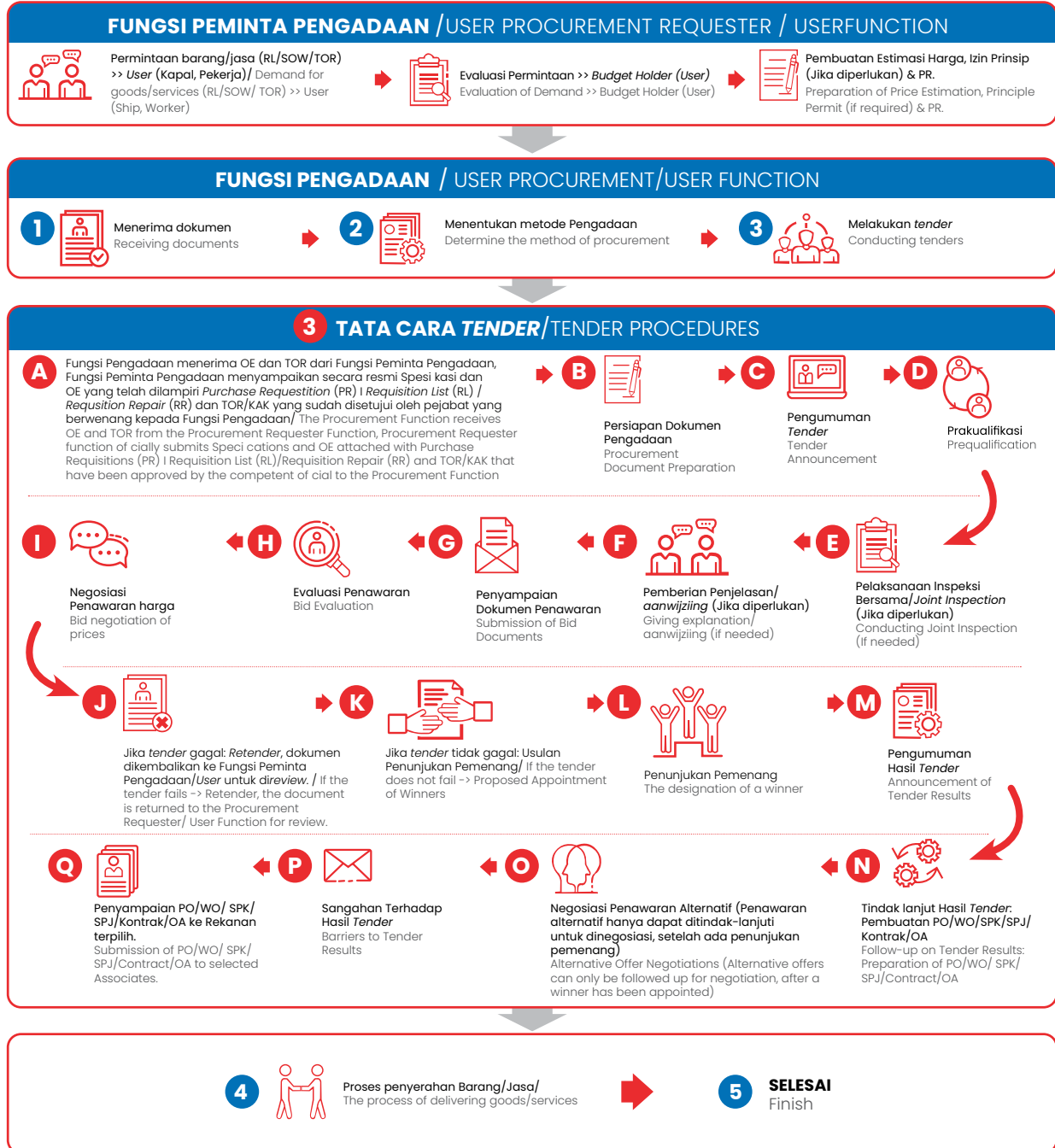
Sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan No. A-001/PTK3300/2021-S9 tanggal 24 November 2021, terdapat 3 tiga metode pengadaan barang & jasa yang digunakan, antara lain:

1. Metode Penunjukan Langsung
Adalah pengadaan dimana Fungsi Pengadaan atau ("FPP") menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tanpa terlebih dahulu melalui proses *Tender* atau *Beauty Contest*.
2. Metode *Tender* Terbatas
Adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa yang diikuti oleh penyedia barang/jasa dalam Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT) dan memenuhi persyaratan kualifikasi umum sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3. Metode *Tender* Terbuka
Adalah metode pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa atau papan pengumuman resmi perusahaan atau situs web Perusahaan sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Procurement of Goods and Services Methods

In accordance with the Guidelines for the Procurement of Goods/Services PT Pertamina Trans Kontinental No. A-001/PTK3300/2021-S9 dated November 24, 2021, there are 3 Goods & Services Procurement Methods used, including:

1. Direct Appointment Method
Is a procurement where the Procurement Function or FPP appoints 1 (one) supplier of goods/services to carry out a job, without first going through the Tender or Beauty Contest process.
2. Limited Tender Method
Is a method of selecting a provider of goods/ services, which is followed by a provider of goods/ services in OMO and fulfills the general qualification requirements in accordance with the work to be carried out.
3. Open Tender Method
Is a method of selecting a provider of goods/services which is carried out openly with a wide announcement through the mass media or the company's official bulletin board or company website so that the wider community and the business world who are interested and meet the qualifications can follow it.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement PolicyAlur Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Process Flow of Procurement of Goods and Services

Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 Fungsi *Procurement* telah melaksanakan 2.610 kegiatan pengadaan dan beberapa di antaranya pencapaian lainnya sebagai berikut:

1. *Cost Optimization* melalui negosiasi sebesar 3% dari *Owner Estimate* ("OE"), atau lebih kurang senilai Rp18.069.838.871.
2. Adanya penghematan biaya *Procurement* sendiri sebesar 62,92% atau lebih kurang senilai Rp538.860.164.
3. Dapat menyelesaikan proses pengadaan lebih cepat dari SLA, sebagai berikut:

Metode Pengadaan Procurement Method	SLA (hari kerja) SLA (working days)	Realisasi (hari kerja) Realization (working days)
Penunjukan Langsung Direct Appointment	9	11
<i>Tender Terbatas</i> Limited Tenders	23	17
<i>Tender Terbuka</i> Open Tenders	23	16

4. Implementasi Digitalisasi System yaitu Aplikasi *Extra* dan *Promise* sejak tahun 2021.
5. Pelaksanaan 3 kali *Vendor Day*, antara lain:
 - a. Tanggal 31 Agustus 2022 dengan tema "*Great Synergy for a Great Business*"
 - b. Tanggal 29 September 2022 dengan tema "*Workshop Full Cycle CSMS Kontrak Pengadaan Barang & Jasa di PT Pertamina Trans Kontinental*"
 - c. Tanggal 27 Oktober 2022 dengan tema "*Workshop Full Cycle CSMS Kontrak Pengadaan Barang & Jasa di PT Pertamina Trans Kontinental (II)*"
6. Melaksanakan pembuatan kontrak payung untuk pengadaan yang diproses oleh *Fungsi Procurement & Logistic* atas permintaan pengadaan barang/jasa oleh ("FPP"). Hal ini berguna dalam peningkatan efektivitas dengan memangkas proses *tender* berulang untuk kebutuhan rutin dan meningkatkan efisiensi dengan mengikat harga selama periode kontrak payung. Adapun jumlah pengadaan kontrak payung selama tahun 2022 sebanyak 28 Kontrak Payung, antara lain:
 - Pengadaan Jasa Surveyor untuk Support Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Kupang, Banyuwangi, Cilacap, Semarang, Belawan, Jakarta dan Sorong
 - Pengadaan Jasa Pekerjaan *Annual Survey* dan *Docking Survey* Kapal KKR (*Small Craft*) PT Pertamina Trans Kontinental di Daerah DKI Jakarta, Banten & Jawa Barat)
 - Pengadaan Jasa Transportir Bunker STS Muntok

Implementation of Activities and Achievements in 2022

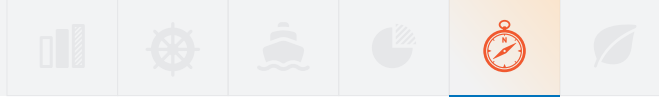
Throughout 2022 the Procurement Function has carried out 2,610 procurement activities and some of these other achievements are as follows:

1. Cost Optimization through negotiations of 3% of the Owner Estimate ("OE"), or approximately Rp18,069,838,871.
2. There is a savings in Procurement costs of 62.92% or approximately Rp538,860,164.
3. Can complete the procurement process faster than SLA, as follows:

4. Implementation of System Digitalization, namely *Extra* and *Promise* Applications since 2021.
5. Implementation of 3 Vendor Days, including:
 - a. August 31, 2022 with the theme "Great Synergy for a Great Business"
 - b. September 29, 2022 with the theme "Full Cycle CSMS Workshop on Goods & Services Procurement Contracts at PT Pertamina Trans Kontinental"
 - c. October 27, 2022 with the theme "Full Cycle CSMS Workshop on Goods & Services Procurement Contracts at PT Pertamina Trans Kontinental (II)"
6. Carry out the creation of umbrella contracts for procurement processed by the Procurement & Logistics Function at the request of procurement of goods/services by ("FPP"). This is useful in increasing effectiveness by cutting repeated tender processes for routine needs and increasing efficiency by binding prices during the period of umbrella contracts. Total umbrella contracts procured during 2022 were 28 umbrella contracts, including:
 - Procurement of Surveyor Services to Support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agents for the Kupang, Banyuwangi, Cilacap, Semarang, Belawan, Jakarta and Sorong Regions.
 - Procurement of Annual Survey and Docking Survey Services for PT Pertamina Trans Kontinental KKR (*Small Craft*) Ships in DKI Jakarta, Banten & West Java)
 - Procurement of STS Muntok Bunker Transport Services

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Policy

- Pengadaan Kebutuhan Operasional (ATK, RTK, Peralatan Gudang & *Sparepart*) di Marine Business & Operation Region I Periode April – Desember 2022
- Pengadaan Jasa Pekerjaan *Annual Survey* dan *Docking Survey* Kapal KKR (*Small Craft*) PT Pertamina Trans Kontinental di Daerah Kalimantan
- Pengadaan Jasa Sertifikasi ISPS & Keamanan Fungsi HSSE
- Pengadaan *Chemical* untuk Kapal Milik PT Pertamina Trans Kontinental
- Pengadaan Jasa Transportir Untuk Kegiatan Bunker BBM PT Pertamina International Shipping Wilayah Balikpapan
- Pengadaan Jasa Transportir Untuk Kegiatan Bunker BBM PT Pertamina International Shipping Wilayah Makassar
- Pengadaan Jasa Transportir Untuk Kegiatan Bunker BBM PT Pertamina International Shipping Wilayah Pontianak
- Pengadaan Penyediaan *Crew*, Jasa Pengoperasian Serta Pemeliharaan Kapal di Daerah Operasi Sumatera PT Pertamina Hulu Rokan
- Pengadaan Jasa Bunker *Handling* Transportir Darat Via Mobil Tanki Di Area Dumai, Pangkalan Susu Dan Sei Siak Tahun 2022
- Pengadaan Jasa Perlindungan/Penangulangan Lingkungan Perairan untuk Keperluan PT Pertamina Hulu Rokan
- Pengadaan *Oil Spill Dispersant* ("OSD") di *Marine Business & Operation Region I*
- Pengadaan Kegiatan *Ship Chandler* Dan *Running Store* Periode Agustus – Desember 2022
- Pengadaan Jasa Transportir untuk Support Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Jakarta
- Pengadaan Jasa Transportir Untuk Kegiatan Bunker BBM TNI Wilayah Jakarta dan Kotabaru
- Pengadaan Jasa Transportir untuk *Support* Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Jakarta dan Surabaya
- Jasa Borongan Pekerjaan Operasional STS Muntok Titik Kedua Periode Mei 2022 – April 2023
- Pengadaan Jasa Transportir untuk *Support* Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Jakarta
- Pengadaan Jasa Transportir untuk *Support* Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Jakarta dan Balikpapan
- Pengadaan Jasa Transportir untuk *Support* Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Batam
- Procurement of Operational Needs (ATK, RTK, Warehouse Equipment & Spare Parts) in Marine Business & Operation Region I Period April – December 2022
- Procurement of Annual Survey and Docking Survey Services for PT Pertamina Trans Kontinental KKR (Small Craft) Ships in the Kalimantan Region
- Procurement of ISPS Certification & HSSE Security Function Services
- Chemical Procurement for Ships Owned by PT Pertamina Trans Kontinental
- Procurement of transportation services for PT Pertamina International Shipping Fuel Bunker Activities in Balikpapan Region
- Procurement of transportation services for PT Pertamina International Shipping Fuel Bunker Activities in Makassar Region
- Procurement of transportation services for PT Pertamina International Shipping Fuel Bunker Activities in Pontianak Region
- Procurement of Crew Provision, Ship Operation and Maintenance Services in Sumatra Operations Area of PT Pertamina Hulu Rokan
- Procurement of Bunker Handling Services for Land Transportation via Tank Cars in Dumai, Pangkalan Susu and Sei Siak Areas in 2022
- Procurement of Water Environment Protection/Management Services for the Needs of PT Pertamina Hulu Rokan
- Procurement of Oil Spill Dispersant ("OSD") in Marine Business & Operation Region I
- Procurement of Ship Chandler and Running Store Activities for the August – December 2022 period
- Procurement of Transportation Services to Support the Handling Activities of the Indonesian Military Fuel Bunker Agent for Jakarta Region
- Procurement of Transportation Services for TNI Fuel Bunker Activities for Jakarta and Kotabaru Regions
- Procurement of Transportation Services to Support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agents for Jakarta and Surabaya Regions
- STS Muntok Second Point Operational Work Contract Service for Period of May 2022 – April 2023
- Procurement of Transportation Services to Support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agent for Jakarta Region
- Procurement of Transportation Services to Support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agents for Jakarta and Balikpapan Regions
- Procurement of Transportation Services to Support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agent for Batam Region



Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Policy

- Pengadaan Jasa Transportir untuk *Support* Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Jakarta
- Pengadaan Jasa Transportir untuk *Support* Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Kupang, Surabaya, Makassar dan Sorong
- Pengadaan Jasa Transportir untuk *Support* Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Jakarta
- Pengadaan Jasa Transportir untuk *Support* Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Surabaya I
- Pengadaan Jasa Transportir untuk *Support* Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Surabaya II
- Pengadaan Jasa Transportir untuk *Support* Kegiatan *Handling* Agen Bunker BBM TNI Wilayah Makassar

- Procurement of Transportation Services to Support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agent fo Jakarta Region
- Procurement of Transportation Services to Support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agents for Kupang, Surabaya, Makassar and Sorong Regions
- Procurement of Transportation Services to Support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agent for Jakarta Region
- Procurement of Transportation Services to Support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agent for Surabaya Region I
- Procurement of Transportation Services to Support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agent for Surabaya Region II
- Procurement of transportation services to support the Handling Activities of TNI Fuel Bunker Agent for Makassar Region

Perencanaan Kegiatan Fungsi *Procurement* Tahun 2023

Untuk program kerja tahun 2023 berfokus pada implementasi SMART GEP.

Selain itu terdapat program kerja yang rutin harus dilaksanakan oleh Fungsi *Procurement* di setiap tahunnya, antara lain:

1. Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa yang terdapat dalam *Procurement Plan List* ("PPL"), di mana rencana pengadaan di tahun 2023 terdapat 169 pengadaan yang tercantum dalam PPL.
2. *Cost Optimization* (rencana) melalui negosiasi sebesar 3% dari OE atau atau lebih kurang senilai Rp15.000.000.000,-
3. Penghematan biaya *Procurement* sendiri dengan realiasi *cost saving* sebesar 3% dari RKAP.
4. Pelaksanaan 3 kali *vendor day*.
5. Realisasi investasi ("ABI") target 85-100%.
6. Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri, target 30%.
7. *SLA Achievement*.
 - a. Pengadaan barang, target 60 hari kalender.
 - b. Pengadaan Jasa, target 90 hari kalender.
8. Penyelesaian kontrak payung, target 20 kontrak.
9. Penyelesaian permintaan pengadaan, target 95%.

Planning for 2023 *Procurement* Function Activities

For 2023 the work program focuses on implementing SMART GEP.

In addition, there are routine work programs that must be carried out by the Procurement Function every year, including:

1. Completion of goods/services procurement contained in the Procurement Plan List ("PPL"), where the 2023 procurement plan includes 169 procurements listed in the PPL.
2. Cost Optimization (plan) through negotiations of 3% of the OE or approximately Rp15,000,000,000.-
3. Savings on Procurement costs themselves with the realization of a cost saving of 3% of the RKAP.
4. Implementation of 3 times vendor day.
5. Investment realization ("ABI") target of 85-100%.
6. Use of Domestic Component Level, target of 30%.
7. Achievement of SLA.
 - a. Procurement of goods, target of 60 calendar days.
 - b. Procurement of Services, target of 90 calendar days.
8. Completion of umbrella contracts, target of 20 contracts.
9. Completion of procurement requests, target of 95%.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Performance-Based Long-Term Compensation Policy

Hingga akhir tahun 2022, Perusahaan tidak melaksanakan program kepemilikan opsi saham untuk manajemen, atau *Management Stock Option Plan* ("MSOP"), maupun program kepemilikan opsi saham untuk karyawan, atau *Employee Stock Option Plan* ("MSOP").

As of the end of 2022, the Company did not implement a management stock option plan ("MSOP"), or an employee stock option plan ("MSOP").

Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* ("WBS")

Whistleblowing System ("WBS")

Whistleblowing System menjadi bagian dalam implementasi GCG yang cukup penting dalam menekan pelanggaran yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, inisiatif penerapan WBS di lingkungan PTK telah dimulai oleh manajemen puncak Perusahaan dan untuk menunjukkan komitmen Perusahaan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PTK senantiasa melakukan pemutakhiran pedoman maupun mekanisme penerapannya.

Dengan pengelolaan dan penanganan pengaduan yang baik diharapkan dapat mendukung terciptanya prinsip tata kelola perusahaan yang efektif, serta menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari praktik korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya serta meningkatkan upaya berperilaku etis dalam menjalankan/mengelola perusahaan.

Whistleblowing System is an important part of GCG implementation to minimize any violations potential. Therefore, the initiative to implement WBS within the PTK environment has been initiated by the Company's top management and to demonstrate the Company's commitment to Good Corporate Governance, PTK is constantly updating the WBS guidelines and implementation mechanisms.

Good management and handling of complaints is expected to support the creation of effective corporate governance principles, as well as create a company environment that is clean from corruption, bribery and other fraudulent practices as well as increase efforts to behave ethically in running/managing the Company.

Dasar Kebijakan dan Ruang Lingkup WBS

Sebagai bagian dalam membangun *Fraud Control System* ("FCS"), PTK telah menyusun pedoman pelaporan pelanggaran dan penanganannya, yakni berdasarkan Keputusan Direksi No. B-001/PTK0320/2021-S0 (Revisi ke 0). Kebijakan ini melengkapi landasan-landasan FCS lain yang ada saat ini. Landasan tersebut berupa Pedoman Perilaku PTK dan menjadi landasan utama sistem pelaporan pelanggaran yang diterapkan oleh PTK yang merupakan sistem dalam mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan PTK dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PTK.

WBS Policy Framework and Scope

As part of building a Fraud Control System ("FCS"), PTK has developed guidelines for reporting violations and their handling, which is based on Board of Directors Decision Letter No. B-001/PTK0320/2021-S0 (Revision 0). This policy complements the foundations of other current FCSs. The foundation is in the form of PTK Code of Conduct and is the main basis for the whistleblowing system implemented by PTK which is a system for managing complaints/disclosures regarding unlawful behavior, unethical/improper acts in a confidential, anonymous and independent manner that is used to optimize the participation of PTK personnel and work partners in uncovering violations occurred in PTK environment.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Performance-Based Long-Term Compensation Policy

Lingkup kebijakan WBS PTK mencakup pelaporan terhadap perbuatan pelanggaran di antaranya:

PTK's WBS policy scope includes reporting of violations including:

Bentuk Pelanggaran Type of Violation	Keterangan Description
Korupsi Corruption	Adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PTK, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan perusahaan. Actions that are committed fraudulently or against the law by the Board of Commissioners, Directors, Management, and Employees of whom for and on behalf of PTK, against the Company's interest or abuse of authority/trust entrusted to the individual with the purpose of enriching one self, or other people, or corporate that may bring loss to the Company.
Suap Bribery	Adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi. Any actions committed by an individual in the form of bribe money/bribery/giving money or promises that are given or received in any form to someone who has influence or has relations with its position, aiming to satisfy personal or corporate interest.
Pencurian Theft	Adalah mengambil barang atau sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau perusahaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Actions of taking something, as a whole or partially that belongs to other people or the Company with the intention of owning it by violating the law.
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Adalah sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadinya. A situation in which an individual is confronted with different interests, between personal or the Company's interest causing the individual to choose and prioritize the Company's interest over his or her personal interest.
Kecurangan Fraud	Adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyikan atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain. Dishonest or deceitful actions, including fraud, extortion, forgery, concealment, or destruction of documents/reports or use false documents, conducted by an individual/a group of people that may cause potential loss or any real losses toward the Company or other people.

Struktur Pengelola Whistleblowing System

Pengelolaan WBS dilakukan oleh Fungsi WBS PT Pertamina (Persero) dan ditindaklanjuti oleh Fungsi Investigation Audit, WBS & Fraud Prevention PT Pertamina (Persero) untuk kemudian dapat dilimpahkan atau dilakukan koordinasi dengan Fungsi Internal Audit Holding/Subholding/Anak Perusahaan Services jika dibutuhkan berdasarkan persetujuan CAE Holding.

Fungsi Pengelola Whistleblowing System

Fungsi atau tugas pengelola WBS Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi mekanisme penyampaian laporan dugaan pelanggaran untuk segera ditangani.
2. Memfasilitasi mekanisme deteksi dini untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran.
3. Mendorong seluruh pekerja berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran tanpa takut diketahui identitasnya.

Whistleblowing System Management Structure

WBS management is carried out by the WBS Function of PT Pertamina (Persero) and followed up by the Investigation Audit, WBS & Fraud Prevention Function of PT Pertamina (Persero) to then be delegated or coordinated with the Internal Audit Holding/Subholding/Subsidiary Services Function if needed based on CAE approval Holding.

WBS Manager Function

The functions or tasks of a company WBS manager are as follows:

1. Facilitating the mechanism for submitting reports of alleged violations to be addressed immediately.
2. Facilitating early detection mechanisms to minimize the occurrence of violations.
3. Encouraging all employees to report violations without fear of being identified.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Performance-Based Long-Term Compensation Policy

4. Meminimalkan risiko keuangan dan risiko non-keuangan dalam menangani tindak pelanggaran.
5. Mengidentifikasi kelemahan sistem kontrol internal untuk dilakukan perbaikan.

4. Minimizing financial risks and non-financial risks in handling violations.
5. Identify weaknesses in the internal control system for improvement.

Prinsip Pelaporan Pelanggaran

WBS Reporting Principles

Prinsip Pelaporan WBS

WBS Reporting Principles

Prinsip Principles	Uraian Description
Rahasia Confidential	Prinsip ini mencakup: • Perlindungan terhadap identitas pelapor; • Perlindungan terhadap pelaksana investigasi dan pelapor; • Hanya pihak-pihak terbatas/tertentu yang mengetahui; • Penerapan asas praduga tidak bersalah. This principle includes: • Protection against the reporter identity; • Protection against investigation executor and reporter; • Only limited parties/certain who knows; • Application of the principle of presumption of not guilty.
Anonim Anonymous	• Prinsip ini mencakup menjamin adanya kemungkinan untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor. • Hal tersebut memberikan jaminan rasa aman kepada pelapor. • This principle includes guaranteeing the possibility not to reveal the identity of the reporter. • This guarantees a sense of security for the reporter.
Independen Independent	• WBS Perusahaan dikelola secara profesional; • Pengaduan yang ditindaklanjuti hanya yang memenuhi kriteria; • Tidak dimungkinkan untuk terjadinya intervensi terhadap laporan. • The Company's WBS is managed professionally; • Complaints that are followed up are only those that meet the criteria; • It is not possible to intervene in the report.

Penyampaian Pelaporan Whistleblowing System

Berikut beberapa saluran untuk penyampaian pelaporan pelanggaran yang disediakan oleh PTK:

Melalui Situs Pertamina Clean
 Telepon : (021) 2350 7051
 SMS dan Whatsapp : 0811 861 5000
 Faksimili : (021) 381 5912
 Email : pertaminaclean@tipoffs.com.sg
 Kirim Surat : Attn: Tip-offs Anonymous™
 Pertamina Clean P.O.Box 2600 JKP 10026

Mekanisme Whistleblowing System

Mekanisme penyaluran pengaduan/penyungkapan oleh pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung, direktorat dan fungsi terkait. Bila Pelapor memandang sarana pengaduan/penyungkapan tidak efektif atau ada keraguan, Pelapor dapat menyalurkan pengaduan/penyungkapan melalui WBS.

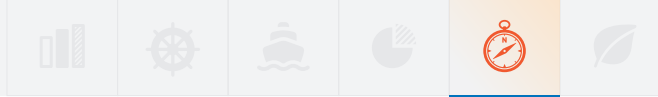
Submission of Whistleblowing System Reporting

PTK provides a channel for the delivery of reporting:

Through the Pertamina Clean Site
 Phone : (021) 2350 7051
 SMS and Whatsapp : 0811 861 5000
 Facsimile : (021) 381 5912
 Email : pertaminaclean@tipoffs.com.sg
 Sending Letter : Attn: Tip-offs Anonymous™
 Pertamina Clean P.O.Box 2600 JKP 10026

Whistleblowing System Mechanism

The mechanism of report/disclosure flow by the whistleblower is basically conducted through formal channel, namely direct supervisor, directorate and related functions. If the Whistleblower views the report/disclosure facility is ineffective or causes doubts, the Whistleblower could submit the report/disclosure through WBS.



Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
Performance-Based Long-Term Compensation Policy

Prosedur WBS adalah sebagai berikut:

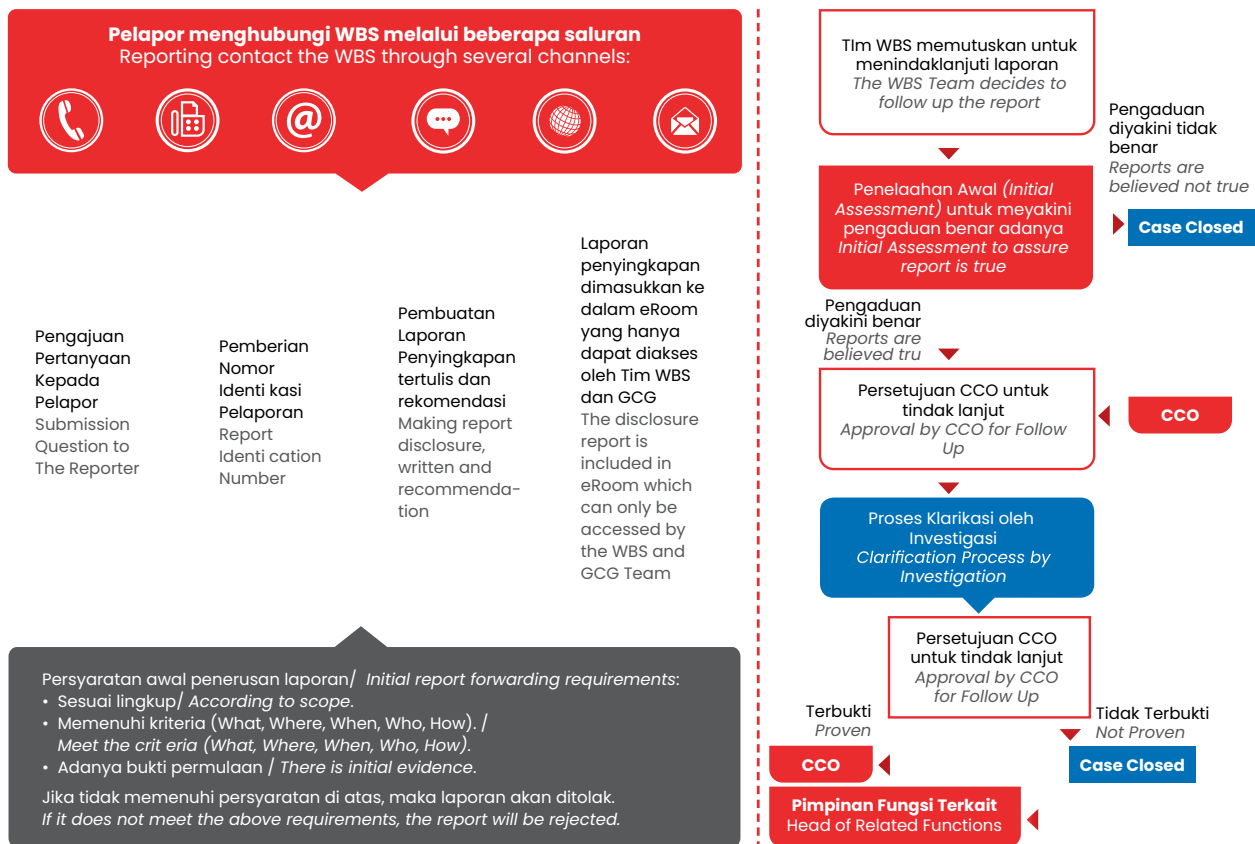
1. Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada pengelola WBS melalui sarana/media yang telah ditentukan.
2. Tim WBS menerima pengaduan penyingkapan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan:
 - a. Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan.
 - b. Laporan penyingkapan (*disclosure report*).
3. Memasukkan Laporan penyingkapan ke dalam *e-Room* yang hanya dapat diakses oleh Tim WBS dan Chief Compliance Officer.
4. Tim WBS menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) kepada Chief Compliance Officer/ Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai kategori Terlapor).
5. Tim WBS melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada Chief Executive Officer. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Chief Compliance Officer memutuskan tindak lanjut:
 - a. Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
 - b. Bekerja sama dengan eksternal Investigator jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PTK dan/atau menimbulkan kerugian besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti Internal Audit.
 - c. Bekerja sama dengan Internal Audit dan/atau Sekuriti sesuai substansi.
 - d. Pengaduan/penyingkapan dilakukan Tim WBS atas justifikasi dan penunjukan dari Chief Compliance Officer.
6. Tim investigasi melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada Chief Compliance Officer.
7. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Chief Compliance Officer memutuskan.

The WBS procedure is as follows:

1. Whistleblower establishes a report/ disclosure and submits it to WBS manager through the determined means/media.
2. WBS Team receives the report/disclosure, records, and prepares it in a standard format, generating:
 - a. Contact acceptance report in accordance with the scope of report category.
 - b. Disclosure report.
3. Transferring the disclosure report into *e-Room* that could only be accessed by WBS Team and Chief Compliance Officer.
4. WBS Team submits the disclosure report to Chief Compliance Officer/Board of Commissioners/ President Director (in accordance with the Offender category).
5. WBS Team performs initial analysis/ clarification on the report and develops si resumé. Afterward it is to be presented to Chief Executive Officer. Based on the presentation results, Chief Compliance Officer decides the follow up:
 - a. Suspended, if it does not meet the requirements of initial indication
 - b. Cooperating with an external investigator if the substance of report/ disclosure is related to PTK image/reputation and/or may cause huge loss and/or has never been followed up by Internal Audit.
 - c. Cooperating with Internal Audit and/ or Security in accordance with the substance.
 - d. Report/disclosure is conducted by WBS Team on the justifications and appointment from Chief Compliance Officer.
6. The Investment Team conducts an investigation and presents the results to the Chief Compliance Officer.
7. Based on the results of the presentation, the Chief Compliance Officer decided.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Performance-Based Long-Term Compensation Policy



Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Apabila ada laporan yang masuk ke dalam *Whistleblowing System* akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi yang tegas dan konsisten jika terbukti bersalah, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran maupun pihak lain yang memiliki niat melakukan pelanggaran. Terkait penanganan pelaporan pelanggaran telah tertuang dalam mekanisme *Whistleblowing System*.

Perlindungan Bagi Pelapor

Setiap Pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak wajar, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan Personal File Record.

Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum jika diperlukan, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 Undang-undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 13 Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Violation Report Processing

If there is any report submitted through the Whistleblowing System, the report will be followed up with the strict and consistent punishment if proven guilty, thereby will give a deterrent effect for violators or other parties who have the intention to commit violations. With regards to the violation report processing, the procedure has been disclosed in the Whistleblowing System mechanism.

Protection for Whistleblower

Every whistleblower will receive protection from the Company against any adverse treatment such as improper dismissal, demotion, or rank, harassment, or discrimination in all its forms, and records which is detrimental to the Personal File Record.

The Company will also provide legal protection if necessary, in line with what is regulated in article 43 of Law No. 15 of 2002 jo. UU No. 25 of 2003 concerning the Money Laundering Crime and Article 13 of Law No. 13 of 2006 on Witness and Victim Protection, and Article 5 PP No. 57 of 2003 concerning Protection Procedures

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Performance-Based Long-Term Compensation Policy

dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengelola WBS dilarang mengungkapkan identitas Pelapor. Apabila dalam faktanya bahwa identitas pelapor perlu diungkapkan atau tidak disembunyikan sebagaimana diperlukan oleh undang-undang dan proses peradilan atau dalam rangka diperlukannya pengambilan tindakan yang sesuai, maka Pengelola WBS wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Pelapor secara tertulis. Perlindungan terhadap Pelapor dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran yang disampaikan memenuhi kriteria, yaitu informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan telah terjadi dan dapat dipercaya/valid (setelah dilakukan verifikasi oleh Pengelola WBS). Kriteria perlindungan terhadap Pelapor wajib dipenuhi, dalam rangka menghindarkan adanya laporan palsu, fitnah, bersifat mengada-ada atau tidak beritikad baik.

Selain itu, PTK juga memberikan perlindungan kepada terlapor, sebab Perusahaan juga mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme dalam rangka melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran

Rincian data pengelolaan pengaduan di PT Pertamina Trans Kontinental sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan

Total Complaints of Violation

Entitas Entity	2022	2021	2020	Jumlah Total
PT Pertamina Trans Kontinental	5	2	1	8

Sosialisasi dan Evaluasi

Perusahaan melakukan sosialisasi WBS melalui media wallpaper yang ada di dalam desktop seluruh pekerja dan seluruh pekerja dapat menyalurkan pengaduan melalui WBS. Sosialisasi WBS akan terus dilakukan secara berjenjang dan bertahap kepada seluruh *stakeholder* dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan WBS.

Sanksi Terhadap Pelanggaran

Perusahaan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif. Hal tersebut tercantum pada Tata Kerja Organisasi Pengelolaan WBS No. B-008/F1000/2019-S0 Juni 2019.

Especially for Reporters and Witnesses in Criminal Acts Money laundering.

WBS managers are prohibited from disclosing identity of the Whistleblowers. If, factually, identity of the whistleblowers needs to be disclosed or not withheld as required by law and judicial process or in the context of its need taking appropriate action, the WBS Manager shall further ask for approval in advance to the Whistleblower through written letter. Protection to the Whistleblower is carried out when reporting the violations submitted meet the criteria, namely information and/or violations submitted has occurred and can be trusted/valid (after verification by the Manager WBS). Protection criteria for whistleblowers are mandatory to be fulfilled, in order to avoid fake reports, slander, fabricated or not in good faith.

In addition, PTK also provides protection to reported, because the Company also uphold confidentiality, the presumption of innocence and professionalism policies in order to carry out the report follow-up process.

Total Violation Report

Details of complaint management data at PT Pertamina Trans Kontinental are as follows:

Socialization and Evaluation

The Company will socialize the WBS through the media wallpaper on the desktops of all workers and all workers can channel complaints through the WBS. WBS socialization will continue to be carried out in stages and gradually to all stakeholders in order to increase the effectiveness of WBS implementation.

Sanctions Against Violations

The Company provides sanctions in accordance with applicable regulations, if proven and related to administrative actions. This is stated in the WBS Management Organization Work Procedure No. B-008/F1000/2019-S0 June 2019.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN")

State Officials' Wealth Report ("LHKPN")

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, PTK menerapkan kebijakan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ("LHKPN") di lingkungan Perusahaan. LHKPN dilaporkan secara berkala untuk periode 1 (satu) tahun melalui aplikasi e-LHKPN dengan batas waktu paling lambat bulan Maret pada tahun berikutnya.

PTK memiliki Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN") yang ditetapkan melalui Surat Keputusan No. Kpts-547/C0000/2021-S0 tanggal 27 Mei 2021 tentang Gratifikasi Pedoman PT Pertamina (Persero) No A13-001/N00200/2021-S9 Tentang Pengelolaan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam pedoman tersebut, diatur pejabat Perusahaan yang wajib melaporkan LHKPN, yaitu:

1. Direksi
2. Dewan Komisaris
3. Direksi Anak Perusahaan
4. Dewan Komisaris Anak Perusahaan
5. Vice President/Setara
6. Manager/Setara
7. Manager/Setara di Anak Perusahaan
8. Assistant Manager/Setara
9. Pejabat level struktural yang diberi kewenangan untuk memutuskan.

Berdasarkan data yang tercantum dalam aplikasi e-LHKPN diketahui bahwa tingkat kepatuhan pejabat Perusahaan terkait kewajiban penyampaian LHKPN telah sangat memadai yaitu mencapai 100% dari 217 pejabat Perusahaan yang wajib melakukan LHKPN.

As a manifestation of the Company's commitment to carrying out business activities that are clean and free from corruption, collusion, and nepotism, PTK implements a management policy for State Officials' Wealth Reports ("LHKPN") within the Company. LHKPN is reported periodically for a period of 1 (one) year through the e-LHKPN application with the latest deadline in March of the following year.

PTK has Guidelines for the State Officials' Wealth ("LHKPN") Reporting stipulated through Decision Letter No. Kpts-547/C0000/2021-S0 dated May 27, 2021 concerning PT Pertamina (Persero) Gratification Guideline No A13-001/N00200/2021-S9 Concerning Management of Obligation to Submit State Officials' Wealth Reports. In these guidelines, it is regulated that Company officials who are required to report LHKPN, namely:

1. Board of Directors
2. Board of Commissioners
3. Directors of Subsidiaries
4. Board of Commissioners of Subsidiaries
5. Vice President/Equivalent
6. Manager/Equivalent
7. Manager/Equivalent in Subsidiaries
8. Assistant Manager/Equivalent
9. Structural level officials who are authorized to make decisions.

Based on the data contained in the e-LHKPN application, it is known that the level of compliance of Company officials regarding the obligation to submit LHKPN is very adequate, reaching 100% of the 217 Company officials who are required to carry out LHKPN.



Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN")
State Officials' Wealth Report ("LHKPN")





Laporan Keuangan

Financial
Report





**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2022/
*31 DECEMBER 2022***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTOR'S STATEMENT LETTER REGARDING**

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

**TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

Nama : Nepos MT Pakpahan
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telepon : 021-3192 3005
Jabatan : Direktur Utama

Name : Nepos MT Pakpahan
Address : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telephone : 021 - 3192 3005
Position : President Director

Nama : Afan Aftory
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telepon : 021-3192 3005
Jabatan : Direktur Keuangan dan Sumber
Daya Manusia

Name : Afan Aftory
Address : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telephone : 021 - 3192 3005
Position : Finance and Human Resources
Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*
b. *The Group's consolidated financial statements do not contain any false material information or facts, nor do they omit information or facts; and*
4. *We are responsible for the Group's internal control systems.*

Thus, this statement is made truthfully.



PT Pertamina Trans Kontinental
Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta 10450
T +62 21 319 23005 F +62 21 310 6804
www.ptk-shipping.com

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.

For and on behalf of the Board of Director.

Jakarta, 13 Maret/March 2023



Nepos MT Pakpahan
Direktur Utama/President Director

Afan Aftory
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/
Finance and Human Resources Director



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises information included in the Annual Report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
13 Maret/March 2023

Daniel Kohar, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1130



Pertamina Trans Kontinental
00284/2.1025/AU.1/06/1130-5/1/III/2023

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah
except for par value and share data)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>	<u>31 Desember/ December 2021</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4, 25	1,125,624	1,263,166	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya		1,779	592	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak berelasi	5, 25	1,178,581	1,009,051	Related parties -
- Pihak ketiga	5	106,192	122,257	Third parties -
Aset kontrak				Contract assets
- Pihak berelasi	6, 25	1,033,386	711,387	Related parties -
- Pihak ketiga	6	243,819	141,933	Third parties -
Piutang sewa pembiayaan	8	22,798	20,876	Finance lease receivables
Persediaan		-	65	Inventories
Piutang lain-lain		59	6,159	Other receivables
Pajak dibayar				
di muka - pajak lain-lain	15a	24,076	17,752	Prepaid taxes - other tax
Uang muka dan biaya dibayar di muka	7	<u>75,393</u>	<u>80,141</u>	Advances and prepayments
Jumlah aset lancar		<u>3,811,707</u>	<u>3,373,379</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	10	3,861,943	4,035,264	Fixed assets
Aset hak-guna	14a	309,975	182,009	Right-of-use assets
Aset pajak tangguhan	15e	87,616	55,327	Deferred tax assets
Piutang sewa pembiayaan	8	22,798	41,753	Finance lease receivables
Penyertaan saham	25	6,661	5,999	Investment in shares
Investasi pada ventura bersama	9	87,607	84,643	Investment in joint venture
Pajak dibayar di muka:				Prepaid taxes:
- Pajak penghasilan	15a	-	2,179	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain	15a	-	15,810	Other taxes -
Aset lain-lain		<u>14,264</u>	<u>5,498</u>	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		<u>4,390,864</u>	<u>4,428,482</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET		<u>8,202,571</u>	<u>7,801,861</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah
except for par value and share data)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>	<u>31 Desember/ December 2021</u>	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
- Pihak berelasi	11, 25	909,546	639,972	Related parties -
- Pihak ketiga	11	117,952	230,515	Third parties -
Biaya masih harus dibayar	12	1,742,194	1,566,119	Accrued expenses
Liabilitas kontrak				Contract liabilities
- Pihak berelasi	13, 25	20,136	53,814	Related parties -
- Pihak ketiga	13	87,084	87,639	Third parties -
Utang pajak				Taxes payable
- Pajak penghasilan	15b	97,288	35,199	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain	15b	52,968	47,875	Other taxes -
Utang dividen	19	64	9,937	Dividend payables
Liabilitas sewa	14b	354,455	225,166	Lease liabilities
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	16	<u>231,826</u>	<u>236,777</u>	Current portion of long-term borrowings
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>3,613,513</u>	<u>3,133,013</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa	14b	81,930	48,815	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	16	722,993	1,000,607	Long-term borrowings
Liabilitas imbalan pasca kerja	17	<u>176,556</u>	<u>170,312</u>	Post-employment benefits obligation
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>981,479</u>	<u>1,219,734</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>4,594,992</u>	<u>4,352,747</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal ditempatkan dan disetor penuh 1.234.747 lembar (2021: 1.106.145 lembar) saham A dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan 819 saham B dengan nilai nominal Rp1.000	18	1,234,748	1,106,146	Share capital - issued and fully paid 1,234,747 shares (2021: 1,106,145 shares) A at par value of Rp1,000,000 per share and 819 shares B at par value of Rp1,000 per share
Tambahan modal disetor		(76,051)	(76,051)	Additional paid-in capital
Rugi komprehensif lain		(80,872)	(101,555)	Other comprehensive loss
Saldo laba				Retained earnings
- Ditentukan penggunaannya	26	112,796	75,943	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		<u>2,416,562</u>	<u>2,444,631</u>	Unappropriated -
		3,607,183	3,449,114	
Kepentingan non-pengendali		<u>396</u>	<u>-</u>	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		<u>3,607,579</u>	<u>3,449,114</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>8,202,571</u>	<u>7,801,861</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Pendapatan usaha	20	4,784,913	3,800,987	Revenue
Beban pokok pendapatan	21	(3,136,987)	(2,688,852)	Cost of revenue
Laba bruto		1,647,926	1,112,135	Gross profit
Beban umum dan administrasi	22	(649,316)	(458,185)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain, bersih	23	25,531	25,543	Other revenue, net
Pendapatan keuangan		23,565	6,597	Finance income
Beban keuangan	24	(99,799)	(54,172)	Finance costs
Bagian atas laba bersih ventura bersama	9	25,446	28,045	Share in profit of joint venture
Beban pajak final		(18,499)	(17,723)	Final tax expenses
Laba sebelum pajak penghasilan		954,854	642,240	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	15c	(221,826)	(111,701)	Income tax expense
Laba tahun berjalan		733,028	530,539	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to the profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	17	24,964	24,790	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak penghasilan terkait		(4,943)	(840)	Related income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to the profit or loss:
Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain		662	(8,423)	Changes in the fair value of equity instruments at fair value through other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif lain		20,683	15,527	Total other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		753,711	546,066	Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
- Pemilik entitas induk		732,568	530,539	Owners of the parent entity -
- Kepentingan non-pengendali		460	-	Non-controlling interests -
Laba tahun berjalan		733,028	530,539	Profit for the year
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
- Pemilik entitas induk		753,251	546,066	Owners of the parent entity -
- Kepentingan non-pengendali		460	-	Non-controlling interests -
Jumlah penghasilan komprehensif lain		753,711	546,066	Total other comprehensive income

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributable to owners of the parent entity						
	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Issued and fully paid share capital</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>		Kepentingan non-pengendali/ <i>Non-controlling interest</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>
Catatan/ <i>Notes</i>				Telah ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>		
Saldo per 1 Januari 2021	693,709	3,000	(117,082)	75,943	1,924,029	-	2,579,599
							Balance as at 1 January 2021
Modal ditempatkan dan disetor penuh	412,437	-	-	-	-	-	Issued and fully paid share capital
Penghasilan komprehensif lain	-	-	15,527	-	-	-	Other comprehensive income
Dividen dideklarasikan	-	-	-	-	(9,937)	-	Dividends declared
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	530,539	-	Profit for the year
Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali	-	(79,051)	-	-	-	-	Restructuring transaction between entities under common control
Saldo per 31 Desember 2021	1,106,146	(76,051)	(101,555)	75,943	2,444,631	-	Balance as at 31 December 2021
Modal ditempatkan dan disetor penuh	128,602	-	-	-	-	-	Issued and fully paid share capital
Penghasilan komprehensif lain	-	-	20,683	-	-	-	Other comprehensive income
Dividen dideklarasikan	-	-	-	-	(723,784)	(64)	Dividends declared
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	732,568	460	Profit for the year
Cadangan umum	-	-	-	36,853	(36,853)	-	General reserves
Saldo per 31 Desember 2022	1,234,748	(76,051)	(80,872)	112,796	2,416,562	396	Balance as at 31 December 2022

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan		4,161,889	3,239,063	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(2,127,266)	(1,549,391)	Payments to suppliers
Pembayaran beban keuangan		(90,619)	(54,172)	Payments of finance costs
Pembayaran pajak final		(18,499)	(17,723)	Payments of final tax expense
Penerimaan penghasilan keuangan		23,565	6,597	Receipts of finance income
Pembayaran kepada karyawan		(389,435)	(236,337)	Payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan badan		(192,055)	(96,421)	Payment of corporate income tax
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		<u>1,367,580</u>	<u>1,291,616</u>	Net cash generated from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penerimaan dividen dari ventura bersama	9	22,482	17,827	Dividends received from joint venture
Penerimaan piutang pembiayaan		17,033	19,866	Receipts from lease receivables
Perolehan aset tetap		(414,682)	(806,486)	Acquisition of fixed assets
Penyertaan saham		-	(4,814)	Investment in shares
Arus kas keluar bersih dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali	30	-	(11,531)	Net cash outflow from restructuring transaction between entities under common control
Kompensasi atas pembatalan aset dalam penyelesaian	10	155,400	124,800	Compensation of cancellation construction in progress
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(219,767)</u>	<u>(660,338)</u>	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan pinjaman		452,399	461,875	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman		(744,038)	(476,998)	Repayments of borrowings
Pembayaran dividen tunai	19	(723,784)	-	Payment of cash dividends
Pembayaran atas liabilitas sewa	14b	(274,620)	(8,149)	Payments of lease liabilities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(1,290,043)</u>	<u>(23,272)</u>	Net cash used in financing activities
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		4,688	2,677	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas		(137,542)	610,683	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	4	<u>1,263,166</u>	<u>652,483</u>	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4	<u>1,125,624</u>	<u>1,263,166</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pertamina Trans Kontinental ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 9 September 1969, yang diubah dengan notaris yang sama dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Januari 1975, oleh Tan Thong Kie dengan nama PT Pertamina Tongkang. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. Ya.5/5/4 tanggal 21 Januari 1975 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 10 tanggal 4 Februari 1975. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 26 Oktober 2011 oleh Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 29 November 2022 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan peningkatan modal dasar Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0319457 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Kramat Raya No. 29.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Maksud Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik baik di dalam negeri maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik tersebut.
- Tujuan Perusahaan adalah untuk:
 - a. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan secara efektif dan efisien; dan
 - b. Memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Pertamina Trans Kontinental (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 3 dated 9 September 1969, as amended by Notarial Deed No. 1 of the same notary dated 3 January 1975, by Tan Thong Kie under the name of PT Pertamina Tongkang. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. Ya.5/5/4 dated 21 January 1975 and was published in State Gazette No. 10 dated 4 February 1975. The Company's name was changed to PT Pertamina Trans Kontinental based on Notarial Deed No. 12 dated 26 October 2011, of Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-58581.AH.01.02 Year 2011 dated 29 November 2011.

The Company's Articles of Association have been amended several times, with the latest amendment made by Notarial Deed No. 30 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, dated 29 November 2022, regarding the increase in the authorised share capital of the Company. The change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0319457 Year 2022 dated 30 November 2022.

The Company is domiciled in Jakarta and its head office is located in Jl. Kramat Raya No. 29.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities are as follows:

- *The Company's objective is to conduct business in shipping, maritime and logistics services both domestically and abroad, as well as other related or supporting business activities in shipping, maritime and logistics services.*
- *The Company's objectives are to:*
 - a. *Make profits based on the principles of effective and efficient management; and*
 - b. *Contribute to economic activities for the welfare and prosperity of the people.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Struktur Grup

i. Entitas anak

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup".

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, struktur Grup adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ <i>Subsidiaries</i>	Aktivitas bisnis/ <i>Business activities</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Mula beroperasi komersial/ <i>Commencement of commercial operations</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>		Jumlah aset sebelum eliminasi/ <i>Total asset before elimination</i>	
				2022	2021	2022	2021
1. PT Pertamina Port and Logistics (dahulu/ <i>formerly PT Peteka Karya Samudera</i>) ("PPL") Berdiri tanggal 10 Februari 1986/ <i>Established on 10 February 1986</i>	Jasa bongkar muat/ <i>Cargo handling</i>	Jakarta	1996	100%	100%	712,454	373,487
2. PT Pertamina Marine Solutions (dahulu/ <i>formerly PT Peteka Karya Gapura</i>) ("PMSol") Berdiri tanggal 5 Juni 1987/ <i>Established on 5 June 1987</i>	Jasa angkutan, penyediaan tenaga kerja dan perdagangan umum/ <i>Transportation service, labour supply and general trade</i>	Jakarta	1998	100%	100%	315,739	300,958
3. PT Pertamina Marine Engineering (dahulu/ <i>formerly PT Peteka Karya Jala</i>) ("PME") Berdiri tanggal 6 November 1991/ <i>Established on 6 November 1991</i>	Perawatan dan pengadaan barang dan jasa/ <i>Maintenance and procurement of goods</i>	Jakarta	1991	99.17%	99.17%	298,064	213,794

ii. Ventura bersama

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 September 2014 yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 41 oleh Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA, Perusahaan dan Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT"), mendirikan ventura bersama bernama PT Trans Yeong Maritime ("TYM"), sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan ventura bersama adalah untuk menyelenggarakan usaha dibidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut. Kepemilikan saham Perusahaan di TYM adalah sebesar 51%.

Perusahaan induk utama Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), badan usaha milik negara ("BUMN").

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. The Group structure

i. Subsidiaries

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

As at 31 December 2022 and 2021, the structure of the Group was as follows:

ii. Joint venture

Based on the Annual General Meeting of Shareholders dated 16 September 2014, which was documented in Notarial Deed No. 41 by Notary Dewantari Handayani S.H., MPA, the Company and Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT") established a joint venture named PT Trans Yeong Maritime ("TYM"), a company located in Central Jakarta. The joint venture's purpose and objective are related to shipping and harbour services. The Company's share of ownership in TYM is 51%.

The Company's ultimate parent company is PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), a state-owned enterprise ("SOE").

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Amir Hamzah
Komisaris	Khalid Zabidi
	Agustinus Lomboan
	Andi Saiful Haq
Direksi	
Direktur Utama	Nepos MT Pakpahan
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Afan Aftory
Direktur Operasi	Slamet Harianto
Direktur Pemasaran	Afan Aftory*

Keterangan:

*) Sejak tanggal 6 Desember 2022, Afan Aftory adalah pelaksana tugas Direktur Pemasaran.

d. Penyelesaian atas laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan pada tanggal 13 Maret 2023.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Boards of Commissioners and Board of Directors

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2022 and 2021 were as follows:

	2021	
		Board of Commissioners
Amir Hamzah	Amir Hamzah	President Commissioner
Khalid Zabidi	Khalid Zabidi	Commissioners
Agustinus Lomboan	Agustinus Lomboan	
Andi Saiful Haq	Andi Saiful Haq	
		Board of Directors
Nepos MT Pakpahan	Nepos MT Pakpahan	President Director
		Finance and Human Resources Director
Afan Aftory	Afan Aftory	Operation Director
Hadi Purnomo	Hadi Purnomo	Commercial Director
Arsono Kuswardanu	Arsono Kuswardanu	

Remarks:

*) Since 6 December 2022, Afan Aftory is Commercial Director acting official.

d. Completion of the consolidated financial statements

These consolidated financial statements were authorised for issuance in accordance with a resolution of the Board of Directors of the Company on 13 March 2023.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap semua periode yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The accounting policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and deposits with a maturity of three months or less.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Lihat catatan 2c untuk informasi mata uang fungsional.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dibawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK 22 "Bisnis Kombinasi" tentang acuan kerangka konseptual pelaporan keuangan;
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak;
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 69 "Agrikultur".

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified. Refer to notes 2c for the information on the group's functional currency.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS")

The implementation of the following new standards, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2022 did not result in changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for current or prior financial periods:

- *The amendments to SFAS 22 "Business Combinations" about references to the conceptual framework for financial reporting;*
- *The amendments to SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" about onerous contracts – cost of fulfilling a contract;*
- *Annual improvement on SFAS 71 "Financial Instruments";*
- *Annual improvement on SFAS 73 "Lease";*
- *Annual improvements on SFAS 69 "Agriculture".*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan antara lancar dan tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi;
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi;
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal;
- Amendemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah" tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad ijarah.

Sehubungan dengan amendemen PSAK 71, 55, 60, 62 dan 73, Grup saat ini memiliki pinjaman jangka panjang yang mengacu pada *Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR")* dan *US Dollar London Interbank Offered Rate ("LIBOR")* dan berlaku setelah tahun 2022 atau paling lambat tanggal ketika *JIBOR* dan *LIBOR* tidak lagi tersedia. Pada tanggal 31 Desember 2022, tolak ukur alternatif belum ditentukan.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS") (continued)

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2022 are as follows:

- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities between current and non-current;*
- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies;*
- *The amendments to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment" about proceeds before intended use;*
- *The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimates;*
- *The amendments to SFAS 46 "Income Tax" about deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction;*
- *The amendments to SFAS 107 "Ijarah Accounting" about recognition, measurement and disclosure of ijarah contracts.*

With respect to the amendments to SFAS 71, 55, 60, 62 and 73, the Group currently has long-term borrowings that refers to the Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") and US Dollar London Interbank Offered Rate ("LIBOR") and extends beyond 2022 or no later than the date when JIBOR and LIBOR is no longer available. As at 31 December 2022, an alternative benchmark has not yet been determined.

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2024 are as follows:

- *The amendments to SFAS 73 "Leases" about lease liability in a sale and leaseback;*
- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74 "Kontak Asuransi";
- Amendemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi" tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 - informasi komparatif.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan ekuitas

(i) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas yang terstruktur) dimana Grup memiliki kontrol. Grup memiliki kontrol atas entitas anak apabila Grup memiliki dampak dari, atau memiliki hak atas, penerimaan variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penerimaan tersebut melalui kuasa atas entitas anak. Entitas anak secara utuh dikonsolidasikan dari tanggal dimana kontrol dialihkan ke Grup. Entitas anak tidak lagi dikonsolidasikan sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

Transaksi, saldo, dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Grup.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS") (continued)

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2025 are as follows:

- SFAS 74 "Insurance Contracts";
- The amendments to SFAS 74 "Insurance Contracts" about initial application of SFAS 74 and SFAS 71 - comparative information.

As at the date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

b. Principles of consolidation and equity accounting

(i) Subsidiaries

Subsidiaries are all those entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are de-consolidated from the date that control ceases.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been adjusted where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan ekuitas (lanjutan)

(ii) Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

(iii) Pengaturan bersama

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor bukan struktur hukum dari pengaturan bersama. Grup telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama. Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui sebagai biaya pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

(iv) Metode ekuitas

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi pasca akuisisi dari *investee* pada laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lainnya dari *investee* di pendapatan komprehensif lainnya.

Jika bagian Grup atas kerugian ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

b. Principles of consolidation and equity accounting (continued)

(ii) Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost.

(iii) Joint arrangements

Under SFAS 66, investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor rather than the legal structure of the joint arrangement. The Group has assessed the nature of its joint arrangement and determined them to be a joint venture. A joint venture is accounted for using the equity method, after initially being recognised at cost in the consolidated statement of financial position.

(iv) Equity method

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

When the Group's share of losses in a joint venture equal or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the joint venture.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan
ekuitas (lanjutan)**

(iv) Metode ekuitas (lanjutan)

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai.

(v) Perubahan kepemilikan

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**b. Principles of consolidation and equity
accounting (continued)**

(iv) Equity method (continued)

Unrealised profits on transactions between the Group and its joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in this entity. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividends received or receivable from joint venture are recognised as a reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investments is tested for impairment.

(v) Changes in ownership interests

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Penjabaran mata uang asing

c. Foreign currency transactions

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

(i) Functional and presentation currency

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency.

(ii) Transaksi dan saldo

(ii) Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into functional currency using the closing exchange rate. The exchange rate used as a benchmark is the rate that is issued by the Bank of Indonesia. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut (dalam satuan penuh):

The rates of exchange used are as follows (in full amounts):

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Rupiah per Dolar Amerika Serikat ("AS\$")	15,592	14,278	Rupiah equivalent to United States Dollar ("US\$") ¹

d. Kas dan setara kas

d. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

Cash and cash equivalents which have been restricted for a certain purpose, or which cannot be used freely, are not defined as cash and cash equivalents.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

e. Transactions with related parties

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

The Group has transactions with related parties. The definition of related parties is in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

e. Transactions with related parties (continued)

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

All significant transactions and balances of the Group with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Group elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transactions with related parties are based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

f. Piutang usaha

f. Trade receivables

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha. Bila pembayaran diharapkan akan diterima dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Bila tidak, disajikan sebagai aset tidak lancar.

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Piutang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate ("EIR") method, less provision for impairment.

Lihat Catatan 2q untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

See Note 2q for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

g. Kontrak aset

g. Contract assets

Kontrak aset merupakan jumlah pendapatan yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan keuangan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan.

Contract assets represent the unbilled amounts at the end of the financial reporting period in respect of services performed.

h. Biaya dibayar dimuka

h. Prepayments

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Kapal milik Grup mengalami pengedokan secara berkala secara umum setiap 2 - 2,5 tahun dan biaya pengedokan tersebut dikapitalisasi sepanjang pengeluarannya dapat menunjukkan peningkatan manfaat ekonomis mendatang kapal. Kapitalisasi biaya tersebut dicatat sebagai penambahan ke harga perolehan kapal untuk kapal yang dimiliki sendiri dan kapal yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, atau dicatat sebagai biaya ditangguhkan untuk kapal yang disewa melalui sewa operasi, dan disusutkan selama periode hingga jadwal pengedokan berikutnya. Total biaya pengedokan terdahulu yang tersisa, jika ada, dihentikan pengakuannya dan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

i. Fixed assets

Fixed assets are initially stated at the cost of acquisition less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost of acquisition includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and when the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

The Group's vessels generally dock every 2 – 2.5 years and the docking costs are capitalised to the extent that the expenditure results in an increase in the future economic benefit of the vessels. The capitalised costs are recorded as an additional cost of the owned vessels and leased vessels under finance lease arrangements, or are recorded as deferred docking costs of leased vessels under operating lease arrangements, and the costs are amortised over the period up to the next scheduled dry-docking. Any remaining carrying amount of the cost of the previous docking is derecognised and charged to current year profit or loss.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	20	<i>Buildings</i>
Kendaraan dan alat berat	5 - 15	<i>Vehicles and heavy equipments</i>
Peralatan kantor	5	<i>Office equipments</i>
Kapal	25	<i>Vessels</i>
Peralatan kapal	5	<i>Vessel equipments</i>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Masa manfaat aset, nilai sisa, dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Apabila suatu aset tetap tidak digunakan lagi atau dilepas, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Biaya konstruksi kapal dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

j. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika aset kualifikasian telah selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

i. Fixed assets (continued)

The assets' useful lives, residual values and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the financial period-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

When property, plant and equipment are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the consolidated financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of property, plant and equipment are recognised in the profit or loss and in the period in which the asset is derecognised.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

The costs of the construction of vessels are capitalised as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

j. Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised as part of the cost of those assets. Capitalisation of borrowing costs ceases when the qualifying assets are complete and ready for service.

k. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The recoverable amount is the higher of an asset's Fair Value Less Cost to Sell ("FVLCTS") and Value in Use ("VIU"). Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan dapat untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

I. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**k. Impairment of non-financial assets
(continued)**

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuations or other available fair value indicators.

A previously recognised impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognised in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

I. Leases

The Group as lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluruh kapasitas aset. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Grup memiliki hak ini hanya jika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan telah ditentukan sebelumnya, dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dan mencatat komponen sewa dan non-sewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assesses whether:

- The contract involves the use of an identified asset - this can be explicitly specified or implicitly, and must be physically distinct or represents substantially all of the total capacity. If the supplier has substantive substitution rights, then there is no identified asset;
- The Group has the right to obtain substantially all economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right only if it has the rights to make relevant decisions about how and for what purpose the asset is being used is predetermined, and:
 1. The Group has the right to operate the asset; or
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purposes it will be used throughout the period of use.

At the inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease component. However, for the leases of improvements whereby the Group is a lessee, the Group has elected not to separate non-lease components and to account for the lease and non-lease components as a single lease component.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

Sewa jangka pendek dan yang aset dasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset dasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the liability balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities as separate line items in the statement of financial position.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modifications

The Group accounts for a lease modifications as a separate leases if both the:

- modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

Lease modifications (continued)

For a lease modifications that are not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

The Group as lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

Dalam sewa pembiayaan, dimana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai pesewa dalam sewa pembiayaan.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai pesewa-antara

Ketika Grup adalah pesewa-antara, Grup memperhitungkan kepentingannya di sewa utama dan subsewa secara terpisah. Grup mengklasifikasikan suatu subsewa dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama, bukan dengan mengacu pada aset pendasar. Jika sewa utama adalah sewa jangka pendek di mana Grup sebagai penyewa telah menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek tersebut, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

m. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang lain-lain berkaitan dengan transaksi pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha normal. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (dikurangi biaya transaksi) dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Leases (continued)

The Group as lessor (continued)

Under a finance lease, where the Group transfers substantially all of the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognised and presents a finance lease receivables in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.

The Group recognises lease payments received under operating leases as income on a straight-line basis over the lease term.

The Group as intermediate lessor

When the Group acts as intermediate lessor, it accounts for its interests in the head lease and the sub-lease separately. The Group assesses the lease classification of a sub-lease with reference to the right-of-use asset arising from the head lease, not with reference to the underlying asset. If a head lease is a short-term lease to which the Group applies the exemption for short term lease, then it classifies the sub-lease as an operating lease.

m. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are amounts due to third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value (net of transaction cost) and subsequently measured at amortised cost using the EIR method.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode SBE.

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal laporan pelaporan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

n. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the EIR method.

Fees paid on the establishment of the loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowing costs either directly or indirectly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalised as part of the cost of that asset until such time as the asset is substantially ready for its intended use or sale. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. All other borrowing costs are recognised in the profit or loss in the period in which they are incurred.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pendapatan usaha Grup ada yang terkena pajak penghasilan final. Penghasilan Grup atas pendapatan dari jasa perkapalan yang diberikan kepada perusahaan domestik dikenakan pajak final dengan tarif 1,20% sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis dan saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Aset pajak tangguhan berasal dari pajak yang dapat dikompensasi diakui jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

o. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Certain revenues are subject to final income tax. The Group's vessel charter income provided to Indonesian companies is subject to a final tax at a rate of 1.20% and under the Taxation Laws of Indonesia.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. The deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination and when the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

The deferred tax assets of the tax loss carried forward are recognised when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax losses can be utilised. Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan akan saling hapus jika ada hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan jika aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas pajak yang sama pada entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda serta jika ada keinginan untuk melakukan penyelesaian saldo secara neto.

p. Liabilitas imbalan kerja

(i) Kewajiban pensiun

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Dana Pensiun Pertamina.

Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("UU Cipta Kerja") (sebelumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003) yang berlaku atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang atau KKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir periode dikurangi nilai wajar aset program.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

o. Taxation (continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

p. Employee benefits liabilities

(i) Pension obligations

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service, or compensation.

The Group established a defined benefit pension plan covering all of its qualified permanent employees. The plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Dana Pensiun Pertamina.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with prevailing Job Creation Law No. 11/2020 ("the Law") (previously Labour Law No. 13/2003) or the Group's Collective Agreement ("CLA"), whichever is higher. Since the Law and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the period end date less the fair value of plan assets.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

p. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

p. Employee benefits liabilities (continued)

(i) Kewajiban pensiun (lanjutan)

(i) Pension obligations (continued)

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality government bonds (considering that currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui dalam laporan laba rugi pada beban imbalan kerja dimana mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in the profit or loss in employee benefits expenses reflecting the increase in the defined benefit obligation resulting from employee service in the current year.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke laba komprehensif lainnya dan merupakan bagian dari cadangan lainnya pada tahun dimana terjadinya perubahan tersebut.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of other reserves in the year in which they arise.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

(ii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya

(ii) Other long-term employee benefits

Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja, diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial serta biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

Other long-term employee benefits, which consist of long service rewards, are recognised in the consolidated statements of financial position at the present value of the defined benefit obligation. The actuarial gains and losses and past service costs are recognised immediately in profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Instrumen keuangan

q. Financial instruments

1. Aset keuangan

1. Financial assets

Klasifikasi

Classification

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan ditentukan berdasarkan jenis aset. Untuk aset keuangan berupa instrumen utang, pengklasifikasiannya harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Classification and measurement of financial assets are determined based on the type of assets. For financial assets in the form of debt instruments, classification is determined based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Secara umum, aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

In general, financial assets are classified in the following two categories:

1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

1. *Financial assets at amortised cost; and*
2. *Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").*

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan klasifikasi setelah penerapan awal tersebut.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

Pada tanggal pelaporan keuangan, Grup hanya memiliki aset keuangan dengan kategori sebagai biaya diamortisasi dan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dengan kategori biaya diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan. Aset keuangan dengan kategori nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari penyertaan saham.

As at the reporting date, the Group only has financial assets which are categorised as amortised cost and fair value through other comprehensive income. The Group's amortised costs comprise cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other receivables, contract assets and finance lease receivables. The Group's fair value through other comprehensive income comprises investment in shares.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Pengakuan dan pengukuran

Recognition and measurement

Pembelian dan penjualan aset keuangan diakui pada saat tanggal perdagangan dimana, Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah kedaluwarsa atau dialihkan dan Grup telah mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat atas kepemilikan.

Regular purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date, i.e., the date on which the group commits to purchase or sell the asset. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets, in the case of a financial asset not at FVTPL. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

Instrumen utang

Debt instruments

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasikan instrumen utang:

Subsequent measurement of debt instruments depends on the business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya bersama dengan keuntungan dan kerugian selisih kurs. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

- *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows solely represent payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses) together with foreign exchange gains and losses. Impairment losses are presented as separate line item in the profit or loss.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Recognition and measurement (continued)

Instrumen utang (lanjutan)

Debt instruments (continued)

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasi instrumen utang: (lanjutan)

Subsequent measurement of debt instruments depends on the business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments: (continued)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lain-lain, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.
- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

- *FVOCI: Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where payments of principal and interest are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.*
- *FVTPL: Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognised in the profit or loss.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Recognition and measurement (continued)

Instrumen ekuitas

Equity instruments

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Investasi pada instrumen ekuitas tidak diuji penurunan nilai.

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Equity investments are not tested for impairment.

Penurunan nilai aset keuangan

Impairment of financial assets

Grup mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan tanpa komponen pendanaan yang signifikan diukur dengan jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya. KKE sepanjang umurnya adalah KKE yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

The Group recognises impairment loss provision for expected credit losses (ECLs) on financial assets measured at amortised cost. Impairment loss provision for trade receivables, contract assets and finance lease receivables without a significant financing component are measured at an amount equal to lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan. Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan KKE, Grup mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perseroan dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience, credit rating and future information.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

KKE adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Grup harapkan untuk diterima). KKE didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa suatu aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi sebagai berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari pelanggan;
- pelanggaran kontrak seperti gagal bayar; atau
- ada kemungkinan bahwa pelanggan akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai pada saat pengakuan awal. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi pada awalnya dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

ECLs are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

At each reporting date, the Group assesses whether financial assets carried at amortised cost are credit impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- *significant financial difficulty of the customers;*
- *breach of contract such as default; or*
- *it is probable that the customer will enter bankruptcy or other financial reorganisation.*

2. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortised cost, or derivatives that are designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at their fair values plus directly attributable transaction costs.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

2. Financial liabilities (continued)

**Pengakuan awal dan pengukuran
(lanjutan)**

**Initial recognition and measurement
(continued)**

Seluruh liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi.

All of the Group's financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortised cost.

Liabilitas keuangan Grup mencakup utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang dividen, liabilitas kontrak, liabilitas sewa dan pinjaman jangka panjang.

The Group's financial liabilities include trade payables, accrued expenses, dividend payables, contract liabilities, lease liabilities and long-term borrowings.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

After initial recognition, financial liabilities measured at amortised cost are subsequently measured at amortised cost using the EIR method.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Gains and losses are recognised in the statement of profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the amortisation process.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognised when, and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

When an existing financial liability is replaced by another financial liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

3. Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, the entity currently has a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

r. Provisi

r. Provision

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai total kewajiban tersebut dibuat.

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

s. Modal saham

s. Share capital

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham baru atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

t. Dividen

t. Dividends

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup dalam periode dimana pembagian dividen diumumkan.

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are declared.

u. Pengakuan pendapatan dan beban

u. Revenue and expense recognition

Pendapatan

Revenue

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

Revenue recognition has to fulfill five steps of assessment:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

1. Identify contract(s) with customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

u. Revenue and expense recognition (continued)

Pendapatan (lanjutan)

Revenue (continued)

3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di yang tertuang dalam nilai kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each the distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin; and*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of said goods or services).*

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- a. *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b. *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognised when the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised when the consideration paid by the customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban dari kontrak dengan pelanggan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak dan menghasilkan meningkatkan atau meningkatkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") dan biaya inkremental untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") diakui sebagai aset bila biaya tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diharapkan akan dipulihkan. Aset ini diamortisasi dengan dasar sistematis yang konsisten dengan pengalihan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset tersebut.

Beban lainnya

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Penerapan panduan praktis

Grup memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk mengakui biaya yang terjadi untuk mendapatkan kontrak sebagai beban saat terjadinya jika periode amortisasi aset tersebut adalah satu tahun atau kurang.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

u. Revenue and expense recognition (continued)

Expenses from contracts with customers

The costs that directly relate to the contract generate or enhance resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") and incremental costs of obtaining a contract ("cost to obtain") are recognised as assets if they meet the criteria for capitalisation under SFAS 72 and expected to be recovered. These assets are amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the assets relate.

Other expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Application of practical expedient

The Group applies the practical expedient to recognise the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortisation period of the asset that the Group otherwise would have recognised is one year or less.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas, pengungkapan nilai aset dan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan akan dievaluasi secara berkelanjutan dan didasarkan pada pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi terhadap kejadian masa depan yang diyakini cukup beralasan dalam situasi tertentu.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the end of the reporting period. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Grup telah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan akuntansi penting berikut yang melibatkan pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang signifikan dimana hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari estimasi-estimasi yang dibuat berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda pada saat itu dan kemungkinan dapat mempengaruhi hasil atau posisi keuangan secara material yang dilaporkan dalam periode mendatang.

Pertimbangan

Penentuan kombinasi bisnis atau pembelian kelompok aset atas pengalihan aset tetap dari PT Pertamina International Shipping ("PIS")

Dalam menentukan apakah transfer aset *marine* non-sarana tambat pada tahun 2021 merupakan kombinasi bisnis atau akuisisi aset, Perusahaan menggunakan pengujian konsentrasi. Karena pengujian konsentrasi terpenuhi, dimana secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi dalam kelompok aset teridentifikasi yang serupa, maka kelompok aset bukan merupakan suatu bisnis.

Manajemen Grup mempertimbangkan bahwa secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi dalam kelompok aset teridentifikasi serupa. Oleh karena itu, manajemen Grup mempertimbangkan bahwa transfer aset *marine* non-sarana tambat adalah akuisisi aset.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun finansial berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the financial results or the financial position reported in future periods.

Judgements

Determination of business combination or purchase of a group of assets for the transfer of fixed assets from PT Pertamina International Shipping ("PIS")

In determining whether transfer of non-mooring marine asset in 2021 was a business combination or asset acquisition, the Company applied the concentration test. Since the concentration test was met, whereby substantially all of the fair value of the gross assets acquired were concentrated in a group of similar identifiable assets, then the group of assets was determined not to be a business.

The Group management considered that substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a group of similar identifiable assets. Therefore, the Group's management considers that transfer of non-mooring marine assets is asset acquisition.

Estimation and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that carry a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Rugi penurunan nilai piutang

Grup menghitung KKE piutang usaha dan aset kontrak. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Impairment loss on receivables

The Group calculates ECL for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customers' actual default in the future.

Estimating the useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation, as anchored to business plans and strategies that also consider expected market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 10 untuk pengungkapan lebih lanjut.

Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup, dan tahun sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan. Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Estimating the useful lives of fixed assets (continued)

The Group estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 and 25 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful lives and the residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 10.

Post-employment benefit

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining years of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation.

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high-quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation. Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan dan pajak lainnya

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Grup. Terdapat transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak selama kegiatan usaha normal. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam tahun penentuan pajak tersebut.

Penghasilan usaha Grup ada yang dikenakan pajak penghasilan final.

Grup mengestimasi bagian final atas biaya umum yang tidak dapat dipisahkan antara bagian pajak penghasilan final dan tidak final dengan alokasi secara proporsional berdasarkan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terhadap penghasilan bruto.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Income taxes and other taxes

Judgement and assumptions are required in determining the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for each company within the Group. There are transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will affect the income tax and deferred income tax provisions in the year in which that determination is made.

Certain revenues of the Group are subject to final income tax.

The Group estimates the final portion of general expenses that cannot be itemised between the final and non-final income tax portion, using an allocation based on proportion of revenue subject to final income tax to the gross revenue.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognised in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognised in accordance with SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Group conducts an analysis of all tax positions related to income taxes in order to determine if a tax liability for unrecognised tax expense should be recognised.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan dan pajak lainnya (lanjutan)

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi volume transaksi *time charter*, harga jual *time charter* (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya operasi, dan belanja modal di masa depan, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 20 dan 15.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Jumlah terpulihkan dari aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai aset. Penentuan nilai wajar dan nilai yang digunakan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi volume transaksi *time charter*, harga jual *time charter* (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya operasi, dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Income taxes and other taxes (continued)

Deferred tax assets, including those arising from temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of expected time charter transaction volumes, time charter selling prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), operating costs and future capital expenditure, which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

The Group recognises liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 20 and 15.

Impairment of non-financial assets

The recoverable amount of a cash-generating asset or group of assets is measured at the higher of its fair value less costs of disposal or value in use. The determination of the fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions regarding expected time charter transaction volumes, time charter selling prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), operating costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charges may be reduced with the impact recorded in profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK 73, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau kembali jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang mempengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased asset are transferred to the lessee based on SFAS 73, which requires the Group to make judgements and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of a leased asset.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management used the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Kas			Cash on hand
Dolar AS	-	1,285	US Dollar
Rupiah	<u>358</u>	<u>3,321</u>	Rupiah
Jumlah kas	<u>358</u>	<u>4,606</u>	Total cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 25)			entities (Note 25)
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk ("BRI")	558,818	37	(Persero) Tbk ("BRI")
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
("Mandiri")	164,519	721,167	("Mandiri")
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk ("BNI")	122,868	179,378	(Persero) Tbk ("BNI")
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			PT Bank Syariah Indonesia Tbk
("BSI")	<u>11,483</u>	<u>22,277</u>	("BSI")
	<u>857,688</u>	<u>922,859</u>	
Pihak ketiga	<u>40,799</u>	<u>19,232</u>	Third parties
Dolar AS			US Dollar
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 25)			entities (Note 25)
BNI	168,643	257,954	BNI
Mandiri	11,671	10,009	Mandiri
BRI	<u>73</u>	<u>66</u>	BRI
	<u>180,387</u>	<u>268,029</u>	
Pihak ketiga	<u>30,800</u>	<u>34,171</u>	Third parties
Jumlah kas di bank	<u>1,109,674</u>	<u>1,244,291</u>	Total cash in banks
Deposito berjangka			Time deposits
Dolar AS			US Dollar
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 25)			entities (Note 25)
BNI	<u>15,592</u>	<u>11,653</u>	BNI
	<u>15,592</u>	<u>11,653</u>	
Pihak ketiga	<u>-</u>	<u>2,616</u>	Third parties
Jumlah deposito berjangka	<u>15,592</u>	<u>14,269</u>	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	<u>1,125,624</u>	<u>1,263,166</u>	Total cash and cash equivalents

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The annual interest rates on time deposits during the year were as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Dolar AS	1.0%	0.2%	US Dollar

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak berelasi (Catatan 25)	1,181,134	1,010,334	<i>Related parties (Note 25)</i>
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak berelasi	<u>(2,553)</u>	<u>(1,283)</u>	<i>Less: Provision for doubtful accounts of related parties</i>
	<u>1,178,581</u>	<u>1,009,051</u>	
Pihak ketiga	207,131	214,410	<i>Third parties</i>
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak ketiga	<u>(100,939)</u>	<u>(92,153)</u>	<i>Less: Provision for doubtful accounts of third parties</i>
	<u>106,192</u>	<u>122,257</u>	
Jumlah	<u>1,284,773</u>	<u>1,131,308</u>	Total

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang
adalah sebagai berikut:

*The details of trade receivables based on aging
schedule are as follows:*

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
0 - 30 hari	1,053,361	940,036	<i>0 - 30 days</i>
30 - 90 hari	57,993	32,225	<i>30 - 90 days</i>
90 - 365 hari	66,698	37,794	<i>90 - 365 days</i>
Lebih dari 365 hari	<u>3,082</u>	<u>279</u>	<i>More than 365 days</i>
	1,181,134	1,010,334	
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak berelasi	<u>(2,553)</u>	<u>(1,283)</u>	<i>Less: Provision for doubtful accounts of related parties</i>
Jumlah pihak berelasi	<u>1,178,581</u>	<u>1,009,051</u>	Total related parties
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
0 - 30 hari	76,052	110,612	<i>0 - 30 days</i>
30 - 90 hari	19,415	10,439	<i>30 - 90 days</i>
90 - 365 hari	17,153	4,186	<i>90 - 365 days</i>
Lebih dari 365 hari	<u>94,511</u>	<u>89,173</u>	<i>More than 365 days</i>
	207,131	214,410	
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak ketiga	<u>(100,939)</u>	<u>(92,153)</u>	<i>Less: Provision for doubtful accounts of third parties</i>
Jumlah pihak ketiga	<u>106,192</u>	<u>122,257</u>	Total third parties

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi saldo provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal	93,436	96,716
Penambahan (Catatan 23)	15,855	2,394
Pemulihan (Catatan 23)	(5,799)	(5,608)
Penyesuaian saldo atas transaksi restrukturisasi (Catatan 31)	-	(66)
Jumlah	<u>103,492</u>	<u>93,436</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The movements in the provision for impairment of trade receivables are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	93,436	96,716	Beginning balance
Penambahan (Catatan 23)	15,855	2,394	Additions (Note 23)
Pemulihan (Catatan 23)	(5,799)	(5,608)	Recovery (Note 23)
Penyesuaian saldo atas transaksi restrukturisasi (Catatan 31)	-	(66)	Adjustment upon restructuring transaction (Note 31)
Jumlah	<u>103,492</u>	<u>93,436</u>	Total

Management believes that the provision for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables.

6. ASET KONTRAK

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi (Catatan 25)	1,034,895	712,243
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak berelasi	<u>(1,509)</u>	<u>(856)</u>
	<u>1,033,386</u>	<u>711,387</u>
Pihak ketiga	245,854	143,236
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak ketiga	<u>(2,035)</u>	<u>(1,303)</u>
	<u>243,819</u>	<u>141,933</u>
Jumlah	<u>1,277,205</u>	<u>853,320</u>

Mutasi saldo provisi penurunan nilai kontrak aset adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal	2,159	1,773
Penambahan (Catatan 23)	2,230	469
Pemulihan (Catatan 23)	(845)	(83)
Jumlah	<u>3,544</u>	<u>2,159</u>

6. CONTRACT ASSETS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak berelasi (Catatan 25)	1,034,895	712,243	Related parties (Note 25)
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak berelasi	<u>(1,509)</u>	<u>(856)</u>	Less: Provision for doubtful accounts of related parties
	<u>1,033,386</u>	<u>711,387</u>	
Pihak ketiga	245,854	143,236	Third parties
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak ketiga	<u>(2,035)</u>	<u>(1,303)</u>	Less: Provision for doubtful accounts third parties
	<u>243,819</u>	<u>141,933</u>	
Jumlah	<u>1,277,205</u>	<u>853,320</u>	Total

the movements in the provision for impairment of contract assets are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	2,159	1,773	Beginning balance
Penambahan (Catatan 23)	2,230	469	Additions (Note 23)
Pemulihan (Catatan 23)	(845)	(83)	Recovery (Note 23)
Jumlah	<u>3,544</u>	<u>2,159</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

7. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Uang muka karyawan	57,178	37,550	Employee advances
Biaya dibayar dimuka	11,194	15,247	Prepaid expenses
Uang muka kerja	5,668	25,917	Operational advances
Lain-lain	1,353	1,427	Others
Jumlah	<u>75,393</u>	<u>80,141</u>	Total

Uang muka karyawan merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan untuk kegiatan operasional Grup.

Employee advances represent advances paid to employees for the operational activities of the Group.

Uang muka kerja merupakan uang muka yang digunakan untuk kegiatan jasa kepelabuhanan, jasa pandu tunda dan jasa persediaan kapal.

Operational advances represent advances paid for port services, pilotage and towage services and ship chandler.

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES

Analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan neto adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of gross finance lease receivables and net finance lease receivables is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Piutang sewa pembiayaan bruto:			Gross finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	25,325	22,241	Due within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	<u>23,772</u>	<u>42,923</u>	Due between two and five years
	49,097	65,164	
Dikurangi: pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(3,501)</u>	<u>(2,535)</u>	Less: unearned finance lease income
Piutang sewa pembiayaan neto	<u>45,596</u>	<u>62,629</u>	Net finance lease receivables

Analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan neto adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of gross finance lease receivables and net finance lease receivables is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Piutang sewa pembiayaan neto:			Net finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	22,798	20,876	Due within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	<u>22,798</u>	<u>41,753</u>	Due between two and five years
Jumlah	<u>45,596</u>	<u>62,629</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

9. INVESTMENT IN JOINT VENTURE

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pada awal tahun	84,643	74,425	<i>At the beginning of the year</i>
Bagian atas laba bersih	25,446	28,045	<i>Share of net profit</i>
Dividen yang diterima	<u>(22,482)</u>	<u>(17,827)</u>	<i>Dividends receipt</i>
Saldo akhir	<u>87,607</u>	<u>84,643</u>	<i>Ending balance</i>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup memiliki ventura bersama sebagai berikut:

As at 31 December 2022 and 2021, the Group had the following joint venture:

<u>Nama entitas/ Name of entity</u>	<u>Lokasi usaha/Place of business</u>	<u>Persentase kepemilikan/ % of ownership interest</u>	<u>Kegiatan usaha/ Business activities</u>	<u>Metode pengukuran/ Measurement method</u>
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Indonesia	51%	Menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut/ <i>Conduct activities related to shipping and harbour services</i>	Ekuitas/ <i>Equity</i>

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan TYM pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

Set out below is the summary of financial information for TYM as at 31 December 2022 and 2021, accounted for using the equity method:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Jumlah aset	296,074	328,491	<i>Total assets</i>
Jumlah liabilitas	<u>(124,295)</u>	<u>(162,524)</u>	<i>Total liabilities</i>
Aset neto	<u>171,779</u>	<u>165,967</u>	<i>Net assets</i>
Laba bersih tahun berjalan	<u>49,894</u>	<u>54,990</u>	<i>Net profit for the year</i>

Tidak ada liabilitas kontinjensi terkait dengan investasi pada TYM.

There is no contingent liability related to the investment in TYM.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai investasi, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama.

Management is of the opinion that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of the investment, therefore, no provision for impairment in the value of investment in a joint venture is necessary.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

2022						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Harga perolehan						Acquisition cost
Aset tetap non-pelayaran						Non-shipping fixed assets
Tanah	29,779	-	-	29,779		Land
Bangunan	139,371	38,395	-	190,092		Buildings
Kendaraan dan alat berat	75,592	403	-	96,989		Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	14,822	24,266	-	35,664		Office equipments
	259,564	63,064	-	352,524		
Aset tetap pelayaran						Shipping fixed assets
Kapal	4,785,779	4,105	-	5,013,239		Vessels
Peralatan kapal	315,992	83,178	-	308,530		Vessel equipments
	5,101,771	87,283	-	5,321,769		
Aset dalam penyelesaian	194,477	194,953	(164,580)	62,239		Construction in progress
Jumlah	5,555,812	345,300	(164,580)	5,736,532		Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Aset tetap non-pelayaran						Non-shipping fixed assets
Bangunan	40,414	11,174	-	50,063		Buildings
Kendaraan dan alat berat	6,237	12,808	-	28,043		Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	12,291	366	-	9,543		Office equipments
	58,942	24,368	-	87,649		
Aset tetap pelayaran						Shipping fixed assets
Kapal	1,366,924	287,746	-	1,707,665		Vessels
Peralatan kapal	94,682	41,927	-	79,275		Vessel equipments
	1,461,606	329,673	-	1,786,940		
Jumlah	1,520,548	354,041	-	1,874,589		Total
Nilai buku	4,035,264			3,861,943		Net book value

2021						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Dekonsolidasi/ Deconsolidation	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Aset tetap non-pelayaran						Non-shipping fixed assets
Tanah	38,741	-	178	(9,140)	29,779	Land
Bangunan	85,629	89,284	-	(48,878)	139,371	Buildings
Kendaraan dan alat berat	17,716	975	-	(5,675)	75,592	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	16,811	345	-	(2,238)	14,822	Office equipments
	158,897	90,604	-	(65,931)	259,564	
Aset tetap pelayaran						Shipping fixed assets
Kapal	3,656,142	120,108	-	-	4,785,779	Vessels
Peralatan kapal	104,654	207,033	-	-	315,992	Vessel equipments
	3,760,796	327,141	-	-	5,101,771	
Aset dalam penyelesaian	821,781	594,931	(130,886)	(1,090,998)	194,477	Construction in progress
Aset sewa pembiayaan						Finance lease assets
Kendaraan	207	-	-	(207)	-	Vehicles
Jumlah	4,741,681	1,012,676	(130,886)	(1,170)	5,555,812	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Aset tetap non-pelayaran						Non-shipping fixed assets
Bangunan	44,117	11,047	-	(14,750)	40,414	Buildings
Kendaraan dan alat berat	5,066	5,529	-	(24)	6,237	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	13,778	1,001	-	24	12,291	Office equipments
	62,961	17,577	-	(21,596)	58,942	
Aset tetap pelayaran						Shipping fixed assets
Kapal	1,103,299	263,806	-	(181)	1,366,924	Vessels
Peralatan kapal	54,898	39,784	-	-	94,682	Vessel equipments
	1,158,197	303,590	-	(181)	1,461,606	
Aset sewa pembiayaan						Finance lease assets
Kendaraan	457	-	-	(457)	-	Vehicles
Jumlah	1,221,615	321,167	-	(181)	1,520,548	Total
Nilai buku	3,520,066				4,035,264	Net book value

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Penyusutan dialokasi sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	350,584	314,443
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	<u>3,457</u>	<u>6,724</u>
Jumlah	<u>354,041</u>	<u>321,167</u>

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang Grup.

Aset tetap Grup diasuransikan terhadap risiko kerugian, kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar AS\$337.937.533 (nilai penuh) pada tahun 2022 (2021: AS\$400.590.963 – nilai penuh). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022.

Pada tahun 2021, Grup menerima Rp124.800 dari vendor atas pembatalan pembangunan kapal. Uang muka sehubungan dengan kapal tersebut sebesar Rp130.886 dan telah dikurangkan dari aset dalam penyelesaian.

Pada tahun 2022, pengurangan atas aset dalam penyelesaian sebesar Rp164.580 terkait dengan pembatalan pembangunan kapal. Grup menerima Rp155.400 dari vendor atas pembatalan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman sehubungan dengan kapal tersebut sebesar Rp9.180 telah dikurangkan dari aset dalam penyelesaian dan dicatat sebagai beban keuangan.

Aset dalam penyelesaian terutama terdiri dari pembuatan kapal yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pembangunan.

10. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation is allocated as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
			<i>Cost of revenue (Note 21)</i>
			<i>General and administrative expenses (Note 22)</i>
Jumlah	<u>354,041</u>	<u>321,167</u>	Total

Certain fixed assets are pledged as collateral for long-term loans by the Group.

Fixed assets of the Group are insured against losses, accidents, fire and other risks with the sum insured amounting to US\$337,937,533 (full amount) in year 2022 (2021: US\$400,590,963 – full amount). Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Based on management's assessment, there is no impairment indicator identified to fixed assets as at 31 December 2022.

In 2021, the Group received Rp124,800 from a vendor for the cancellation of vessels construction. The advance payment related to this vessel was Rp130,886 and has been deducted from assets under construction.

In 2022, disposal of construction in progress amounting to Rp164,580 was relating to cancellation of vessels construction. The Group received Rp155,400 from the vendors for the cancellation. Capitalisation of borrowing costs related to these vessels were Rp9,180 which have been deducted from assets under construction and were recorded as finance costs.

Construction in progress mainly consisted of construction of vessels that have not been completed as at the reporting date.

11. UTANG USAHA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi (Catatan 25)	909,546	639,972
Pihak ketiga	<u>117,952</u>	<u>230,515</u>
Jumlah	<u>1,027,498</u>	<u>870,487</u>

11. TRADE PAYABLES

*Related parties (Note 25)
Third parties*

Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

12. ACCRUED EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Jasa penunjang operasi dan penyediaan tenaga kerja	787,219	435,637	Marine operations support and labour supply services
Keagenan umum	546,169	404,712	General agencies
Pemanduan dan penundaan	169,275	136,507	Towage and pilotage
Insentif, bonus dan tantiem	115,114	99,800	Incentive, bonus and tantiem
Sewa kapal jangka pendek	106,889	173,147	Short-term ship rentals
Pembangunan kapal	-	5,857	Construction of vessels
Lain-lain	17,528	310,459	Others
Jumlah	<u>1,742,194</u>	<u>1,566,119</u>	Total

13. LIABILITAS KONTRAK

13. CONTRACT LIABILITIES

Liabilitas kontrak adalah uang muka pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

Contract liabilities are advances from customers with the following details:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak ketiga	87,084	87,639	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 25)	20,136	53,814	Related parties (Note 25)
Jumlah	<u>107,220</u>	<u>141,453</u>	Total

14. SEWA

14. LEASES

a. Aset hak-guna

a. Right-of-use assets

	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Biaya perolehan				Costs
Tanah dan bangunan	76,067	-	76,067	Land and buildings
Kendaraan dan alat berat	9,437	9,782	19,219	Vehicles and heavy equipments
Kapal	221,334	427,242	648,576	Vessels
Jumlah	<u>306,838</u>	<u>437,024</u>	<u>743,862</u>	Total
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Tanah dan bangunan	49,476	23,049	72,525	Land and buildings
Kendaraan dan alat berat	6,360	9,015	15,375	Vehicles and heavy equipments
Kapal	68,993	276,994	345,987	Vessels
Jumlah	<u>124,829</u>	<u>309,058</u>	<u>433,887</u>	Total
Nilai tercatat	<u>182,009</u>		<u>309,975</u>	Net carrying value

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. SEWA (lanjutan)

14. LEASES (continued)

a. Aset hak-guna (lanjutan)

a. Right-of-use assets (continued)

2021						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Dekonsolidasi/ <i>Deconsolidation</i>	Saldo akhir <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan					Costs	
Tanah dan bangunan	74,373	144	1,550	-	76,067	<i>Land and buildings</i>
Kendaraan dan alat berat	10,216	138	-	(917)	9,437	<i>Vehicles and heavy equipments</i>
Kapal	-	221,334	-	-	221,334	<i>Vessels</i>
Jumlah	84,589	221,616	1,550	(917)	306,838	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Tanah dan bangunan	24,765	24,711	-	-	49,476	<i>Land and buildings</i>
Kendaraan dan alat berat	3,492	3,398	-	(530)	6,360	<i>Vehicles and heavy equipments</i>
Kapal	-	68,993	-	-	68,993	<i>Vessels</i>
Jumlah	28,257	97,102	-	(530)	124,829	Total
Nilai tercatat	56,332				182,009	Net carrying value

Alokasi beban penyusutan aset hak-guna adalah sebagai berikut:

The depreciation expenses of right-of-use assets were allocated as follows:

	2022	2021	
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	300,295	93,704	Cost of revenue (Note 21)
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	8,763	3,398	General and administrative expenses (Note 22)
Jumlah	309,058	97,102	Total

b. Liabilitas sewa

b. Lease liabilities

	2022	2021	
Saldo awal	273,981	60,917	Beginning balance
Penambahan	437,024	221,616	Additions
Beban bunga (Catatan 24)	15,935	7,624	Interest expense (Note 24)
Pembayaran	(290,555)	(15,773)	Payments
Dekonsolidasi	-	(403)	Deconsolidation
Saldo akhir	436,385	273,981	Ending balance
Bagian lancar	354,455	225,166	Current portion
Bagian tidak lancar	81,930	48,815	Non-current portion
Jumlah	436,385	273,981	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. SEWA (lanjutan)

14. LEASES (continued)

b. Liabilitas sewa (lanjutan)

b. Lease liabilities (continued)

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated profit or loss for the year ended 31 December 2022 and 2021 were as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban bunga (Catatan 24)	15,935	7,624	Interest expense (Note 24)
Beban terkait sewa jangka pendek	23,301	12,717	Expense related to short-term leases
Beban terkait sewa atas aset bernilai rendah	71	61	Expense related to lease of low value assets

Jumlah yang terkait dengan sewa jangka pendek, sewa atas aset bernilai rendah, dan sewa variabel tidak dimasukkan sebagai liabilitas sewa berdasarkan sifatnya sebagaimana dibahas pada Catatan 21.

Amounts related to short-term leases, leases of low value assets and variable leases are not required to be included as lease liabilities based on their nature as discussed in Note 21.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statement of cash flows shows the following amounts related to leases:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flow from operating activities
Pembayaran beban keuangan	(15,935)	(7,624)	Payments of finance costs
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flow from financing activities
Pembayaran atas liabilitas sewa	(274,620)	(8,149)	Payments of lease liabilities

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak penghasilan			Corporate income tax
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
- 2019	-	2,179	2019 -
	-	<u>2,179</u>	
Pajak lain-lain			Other tax
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	24,076	33,562	Value Added Tax ("VAT")
Jumlah	<u>24,076</u>	<u>33,562</u>	Total
Bagian lancar	24,076	17,752	Current portion
Bagian tidak lancar	-	15,810	Non-current portion

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak penghasilan			Corporate income tax
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Kurang bayar pajak penghasilan			Underpayment of corporate income tax
- 2022	70,923	-	2022 -
- 2021	-	16,261	2021 -
- 2016	-	12,794	2016 -
	<u>70,923</u>	<u>29,055</u>	
 <u>Entitas anak</u>			 <u>Subsidiaries</u>
Kurang bayar pajak penghasilan			Underpayment of corporate income tax
- 2022	26,365	-	2022 -
- 2021	-	6,144	2021 -
	<u>26,365</u>	<u>6,144</u>	
	<u>97,288</u>	<u>35,199</u>	
 Pajak lain-lain			 Other taxes
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
PPN	14,080	31,257	VAT
Pasal 21	14,412	7,032	Article 21
Pasal 23	4,067	1,984	Article 23
Pasal 25	1,891	-	Article 25
Pasal 15	632	1,334	Article 15
Pasal 4(2)	132	32	Article 4(2)
	<u>35,214</u>	<u>41,639</u>	
 <u>Entitas anak</u>			 <u>Subsidiaries</u>
PPN	15,338	5,148	VAT
Pasal 21	686	296	Article 21
Pasal 22	2	2	Article 22
Pasal 23	399	739	Article 23
Pasal 25	844	-	Article 25
Pasal 26	40	-	Article 26
Pasal 15	59	30	Article 15
Pasal 4(2)	386	21	Article 4(2)
	<u>17,754</u>	<u>6,236</u>	
	<u>52,968</u>	<u>47,875</u>	
 Jumlah	<u><u>150,256</u></u>	<u><u>83,074</u></u>	 Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Kini	189,758	83,300	Current
Tangguhan	(36,702)	(13,445)	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	<u>12,585</u>	<u>12,794</u>	Adjustment in respect of prior years
	<u>165,641</u>	<u>82,649</u>	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Kini	51,973	29,145	Current
Tangguhan	(530)	(154)	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	<u>4,742</u>	<u>61</u>	Adjustment in respect of prior years
	<u>56,185</u>	<u>29,052</u>	
Jumlah	<u>221,826</u>	<u>111,701</u>	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between consolidated profit before income tax and the estimated taxable income for the years ended 31 December 2022 and 2021, are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	954,854	642,240	Consolidated profit before income tax
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada tingkat konsolidasian	<u>(56,792)</u>	<u>(33,647)</u>	Profit before tax of subsidiaries after consolidation adjustments
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	<u>898,062</u>	<u>608,593</u>	Profit before income tax - the Company

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Provisi atas liabilitas imbalan pasca kerja	26,744	757	Provision for post-employment benefits obligation
Provisi atas bonus karyawan	80,523	21,673	Provision for employee bonus
Provisi atas cadangan penurunan nilai piutang	7,832	(2,371)	Provision for impairment of receivables
Penyusutan aset tetap	21,999	40,209	Depreciation of fixed assets
Perbedaan perlakuan liabilitas sewa antara komersial dan fiskal	29,730	5,045	Difference between commercial and tax treatment of lease liabilities
Beban yang tidak dapat diperhitungkan untuk keperluan pajak	90,138	135,481	Non-deductible expenses
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(20,339)	(8,396)	Interest income subject to final tax
Keuntungan dari investasi pada entitas anak	(177,362)	(113,662)	Gain on investment in subsidiaries
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(563,894)	(1,663,221)	Revenue subject to final tax
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	494,549	1,382,572	Cost of revenue related to revenue subject to final tax
Bagian atas laba bersih ventura bersama	(25,446)	(28,045)	Share in net profit of joint venture
	<u>(35,526)</u>	<u>(229,958)</u>	
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	<u>862,536</u>	<u>378,635</u>	Taxable income - the Company
Beban pajak kini:			Current tax expenses:
Perusahaan	189,758	83,300	The Company
Entitas Anak	51,973	29,145	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan kini konsolidasian	<u>241,731</u>	<u>112,445</u>	Consolidated current income tax
Beban pajak kini Perusahaan	189,758	83,300	Current tax expense of the Company
Dikurangi:			Less:
Pajak dibayar di muka			Prepaid income taxes
- Pasal 22	(679)	-	Article 22 -
- Pasal 25	(22,343)	(19,858)	Article 25 -
- Pasal 23	(95,813)	(47,181)	Article 23 -
	<u>(118,835)</u>	<u>(67,039)</u>	
Kurang bayar pajak penghasilan - Perusahaan	<u>70,923</u>	<u>16,261</u>	Underpayment corporate income tax - the Company

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika SPT disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when the Annual Tax Return is submitted to the Directorate General of Taxation ("DGT").

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Pajak atas laba Grup sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on the Group's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits of the consolidated entities as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	954,854	642,240	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	210,068	141,293	<i>Income tax calculated at applicable tax rate</i>
Dampak pajak penghasilan pada:			<i>Tax effects of:</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak	21,547	32,488	<i>Non-deductible expenses</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(165,807)	(387,036)	<i>Revenue subject to final tax</i>
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	144,289	317,368	<i>Cost of revenue related to revenue subject to final tax</i>
Bagian atas laba bersih ventura bersama	(5,598)	(6,170)	<i>Share in profit of joint venture</i>
Penyesuaian tahun lalu	17,327	12,855	<i>Adjustment in respect of prior years</i>
Penyesuaian pajak tangguhan	-	903	<i>Deferred tax adjustment</i>
Beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>221,826</u>	<u>111,701</u>	<i>Consolidated income tax expense</i>

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Aset pajak tangguhan, neto Perusahaan			<i>Deferred tax assets, net The Company</i>
Aset atas sewa pembiayaan	(13,423)	(11,325)	<i>Finance lease assets</i>
Penyertaan saham	(1,465)	(1,320)	<i>Investment in shares</i>
Penyusutan aset tetap	17,917	10,979	<i>Fixed assets depreciation</i>
Bonus karyawan	28,042	10,326	<i>Employees bonus</i>
Sewa	20,546	14,006	<i>Leases</i>
Liabilitas imbalan pasca kerja	18,790	17,645	<i>Post-employment benefit obligations</i>
Provisi penurunan nilai piutang usaha	15,385	13,663	<i>Provision for impairment of trade receivables</i>
	<u>85,792</u>	<u>53,974</u>	

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax assets (continued)

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah
sebagai berikut: (lanjutan)

The details of deferred tax assets are as follows:
(continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Aset pajak tangguhan, neto			Deferred tax assets, net
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Sewa	(229)	(287)	Leases
Penyusutan aset tetap	(156)	410	Fixed assets depreciation
Bonus karyawan	95	-	Employees bonus
Liabilitas imbalan			Post-employment
pasca kerja	214	230	benefit obligations
Investasi saham	(99)	(85)	Investment in share
Provisi penurunan			Provision for impairment
nilai piutang usaha	1,996	1,082	of trade receivables
Provisi penurunan			Provision for impairment
nilai persediaan	3	3	of inventories
	<u>1,824</u>	<u>1,353</u>	
Jumlah	<u>87,616</u>	<u>55,327</u>	Total

e. Analisis perubahan aset pajak tangguhan

e. Analysis of changes in deferred tax assets

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Aset pajak tangguhan, neto - awal tahun	55,327	43,111	Deferred tax assets, net - beginning balance
Penyesuaian terkait perubahan tarif pajak penghasilan	-	(903)	Adjustment related to changes in income tax rate
Beban pajak tangguhan	37,232	15,625	Deferred tax expense
Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	(4,943)	(840)	Recognised in other comprehensive income
Dekonsolidasi	-	(1,666)	Deconsolidation
Aset pajak tangguhan, neto - akhir tahun	<u>87,616</u>	<u>55,327</u>	Deferred tax assets, net - ending balance

f. Status audit pajak

f. Tax audit status

Perusahaan

The Company

Pada bulan Desember 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2016 sebesar Rp12.794. Perusahaan telah membayar kurang bayar pajak penghasilan badan tersebut pada tanggal Januari 2022 dan dibebankan pada laba rugi tahun 2021.

In December 2021, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") for Corporate Income Tax fiscal year 2016 amounting to Rp12,794. The Company paid the underpayment in January 2022 and charged to profit or loss in 2021.

Pada bulan September 2022, Perusahaan menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2017 sebesar Rp3.608. Perusahaan telah membayar kurang bayar pajak penghasilan badan tersebut pada tanggal Oktober 2022 dan dibebankan pada laba rugi tahun 2022.

In September 2022, the Company received SKPKB for Corporate Income Tax fiscal year 2017 amounting to Rp3,608. The Company paid the underpayment in October 2022 and charged to profit or loss in 2022.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Status audit pajak (lanjutan)

PMSol

Pada bulan Desember 2021, PMSol menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2016 sebesar Rp621. PMSol telah membayar kurang bayar pajak penghasilan badan tersebut pada Januari 2022 dan dibebankan pada laba rugi 2022.

PPL

Pada bulan Oktober 2022, PPL menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2019 sebesar Rp792. PPL telah membayar kurang bayar pajak penghasilan badan tersebut pada November 2022 dan dibebankan pada laba rugi tahun 2022.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, tidak ada audit pajak yang sedang berlangsung.

g. Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Catatan 27h). Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

h. Administrasi

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

15. TAXATION (continued)

f. Tax audit status (continued)

PMSol

In December 2021, PMSol received SKPKB for Corporate Income Tax fiscal year 2016 amounting to Rp621. PMSol paid the underpayment in January 2022 and charged to profit or loss in 2022.

PPL

In October 2022, PPL received SKPKB for Corporate Income Tax fiscal year 2019 amounting to Rp792. PPL paid the underpayment in November 2022 and charged to profit or loss in 2022.

As at the date of these consolidated financial statements, there is no ongoing tax audit.

g. Tax rates

On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonisation of Tax Regulations (Note 27h). The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards. Hence, the previously tax rate determination of 20% will not be applicable after the ratification of this Law.

h. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, entities which are domiciled in Indonesia calculate and pay taxes on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN

16. BORROWINGS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 25)			Government-related entities (Note 25)
Mandiri	375,096	353,807	Mandiri
BSI	<u>180,467</u>	<u>319,324</u>	BSI
	<u>555,563</u>	<u>673,131</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank BTPN Tbk ("BTPN")	399,256	515,109	PT Bank BTPN Tbk ("BTPN")
MUFG Bank Ltd. ("MUFG")	<u>-</u>	<u>49,144</u>	MUFG Bank Ltd. ("MUFG")
	<u>399,256</u>	<u>564,253</u>	
Jumlah	<u>954,819</u>	<u>1,237,384</u>	Total
Jatuh tempo dalam satu tahun	231,826	236,777	Due next year
Bagian jangka panjang	722,993	1,000,607	Non-current portion

PMSol

PMSol

Notional Pooling Mandiri

Notional Pooling Mandiri

Berdasarkan perjanjian *Notional Pooling* No. 006/H00000/2016-S0 tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian diubah berdasarkan perjanjian No. SPJ-011/H00000/2022-S4 tanggal 12 September 2022, Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Notional Pooling* kepada Pertamina dan beberapa anak perusahaannya. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah satu tahun dan otomatis diperpanjang sampai dengan lima tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp21.289 dan nihil. Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.884 (2021: Rp1.789).

Based on *Notional Pooling* agreement No. 006/H00000/2016-S0 dated 15 August 2016, later amended based on agreement No. SPJ-011/H00000/2022-S4 dated 12 September 2022, Mandiri agreed to provide *Notional Pooling* facilities to Pertamina and its several subsidiaries. The term of the agreement is one year and will be automatically renewed to five years. The balance of the loan as at 31 December 2022 and 2021 was Rp21,289 and nil, respectively. Interest expense from loan for the year ended 31 December 2022 was amounting to Rp1,884 (2021: 1,789).

Perusahaan

The Company

BSI

BSI

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BSI adalah sebagai berikut:

The details of the long-term bank loans from BSI are as follows:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2022/ Balance as at 31 December 2022
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp82.934/Rp82,934	7,50% per tahun/ 7.50% per annum	Juli 2026/ July 2026	Pembiayaan pembelian kapal Transko Taurus/Financing for purchase of Transko Taurus	Rp53,966/ Rp53,966
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp44.720/Rp44,720	7,50% per tahun/ 7.50% per annum	November 2027/ November 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp38,055/ Rp38,055
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp26.832/Rp26,832	7,50% per tahun/ 7.50% per annum	Desember 2027/ December 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp22,901/ Rp22,901

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Perusahaan(lanjutan)

BSI (lanjutan)

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BSI adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2021/ Balance as at 31 December 2021
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp17.888/Rp17,888	7,50% per tahun/ 7.50% per annum	Desember 2027/ December 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/ Financing for purchase of Harbour Tug	Rp15.625/ Rp15,625
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp206.910/Rp206,910	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +2,35%/Interest at rates of 1 month JIBOR +2.35%	Februari 2026/ February 2026	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/ Financing for purchase of Harbour Tug	Rp31.200/ Rp31,200
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp90.180/Rp90,180	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +2,35%/Interest at rates of 1 month JIBOR +2.35%	Februari 2026/ February 2026	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/ Financing for purchase of Harbour Tug	Rp18.720/ Rp18,720

Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.586 (2021: Rp27.436).

Notional Pooling Mandiri

Berdasarkan perjanjian *Notional Pooling* No. 006/H00000/2016-S0 tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian diubah berdasarkan perjanjian No. SPJ-011/H00000/2022-S4 tanggal 12 September 2022, Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Notional Pooling* kepada Pertamina dan beberapa anak perusahaannya. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah satu tahun dan otomatis diperpanjang sampai dengan lima tahun. Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah nihil (2021: Rp1.813).

Mandiri

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CBG.CB3/SPPK.035/2021 tanggal 2 Juni 2021, Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Term Loan* kepada Perusahaan dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp442.259.

Jangka waktu pinjaman adalah tujuh tahun dengan *grace period* selama 24 bulan sejak *delivery* kapal terakhir atau 30 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit. Bunga atas pinjaman tersebut adalah *JIBOR* 1 bulan + 2,05% per tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp353.807. Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.785 (2021: Rp10.906).

16. BORROWINGS (continued)

The Company (continued)

BSI (continued)

The details of the long-term bank loans from BSI are as follows: (continued)

Interest expense from loan for the year ended 31 December 2022 was amounting to Rp18,586 (2021: Rp27,436).

Notional Pooling Mandiri

Based on *Notional Pooling* agreement No. 006/H00000/2016-SO dated 15 August 2016, later amended based on agreement No. SPJ-011/H00000/2022-S4 dated 12 September 2022, Mandiri agreed to provide *Notional Pooling* facilities to Pertamina and its several subsidiaries. The term of the agreement was one year and will be automatically renewed to five years. Interest expense from loan for the year ended 31 December 2022 was nil (2021: Rp1,813).

Mandiri

Based on the *Offering Letter* No. CBG.CB3/SPPK.035/2021 dated 2 June 2021, Mandiri agreed to provide a *Term Loan* facility to the Company with a maximum facility value of Rp442,259.

The term of the loan is seven years with a *grace period* of 24 months from the last ship delivery or 30 months from the signing of the Credit Agreement. The interest on the loan is *JIBOR* 1 month + 2.05% per annum. The loan balance as of 31 December 2022 and 2021 is Rp353,807. Interest expense from loan for the year ended 31 December 2022 was amounting to Rp21,785 (2021: Rp10,906).

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

MUGF

Berdasarkan perjanjian kredit No. 17-0320-GC-LN tanggal 13 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dengan nilai fasilitas maksimum sebesar AS\$15.935.000 (nilai penuh).

Jangka waktu pinjaman adalah sampai tahun 2022 dengan *grace period* selama 3 bulan sejak tanggal perjanjian. Bunga atas pinjaman tersebut adalah *LIBOR* + 1,35% per tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2021 adalah sebesar AS\$3.441.960 (nilai penuh) atau setara dengan Rp49.144. Selama 2022, Perusahaan telah melakukan pelunasan terhadap pokok terutang. Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp606 (2021: Rp1.249).

BTPN

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BTPN adalah sebagai berikut:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp148.548/Rp148,548	Tingkat bunga <i>LIBOR</i> + 1,75% per tahun/ Interest at a rates of <i>LIBOR</i> + 1.75% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility AS\$11.326.400 (nilai penuh)/ US\$11,326,400 (full amount)	Tingkat bunga <i>LIBOR</i> + 1,35% per tahun/ Interest at a rates of <i>LIBOR</i> + 1.35% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp330.239/Rp330,239	Tingkat bunga <i>LIBOR</i> + 1,75% per tahun/ Interest at a rates of <i>LIBOR</i> + 1.75% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp148.548/Rp148,548	Tingkat bunga <i>LIBOR</i> + 1,75% per tahun/ Interest at Rates of <i>LIBOR</i> + 1.75% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp93.759/Rp93,759	Tingkat bunga <i>LIBOR</i> + 1,75% per tahun/ Interest at a rates of <i>LIBOR</i> + 1.75% per annum

Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.806 (2021: Rp29.326).

16. BORROWINGS (continued)

The Company (continued)

MUGF

Based on loan agreement No. 17-0320-GC-LN dated 13 October 2017, the Company obtained financing facility with a maximum amount of US\$15,935,000 (full amount).

The loan period is until 2022 with a grace period of 3 months from the date of the agreement. Interest of the loan is *LIBOR* + 1.35% per annum. The loan balance as at 31 December 2021 is US\$3,441,960 (full amount) or equivalent to Rp49,144. During 2022, the Company has fully paid the outstanding principal. Interest expense from loan for the year ended 31 December 2022 was amounting to Rp606 (2021: Rp1,249).

BTPN

The details of the long-term bank loans from BTPN are as follows:

Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2022/ Balance as at 31 December 2022
November 2023/ November 2023	Pembiayaan pembelian kapal Transko Antasena/Financing for purchase of Transko Antasena	Rp48.497/ Rp48,497
September 2024/ September 2024	Pembiayaan pembelian kapal Transko Cempala, Sikatan & Gelatik/Financing for purchase of Transko Cempala, Sikatan & Gelatik	US\$4.704.812 (nilai penuh), setara dengan Rp73.357/ US\$4,704,812 (full amount), equivalent to Rp73,357
Agustus 2024/ August 2024	Pembiayaan pembelian kapal HT3200 HP dan Gagak/Financing for purchase of HT3200 HP and Gagak	Rp135.181/ Rp135,181
September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Yudhistira/Financing for purchase of Transko Yudhistira	Rp84.177/ Rp84,177
September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Rajawali/Financing for purchase of Transko Rajawali	Rp58.044/ Rp58,044

Interest expense from loan for the year ended 31 December 2022 was amounting to Rp24,806 (2021: Rp29,326).

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Grup memberikan imbalan pasca kerja kepada semua karyawan tetapnya. Imbalan yang diberikan adalah imbalan pasti yang berkaitan dengan penghargaan masa kerja yang tergantung pada lamanya masa kerja. Grup mengakui timbulnya biaya pada saat Grup menerima manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan karyawan.

Grup melakukan penyisihan untuk liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang. Liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah disajikan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits, menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai yang termasuk dalam laporan posisi keuangan yang berasal dari kewajiban Grup sehubungan dengan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Nilai kini liabilitas	300,525	296,979
Nilai wajar aset program	(123,969)	(126,667)
Liabilitas imbalan pasca kerja	<u>176,556</u>	<u>170,312</u>

Beban imbalan pasca kerja yang dibebankan di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Biaya jasa kini	28,137	35,930
Biaya jasa lalu	176	(5,852)
Biaya bunga	11,965	11,228
Pengukuran kembali atas liabilitas yang diakui sebagai imbalan kerja jangka panjang lainnya	(38)	(535)
Biaya imbalan pasca kerja	<u>40,240</u>	<u>40,771</u>

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya (sebelum pajak) adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pengukuran kembali nilai kini liabilitas:		
Keuntungan atas perubahan asumsi ekonomis	20,856	18,707
Keuntungan atas penyesuaian pengalaman	7,260	13,289
Imbal hasil atas aset program tidak termasuk pendapatan bunga	(3,152)	(7,206)
Penghasilan komprehensif lain	<u>24,964</u>	<u>24,790</u>

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Group provides post-employment benefits to all permanent employees. Benefits provided are defined benefits related to long service appreciation. The Group recognises expenses when the economic benefits of the services provided by the employees have been received.

The Group provides provision for long-term employee benefits liabilities. Long-term employee benefits liabilities as at 31 December 2022 and 2021 were presented based on calculations performed by the independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Steven and Mourits, using the projected unit credit method.

The amounts included in the statement of financial position arising from the Group's obligation in respect of these post-employment benefits are as follows:

*Present value of obligation
Fair value of plan assets

Post-employment benefit obligation*

Amounts charged in the profit or loss and in respect of these post-employment benefits are as follows:

*Current service cost
Past service cost
Interest cost
Remeasurement on obligation recognised as other long-term employee benefit*

Post-employment benefit expenses

Remeasurement of employee benefit obligation recognised as other comprehensive income (before tax) is as follows:

*Remeasurement of present value of obligation:
Gain from changes in financial assumptions
Gain from changes in experience adjustments
Return on plan assets excluding interest income*

Other comprehensive income

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of unfunded obligations in the current year were as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pada awal tahun	170,312	178,402	Beginning of the year
Dibebankan pada laporan laba rugi	40,240	40,771	Charged to profit or loss
Keuntungan aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(24,964)	(24,790)	Actuarial gain recognised in other comprehensive income
luran oleh Grup	(5,008)	(2,561)	The Group's contribution
Pembayaran imbalan	(4,024)	(11,804)	Benefit payment
Dekonsolidasi	-	(9,706)	Deconsolidation
Nilai kini liabilitas pada akhir tahun	<u>176,556</u>	<u>170,312</u>	Present value of obligation at the end of the year

Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The main assumptions used are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Tingkat diskonto	7% - 7.4%	6.7% - 7.3%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8.22% - 10%	9% - 10%	Basic salary growth rate
Tabel mortalita	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019	Mortality table
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age

Dampak akibat dari setiap satu persen (1%) perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

A one percentage (1%) point change in the assumed discount rate and salary increase rate at 31 December 2022, would have the following effects:

**Dampak atas kewajiban imbalan pasti/
Impact on defined benefit obligation**

	<u>Perubahan asumsi/ Change in assumptions</u>	<u>Kenaikan Asumsi/ Increase in assumptions</u>	<u>Penurunan Asumsi/ Decrease in assumptions</u>	
Tingkat diskonto	1%	(280,336)	323,762	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	312,647	(289,704)	Salary growth rate

Pada 31 Desember 2022, rata-rata durasi atas provisi imbalan pasca kerja karyawan adalah 16,60 tahun.

As at 31 December 2022, the weighted average duration of the provision for employee service entitlements is 16.60 years.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 31 December 2022 is presented below:

	<u>Kurang dari satu tahun/ Less than one year</u>	<u>1 sampai 5 tahun/ Between 1 and 5 years</u>	<u>5 sampai 10 tahun/ Between 5 and 10 years</u>	<u>Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
Liabilitas imbalan pasca kerja	<u>26,014</u>	<u>105,444</u>	<u>145,885</u>	<u>669,334</u>	<u>946,677</u>	Post-employment benefit obligation

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers tentang Pengattribution Imbalan pada Periode Jasa (PSAK 24 "Imbalan Kerja"). Grup telah mengkaji dampak siaran pers ini terhadap kewajiban imbalan pasca kerja Grup pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, dan saldo awal dari periode komparatif yang paling awal per 1 Januari 2021 berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh aktuaris. Berdasarkan hasil perhitungan aktuaris, tidak ada dampak signifikan dari penerapan siaran pers ini terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2021, oleh karena itu, Grup tidak menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian.

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

In April 2022, the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") issued a press release regarding Attributing Benefit to Periods of Service (SFAS 24 "Employee Benefits"). The Group has assessed the impact of this press release to the Group's post-employment benefit obligations for the years ended 31 December 2022 and 2021 and beginning balance of the earliest comparative period as at 1 January 2021 based on calculations performed by the actuary. Based on the actuary's calculation result, the impact of adoption of this press release was not significant to the Group's consolidated financial statements as at 31 December 2021 and 1 January 2021, therefore, the Group did not restate the consolidated financial statements.

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

The structure of shareholders and the percentage of ownerships as at 31 December 2022 and 2021 are as follows:

2022				
Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh)/ Number of shares (full amount)	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Shareholders
Saham Seri A				Series A shares
PIS	1,234,737	1,234,737	99.93%	PIS
PT Pertamina Pedeve Indonesia	10	10	0.01%	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Saham Seri B				Series B shares
PIS	819	1	0.06%	PIS
Jumlah	1,235,566	1,234,748	100%	Total
2021				
Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh)/ Number of shares (full amount)	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Shareholders
Saham Seri A				Series A shares
PIS	1,106,135	1,106,135	99.93%	PIS
PT Pertamina Pedeve Indonesia	10	10	0.01%	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Saham Seri B				Series B shares
PIS	819	1	0.06%	PIS
Jumlah	1,106,964	1,106,146	100%	Total

Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 28 April 2021 oleh Aulia Taufani S.H., pemegang saham sepakat untuk mengalihkan saham Pertamina ke PIS sebesar Rp693.698 saham seri A dan Rp1 saham seri B.

In accordance with Notarial Deed No. 69 dated 28 April 2021 by Aulia Taufani S.H., the the shareholders agreed to transfer Pertamina's shares to PIS in the amount of Rp693,698 series A shares and Rp1 series B shares.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 104 tanggal 29 April 2021 oleh Aulia Taufani S.H., Perusahaan telah meningkatkan modal dengan menerbitkan saham baru yang diambil oleh PIS dengan inbreng aset *marine* non-sarana tambat sebesar Rp412.437. Selain itu Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari semula Rp2.000.001 menjadi Rp4.424.581 dan modal ditempatkan dan disetor untuk saham seri A dari semula Rp693.709 menjadi Rp1.106.145. Modal dasar yang semula dibagi menjadi 2.000.000 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B menjadi 4.424.580 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B.

Berdasarkan Akta No. 30 tanggal 29 November 2022 oleh Lenny Janis Ishak S.H., Perusahaan telah meningkatkan modal dengan menerbitkan saham baru yang diambil oleh PIS dengan inbreng aset *marine* non-sarana tambat sebesar Rp128.602. Selain itu Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor untuk saham seri A dari semula Rp1.106.145 menjadi Rp1.234.747.

18. SHARE CAPITAL (continued)

In accordance with Notarial Deed No. 104 dated 29 April 2021 by Aulia Taufani S.H., The Company increased its capital by issuing new shares which were subscribed by PIS through in-kind capital contribution in the form of non-mooring marine assets of Rp412,437. In addition, the Company decided to increase the authorised capital from Rp2,000,001 to Rp4,424,581 and the issued and paid-up capital for series A shares from Rp693,709 to Rp1,106,145. The authorised capital was originally divided into 2,000,000 series A shares and 819 series B shares to 4,424,580 series A shares and 819 series B shares.

In accordance with Notarial Deed No. 30 dated 29 November 2022 by Lenny Janis Ishak S.H., The Company increased its capital by issuing new shares which were subscribed by PIS through in-kind capital contribution in the form of non-mooring marine assets of Rp128,602. In addition, the Company decided to increase the issued and paid-up capital for series A share from Rp1,106,145 to Rp1,234,747.

19. DIVIDEN

Perusahaan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 Juni 2022, Perusahaan mengumumkan dividen final untuk tahun 2021 sebesar AS\$49.100.000 (nilai penuh) setara dengan Rp723.784, yang mana telah dibayarkan pada Juli 2022.

PME

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juli 2021, PME mengumumkan total dividen final untuk tahun 2020 sebesar Rp7.831, yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan sebesar Rp7.767 pada tanggal 18 Oktober 2022. Pada tanggal 31 Desember 2022, utang dividen merupakan utang dividen PME kepada PET sebesar Rp64.

19. DIVIDENDS

The Company

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on 16 June 2022, the Company declared final dividends for the 2021 financial year of US\$49,100,000 (full amount) equivalent to Rp723,784, which was paid in July 2022.

PME

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on 30 Juli 2021, PME declared total final dividends for the 2020 financial year of Rp7,831, which has been paid to the Company amounting to Rp 7,767 on 18 October 2022. As at 31 December 2022, dividend payables represent PME's dividends payable to PET amounting to Rp64.

20. PENDAPATAN USAHA

20. REVENUE

	2022	2021	
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	2,170,092	1,307,301	<i>Marine operations support services</i>
Sewa kapal	1,597,644	1,340,814	<i>Vessel charter</i>
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	479,945	358,237	<i>Shipping agency and port services</i>
Jasa penyediaan tenaga kerja	219,010	406,913	<i>Labour supply services</i>
Perdagangan umum	191,631	176,393	<i>General trading</i>
Bongkar muat	61,245	63,101	<i>Cargo handling</i>
Pengerukan	38,387	92,372	<i>Dredging</i>
Jasa broker kapal, neto	18,589	13,545	<i>Charter broker services, net</i>
Sewa gudang	2,522	3,018	<i>Warehouse rental</i>
Air bersih	-	33,748	<i>Clean water</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	5,848	5,545	<i>Others (each below Rp2,000)</i>
Jumlah	4,784,913	3,800,987	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

Grup mengakui kontrak aset terkait pendapatan berikut ini:

20. REVENUE (continued)

The Group has recognised contract assets related to the following revenues:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Aset kontrak			Contract assets
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	555,118	443,647	Shipping agency and port services
Sewa kapal	300,589	140,989	Vessel charter
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	191,477	119,300	Marine operations support services
Perdagangan umum	121,718	23,430	General trading
Jasa penyediaan tenaga kerja	51,167	59,367	Labour supply services
Jasa <i>broker</i> kapal	37,576	28,648	Charter broker services
Pengerukan	19,560	37,939	Dredging
Jumlah, setelah dikurangi provisi penurunan nilai	<u>1,277,205</u>	<u>853,320</u>	Total, net of expected credit loss

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Liabilitas kontrak			Contract liabilities
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	107,220	141,453	Shipping agency and port services
Jumlah	<u>107,220</u>	<u>141,453</u>	Total

Lihat catatan 25 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 25 for related party transactions and balances.

Tabel berikut menunjukkan berapa banyak pendapatan yang diakui pada periode pelaporan saat ini terkait dengan liabilitas kontrak yang dialihkan dan berapa banyak yang terkait dengan kewajiban kinerja yang diselesaikan pada tahun sebelumnya:

The following table shows how much of the revenue recognised in the current reporting period relates to carried-forward contract liabilities and how much relates to performance obligations that were satisfied in a prior year:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pendapatan diakui yang termasuk dalam saldo liabilitas kontrak pada awal periode:			Revenue recognised that was included in the contract liability balance at the beginning of the period:
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	125,347	77,803	Shipping agency and port services

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

21. COST OF REVENUE

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	972,198	584,882	Marine operations support services
Penyusutan (Catatan 10 dan 14)	650,879	408,147	Depreciation (Notes 10 and 14)
Penyediaan tenaga kerja	516,354	803,749	Labour supply services
Sewa kapal	510,928	440,115	Vessel charter
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	243,787	220,049	Shipping agency and port services
Perdagangan umum	164,163	110,598	General trading
Bongkar muat	41,987	49,330	Cargo handling
Pengerukan	31,691	49,522	Dredging
Air bersih	-	20,347	Clean water
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	5,000	2,113	Others (each below Rp2,000)
Jumlah	<u>3,136,987</u>	<u>2,688,852</u>	Total

Lihat catatan 25 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 25 for related party transactions and balances.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Umum			General
Biaya karyawan dan kesejahteraan	435,957	284,608	<i>Employee costs and welfare</i>
Pemeliharaan bangunan	63,616	94,652	<i>Maintenance of buildings</i>
Perlengkapan kantor	33,153	18,548	<i>Office supplies</i>
Hubungan masyarakat	29,171	18,358	<i>Public relations</i>
Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah	23,372	12,778	<i>Short-term leases and leases of low value assets</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp4.000)	<u>6,792</u>	<u>7,362</u>	<i>Others (each below Rp4,000)</i>
	<u>592,061</u>	<u>436,306</u>	
Administrasi			Administrative
Jasa profesional	43,465	8,409	<i>Professional fees</i>
Penyusutan (Catatan 10 dan 14)	12,220	10,122	<i>Depreciation (Notes 10 and 14)</i>
Biaya bank	<u>1,570</u>	<u>3,348</u>	<i>Bank charges</i>
	<u>57,255</u>	<u>21,879</u>	
Jumlah	<u>649,316</u>	<u>458,185</u>	Total
Lihat catatan 25 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.			<i>Refer to Note 25 for related party transactions and balances.</i>

23. PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO

23. OTHER REVENUE, NET

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba selisih kurs, neto	9,365	1,016	<i>Foreign exchange gain, net</i>
Penyisihan piutang tak tertagih (Catatan 5 dan 6)	(18,085)	(2,863)	<i>Bad debt expense (Notes 5 and 6)</i>
Pemulihan penurunan nilai piutang usaha dan kontrak aset (Catatan 5 dan 6)	6,644	5,691	<i>Reversal of impairment on trade receivables and contract assets (Notes 5 and 6)</i>
Klaim atas denda penyerahan kapal	24,808	10,408	<i>Claim from late delivery of vessels</i>
Lain-lain, neto	<u>2,799</u>	<u>11,291</u>	<i>Others, net</i>
Jumlah	<u>25,531</u>	<u>25,543</u>	Total

24. BEBAN KEUANGAN

24. FINANCE COSTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban keuangan atas pinjaman jangka panjang	(83,864)	(46,548)	<i>Finance cost of long-term borrowings</i>
Beban keuangan atas liabilitas sewa (Catatan 14b)	<u>(15,935)</u>	<u>(7,624)</u>	<i>Finance costs of lease liabilities (Note 14b)</i>
Jumlah	<u>(99,799)</u>	<u>(54,172)</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama ataupun entitas berelasi dengan Pemerintah. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Group enters into trade and non-trade with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control or Government-related entities. Sales or purchase price among related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between third parties.

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Perusahaan induk utama/ <i>Ultimate parent company</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha, liabilitas kontrak, dan modal saham/ <i>Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables, contract liabilities and share capital</i>
PT Pertamina International Shipping ("PIS")	Pemegang saham mayoritas/ <i>Majority shareholder</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha, dan liabilitas kontrak/ <i>Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables and contract liability</i>
PT Pertamina Energy Terminal ("PET")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/ <i>Revenue, cost of revenue, general & administrative expense, trade receivables, contract assets and trade payables</i>
PT Kilang Pertamina International ("KPI")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/ <i>Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract asset and trade payables</i>
PT Perta Arun Gas ("PAG")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/ <i>Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables</i>
PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/ <i>Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract liabilities and trade payables</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pertamina Retail ("PTPR")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, cost of revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract liabilities
PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract liabilities
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North-West Java ("PHE ONWJ")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract liabilities
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga ("PHSS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract liabilities
PT Pertamina Lubricants ("PTPL")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT PGN LNG Indonesia ("PGN LNG")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina EP ("PEP")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("PHE WMO")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Bina Medika ("Pertamedika")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, dan utang usaha/Cost of revenue, general and administrative expenses and trade payables
PT Patra Logistik ("Patra Logistik")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan dan liabilitas kontrak/Revenue, cost of revenue and contract liabilities
PT Nusantara Regas ("Nusantara Regas")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Kilang Pertamina Balikpapan ("KPB")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset/Revenue and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore ("PHE NSO")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset/Revenue and contract assets
PT Prima Armada Raya ("PAR")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Pertamina Training & Consulting ("PTC")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas dan pinjaman jangka panjang/Placement of cash and cash equivalents and long-term borrowings

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Mitra Tours & Travel ("MTT")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd. ("PIMD")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Liabilitas kontrak/Contract liabilities
PT Pertamina Hulu Rokan ("PHR")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan/Revenue
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ("PHE JM")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan/Revenue
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia ("ATPI")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban pokok pendapatan/Cost of sales
PT Benggala Laju Abadi ("Benggala")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Banggai Bahtera Laju Abadi ("Banggai")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Aru Bahtera Laju Abadi ("Aru")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Alor Bahtera Laju Abadi ("Alor")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Ararkula Bahtera Laju Abadi ("Ararkula")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Bangkit Bahtera Laju Abadi ("Bangkit")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Liran Bahtera Laju Abadi ("Liran")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Barung Bahtera Laju Abadi ("Barung")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Miangas Bahtera Laju Abadi ("Miangas")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Brass Bahtera Laju Abadi ("Brass")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Damar Bahtera Laju Abadi ("Damar")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Damanusa Bahtera Laju Abadi ("Damanusa")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Bepondi Bahtera Laju Abadi ("Bepondi")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Entitas ventura bersama/Joint venture entity	Piutang usaha/Trade receivables
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Piutang usaha, kontrak aset, dan liabilitas kontrak/Revenue, contract assets and contract liabilities

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pelindo Marine Service ("Pelindo MS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Piutang usaha/Trade receivables
PT Administrasi Medika ("Admedika")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Pratama Mitra Sejati ("PMS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Sigma Cipta Utama ("SCU")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of sales and trade payables
PT Jawa Satu Power ("JSP")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Piutang usaha/Trade receivables
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Piutang usaha/Trade receivables
PT Peralife Insurance ("Peralife")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Surveyor Indonesia (Persero) ("Surveyor Indonesia")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BKI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT PAL Indonesia ("PAL")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Jasa Armada Indonesia ("IPCM")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah/ Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Utang usaha/Trade payables
PT Superintending Company of Indonesia ("SUCOFINDO")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah/ Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Utang usaha/Trade payables

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 12,85% dan 15,41% dari jumlah aset.

Piutang usaha (Catatan 5)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PIS	741,318	157,996
Patra Niaga	252,972	336,761
PET	43,282	4,707
KPI	28,107	379,359
Pertamina	24,229	31,031
PAG	22,772	28,592
PHKT	11,358	7,813
PHM	10,597	5,949
PHE ONWJ	8,192	12,129
PHSS	7,328	1,099
PTPR	7,007	3,739
PTPL	5,207	295
Pelindo	3,488	-
Nusantara Regas	3,403	1,994
Pelindo MS	2,969	-
PGN LNG	1,881	4,450
PHE OSES	1,862	17,875
TYM	1,780	6,952
PEP	1,242	263
JSP	555	4,400
TPPI	-	3,693
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1,585	1,237
Jumlah	<u>1,181,134</u>	<u>1,010,334</u>

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows:

Cash and cash equivalents (Note 4)

As at 31 December 2022 and 2021, the balances of cash and cash equivalents placed in Government-related entities represent 12.85% and 15.41%, respectively, of the total assets.

Trade receivables (Note 5)

PIS
Patra Niaga
PET
KPI
Pertamina
PAG
PHKT
PHM
PHE ONWJ
PHSS
PTPR
PTPL
Pelindo
Nusantara Regas
Pelindo MS
PGN LNG
PHE OSES
TYM
PEP
JSP
TPPI
Others (each below Rp1,000)
Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kontrak aset (Catatan 6)

	2022	2021
PIS	310,899	529,592
KPI	264,596	3,339
Patra Niaga	260,625	65,653
Pelindo	55,049	-
PHE OSES	23,552	19,338
PHE ONWJ	23,539	10,390
PHM	20,093	10,538
PTPR	19,551	26,833
PHKT	13,531	13,173
Pertamina	8,287	5,836
PET	6,724	11,325
KPB	6,714	-
PHS	6,069	736
PAG	5,398	2,299
PHE NSO	3,588	-
PGN LNG	2,832	3,483
PHE WMO	2,028	1,715
PEP	36	7,549
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1,784	444
Jumlah	1,034,895	712,243

Penyertaan saham

	Kepemilikan/ Ownership (%)	2022	2021
PET	0.01%	1,210	1,129
Benggala	0.10%	789	728
Banggai	0.10%	771	710
Alor	0.10%	432	365
Aru	0.10%	426	379
Barung	0.10%	410	385
Miargas	0.10%	401	370
Ararkula	0.10%	389	344
Liran	0.10%	385	315
Bangkit	0.10%	335	315
Brass	0.10%	313	273
Damanusa	0.10%	285	265
Damar	0.10%	284	265
Patra Niaga	0.10%	130	56
Bepondi	0.01%	101	100
Jumlah		6,661	5,999

Penyertaan saham diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang dicatat menggunakan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Contract assets (Note 6)

	2022	2021
PIS	310,899	529,592
KPI	264,596	3,339
Patra Niaga	260,625	65,653
Pelindo	55,049	-
PHE OSES	23,552	19,338
PHE ONWJ	23,539	10,390
PHM	20,093	10,538
PTPR	19,551	26,833
PHKT	13,531	13,173
Pertamina	8,287	5,836
PET	6,724	11,325
KPB	6,714	-
PHS	6,069	736
PAG	5,398	2,299
PHE NSO	3,588	-
PGN LNG	2,832	3,483
PHE WMO	2,028	1,715
PEP	36	7,549
Others (each below Rp1,000)	1,784	444
Total	1,034,895	712,243

Investment in shares

	Kepemilikan/ Ownership (%)	2022	2021
PET	0.01%	1,210	1,129
Benggala	0.10%	789	728
Banggai	0.10%	771	710
Alor	0.10%	432	365
Aru	0.10%	426	379
Barung	0.10%	410	385
Miargas	0.10%	401	370
Ararkula	0.10%	389	344
Liran	0.10%	385	315
Bangkit	0.10%	335	315
Brass	0.10%	313	273
Damanusa	0.10%	285	265
Damar	0.10%	284	265
Patra Niaga	0.10%	130	56
Bepondi	0.01%	101	100
Total		6,661	5,999

Investment in shares are classified as equity instruments measured at fair value through other comprehensive income.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Utang usaha (Catatan 11)

	2022	2021
Pertamina	379,652	576,231
Pelindo	167,541	-
Patra Niaga	159,803	24,932
PIS	74,068	-
PAG	23,895	17,685
PAR	20,111	-
Pertalife	15,391	-
Admedika	14,558	-
Surveyor Indonesia	7,954	1,599
PMS	7,181	2,724
PET	7,342	6,555
PBM	6,277	2,157
Telkomsat	4,243	487
BKI	4,179	444
SCU	3,610	-
IPCM	2,276	-
PAL	2,608	905
SCI	2,305	-
PTC	2,042	1,059
MTT	1,645	746
KPI	1,110	1,663
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1,755	2,785
Jumlah	909,546	639,972

Liabilitas kontrak (Catatan 13)

	2022	2021
PIS	19,605	53,659
Adhi Karya	270	-
PIMD	144	138
Pelindo	50	-
Dahana	44	-
Pertamina	8	-
TSA	8	-
Djakarta Lloyd	7	-
Patra Logistik	-	17
Jumlah	20,136	53,814

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Trade payables (Note 11)

	2022	2021
Pertamina	379,652	576,231
Pelindo	167,541	-
Patra Niaga	159,803	24,932
PIS	74,068	-
PAG	23,895	17,685
PAR	20,111	-
Pertalife	15,391	-
Admedika	14,558	-
Surveyor Indonesia	7,954	1,599
PMS	7,181	2,724
PET	7,342	6,555
PBM	6,277	2,157
Telkomsat	4,243	487
BKI	4,179	444
SCU	3,610	-
IPCM	2,276	-
PAL	2,608	905
SCI	2,305	-
PTC	2,042	1,059
MTT	1,645	746
KPI	1,110	1,663
Others (each below Rp1,000)	1,755	2,785
Total	909,546	639,972

Contract liabilities (Note 13)

	2022	2021
PIS	19,605	53,659
Adhi Karya	270	-
PIMD	144	138
Pelindo	50	-
Dahana	44	-
Pertamina	8	-
TSA	8	-
Djakarta Lloyd	7	-
Patra Logistik	-	17
Total	20,136	53,814

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (Catatan 16)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Mandiri	375,096	353,807
BSI	180,467	319,324
Jumlah	<u>555,563</u>	<u>673,131</u>

Pendapatan usaha (Catatan 20)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Patra Niaga	1,329,911	510,323
PIS	987,960	590,137
KPI	784,205	297,125
PTPR	197,581	181,739
PAG	151,294	118,816
Patra Logistik	147,539	-
PHE OSES	88,435	89,805
PET	87,050	15,540
PHM	82,521	64,129
Pelindo	70,838	-
PHKT	70,801	82,090
PHE ONWJ	54,287	40,172
PGN LNG	19,814	10,777
Nusantara Regas	7,944	12,471
PHSS	7,500	5,351
Pertamina	7,230	1,331,000
PHE WMO	5,730	5,667
PTPL	4,459	1,022
PMS	4,046	-
PHE JM	3,762	3,128
KPB	3,115	-
PEL	2,974	-
PHR	1,837	-
PHE NSO	1,388	-
PEP	1,367	6,616
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1000)	1,287	1,500
Jumlah	<u>4,124,875</u>	<u>3,367,408</u>

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Long-term borrowings (Note 16)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Mandiri	375,096	353,807
BSI	180,467	319,324
Total	<u>555,563</u>	<u>673,131</u>

Revenue (Note 20)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Patra Niaga	1,329,911	510,323
PIS	987,960	590,137
KPI	784,205	297,125
PTPR	197,581	181,739
PAG	151,294	118,816
Patra Logistik	147,539	-
PHE OSES	88,435	89,805
PET	87,050	15,540
PHM	82,521	64,129
Pelindo	70,838	-
PHKT	70,801	82,090
PHE ONWJ	54,287	40,172
PGN LNG	19,814	10,777
Nusantara Regas	7,944	12,471
PHSS	7,500	5,351
Pertamina	7,230	1,331,000
PHE WMO	5,730	5,667
PTPL	4,459	1,022
PMS	4,046	-
PHE JM	3,762	3,128
KPB	3,115	-
PEL	2,974	-
PHR	1,837	-
PHE NSO	1,388	-
PEP	1,367	6,616
Others (each below Rp1,000)	1,287	1,500
Total	<u>4,124,875</u>	<u>3,367,408</u>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/71 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Beban pokok pendapatan (Catatan 21)

	2022	2021
Patra Niaga	645,286	133,167
Pelindo	548,210	-
PIS	127,556	-
PAG	73,801	25,471
Pertamina	27,891	289,378
TPI	18,994	-
JAI	18,395	-
Admedika	14,558	-
Telkomsat	7,668	-
PET	6,081	3,623
BKI	5,586	-
Sucofindo	3,730	-
SCU	3,577	-
Pertamedika	1,356	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	3,177	12,206
Jumlah	1,505,866	463,845

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Cost of revenue (Note 21)

Patra Niaga
Pelindo
PIS
PAG
Pertamina
TPI
JAI
Admedika
Telkomsat
PET
BKI
Sucofindo
SCU
Pertamedika
Others (each below Rp1,000)

Total

Beban umum dan administrasi (Catatan 22)

	2022	2021
PAR	20,111	-
Admedika	14,558	-
PMS	8,861	7,112
Pertamedika	5,547	2,847
PTC	4,445	2,828
MTT	2,246	980
BKI	1,277	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	623	13
Jumlah	57,668	13,780

General and administrative expenses (Note 22)

PAR
Admedika
PMS
Pertamedika
PTC
MTT
BKI
Others (each below Rp1,000)

Total

Kompensasi dan imbalan lain

Kompensasi dan imbalan lain yang diberikan oleh Perusahaan kepada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Compensation and other benefits

Compensation and other benefits provided by the Company to its key management is as follows:

	2022	2021
Gaji dan imbalan lainnya	20,060	9,854

Salaries and other benefits

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/72 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. SALDO LABA DICADANGKAN

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib dari laba bersih sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 16 Juni 2022 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 16 oleh Miryany Usman, S.H. tanggal 16 Juni 2022, para pemegang saham menyetujui Cadangan Wajib sebesar AS\$2.500.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp36.853 yang dialokasikan dari Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah membentuk dana cadangan sebesar Rp112.796 dan Rp75.943.

26. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 issued in August 2007, requires each company to establish a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of a Company's issued and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of such reserve.

Based on the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on 16 June 2022 which was notarised in the Notarial Deed No. 16 of Miryany Usman, S.H. dated 16 June 2022, the shareholders approved the General Reserves of US\$2,500,000 (full amount) or equivalent to Rp36,853 which were allocated from the Unappropriated Retained Earnings.

As at 31 December 2022 and 2021, the Company has provided for Rp112,796 and Rp75,943 as general reserves.

27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI

a. Perjanjian kerjasama dengan PAG

Pada tanggal 30 Januari 2015 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan terminal antara Perusahaan dengan PAG. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah untuk jasa rutin sebesar Rp40.990 per tahun, dan untuk jasa non-rutin adalah sebesar pengeluaran nyata ditambah dengan margin yang sudah di atur dalam perjanjian.

Pada tanggal 30 Mei 2017, perjanjian ini diperpanjang selama lima belas tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

b. Perjanjian kerjasama dengan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia ("APROBI")

Pada tanggal 18 Agustus 2022 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan *ship-to-ship* antara Perusahaan dengan APROBI. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut untuk jasa rutin terbagi menjadi skema A (penyewaan 2 kapal *floating storage* dan 2 kapal *harbour tug*) sebesar Rp29.135 per bulan dan skema B (penyewaan 1 kapal *floating storage* dan 1 kapal *harbour tug*) sebesar Rp15.698 perbulan. Nilai kontrak untuk jasa non-rutin adalah sebesar pengeluaran ditambah dengan *fee* yang sudah diatur dalam perjanjian.

27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Cooperation agreement with PAG

On 30 January 2015, a cooperation agreement for port terminal management was signed between the Company and PAG. The agreement is valid for three years and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement is for a routine service at Rp40,990 per year, and for non-routine services amounting to actual expenditures plus a margin as set out in the agreement.

On 30 May 2017, this agreement was extended for fifteen years and may be extended according to the agreement.

b. Cooperation agreement with Indonesia Biofuel Producer Association ("APROBI")

On 18 August 2022, a cooperation agreement for ship-to-ship management was signed between the Company and APROBI. The agreement is valid for one year and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement for the routine services are divided into scheme A (the lease of 2 floating storage vessels and 2 harbour tugboats) is Rp29,135 per month and scheme B (the lease of 1 floating storage vessel and 1 harbour tugboat) amounting to Rp15,698 per month. The contract value for non-routine services amounted to actual expense plus fee according to the agreement.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/73 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

**27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

c. Perjanjian sewa berdasarkan waktu

Perusahaan memiliki beberapa perjanjian untuk menyewakan kapal-kapal ke beberapa pelanggan. Perjanjian yang signifikan adalah dengan Pertamina. Periode perjanjian-perjanjian tersebut umumnya 1 - 2 tahun dengan opsi perpanjangan jangka waktu.

c. Time charter agreement

The Company has several agreements to lease vessels to various customers. The significant agreements are with Pertamina. The period of these agreements is typically made for 1 - 2 years with options to extend the term.

d. Perjanjian pengelolaan pelabuhan bundling dan unbundling

Pada tanggal 9 Juni 2021, konsorsium grup Perusahaan, yang terdiri dari Perusahaan, PPL, PMSol, PME, dan PET, mengadakan perjanjian pengelolaan pelabuhan *bundling* dan *unbundling* terkait jasa kepelabuhanan, jasa *marine*, dan jasa konstruksi untuk *Subholding Refinery and Petrochemical* dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2021. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp908.884 per tahun.

d. Bundling and unbundling port management agreement

On 9 June 2021, the Company's group consortium, which consists of the Company, PPL, PMSol, PME and PET, entered into bundling and unbundling port management agreement related to port, marine and construction for Subholding Refinery and Petrochemical with Pertamina. The agreement is valid for 10 (ten) years effective from 1 May 2021. Contract value of this agreement is Rp908,884 per year.

Pada tanggal 11 Juni 2021, konsorsium grup Perusahaan juga mengadakan perjanjian pengelolaan pelabuhan *bundling* dan *unbundling* terkait jasa kepelabuhanan, jasa *marine*, dan jasa konstruksi untuk *Subholding Commercial and Trading* dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2021. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp27,97 per liter dengan jumlah Rp1.736.238 per tahun.

On 11 June 2021, the Company's group consortium also entered into bundling and unbundling port management agreement related to port, marine and construction services for Subholding Commercial and Trading with Pertamina. The agreement is valid for 10 (ten) years effective from 1 May 2021. Contract value of this agreement is Rp27.97 per liter with total amount of Rp1,736,238 per year.

e. Perjanjian layanan sewa shorebase

Pada tanggal 16 Februari 2022, telah ditandatangani perjanjian layanan sewa *shorebase* antara Perusahaan dengan PHKT. Perjanjian ini berlaku selama 24 bulan yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2022. Nilai total kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp68.011.

e. Shorebase rental service

On 16 February 2022, an agreement for shorebase rental services was signed between the Company and PHKT. The agreement is valid for 24 months effective from 1 May 2022. The total contract value of the agreement is Rp68,011.

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundang berbagai peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus. Salah satu dari peraturan pelaksana ini adalah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan pelaksana ini mengatur, antara lain, jangka waktu kontrak untuk karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah lima tahun maksimum dan karyawan ini berhak atas uang kompensasi yang dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja, termasuk pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

In February 2021, the Government officially enacted various implementing regulations of the Omnibus Law. One of these implementing regulations is Government Regulation No. 35 of 2021 concerning the Limited Time Employment Agreement, Outsourcing, Working Time and Break Time, and Termination of Employment. This implementing regulation regulates, among other things, that the contract period for employees with a limited time employment agreement is five years maximum and these employees are entitled to compensation benefit which is calculated proportionally based on the length of service, including severance pay and service pay.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/74 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

f. Undang-Undang Cipta Kerja

Grup melalui anak perusahaannya, PMSol, memiliki karyawan perjanjian kerja waktu tertentu. Manajemen Grup berpendapat bahwa paket kompensasi karyawan yang diberikan kepada karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu-nya telah memenuhi ketentuan PP 35/2021.

g. Undang-Undang No. 7/2021

Pada tanggal 7 Oktober 2021, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan oleh Presiden sebagai UU No. 7/2021 ("UU HPP") pada tanggal 29 Oktober 2021. UU ini mengatur sejumlah aturan baru perpajakan sebagai salah satu cara Pemerintah mereformasi sistem perpajakan, salah satu implementasinya Nomor Induk Kependudukan ("NIK") sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") untuk wajib pajak orang pribadi.

Ketentuan kebijakan lainnya yang menjadi poin penting di dalam UU HPP adalah:

PPN

Kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Adanya sistem multi tarif PPN dengan rentang sekitar 5% - 15% dan tarif PPN 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi ("PPh OP")

Adanya perubahan dan penambahan rentang tarif PPh OP menjadi 5 lapisan atau kategori yaitu lapisan kena pajak sampai dengan Rp60 (tarif pajak 5%), diatas Rp60 - Rp250 (tarif pajak 15%), diatas Rp250 - Rp500 (tarif pajak 25%), diatas Rp500 - Rp5.000 (tarif pajak 30%), dan lapisan kelima untuk pendapatan diatas Rp5.000 (tarif pajak 35%).

Program Pengungkapan Sukarela

Program ini akan diberlakukan selama enam bulan, yaitu pada kurun waktu 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 dan program ini hanya akan berlaku bagi wajib pajak badan yang sebelumnya berpartisipasi dalam program pengampunan pajak dan wajib pajak orang pribadi.

**27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

f. Job Creation Bill

The Group through its subsidiary, PMSol, has employees with limited time employment agreements. The Group's management is of the opinion that the employee compensation package provided to its Temporary Appointment Work Agreement (PKWT) employees has complied with the provision of PP 35/2021.

g. Law No. 7/2021

On 7 October 2021, the Indonesian Parliament approved the Harmonisation of Tax Regulations Bill which was signed into law by the President as Law No. 7/2021 ("HPP Law") on 29 October 2021. This law regulates a number of new tax rules as one way for the Government to reform the tax system, one of which is the implementation of the Population Identification Number as Taxpayer Identification Number for individual taxpayers.

Other policy provisions that are important points in the HPP Law are:

VAT

Gradual increase in general VAT rates, increasing from 10% to 11% starting 1 April 2022 and 12% rate starting 1 January 2025. There is a VAT multi-tariff system with a range of around 5% - 15% and a VAT rate of 0% for the export of tangible and intangible taxable goods and the export of taxable services.

Personal Income Tax ("PPh OP")

There are changes and additions to the range of PPh OP rates into 5 layers or categories, namely: taxable layer up to Rp60 (5% tax rate), above Rp60 - Rp250 (15% tax rate), above Rp250 - Rp500 (25% tax rate), above Rp500 - Rp5,000 (30% tax rate) and the fifth layer for income above Rp5,000 (tax rate of 35%).

Voluntary Disclosure Programme

This programme will be implemented for six months, from 1 January 2022 to 30 June 2022 and this will be applicable only for corporate taxpayers who previously participated in the tax amnesty programme and individual taxpayers.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

g. Undang-Undang No. 7/2021 (lanjutan)

Ketentuan kebijakan lainnya yang menjadi poin penting di dalam UU HPP adalah: (lanjutan)

PPh Badan

Tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sementara wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu diberikan tarif 3% lebih rendah dari 22%.

Perubahan UU Cukai

Perubahan berupa penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai, menggunakan prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir terkait pelanggaran cukai yang mencakup pelanggaran perizinan, pengeluaran barang kena cukai, barang kena cukai tidak dikemas, barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai.

h. Kasus hukum atas lahan disewakan kepada PT Batubara Mandiri

Pada tanggal 27 April 2021, Perusahaan digugat oleh PT Batubara Mandiri terkait pembatasan penggunaan lahan sewa di Lahan Bagus Kuning, Plaju, Palembang. Menurut PT Batubara Mandiri, mereka hanya dapat menggunakan lahan seluas 15.000m² dari 42.650m² luas lahan yang dinyatakan dalam kontrak.

Pada tanggal 8 April 2014, PT Batubara Mandiri menerima surat peringatan dan denda dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dikarenakan lokasi lahan sewa tidak termasuk di dalam lokasi persediaan batu bara yang telah ditentukan. Dikarenakan pembatasan ini mempengaruhi aktivitas operasional, PT Batubara Mandiri menganggap bahwa Grup bertanggung jawab atas kerugian mereka sebesar Rp298.964.

Pada tanggal 22 September 2021, perkara ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Batam dimana keputusan pengadilan memenangkan tergugat. Berdasarkan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa perkara ini dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang. Atas putusan ini, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau.

27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

g. Law No. 7/2021 (continued)

Other policy provisions that are important points in the HPP Law are: (continued)

Corporate Income Tax

Domestic corporate income tax rates and permanent establishments are 22% which will come into effect in the 2022 fiscal year. Meanwhile, domestic corporate taxpayers in the form of Perseroan Terbuka, with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange at least 40% and fulfilling certain requirements are given a tariff which is 3% lower than 22%.

Changes to the Excise Law

The change is the addition or reduction of types of excisable goods, using the principle of punishment as a last resort related to excise violations which include licensing violations, releasing excisable goods, unpackaged excisable goods, excisable goods originating from criminal acts and the sale and purchase of excise stamps.

h. Legal case of leased land to PT Batubara Mandiri

On 27 April 2021, the Company was sued by PT Batubara Mandiri due to leased land use limitation in Lahan Bagus Kuning, Plaju, Palembang. According to PT Batubara Mandiri, they can only use 15,000m² from 42,650m² of total area stated in contract.

On 8 April 2014, PT Batubara Mandiri received a warning letter and penalty from the Ministry of Energy and Mineral Resources of South Sumatera due to leased land location is not included in the location determined as coal stockpile area. Since these limitations are impacting their operational activity, PT Batubara Mandiri believes that the Group is responsible for their losses amounting to Rp298,964.

On 22 September 2021, this legal case was handled by Batam District Court which decided in favour of the defendant. However, based on Regulation of Legal Events for Regions Outside Java and Madura, Batam District court is of the opinion that this legal case should be decided by Palembang District Court. Against this decision, the Plaintiff filed an appeal to the Riau High Court.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/76 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

**27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

**h. Kasus hukum atas lahan disewakan kepada
PT Batubara Mandiri (lanjutan)**

**h. Legal case of leased land to PT Batubara
Mandiri (continued)**

Pada tanggal 21 Desember 2021, Pengadilan Tinggi Riau mengabulkan banding dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Batam berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Atas putusan ini, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

On 21 December 2021, Riau High Court granted the appeal request and decided that the Batam District Court has the right and authority to examine and decide cases. Against this decision, the Defendant filed an appeal to the Supreme Court.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Batam berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara.

On 13 December 2022, the Supreme Court rejected the appeal and decided that the Batam District Court had the right and authority to examine and decide the case.

Sesuai dengan Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Desember 2022, sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini proses pemeriksaan dan persidangan masih berjalan.

In accordance with the Court Summons Letter from Batam District Court dated 23 December 2022, the first hearing with an agenda for summoning the parties has been held on 4 January 2023. As of the issuance date of these consolidated financial statements, the examination and trial process is still ongoing.

Grup berpendapat hasil akhir perkara ini tidak akan memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Grup.

The Group is of the opinion that results of this legal case will not have material adverse impact to the Group's financial position and cash flows.

**i. Perkara Perdata di Badan Arbitrase Nasional
Indonesia ("BANI") dengan PT Dok Bahari
Nusantara ("DBN")**

**i. Civil Case at the Indonesian National
Arbitration Board with PT Dok Bahari
Nusantara ("DBN")**

Pada 18 September 2019, Perusahaan dan DBN telah menandatangani perjanjian pembelian dan pembangunan 3 unit kapal *harbour tug* 3200 HP. Berdasarkan perjanjian tersebut, DBN memiliki kewajiban untuk membangun dan menyerahkan kepada Perusahaan sejumlah kapal tersebut dalam kurun waktu 13 bulan dengan nilai sebesar Rp156.000.

On 18 September 2019, the Company and DBN signed an agreement to purchase and build 3 units of harbour tug 3200 HP. Based on the agreement, DBN has an obligation to build and deliver to the Company these ships within 13 months with a value of Rp156,000.

Dikarenakan DBN tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan kapal sesuai jangka waktu dalam perjanjian, Perusahaan telah melakukan pembatalan lebih awal terhadap perjanjian tersebut pada tahun 2021.

Due to DBN was not able to fulfill its obligations to complete the shipbuilding within the timeframe based on the agreement, the Company has terminated the agreement earlier in 2021.

Pada tanggal 10 November 2022, Perusahaan telah mendaftarkan permohonan perkara perdata melalui Arbitrase di BANI atas tuntutan ganti rugi keterlambatan penyelesaian pembangunan Kapal sesuai jangka waktu di dalam Perjanjian. Tuntutan ganti rugi yang diajukan adalah sebesar Rp97.869.

On 10 November 2022, the Company has registered a request for a civil case through Arbitration at the Indonesian National Arbitration Board regarding claim for compensation of delays in the completion of the shipbuilding according to the timeframe in the Agreement. The claim for compensation that was filed amounted to Rp97,869.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini proses pemeriksaan perkara masih berjalan.

As of the issuance date of these consolidated financial statements, the case examination process is still ongoing.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/77 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

**j. Perkara Perdata di BANI dengan PT Batamec
("BMC")**

Pada 27 Desember 2019, Perusahaan dan BMC telah menandatangani perjanjian pembelian dan pembangunan 2 unit kapal *harbour tug* 3200 HP. Berdasarkan perjanjian tersebut, BMC memiliki kewajiban untuk membangun dan menyerahkan kepada Perusahaan sejumlah kapal tersebut dalam kurun waktu 14 bulan dengan nilai sebesar Rp111.000.

Dikarenakan BMC tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan kapal sesuai jangka waktu dalam perjanjian, Perusahaan telah melakukan pembatalan lebih awal terhadap perjanjian tersebut pada tahun 2022.

Pada tanggal 23 Februari 2023, Perusahaan telah mendaftarkan permohonan perkara perdata melalui Arbitrase di BANI atas tuntutan ganti rugi keterlambatan penyelesaian pembangunan Kapal sesuai jangka waktu di dalam Perjanjian. Tuntutan ganti rugi yang diajukan adalah sebesar Rp67.029.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini proses pemeriksaan perkara masih berjalan.

k. Time Charter Party kapal Anchor Handling Tug Supply ("AHTS") untuk mendukung PHE ONWJ

PTK telah menandatangani 3 (tiga) perjanjian sewa kapal dengan PHE ONWJ, masing-masing menggunakan kapal milik Perusahaan untuk periode 36 (tiga puluh enam) bulan. Adapun ketiga perjanjian sewa tersebut adalah:

- i. No. 4710005697 tertanggal 1 April 2022 untuk kapal AHTS Transko Moloko dengan nilai total Rp48.365;
- ii. No. 4710005995 tertanggal 15 Juni 2022 untuk kapal AHTS Transko Andalas dengan nilai total Rp46.177; dan
- iii. No. 4710005698 tertanggal 1 Juli 2022 untuk kapal AHTS Peteka 5401 dengan nilai total Rp37.356.

27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

j. Civil Case at the Indonesian National Arbitration Board with PT Batamec ("BMC")

On 27 December 2019, the Company and DBN signed an agreement to purchase and build 2 units of harbour tug 3200 HP. Based on the agreement, BMC has an obligation to build and deliver to the Company these ships within 14 months with a value of Rp111,000.

Due to BMC was not able to fulfill its obligations to complete the shipbuilding within the timeframe based on the agreement, the Company has terminated the agreement earlier in 2022.

On 23 February 2023, the Company has registered a request for a civil case through Arbitration at the Indonesian National Arbitration Board regarding claim for compensation of delays in the completion of the shipbuilding according to the timeframe in the Agreement. The claim for compensation that was filed amounted to Rp67,029.

As of the issuance date of these consolidated financial statements, the case examination process is still ongoing.

k. Time Charter Party for Anchor Handling Tug Supply ("AHTS") vessels to Support PHE ONWJ

PTK has signed 3 (three) boat charter agreements with PHE ONWJ. each agreement using a ship owned by the Company for a period of 36 (thirty-six) months. The three rental agreements are:

- i. No. 4710005697 dated 1 April 2022 for AHTS Transko Moloko with a total value of Rp48,365;
- ii. No. 4710005995 dated 15 June 2022 for AHTS Transko Andalas with a total value of Rp46,177; and
- iii. No. 4710005698 dated 1 July 2022 for AHTS Peteka 5401 with a total value of Rp37,356.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

I. Pembelian kapal *secondhand*

Pada tanggal 23 dan 27 Desember 2022, PTK menandatangani perjanjian pembelian kapal *secondhand* sebagai berikut:

- i. TB Martha Pacific – OB Sentana Mulia dari PT Pelayaran Multi Jaya Samudera dengan nilai pembelian sebesar Rp29.250;
- ii. TB Martha IV – OB Sentana IV dari PT Pelayaran Multi Jaya Samudera dengan nilai pembelian sebesar Rp24.425;
- iii. LCT Anugerah Perdana 33 dari PT Penduang Segara Sentosa dengan nilai pembelian Rp11.400; dan
- iv. LCT Jesslyn dari PT Bahari Papua Perkasa dengan nilai pembelian sebesar Rp16.044.

27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

I. Secondhand vessel purchase agreements

On 23 and 27 December 2022, PTK signed four agreements to purchase of secondhand vessels as follows:

- i. TB Martha Pacific – OB Sentana Mulia from PT Pelayaran Multi Jaya Samudera with the purchase amount of Rp29,250;
- ii. TB Martha IV – OB Sentana IV from PT Pelayaran Multi Jaya Samudera with the purchase amount of Rp24,425;
- iii. LCT Anugerah Perdana 33 from PT Penduang Segara Sentosa with the purchase amount of Rp11,400; and
- iv. LCT Jesslyn from PT Bahari Papua Perkasa with the purchase amount of Rp16,044.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

• **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, utang pembiayaan konsumen, liabilitas sewa pembiayaan dan pinjaman bank jangka panjang yang dimiliki Grup.

Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah sebesar 100 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp593 terutama sebagai akibat lebih tinggi/lebih rendah biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk. Market prices contain two types of risk: interest rate risk and foreign exchange rate risk.

• **Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's cash and cash equivalents, consumer finance liability, finance lease liabilities and long-term bank loans.

There is no formal hedging policy with respect to the interest rate exposure. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

As at 31 December 2022, had the interest rates of the loans and borrowings been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, income before corporate income tax for the year ended 31 December 2022 would have been Rp593 lower/higher, accordingly, mainly as a result of higher/lower interest charges on the loans and borrowings with floating interest rates.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/79 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

• **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi oleh Grup sebagai akibat fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang sewa pembiayaan, utang usaha, liabilitas kontrak dan pinjaman jangka panjang dalam mata uang Dolar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp5.543.

Risiko kredit

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Untuk mengukur KKE, piutang usaha dan kontrak aset telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit gabungan dan waktu jatuh tempo.

Tarif kerugian ekspektasian adalah berdasarkan profil pembayaran penjualan masing-masing selama periode 24 bulan sebelum 31 Desember 2022 atau 2021 dan kerugian kredit historis terkait yang dialami dalam periode ini. Tarif historis kerugian disesuaikan dengan informasi pada saat ini dan dimasa depan atas faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutangnya. Grup telah mengidentifikasi harga minyak mentah sebagai faktor yang paling relevan dan menyesuaikan tarif kerugian historis berdasarkan perubahan yang diekspektasi pada faktor tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha sebesar Rp1.388.265 (2021: Rp1.224.643) mengalami penurunan nilai dan telah diprovisikan sebesar Rp103.492 (2021: Rp93.335).

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset kontrak sebesar Rp1.280.749 (2021: Rp855.479) mengalami penurunan nilai dan telah diprovisikan sebesar Rp3.544 (2021: Rp2.159).

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

• **Foreign exchange rate risk**

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from US Dollar denominated cash and cash equivalent, trade receivables, finance lease receivables, trade payables, contract liabilities and long-term borrowings.

As at 31 December 2022, had the exchange rate of the Rupiah against US Dollar depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, profit before final and income tax for the year ended 31 December 2022 would have been Rp5,543 higher/lower.

Credit risk

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statement of financial position.

To measure the ECL, trade receivables and contract assets have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

The expected loss rates are based on the payment profiles of sales over a period of 24 months before 31 December 2022 or 2021, respectively and the corresponding historical credit losses experienced within this period. The historical loss rates are adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables. The Group has identified the crude oil prices to be the most relevant factor and accordingly adjusts the historical loss rates based on expected changes in this factor.

As at 31 December 2022, trade receivables of Rp1,388,265 (2021: Rp1,224,643) were impaired and had been provided for with an amount of Rp103,492 (2021: Rp93,335).

As at 31 December 2022, contract assets of Rp1,280,749 (2021: Rp855,479) were impaired and had been provided for with an amount of Rp3,544 (2021: Rp2,159).

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/80 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas kas Grup terutama berasal dari kebutuhan untuk melakukan pembayaran biaya operasional kapal dan pelunasan atas pinjaman bank jangka panjang. Sumber dana pembayaran berasal dari kontrak sewa kapal jangka pendek, menengah dan panjang dan pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman bank jangka panjang.

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual dalam kontrak:

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 years</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 years</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 years</u>	<u>Jumlah/Total</u>
31 Desember 2022					
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	909,546	-	-	-	909,546
- Pihak ketiga	117,952	-	-	-	117,952
Biaya yang masih harus dibayar	1,627,080	-	-	-	1,627,080
Utang dividen	64	-	-	-	64
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	20,136	-	-	-	20,136
- Pihak ketiga	87,084	-	-	-	87,084
Liabilitas sewa	362,828	83,529	-	-	446,357
Pinjaman jangka panjang	264,816	333,894	215,434	249,846	1,063,990
Jumlah	3,389,506	417,423	215,434	249,846	4,272,209

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the cash flow position of the Group indicate that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Group's liquidity requirements mainly come from payments and repayments of long-term borrowings vessel operation costs. The source of funds to fulfil the repayment of long-term bank loans is from contractual rental with third parties in the short, medium and long-term and funds obtained from long-term bank loans.

The Group evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintain its payables and receivables days' stability.

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments:

31 December 2022
Financial liabilities
Trade payables
Related parties -
Third parties -
Accrued expenses
Dividend payables
Contract liabilities
Related parties -
Third parties -
Lease liabilities
Long-term borrowings
Total

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 years</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 years</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 years</u>	<u>Jumlah/Total</u>
31 Desember 2021					
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	639,972	-	-	-	639,972
- Pihak ketiga	230,515	-	-	-	230,515
Biaya yang masih harus dibayar	1,466,319	-	-	-	1,466,319
Utang dividen	9,937	-	-	-	9,937
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	53,814	-	-	-	53,814
- Pihak ketiga	87,639	-	-	-	87,639
Liabilitas sewa	225,166	48,815	-	-	273,981
Pinjaman jangka panjang	236,777	233,553	317,012	450,042	1,237,384
Jumlah	2,950,139	282,368	317,012	450,042	3,999,561

31 December 2021
Financial liabilities
Trade payables
Related parties -
Third parties -
Accrued expenses
Dividend payables
Contract liabilities
Related parties -
Third parties -
Lease liabilities
Long-term borrowings
Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/81 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan diharapkan akan dapat direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Perusahaan menganalisis aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Hirarki nilai wajar Grup pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Company's current financial assets and liabilities are expected to be realised or settled in the near term, except for financial assets which are measured at fair value. Therefore, their carrying amounts approximate their fair value.

The Company analyses its financial assets which are measured at fair value. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the assets or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable input) (Level 3).*

The Group's fair value hierarchy as of 31 December 2022 is as follows:

		2022		
		Harga pasar yang dikuotasi untuk aset dan liabilitas yang sama (Tingkat 1)/ <i>Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)</i>	Input yang signifikan dan dapat diobservasi secara langsung (Tingkat 2)/ <i>Significant and observable inputs, direct or indirectly (Level 2)</i>	Input yang signifikan tetapi tidak dapat diobservasi (Tingkat 3)/ <i>Significant unobservable inputs (Level 3)</i>
	Jumlah/Total			
Penyertaan saham/ <i>Investments in shares</i>	6,661	-	-	6,661
Jumlah/Total	6,661	-	-	6,661

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/82 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp3.734.678 (2021: Rp3.312.568) sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, serta mengklasifikasikan penyertaan saham sebesar Rp6.661 (2021: Rp5.999) sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, kontrak liabilitas, utang dividen, liabilitas sewa, pinjaman jangka panjang sebesar Rp4.153.066 (2021: Rp3.999.561) sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya amortisasi.

29. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2022, the Group classified its cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, contract assets and finance lease receivables amounting to Rp3,734,678 (2021: Rp3,312,568) as loans and receivables, and classified its investment in shares amounting to Rp6,661 (2021: Rp5,999) as financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

As at 31 December 2022, the Group classified its trade payables, accrued expenses, contract liabilities, dividend payables, lease liabilities, long-term borrowings amounting to Rp4,153,066 (2021: Rp3,999,561) as financial liabilities measured at amortised cost.

30. INFORMASI TAMBAHAN KAS

Transaksi non-kas

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Perolehan aset tetap melalui peningkatan biaya masih harus dibayar	(81)	(216,655)
Perolehan aset hak guna melalui sewa	(437,024)	(221,616)
Perolehan aset tetap melalui peningkatan utang usaha	(25,483)	-
Perolehan aset tetap melalui penerbitan saham	(121,709)	(412,437)
Perolehan aset lain-lain melalui penerbitan saham	(6,893)	-
Perolehan aset hak-guna melalui biaya dibayar dimuka	-	1,550
Perolehan aset tetap melalui penerimaan atas denda keterlambatan penyerahan kapal	-	10,408
Dividen dideklarasikan yang belum dibayarkan	64	9,937
Penurunan piutang usaha akibat dekonsolidasi	-	(9,786)
Penurunan aset kontrak akibat dekonsolidasi	-	(24,888)
Penurunan pajak dibayar dimuka akibat dekonsolidasi	-	(153)
Penurunan utang pajak akibat dekonsolidasi	-	217

30. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION

Non-cash transactions

Acquisition of fixed assets through increase in accrued expenses

Acquisition of right of use assets through lease liabilities

Acquisition of fixed assets through increase in trade payables

Acquisition of fixed assets through issuance of shares

Acquisition of other assets through issuance of shares

Acquisition of right-of-use assets through prepaid expenses

Acquisition of fixed assets through settlement from penalty from delivery of vessels

Dividend declared which have not been paid

Decrease in trade receivables as a result of deconsolidation

Decrease in contract assets as a result of deconsolidation

Decrease in prepaid taxes as a result of deconsolidation

Decrease in tax payables as a result of deconsolidation

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/83 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. INFORMASI TAMBAHAN KAS (lanjutan)

**30. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION
(continued)**

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Reconciliation of liabilities from financing activities

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2022 dan 2021 as follows:

	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	Pinjaman bank jangka panjang/ Long-term bank loan	Jumlah/ Total	
1 Januari 2021	60,917	1,248,814	1,309,731	1 January 2021
Arus kas masuk	-	461,875	461,875	Cash inflows
Arus kas keluar	(8,149)	(476,998)	(485,147)	Cash outflows
Penambahan liabilitas sewa	221,616	-	221,616	Addition of lease liabilities
Efek perubahan lainnya	(403)	3,693	3,290	Other adjustment effect
31 Desember 2021	273,981	1,237,384	1,511,365	31 December 2021
Arus kas masuk	-	452,399	452,399	Cash inflows
Arus kas keluar	(274,620)	(744,038)	(1,018,658)	Cash outflows
Penambahan liabilitas sewa	437,024	-	437,024	Addition of lease liabilities
Efek perubahan lainnya	-	9,074	9,074	Other adjustment effect
31 Desember 2022	436,385	954,819	1,391,204	31 December 2022

31. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ANTARA ENTITAS SEPENGENDALI

31. RESTRUCTURING TRANSACTION BETWEEN ENTITIES UNDER COMMON CONTROL

Grup sebelumnya memiliki 99,9% saham di PET. Informasi keuangan komparatif Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mencakup hasil keuangan PET sebagai berikut:

The Group previously owned a 99.9% interest in PET. The Group's comparative financial information for the year ended 31 December 2021 includes the following financial results of PET:

	31 Desember/ December 2021	
Aset lancar	44,314	Current assets
Aset tidak lancar	47,037	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	(10,343)	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	(3,615)	Non-current liabilities
Aset bersih yang dikonsolidasikan	77,393	Net assets consolidated
	2021	
Pendapatan	63,038	Revenue
Beban	(52,560)	Expenses
Penghasilan komprehensif lainnya	525	Other comprehensive income
Penghasilan komprehensif yang dikonsolidasikan	11,003	Total comprehensive income being consolidated

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/84 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**31. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI
ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)**

**31. RESTRUCTURING TRANSACTION BETWEEN
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)**

Grup sebelumnya memiliki 99,9% saham di PET. Informasi keuangan komparatif Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mencakup hasil keuangan PET sebagai berikut: (lanjutan)

The Group previously owned a 99.9% interest in PET. The Group's comparative financial information for the year ended 31 December 2021 includes the following financial results of PET: (continued)

	<u>2021</u>	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(1,770)	Net cash flows used in operating activities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(6,542)	Net cash flows used in investing activities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pembiayaan	<u>(481)</u>	Net cash flows used in financing activities
Kontribusi penurunan kas bersih	<u>(8,793)</u>	Net cash decrease contributed

Pada tanggal 27 Agustus 2021 Pertamina, PIS dan PET menyelesaikan proses restrukturisasi terhadap PET yang menyebabkan Perusahaan kehilangan pengendalian atas PET kepada PIS. Dengan demikian, efektif sejak tanggal 27 Agustus 2021 Perusahaan tidak melakukan konsolidasi atas PET.

On 27 August 2021 Pertamina, PIS and PET completed a restructuring transaction resulting in the Company losing control of PET to PIS. As a result, the Company no longer consolidated the financial results of PET effective 27 August 2021.

Selain kehilangan kendali, Perusahaan juga tidak memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut meskipun tetap memiliki 0,017% kepemilikan di PET. Dimana pengendalian telah hilang dan pengaruh signifikan tidak dipertahankan, kepentingan yang tersisa dicatat sesuai dengan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang diukur pada FVOCI.

In addition to the loss of control, the Company also doesn't retain significant influence over that entity despite continues to own a 0.017% interest in PET. Where control has been lost and significant influence is not retained, the remaining interest is accounted for in accordance with SFAS 71 "Financial Instrument" which is classified as equity instrument measured at FVOCI.

Pengendalian atas PET berpindah kepada PIS, induk perusahaan, sehingga transaksi tersebut dicatat sesuai dengan prinsip PSAK 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara nilai buku bersih dari penyertaan yang ditahan dengan nilai historis kepemilikannya sebesar Rp79.051 dicatat sebagai tambahan modal disetor di ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat dalam laba rugi sebagai akibat dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali ini sesuai dengan prinsip PSAK 38.

Control over PET was transferred to PIS, consequently the transaction was accounted for in accordance with the principles of SFAS 38 "Business Combination of Entities under Common Control". The difference between the net book value of its retained investment with the historical cost of its ownership in PET amounting to Rp79,051 was recorded as an additional paid-in capital in equity. No gain or loss was recorded in profit or loss as a result of this restructuring transaction between entities under common control in accordance with the principles of SFAS 38.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/85 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**31. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI
ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)**

**31. RESTRUCTURING TRANSACTION BETWEEN
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)**

Nilai tercatat aset dan liabilitas yang dihentikan pengakuannya sehubungan dengan dekonsolidasi entitas anak adalah sebagai berikut:

The carrying amounts of the assets and liabilities which were derecognised in connection with the deconsolidation of the subsidiary is as follows:

	27 Agustus/ August 2021	
Aset lancar	48,384	Current assets
Aset tidak lancar	48,418	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	(6,355)	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	(9,705)	Non-current liabilities
Aset bersih yang dilepas	80,742	Net assets deconsolidated
Dikurangi dengan:		Less:
Nilai buku aset bersih yang dimiliki	(1,691)	Net book value of retained interest
Tambahan modal disetor	79,051	Additional paid-in-capital

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2021 masih mencakup hasil usaha anak perusahaan terdahulu sampai dengan hilangnya pengendalian pada tanggal 27 Agustus 2021. Perseroan mengkonsolidasikan laba bersih dari usaha PET sebesar Rp3.036 selama 1 Januari 2021 - 27 Agustus 2021.

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year 2021 still includes the results of operations of the former subsidiary up to the day the control was lost on 27 August 2021. The Company consolidated a net profit from PET's operations amounted to Rp3,036 during 1 January 2021 – 27 August 2021.

**1 Januari/January 2021
- 27 Agustus/August 2021**

Pendapatan	40,363	Revenue
Beban	(32,830)	Expenses
Penghasilan komprehensif lainnya	(4,497)	Other comprehensive income
Penghasilan komprehensif lainnya bersih yang dikonsolidasikan	3,036	Net comprehensive income consolidated

Laporan arus kas konsolidasian tahun 2021 menyajikan saldo berikut berkaitan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali:

The consolidated statements of cash flows for the year 2021 disclose the following amounts related to restructuring transactions between entities under common control:

	2021	
Pembayaran bersih dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali	(11,531)	Net cash outflows from restructuring transactions between entities under common control



Sailing Beyond Border for **Sustainable Competitive Advantages**

**MELAJU MENEMBUS BATAS,
MEWUJUDKAN KEUNGGULAN BERKELANJUTAN**



PT Pertamina Trans Kontinental

KANTOR PUSAT | HEAD OFFICE:

Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450

Tlp. : (+6221) 31923005

Fax. : (+6221) 3106804

Email : pusat.ptk@pertamina.com



pertamina-ptk.com